BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. SOPPENG TAHUN 2022



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 31 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008–2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun

2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 119);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 125);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 139).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD yang mengacu pada RKP, RKPD Provinsi yang memuat evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk periode 1 (satu) tahun, yakni tahun 2022 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
7. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
8. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan 1 (satu) atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengarahan sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang, modal termasuk jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
10. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah Forum antar pelaku dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1) RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2022 sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026.
(2) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
    a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja SKPD Tahun 2022.
    b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2022.

(3) Dalam hal terjadi penambahan sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dan Ketua DPRD.
(4) Penambahan sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan/atau perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.
(5) Penambahan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disesuaikan dan/atau ditampung dalam RKPD Perubahan.

Pasal 3

RKPD sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati ini merupakan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum SKPD, Musrenbang Kabupaten, sinkronisasi Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional serta evaluasi hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD serta mempertimbangkan sinergisitas antar sektor dan antar wilayah.

Pasal 4

(1) Sistimatika Dokumen RKPD Tahun 2022 terdiri :

BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VII PENUTUP
LAMPIRAN

(2) Dokumen RKPD Tahun 2022 sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Dalam rangka Penyusunan APBD Tahun 2022 Pemerintah Daerah menggunakan dokumen RKPD Tahun 2022 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2022.
(2) Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan Rencana Kerja SKPD Tahun 2022 dalam melakukan pembahasan rencana kerja dan anggaran SKPD dengan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Soppeng.

Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan sinkronisasi antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dengan RKPD Tahun 2022.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 30 Juni 2021

BUPATI SOPPENG,

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 30 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOPPENG,

A.TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2021 NOMOR 31

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN..... I-1

1.1. Latar Belakang..... I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan..... I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen..... I-6
1.4. Maksud dan Tujuan..... I-8
1.5. Sistematika Perubahan RKPD..... I-8

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH..... II-1

2.1. Kondisi Umum Daerah..... II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi..... II-1
2.1.1.1. Karateristik Lokasi dan Wilayah..... II-1
2.1.1.2. Potensi Pembangunan Wilayah..... II-4
2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana..... II-7
2.1.1.4. Aspek Demografi..... II-7
2.1.1.5. Potensi Sumber Daya untuk dikembangkan..... II-10
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat..... II-20
2.1.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi..... II-20
2.1.2.2. Kesejahteraan Sosial..... II-44
2.1.2.3. Seni, Budaya dan Olahraga..... II-53
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum..... II-54
2.1.3.1. Pelayanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar..... II-54
2.1.3.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar..... II-100
2.1.3.3. Pelayanan Urusan Pilihan..... II-164
2.1.3.4. Urusan Penunjang Urusan..... II-174
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah..... II-189
2.1.4.1. Nilai Tukar Petani..... II-189
2.1.4.2. Persetanse Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa..... II-190
2.1.4.3. Rasio Ketergantungan..... II-191
2.1.5. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2020 191
2.1.6. Standar Pelayanan Minimal (SPM)..... II-230
2.1.6.1. Bidang Pendidikan..... II-230
2.1.6.2. Bidang Kesehatan..... II-232
2.1.6.3. Bidang Pekerjaan Umum..... II-238
2.1.6.4. Bidang Perumahan Rakyat..... II-239
2.1.6.5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat..... II-240
2.1.6.6. Bidang Sosial..... II-242
2.1.7. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ TPB / SDGs..... II-246
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2021 dan Realisai RPJMD..... II-262
2.2.1. Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD..... II-262
2.2.2. Evaluasi pelaksanaan RKPD sampai Tahun 2021..... II-270
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah..... II-355
2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah..... II-355
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah II-360
2.3.2.1. Urusan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar..... II-360
2.3.2.2. Urusan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar..... II-364
2.3.2.3. Urusan Pilihan..... II-366
2.3.2.4. Fungsi Penunjang urusan..... II-367

2.4. Isu Strategis II-368
1) Identifikasi Isu Strategis dari Level Global..... II-368
2) Identifikasi Isu Strategis dari Level Nasional II-370
3) Identifikasi Isu Strategis Provinsi II-370
4) Identifikasi Isu Strategis dari Masalah Pembangunan Daerah II-370
2.5. Inovasi Daerah II-371
1. E-LaJURKEL (Laporan Jurnal Kelas berbasis Barkode) II-371
2. Gerakan Digitalisasi Layanan Desa (Gadis Desa)..... II-374
3. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian "Database Dalam Genggaman" II-378

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1
3.1.1. Kondisi Pembangunan Ekonomi Kab. Soppeng Tahun 2020 .... III-2
3.1.1.1. Pertumbuhan PDRB..... III-2
3.1.2. Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah..... III-20
3.1.3. Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah..... III-21
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... III-24
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-25
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah..... III-28
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah..... III-34

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-2
4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional IV-2
4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan IV-4
4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2022 ..... IV-6
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022..... IV-16
4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 ..... IV-16
4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 IV-18
4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2022..... IV-20
4.2.4. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2022 ..... IV-27
4.2.5. Program Prioritas Pembangunan Tahun 2022..... IV-28

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN V-1

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VI-2
6.1. Penetapan Indikator Kinerja Makro VI-2
6.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) VI-2
6.3. Indikator Kinerja Daerah..... VI-3
6.4. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)..... VI-22
6.5. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) VI-24

BAB VII PENUTUP VI-1
7.1 Kaidah Pelaksanaan VII-1
7.2 Kesimpulan VII-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Luas Area , Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kepadatan penduduk berdasarkan kecamatan Kabupaten Soppeng Tahun 2020 ..... II-9
Tabel 2. 2. Jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Soppeng Tahun 2020 ..... II-9
Tabel 2. 3. Potensi Wisata Alam di Kabupaten Soppeng II-12
Tabel 2. 4. Potensi Wisata Sejarah dan Budaya di Kabupaten Soppeng ... II-13
Tabel 2. 5. Potensi Wisata Buatan dan Minat Khusus di Kabupaten Soppeng II-15
Tabel 2. 6. Kriteria Penggunaan Lahan Untuk Setiap Kemampuan Lahan II-17
Tabel 2. 7. Kelas Kemampuan Lahan di Kabupaten Soppeng Tahun 2020 II-18
Tabel 2. 8. Ketersediaan dan Kebutuhan Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Soppeng Tahun 2020 ..... II-19
Tabel 2. 9. Daya Dukung Ketersediaan Pangan di Kabupaten Soppeng Tahun 2019 19
Tabel 2.10. Produk Domestik Regional Bruto Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2016–2020 ..... II-20
Tabel 2.11. Produk Domestik Regional Bruto Soppeng Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2016–2020 ..... II-21
Tabel 2.12. Distribusi PDRB Tahunan Kabupaten Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Persen) II-23
Tabel 2. 13. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng, Menurut Lapangan usaha Kabupaten Soppeng Tahun 2016 - 2020 ..... II-26
Tabel 2. 14.Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kabupaten Soppeng Tahun 2020 ..... II-33
Tabel 2. 15.Penguatan cadangan pangan Tahun 2016-2020 ..... II-36
Tabel 2.16. Kontribusi PDRB Pertanian khusus Palawija terhadap PDRB Sektor Pertanian Tahun 2016-2020 ..... II-37
Tabel 2.17. Kontribusi PDRB Sektor Pertanian Tahun 2016-2020 ..... II-37
Tabel 2.18. Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB Sektor Pertanian Tahun 2016-2020 ..... II-38
Tabel 2.19. Gambaran Produksi Hasil Pertanian Tahun 2016-2020 ..... II-38
Tabel 2.20. Gambaran Produksi Hasil Perkebunan Tahun 2016-2020 ..... II-39
Tabel 2.21. Kontribusi Produksi Kelompok Tani Tahun 2016-2020 ..... II-40
Tabel 2.22. Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata Tahun 2016-2020 ..... II-40
Tabel 2.23. Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Tahun 2016-2020 ..... II-41
Tabel 2.24.Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Tahun 2016-2020 ..... II-42
Tabel 2.25.Pertumbuhan Industri Tahun 2016-2020 ..... II-43
Tabel 2.26. Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020 ..... II-49
Tabel 2.27.Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020 50
Tabel 2.28.Cakupan Desa Siaga Aktif di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020 ..... II-50
Tabel 2.29. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2016-2020 ..... II-52
Tabel 2.30. Jumlah Grup Kesenian Per 10.000 Penduduk Tahun 2016-2020 II-53
Tabel 2. 31.Capaian Perkembangan Olahraga di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020 ..... II-53
Tabel 2.32. Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2016-2020 ..... II-54
Tabel 2. 33.Angka Partisipasi Kasar Tahun 2016-2020 ..... II-54
Tabel 2. 34. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Paket B Tahun 2016-2020 ..... II-55

Tabel 2. 35.Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Tahun 2016-2020 .....II-55
Tabel 2. 36.Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Tahun 2016-2020.....II-56
Tabel 2.37. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Tahun 2016-2020 .....II-56
Tabel 2.38. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B T ahun 2016-2020.....II-56
Tabel 2.39. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Tahun 2016-2020 .....II-57
Tabel 2. 40. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Tahun 2016-2020.....II-57
Tabel 2.41. Angka Kelulusan (AL) SD/MI Tahun 2016-2020 .....II-58
Tabel 2.42. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Tahun 2016-2020 .....II-58
Tabel 2.43. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Tahun 2016-2020.....II-59
Tabel 2.44. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Tahun 2016-2020.....II-59
Tabel 2.45. Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) Tahun 2016-2020 .....II-59
Tabel 2.46. Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik (Kelas) Tahun 2016-2020.....II-60
Tabel 2. 47. Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan Kondisi Bangunan Baik (Kelas) Tahun 2016-2020.....II-60
Tabel 2.48. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2016-2020.....II-61
Tabel 2.49. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2016-2020II-61
Tabel 2. 50. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Tahun 2016-2020II-61
Tabel 2. 51. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2016-2020.....II-62
Tabel 2.52. Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020.....II-63
Tabel 2.53. Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020.....II-63
Tabel 2.54. Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2016-2020..... 64
Tabel 2.55. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2016-2020.....II-64
Tabel 2.56. Rasio Posyandu per Satuan Balita Tahun 2016-2020 .....II-65
Tabel 2. 57.. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Tahun 2016-2020.....II-66
Tabel 2.58. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Tahun 2016-2020 II-66
Tabel 2. 59. Rasio Dokter per satuan Penduduk Tahun 2016-2020.....II-67
Tabel 2. 60. Rasio tenaga medis per satuan Penduduk Tahun 2016-2020 II-67
Tabel 2.61. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Tahun 2016-2020 .....II-68
Tabel 2.62. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2016-2020 .....II-68
Tabel 2.63. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2016-2020.....II-69
Tabel 2.64. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Tahun 2016-2020.....II-69
Tabel 2.65. Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) Tahun 2016-2020 .....II-70
Tabel 2.66. Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak Tahun 2016-2020.....II-70

Tabel 2.67. Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk Tahun 2016-2020 II-71
Tabel 2.68. Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani Tahun 2016-2020II-71
Tabel 2.69. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Tahun 2016-2020 ..... II-71
Tabel 2. 70.Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Tahun 2016-2020 ..... II-72
Tabel 2. 71.Tingkat kematian karena Tuberkulosis per 100.000 penduduk Tahun 2016-2020 ..... II-72
Tabel 2.72. Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Tahun 2016-2020 ..... II-73
Tabel 2.73. Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS Tahun 2016-2020 ..... II-73
Tabel 2.74. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Tahun 2016-2020 ..... II-74
Tabel 2.75. Penderita Diare yang ditangani di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020 ..... II-74
Tabel 2.76. Angka Kejadian Malaria di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020 ..... II-75
Tabel 2.77. Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat Tahun 2016-2020 ..... II-75
Tabel 2.78. Prevalensi HIV/AIDS (Persen) Dari Total Populasi Tahun 2016-2020 ..... II-76
Tabel 2.79. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Tahun 2016-2020 ..... II-77
Tabel 2.80. Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020 ..... II-77
Tabel 2.81. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Tahun 2016-2020 ..... II-78
Tabel 2.82. Cakupan pelayanan nifas di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020 ..... II-79
Tabel 2.83. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020 ..... II-79
Tabel 2.84. Cakupan pelayanan anak balita di Kabupaten Soppeng tahun 2016-2020 ..... II-80
Tabel 2.85. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 Bulan keluarga miskin di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020 ..... II-80
Tabel 2.86. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020 ..... II-81
Tabel 2.87. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Tahun 2016-2020 ..... II-81
Tabel 2.88. Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 jam Tahun 2016-2020 ..... II-82
Tabel 2.89. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Tahun 2016-2020 ..... II-83
Tabel 2.90. Rasio. Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Tahun 2016-2020 ..... II-83
Tabel 2.91. Persentase Kawasan Permukiman yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 ..... II-84
Tabel 2.92. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (>40KM/Jam) Tahun 2016-2020 ..... II-84
Tabel 2. 93. Jalan yang Memiliki Trotoar Dan Drainase / Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M) Tahun 2016-2020 ..... II-84
Tabel 2. 94. Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2016-2020 ..... II-85
Tabel 2. 95. Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat Tahun 2016-2020 ..... II-85
Tabel 2. 96. Tidak Terjadi Genangan >2 Kali Setahun Tahun 2016-2020 . II-86
Tabel 2. 97. Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Tahun 2016-2020 ..... II-86
Tabel 2.98. Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2016-2020 ..... II-87

Tabel 2.99. Penduduk berakses air minum Tahun 2016-2020 ..... II-87
Tabel 2.100. Proporsi Rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan Tahun 2016-2020 ..... II-87
Tabel 2. 101. Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah Di Perkotaan Tahun 2016-2020..... II-88
Tabel 2. 102. Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Tahun 2016-2020..... II-88
Tabel 2. 103. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk Tahun 2016-2020 II-89
Tabel 2. 104. Luas RTH Public Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan Tahun 2016-2020 ..... II-89
Tabel 2. 105. Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2016-2020 ..... II-89
Tabel 2. 106. Rumah Layak Huni Tahun 2016-2020..... II-90
Tabel 2. 107. Pemukiman Layak Huni Tahun 2016-2020..... II-90
Tabel 2. 108. Ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2016-2020 ..... II-90
Tabel 2. 109. Layanan rumah layak huni yang terjangkau Tahun 2016-2020II-91
Tabel 2. 110. Pemukiman yang Tertata Tahun 2016-2020 ..... II-91
Tabel 2. 111. Lingkungan Pemukiman Kumuh Tahun 2016-2020..... II-91
Tabel 2.112. Rumah tangga kumuh perkotaan Tahun 2016-2020 ..... II-91
Tabel 2.113. Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU Tahun 2016-2020..... II-92
Tabel 2. 114. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Tahun 2016-2020II-92
Tabel 2. 115. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Tahun 2016-2020 ..... II-93
Tabel 2.116. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020..... II-94
Tabel 2. 117.Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Tahun 2016-2020 ..... II-94
Tabel 2. 118. Penegakan PERDA Tahun 2016-2020 ..... II-95
Tabel 2. 119. Persentase PMKS yang Tertangani Tahun 2016-2020 ..... II-96
Tabel 2. 120. Persentase PMKS Skala Kab. Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Tahun 2016-2020 ..... II-97
Tabel 2. 121. Persentase Panti Sosial Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi jenis lainnya Tahun 2016-2020 ..... II-97
Tabel 2.122. Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan sarana prasarana pelayanan Kesehatan sosial tahun 2016-2020 ..... II-98
Tabel 2.123. Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2016-2020..... II-98
Tabel 2.124. Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat II-98
Tabel 2.125. Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang telah Menerima Jaminan Sosial Tahun 2016-2020 . II-99
Tabel 2.126. Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan Tahun 2016-2020..... II-100
Tabel 2.127. Keselamatan dan Perlindungan Tahun 2016-2020..... II-100
Tabel 2.128. Besaran Pekerja/ Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Tahun 2016-2020 ..... II-101
Tabel 2.129. Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Tahun 2016-2020 ..... II-101
Tabel 2.130. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2016-2020..... II-102

Tabel 2.131. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR Tahun 2016-2020..... 103
Tabel 2. 132. Partisipasi perempuan di lembaga swasta Tahun 2016-2020 ..II-103
Tabel 2. 133. Rasio KDRT Tahun 2016-2020 ..... II-104
Tabel 2.134. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2016-2020 . II-104
Tabel 2.135. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Didalam Unit Pelayanan Terpadu Tahun 2016-2020 ..... II-105
Tabel 2.136. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Tahun 2016-2020..... II-105
Tabel 2.137. Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Tahun 2016-2020 ..... II-107
Tabel 2.138. Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Tahun 2016-2020 ..... II-107
Tabel 2.139. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum II-108
Tabel 2. 140. Layanan Pemulangan Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2016-2020..... II-108
Tabel 2. 141. Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan II-109
Tabel 2. 142. Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD Tahun 2016-2020 II-109
Tabel 2. 143. Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP Tahun 2016-2020II-110
Tabel 2. 144. Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMA Tahun 2016-2020II-110
Tabel 2. 145. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di Perguruan Tinggi Tahun 2016-2020..... II-111
Tabel 2. 146. Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun 2016-2020..... II-111
Tabel 2. 147. Kontribusi Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan Di Sektor Nonpertanian Tahun 2016-2020..... II-111
Tabel 2. 148. Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2016-2020 ..... II-112
Tabel 2. 149. Ketersediaan Energi dan Protein Tahun 2016-2020 ..... II-112
Tabel 2. 150. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Tahun 2016-2020..... II-113
Tabel 2.151. Persentase Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2016-2020 ..... II-114
Tabel 2. 152. Penyelesaian Kasus Tanah Negara Tahun 2016-2020 ..... II-114
Tabel 2. 153. Penyelesaiaan Izin Lokasi Tahun 2016-2020..... II-114
Tabel 2. 154. Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020 . II-115
Tabel 2. 155. Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi Tahun 2016-2020..... II-115
Tabel 2. 156. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air Tahun 2016-2020.. II-115
Tabel 2. 157. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara Tahun 2016-2020...II-116
Tabel 2. 158. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2 016-2020..... II-116
Tabel 2. 159. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin Pplh Dan Puu Lh Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020 ..... II-116
Tabel 2. 160. Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan masyarakat Tahun 2016-2020..... II-117

Tabel 2. 161. Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup Tahun 2016-2020 ..... II-117
Tabel 2. 162. Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020 ... II-118
Tabel 2. 163. Timbulan sampah yang ditangani Tahun 2016-2020 ..... II-118
Tabel 2. 164. jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R Tahun 2016-2020II-119
Tabel 2. 165. Cakupan area pelayanan Tahun 2016-2020 ..... II-119
Tabel 2. 166. jumlah sampah yang tertangani Tahun 2016-2020..... II-119
Tabel 2. 167. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020 ..... II-120
Tabel 2. 168. Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan tahun 2016-2020 ..... II-120
Tabel 2. 169. Pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan Tahun 2016-2020 ..... II-120
Tabel 2. 170. Penduduk Ber-KTP Per-Satuan Penduduk Tahun 2016-2020 .II-121
Tabel 2. 171. Rasio Bayi ber-Akte Kelahiran Tahun 2016-2020 Kabupaten Soppeng II-121
Tabel 2. 172. Rasio Pasangan Ber-Akte Nikah Tahun 2016-2020 Kabupaten Soppeng II-122
Tabel 2. 173. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tahun 2016-2020 Kabupaten Soppeng II-123
Tabel 2. 174. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2016-2020 Kabupaten Soppeng..... II-123
Tabel 2.175. Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik Tahun 2016-2020 ..... II-124
Tabel 2. 176. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pembinaan Masyarakat (LPM) Tahun 2016-2020 ..... II-125
Tabel 2.177. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Tahun 2016-2020II-125
Tabel 2.178. Persentase LPM Aktif Tahun 2016-2020 ..... II-125
Tabel 2. 179. Persentase LPM Berprestasi Tahun 2016-2020 ..... II-126
Tabel 2. 180. Persentase PKK Aktif Tahun 2016-2020..... II-126
Tabel 2. 181. Persentase Posyandu Aktif Tahun 2016-2020 ..... II-127
Tabel 2. 182. Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan Mayarakat Tahun 2016-2020 ..... II-127
Tabel 2. 183. Pemeliharaan Pasca program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2016-2020..... II-128
Tabel 2. 184. Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020..... II-129
Tabel 2. 185. Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020 ..... II-129
Tabel 2. 186. Persentase Perangkat Daerah yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB Tahun 2016-2020..... II-129
Tabel 2. 187. Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk Tahun 2016-2020II-130
Tabel 2. 188. Jumlah Sektor Yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Program Pembangunan Tahun 2016-2020..... II-131
Tabel 2. 189. Jumlah kerja sama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informasi yang melakukan pendidikan kependudukan Tahun 2016-2020..... II-132
Tabel 2.190. Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020..... II-132

Tabel 2.191. Rasio Akseptor KB di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020 ..II-133
Tabel 2.192. Angka Pemakaian Kontrasepsi/Cpr Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun 2016-2020 ..... II-133
Tabel 2.193. Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) Per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (Asfr 15-19) II-134
Tabel 2.194. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun Tahun 2016-2020 ..... II-134
Tabel 2.195. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) Tahun 2016-2020..... II-135
Tabel 2.196. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Tahun 2016-2020..... II-136
Tabel 2.197. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Tahun 2016-2020..... II-136
Tabel 2.198. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Tahun 2016-2020..... II-137
Tabel 2.199. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Tahun 2016-2020..... II-137
Tabel 2.200. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Tahun 2016-2020..... II-138
Tabel 2. 201. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan Tahun 2016-2020..... II-138
Tabel 2.202. Cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa Tahun 2016-2020 ..... II-138
Tabel 2. 203. Cakupan PKB dan PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah Kb Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Bidang Pengendalian Penduduk Tahun 2016-2020 ..... II-139
Tabel 2.204. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)..... II-140
Tabel 2.205. Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan Tahun 2016-2020 ..... II-141
Tabel 2. 206. Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Tahun 2016-2020 ..... II-141
Tabel 2. 207. Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerja sama dengan BPJS II-142
Tabel 2.208. Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa Tahun 2016-2020..... II-143
Tabel 2. 209. Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga..... II-143
Tabel 2.210. Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020..... II-143
Tabel 2.211. Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yang Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Tahun 2016-2020 ..... II-144
Tabel 2.212. Persentase pembiayaan program kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga..... II-144
Tabel 2. 213. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Tahun 2016-2020II-145
Tabel 2. 214. Rasio izin trayek Tahun 2016-2020 ..... II-146
Tabel 2. 215. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2016-2020..... II-146
Tabel 2. 216. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2016-2020 ..... II-146
Tabel 2. 217. Persentase Layanan Angkutan Darat Tahun 2016-2020 ... II-147
Tabel 2. 218. Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Tahun 2016-2020 ..... II-147
Tabel 2. 219. Pemasangan Rambu-rambu Tahun 2016-2020..... II-147

Tabel 2. 220. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan II-148
Tabel 2. 221.Cakupan Layanan Telekomunikasi Tahun 2016-2020 ..... II-148
Tabel 2. 222. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon Tahun 2016-2020 ..... II-148
Tabel 2. 223.Proporsi rumah tangga dengan akses internet Tahun 2016-2020 ..... II-149
Tabel 2. 224. Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi Tahun 2016-2020 ..... II-149
Tabel 2. 225. Persentase Koperasi Aktif Tahun 2016-2020 ..... II-150
Tabel 2. 226. Persentase UKM non BPR/LKM Aktif Tahun 2016-2020 ... II-151
Tabel 2. 227. Persentase BPR/LKM Aktif Tahun 2016-2020 ..... II-151
Tabel 2.228. Data Bank Prekreditan Rakyat (BPR) / Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Aktif di Kabupaten Soppeng II-152
Tabel 2.229. Persentase Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2016-2020 ..... II-153
Tabel 2.230. Jumlah Investor Berskala Nasional Tahun 2016-2020 ..... II-154
Tabel 2.231. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional Tahun 2016-2020II-154
Tabel 2.232. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah) Tahun 2016-2020 ..... II-155
Tabel 2.233. Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif 2016-2020 ..... II-155
Tabel 2.234. Cakupan Pembinaan Olahraga 2016-2020 ..... II-155
Tabel 2.235. Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat 2016-2020 ..... II-156
Tabel 2.236. Cakupan Pembinaan Atlet Muda 2016-2020 ..... II-156
Tabel 2.237. Jumlah Atelet Yang Berprestasi 2016-2020 ..... II-157
Tabel 2.238. Jumlah Prestasi Olahraga 2016-2020 ..... II-157
Tabel 2.239. Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi Tahun 2016-2020 ..... II-158
Tabel 2.240. Buku ”Kabupaten Dalam Angka” Tahun 2016-2020 ..... II-158
Tabel 2.241. Buku ”PDRB” Tahun 2016-2020 ..... II-158
Tabel 2.242. Rasio Jumlah pengunjung perpustakaan Kab Soppeng Tahun 2016 – 2020 ..... II-159
Tabel 2.243. Penyelenggaraan Festival, seni, budaya dan adat Tahun 2016 – 2020 159
Tabel 2.244. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Tahun 2016 – 2020 ..... II-160
Tabel 2.245. Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu Tahun 2016 – 2020 ..... II-161
Tabel 2.246. Rasio Jumlah pengunjung perpustakaan Kab Soppeng Tahun 2016 – 2020 ..... II-161
Tabel 2.247. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Kab Soppeng Tahun 2016 – 2020 ..... II-162
Tabel 2.248. Rasio perpustakaan per satuan penduduk Kab Soppeng Tahun 2016 - 2020 ..... II-162
Tabel 2.249. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan Kab Soppeng Tahun 2016 – 2020 ..... II-162
Tabel 2. 250. Jumlah koleksi judul buku perpustakaan Kab Soppeng Tahun 2016 – 2020 ..... II-163
Tabel 2. 251. Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat Tahun 2016 – 2020 ..... II-163
Tabel 2.252. Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku di Kab Soppeng Tahun 2016 – 2020 ..... II-163
Tabel 2. 253. Peningkatan SDM pengelola kearsipan Tahun 2016 – 2020II-164
Tabel 2. 254. Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2016-2020 ..... II-164
Tabel 2. 255. Rata-Rata Kunjungan Wisata Dalam Satu Tahun Tahun 2016-2020 ..... II-165
Tabel 2. 256. PAD Sektor Pariwisata Tahun 2016-2021 ..... II-165

Tabel 2. 257. Rincian Penerimaan Sektor Kepariwisataan Tahun 2016-2020II-166
Tabel 2. 258. Bina Kelompok Petani Tahun 2016-2020 ..... II-167
Tabel 2. 259. Ekspor Bersih Perdagangan Tahun 2016-2020 ..... II-168
Tabel 2. 260. Cakupan Bina Kelompok Pedagang Tahun 2016-2020 ..... II-169
Tabel 2. 261. Cakupan Bina Kelompok PengrajinTahun 2016-2020 ..... II-170
Tabel 2. 262. Produksi Perikanan Tahun 2016-2020 ..... II-171
Tabel 2. 263. Konsumsi Ikan Tahun 2016-2020 ..... II-172
Tabel 2. 264. Bina Kelompok Nelayan Tahun 2016-2020 ..... II-172
Tabel 2. 265. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Tahun 2016-2020 II-173
Tabel 2. 266. Proporsi Tangkapan Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis yang Aman Tahun 2016-2020 ..... II-173
Tabel 2. 267. Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial Tahun 2016-2020..... II-174
Tabel 2. 268. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Tahun 2016-2020 ..... II-174
Tabel 2. 269. Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Tahun 2016-2020 ..... II-175
Tabel 2. 270. Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Tahun 2016-2020 ..... II-175
Tabel 2. 271. Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Tahun 2016-2020..... II-176
Tabel 2. 272. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Tahun 2016-2020..... II-176
Tabel 2. 273. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Tahun 2016-2020..... II-177
Tabel 2. 274. Persentase SILPA Tahun 2016-2020 ..... II-178
Tabel 2. 275. Persentase SILPA terhadap APBD Tahun 2016-2020 ..... II-178
Tabel 2. 276. Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana Tzhun 2016-2020..... II-179
Tabel 2.277. Persentase belanja pendidikan (20%) Tahun 2016-2020 .... II-179
Tabel 2. 278. Persentase belanja kesehatan (10%) Tahun 2016-2020..... II-180
Tabel 2. 279. Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung Tahun 2016-2020..... II-181
Tabel 2.280. Bagi hasil kabupaten/kota dan desa Tahun 2016-2020.... II-181
Tabel 2. 281. Penetapan APBD Tahun 2016-2020..... II-182
Tabel 2. 282. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan Tahun 2016-2020..... II-183
Tabel 2. 283. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Tahun 2016-2020..... II-183
Tabel 2. 284. Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Tahun 2016-2020 ..... II-184
Tabel 2. 285. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Tahun 2016-2020..... II-184
Tabel 2. 286. Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Tahun 2016-2020..... II-184
Tabel 2. 287. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah Tahun 2016-2020 ..... II-185
Tabel 2. 288. Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Tahun 2016-2020 ..... II-185
Tabel 2. 289. Persentase tindak lanjut temuan Tahun 2016-2020 ..... II-186
Tabel 2. 290. Persentase Pelanggaran Pegawai Tahun 2016-2020 ..... II-187
Tabel 2. 291. Jumlah Temuan BPK Tahun 2016-2020..... II-187
Tabel 2.292. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/ Kota Tahun 2016-2020..... II-188

Tabel 2.293. Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) Tahun 2016-2020 ..... II-188
Tabel 2.294. Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda..... II-189
Tabel 2.295. Nilai Tukar Petani Tahun 2016-2020 ..... II-189
Tabel 2.296. Persentase Desa Berstatus Swasembada Tahun 2016-2020..... II-190
Tabel 2.297. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020..... II-193
Tabel 2.298. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2016-2020 ..... II-230
Tabel 2.299. Pendidikan Dasar Tahun 2016-2020 ..... II-231
Tabel 2.300. Pendidikan Kesetaraan Tahun 2016-2020 ..... II-232
Tabel 2. 301. Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan Tahun 2016-2020 ..... II-232
Tabel 2. 302.Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2016-2020 II-239
Tabel 2. 303. Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2016-2020 ..... II-239
Tabel 2. 304. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2020..... II-240
Tabel 2. 305. Bidang Sosial Tahun 2016-2020..... II-242
Tabel 2. 306 Hasil Analisis Capaian Kinerja SPM Tahun 2020 ..... II-243
Tabel 2. 307 Realisasi Capaian TPB yang dilaksanakan belum mencapai target..... II-246
Tabel 2. 308 Realisasi Capaian TPB yang belum dilaksanakan II-256
Tabel 2. 309 Evaluasi Realisasi Capaian RPJMD..... II-262
Tabel 2. 310 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Sampai Tahun 2021..... II-271

Tabel 3. 1. Produk Domestik Regional Bruto Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah), 2016—2020..... III-3
Tabel 3. 2Produk Domestik Regional Bruto Soppeng..... III-4
Tabel 3. 3. Distribusi PDRB Tahunan Kabupaten Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, ... III-5
Tabel 3. 4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng, Menurut Lapangan usaha Kabupaten Soppeng Tahun 2016 - 2020 ..... III-8
Tabel 3. 5. Produk Domestik Regional Bruto Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2016—2020 ..... III-14
Tabel 3. 6. Produk Domestik Regional Bruto Soppeng Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2016—2020..... III-15
Tabel 3. 7.. Distribusi PDRB Tahunan Kabupaten Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2016-2020 (Persen) III-16
Tabel 3. 8. Jumlah Pekerja berdasarkan Status Pekerjaan Tahun 2020 .. III-18
Tabel 3. 9. Target Indikator Makro Kab. Soppeng Tahun 2022 ..... III-25
Tabel 3. 10. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan daerah Kab. Soppeng Tahun 2019-2023..... III-28
Tabel 3. 11. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Soppeng,Tahun 2019-2022..... III-34
Tabel 3. 12. Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah III-36

Tabel 4. 1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Target Kinerja Tahun 2022..... IV-5
Tabel 4. 2. Penjelasan Visi Kepala Daerah Terpilh Kab. Soppeng..... IV-7
Tabel 4. 3. Penjelasan Misi Kepala Daerah Terpilih IV-8

Tabel 4. 4. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022 yang termuat Dalam RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2021-2026 .....IV-9
Tabel 4. 5. Arah Kebijakan RPJPD Kab. Soppeng Tahun 2005-2025 .....IV-11
Tabel 4. 6. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kab. Soppeng Tahun 2022IV-13
Tabel 4. 7. Keterkaitan antara Tujuan dan Pembangunan Tahun 2022 dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2021-2026 dan Sasaran Pokok RPJPD Kab. Soppeng Tahun 2005-2025.....IV-14
Tabel 4. 8 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2022.....IV-19
Tabel 4. 9. Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kab. Soppeng Tahun 2022.....IV-21
Tabel 4. 10. Keterkaitan Permasalahan Pembangunan daerah dan isu strategis dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kab. Soppeng Tahun 2022 IV-24
Tabel 4. 11. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kab. Soppeng Tahun 2022.....IV-27
Tabel 4. 12. Program Prioritas Kab. Soppeng Tahun 2022.....IV-28
Tabel 4. 13. Keterkaitan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi dan Prioritas Daerah Tahun 2022 .....IV-35
Tabel 5. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 .....V-2
Tabel 6. 1. Penetapan Indikator Makro Kab.Soppeng Tahun 2022.....VI-2
Tabel 6. 2. Indikator Kinerja Utama Kab. Soppeng Tahun 2022 .....VI-3
Tabel 6. 3. Indikator Kinerja Daerah Kab. Soppeng Tahun 2022 (Permendagri 86 tahun 2017).....VI-4
Tabel 6. 4. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kab. Soppeng Tahun 2021-2026 (Permendagri 18 Tahun 2020).....VI-16
Tabel 6. 5. Indikator SPM Kab. Soppeng Tahun 2022.....VI-22
Tabel 6. 6. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kab. Soppeng VI-24

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020 ..... II-8
Grafik 2.2. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2020 ..... II-24
Grafik 2.3. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng dan Wilayah sekitar Tahun 2016 - 2020 ..... II-25
Grafik 2. 4. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kab./ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 ..... II-25
Grafik 2. 5. Perbandingan Inflasi Kabupaten Soppeng dengan Inflasi Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 - 2020 ..... II-28
Grafik 2. 6. PDRB Per Kapita Kabupaten Soppeng Menurut Lapangan Usaha, 2016-2020 (Juta Rupiah) II-28
Grafik 2. 7. PDRB Per Kapita Kabupaten Soppeng dan Wilayah Sekitar Tahun 2016-2020 ..... II-29
Grafik 2. 8. Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Soppeng dengan Indeks Gini Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020 ..... II-29
Grafik 2. 9. Kondisi Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020. II-30
Grafik 2. 10. Perbandingan Kemiskinan Kabupaten Soppeng dengan Kabupaten / Kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 ..... II-31
Grafik 2. 11. Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020 ..... II-35
Grafik 2. 12. Nilai Akuntabilitas Daerah Kabupaten Soppeng II-35
Grafik 2. 13. Kontirbusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB II-41
Grafik 2. 14. IPM dan Komponen pembentuk IPM Kabupaten Soppeng, Tahun 2016 – 2020 ..... II-44
Grafik 2. 15. IPM Kabupaten Soppeng, Prov. Sul-Sel dan Nasional Tahun 2016 – 2020 ..... II-45
Grafik 2. 16. Indeks Pendidikan Tahun 2016 – 2020 ..... II-46
Grafik 2. 17. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Soppeng, Prov. Sul-Sel dan Nasional Tahun 2016 – 2020 ..... II-46
Grafik 2. 18. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Soppeng, Prov. Sul-Sel dan Nasional Tahun 2016 – 2020 ..... II-47
Grafik 2.19. Indeks kesehatan Tahun 2016 – 2020 ..... II-47
Grafik 2.20. Umur Harapan Hidup Kabupaten Soppeng, Prov. Sul-Sel dan Nasional Tahun 2016 – 2020 ..... II-48
Grafik 2. 21. Pengeluaran Perkapita Kabupaten Soppeng, Prov. Sul-Sel dan Nasional dan Daerah Sekitar Tahun 2016 – 2020 ..... II-49
Grafik 2. 22. Tingkat Partisipasi Kerja (TPAK) Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2020 ..... II-51
Grafik 2.23. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020 ..... II-51
Grafik 2.24. Rasio Penduduk Yang Bekerja Kabupaten Soppeng 2017-2019 ..... II-52
Grafik 2. 25. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2016-2020 ..... II-62
Grafik 2. 26. Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2016-2020 ..... II-64
Grafik 2. 27. Diagram Angka Kematian Ibu per 100,000 Kelahiran Hidup Tahun 2016-2020 ..... II-65
Grafik 2. 28. Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik II-82
Grafik 2. 29. Jumlah PMKS Yang Seharusnya Menerima Bantuan II-96
Grafik 2. 30. Usaha Mikro II-153
Grafik 2. 31. Sentra Usaha Industri II-170
Grafik 2. 32. Rasio Ketergantungan Kabupaten Soppeng II-191
Grafik 2. 33. Presentase Capaian Indikator TPB Kabupaten Soppeng II-261

Grafik 3. 1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng, ... III-6
Grafik 3. 2Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi III-7
Grafik 3. 3 ..... III-7
Grafik 3. 4 Perbandingan Inflasi Nasional, ... III-9
Grafik 3. 5PDRB Per Kapita Kabupaten Soppeng Menurut Lapangan Usaha, 2016-2020 (Juta Rupiah) III-10
Grafik 3. 6Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten III-10
Grafik 3. 7. Perbandingan Indeks Gini Nasional, ... III-11
Grafik 3. 8. Kondisi Kemiskinan Kabupaten Soppeng III-12
Grafik 3. 9Persentase Penduduk Miskin Kab./ Kota III-13
Grafik 3. 10Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja III-17
Grafik 3. 11 Tingkat Pengangguran Terbuka III-18
Grafik 3. 12 IPM dan Komponen pembentuk IPM Kabupaten Soppeng, ... III-19
Grafik 3. 13IPM Kabupaten Soppeng, Prov. Sul-Sel dan III-20
Grafik 3. 14 Korelasi Realisasi dan Proyeksi Indikator Makro Kab. Soppeng dengan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019-2022 ..... III-26
Grafik 3. 15 Korelasi Realisasi dan Proyeksi Indikator Makro Kab. Soppeng dengan Belanja Daerah Tahun 2019-2022 ..... III-29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. *Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan lain* I-7
Gambar 1.2. Alur Perencanaan dan Penganggaran.....I-7
Gambar 2. 1. Peta Administrasi Kabupaten Soppeng II-1
Gambar 2. 2. Peta Topografi Kabupaten Soppeng.....II-2
Gambar 2. 3. Peta Jenis Tanah Kabupaten.....II-3
Gambar 2. 4. Peta Tutupan Lahan Kabupaten Soppeng Tahun 2020.....II-4
Gambar 2. 5. Peta Rawan Banjir Kabupaten Soppeng.....II-7
Gambar 2. 6. Potensi Pertanian di Kabupaten Soppeng.....II-12
Gambar 4.1. Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kab. Soppeng Tahun 2022.....IV-21



BAB I
PENDAHULUAN

"Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik"

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Lampiran : Peraturan Bupati Soppeng
Nomor : 31 Tahun 2021
Tanggal : 30 Juni 2021
Tentang : Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi, dan politik sampai pada perkembangan adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan. Nilai dalam pembangunan adalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Pembangunan yang bermakna adalah yang memenuhi unsur kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dapat menumbuhkan kebanggaan sebagai manusia, dan dapat memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Kedudukan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2022 merupakan pelaksanaan tahun ketujuh belas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan merupakan pelaksanaan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 karena tahun 2021 masih merupakan bagian dari dokumen perencanaan periode 2016-2021. Bagi Perangkat Daerah (PD), RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dalam rangka mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA-PD) Tahun 2022.

Keterkaitan antara RKPD dengan dokumen RPJMD, RENSTRA-PD dan RENJA-PD terbangun secara logis dan fungsional yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memiliki kontribusi yang besar bagi pencapaian tujuan pembangunan. Hubungan antar dokumen perencanaan mulai dari RPJMD, RKPD, RENSTRA-PD dan RENJA-PD dengan dokumen anggaran adalah dokumen perencanaan bermuara pada penganggaran (RAPBD/APBD) yang melalui beberapa tahapan kebijakan keuangan yang perlu dirumuskan bersama baik antara pemerintah dan masyarakat maupun antara pemerintah dan legislatif yaitu Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang dimulai persiapan penyusunan, rancangan awal, rancangan, musrenbang, perumusan

rancangan akhir serta penetapan. Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses menggunakan pendekatan Teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik delakunan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Sementara pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten, Daerah provinsi, hingga nasional.

Pada orientasi substansi, penyusunan RKPD menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sementara pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Capaian kinerja ekonomi makro pada tahun 2020 menjadi dasar penentuan target-target prioritas pembangunan. Pertumbuhan ekonomi turun sampai pada angka 2,19 % sebagai akibat dari penyebaran Covid-19 yang sangat berdampak terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Tidak hanya itu, Covid-19 juga mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,42 %, Pandemi ini menyebabkan kegiatan ekonomi mengalami kemandekan sebagai akibat dari pembatasan sosial untuk menekan penyebaran virus. Beberapa Pengusaha terpaksa mengurangi jumlah pekerja dikarekan omset yang berkurang di masa pandemi. Angka kemiskinan pun pada akhirnya mengalami peningkatan dari 16.450 Jiwa di tahun 2019 hingga 17.230 jiwa di tahun 2020.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891)
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia

tahun 2018 Nomor 1540);

30. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 - 2023 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 280);
41. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
42. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
43. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302);

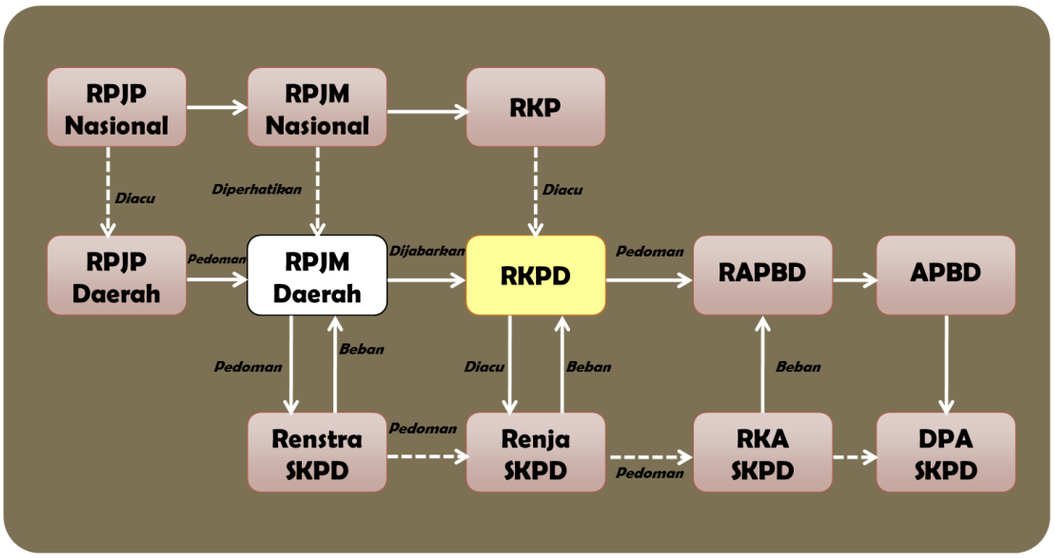
44. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314).
45. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 24).
46. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032 (lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 81);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng (lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 119);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 – 2026 ;

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2022 harus memperhatikan dokumen perencanaan baik ditingkat pusat (RKP Tahun 2022) maupun ditingkat provinsi (RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022). Hal tersebut dimaksudkan agar program dan kegiatan yang direncakan pada tahun 2022 sesuai dengan tujuan di tingkat provinsi maupun nasional dalam aspek sektoral maupun aspek kewilayahan.

Disamping itu, RKPD juga perlu mempertimbangkan RPJMD, agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sejalan dengan prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian, diharapkan dalam pelaksanaannya dapat berhasil guna dan tepat serta terarah dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten. Keterkaitan antara RKPD Kabupaten Soppeng dengan dokumen lainnya dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.

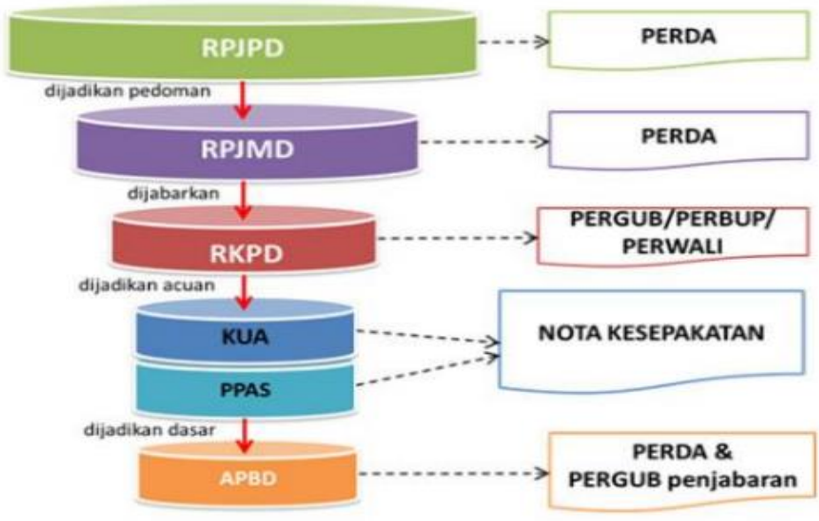
Gambar 1.1. Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan lain



Sumber : Undang-Undang No 25 Tahun 2004, Diolah

Dokumen perencanaan yang harus dimiliki oleh daerah terdiri dari RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Masing-masing dokumen merupakan hirarki yang saling berhubungan. RPJPD yang menjelaskan tentang visi, misi, arah dan sasaran pembangunan daerah selama 20 tahun yang kemudian dijabarkan dalam arah pembangunan tiap lima tahun dalam bentuk RPJMD. Selanjutnya RPJMD dijabarkan ke tahapan pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk satu tahun dalam bentuk RKPD sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan dapat terjaga dan berjalan dalam satu benang merah yang saling terkait. Selanjutnya, RKPD menjadi landasan bagi penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kab.Soppeng. Adapun alur perencanaan digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.2. Alur Perencanaan dan Penganggaran



Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017, diolah

Penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2022 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut:

a. Tujuan yang dikehendaki;
b. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;

c. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya;
e. SKPD yang mempunyai kewenangan dalam pelaksanaannya.

RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2022 merupakan pedoman dasar dalam penyusunan Rancangan APBD dengan mengacu RKP dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan serta akan menjadi bagian dari RPJMD 2021-2026 yang masih dalam proses penyusunan. Selain itu, konsistensi RKPD juga diperlukan dalam penyusunan kerangka pendanaan tahunan, dimana fungsinya sebagai arah serta pedoman dalam penyusunan Renja SKPD Tahun 2022 dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD;
2. Pedoman perumusan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah;
3. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan

Adapun tujuan penyusunan RKPD Tahun 2022 adalah sebagai:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan guna mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah;
2. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Soppeng yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2022;
3. Memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menentukan dan menetapkan program dan prioritas pembangunan Tahun 2022;
4. Sebagai instrument dalam melakukan evaluasi kinerja penyelengaraan pemerintahan daerah.
5. Untuk memberikan arah pembangunan tahunan Kabupaten Soppeng dan sinergitas program dan kegiatan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Soppeng maupun yang dilaksanakan bersama-sama masyarakat.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN yang terdiri dari ***Latar Belakang*** yang Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. ***Dasar Hukum Penyusunan*** yang memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. ***Hubungan Antar Dokumen*** dimana pada bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten

Soppeng, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan untuk penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng. ***Maksud dan Tujuan*** memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah. ***Sistematika Dokumen RKPD*** mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH yang terdiri dari ***Kondisi Umum Daerah*** yang memberikan gambaran kondisi umum daerah meliputi aspek geografi, demografi, potensi pembangunan wilayah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum. ***Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD*** yang mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan. Serta ***Permasalahan Pembangunan Daerah*** yang berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH yang terdiri dari ***Arah Kebijakan Ekonomi Daerah*** yang mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi/kabupaten. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. ***Arah Kebijakan Keuangan Daerah*** yang berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH yang terdiri dari ***Tujuan dan Sasaran Pembangunan*** yang menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD Kabupaten Soppeng. ***Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022*** yang merupakan Suatu prioritas pembangunan daerah tahun 2022 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana. SERTA Berisi Tema, Prioritas, Sasaran, Indikator sasaran dan interkoneksi diantaranya. Disajikan pula interkoneksi dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJMN.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH yang terdiri dari ***Rencana Program Prioritas*** yang memuat Rencana Program beserta besaran pagu dana yang akan dilaksanakan guna mendukung prioritas dan sasaran pembangunan pada Tahun 2021, rekapitulasi belanja tidak langsung dan usulan belanja langsung di setiap Perangkat Daerah. ***Telaahan Pokok-pokok***

Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang memuat saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD yang disesuaikan dengan program priotas pembanguna tahun 2021.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH yang memuat penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP



BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

"Pada bagian ini dijelaskan mengenai Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan "

2.1 KONDISI UMUM KONDISI DAERAH

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

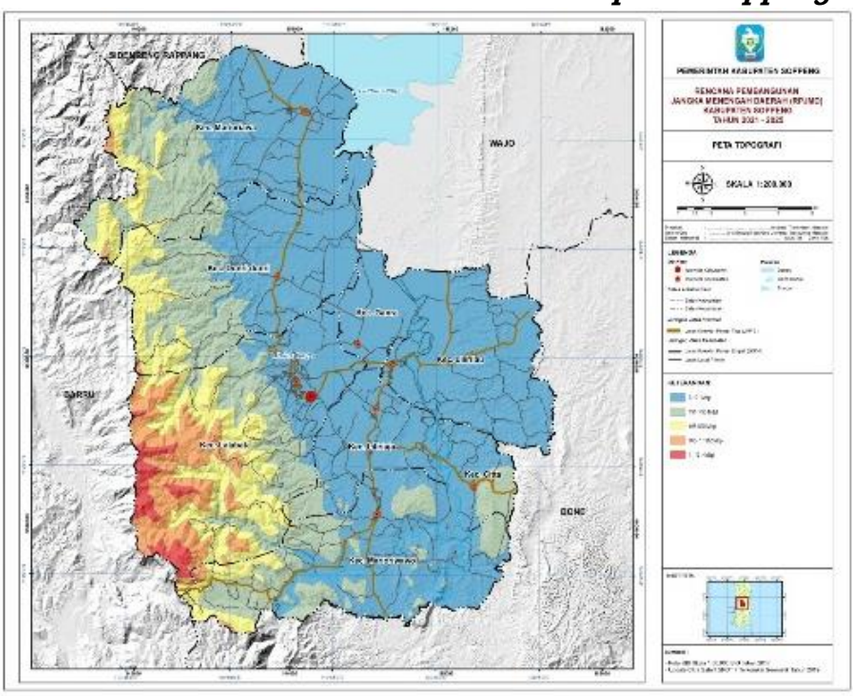
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Karateristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Soppeng merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak diantara 4° 06° 00° - 4° 32° 00° Lintang Selatan 119° 42° 18° - 120° 06° 13° Bujur Timur dan berada sekitar 180 km di sebelah utara Kota Makassar (Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan). Luas wilayah Kabupaten Soppeng tercatat 1.500 Km².

Secara administratif Kabupaten Soppeng terbagi atas 8 Kecamatan, 21 Kelurahan, 49 Desa, 39 Lingkungan, 124 Dusun, 438 Rukun Kampung, dan 1.163 Rukun Tetangga dengan Ibukota Kabupaten Soppeng yaitu Kota Watansoppeng.

Gambar 2. 1. Peta Administrasi Kabupaten Soppeng

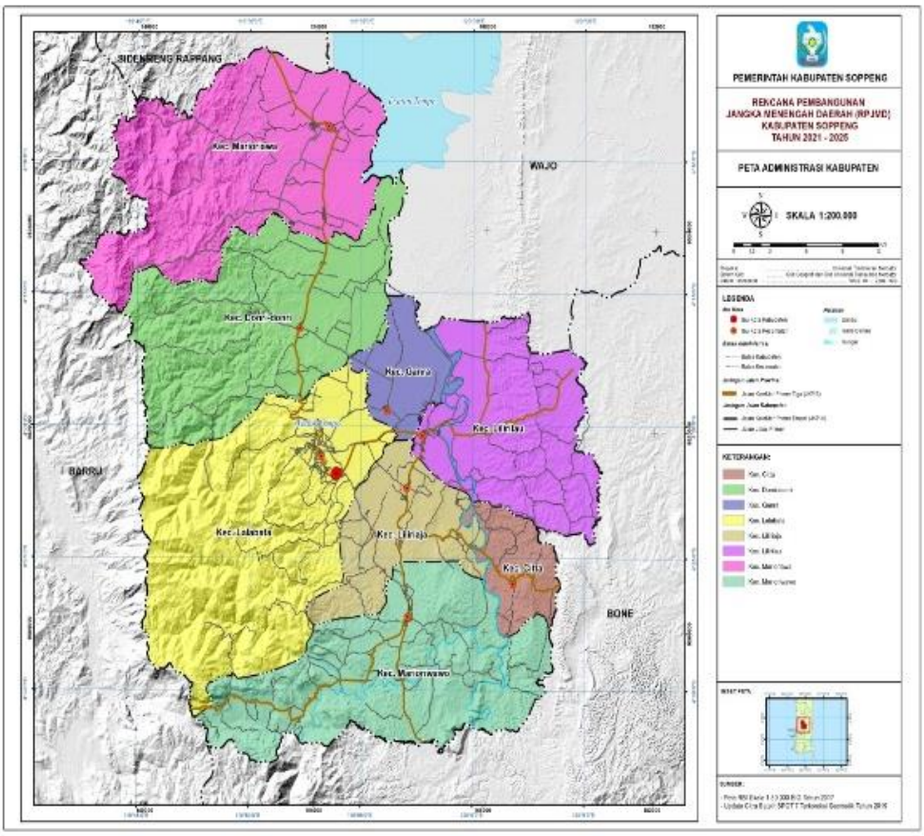


Sumber : RPJMD Kab. Soppeng 2021-2026

Adapun batas wilayah Kabupaten Soppeng terdiri dari:

- Sebelah Utara : Kabupaten Sidenreng Rappang dan Wajo,
- Sebelah Timur : Kabupaten Wajo dan Bone,
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bone
- Sebelah Barat : Kabupaten Barru

Gambar 2. 2. Peta Topografi Kabupaten Soppeng



Sumber : RPJMD Kab. Soppeng 2021-2025

Kabupaten Soppeng merupakan daerah daratan dan perbukitan, dengan luas daratan 700 Km² berada pada ketinggian rata-rata kurang lebih 60 M diatas permukaan laut dan perbukitan yang luasnya 800 Km² berada pada ketinggian rata-rata 200 M diatas permukaan laut. Berdasarkan klasifikasi menurut ketinggian diatas permukaan laut (DPL), wilayah Kabupaten Soppeng diklasifikasikan berdasarkan ketinggiannya sebagai berikut :

- Area ketinggian 0 - 25 meter DPL ;
- Area ketinggian 25 - 100 meter DPL;
- Area ketinggian 100 - 500 meter DPL;
- Area ketinggian 500 - 1.000 meter DPL;
- Area ketinggian >1.000 meter DPL;

Di Kabupaten Soppeng terdapat beberapa gunung dan gunung tertinggi adalah Gunung Nene Conang dengan ketinggian 1.463 m dpl. Seluruh gunung tersebut tidak menunjukkan ciri-ciri sebagai jenis gunung berapi. Ketinggian masing-masing gunung tersebut adalah sebagai berikut:

- Gunung Nene Conang + 1.463 m dpl
- Gunung Sewo + 860 m dpl
- Gunung Lapancu + 850 m dpl
- Gunung Bulu Dua + 800 m dpl
- Gunung Paowengeng + 760 m dpl

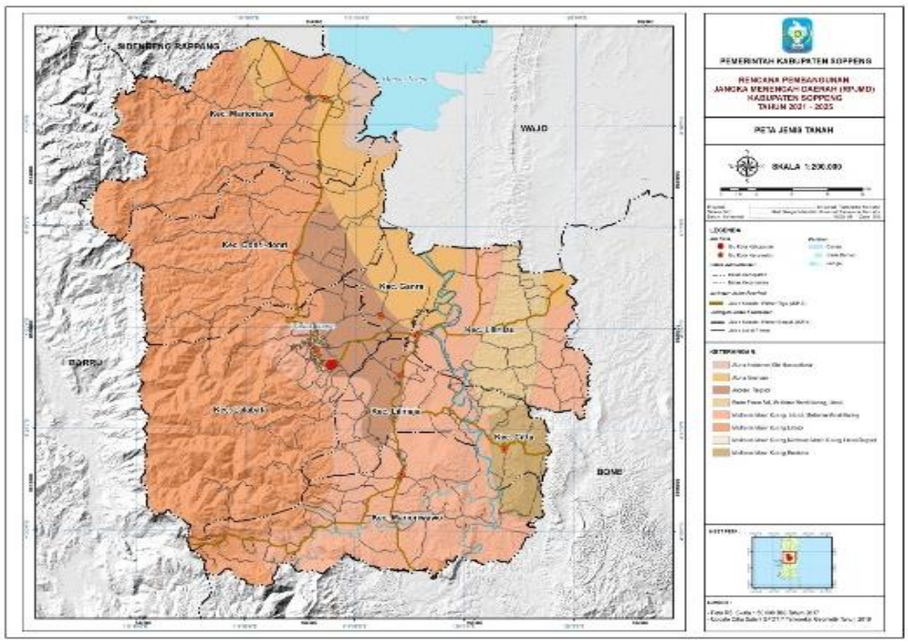
Puluhan sungai-sungai yang terletak di Kabupaten Soppeng yang cukup banyak berpotensi untuk mengairi tanah-tanah pertanian di sekitarnya. Sungai-sungai tersebut antara lain :

- Sungai Langkemme, berhulu di Gunung Lapancu bermuara di Sungai Walannae.
- Sungai Soppeng, berhulu di Gunung Matanre dan bermuara di Sungai Walannae.
- Sungai Lawo, berhulu di Gunung Lapancu dan bermuara di Danau Tempe.
- Sungai Paddangeng, berhulu di Gunung Malemping dan bermuara di Danau Tempe.
- Sungai Lajaroko, berhulu di Gunung Addeppungeng dan bermuara di Danau tempe.

Ditinjau dari kondisi jenis tanah, jenis-jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Soppeng antara lain Litosol, Gromusol, Mediteran Coklat, Regusol, Alluvial, Litosol Coklat Tua; dengan variasi penyebaran jenis tanah pada setiap kecamatan ; sebagai berikut :

- Kecamatan Marioriwawo: Litosol, Gromusol dan Mediteran Coklat;
- Kecamatan Liliriaja, Citta, Ganra: Gromusol/ Kelabu Tua, Mediteran Coklat dan Regusol;
- Kecamatan Lilirilau: Aluvial, Coklat Kelabuan, Gromusol/ Kelabu Tua Kekuning-kuningan
- Kecamatan Lalabata: Aluvial Hidromorf, Gromusol, Coklat Tua Rensina, Litosol, Mediteran Coklat, Regusol dan Litosol
- Kecamatan Marioriawa dan Kecamatan Donri-Donri: Aluvial Hidromorf Kelabu Tua, Mediteran Regusol dan Litosol.

Gambar 2. 3. Peta Jenis Tanah Kabupaten



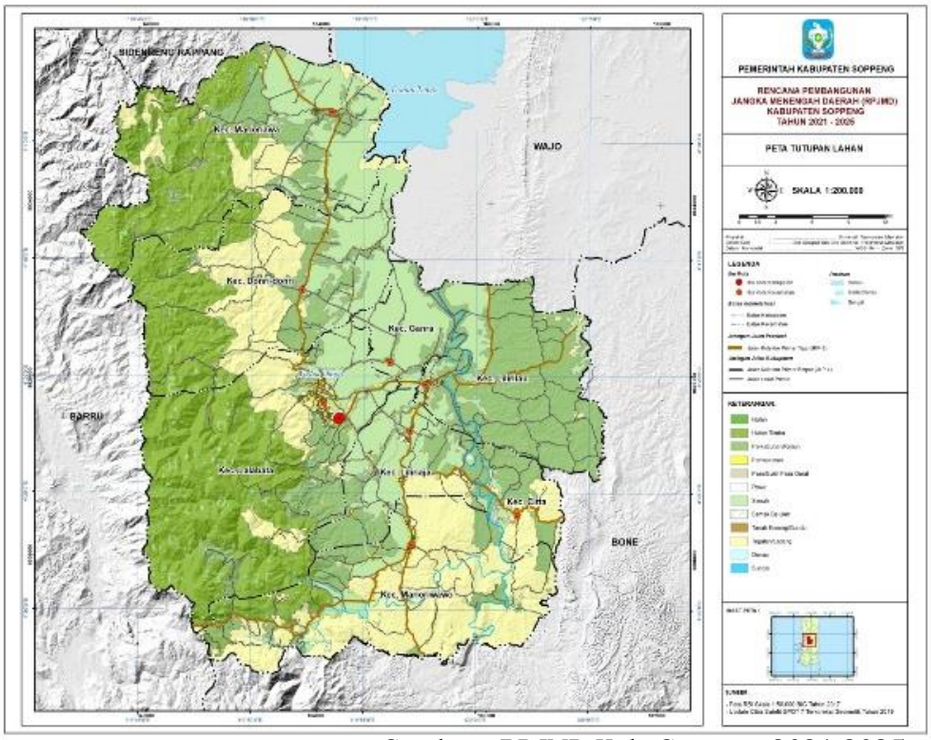
Sumber : RPJMD Kab. Soppeng 2021-2025

Temperatur udara di Kabupaten Soppeng berada pada kisaran ± 24° sampai dengan ± 30° dan keadaan angin berada pada kecepatan lemah sampai sedang. Berdasarkan data Badan Meteorologi dan Geofisika curah hujan rata-rata pada tahun 2012 sekitar 180 mm dan 15 hari hujan/bulan. Jumlah hari hujan tertinggi yaitu pada bulan Juli sebanyak 25 hari hujan, sedangkan terendah pada bulan Desember yaitu 5 hari hujan.

2.1.1.2. Potensi Pembangunan Wilayah

Kabupaten Soppeng memiliki potensi pengembangan wilayah cukup prospektif. Potensi ini dituangkan dalam kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Soppeng (RTRW Kabupaten Soppeng 2012-2032) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032.

Gambar 2. 4. Peta Tutupan Lahan Kabupaten Soppeng Tahun 2020



Sumber : RPJMD Kab. Soppeng 2021-2025

Arah pengembangan wilayah Kabupaten Soppeng sebagai berikut:

1. Kawasan peruntukan pertanian sebagai berikut:
   - ✓ Kawasan pertanian tanaman pangan seluas kurang lebih 48.437 ha yang terdapat tersebar di seluruh kecamatan;
   - ✓ Kawasan pertanian hortikultura seluas kurang lebih 21.549 ha yang terdapat Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-donri dan Kecamatan Lilirilau;
   - ✓ Kawasan perkebunan terdiri atas:
   - kawasan perkebunan kakao dan kelapa terdapat tersebar di seluruh kecamatan;
   - kawasan perkebunan kopi, terdapat di Kecamatan Lalabata, Marioriwawo, Marioriawa, dan Donri-donri;
   - kawasan perkebunan cengkeh, terdapat di Kecamatan Lalabata, Marioriawa dan Maarioriwawo;
   - kawasan perkebunan lada terdapat di Kecamatan Lilirilau, Citta, Marioriawa, Lalabata, Donri-donri dan Liliriaja;
   - kawasan perkebunan aren terdapat di Kecamatan Marioriawa, Lilirilau, Donri-donri, dan Citta;
   - kawasan perkebunan jambu mente terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Liliriaja, Lalabata, Donri-donri, dan Marioriawa;

- kawasan perkebunan kemiri terdapat di Kecamatan Lilirilau, Citta, dan Ganra;
- kawasan perkebunan tembakau terdapat di Kecamatan Donri-donri, Marioriawa dan Liliriaja;
- kawasan perkebunan kelapa sawit terdapat di Kecamatan Donri-donri, Lalabata, Liliriaja, Mariowawo, Marioriawa, dan Ganra; dan
- tanaman murbei tersebar di Kecamatan Marioriawa dan Donri-Donri.

2. Kawasan peruntukan perikanan sebagai berikut:
   - ✓ Kawasan peruntukan perikanan tangkap di Kecamatan Donri-donri;
   - ✓ Kawasan peruntukan budidaya perikanan di Kecamatan Liliriaja;
   - ✓ Kawasan pengolahan ikan ditetapkan dan dikembangkan diseluruh wilayah kecamatan;
   - ✓ Kawasan pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) ditetapkan akan dikembangkan di BBI Ompo Kecamatan Lalabata, BBI Lajoa Kecamatan Liliriaja dan BBI Citta Kecamatan Citta.
   - ✓ Kawasan Pengembangan Unit Perbenihan Rakyak (UPR) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau.
3. Kawasan peruntukan industri sebagai berikut:
   - ✓ Kawasan peruntukan industri sedang terdiri atas industri penggilingan padi tersebar di setiap kecamatan, industri pemintalan sutra alam di Kecamatan Donri-Donri dan industri tembakau di Kecamatan Lilirilau;
   - ✓ Peruntukan industri rumah tangga terdiri atas industri pembuatan gula merah tersebar di Kecamatan Lalabata, Marioriwawo, Citta, Lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa, industri pertenunan di Kecamatan Donri-Donri, Lilirilau, Marioriawa, Lalabata.
4. Kawasan peruntukan pariwisata sebagai berikut:
   - ✓ Peruntukan pariwisata budaya atau sejarah terdiri atas :
     - Villa Yuliana atau Museum Latemmamala, Kawasan Makam Kuno Jera Lompoe, Kompleks Istana Datu Soppeng, Makam Syekh Abdul Majid (Tuang Uddungeng), Makam Petta Bulu Matanre, Situs Megalitik Lawo, Tinco, Sewo dan Umpungeng, Makam Petta Seppang, Kompleks Makam Datu Soppeng, Makam Tuang Uddungeng, Gereja Khatolik Patung Bunda Maria, Rumah Tradisional Batu Laiya, Kompleks Makam Jera'Caddie, Menhir Latemmamala, di Kecamatan Lalabata;

- Makam Petta Sering, Situs Tomanurung Sanyili, Makam Petta Abbaraningnge, Makam Petta Balubue, Bulu Bottingnge, Appejenge di Kecamatan Donri-Donri;
- Makam Datu Mario, Makam Petta Jangko, Kompleks Sao Mario, Situs Tampaning, Makam Kuno Padali, Makam Petta Kajuara di Kecamatan Marioriawa;
- Makam Kuno Datu Lompulle, Kompleks Makam Pakka Saloe, Makam Petta Sara'e, Makam Sullewatang dan Petta Karame, di Kecamatan Ganra;
- Museum Calio, Situs Kecce, Marale, dan Situs Paroto, Kompleks Makam Datu Salaonro, Makam Arung Baringeng, Makam Abbanuange, Situs Megalitik Samoling, Situs Paleolitik Jampu di Kecamatan Lilirilau;
- Situs Talepu, Lonrong, Lenrang, Kompleks Makam Abbanuangnge, Kompleks Makam Datu Pattojo, Benteng Pattojo, Saoraja Seng, Gua Lakaroci di Kecamatan Liliriaja;
- Situs Paleolitik Lakibong, Makam Datu Citta di Kecamatan Citta;
- Makam Kalokoe Watu, Makan Lato Garimpang, Situs Goarie, Situs Megalitik Madenra, Sumur Tua Tettikenrarae, Makam Arung Sekkang, Rumah Arrajang di Kecamatan Marioriwawo.

✓ Peruntukan pariwisata alam berupa Taman Wisata Alam (TWA) meliputi TWA Lejja, TWA Danau Tempe (Kecamatan Marioriawa), TWA Citta (Kecamatan Citta), TWA Lereng Hijau Bulu Dua (Kecamatan Marioriwawo), Goa Coddong (Kecamatan Citta), Populasi Kelelawar di Pusat Kota Watansoppeng (Kecamatan Lalabata), dan Kawasan Pesutraan Alam (Kecamatan Donri-Donri).

✓ Peruntukan pariwisata buatan di Kawasan Wisata Ompo;

✓ Peruntukan wisata agro di Desa Mariorilau dan Desa Gattareng Kecamatan Marioriwawo.

5. Kawasan Strategis Kabupaten dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas:
   ✓ Kawasan strategis perkotaan dan pusat pemerintahan ditetapkan di Kecamatan Lalabata;
   ✓ Kawasan strategis simpul transportasi dan perdagangan ditetapkan di Kawasan Cabenge Kecamatan Lilirilau;
   ✓ Kawasan strategis pengembangan lahan pertanian dan kawasan agropolitan ditetapkan di Kecamatan Liliriaja, Marioriwawo, Ganra;
6. Kawasan Strategis Kabupaten dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas;
   ✓ Kawasan Danau Tempe di Kecamatan Marioriawa
   ✓ Kawasan wisata alam Lejja di Kecamatan Marioriawa; dan
   ✓ Kawasan hutan lindung yang meliputi Kecamatan Marioriawa, Lalabata, Liliriaja, Lilirilau, Donri-Donri, Citta.

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

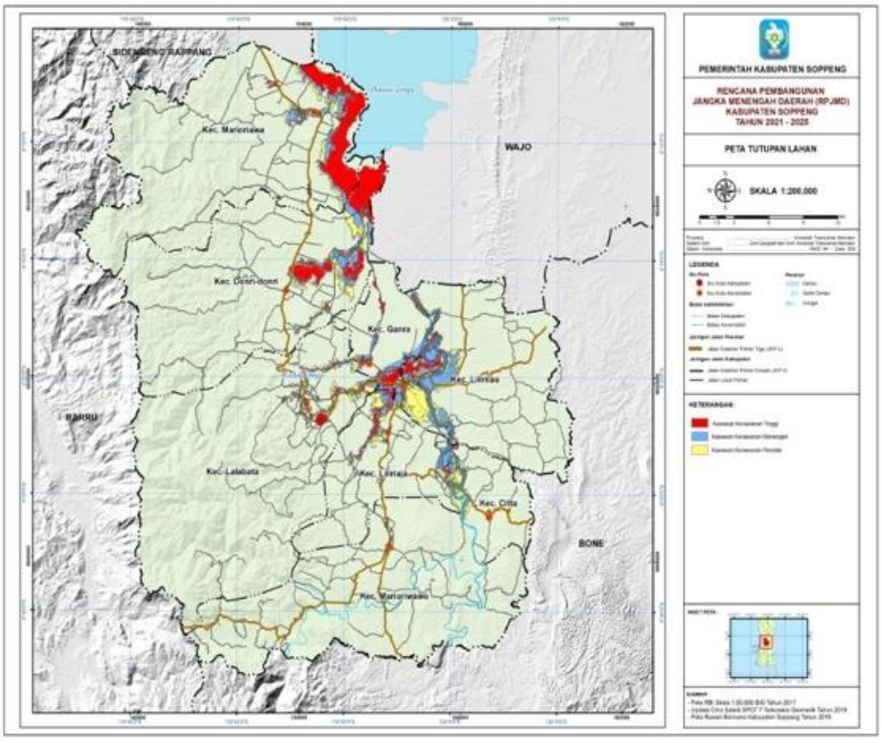
Dengan kondisi topografis Kabupaten Soppeng yang bergunung-gunung dan memiliki wilayah dataran rendah serta bentang wilayah yang luas selain memiliki potensi keindahan dan kesuburan juga memiliki potensi rawan bencana berupa banjir, longsor, dan puting beliung.

Wilayah rawan bencana di Kabupaten Soppeng, yaitu:

1. Kawasan rawan banjir terdapat di Daerah Aliran Sungai Walanae meliputi Kecamatan Lilirilau, Liliriaja, Donri-Donri, Marioriawa, Citta dan Ganra;
2. Kawasan rawan tanah longsor terdapat di di Desa Gattareng Kecamatan Marioriwawo, Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata, Desa Citta Kecamatan Citta;
3. Penetapan kawasan rawan bencana angin puting beliung terdapat di Desa Laringgi, Kelurahan Limpomajang, Kelurahan Kaca, Kelurahan Attang Salo, Kelurahan Batu-batu, dan Kelurahan Manorang Salo Kecamatan Marioriawa.

Penanganan daerah rawan bencana, memerlukan rekayasa perencanaan lintas sektor dalam penanganannya sehingga tidak menjadi bencana yang sifatnya rutin setiap tahun.

Gambar 2. 5. Peta Rawan Banjir Kabupaten Soppeng



Sumber : RPJMD Kab. Soppeng 2021-2025

2.1.1.4. Aspek Demografi

Aspek demografi suatu daerah menggambarkan secara statistik dan matematik tentang besar, komposisi dan distribusi penduduk dan serta perubahan-perubahannya dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan Penduduk merupakan orang-orang yang berada dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus menerus/ kontinyu. Dewasa ini perencanaan pembangunan baik nasional maupun regional, penduduk merupakan salah satu faktor

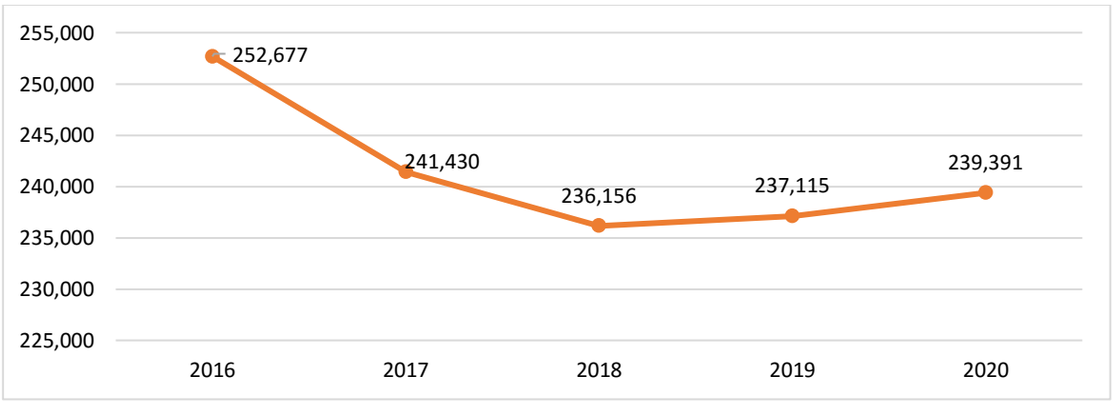
strategis dikarenakan penduduk bukan hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek pembangunan.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah diperlukan adanya analisis mengenai kondisi kependudukan yang bertujuan untuk mengetahui kuantitas dan kondisi penduduk, baik berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, bahkan kondisi sosio-ekonomi, mengetahui pertumbuhan masa lampau, masa sekarang, serta penurunannya dan penyebarannya dalam suatu wilayah pembangunan, mengembangkan hubungan sebab-akibat antara perkembangan penduduk dengan bermacam macam aspek pembangunan, mencoba memproyeksikan pertumbuhan penduduk dan kemungkinan-kemungkinan konsenkuensinya serta pengaruh terhadap pelaksaanaan pembangunan.

Keberhasilan suatu pembangunan sangat tergantung pada penduduknya, terlebih jika didukung oleh jumlah penduduk yang besar, berkualitas dan produktif yang dapat menjadi sumber potensi dalam pelaksanaan pembangunan. Akan tetapi, jumlah penduduk yang besar tidak dapat menjamin keberhasilan pembangunan jika tidak didukung oleh perencanaan program-program dan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas penduduknya. Berdasarkan hal tersebut tentunya sangat diperlukan data-data kependudukan yang akurat untuk mendukung setiap program peningkatan kualitas agar potensi penduduk dalam suatu wilayah dapat dimaksimalkan dengan baik dalam mendukung pembangunan.

Berdasarkan data KTP-El Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Kabupaten Soppeng pada tahun 2016 sebesar 252.677 jiwa, dan pada tahun 2017 turun menjadi 241.430 jiwa dan pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan sebesar 236.156 jiwa. Penurunan jumlah penduduk tersebut disamping disebabkan adanya mutasi penduduk juga karena adanya pembersihan data sehingga data penduduk ganda ataupun data penduduk yang telah meninggal dikeluarkan dari database kependudukan. Pada tahun 2019 jumlah penduduk sebesar 237.115 jiwa meningkat dibanding tahun 2018. Sementara itu pada tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Soppeng sebesar 239.391 jiwa meningkat dibanding tahun 2019. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa perbaikan data kependudukan terus dilakukan selam lima tahun terakhir, dan selama kurun waktu 2018-2020 data kependudukan di Kabupaten Soppeng sudah mulai akurat dimana sudah tidak terdapat lagi data penduduk ganda dan update data sudah terus dilakukan.

Grafik 2.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil, 2020

Jumlah Penduduk Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 sebesar 239.391 jiwa yang terbagi ke dalam 8 kecamatan akan di tampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 1. Luas Area , Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kepadatan penduduk berdasarkan kecamatan Kabupaten Soppeng Tahun 2020

KECAMATAN	LUAS AREA	PENDUDUK			KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
LALABATA	278	23.798	24.938	48.736	175
GANRA	57	5.535	6.120	11.655	204
CITTA	40	3.896	4.243	8.139	203
MARIORIWAWO	300	24.303	25.570	49.873	166
MARIORIAWA	320	14.185	14.997	29.182	91
DONRI-DONRI	222	11.693	12.755	24.448	110
LILIRIAJA	96	13.741	14.922	28.663	299
LILIRILAU	187	18.439	20.256	38.695	207
TOTAL	1500	115.590	123.801	239.391	182

Sumber: Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil, 2020

Potensi tenaga kerja dapat dicermati dari komposisi penduduk menurut umur karena umur seseorang sangat mempengaruhi kemampuan fisiknya sehingga akan menentukan produktivitasnya. Penduduk dengan usia yang sangat muda (umur 0-14 tahun) umumnya belum produktif karena selain kemampuan fisiknya yang masih kurang, juga karena mereka pada umumnya masih sekolah dan belum bekerja. Begitu pula penduduk yang berusia lanjut (umur 60 tahun ke atas), produktivitasnya sudah menurun dan bahkan sebagian dari mereka sudah tidak bekerja lagi. Bila di hitung jumlah penduduk pada kelompok usia produktif (15-59 tahun) pada tahun 2020 yaitu sebesar 152.313 jiwa maka dapat diketahui bahwa pada umumnya penduduk Kabupaten Soppeng masih dalam usia produktif. Jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 2. Jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Soppeng Tahun 2020

GOLONGAN UMUR	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
0 – 4	6.575	6.145	12.720
5 – 9	8.628	8.102	16.730
10 – 14	9.563	8.975	18.538
15 – 19	10.605	10.149	20.754
20 – 24	10.452	10.129	20.581
25 – 29	8.433	8.126	16.559
30 – 34	7.080	7.148	14.228
35 – 39	7.592	8.010	15.602
40 – 44	8.014	8.480	16.494
45 – 49	8.315	9.224	17.539

GOLONGAN UMUR	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
50 – 54	8.265	8.997	17.262
55 – 59	5.764	7.252	13.016
60 – 64	5.313	7.164	12.477
65 – 69	3.741	4.858	8.599
70 – 74	3.068	4.405	7.473
75+	4.182	6.637	10.819
JUMLAH	115.590	123.801	239.391

Sumber: Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, 2020

2.1.1.5. Potensi Sumber Daya untuk dikembangkan

2.1.1.5.1. Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Soppeng termuat dalam kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032. Selanjutnya diperlukan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada seluruh Kawasan Perkotaan yang terdapat di Kabupaten Soppeng sebagai penjabaran terhadap rencana umum tata ruang wilayah kabupaten ke dalam rencana rinci tata ruang kabupaten.

2.1.1.5.2. Kawasan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan yang termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032 terdiri atas kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan peruntukan budidaya perikanan dan kawasan pengembangan Balai Benih Ikan (BBI).

- Kawasan peruntukan perikanan tangkap ditetapkan pada wilayah sungai yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Citta, dan sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa.
- Kawasan peruntukan budidaya perikanan merupakan Kawasan budidaya perikanan air tawar yang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra,

sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau

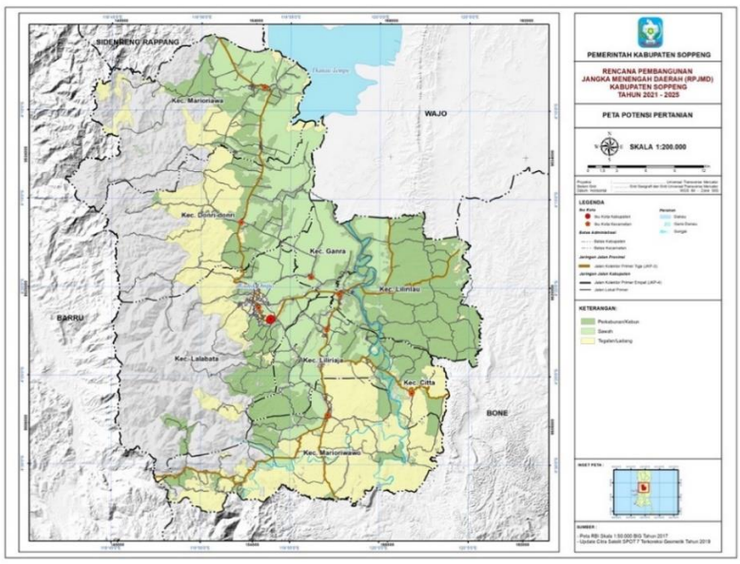
- Kawasan pengembangan balai benih ikan ditetapkan akan dikembangkan di BBI Ompo Kecamatan Lalabata, BBI Lajoa Kecamatan Liliriaja, dan BBI Citta Kecamatan Citta.

2.1.1.5.3. Kawasan Pertanian

Kawasan Pertanian yang termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032 terdiri atas:

- Kawasan pertanian tanaman pangan seluas kurang lebih 46.491 ha yang terdapat tersebar di seluruh kecamatan;
- Kawasan pertanian hortikultura seluas kurang lebih 21.549 ha yang terdapat tersebar di seluruh kecamatan;
- Kawasan perkebunan terdiri atas:
  - kawasan perkebunan kakao dan kelapa terdapat tersebar di seluruh kecamatan;
  - kawasan perkebunan kopi, terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Ganra, Citta, Lilirilau, Donri-Donri;
  - kawasan perkebunan cengkeh, terdapat di di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, dan Citta;
  - kawasan perkebunan lada terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Ganra, Citta, Lilirilau, Donri-Donri;
  - kawasan perkebunan aren terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Citta, Lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa;
  - kawasan perkebunan jambu mente terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Citta, Lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa;
  - kawasan perkebunan kemiri terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa, Citta;
  - kawasan perkebunan tembakau terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Ganra, Lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa;
  - kawasan perkebunan kelapa sawit terdapat di Kecamatan Marioriawa dan Donri-Donri; dan
  - tanaman murbei tersebar di Kecamatan Marioriawa dan Donri-Donri.

Gambar 2. 6. Potensi Pertanian di Kabupaten Soppeng



Sumber : RPJMD Kab. Soppeng 2021-2025

2.1.1.5.4. Kawasan Pariwisata

Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten (RIPPARKAB) Kabupaten Soppeng Tahun 2018-2033 terdapat beragam potensi wisata yang ada di Kabupaten Soppeng diantaranya permandian wisata alam, agro, situs sejarah dan budaya masyarakat tradisional termasuk kuliner tradisional, maupun *events* (peristiwa pariwisata).

2.1.1.5.4.1. Potensi Wisata Alam

Daya Tarik wisata alam merupakan salah satu daya tarik wisata yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan untuk berkunjung di Kabupaten Soppeng. Adapun rinciannya dapat diketahui melalui tabel berikut.

Tabel 2. 3. Potensi Wisata Alam di Kabupaten Soppeng

NO	NAMA DESTINASI	LOKASI
1	Kawasan TWA Lejja	Desa Babbae Kecamatan Marioriawa
2	Kawasan TWA Danau Tempe	Kelurahan Limpomajang Kec. Marioriawa
3	Kawasan TWA Citta	Desa Citta Kecamatan Citta
4	Kawasan TWA Goa Coddong	Desa Citta Kecamatan Citta
5	Kawasan TWA Lereng Hijau Bulu Dua	Desa Gattareng Kec.Marioriwawo
6	Kawasan Alam Adventure Park Gattareng Toa	Desa Gattareng Kec.Marioriwawo
7	Kawasan Populasi Kelelawar di Pusat Kota Watansoppeng	Botto Kecamatan Lalabata
8	Kawasan Pesutraan Alam	Kecamatan Donri-Donri
9	AppejengÉ	Desa Lalabata Riaja Kec, Donri-Donri
10	Kawasan Matabulu	Desa Matabulu Kec. Lalabata
11	Puncak Biccuing	Dusun Biccuing Kel. Botto Kec. Lalabata
12	Air Terjun Minawoe	Desa Bulue Kec. Marioriawa
13	Air Terjun Datae	Desa Bulue Kec. Marioriawa

Sumber: Laporan Akhir RIPPARKAB Kabupaten Soppeng 2018-2033

2.1.1.5.4.2. Potensi Wisata Sejarah dan Budaya

Selain potensi wisata alam, Kabupaten Soppeng juga memiliki potensi wisata sejarah dan Budaya yang tersebar di berbagai wilayah kabupaten Soppeng. Adapun rincian potensi wisata sejarah dan budaya yang ada di Kabupaten Soppeng dapat diketahui melalui tabel berikut.

Tabel 2. 4. Potensi Wisata Sejarah dan Budaya di Kabupaten Soppeng

NO	NAMA DESTINASI	LOKASI
1	Prosesi Perkawinan	Seluruh wilayah kabupaten Soppeng
2	Musik Tradisional	Seluruh wilayah kabupaten Soppeng
3	Tari Tradisional	Seluruh wilayah kabupaten Soppeng
4	Lagu daerah	Seluruh wilayah kabupaten Soppeng
5	Villa Yuliana (Bola MaccacaE)	Kecamatan Lalabata
6	Kawasan makam Kuno Jera LompoE	Kecamatan Lalabata
7	Kompleks Istana Datu Soppeng	Kecamatan Lalabata
8	Makam Syekh Abdul Majid (Tuang Uddunge)	Kelurahan Bila Kec. Lalabata
9	Makam Petta Bulu Matanre	Kec. Lalabata
10	Situs Megalitik Lawo	Kec. Lalabata
11	Situs Megalitik Tinco	Kec. Lalabata
12	Situs Megalitik Sewo	Kec. Lalabata
13	Situs Megalitik Umpungeng	Kec. Lalabata
13	Makam Petta Seppang	Kec. Lalabata
14	Kompleks Makam Datu Soppeng	Kec. Lalabata
15	Gereja Khatolik Patung Bunda Maria	Kec. Lalabata
16	Rumah Tradisional Batu Laiya	Kec. Lalabata
17	Kompleks makam Jera CaddiE	Kec. Lalabata
18	Menhir Latemmamala (LamumpatuE)	Kec. Lalabata
19	Situs Petta BanuangÉ	Kec. Lalabata
20	Situs Petta Wanua	Kec. Lalabata
21	Makam Lato Gappong	Kec. Lalabata
22	Makam Petta Awo	Kec. Lalabata
23	Menhir La Temma Pole	Kec. Lalabata
24	Makam Petta Sering	Kec, Donri-Donri
25	Situs Tomanurung Sanyili	Kec, Donri-Donri
26	Makam Petta AbbaraningngE	Kec, Donri-Donri
27	Makam Petta BalubuE	Kec, Donri-Donri
28	Bulu BottingngE	Kec, Donri-Donri
29	Makam Petta AddagangE	Kec, Donri-Donri
30	Makam Datu Mario	Kec. Marioriawa

NO	NAMA DESTINASI	LOKASI
31	Kompleks Makam Petta Jangko	Kec. Marioriawa
32	Kompleks Sao Mario	Kec. Marioriawa
33	Situs Tampaning	Kec. Marioriawa
34	Makam Kuno Padali	Kec. Marioriawa
35	Makam Petta Kajuara	Kec. Marioriawa
36	Makam Kuno Datu Lompulle	Kec. Ganra
37	Kompleks Makam Pakka SaloE	Kec. Ganra
38	Makam Petta Sara'E	Kec. Ganra
39	Makam Sullewatang Kebo dan Petta Karame	Kec. Ganra
40	Museum Calio	Kec. Lilirilau
41	Situs Kecce	Kec. Lilirilau
42	Situs Marale	Kec. Lilirilau
43	Situs Paroto	Kec. Lilirilau
44	Kompleks Makam Datu Salaonro	Kec. Lilirilau
45	Makam Arung Baringeng	Kec. Lilirilau
46	Makam AbbanuangE	Kec. Lilirilau
47	Situs Megalitik Samoling	Kec. Lilirilau
48	Situs Paleolitik Jampu	Kec. Lilirilau
49	Situs Talepu	Kec. Liliriaja
50	Situs Lonrong	Kec. Liliriaja
51	Situs Lenrang	Kec. Liliriaja
52	Kompleks Makam AbbanuangE	Kec. Liliriaja
53	Kompleks Makam Datu Pattojo	Kec. Liliriaja
54	Benteng Pattojo	Kec. Liliriaja
55	Saoraja Seng	Kec. Liliriaja
56	Gua Lakaroci	Kec. Liliriaja
57	Gua Coddong	Desa Citta Kec. Citta
58	Situs Paleolitik Lakibong	Kec. Citta
59	Makam Datu Citta	Kec. Citta
60	Makam KalokoE Watu	Kec. Marioriwawo
61	Makam Lato Garimpang	Kec. Marioriwawo
62	Situs GoariE	Kec. Marioriwawo
63	Situs Megalitik Madenra	Kec. Marioriwawo
64	Sumur Tua TettikenraraE	Kec. Marioriwawo
65	Makam Arung Sekkang	Kec. Marioriwawo
66	Rumah Arrajang	Kec. Marioriwawo

Sumber: Laporan Akhir RIPPARKAB Kabupaten Soppeng 2018-2033

2.1.1.5.4.3. Potensi Wisata Buatan Manusia dan Minat Khusus

Selain potensi wisata alam, sejarah dan budaya, kabupaten Soppeng juga memiliki potensi daya tarik wisata buatan manusia yang cukup menarik minat wisatawan pada saat melakukan kunjungan ke kabupaten Soppeng. Potensi wisata buatan merupakan segala bentuk daya tarik yang

dibuat atau dibangun oleh manusia secara terencana sebagai sarana bagi wisatawan dalam melakukan aktivitas wisata. Adapun rincian potensi wisata buatan manusia (*Manmade*) dan minat khusus dapat diketahui melalui tabel berikut.

Tabel 2. 5. Potensi Wisata Buatan dan Minat Khusus di Kabupaten Soppeng

NO	NAMA DESTINASI	LOKASI
1	Kawasan wisata Ompo	Kec. Lalabata
2	Kawasan Wisata Agro	Desa Mariorilau Kec. Marioriwawo
3	Kawasan Wisata Agro	Desa Gattareng Kec. Marioriwawo
4	Kawasan TWA Lereng Hijau Bulu Dua	Desa Gattareng Kec.Marioriwawo
5	Kawasan Adventure Park Gattareng Toa	Desa Gattareng Kec.Marioriwawo
6	Kawasan Populasi Kelelawar (Taman Kalong)	Botto Kecamatan Lalabata

Sumber: Laporan Akhir RIPPARKAB Kabupaten Soppeng 2018-2033

2.1.1.5.5. Kawasan Pertambangan

Kawasan peruntukan wilayah pertambangan termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032 meliputi:

- Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara terdiri atas:
  - Wilayah usaha pertambangan komoditas mineral logam berupa emas dan tembaga ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa;
  - Wilayah usaha pertambangan komoditas mineral bukan logam berupa pasir kuarsa, batu gamping, fire clay, dan dolomite ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo;
  - Wilayah usaha pertambangan komoditas batuan berupa kerikil berpasir alami ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau;
  - wilayah usaha pertambangan komoditas batubara ditetapkan di Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo.
- Kawasan peruntukan wilayah pertambangan minyak dan gas bumi merupakan bagian dari kawasan pertambangan minyak dan gas bumi Blok Sengkang yang berada di wilayah Kabupaten Soppeng ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa;
- Kawasan peruntukan wilayah pertambangan panas bumi ditetapkan di Desa Bulue Kecamatan Marioriawa.

2.1.1.5.6. Kawasan Industri

Kawasan peruntukan industri yang termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032, meliputi:

- Kawasan peruntukan industri sedang terdiri atas:
  - Kawasan peruntukan industri penggilingan padi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau;
  - Kawasan peruntukan industri pemintalan sutera alam ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri;
  - Kawasan peruntukan industri pengolahan ikan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau;
  - Kawasan peruntukan industri pengolahan tembakau ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau.
- Kawasan peruntukan industri rumah tangga merupakan kawasan aglomerasi industri rumah tangga, terdiri atas:
  - Kawasan peruntukan industri pembuatan gula merah ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Donri-Donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau;
  - Kawasan peruntukan industri pertenunan sarung sutera ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lalabata.

2.1.1.5.7. Kawasan Perdangangan

Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032, meliputi:

- Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala regional ditetapkan di kawasan perdagangan Watansoppeng Kecamatan Lalabata dan kawasan perdagangan Cabenge Kecamatan Lilirilau;
- Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala kabupaten dan/atau kecamatan ditetapkan di kawasan perdagangan Takkalala Kecamatan Marioriwawo dan kawasan perdagangan Batu-Batu Kecamatan Marioriawa.

2.1.1.5.8. Potensi Energi Baru Terbaharukan (EBT)

Penggunaan energi di dunia akan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Guna memenuhi kebutuhan, tak cukup hanya dengan mengandalkan energi fosil. Diperlukan juga sistematis untuk mengembangkan potensi energi baru dan terbarukan. Berdasarkan hasil kajian sumberdaya alam dan energi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Soppeng, terdapat potensi energi yang terdapat di Kabupaten Soppeng yaitu:

1. Batubara

   Potensi batubara di Kabupaten Soppeng dapat ditemukan, dimana terdapat Singkapan batubara di Desa Gattareng Toa Kecamatan Marioriwawo, berdasarkan luas dan penyebarannya perhitungan yang sifatnya sumber daya tereka sekitar 2,65 juta ton.

2. Geothermal

   Potensi Panas Bumi di Kabupaten Soppeng dijumpai di Desa Bulue Kecamatan Marioriawa dengan temperatur manifestasi panas bumi di permukaan cukup tinggi berkisar 39^{o} C dan Desa Watu Toa Kecamatan Marioriwawo dengan temperatur berkisar 37^{o} C.

3. Hidrologi

   Pemanfaatan air yang berpotensi digunakan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro dijumpai di beberapa lokasi, antara lain

   - Potensi PLTM Sungai Langkemme di Desa Watu Kecamatan Marioriwawo dengan kapasitas bangkitan 3 MW.
   - Potensi PLTM Sungai Lawo di Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata dengan kapasitas bangkitan 1.5 MW.
   - Potensi PLTM Sungai Salau di Desa Sering Kecamatan Donri-donri dengan kapasitas bangkitan 1.5 MW.

2.1.1.5.9. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

2.1.1.5.9.1. Kemampuan Lahan

Kemampuan lahan adalah penilaian lahan secara sistematis berdasarkan atas sifat-sifat yang merupakan potensi dan penghambat dalam penggunaannya secara lestari. Kelas kemampuan lahan terbagi atas VIII kelas. Dari kelas I s.d. IV dapat digunakan untuk pertanian, sedangkan dari kelas V s.d. VII untuk padang rumput, kelas VIII sebaiknya secara alami sebagai hutan lindung. Masing-masing kelas dibagi lagi menjadi subkelas yaitu subkelas erosi, subkelas genangan air, subkelas solum (penghambat perakaran) dan subkelas iklim. Subkelas dapat diuraikan lagi menjadi beberapa unit. Adapun kriteria penggunaan lahan yang diperkenankan pada setiap kelas kemampuan lahan diperlihatkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 6. Kriteria Penggunaan Lahan Untuk Setiap Kemampuan Lahan

No.	Kemampuan Lahan	Penggunaan Lahan yang diperkenankan
1	I	Semua jenis penggunaan lahan
2	II	Semua jenis penggunaan lahan kecuali Psi
3	III	Semua jenis penggunaan lahan kecuali Psi dan Pi (hanya Psd)
4	IV	Pt, semua jenis pengembalaan, semua jenis hutan
5	V	Semua jenis pengembalaan (Pgi, Pgsd, Pgt), semua jenis hutan
6	VI	Pgsd, Pgt, semua jenis hutan
7	VII	Pgt, hutan.
8	VIII	Cagar alam dan hutan lindung

Sumber: Klingbiel dan Montgomery (1961) dan Fenton (2014)
Keterangan: Psi: Pertanian sangat intensif; Pi: Pertanian intensif;
Psd: Pertanian intensif sedang; Pt: Pertanian terbatas;
Pgi: pengembalaan intensif; Pgsd: pengembalaan sedang;
Pgt: Pengembalaan terbatas

Berdasarkan hal tersebut kemampuan lahan di Kabupaten Soppeng, diketahui bahwa kelas kemampuan lahan VI yang paling mendominasi di Kabupaten Soppeng yakni sebesar 36.58% dari luasan Kabupaten Soppeng, diikuti kelas lahan IV sebesar 31.54 %, kelas lahan V 12.04%, kelas lahan III 9.39%, kelas lahan I 4.78%, kelas lahan VII 4.09%, kelas lahan VIII 1,28% dan yang terakhir kelas lahan II 0.33%. Hasil ini menunjukkan bahwa umumnya lahan di Kabupaten Soppeng hanya mampu untuk penggunaan pengembalaan sedang, pengembalaan terbatas dan semua jenis hutan, serta sedikit yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian intensif. Selain itu, data di atas juga menunjukkan kecamatan pengembangan sektor pertanian yang didukung oleh potensi lahan terdapat pada Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lilirilau, dan Kecamatan Marioriwawo.

Tabel 2. 7. Kelas Kemampuan Lahan di Kabupaten Soppeng Tahun 2020

Kecamatan	Kelas Kemampuan Lahan (Ha)							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VII
Citta	-	-	523,44	1.490,21	661,93	-	496,25	351
Donri-donri	-	-	351,09	6.767,47	2.912,81	1,12505787	-	-
Ganra	-	-	-	4.866,24	-	-	-	-
Lalabata	-	-	334,79	4.587,60	1.592,43	1,233726852	-	27,6
Liliriaja	1.430	-	938,19	4.745,07	519,81	965,09	623,17	-
Lilirilau	3.956	0,71	6.964,82	4.601,52	503,93	-	-	-
Marioriawa	-	-	3.139,66	7.407,85	7.109,54	9.584,87	-	-
Marioriwawo	1.137	453,74	554,47	8.539,65	3.124,08	3.982,67	4.392,39	1.372
Total	6.523	454,44	12.806,46	43.005,61	16.424,54	49.889,02	5.511,80	1.751

Sumber: KLHS RPJMD Soppeng, 2020

Berdasarkan hal tersebut kemampuan lahan di Kabupaten Soppeng, diketahui bahwa kelas kemampuan lahan VI yang paling mendominasi di Kabupaten Soppeng yakni sebesar 36.58% dari luasan Kabupaten Soppeng, diikuti kelas lahan IV sebesar 31.54 %, kelas lahan V 12.04%, kelas lahan III 9.39%, kelas lahan I 4.78%, kelas lahan VII 4.09%, kelas lahan VIII 1,28% dan yang terakhir kelas lahan II 0.33%. Hasil ini menunjukkan bahwa umumnya lahan di Kabupaten Soppeng hanya mampu untuk penggunaan pengembalaan sedang, pengembalaan terbatas dan semua jenis hutan, serta sedikit yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian intensif. Selain itu, data di atas juga menunjukkan kecamatan pengembangan sektor pertanian yang didukung oleh potensi lahan terdapat pada Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lilirilau, dan Kecamatan Marioriwawo.

2.1.1.5.9.2. Daya Dukung Penyediaan Air Bersih

Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan berdasarkan tiga pendekatan, salah satunya dengan pendekatan perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air. Air merupakan salah satu unsur alam yang sangat dibutuhkan dalam keberlangsungan kehidupan makhluk hidup khususnya manusia. Selain digunakan untuk keperluan minum dan rumah tangga, air juga dimanfaatkan dalam aspek kehidupan lainnya yaitu untuk

pertanian, perkebunan, perumahan, industri, dan pariwisata. Status daya dukung lingkungan dengan pendekatan air menunjukkan suatu kondisi ketersediaan air wilayah dengan kebutuhan yang ada. Pengelolaan air yang kurang tepat menimbulkan dampak negatif terhadap ketersediaan air. Ketersediaan serta kebutuhan air di Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 8. Ketersediaan dan Kebutuhan Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Soppeng Tahun 2020

Kecamatan	Volume Air Tahun 2019 (m3/tahun)		Selisih
	Ketersediaan	Kebutuhan	
Citta	2.715.818,61	355.893,55	2.359.925,07
Donri-donri	20.065.611,15	1.038.601,03	19.027.010,12
Ganra	4.290.747,79	509.512,66	3.781.235,13
Lalabata	27.382.213,30	2.086.490,06	25.295.723,24
Liliriaja	7.121.624,67	1.257.077,81	5.864.546,86
Lilirilau	11.991.100,73	1.587.811,78	10.403.288,95
Marioriawa	27.824.802,60	1.276.368,80	26.548.433,80
Marioriwawo	19.418.287,64	2.092.043,33	17.326.244,31
Grand Total	120.810.206,50	10.203.799,01	110.606.407,49

Sumber: KLHS RPJMD Soppeng, 2020

Daya dukung penyediaan air menunjukkan ketersediaan air di Kabupaten Soppeng sebesar 120.810.206,50 m^3/tahun, sementara kebutuhan air sebesar 10.203.799,01 m^3/tahun, sehingga masih ada selisih sebesar 110.606.407,49 m^3/tahun, hal ini berarti ambang batas daya dukung penyediaan air belum terlampaui.

2.1.1.5.9.3. Daya Dukung Ketersediaan Pangan

Untuk pemenuhan akan ketersediaan pangan perlu memperhatikan ketersediaan lahan yang menjadi faktor untuk memproduksi pangan. Hal ini didukung oleh pernyataan Food and Agriculture Organization (1996) bahwa ketersediaan pangan menjadi salah satu faktor penentu ketahanan pangan agar tercukupinya kebutuhan dan keamanan akan pangan. Adapun permasalahan yang terjadi dalam penyediaan lahan untuk pangan adalah penurunan luas lahan akibat alih fungsi lahan ke non pertanian. Hal ini jika tidak diperhatikan dengan baik akan berakibat pada penurunan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan penduduk dan kegiatan ekonomi. Ketersediaan, kebutuhan dan selisih ketersediaan dan kebutuhan pangan tahun 2019 dapat pada tabel berikut.

Tabel 2. 9. Daya Dukung Ketersediaan Pangan di Kabupaten Soppeng Tahun 2019

Kecamatan	Status Pangan Tahun 2019 (kkal/tahun)		
	Ketersediaan	Kebutuhan	Selisih
Citta	24.758.041.867,34	6.464.987.523,90	18.293.054.343,44
Donri-donri	163.330.533.449,78	18.866.716.668,47	144.463.816.781,30
Ganra	39.213.179.301,11	9.255.556.921,10	29.957.622.380,01
Lalabata	200.434.798.210,73	37.902.154.507,36	162.532.643.703,38

Kecamatan	Status Pangan Tahun 2019 (kkal/tahun)		
	Ketersediaan	Kebutuhan	Selisih
Liliriaja	66.071.187.252,22	22.835.458.573,24	43.235.728.678,98
Lilirilau	119.301.059.687,79	28.843.409.500,95	90.457.650.186,83
Marioriawa	219.608.860.426,71	23.185.889.284,22	196.422.971.142,49
Marioriwawo	160.532.398.364,17	38.003.032.468,06	122.529.365.896,09
Grand Total	993.250.058.559,83	185.357.205.447,30	807.892.853.112,52

Sumber: KLHS RPJMD Soppeng, 2020

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1. Pertumbuhan *Ekonomi*

2.1.2.1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator utama dalam mengukur perekonomian daerah adalah penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dimana PDRB merupakan jumlah keseluruhan dari nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan berdasarkan semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam kurun waktu satu tahun.

Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Analisis ekonomi daerah harus mampu menggambarkan dengan jelas kinerja PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk perhitungannya ke sektor-sektor usaha. Analisis ekonomi daerah dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah.

Pada tahun 2020 Perekonomian Kabupaten Soppeng tetap menunjukkan laju perkembangan yang positif, meskipun ditengah kondisi bencana akibat Covid 19 yang mempengaruhi semua sektor ekonomi global, nasional dan daerah. Hal ini tercermin dari nilai produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) tahun 2020 yang sebesar Rp.11.382.122,02 juta rupiah, dimana pada tahun 2019 sebesar Rp.10.937.388,00 juta rupiah. Hal tersebut menggambarkan aktivitas ekonomi di Kabupaten Soppeng masih tumbuh menggeliat ditengah pandemic Covid-19. Untuk selengkapnya gambaran terkait PDRB ADHB Kabupaten Soppeng tahun 2015-2020 terangkum dalam berikut:

Tabel 2.10. Produk Domestik Regional Bruto Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2016–2020

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.391.150,60	2.731.526,10	3.057.935,70	3.138.491,00	3.336.193,48
B	Pertambangan dan Penggalian	356.041,70	384.274,80	432.920,40	477.330,90	506.494,11
C	Industri Pengolahan	822.548,30	936.725,30	1.048.113,00	1.150.263,20	1.130.157,01

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6.096,40	7.449,30	8.125,20	8.682,00	9.068,90
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.553,30	4.050,10	4.461,90	4.717,80	4.975,43
F	Konstruksi	964.170,60	1.098.866,00	1.290.274,60	1.468.400,10	1.537.616,97
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	980.946,00	1.101.069,00	1.276.053,60	1.458.273,20	1.414.753,16
H	Transportasi dan Pergudangan	257.663,50	273.810,80	303.263,30	335.477,30	324.709,77
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	113.746,10	128.377,60	147.031,70	167.153,60	163.898,42
J	Informasi dan Komunikasi	218.035,40	261.882,20	299.074,30	332.939,00	369.116,18
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	276.358,40	295.267,60	324.413,00	352.304,60	384.579,91
L	Real Estate	438.088,30	483.696,50	527.386,20	568.306,40	592.730,77
M,N	Jasa Perusahaan	15.896,00	17.835,60	19.750,50	22.149,90	21.350,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	521.439,50	561.179,30	607.050,80	685.513,70	722.368,41
P	Jasa Pendidikan	344.565,70	379.408,50	418.110,50	488.576,70	562.871,42
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	128.931,50	145.963,10	167.871,50	192.962,00	218.892,78
R,S, T,U	Jasa lainnya	56.708,30	64.825,10	74.102,00	85.846,60	82.344,87
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	7.895.939,50	8.876.207,00	10.005.938,30	10.937.388,00	11.382.122,02

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2021

Jika dilihat dari besaran PDRB atas dasar harga konstan yang menggambarkan produktivitas ekonomi yang dihitung berdasarkan tahun dasar konstan, PDRB ADHK Kabupaten Soppeng menggambarkan pola yang sama dengan PDRB ADHB yang mengalami kinerja positif. Nilai PDRB ADHK Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 sebesar Rp.7.146.654,36 juta rupiah, lebih tinggi dibanding tahun 2019 yang sebesar Rp.6.993.513,10 juta rupiah. Kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan kategori dengan nilai PDRB ADHK terbesar di tahun 2020 sebesar Rp. 1.995.488,51 juta rupiah.

Tabel 2.11. Produk Domestik Regional Bruto Soppeng Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2016–2020

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.613.107,00	1.757.019,70	1.896.925,70	1.946.887,40	1.995.488,51
B	Pertambangan dan Penggalian	175.714,50	189.228,40	207.354,40	228.338,70	237.152,57
C	Industri Pengolahan	564.498,30	621.778,80	657.200,80	710.969,20	691.955,40
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7.244,90	7.615,90	8.068,70	8.627,30	9.141,62
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.155,10	3.391,50	3.712,90	3.915,30	4.129,08
F	Konstruksi	672.422,90	728.663,30	793.817,00	876.612,10	916.147,34
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	789.092,60	860.583,90	943.562,00	1.047.940,10	1.005.657,51
H	Transportasi dan Pergudangan	160.047,70	172.636,30	190.016,30	209.471,00	196.819,02
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	86.675,10	95.683,30	107.252,30	120.543,40	117.067,77
J	Informasi dan Komunikasi	201.083,80	225.201,30	245.823,90	273.085,80	305.146,03
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	169.575,70	174.714,40	185.203,20	196.578,50	213.335,14
L	Real Estate	280.586,90	290.107,20	306.756,60	324.701,80	337.560,00
M,N	Jasa Perusahaan	12.291,80	13.248,40	14.568,10	16.045,40	15.183,72
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	351.948,20	369.224,50	385.072,20	423.603,10	438.879,32
P	Jasa Pendidikan	317.755,90	342.203,40	376.713,30	415.966,80	461.390,37
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	103.499,80	113.580,00	124.167,00	136.049,70	150.430,20



Kate-gori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
R,S, T,U	Jasa lainnya	38.990,60	42.575,30	48.178,00	54.177,60	51.170,75
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5.547.690, 87	6.007.455, 72	6.494.392, 43	6.993.513, 10	7.146.654, 36

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2021

Berdasarkan dari komponen penyusunnya, kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi lapangan usaha utama yang memberikan produktivitas tertinggi di Kabupaten Soppeng dengan kontribusi pada tahun 2020 sebesar Rp.3.336.193,48 juta rupiah. Selanjutnya kategori lapangan usaha yang memberikan kontribusi tinggi yaitu konstruksi sebesar Rp.1.537.616,97 juta rupiah dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp.1.414.753,16 juta rupiah. Hal ini membuktikan bahwa meskipun ditengah pandemik Covid-19, tetapi sektor utama perekonomian di Kab. Soppeng pada tahun 2020 tetap memberikan kontribusi yang cukup.

Selaras dengan karakteristik Kabupaten Soppeng sebagai Kabupaten yang mengandalkan sektor pertanian sebagai aktifitas ekonomi utama masyarakatnya. Besarnya produktivitas sektor pertanian tersebut menjadi pengungkit dalam mendorong tumbuhnya lapangan usaha penunjang lainnya yaitu kategori lapangan usaha kontruksi. Kontruksi menjadi kategori lapangan usaha yang memiliki prospek tumbuh tinggi dikarenakan semakin berkembangnya suatu wilayah maka semakin tinggi pula permintaan akan pembangunan fisik di Kabupaten Soppeng.

2.1.2.1.1.2. ***Distribusi* Sektoral**

Distribusi sektoral memberikan gambaran sejauh mana peranan sektor lapangan usaha memberikan andil terhadap pembentukan perekonomian Kabupaten Soppeng. Distribusi PDRB Kabupaten Soppeng pada tahun 2015-2020 didominasi oleh sektor primer, dimana pada tahun 2020 berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku kontribusi tertinggi pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 29,31 persen. Adapun sektor kedua dengan kontribusi tertinggi pada tahun 2020 yaitu konstruksi sebesar 13,51 persen.

Tabel 2.12. Distribusi PDRB Tahunan Kabupaten Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Persen)

Kate-gori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30,28	30,77	30,56	28,70	29,31
B	Pertambangan dan Penggalian	4,51	4,33	4,33	4,36	4,45
C	Industri Pengolahan	10,42	10,55	10,47	10,52	9,93
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04
F	Konstruksi	12,21	12,38	12,90	13,43	13,51

Kate-gori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,42	12,40	12,75	13,33	12,43
H	Transportasi dan Pergudangan	3,26	3,08	3,03	3,07	2,85
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,44	1,45	1,47	1,53	1,44
J	Informasi dan Komunikasi	2,76	2,95	2,99	3,04	3,24
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,50	3,33	3,24	3,22	3,38
L	Real Estate	5,55	5,45	5,27	5,20	5,21
M,N	Jasa Perusahaan	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,60	6,32	6,07	6,27	6,35
P	Jasa Pendidikan	4,36	4,27	4,18	4,47	4,95
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,63	1,64	1,68	1,76	1,92
R,S, T,U	Jasa lainnya	0,72	0,73	0,74	0,78	0,72
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng , 2021

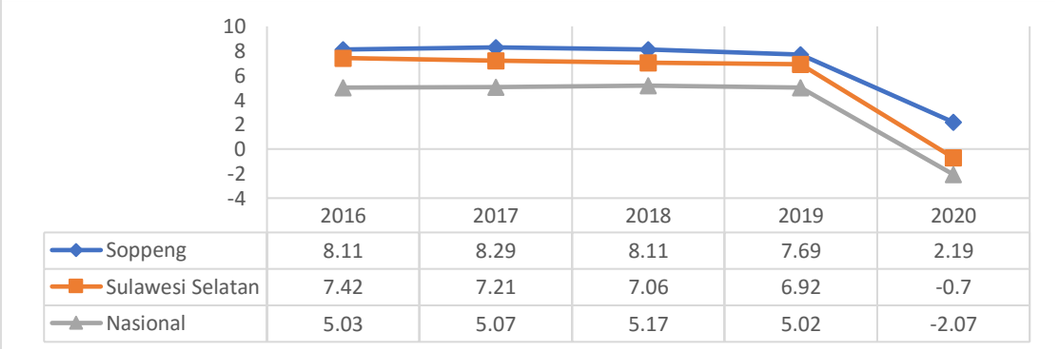
Berdasarkan distribusi PDRB menurut lapangan usaha, perlu dicermati tentang peranan setiap sektor dan sektor apa saja yang merupakan sektor basis (base sector) dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Soppeng terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Prov. Sulawesi Selatan.

2.1.2.1.1.3. ***Pertumbuhan Ekonomi***

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB yang dihasilkan suatu daerah pada tahun tertentu dibandingkan nilai PDRB tahun sebelumnya, dengan menggunakan nilai PDRB Harga Konstan. Laju pertumbuhannya untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan serta sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan daerah untuk perncanaan pembangunan daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng lima tahun terakhir tumbuh positif dengan besaran yang fluktuatif, diakibatkan oleh peranan sektor pertanian yang memberikan kontribusi selama lima tahun terakhir yang juga mengalami fluktuatif.

Grafik 2.2. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2020

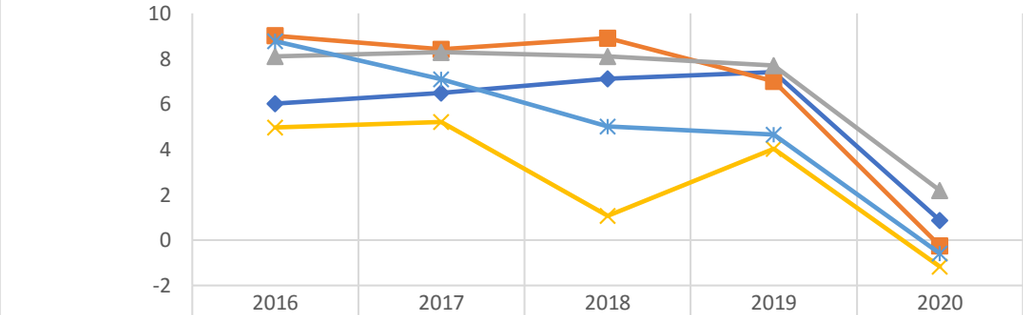


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2021

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 menunjukkan kinerja yang cukup baik, dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng Tahun 2020 sebesar 2,19 persen lebih besar dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang terkontraksi sebesar -2,07 persen dan pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar -0,7 persen.

Apabila disandingkan dengan pertumbuhan Ekonomi wilayah sekitar, pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng pada empat tahun terakhir berada pada posisi yang baik. Pada tahun 2020 walaupun dalam masa pandemic Covid-19 pertumbuhan ekonomi kabupaten Soppeng lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi wilayah sekitar yang setara. Perbandingan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

Grafik 2.3. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng dan Wilayah sekitar Tahun 2016 - 2020

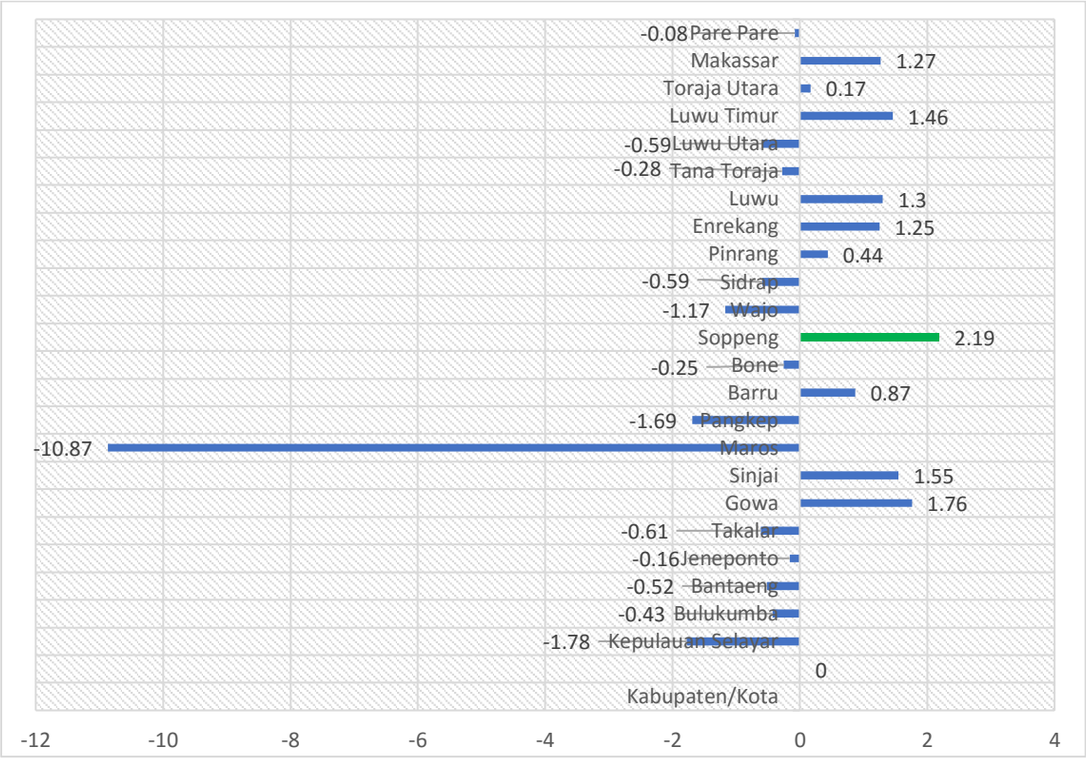


	2016	2017	2018	2019	2020
Barru	6.01	6.48	7.11	7.41	0.87
Bone	9.01	8.41	8.91	7.01	-0.25
Soppeng	8.11	8.29	8.11	7.69	2.19
Wajo	4.96	5.21	1.08	4.03	-1.17
Sidrap	8.77	7.09	5.02	4.65	-0.59

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2021

Untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng jika dibandingkan dengan daerah lain di Prov. Sul-Sel, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Soppeng berada pada urutan pertama. Hal ini menunjukkan bahwa aktifitas ekonomi di Kabupaten Soppeng di tengah pandemi Covid -19 cukup menggeliat pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan daerah lain di Prov. Sulawesi Selatan.

Grafik 2. 4. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kab./ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2021

Selama lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng terjadi pada seluruh kategori lapangan usaha kecuali pada tahun 2020, dimana akibat dampak dari covid-19 beberap sektor mengalami kontraksi yaitu industri pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Perusahaan dan jasa lainnya. Kategori lapangan usaha Pertanian, kehutanan dan perikanan masih memberikan andil terbesar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng meskipun pada tahun 2020, mengalami sedikit perlambatan dibanding tahun 2019. Kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2020 yaitu kategori informasi dan komunikasi yang sebesar 11,74 persen.

Tabel 2. 13. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng, Menurut Lapangan usaha Kabupaten Soppeng Tahun 2016 - 2020

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10,07	8,19	7,38	2,57	2,50
B	Pertambangan dan Penggalian	9,78	7,14	8,74	9,19	3,86
C	Industri Pengolahan	6,26	9,21	5,39	7,56	-2,68
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,68	4,87	5,61	6,47	5,96
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,4	6,97	8,66	5,17	5,46

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
F	Konstruksi	4,11	7,72	8,21	9,44	4,51
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,92	8,31	8,79	9,96	-4,03
H	Transportasi dan Pergudangan	5,77	7,29	9,15	9,29	-6,04
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,33	9,41	10,79	11,03	-2,88
J	Informasi dan Komunikasi	9,53	10,71	8,39	9,98	11,74
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,36	2,94	5,66	5,79	8,52
L	Real Estate	2,82	3,28	5,43	5,53	3,96
M,N	Jasa Perusahaan	7,94	7,22	9,06	9,21	-5,37
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,55	4,68	4,12	9,1	3,61
P	Jasa Pendidikan	8,79	7,14	9,16	9,44	10,92
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,13	8,87	8,53	8,73	10,57
R,S, T,U	Jasa lainnya	7,4	8,42	11,63	11,07	-5,55
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	8,11	8,29	8,11	7,69	2,19

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng (Angka Sementara - ** Angka sangat Sementara), 2020*

2.1.2.1.2. Inflasi

Secara umum angka inflasi yang menggambarkan kecenderungan tentang perkembangan harga dan perubahan nilai yang dapat dipakai sebagai informasi dasar untuk pengambilan keputusan baik tingkat ekonomi makro atau mikro, baik fiskal maupun moneter. Pada tingkat mikro, rumah tangga/masyarakat misalnya, dapat memanfaatkan angka inflasi untuk dasar penyesuaian pengeluaran kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan mereka yang relatif tetap. Pada tingkat korporat angka inflasi dapat dipakai untuk perencanaan pembelanjaan dan kontrak bisnis. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa Inflasi merupakan indikator penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

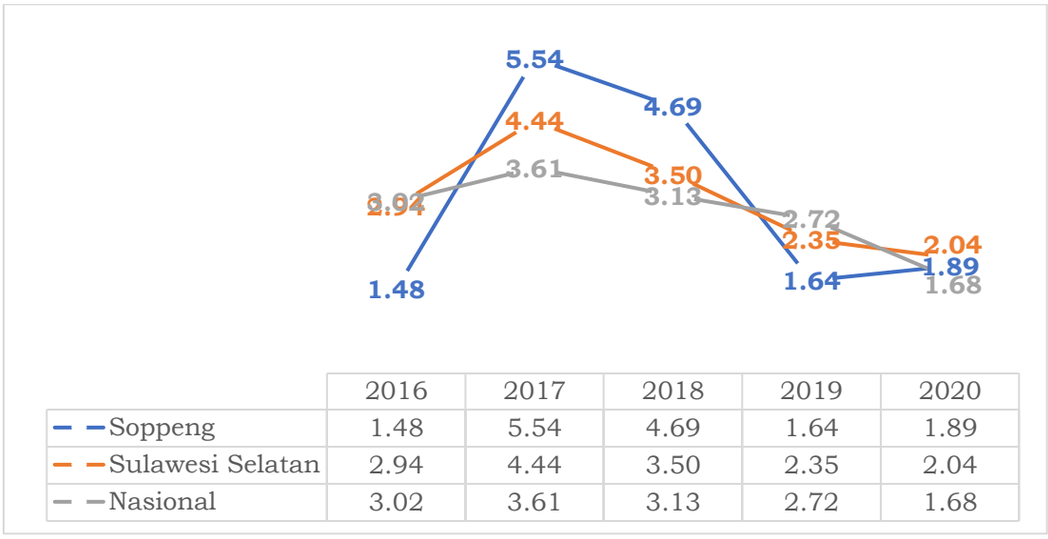
Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Tingkat inflasi dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi maupun biaya hidup yang ada di masyarakat. Fluktuasi inflasi daerah akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng yang cukup tinggi pada tahun terakhir tentu tidak akan terlalu bermakna terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat manakala laju inflasi juga cukup tinggi.

Pengendalian inflasi merupakan indikator yang erat kaitannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun inflasi memberikan dampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi bukan berarti tidak adanya inflasi dapat berdampak baik bagi perekonomian. Inflasi yang terlalu rendah bahkan diangka nol justru akan berdampak pada lesunya

perekonomian bahkan dapat menimbulkan stagnansi. Alhasil pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak dapat terlaksana.

Laju inflasi tahunan Kabupaten Soppeng tahun 2020 adalah sebesar 1,89 persen, kondisi tersebut memberi gambaran bahwa sepanjang tahun 2020 keadaan harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan sebesar 1,89 persen. Kondisi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi yang terjadi pada tahun 2019. Laju inflasi terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu 1,48 persen dan tertinggi pada tahun 2017 yang mencapai 5,54 persen, selanjutnya tahun 2018 yaitu 4,69 persen. Laju inflasi atau rata-rata kenaikan harga barang dan jasa sepanjang tahun 2020 lebih rendah dari laju inflasi Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 2,04 persen. Namun lebih tinggi dari laju inflasi nasional sebesar 1,68 persen.

Grafik 2. 5. Perbandingan Inflasi Kabupaten Soppeng dengan Inflasi Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 - 2020



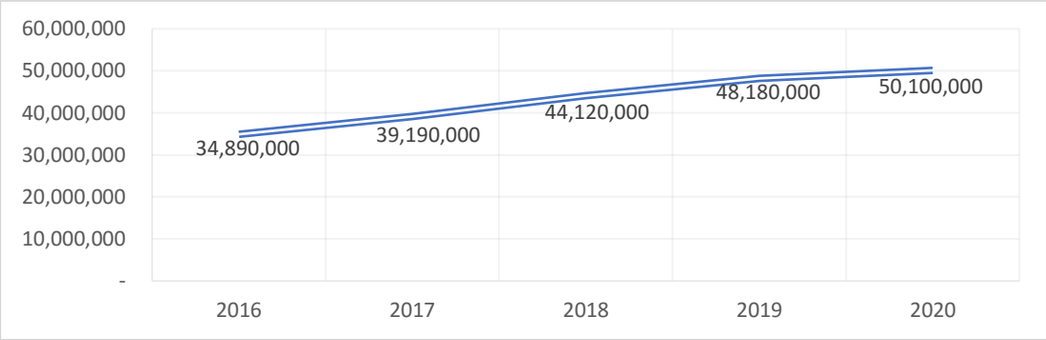
	2016	2017	2018	2019	2020
Soppeng	1.48	5.54	4.69	1.64	1.89
Sulawesi Selatan	2.94	4.44	3.50	2.35	2.04
Nasional	3.02	3.61	3.13	2.72	1.68

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

2.1.2.1.3. PDRB Perkapita

PDRB PerKapita atau pendapatan perkapita merupakan pendapatan rata-rata untuk masing-masing penduduk dalam suatu daerah selama satu periode tertentu. Pendapatan Per Kapita juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah sebagai indicator kesejahteraan suatu daerah, standar pertumbuhan kemakmuran daerah, sebagai pedoman bagi pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi, dan pembanding tingkat kemakmuran antar daerah. PDRB per kapita atas harga berlaku berguna untuk menunjukkan nilai PDRB per-kepala atau satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita atas harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah. PDRB perkapita Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 sebesar Rp.50,10 juta rupiah meningkat dibanding tahun 2019 yang sebesar Rp.48,18 juta rupiah.

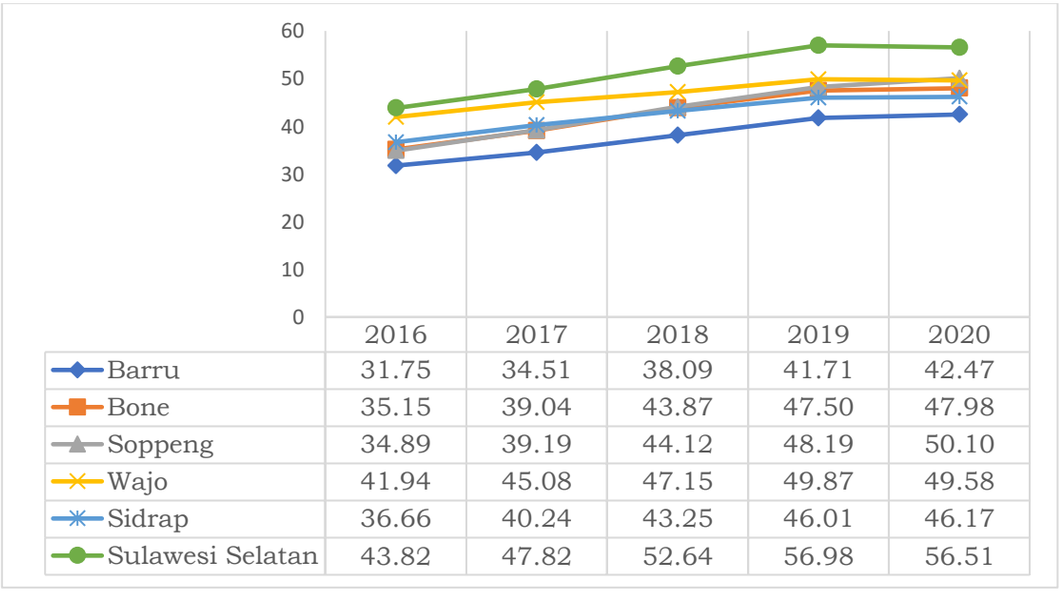
Grafik 2. 6. PDRB Per Kapita Kabupaten Soppeng Menurut Lapangan Usaha, 2016-2020 (Juta Rupiah)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2021

Jika dibandingkan dengan wilayah disekitar Kabupaten Soppeng yaitu Kab. Bone, Kab. Sidrap, Kab. Barru, dan Kab. Wajo. PDRB perkapita di Kabupaten Soppeng juga cukup tinggi.

Grafik 2. 7. PDRB Per Kapita Kabupaten Soppeng dan Wilayah Sekitar 2016-2020



	2016	2017	2018	2019	2020
Barru	31.75	34.51	38.09	41.71	42.47
Bone	35.15	39.04	43.87	47.50	47.98
Soppeng	34.89	39.19	44.12	48.19	50.10
Wajo	41.94	45.08	47.15	49.87	49.58
Sidrap	36.66	40.24	43.25	46.01	46.17
Sulawesi Selatan	43.82	47.82	52.64	56.98	56.51

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2021

2.1.2.1.4. Indeks Gini

Indeks Gini (GR) merupakan alat ukur atau indikator yang menerangkan distribusi pendapatan aktual, pengeluaran pengeluaran konsumsi atau variable-variabel lain yang terkait dengan distribusi dimana setiap orang menerima bagian secara sama atau identik. Indeks Gini Rasio adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.

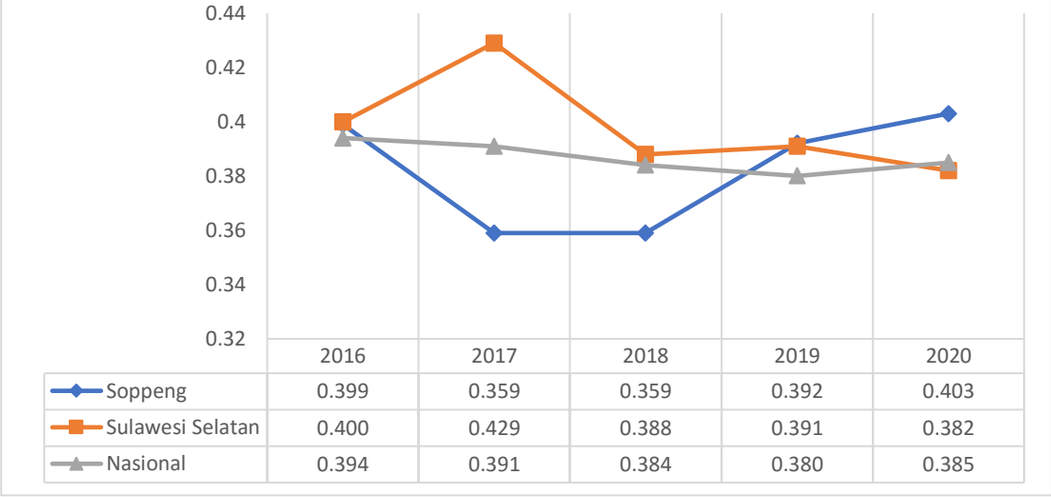
Nilai indeks gini berada pada selang 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi nilai indeks gini, maka semakin tinggi pula ketidakmerataan pendapatan dalam suatu wilayah. Jika nilai indeks gini mendekati satu, maka terjadi ketidakmerataan dalam pembagian pendapatan. Sebaliknya apabila nilai Indeks Gini kecil atau mendekati nol, makan semakin merata distribusi pendapatan aktual dan pengeluaran konsumsi. Klasifikasi nilai indek gini:

GR < 0,3 → ketimpangan rendah

0,3 ≤ GR ≤ 0,5 → ketimpangan sedang

GR > 0,5 → ketimpangan tinggi

Grafik 2. 8. Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Soppeng dengan Indeks Gini Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020



	2016	2017	2018	2019	2020
Soppeng	0.399	0.359	0.359	0.392	0.403
Sulawesi Selatan	0.400	0.429	0.388	0.391	0.382
Nasional	0.394	0.391	0.384	0.380	0.385

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

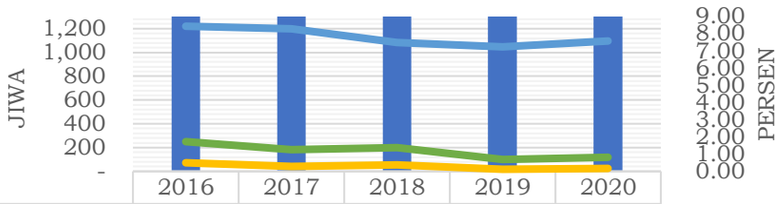
Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Soppeng yang diukur oleh indeks gini selama tahun 2016-2020 berfluktuasi, dengan capaian indeks gini terendah sebesar 0,359 pada tahun 2017 dan 2018. Pada Tahun 2020, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Soppeng yang diukur oleh indeks gini adalah sebesar 0,403, naik 0,011 poin dari tahun 2019. Jika dibandingkan dengan gini ratio di Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, indeks gini Kabupaten Soppeng pada Tahun 2020 lebih tinggi dimana indeks gini Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,382 dan Nasional sebesar 0,385. Walaupun mengalami kenaikan pada tahun 2020, tetapi Kabupaten Soppeng masih berada pada ketimpangan sedang.

2.1.2.1.5. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang /rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik untuk makanan maupun non makanan. Kemiskinan dapat dilihat dari dua ukuran makro yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Data kemiskinan absolut adalah data kemiskinan yang merefleksikan suatu standar seperti kebutuhan pokok minimal. Kemiskinan absolut diukur berdasarkan indikator bersifat uang (garis kemiskinan) dengan pendekatan kebutuhan dasar.

Sumber utama lahirnya kemiskinan disebabkan masalah kesejahteraan sosial masyarakat. Sejatinya kemiskinan berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu kemiskinan merupakan masalah pokok daerah yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Berikut tabel kondisi Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020 :

Grafik 2. 9. Kondisi Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020



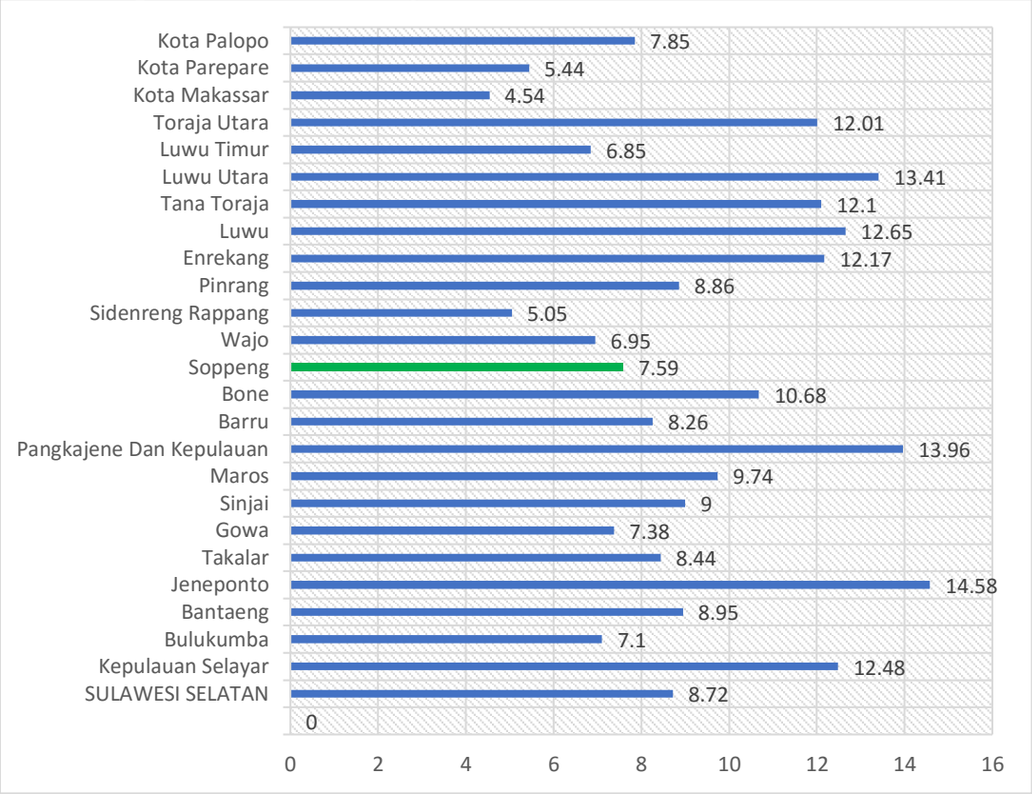
	2016	2017	2018	2019	2020
JUMLAH PENDUDUK MISKIN (JIWA)	19,120	18,760	17,000	16,450	17,230
INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2) (%)	0.50	0.28	0.37	0.12	0.16
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (%)2	8.45	8.29	7.50	7.25	7.59
INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1) (%)3	1.73	1.25	1.39	0.69	0.83

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2021

Pada kurun 2016 – 2019 penduduk miskin di Kabupaten Soppeng terus mengalami penurunan dimana pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin sebanyak 19.120 jiwa (8,45%) dan pada tahun 2019 sebanyak 16.450 jiwa (7,25%). Tetapi dampak dari pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin yaitu sebesar 17.230 jiwa (7,59%).

Selain dari aspek persentase kemiskinan, suatu daerah juga dapat dilihat dari ineks kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sementara itu Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index/P2) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi angka indeksnya, semakin parah kemiskinannya. Selama periode 2016 – 2020 indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Soppeng berfluktuatif dan cenderung menurun dimana pada tahun 2016 indeks kedalaman kemiskinan sebesar 1,73%, dan pada tahun 2020 sebesar 0,83%. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Grafik 2. 10. Perbandingan Kemiskinan Kabupaten Soppeng dengan Kabupaten / Kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2021

Selain ideks kedalaman kemiskinan yang terus menurun Indeks keparahan Kemiskinan (P2) juga berfluktuatuif dan cenderung menurun, dimana pada tahun 2016 Indeks Keparahan Kemiskinan sebesar 0,50 dan pada tahun 2020 sebesar 0,16. Hal ini berarti bahwa jurang kemiskinan (poverty gap) di Kabupaten Soppeng rendah atau ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin juga semakin rendah.

Jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin dengan daerah di Prov. Sulawesi selatan dan jumlah penduduk miskin dengan nasional maka persentase penduduk miskin di Kabupaten Soppeng masih lebih rendah.

Kompleksitas masalah kemiskinan ini tentu tidak bisa dijawab melalui program pembangunan yang bersifat parsial apalagi kontradiktif, tetapi diperlukan sebuah rumusan kebijakan yang bersifat holistik, ada keterkaitan satu sama lain meskipun tidak bisa menghindari pendekatan sektoral. Rumusan kebijakan pembangunan hendaknya disatukan oleh dua isu sentral dan mendasar yaitu penanggulangan kemiskinan (Pro Poor) dan penciptaan lapangan kerja (Pro Job).

2.1.2.1.6. Indeks Kepuasan Masyarakat

Setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya

pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik. Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menumbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.

Pada prinsipnya proses pemantauan dan evaluasi ini dilakukan untuk melakukan evaluasi kinerja pelayanan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Dalam proses pemantauan dilakukan penilaian apakah Standar Pelayanan yang sudah disusun dapat dilaksanakan dengan baik, apa yang menjadi faktor kunci keberhasilan dan apa yang menjadi faktor penghambat. Metode yang dapat dipergunakan antara lain: analisis dokumen, survei, wawancara, dan observasi. Survei dapat dilakukan dengan menggunakan metode Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana ketentuan yang berlaku. Evaluasi Standar Pelayanan adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu penerapan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dan/atau kegagalan dalam rangka penerapan Standar Pelayanan. Proses evaluasi juga mempertimbangkan pengaduan pelayanan publik yang diperoleh, serta hasil dari Survei Kepuasan Masyarakat. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan, penyelenggara pelayanan dapat melakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik/inovasi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

Dari hasil kajian yang dilakukan terhadap 19 unit penyelenggara layanan yang terdiri dari 8 unit penyelenggara pelayanan dasar dan 11 unit penyelenggara non pelayanan dasar, didapatkan indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2020 dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 14.Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kabupaten Soppeng Tahun 2020

NO	JENIS LAYANAN	NILAI IKM		PREDIKAT
		PELAYANAN DASAR	NON PELAYANAN DASAR	
1	Layanan Bedah Rumah	91,83		SANGAT BAIK
2	Layanan Ketersediaan Air Bersih dan Sanitasi	86,66		BAIK
3	Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PBB dan Restoran)		88,94	SANGAT BAIK
4	Kantor Kecamatan		87,08	BAIK
5	Pelayanan Infrastruktur		88,62	BAIK
6	Pelayanan Sektor Pertanian (Ketersediaan Pupuk, Bibit, Sarpras Dll.)		85,5	BAIK
7	Pelayanan Kesehatan	85,03		BAIK
8	Layanan Keamanan dan Ketertiban	84,87		BAIK
9	Layanan Administrasi Kependudukan		84,87	BAIK

NO	JENIS LAYANAN	NILAI IKM		PREDIKAT
		PELAYANAN DASAR	NON PELAYANAN DASAR	
10	Pelayanan Pendidikan	83,97		BAIK
11	Kantor Kelurahan		83,21	BAIK
12	Pelayanan Pemadam Kebakaran	82,67		BAIK
13	Layanan lampu Jalan dan Terminal		82,67	BAIK
14	Layanan Pencatatan Sipil		82,29	BAIK
15	Layanan PTSP dan Perizinan		82,08	BAIK
16	Pelayanan Kebersihan		81,72	BAIK
17	Pelayanan PDAM	81,36		BAIK
18	Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa		80,83	BAIK
19	Layanan Infrastruktur Taman/Ruang Terbuka Hijau		78,3	BAIK
	RERATA	85,20	83,84	

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2020

Hasil pengolahan data hasil survei 19 Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng menunjukkan bahwa terdapat 2 unit penyelenggara pelayanan publik yang mendapat penilaian sangat positif dari masyarakat dengan nilai mutu pelayanan "A" dan Kinerja Unit Pelayanan "Sangat Baik", yaitu Layanan Bedah Rumah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan nilai IKM 91,83 dan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PBB dan Restoran) pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan nilai IKM 88,94. Sedangkan 17 unit penyelenggara pelayanan publik lainnya memiliki nilai mutu pelayanan "B" dan Kinerja Unit Pelayanan "Baik".

Pengolahan data hasil survei menunjukkan bahwa diantara Sembilan unsur pelayanan publik yang dinilai, unsur biaya/tarif memiliki nilai tertinggi dengan tingkat kualitas pelayanan sangat baik pada semua jenis layanan, kecuali pada layanan penyediaan air minum yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Nilai tertinggi untuk pelayanan PDAM pada unsur penanganan, pengaduan, saran dan masukan. Sedangkan unsur pelayanan publik dengan nilai terendah pada setiap jenis layanan bervariasi, tetapi didominasi oleh unsur sarana prasarana dan waktu penyelesaian.

Berdasarkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tersebut, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki kinerja unit pelayanan "Sangat Baik", direkomendasikan untuk mempertahankan kinerjanya. Adapun Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki kinerja unit pelayanan "baik" diharapkan untuk melakukan perbaikan terhadap unsur-unsur pelayanan yang masih rendah, agar nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dapat menjadi sangat baik.

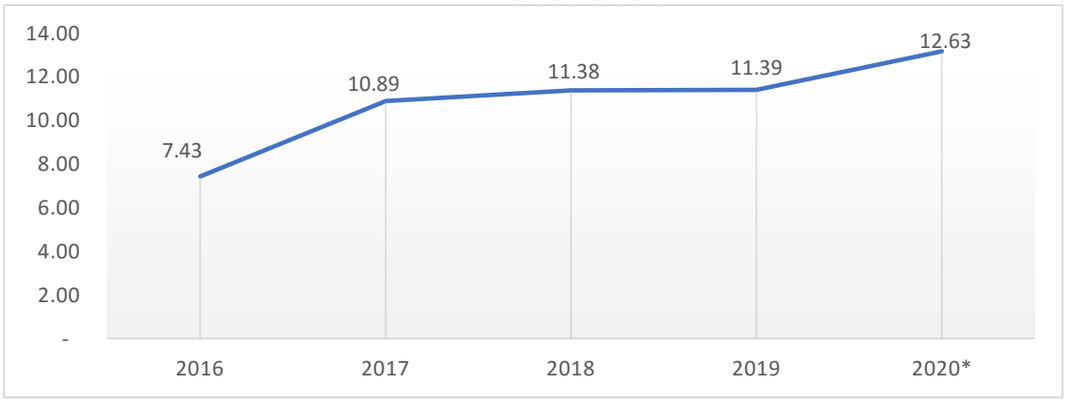
2.1.2.1.7. Persentase PAD Terhadap pendapatan

PAD merupakan unsur yang penting dalam pendapatan daerah. PAD merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain

penerimaan dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Keseluruhannya merupakan sumber pendaaan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Persentase PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan rasio ketergantungan suatu daerah. Semakin tinggi nilai rasio PAD terhadap total pendapatan maka semakin kecil ketergantungan suatu daerah terhadap transfer dana dari pihak eksternal baik itu pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah lainnya.

Persentase PAD terhadap pendapatan mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya, dimana awalnya hanya 7,43 % kemudian di tahun 2020 kini mencapai 12,63%. Hal ini disebabkan karena perbaikan regulasi dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan dan juga dipicu oleh laju pertumbuhan ekonomi, serta kebijakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Berbagai langkah dan usaha ekstensifikasi maupun intensifikasi pajak dan retribusi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan didukung regulasi yang mempermudah akses penagihan kepada para wajib pajak.

Grafik 2. 11. Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab.Soppeng, 2020

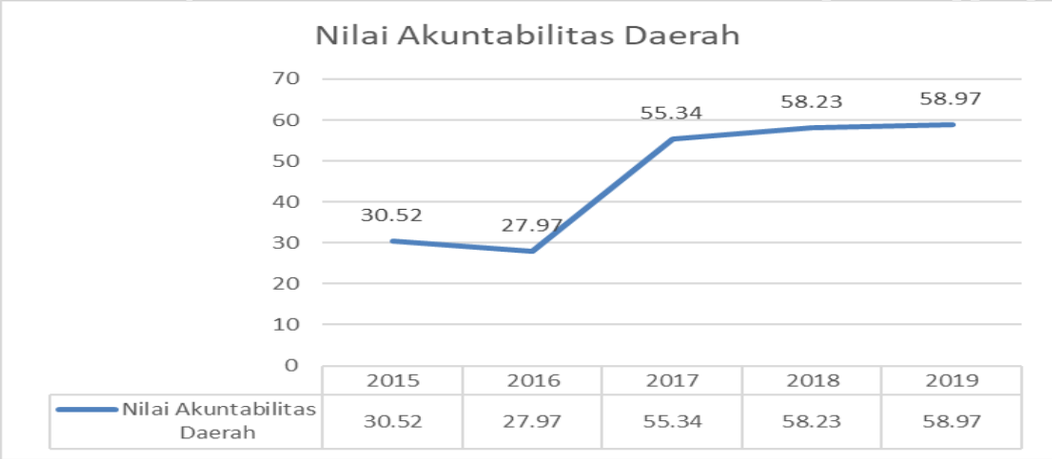
2.1.2.1.8. Opini Badan Pemeriksa Keuangan

Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Soppeng telah mendapat perbaikan sejak tahun 2012 dan bahkan sejak tahun 2014 sampai tahun 2020 telah mendapat predikat opini WTP. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publlik dalam hal pengelolaan keuangan pemerintah telah berjalan sangat baik.

2.1.2.1.9. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah

Indikator Nilai Akuntabilitas kinerja berdasarkan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah tahun 2019 terhadap implementasi system akuntabilitas kinerja kabupaten Soppeng tahun 2019 dengan nilai 58.97% atau dengan predikat penilaian CC. Walaupun nilai tiap komponen meningkat akan tetapi belum meningkat dari tahun sebelumnya.

Grafik 2. 12. Nilai Akuntabilitas Daerah Kabupaten Soppeng



Sumber : Bappelitbangda Kab.Soppeng, 2020

2.1.2.1.10. Penguatan Cadangan Pangan

Penyediaan Cadangan pangan pemerintah daerah merupakan bagian dari Cadangan Pangan Nasional, sehingga setiap daerah berkewajiban dalam melakukan penguatan cadangan pangan di wilayah masing-masing. Berdasarkan peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah, diatur mengenai Jumlah Cadangan Beras sebagai pangan utama tiap daerah. Adapun penguatan cadangan pangan yang dilaksanakan di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. 15.Penguatan cadangan pangan Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Cadangan Pangan Kabupaten Soppeng	Ton	10.0	10.0	20.0	10.0	20.0
	Penguatan Cadangan Pangan ((Jumlah Cadangan Pangan / 100)*100%)	%	10.0	10.0	20.0	10.0	20.0

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, 2020

Tahun 2016 dan 2017 jumlah cadangan pangan yang diadakan yaitu 10 Ton, tahun 2018 meningkat menjadi 20 Ton, tahun 2019 menurun menjadi 10 Ton dan kembali meningkat menjadi 20 Ton pada tahun 2020. Penguatan cadangan pangan menjadi instrumen strategis untuk menjamin akses pangan masyarakat pasca bencana, kerawanan pangan dan kondisi darurat lainnya, serta menjaga stabilisasi harga pangan.

2.1.2.1.11. Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB

Salah satu sub sektor terbesar dalam sektor pertanian di Kabupaten Soppeng yaitu Sub Sektor Tanaman Pangan dengan komoditi utama berupa Padi dan Palawija. Khusus untuk Palawija di Kabupaten Soppeng yang utama adalah Jagung dan Kedelai, disamping itu juga pada beberapa wilayah dibudidayakan palawija jenis lainnya seperti Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu dan Ubi Jalar. Palawija sebagai bahan pangan kedua setelah padi (beras) juga sangat penting sebagai pelengkap kebutuhan konsumsi masyarakat, selain itu, palawija juga sebagai bahan pakan ternak utama. Gambaran kontribusi PDRB Pertanian khusus Palawija terhadap PDRB Sektor Pertanian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16. Kontribusi PDRB Pertanian khusus Palawija terhadap PDRB Sektor Pertanian Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian (palawija)	Juta Rp	359,149.60	277,531.85	342,910.60	515,401.00	672,229.70
2	Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan	Juta Rp	2,184,787.30	2,481,733.20	2,755,401.13	2,788,415.30	2,931,461.20
	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB	%	16.44%	11.18%	12.45%	18.48%	22,93%

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, 2020

Berdasarkan tabel tersebut diatas, tergambar bahwa kontribusi Sektor Pertanian Khusus Palawija terhadap Total PDRB Sektor Pertanian pada tahun 2016 sebesar 16,44% dan mengalami penurunan menjadi 11,18% pada tahun 2017, meningkat kembali pada tahun 2018 menjadi 12,45%, kemudian meningkat menjadi 18,48% pada tahun 2019. Kontribusi PDRB dari sektor pertanian (Palawija) mengalami fluktuasi selama 2016-2019, hal tersebut disebabkan oleh ketergantungan pertanaman palawija pada kondisi cuaca dan iklim, ketersediaan air, dan sarana produksi khususnya bibit palawija. Sedangkan pada tahun 2020 kontribusi sektor pertanian palawija terhadap PDRB sebesar 22,93%.

2.1.2.1.12. Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan Terhadap PDRB

Kontribusi PDRB Sektor Pertanian terhadap total PDRB menjadi salah satu indikator yang menunjukkan besarnya peran Sektor Pertanian dalam struktur PDRB Kabupaten Soppeng. Gambaran dari besaran kontribusi tersebut mencerminkan peran sektor pertanian dalam menggerakkan perekonomian di Kabupaten Soppeng. Berikut tabel kontribusi PDRB Sektor Pertanian tahun 2016-2020:

Tabel 2.17. Kontribusi PDRB Sektor Pertanian Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan	Juta Rp	2,184,787.30	2,481,733.20	2,759,442.40	2,788,415.30	2,931,461.20
2	Jumlah Total PDRB	Juta Rp	7,935,787.23	8,947,107.05	10,005,938.30	10,937,388.00	11,382,120.00
	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	%	27.53	27.74	27.58	25.49	25,75

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan, 2020

Pada Tahun 2016, kontribusi PDRB Sektor Pertanian terhadap total PDRB Kabupaten Soppeng mencapai 27,53%, dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 27,74%, kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2018 menjadi 27,58%. Dan Khusus tahun 2019, mengalami penurunan sampai 2,09% kemudian mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,26% di tahun 2020. Kontribusi selama tahun 2016-2020 tersebut merupakan yang terbesar dibandingkan sektor-sektor lainnya. Tingginya kontribusi tersebut terutama didukung oleh Sub Sektor Tanaman Pangan dan Sub Sektor Perkebunan, sebagai sub sektor terbesar dalam sektor pertanian yang ada di Kabupaten Soppeng. Adanya penurunan yang sangat besar pada tahun 2019 disebabkan

akibat dari menurunnya produksi Tanaman Pangan, khususnya Padi sebagai komoditi terbesar, tercatat sekitar 9.161 Hektar Pertanaman Padi Puso, dengan perkiraan nilai kerugian sekitar 200 Milyar Rupiah. Selain itu produksi Kakao juga menurun dan termasuk memberi pengaruh pada penurunan konstribusi PDRB sektor pertanian. Sedangkan pada tahun 2020 kontribusi PDRB sektor pertanian sebesar 25,75% atau meningkat dibanding tahun 2019.

2.1.2.1.13. Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB

Selain sub sektor Tanaman Pangan, kontribusi terbesar kedua pada PDRB Sektor Pertanian yaitu dari Sub Sektor Perkebunan terutama komoditi tanaman keras (tahunan). Jenis tanaman keras utama yang ada di Kabupaten Soppeng diantaranya Kakao, Kelapa, Kemiri dan Jambu Mete. Berikut gambaran kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB Sektor Pertanian Tahun 2016-2020 :

Tabel 2.18. Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB Sektor Pertanian Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kontribusi perkebunan (tanaman keras)	Juta Rp	611,046.10	700,881.50	772,112.40	771,137.70	808,273.63
2	Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan	Juta Rp	2,184,787.30	2,481,733.20	2,755,401.13	2,788,415.30	2,931,461.20
	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB	%	27.97	28.24	28.02	27.66	27,57

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan, 2020

Dari tabel tersebut diatas, tergambar bahwa tahun 2016 kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB Sektor Pertanian sebesar 27,97% dan mengalami peningkatan menjadi 28,24% pada tahun 2017, menurun menjadi 28,02% pada tahun 2018 dan 27,66% pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 kontribusi sektor perkebunan sebesar 27,57%. Tingginya nilai komoditi hasil perkebunan, khususnya tanaman keras disebabkan komoditi tersebut merupakan komoditi ekspor yang bernilai tinggi dibandingkan komoditi hasil pertanian lainnya.

2.1.2.1.14. Produksi Sektor Pertanian

Sektor pertanian sebagai penggerak utama kehidupan perekonomian di Kabupaten Soppeng ditunjukkan dari besarnya kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB sangat bergantung pada produksi hasil pertanian. Gambaran produksi hasil pertanian di Kabupaten Soppeng khususnya Tanaman Pangan Tahun 2016-2020 pada tabel berikut :

Tabel 2.19. Gambaran Produksi Hasil Pertanian Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi Sektor Pertanian						
	a. Padi	Ton	280,905.00	309,816.00	338,933.00	267,256.00	276,589
	b. Jagung	Ton	93,131.10	84,759.00	94,837.00	148,015.00	195,504
	c. Kedelai	Ton	2,497.20	1,319.00	523.00	525.00	525
	d. Kacang Tanah	Ton	900.30	145.00	1,425.00	1,164.00	1,067
	e. Kacang Hijau	Ton	100.90	54.00	257.00	47.40	61
	f. Ubi Kayu	Ton	287.50	465.00	230.00	1,191.00	1,526

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
	g. Ubi Jalar	Ton	73.30	123.00	156.00	92.00	104
	Jumlah	Ton	377,895.30	396,681.00	436,361.00	418,290.40	475,376

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan, 2020

Pada Tahun 2016 total produksi pertanian khusus 7 (tujuh) jenis Tanaman Pangan sebagaimana tabel diatas yaitu 377.895,30 Ton, meningkat pada tahun 2017 menjadi 396.618 Ton atau peningkatan sebesar 4,97% dari tahun 2016. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan yang signifikan terutama 2 (dua) jenis komoditi utama yaitu Padi dan Jagung, sehingga total produksi mencapai 436.361 Ton atau peningkatan sebesar 10,00% dibanding tahun 2017. Pada tahun 2019, faktor bencana alam banjir yang terjadi di awal tahun dan kemarau panjang dari Juni-Desember 2019 menyebabkan sekitar 9.161 hektar pertanaman padi yang mengalami fuso (gagal panen), sehingga terjadi penurunan yang cukup signifikan, akan tetapi secara total penurunan hanya mencapai -4,14%, karena adanya peningkatan produksi jagung. Total produksi tahun 2019 sebesar 418.290,4 Ton. Dan pada tahun 2020, total produksi sudah mencapai 475.376 Ton.

2.1.2.1.15. Produksi Sektor Perkebunan

Produksi hasil perkebunan di Kabupaten Soppeng juga menjadi salah satu andalan bagi pendapatan petani pada lahan kering, terutama jenis tanaman keras (tahunan) maupun tanaman perkebunan musiman. Berikut gambaran produksi hasil perkebunan tahun 2016-2020 :

Tabel 2.20. Gambaran Produksi Hasil Perkebunan Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi Sektor Perkebunan						
	a. Kelapa Dalam	Ton	2,933.22	2,386.59	2,146.50	2,810.40	2,988.43
	b. Kelapa Hibrida	Ton	73.90	64.31	64.25	83.32	84.90
	c. Kopi Robusta	Ton	65.88	64.74	64.74	64.74	63.12
	d. Cengkeh	Ton	-	56.75	25.10	35.49	37.21
	e. Kakao	Ton	12,361.31	10,015.79	7,868.66	4,625.00	4,158.15
	f. Jambu Mete	Ton	221.10	568.95	568.87	892.16	930.48
	g. Lada	Ton	3.92	3.92	3.92	22.85	23.90
	h. Kemiri	Ton	593.15	678.79	1,015.05	1,838.61	2,028.02
	i. Aren	Ton	153.96	153.96	138.40	153.03	160.27
	j. Tembakau	Ton	126.50	99.50	101.75	111.50	101.25
	Jumlah	Ton	16,532.94	14,093.30	11,997.24	10,637.10	10,575.73

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan, 2020

Pada Tahun 2016 total produksi hasil perkebunan sebagaimana tabel diatas yaitu 16.532,94 Ton, menurun pada tahun 2017 menjadi 14.093,3 Ton atau menurun sebesar -14,00% dari tahun 2016. Pada tahun 2018 kembali terjadi penurunan produksi yang hanya mencapai 11.997,24 Ton atau menurun sebesar -14,00% dibanding tahun 2017. Tahun 2019, juga menurun menjadi 10.637,10 Ton atau menurun sebesar -11,33% dibanding tahun 2018. Penurunan produksi hasil perkebunan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut disebabkan oleh menurunnya produksi kakao sebagai

komoditi terbesar pada sub sektor perkebunan. Untuk tahun 2020 total produksi hanya mencapai 10.575,73 Ton.

2.1.2.1.16. Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB

Kegiatan usaha pertanian di Kabupaten Soppeng, khususnya budidaya Komoditi Pangan utama di Kabupaten Soppeng berupa Padi, keseluruhan proses produksinya dihasilkan oleh kelompok tani. Seluruh lahan persawahan yang ada di Kabupaten Soppeng dalam memproduksi padi dikelola oleh para petani yang tergabung dalam kelompok tani. Tidak ada usaha budidaya tanaman pangan khususnya Padi yang dikelola oleh perusahaan atau sejenisnya. Berikut tabel Kontribusi Produksi Kelompok Tani terhadap Total Produksi Tahun 2016-2020 :

Tabel 2.21. Kontribusi Produksi Kelompok Tani Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Produksi padi/bahan pangan utama lokal hasil kelompok petani	Ton	280,905	309,816	338,933	267,256	276,589
2	Jumlah produksi padi/bahan pangan utama di daerah	Ton	280,905	309,816	338,933	267,256	276,589
	Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan, 2020

2.1.2.1.17. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Kepariwisataan merupakan salah satu sektor yang berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto secara Nasional dan Regional (daerah) termasuk Kabupaten Soppeng., Kontribusi Sektor Pariwisata di Kabupaten Soppeng belum signifikan berkontribusi terhadap total PDRB Kabupaten Soppeng, namun demikian mampu menggerakan ekonomi daerah, seperti penyerapan tenaga kerja pada beberapa objek wisata daerah dan perputaran uang dari wisatawan yang berkunjung.

Tabel 2.22. Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata	Juta Rp	86.675,10	95.683,30	107.252,30	120.543,40	117.067,77
2	Total PDRB	Juta Rp	5.547.690,90	6.007.455,70	6.494.392,40	6.993.513,10	7.146.654,36
3	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	1,56	1,59	1,65	1,72	1,64

Sumber : Buku PRDB Kabupaten Soppeng menurut lapangan usaha 2015-2019

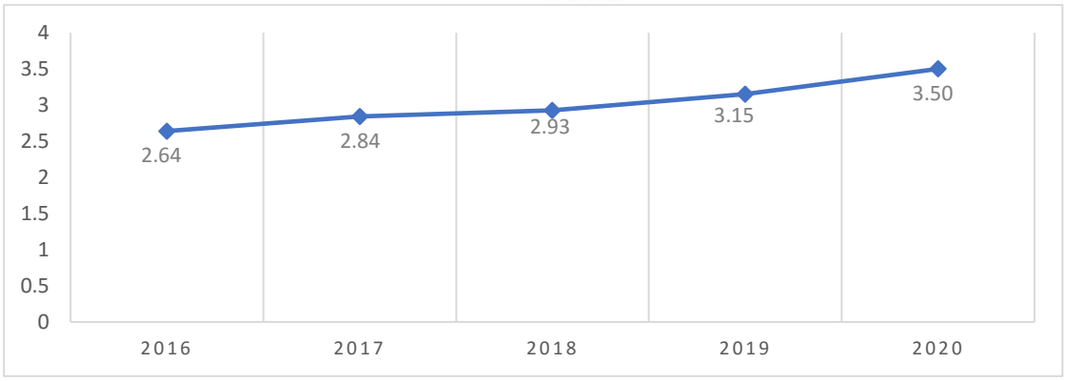
Pada Tahun 2016, kontribusi PDRB Sektor Pariwisata terhadap total PDRB Kabupaten Soppeng sebesar 1,56 persen, pada tahun 2017 sedikit meningkat menjadi 1,59 persen, pada tahun 2018 kembali meningkat menjadi 1,65 persen dan tahun 2019 kembali meningkat menjadi 1,72 persen sementara untuk tahun 2020 kontribusi sektor pariwisata sebesar 1,64 persen atau lebih rendah dibanding tahun 2019, hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 sehingga berdampak pada sektor pariwisata.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap total PDRB, yang cenderung stagnan, tidak berarti sektor pariwisata di Kabupaten Soppeng tidak ada pergerakan, ini dapat dilihat pada tabel di atas, adanya peningkatan jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata (juta) dari tahun ke tahun.

2.1.2.1.18. Kontirbusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB

Sektor Perikanan merupakan salah satu sektor yang berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Soppeng, Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap total PDRB menjadi salah satu indikator yang menunjukkan peran Sektor Perikanan dalam struktur PDRB Kabupaten Soppeng. Pada Tahun 2016, kontribusi PDRB Sektor Perikanan terhadap total PDRB Kabupaten Soppeng adalah 2,64%, dan meningkat menjadi 2.84% ditahun 2017. Trend peningkatan terus berlanjut sampai menyentuh angka 3.15% ditahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB sebesar 3,50%.

Grafik 2. 13. Kontirbusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2020

2.1.2.1.19. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Sektor Perdagangan yang meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha baik penjualan secara grosir (Perdagangan Besar) maupun eceran dari berbagai jenis barang memberikan sumbangan konstribusi yang cukup besar pada PDRB Kabupaten Soppeng. Perdagangan besar seringkali secara fisik berarti mengumpulkan, menyortir dan memisahkan kualitas barang dalam ukuran besar, membongkar dari ukuran besar dan mengepak ulang menjadi ukuran yang lebih kecil. Sedangkan penjualan eceran melakukan penjualan kembali barang-barang (tanpa perubahan teknis) baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga melalui toko, departement store, kios, mail-order houses, pedagang keililing, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain.

Tabel 2.23. Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN (jutaan)				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan	Juta Rp	789.092,60	860.583,90	943.562,00	1.047.940,10	1.005.657,51
2	Total PDRB	Juta Rp	5.547.690,90	6.007.455,70	6.494.392,40	6.993.513,10	7.146.654,36
	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	14,22	14,33	14,53	14,98	14,07

Sumber : Buku PRDB Kabupaten Soppeng menurut lapangan usaha 2015-2019

Pada Tahun 2016, kontribusi PDRB Sektor Perdagangan terhadap total PDRB Kabupaten Soppeng hanya mencapai 14,22 persen, pada tahun 2017 meningkat menjadi 14,33 persen, pada tahun 2018 terus meningkat menjadi 14,53 persen dan tahun 2019 semakin meningkat menjadi 14,98 persen sementara untuk tahun 2020 Pandemi Covid-19 juga menyebabkan pertumbuhan sektor perdagangan baik besar maupun eceran mengalami penurunan bahkan negatif. Hal ini dikarenakan daya beli masyarakat yang menurun selama pandemi Covid-19, terutama untuk subkategori perdagangan besar. Sehingga kontribusi sector ini menurun sebesar 14,07 persen.

2.1.2.1.20. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Kategori industri pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat ditempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak

Sub sektor industri yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Soppeng adalah industri tembakau atau produk pengganti tembakau, rokok, cerutu dan pemotongan dan pengeringan tembakau. Sub sektor lain adalah industri makanan dan minuman. Industri ini mencakup pengolahan produk pertanian, perkebunan dan perikanan menjadi makanan dan juga mencakup produk setengah jadi yang tidak secara langsung menjadi produk makanan dan minuman. Diantaranya adalah industri pengolahan kopi dan kakao, industri gula dan produk lainnya berbasis aren.

Tabel 2.24.Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Industri	Juta	564.498,30	621.778,80	657.200,80	710.969,20	691.955,40
2	Total PDRB	Juta	5.547.690,90	6.007.455,70	6.494.392,40	6.993.513,10	7.146.654,36
	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	10.18	10.35	10.12	10.17	9,68

Sumber : Buku PRDB Kabupaten Soppeng menurut lapangan usaha 2015-2020

Pada tabel menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB sektor industri dikontribusi oleh industri pengolahan sebesar 10,18% pada tahun 2016, meskipun nilai kontribusi mengalami fluktuasi pada 2017 yakni

10,35%, namun kontribusi sektor industri menurun pada tahun 2018 yakni pada tingkat 10,12%. Walaupun kembali terjadi kenaikan pada tahun 2019 yakni sebesar 10,17% namun tidak cukup signifikan dalam memberikan konstribusi terhadap PDRB Kabupaten Soppeng.

Pertumbuhan untuk kategori industri pengolahan cenderung menurun bahkan negatif pada tahun 2020 yang sebesar 9,68%. Hal ini disebabkan karena hampir seluruh subkategori pada Industri Pengolahan mengalami kontraksi. Selain itu, adanya penurunan omzet terutama untuk industri makan minum yang memiliki share terbesar untuk industri pengolahan di Kabupaten Soppeng menyebabkan pertumbuhan industri pengolahan menjadi negatif. Namun, untuk Industri Kimia dan Farmasi mengalami peningkatan pertumbuhan dikarenakan konsumsi masyarakat terkait obat-obatan meningkat di masa pandemi corona. Selain itu, industri tekstil dan pakaian jadi juga mengalami penurunan omzet yang sangat signifikan dikarenakan ketiadaan pesanan yang menyebabkan nilai omzetnya bahkan tidak ada.

2.1.2.1.21. Pertumbuhan Industri

Kegiatan industri merupakan suatu kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yakni dengan mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Keberadaan industri dapat memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya seperti sektor perdagangan, pertanian, ataupun sektor jasa. Berkembangnya sektor-sektor tersebut akan mendukung meluasnya peluang kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan permintaan masyarakat (daya beli). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perekonomian sedang tumbuh dan sehat. Berikut adalah data kinerja Pertumbuhan Industri di Kabupaten Soppeng kurun waktu tahun 2016-2020.

Tabel 2.25.Pertumbuhan Industri Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Industri tahun-n	Unit	12	12	12	15	20
2	Jumlah Industri sampai tahun-n	Unit	3689	3701	3713	3728	3748
3	Pertumbuhan Industri (%)	%	0.33	0.32	0.32	0.40	0.53

Sumber : Dinas PPK dan UKM Kabupaten Soppeng, 2020

Pertumbuhan industri adalah adalah adanya kenaikan dari suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, yang bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.

Pertumbuhan industri di Kabupaten Soppeng dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2016 s.d 2020) mengalami perkembangan setiap tahunnya. Berdasarkan pada Indikator Sosial Ekonomi Makro Kabupaten Soppeng Tahun 2019 tercatat bahwa Industri pengolahan telah berkontribusi sebesar Rp. 529.141.100.000 pada Tahun 2016 dan naik menjadi Rp. 710.969.200.000 pada tahun 2019. Hal ini didukung oleh penambahan jumlah unit industri yang bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2016

Persentase pertumbuhan industri sebesar 0,33%, kemudian agak turun pada tahun 2017 dan tahun 2018 menjadi 0,32%. Pada Tahun 2019 terus naik menjadi 0,40% dan pada tahun 2020 semakin bertumbuh menjadi 0,53%. Kenaikan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan industri di Kabupaten Soppeng mempunyai kecenderungan untuk memiliki nilai tukar dan output yang lebih tinggi daripada sektor lain meskipun inputnya sedikit.

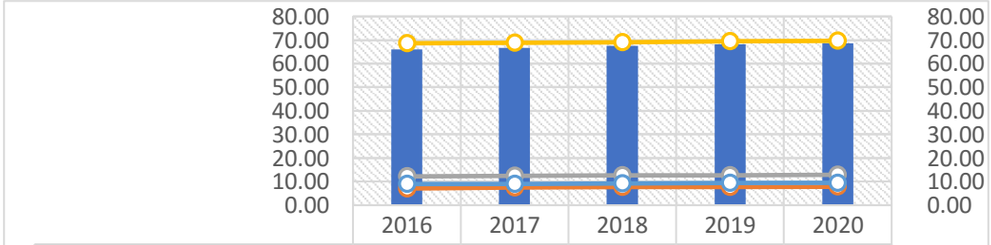
*2.1.2.2. **Kesejahteraan Sosial***

Pembangunan daerah dibidang kesejahteraan sosial dilakukan antara lain terhadap angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja.

2.1.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Grafik 2. 14. IPM dan Komponen pembentuk IPM Kabupaten Soppeng, Tahun 2016 – 2020



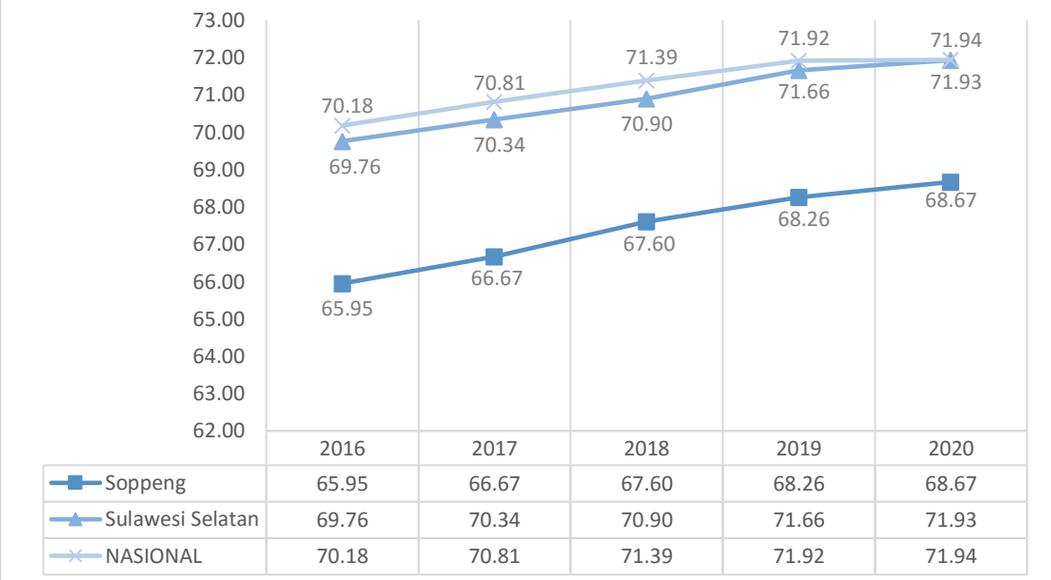
	2016	2017	2018	2019	2020
IPM	65.95	66.67	67.60	68.26	68.67
RATA-RATA LAMA SEKOLAH (TAHUN)	7.06	7.42	7.63	7.74	7.81
HARAPAN LAMA SEKOLAH (TAHUN)	12.20	12.33	12.57	12.73	12.90
UMUR HARAPAN HIDUP (TAHUN)	68.62	68.72	69.02	69.43	69.65
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (juta Rupiah/Orang/Tahun)	8.965	9.035	9.291	9.444	9.483

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2020

Selama lima tahun terakhir IPM Kabupaten Soppeng terus mengalami tren peningkatan dimana pada tahun 2020 IPM Kabupaten Soppeng sebesar 68,67 lebih tinggi dibanding tahun 2019 yang sebesar 68,26. Hal ini membuktikan bahwa slama kurun waktu lima tahun terakhir akses masyarakat Kabupaten Soppeng terhadap kesehatan, Pendidikan dan kehidupan yang layak semakin baik.

Jika dibandingkan dengan IPM Nasional dan Provinsi Sulawei Selatan Nilai IPM Kab. Soppeng masih sangat rendah bahkan berada pada peringkat 19 pada tahun 2020.

Grafik 2. 15. IPM Kabupaten Soppeng, Prov. Sul-Sel dan Nasional Tahun 2016 – 2020



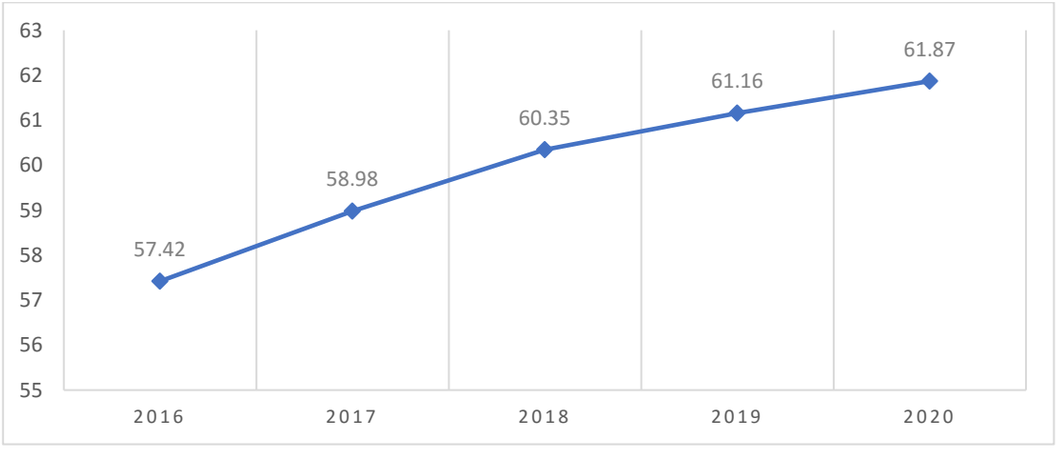
	2016	2017	2018	2019	2020
Soppeng	65.95	66.67	67.60	68.26	68.67
Sulawesi Selatan	69.76	70.34	70.90	71.66	71.93
NASIONAL	70.18	70.81	71.39	71.92	71.94

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2020

2.1.2.2.2. Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan bidang pendidikan. Indikator pembentuk indeks Pendidikan adalah Angka Melek Huruf dan Rata-rata lama Sekolah. Ukuran kinerja pembangunan di bidang pendidikan akan tertuang dalam besarnya pencapaian indeks pendidikan. Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 indeks Pendidikan di Kab. Soppeng mengalami peningkatan yang cukup baik, dimana pada tahun 2016 indeks Pendidikan sebesar 57,42 dan pada tahun 2020 sebesar 61,87. Hal ini membuktikan bahwa adanya peningkatan di sektor Pendidikan selama lima tahun terakhir, meskipun secara keseluruhan peningkatan ini belum dapat menjadi pengungkit yang cukup besar terhadap angka IPM di Kab. Soppeng. Adapun perkembangan indeks Pendidikan di Kab. Soppeng tahun 20216-2020 sebagai berikut:

Grafik 2. 16. Indeks Pendidikan Tahun 2016 – 2020

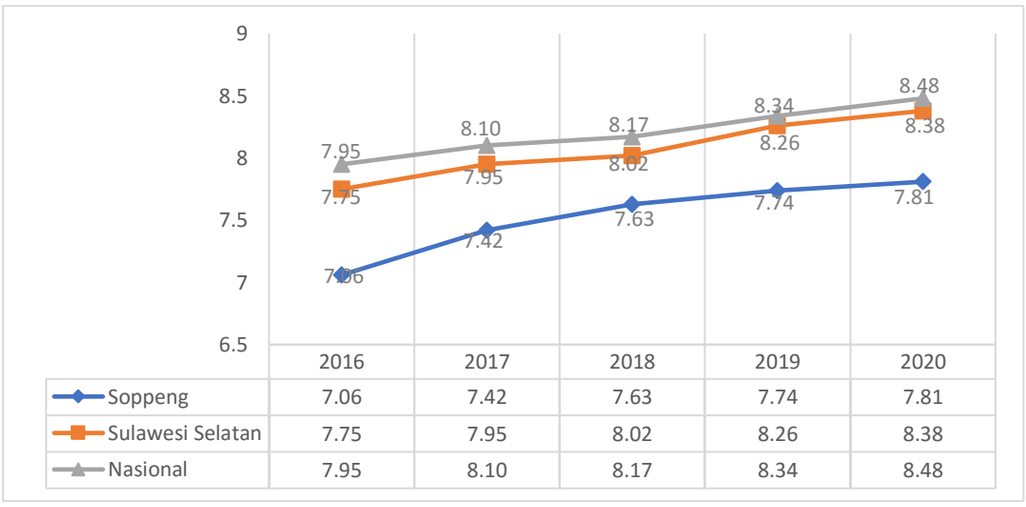


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2020

2.1.2.2.3. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Tahun 2020 angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Soppeng selama 7,81 tahun , meningkat dibanding tahun 2019 yang sebesar 7,74 tahun. Rata-rata lama sekolah pada tahun 2020 di Kabupaten Soppeng masih lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 8,38 tahun dan tingkat Nasional yang sebesar 8,48 tahun.

Grafik 2. 17. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Soppeng, Prov. Sul-Sel dan Nasional Tahun 2016 – 2020



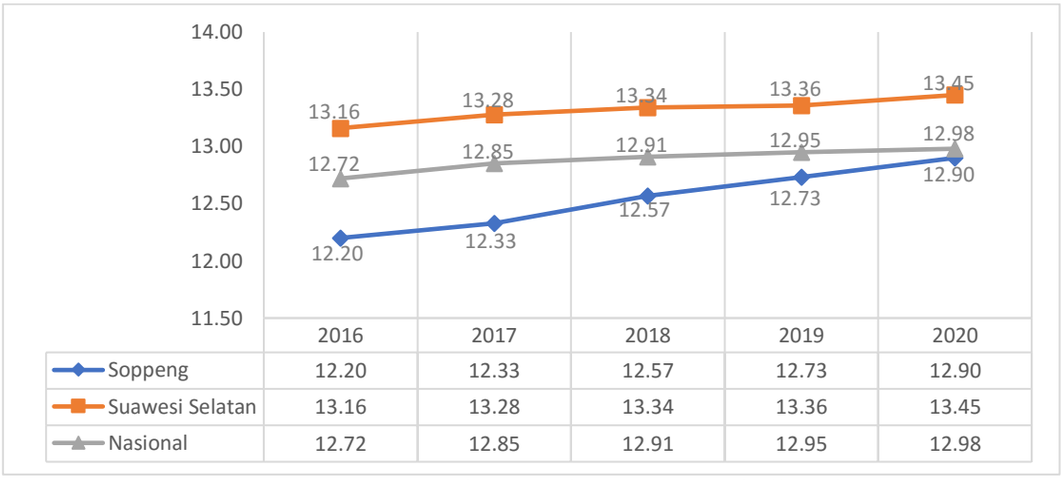
	2016	2017	2018	2019	2020
Soppeng	7.06	7.42	7.63	7.74	7.81
Sulawesi Selatan	7.75	7.95	8.02	8.26	8.38
Nasional	7.95	8.10	8.17	8.34	8.48

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2021

2.1.2.2.4. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah merupakan Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Angka harapan Lama Sekolah di Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 masih rendah yaitu sebesar 12,90 tahun. Bahkan ketika dibandingkan dengan provinsi dan nasional angka harapan lama sekolah Kabupaten Soppeng masih rendah.

Grafik 2. 18. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Soppeng, Prov. Sul-Sel dan Nasional Tahun 2016 – 2020



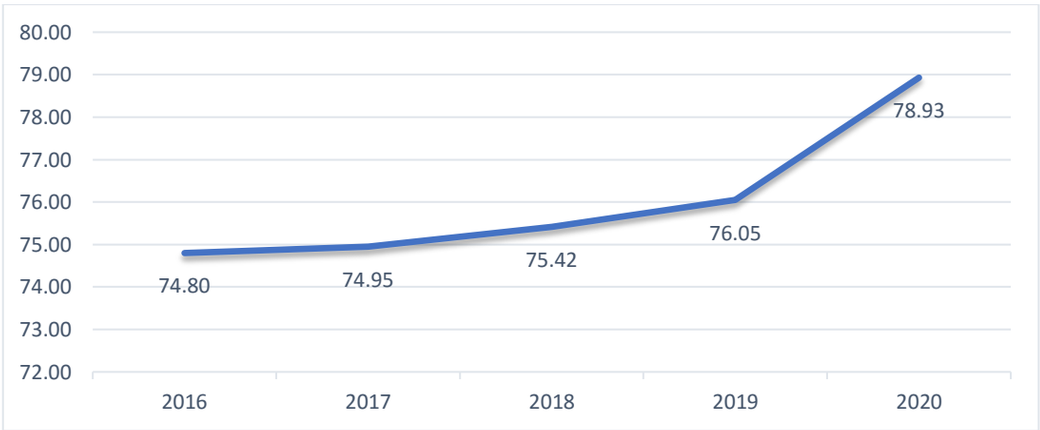
	2016	2017	2018	2019	2020
Soppeng	12.20	12.33	12.57	12.73	12.90
Suawesi Selatan	13.16	13.28	13.34	13.36	13.45
Nasional	12.72	12.85	12.91	12.95	12.98

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2020

2.1.2.2.5. Indeks Kesehatan

Indeks kesehatan merupakan pencerminan hasil pembangunan bidang kesehatan. Ukuran kinerja pembangunan di bidang kesehatan akan tertuang dalam besarnya pencapaian indeks kesehatan. Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 indeks kesehatan di Kab. Soppeng mengalami peningkatan yang cukup baik, dimana pada tahun 2016 indeks Kesehatan sebesar 74,80 dan pada tahun 2020 sebesar 78,93. Hal ini membuktikan bahwa adanya peningkatan di sektor Kesehatan selama selama kurun waktu tersebut, meskipun secara keseluruhan peningkatan ini belum dapat menjadi pengungkit yang cukup besar terhadap angka IPM di Kab. Soppeng. Adapun perkembangan indeks Kesehatan di Kab. Soppeng tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Grafik 2.19. Indeks kesehatan Tahun 2016 – 2020

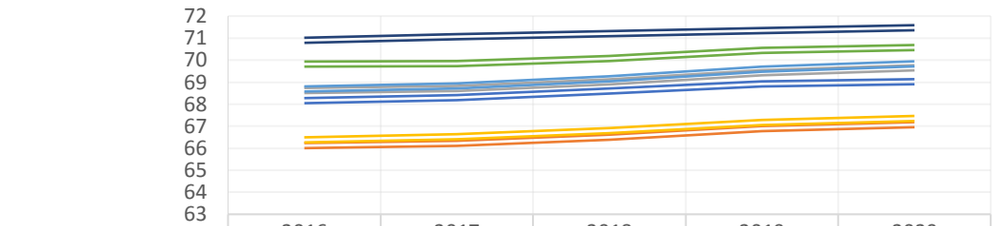


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2020

2.1.2.2.6. Umur Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Umur harapan hidup Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 selama 69,65 tahun, lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi yang sebeser 70,57 tahun dan Nasional yang sebesar 71,47 tahun. Walaupun lebih rendah dari provinsi dan nasional tetapi jika dibandingkan dengan wilayah disekitar, angka harapan hidup di Kabupaten Soppeng masih cukup baik. Angka harapan hidup ini sangat berkaitan dengan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Grafik 2.20. Umur Harapan Hidup Kabupaten Soppeng, Prov. Sul-Sel dan Nasional Tahun 2016 – 2020



	2016	2017	2018	2019	2020
Barru	68.16	68.30	68.60	68.91	69.02
Bone	66.12	66.22	66.50	66.88	67.07
Soppeng	68.62	68.72	69.02	69.43	69.65
Wajo	66.38	66.52	66.79	67.17	67.35
Sidrap	68.69	68.82	69.15	69.59	69.83
Sulawesi Selatan	69.82	69.84	70.08	70.43	70.57
Nasional	70.90	71.06	71.20	71.34	71.47

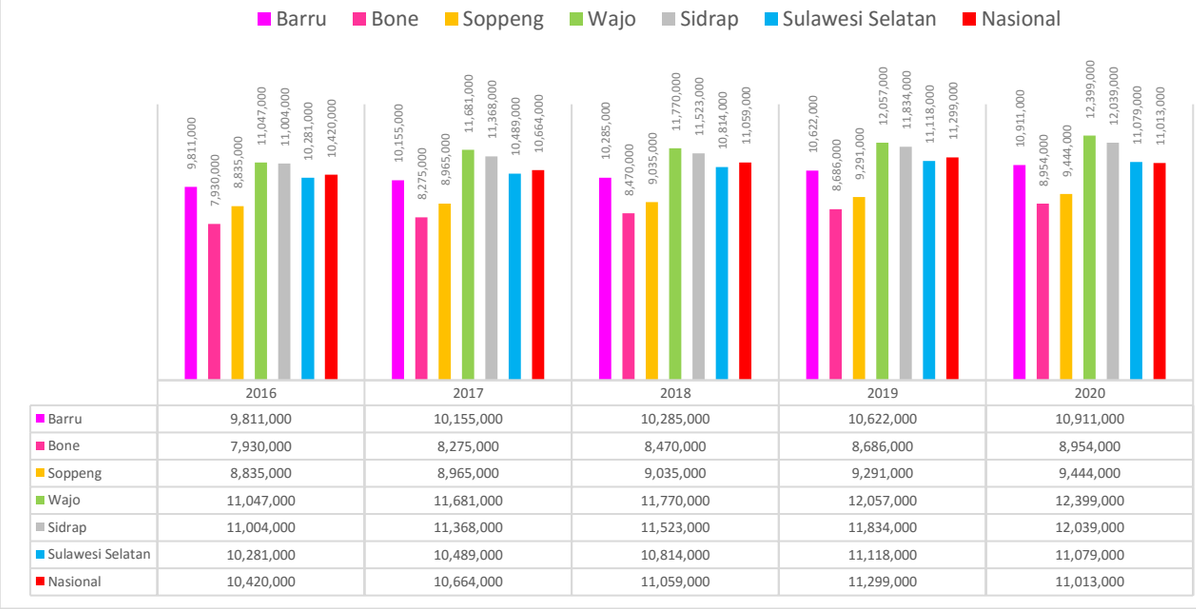
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2020

Penduduk Kabupaten Soppeng secara umum memiliki angka usia harapan hidup 69,65 tahun atau lebih. Angka usia harapan hidup tersebut dipengaruhi oleh kualitas kesehatan yang cenderung semakin baik ditunjang dengan kemudahan dan kesadaran penduduk dalam mengakses fasilitas kesehatan yang baik. Kesadaran masyarakat dalam menggunakan layanan kesehatan pun ditunjang oleh berbagai jaminan kesehatan, yaitu berupa Jaminan Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Dengan adanya berbagai jaminan kesehatan tersebut, mendorong kesadaran masyarakat untuk berobat ke fasilitas kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit.

2.1.2.2.7. Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran perkapita Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 sebesar Rp.9.444.000,- meningkat dibanding tahun 2019 yang sebesar Rp.9.291.000,-. Walaupun pada tahun 2020 meningkat dibanding tahun 2019, pengeluaran perkapita Kabupaten Soppeng masih lebih rendah dibanding dengan tingkat Provinsi yang sebesar Rp.11.079.000,- dan nasional yang sebesar Rp. 11.013.000,-. Bahkan pengeluaran perkapita Kabupaten Soppeng masih lebih rendah jika dibanding dengan beberapa wilayah lain disekitar.

Grafik 2. 21. Pengeluaran Perkapita Kabupaten Soppeng, Prov. Sul-Sel dan Nasional dan Daerah Sekitar Tahun 2016 – 2020



	2016	2017	2018	2019	2020
Barru	9,811,000	10,155,000	10,285,000	10,622,000	10,911,000
Bone	7,930,000	8,275,000	8,470,000	8,686,000	8,954,000
Soppeng	8,835,000	8,965,000	9,035,000	9,291,000	9,444,000
Wajo	11,047,000	11,681,000	11,770,000	12,057,000	12,399,000
Sidrap	11,004,000	11,368,000	11,523,000	11,834,000	12,039,000
Sulawesi Selatan	10,281,000	10,489,000	10,814,000	11,118,000	11,079,000
Nasional	10,420,000	10,664,000	11,059,000	11,299,000	11,013,000

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2020

2.1.2.2.8. Persentase Balita Gizi buruk

Balita gizi buruk atau malnutrisi adalah kondisi anak tidak menerima mineral, dan kalori yang cukup untuk membantu perkembangan organ vital. Pemenuhan gizi yang belum tercukupi baik sejak dalam kandungan hingga bayi lahir dapat menjadi pemicu gizi buruk.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan, persentase balita dengan gizi buruk pada tahun 2019 mencapai 0,008% dari total jumlah balita, mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 0,015% dari jumlah total balita sebanyak 13.156 balita. Jumlah balita gizi buruk mengalami kenaikan karena adanya penyakit penyerta yang diderita. Semua balita kasus gizi buruk yang ada di wilayah Kabupaten Soppeng mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan peningkatan. Pelayanan perawatan gizi buruk yang diberikan yakni pemantauan status gizi balita, pemberian makanan tambahan (PMT), dan pemberian edukasi berupa konseling dan penyuluhan kepada orang tua Balita.

Tabel 2.26. Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah balita gizi buruk	Balita	3	2	2	1	2
2	Jumlah balita	Balita	13.465	13.138	13.020	13.021	13.156
	% Balita Gizi Buruk	%	0,022	0,015	0,015	0,008	0,015

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

2.1.2.2.9. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Gizi kurang adalah gangguan yang diakibatkan kekurangan atau ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, aktifitas berfikir dan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan yang terjadi pada anak usia kurang dari lima tahun.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan, pada tahun 2020 prevalensi balita gizi kurang tercatat sebesar 3,28%, mengalami penurunan

dibandingkan tahun 2019 sebesar 3,31%. Pada tahun 2016 dan tahun 2017 untuk menentukan status gizi secara manual dengan menggunakan buku standar antropometri. Pada tahun 2018 hingga tahun 2020 menggunakan aplikasi e-PPGBM dengan standar Kemenkes, sehingga jumlah balita gizi kurang mengalami peningkatan. Prevalensi balita gizi kurang perlu terus ditekan melalui upaya peningkatan kualitas balita secara lebih baik yang disertai dengan kualitas lingkungan keluarga secara lebih baik pula.

Tabel 2.27.Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Banyaknya balita gizi kurang	Balita	142	180	449	431	431
2	Jumlah balita	Balita	13.465	13.318	13.020	13.021	13.156
	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	1,05	1,35	3,45	3,31	3,28

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

2.1.2.2.10. Cakupan Desa Siaga Aktif

Desa siaga merupakan salah satu bentuk reorientasi pelayanan dari sebelumnya bersifat sentralistik dan top down menjadi lebih partisipatif dan bottom up. Secara umum, tujuan pengembangan desa siaga adalah terwujudnya masyarakat desa yang sehat, peduli dan tanggap terhadap permasalahan di wilayahnya. Cakupan desa siaga aktif adalah desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveillance berbasis masyarakat dibandingkan dengan jumlah desa siaga yang dibentuk.

Cakupan desa siaga aktif di Kabupaten Soppeng telah mencapai 100% di tahun 2017, 2019 dan 2020. Keberadaan desa siaga aktif sangat berperan dalam menjaga kualitas masyarakat dikarenakan seluruh penduduk dapat mengakses pelayanan dasar setiap hari.

Tabel 2.28.Cakupan Desa Siaga Aktif di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Desa Siaga Aktif	Desa	69	70	68	70	70
2	Jumlah Desa Siaga yang dibentuk	Desa	70	70	70	70	70
	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	98,57	100	97,14	100	100

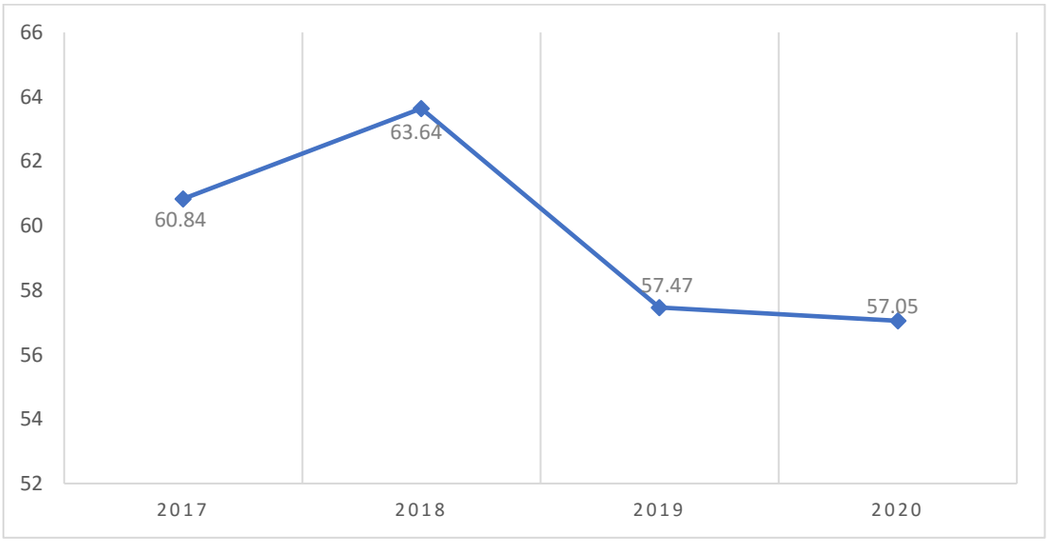
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

2.1.2.2.11. Angka partisipasi angkatan kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah Persentase Penduduk yang termasuk angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja inilah yang menunjukkan seberapa besar persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah.

TPAK yang tinggi adalah sangat baik untuk pembangunan suatu wilayah. Karena semakin tinggi TPAK, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi; semakin banyak pasokan tenaga kerja (labour supply) yang akan memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Grafik 2. 22. Tingkat Partisipasi Kerja (TPAK) Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

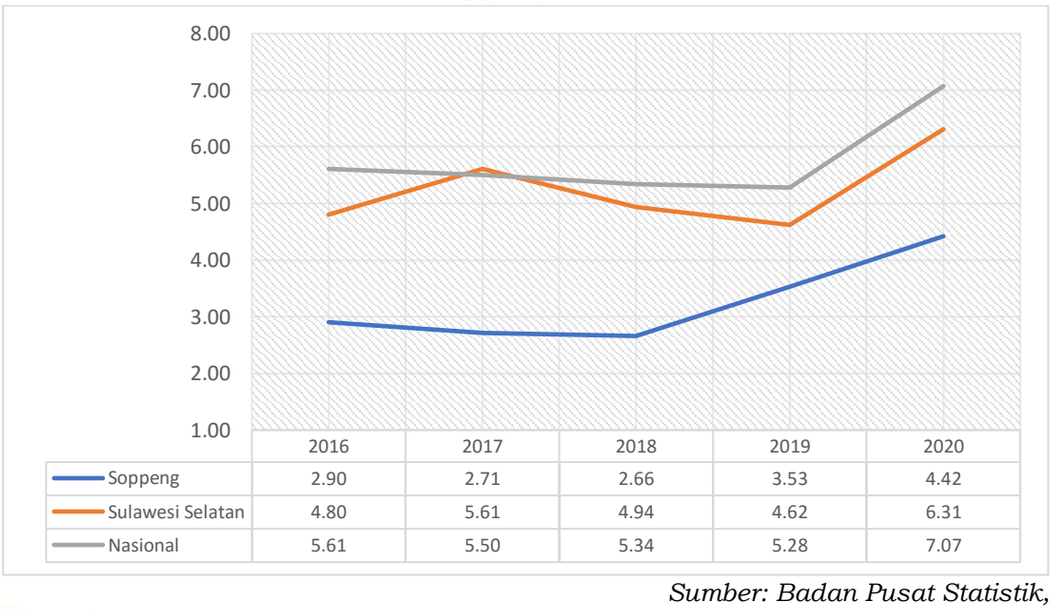
2.1.2.2.12. Tingkat pengangguran terbuka

Tingkat pengangguran terbuka Mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Indikator Tingkat Pengannguran Terbuka di kabupaten Soppeng mengalami penurunan tiap tahun sebelum meningkat menjadi 3.53% ditahun 2019. Meskipun demikian, untuk tahun 2021 target Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2.23%. Sementara itu, Indikator Tingkat Pengangguran terbuka itu jauh lebih rendah dari TPT Provinsi dan Nasional lima tahun terakhir.

TPT di Kabupaten Soppeng apabilah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dapat terlihat bahwa peningkatan ekonomi ditahun 2016 menunjukkan ada penurunan pada TPT ditahun 2016 tersebut dan tren-nya cenderung bertahan selam tiga tahun sebelum meningkat di tahun 2019 dan 2020.

Grafik 2.23. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020



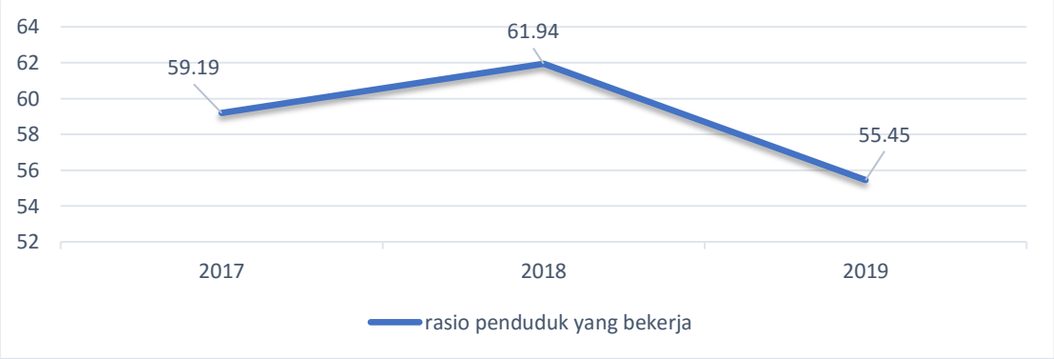
	2016	2017	2018	2019	2020
Soppeng	2.90	2.71	2.66	3.53	4.42
Sulawesi Selatan	4.80	5.61	4.94	4.62	6.31
Nasional	5.61	5.50	5.34	5.28	7.07

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

2.1.2.2.13. Rasio penduduk yang bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja. Selama tahun 2017 sampai dengan 2019 rasio penduduk yang bekerja mengalami fluktuatif. Dimana tahun 2017 sebesar 59,19% dan meningkat pada tahun 2018 sebesar 61,94%. Sementara itu pada tahun 2019 menurun dibanding tahun 2018 dimana pada tahun 2019 sebesar 55,45%.

Grafik 2.24. Rasio Penduduk Yang Bekerja Kabupaten Soppeng 2017-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab.Soppeng, 2019

2.1.2.2.14. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan adalah kondisi ideal yang ingin dicapai terkait dengan kebutuhan konsumsi pangan yang ideal yaitu beragam, bergizi seimbang dan Aman. Data Skor Pola Pangan Harapan diperoleh dari hasil survey konsumsi pangan yang dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Adapun hasil pencapaian skor pola pangan harapan tahun 2016-2020 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.29. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	% Angka Kecukupan Gizi (AKG) Bobot Masing-masing Kelompok Pangan	Skor	89.9	91.8	87.8	88.2	93.3
	Padi-Padian	Skor	25.00	53.5	25.0	25.0	25
	Umbi-Umbian	Skor	1.40	2.3	1.1	0.6	2.5
	Pangan Hewani	Skor	20.10	9.8	19.5	24.0	24
	Minyak dan Lemak	Skor	4.40	8.3	4.1	0.8	0,4
	Buah/Biji Berminyak	Skor	0.70	1.3	0.6	0.2	0,4
	Kacang-Kacangan	Skor	6.20	2.7	5.4	7.0	10
	Gula	Skor	2.10	4.1	2.1	0.6	1.1
	Sayur dan Buah	Skor	30.00	7.6	30.0	30.0	30
	Lain-lain	Skor	-	2.2	-	-	

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Berdasarkan tabel tersebut diatas, tahun 2016 capaian skor pola pangan harapan sebesar 89,9 dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 91,8. Pada tahun 2018 menurun menjadi 87,8 dan kembali meningkat pada tahun

2019 menjadi 88,2. Dan untuk Tahun 2020 skor pola pangan harapan sebesar 93,3. Kondisi ideal Pola Pangan Harapan yaitu sebesar 100. Capaian 2016-2020 masih belum mencapai kondisi ideal, yang menggambarkan bahwa kecenderungan konsumsi pangan masyarakat belum seimbang sesuai anjuran. Faktor ketersediaan, keterjangkauan dan kebiasaan masyarakat dalam konsumsi pangan menjadi faktor utama capaian skor pola pangan harapan.

*2.1.2.3. **Seni, Budaya dan Olahraga***

Kinerja Pembangunan daerah di bidang seni dan budaya diukur dari Indikator-indikator yang berhubungan dengan seni budaya dan olahraga.

Grup kesenian yang terbentuk di Kabupaten Soppeng terdiri atas beberapa sanggar seni dan kelompok seni budaya yang dibentuk baik oleh sekolah, desa maupun kelompok pemuda. Sanggar seni yang ada umumnya berfokus pada seni musik dan tari tradisional dan kontemporer. Sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap perkembangan seni dan budaya tradisional, pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah provinsi memberikan bantuan berupa alat dan dana pembinaan bagi sanggar seni yang telah terdaftar. Dengan adanya sanggar seni diharapkan semakin banyak generasi muda yang dapat menyalurkan hobby mereka di bidang seni, yang secara tidak langsung melakukan pelestarian budaya daerah.

Jumlah Grup Kesenian Per 10.000 penduduk adalah sebagai berikut:

Tabel 2.30. Jumlah Grup Kesenian Per 10.000 Penduduk Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah grup kesenian	Grup	5	5	12	15	15
2	Jumlah penduduk	Jiwa	252.677	241.430	236.156	237.115	238.967
	Jumlah Grup Kesenian Per 10.000 penduduk	Per 10.000 Penduduk	0,2	0,21	0,51	0,63	0,63

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Gedung kesenian sebagai wadah atau tempat berkumpul, berekspresi dan berkreasi para seniman penting untuk dimiliki oleh setiap daerah. Namun hingga akhir tahun 2020, Kabupaten Soppeng belum memiliki gedung kesenian.

Sementara Capaian Perkembangan Olahraga di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 31.Capaian Perkembangan Olahraga di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	Per 10.000 Penduduk	3,80	3,98	3,98	3,98	3,98
2	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk	Per 10.000 Penduduk	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Soppeng, 2020

Di Kabupaten Soppeng terdapat 96 klub olahraga yang tersebar di 8 Kecamatan, atau dengan perbandingan 3,80 per 10.000 penduduk. Sementara untuk gedung olahraga terdapat 1 gedung olahraga yang merupakan milik pemerintah daerah yaitu Gedung KONI dengan

perbandingan 0,04 per 10.000 penduduk. Angka ini belum termasuk gedung olahraga yang dikelola pihak swasta yang tersebar di berbagai tempat di setiap kecamatan.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Pelayanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.1.3.1.1. Bidang Urusan Pendidikan

2.1.3.1.1.1. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Satuan layanan PAUD yang dilksanakan pada suatu lembaga pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA). Untuk TK disebut sebagai PAUD Formal sedangkan di luarTK disebut sebagai PAUD Non Formal.

Tabel 2.32. Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak	Siswa	5.264	5.035	3.445	4.669	6.151
2	Jumlah anak usia 4 – 6 Tahun	Anak	10.469	10.345	6.744	9.805	9.601
	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	50,28	48,67	51,08	47,62	64,07

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2020 tercatat sebesar 64,07 persen, meningkat dibandingkan pada tahun 2016 hanya sebesar 50,28 persen. Peningkatan realisasi tersebut antara lain disebabkan oleh meningkatkan peran guru PAUD dan penilik PAUD dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya PAUD, sehingga penduduk yang berusia 4-6 tahun dapat berpartispasi pada PAUD.

2.1.3.1.1.2. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu perbandingan antara rasio jumlah siswa, pada jenjang usia manapun, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK adalah indikator yang dianggap paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Pada APK, korelasinya yaitu semakin tinggi angka partisipasi kasar menunjukkan semakin besar jumlah siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan, walaupun dengan mengesampingkan aspek usia dari siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan.

Tabel 2. 33.Angka Partisipasi Kasar Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah semua siswa n dijenjang SD/MI/Paket A	Siswa	22.026	21.780	21.343	21.652	21.043
2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun	Jiwa	22.900	22.441	21.521	22.355	21.697
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	96,18	97,05	99,17	96,86	96,99

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Pada tahun 2016 Angka Partisipasi Kasar pada jenjang Pendidikan SD/MI/Paket A di Kabupaten Soppeng adalah 96,18 persen meningkat menjadi 96,99 persen pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2016 Angka Partisipasi Kasar pada jenjang Pendidikan SMP/Mts/Paket B pada tahun 2016 adalah 86,66 persen dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 93,59 persen. Realisasi pada tahun 2020 belum mencapai target yaitu 100 persen dikarenakan masih ada siswa putus sekolah. Solusi ke depan untuk mencapai target dan mempertahankan kinerja tersebut adalah memberikan biaya personil bagi peserta didik yang rawan putus sekolah akibat faktor ekonomi, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Tabel 2. 34. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Paket B Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah semua siswa dijenjang SMP/MTS/Paket B	Siswa	11.723	11.468	10.789	11.077	10.837
2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun	Jiwa	13.528	13.364	12.473	11.892	11.579
	Angka Partisipasi Kasar (APk) SMP/MTS/Paket B	%	86,66	85,81	86,5	93,15	93,59

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

2.1.3.1.1.3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Apabila dibandingkan dengan Angka Pendidikan Kasar (APK), APM dianggap lebih baik karena mampu menggambarkan partisipasi penduduk kelompok usia tertentu yang berada di jenjang pendidikan tertentu. Perhitungan APM di suatu jenjang pendidikan diambil dari pembagian jumlah siswa dengan kelompok umur tertentu (7 – 12 tahun untuk SD/MI dan 13 – 15 tahun untuk SMP/MTs) dibagi dengan jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu. Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yg bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu. Berikut tabel yang menunjukkan angka partisipasi murni di Kabupaten Soppeng tahun 2016-2020.

Tabel 2. 35.Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah siswa usia 7-12 Tahun dijenjang SD/MI/Paket A	Siswa	19.349	19.517	19.245	19.314	19.285
2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun	Jiwa	22.900	22.441	21.521	22.355	21.697
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	84,49	86,97	89,42	86,4	88,88

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A persentase penduduk usia sekolah yang bersekolah tepat waktu mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 Angka Partisipasi Murni pada jenjang Pendidikan SD/MI/Paket A adalah 84,49 persen, meningkat menjadi 88,88 persen pada tahun 2020.

Tabel 2. 36.Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah siswa usia 13-15 Tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B	Siswa	9.512	9.913	9.354	8.139	8.089
2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun	Jiwa	13.528	13.364	12.473	11.892	11.579
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	70,31	74,18	74,99	68,44	69,86

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B dari tahun 2016 sampai 2018 persentasenya mengalami kenaikan. Selanjutnya menurun pada tahun 2019 da 2020. Pada tahun 2016 APM pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B adalah 70,31 persen dan menurun menjadi 69,86 persen pada tahun 2020.

Belum tercapainya target APM 100 persen, baik pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A maupun pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B antara lain disebabkan oleh masih adanya peserta didik yang putus sekolah dan anak tidak sekolah (ATS), masih adanya penduduk usia 7-12 tahun yang tinggal di daerah perbatasan kabupaten terdata sebagai penduduk Kabupaten Soppeng namun bersekolah di luar Kabupaten Soppeng.

2.1.3.1.1.4. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. APS merupakan indikator dasar untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan, khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Sebaliknya, semakin rendah APS menunjukkan semakin besar penduduk yang tidak mampu merasakan layanan pendidikan.

Tabel 2.37. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah murid usia 7-12 thn	Murid	19.349	19.517	21.343	19.314	21.616
2	Jumlah penduduk usia 7-12 thn	Jiwa	22.900	22.441	21.521	22.355	21.697
	Angka partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	84,49	86,97	99,17	86,4	96,63

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A menunjukkan peningkatan dari tahun 2016 sebesar 84,49 persen menjadi 96,63 persen pada tahun 2020. Tingginya APS menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan dasar dan partisipasi penduduk usia sekolah semakin baik.

Tabel 2.38. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah murid usia 13-15 thn	Murid	9.512	9.913	10.789	8.139	9.150
2	Jumlah penduduk usia 13-15 thn	Jiwa	13.528	13.364	12.473	11.892	11.579

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
	Angka partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	70,31	74,18	86,5	68,44	79,02

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A, Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B tahun 2016 sebesar 70,31 persen menjadi 79,02 persen pada tahun 2020. Adanya persentase penurunan pada tahun 2019 disebabkan oleh masih adanya siswa putus sekolah jenjang SMP dan masih adanya penduduk usia 13-15 tahun yang tinggal di daerah perbatasan kabupaten terdata sebagai penduduk Kabupaten Soppeng namun bersekolah di luar Kabupaten Soppeng.

2.1.3.1.1.5. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah merupakan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun. Angka putus sekolah merupakan perbandingan antara jumlah murid putus sekolah dengan seluruh jumlah murid dalam jenjang pendidikan tertentu. Hasil perhitungan angka putus sekolah digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa yang putus sekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu. Semakin tinggi angka putus sekolah maka semakin banyak siswa yang tinggal kelas. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI dan Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.39. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Capaian Kinerja APS SD/MI	Jiwa	22.026	21.780	21.343	21.385	21.043
2	Jumlah Seluruh APS SD/MI	Jiwa	19	7	40	67	1
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,086	0,032	0,187	0,313	0,005

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Pada tahun 2016 Angka Putus Sekolah di Kabupaten Soppeng pada jenjang Pendidikan SD/MI (usia 7-12 tahun) adalah 0,086 persen naik menjadi 0,005 persen pada tahun 2020. Angka Putus Sekolah (APts) SD terealisasi sebesar 0,005 persen dari target nol persen dengan capaian 99,995 persen, sehingga belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 2. 40. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Capaian Kinerja APS SMP/MTs	Jiwa	11.723	11.468	10.789	10.745	10.837
2	Jumlah Seluruh APS SMP/MTs	Jiwa	40	14	163	135	3
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,34	0,12	1,51	1,26	0,03

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Data menunjukkan bahwa APS pada jenjang usia 13-15 pada tahun 2016 adalah 0,34 persen, meningkat menjadi 0,03 persen pada tahun 2020. Realisasi sebesar 0,03 persen dari target 0 persen dengan capaian 99,97 persen, belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini antara lain disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga dan kesulitan akses ke sekolah. Solusi ke depan diupayakan bagi peserta didik yang rawan putus sekolah akibat faktor ekonomi diberikan biaya personil sebagaimana diatur di dalam

Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standat Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

2.1.3.1.1.6. Angka Kelulusan

Angka kelulusan merupakan perbandingan antara jumlah siswa yang lulus ujian akhir atau ujian nasional dengan jumlah siswa yang mengikuti ujian nasional tersebut. Angka kelulusan yang tinggi menunjukkan prestasi dari sebuah institusi pendidikan.

Tabel 2.41. Angka Kelulusan (AL) SD/MI Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	Siswa	3.897	4.137	3.574	3.577	3.628
2	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya	Siswa	3.922	4.139	3.582	3.625	3.629
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	99,36	99,95	99,78	98,68	99,97

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Berdasarkan data, angka kelulusan SD/MI di Kabupaten Soppeng dalam kurun waktu 2016-2020 cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 angka kelulusan pada jenjang Pendidikan SD/MI sebesar 99,36 persen dan meningkat menjadi 99,97 persen pada tahun 2020. Penyebab utama belum tercapainya angka kelulusan 100 persen dikarenakan tidak semua siswa yang terdaftar pada tingkat tertinggi jenjang SD mengikuti ujian akhir antara lain disebabkan sakit pada saat ujian dan tidak dapat lagi mengikuti ujian susulan.

Tabel 2.42. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs	Siswa	3.682	4.476	3.796	3.635	3.408
2	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya	Siswa	3.682	4.477	3.846	3.718	3.411
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	99,98	98,7	97,77	99,91

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Sementara angka kelulusan untuk jenjang SMP/MTs di Kabupaten Soppeng dalam kurun waktu 2016-2020 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2016 angka kelulusan mencapai 100 persen tetapi menurun menjadi 99,91 persen pada tahun 2020. Kecenderungan penurunan pada tingkatan SMP/MTs mengindikasikan kualitas pendidikan di Kabupaten Soppeng yang menurun. Faktor dari guru, murid, orang tua, dan berbagai kebijakan dalam bidang pendidikan berperan dalam menurunkan angka kelulusan. Angka kelulusan jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MTs tingkat kelulusannya harus diupayakan agar mencapai 100 persen pada tahun berikutnya.

2.1.3.1.1.7. Angka Melanjutkan (AM)

Angka melanjutkan (AM) sekolah merupakan perbandingan antara jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan ke tingkat berikutnya dengan jumlah lulusan pada tahun sebelumnya pada tingkat pendidikan sebelumnya. Angka melanjutkan ini menunjukkan seberapa besar minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Tabel 2.43. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs	Siswa	2.871	3.624	3.579	3.715	3.758
2	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI Tahun ajaran sebelumnya	Siswa	3.897	4.137	3.574	3.577	3.628
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	73,67	87,6	100,14	103,86	103,58

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Pada tahun 2016 Angka Melanjutkan (AM) jenjang SD/MI/ ke SMP/MTs adalah 73,67 persen dan meningkat menjadi 103,58 persen pada tahun 2020. Capaian realisasi sebesar 103,58 persen melebihi target yang ditetapkan sebesar 100 persen, yang berarti semua lulusan SD/MI dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya yaitu SMP/Mts. Tingginya capaian terjadi karena adanya siswa jenjang pendidikan SD yang bersekolah di luar Kabupaten Soppeng, tapi melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP di Kabupaten Soppeng.

Tabel 2.44. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA	Siswa	3.013	n/a	n/a	3.875	3.259
2	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs Tahun ajaran sebelumnya	Siswa	3.682	4.476	3.796	3.635	3.408
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	81,83	n/a	n/a	106,6	95,63

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Angka Melanjutkan (AM) jenjang SD/MI/ ke SMP/MTs pada tahun 2016 adalah 81,83 persen dan meningkat menjadi 95,63 persen pada tahun 2020. Capaian realisasi sebesar 95,63 persen belem mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 persen. Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan adanya siswa jenjang SMP yang bersekolah di Kabupaten Soppeng namun melanjutkan jenjang SMA di luar Kabupaten Soppeng.

2.1.3.1.1.8. Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)

Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) adalah angka menunjukkan jumlah capaian kinerja penduduk usia di atas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis dari total jumlah penduduk usia di atas 15 tahun, di Kabupaten Soppeng pada tabel berikut:

Tabel 2.45. Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Capaian Kinerja Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf	Jiwa	240.612	197.290	184.554	181.791	159.290
2	Jumlah Seluruh Penduduk yang berusia > 15 tahun Melek Huruf	Jiwa	241.207	197.997	185.266	182.483	182.033
	Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (tidak buta aksara)	%	99,75	99,64	99,62	99,62	87,51

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Dari tabel diatas terlihat bahwa angka melek huruf di Kabupaten Soppeng tahun 2016 mencapai 99,75 persen yang juga berarti dari 241.207 orang jumlah penduduk usia di atas 15 tahun hanya 0,25 persen diantaranya

yang belum mampu membaca dan menulis. Jumlahnya tersebut mengalami penurunan menjadi 87,51% atau sekitar 12,49 persen yang belum mampu membaca dan menulis pada tahun 2020. Untuk meningkatkan pencapaian target kedepannya Pemerintah daerah akan mengupayakan penduduk usia 15-24 tahun yang tidak dapat membaca untuk berpartisipasi pada Pendidikan Kesetaraan.

2.1.3.1.1.9. Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik

Fasilitas pendidikan SD kondisi bangunan baik pada tahun 2020 terealisasi sebesar 85,73% dari target 90,92%. Penyebab tidak tercapainya target tersebut adalah masih ada bangunan sekolah yang sudah tua dan belum dilakukan rehabilitasi karena terbatasnya kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya, diupayakan fasilitas pendidikan jenjang SD yang mengalami kerusakan minimal sedang untuk dilakukan rehabilitasi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kondisi Bangunan Baik (Kelas) Sekolah Pendidikan SD/MI pada tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.46. Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik (Kelas) Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (Kelas)	Unit	1.545	1.481	1.389	1.514	1.514
2	Jumlah seluruh sekolah SD/MI (Kelas)	Unit	1.654	1.654	1.613	1.766	1.766
	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik (Kelas)	%	93,41	89,54	86,11	85,73	85,73

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Kondisi Bangunan Baik (Kelas) Sekolah Pendidikan SMP/MTs pada tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 47. Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan Kondisi Bangunan Baik (Kelas) Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (Kelas)	Unit	424	392	333	492	492
2	Jumlah seluruh sekolah SMP/MTs (Kelas)	Unit	441	441	412	601	601
	Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan Kondisi Bangunan Baik (Kelas)	%	96,15	88,89	80,83	81,86	81,86

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

2.1.3.1.1.10. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah jenjang tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia sekolah. Berdasarkan data terlihat bahwa pada tahun 2020 rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) adalah 103,38 persen, meningkat dari tahun 2016 sebesar 93,88 persen. Jumlah sekolah sudah cukup banyak untuk menampung jumlah penduduk usia sekolah 7-12 tahun. Capaian target akan dipertahankan dengan mengupayakan sekolah-sekolah yang sudah ada tetap beroperasi sesuai ketentuan.

Tabel 2.48. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah sekolah (SD/MI +SMP/MTs)	Unit	342	342	341	344	344
2	Jumlah penduduk usia (7 s.d 12) thn + (13 s.d 15) thn	Jiwa	36.428	35.805	33.994	34.247	33.276
	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar		93,88	95,52	100,31	100,45	103,38

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

2.1.3.1.1.11. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio guru/murid menggambarkan perbandingan jumlah guru terhadap murid. Hal ini untuk melihat apakah guru yang tersedia cukup untuk melayani atau membimbing murid yang ada. Dengan melihat rasio ini maka dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan guru dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi murid-murid yang ada di Kabupaten Soppeng, sekaligus juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2.49. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Guru (SD/MI +SMP/MTs)	Guru	2.589	3.451	3.885	4.452	3.756
2	Jumlah Murid (SD/MI+SMP/MTs)	Murid	28.861	29.430	28.599	32.130	31.880
	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar		0,08	0,12	0,013	0,14	0,12

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

2.1.3.1.1.12. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1-/D-IV

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV merupakan perbandingan antara jumlah guru yang berijazah minimal S1/D-IV dengan total seluruh guru yang ada. Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1/DIV tentu akan memiliki kompetensi dan pemahaman tentang materi yang lebih baik. Kemampuan materi seorang guru akan bertambah seiring dengan latar belakang pendidikan yang diterima, dengan pendidikan yang lebih tinggi maka pemahaman akan materi pendidikan akan menjadi lebih baik.

Tabel 2. 50. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV	Guru	2.415	3.151	3.535	3.929	3.513
2	Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	Guru	2.720	3.181	3.885	4.452	3.756
	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	%	88,79	99,06	90,99	88,25	93,53

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Pada tahun 2016 persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV adalah 88,79% dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 93,53 persen atau dari 3.756 jumlah guru yang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA terdapat 3.513 jumlah guru yang telah berijasah kualifikasi S1/D-IV. Realisasi 93,53 persen guru yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D-IV belum mencapai target 100%. Tidak tercapainya target dikarenakan ada beberapa guru yang sudah S1 namun tidak linear dengan pendidikan guru

sehingga masih dianggap belum sarjana S1. Adapula beberapa guru yang belum sarjana namun sudah tidak berminat mengikuti pendidikan S1/D-IV karena sudah mendekati usia pensiun.

2.1.3.1.2. Bidang Urusan Kesehatan

2.1.3.1.2.1. Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup adalah Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

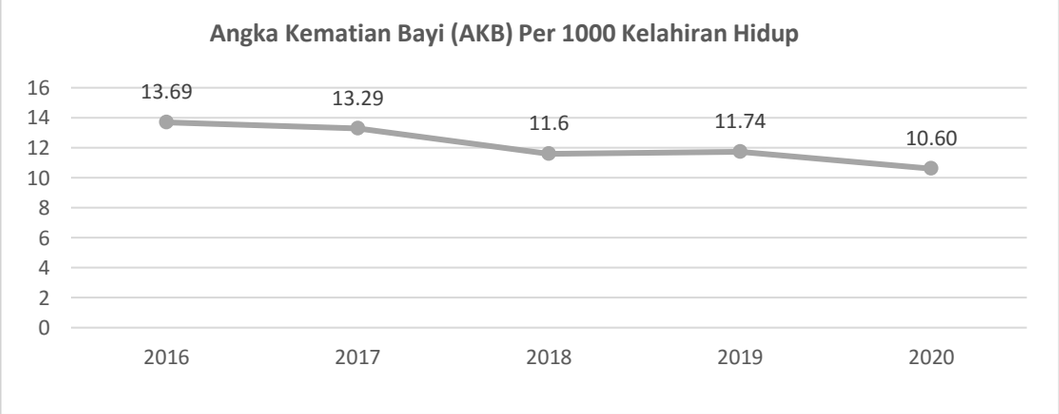
Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, AKB per 1000 kelahiran di Kabupaten Soppeng dari tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan kecenderungan menurun. Dari seluruh kematian bayi pada tahun 2016 hingga tahun 2020, sebagian besar kematian bayi dikontribusi pada periode neonatal. Pada tahun 2016 proporsi kematian neonatal mencapai 74,36% dari seluruh angka kematian bayi. Pada tahun 2017 sebesar 73,68%, tahun 2018 sebesar 96,88%, tahun 2019 sebesar 74,29% dan tahun 2020 sebesar 70,37%. Kasus kematian bayi yang terjadi di Kabupaten Soppeng akibat kelainan bawaan sejak lahir, gangguan pernapasan, atau mengalami penyakit berat yang sudah komplikasi. Sehingga upaya untuk meningkatkan pelayanan Kesehatan pada bayi baru lahir menjadi sangat strategis. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 2. 51. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun)	Jiwa	39	38	32	35	31
2	Jumlah Kelahiran Hidup	Jiwa	2.849	2.860	2.759	2.982	2.938
	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup	%	13,69	13,29	11,6	11,74	10,60

sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

Grafik 2. 25. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

Dari grafik diatas diketahui jumlah AKB per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2016 adalah sebesar 13,69% dan angkanya menurun pada tahun 2020 menjadi sebesar 10,6%. Angka ini kerap digunakan sebagai acuan

untuk menilai baik-buruknya kondisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan di suatu wilayah. Bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua bayi. Kemajuan dalam penurunan AKB menunjukkan derajat kesehatan di Kabupaten Soppeng dan merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

2.1.3.1.2.2. Angka kelangsungan hidup bayi

Angka kelangsungan hidup bayi adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (1-angka kematian bayi). Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Angka kelangsungan hidup bayi di Kabupaten Soppeng tahun 2016-2020, pada tabel berikut:

Tabel 2.52. Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun)	Jiwa	39	38	37	35	31
2	Jumlah Kelahiran Hidup Bayi	Jiwa	2810	2822	2722	2947	2907
3	Jumlah Kelahiran Hidup	Jiwa	2849	2860	2759	2982	2938
	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	%	98,63	98,67	98,66	98,83	98,94

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

Dari tabel di atas tergambar, bahwa Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Soppeng cukup tinggi, pada tahun 2020 mencapai angka 98,94 persen atau dari 2.938 bayi yang lahir hidup hanya 31 bayi diantaranya yang meninggal berumur kurang dari 1 tahun.

2.1.3.1.2.3. Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Balita merupakan upaya penekanan jumlah kematian terhadap anak dibawah lima tahun. Realisasi yang diperoleh dari data kasus kematian Balita yang berumur dibawah lima tahun pada tahun 2020 berjumlah 1,02 jiwa dalam 1.000 balita lebih baik dari tahun 2016 dengan kematian 3,2 jiwa dalam 1.000 balita. Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup menunjukkan penurunan sebesar 2,18%. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.53. Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kematian Balita (berumur kurang 5 tahun)	Jiwa	9	4	2	3	3
2	Jumlah Kelahiran Hidup	Jiwa	2.849	2.860	2.759	2.982	2.938
	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	%	3,2	1,4	0,7	1	1,02

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

2.1.3.1.2.4. Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Neonatal menunjukkan jumlah kematian neonatal yang terjadi pada bayi baru lahir yang berumur 0 sampai 28 hari per 1000 kelahiran hidup. Angka Kematian Neonatus pada tahun 2018 hingga tahun 2021 ditargetkan 0 kasus, tapi hingga tahun 2020 masih ada kasus yang

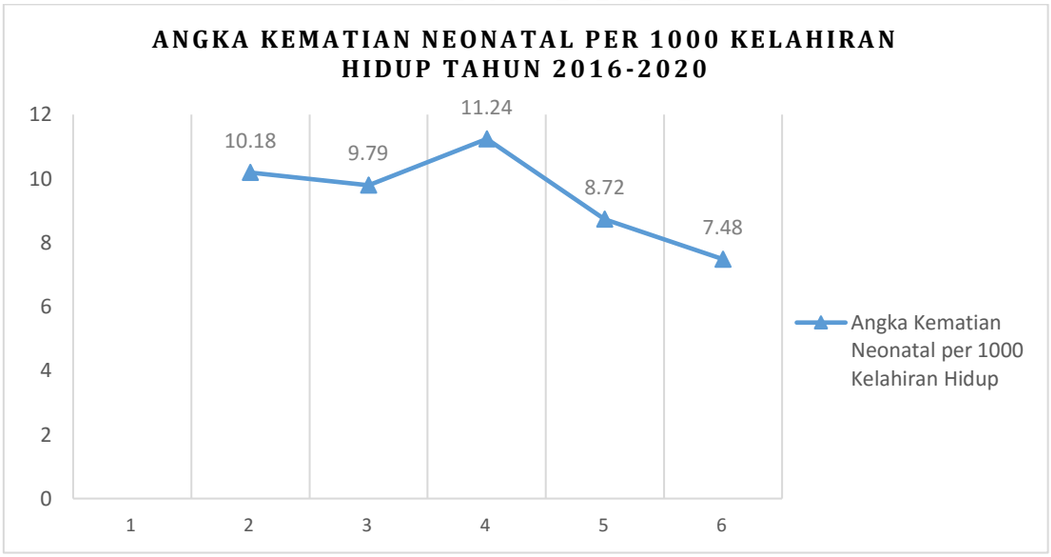
terjadi. Rata-rata neonatus yang meninggal mengalami kelainan kongenital dan komplikasi dengan penyakit lain. Berat bayi yang terlahir rendah dengan kongenital, sekitar 20% bayi akan meninggal pada minggu pertama dalam masa kehidupannya.

Tabel 2.54. Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kematian Neonatal (berumur kurang 1 bulan)	Jiwa	29	28	31	26	22
2	Jumlah Kelahiran Hidup	Jiwa	2849	2860	2759	2982	2938
	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	10,18	9,79	11,24	8,72	7,48

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

Grafik 2. 26. Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

2.1.3.1.2.5. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka kematian ibu merupakan jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas. Angka kematian ibu pada tahun 2020 mencapai 1,21 per 100.000 kelahiran hidup, lebih tinggi jika dibandingkan capaian pada tahun 2016 yaitu 1,05. Sehingga masih diperlukan berbagai upaya yang berkelanjutan untuk menurunkan angka tersebut. Risiko komplikasi yang terjadi pada ibu hamil dapat berkurang jika sebelum hamil ibu sehat dan bergizi baik, selama kehamilan melakukan pelayanan antenatal ke petugas kesehatan minimal 4 kali, saat persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten, kemudahan dalam mengakses layanan rujukan, serta ibu dan bayi mendapatkan layanan neonatal dan nifas.

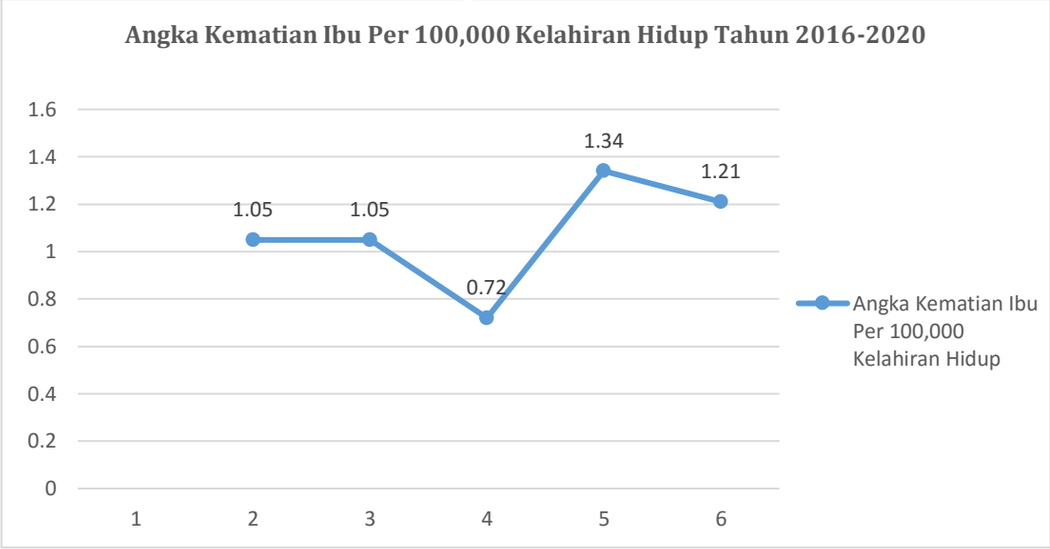
Tabel 2.55. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas	Jiwa	3	3	2	4	3
2	Jumlah kelahiran hidup	Jiwa	2.849	2.860	2.759	2.982	2.398

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	Per 100.000 Kelahiran Hidup	1,05	1,05	0,72	1,34	1,21

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

Grafik 2. 27. Diagram Angka Kematian Ibu per 100,000 Kelahiran Hidup Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

2.1.3.1.2.6. Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, sehingga diharapkan strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu. Berdasarkan data pada tahun 2020 rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Soppeng 24,93 yang artinya setiap 1000 balita dilayani 25 posyandu. Sedangkan pada tahun 2016 rasio posyandu hanya 24,29, yang artinya setiap 1000 balita dilayani 24 posyandu.

Tabel 2.56. Rasio Posyandu per Satuan Balita Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah posyandu	Unit	327	327	327	327	328
2	Jumlah balita	Jiwa	13.465	13.138	13.020	13.021	13.156
	Rasio Posyandu per Satuan Balita	Per Satuan Balita	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

2.1.3.1.2.7. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk

Puskesmas, klinik, dan puskesmas pembantu merupakan sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Indikator rasio puskesmas per 1.000 penduduk adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap puskesmas. Sampai tahun 2020, puskesmas di Kabupaten Soppeng

berjumlah 17 buah, poliklinik 3 buah dan Puskesmas Pembantu 44 buah. Rasio puskesmas, klinik, dan Pustu per satuan penduduk di Kabupaten Soppeng pada tahun 2016 adalah 0,00024, hal ini berarti dari 61 puskesmas jangkauan layanannya adalah 1 puskesmas dapat menjangkau 4.142 penduduk. Sedangkan pada tahun 2020 rasionya meningkat menjadi 0,27, hal ini berarti dari 64 puskesmas jangkauan layanannya adalah 1 puskesmas dapat menjangkau 3.733 penduduk. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 57.. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah puskesmas, poliklinik, pustu	Unit	61	61	64	64	64
2	Jumlah penduduk	Jiwa	252.677	241.430	236.156	237.115	238.967
	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk	Per Satuan Penduduk	0,00024	0,00025	0,00027	0,00027	0,00027

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

2.1.3.1.2.8. Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk

Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga medis profesional serta sarana kedokteran yang permanen, dan asuhan keperawatan yang berkesinambungan. Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Semakin banyak rumah sakit yang tersedia, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, sehingga rumah sakit memiliki peranan penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Data rasio rumah sakit per satuan penduduk menunjukkan tingkat cakupan pelayanan kesehatan berupa rumah sakit terhadap jumlah penduduk di wilayah tertentu. Data rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 yaitu 0,00418. Jumlah Penduduk dari tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi sampai saat ini Rumah Sakit yang ada di Kabupaten Soppeng hanya 1 yaitu RSUD La Temmamala.

Tabel 2.58. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah sakit	Unit	1	1	1	1	1
2	Jumlah penduduk	Jiwa	252.677	241.430	236.156	237.115	238.967
	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk	Per Satuan Penduduk	0,00396	0,00414	0,00423	0,00422	0,00418

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

2.1.3.1.2.9. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Dokter umum dan dokter spesialis yang dimaksud merupakan dokter yang memberikan pelayanan kesehatan di Kabupaten Soppeng, baik berstatus PNS maupun bukan. Berdasarkan data pada tahun 2016 jumlah dokter tercatat 41 orang yang bertugas di Rumah sakit dan Puskesmas, dengan demikian jika dibanding dengan jumlah penduduk pada tahun 2016, maka rasio dokter per satuan penduduk di Kabupaten Soppeng adalah 0,16,

meningkat pada tahun 2020 dimana dokter yang tercatat adalah 98 orang atau dengan rasio 0,41. Angka tersebut dipengaruhi adanya rekrutmen yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng, sehingga terjadi penambahan tenaga dokter dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2. 59. Rasio Dokter per satuan Penduduk Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah dokter	Orang	41	51	60	80	98
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	252.677	241.430	236.156	237.115	238.967
	Rasio Dokter per Satuan Penduduk	Per Satuan Penduduk	0,16	0,21	0,25	0,34	0,41

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

2.1.3.1.2.10. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Tenaga medis yang dimaksud merupakan tenaga yang memberikan pelayanan medis kepada masyarakat. Berdasarkan data pada tahun 2020 jumlah tenaga medis memiliki rasio 1 tenaga medis terhadap 445 jiwa masyarakat memiliki rasio lebih besar dibanding dengan tahun 2016 dengan rasio 1 tenaga medis dalam 1.113 jiwa masyarakat. Hal tersebut dipengaruhi adanya rekrutmen yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng, sehingga terjadi penambahan tenaga medis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain tenaga medis berstatus Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Kabupaten Soppeng juga berusaha mengatasi kekurangan tenaga medis dengan merekrut tenaga medis berstatus tenaga kontrak yang dibiayai oleh APBD Kabupaten.

Tabel 2. 60. Rasio tenaga medis per satuan Penduduk Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tenaga medis	Orang	227	239	567	667	537
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	252.677	241.430	236.156	237.115	238.967
	Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk	Per Satuan Penduduk	0,9	0,99	2,4	2,81	3,49

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

2.1.3.1.2.11. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Komplikasi kebidanan merupakan kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang mengancam jiwa ibu dan/atau bayi. Komplikasi dalam kehamilan meliputi abortus, hyperemesis gravida rum, perdarahan per vaginal, hipertensi dalam kehamilan (pre eklampsia, eklampsia), kehamilan lewat waktu, ketuban pecah. Komplikasi dalam persalinan meliputi kelainan letak/presentasi janin, partus macet/distosia, hipertensi dalam kehamilan (pre eklampsia, eklampsia), perdarahan pasca persalinan, infeksi berat/sepsis, kontraksi dini/persalinan premature, kehamilan ganda. Komplikasi dalam nifas meliputi hipertensi dalam kehamilan (pre eklampsia, eklampsia), infeksi nifas, perdarahan nifas.

Tabel 2.61. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif	Jiwa	437	451	472	473	424
2	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan	Jiwa	437	451	472	473	424
	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK). Penanganan definitif adalah penanganan/pemberian tindakan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan setiap kasus komplikasi kebidanan. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional.

2.1.3.1.2.12. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan

Komplikasi dan kematian ibu maternal dan bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada masa di sekitar persalinan, hal ini disebabkan pertolongan tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan (profesional). Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan pada tahun 2016 hingga tahun 2020 mencapai 100%.

Tabel 2.62. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan	Jiwa	2.858	2.867	2.770	2.978	2.506
2	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin	Jiwa	2.858	2.867	2.770	2.978	2.506
	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

2.1.3.1.2.13. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Universal Child Immunization (UCI) adalah suatu keadaan tercapainya pemberian imunisasi dasar secara lengkap pada semua bayi. Imunisasi dasar pada bayi dilakukan pada saat bayi masih berusia kurang dari 12 bulan, dengan pemberian imunisasi meliputi BCG, DPT, Polio, hepatitis dan campak. Persentase Desa/Kelurahan mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi diperoleh dari perhitungan jumlah desa/kelurahan yang mencapai 80% pada bayi dibagi jumlah seluruh desa/kelurahan.

Tabel 2.63. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Desa / Kelurahan UCI	Desa/ Kelurahan	64	65	68	70	58
2	Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan	Desa/ Kelurahan	70	70	70	70	70
	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	91,43	92,86	97,14	100,00	82,86

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) pada tahun 2016 mencapai 91,43% dan mengalami peningkatan hingga tahun 2019 mencapai 100%. Namun pada tahun 2020, hanya mencapai 82,86%. Hal disebabkan oleh karena dihentikannya pelayanan imunisasi bayi selama beberapa bulan karena Pandemi Covid-19. Pelayanan imunisasi dilaksanakan kembali pada masa *new normal*, tapi kecendrungan orang tua belum membawa bayi untuk mendapatkan imunisasi karena masih takut tertular Covid-19.

Balita Gizi Buruk merupakan faktor anak terlahir dengan BBLR dan adanya penyakit yang menyertai sejak lahir (kelainan bawaan). Hal ini dapat dicapai karena meningkatnyakesadaran masyarakat untuk memeriksakan kehamilannya sejak dini pada petugas kesehatan atau sarana kesehatan yang tersedia sehingga anak dapat terlahir dengan sehat dan atau mencegah terjadinya kelahiran dengan BBLR yang menjadi faktor utama terjadinya gizi buruk.Pemantauan balita gizi buruk dilakukan dengan kunjungan rumah serta melakukan pemantauan status gizi dan konseling. Adapun perawatan kasus balita gizi buruk di puskesmas dilakukan sesuai tatalaksana gizi buruk dengan pemberian Formula 100.

Tabel 2.64. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan	Balita	3	2	2	1	2
2	Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan	Balita	3	2	2	1	2
	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

2.1.3.1.2.14. Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)

Kalori adala Potensi Pembangunan Wilayahh satuan unit kandungan panas atau energi. Akan tetapi, lebih tepatnya kalori adalah jumlah energi yang Anda dapatkan dari makanan dan minuman, atau energi yang kita bakar melalui aktivitas sehari-hari. Sederhananya, kalori adalah energi yang dibutuhkan tubuh agar bisa beraktivitas dan menjalankan fungsinya dengan baik. Standar proporsi kalori yang di tetapkan di indonesia sebesar 2.100 Kkal/Kapita/hari. Namun di Kabupaten Soppeng masyarakat dengan asupan kalori dibawah tingkat konsumsi minimum sebesar 2,43% di

tahun 2016 dan 2,97% di tahun 2020. Hal tersebut membuktikan bahwa asupan kalori yang diterima masyarakat Soppeng tinggal sedikit yang belum menerima asupan kalori dibawah standar. Namun tetap perlu mendapatkan perhatian pemerintah melalui petugas kesehatan.

Tabel 2.65. Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Banyaknya penduduk yang tingkat konsumsinya lebih rendah dari 2.100 Kkal/kapita/hari)	Jiwa	327	327	327	326	325
2	Jumlah balita	Jiwa	13.465	13.138	13.020	13.021	10.928
	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	%	2,43	2,49	2,51	2,5	2,97

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

2.1.3.1.2.15. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak

Penyakit Campak adalah suatu infeksi virus yang sangat menular, yang ditandai dengan demam, batuk, konjungtivitis (peradangan selaput ikat mata/konjungtiva) dan ruam kulit. Penyakit ini disebabkan karena infeksi virus campak golongan Paramixovirus. Sehingga salah satu cara untuk mencegah penyakit campak adalah dengan memberikan imunisasi campak. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak pada tahun 2018 telah mencapai 100%. Namun capaian tersebut menurun pada tahun 2019 dan tahun 2020. Beberapa hal yang mempengaruhi hal tersebut antara lain adanya penolakan dari orangtua anak terkait issu halal haram dari vaksin, dan penghentian pelayanan imunisasi di Posyandu selama beberapa bulan pada masa pandemi covid-19.

Tabel 2.66. Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak	Jiwa	2.958	2.792	3.073	3.079	2.854
2	Jumlah anak usia 1 tahun	Jiwa	3.076	3.076	3.073	3.282	3.225
	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak	%	96,16	90,77	100	93,81	88,5

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

2.1.3.1.2.16. Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk

Non polio AFP (Acute Flaccid Paralysis) adalah kasus lumpuh layuh akut yang diduga kasus polio sampai dibuktikan dengan pemeriksaaan laboratorium bukan kasus polio. Pada tahun 2016, 2017 dan 2020 tidak ditemukan kasus lumpuh layu dibawah umur 15 tahun di Kabupaten Soppeng. Hal ini disebabkan keberhasilan petugas kesehatan, terutama petugas munisasi yang memberikan pelayanan imunisasi polio pada bayi dan balita. Namun pada tahun 2018 dan 2019 masih ditemukan kasus SFP non

polio, oleh karena itu pemantauan terhadap kasus lumpuh layu adalah upaya pencegahan yang harus terus ditingkatkan.

Tabel 2.67. Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kasus SFP non Polio yang dilaporkan	Kasus	0	0	5	2	0
2	jumlah penduduk < 15 tahun	Jiwa	52.881	49.538	49.320	48.962	48.652
	Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk	Per 100.000 Penduduk	0	0	10,14	4,08	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

2.1.3.1.2.17. Cakupan balita pneumonia yang ditangani

Jumlah kasus Balita dengan Pneumonia ditangani di Kabupaten Soppeng pada Tahun 2020 sebanyak 90 kasus dan semua mendapatkan pelayanan dari tenaga medis. Hal ini menunjukkan masih perlu peningkatan penyuluhan kepada masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat serta menjauhkan anak- anak dari perokok, mengingat pneumonia masih merupakan permasalahan yang perlu penanggulangan yang serius mengingat dampak yang timbul sangat mempengaruhi derajat kesehatan terutama pada kelompok umur balita. Cakupan balita pneumonia yang ditangani pada tahun 2016 adalah sebesar 13,82% dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar 10,48%.

Tabel 2.68. Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penderita pnemonia balita yang ditangani	Jiwa	312	192	374	324	90
2	Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita	Jiwa	2257	2263	858	859	859
	Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani	%	13,82	8,48	43,59	37,72	10,48

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA pada tahun 2020 adalah 36,25. Realisasi Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB didapat dari perhitungan jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun sejumlah 236 orang dibagi jumlah orang yang diperkirakan menderita TBC BTA dalam kurun waktu yang sama sejumlah 651 orang dikali 100% (seratus persen).

Tabel 2.69. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati	Jiwa	167	304	370	379	236
2	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+)	Jiwa	418	486	651	632	651
	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	%	39,95	62,55	56,84	59,97	36,25

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

Tantangan yang dihadapi adalah masih banyaknya kasus yang tidak ditemukan. Tabel di atas menunjukkan bahwa dari estimasi orang yang menderita TB sebanyak 651, baru 36,25% yang ditemukan dan diobati di tahun 2020. Capaian tersebut menurun dari tahun-tahun sebelumnya sebesar 59,97% pada tahun 2019, 56,84% pada tahun 2018 dan 62,55% pada tahun 2017. Kasus yang ditemukan terbilang masih rendah. Mereka yang tidak ditemukan dan diobati hingga sembuh berpotensi besar menularkan pada orang lain. Inilah yang menyebabkan kasus TB masih tinggi, di samping faktor penyebab lainnya seperti lingkungan, kultur, dan lain-lain. Dibutuhkan dukungan dari semua sektor, bukan hanya pemerintah daerah, tetapi juga dari swasta, dan masyarakat sendiri.

2.1.3.1.2.18. Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Tuberkulosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TB (*Mycobacterium Tuberculosis*). Sebagian besar kuman TB menyerang paru, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya. Tingkat prevalensi Tuberkulosis di Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 sebesar 98,76 dari 100.000 penduduk dan meningkat dari tahun 2016 sebesar 220 kasus atau 87,07% dari 100.000 penduduk. Penemuan pasien merupakan langkah pertama dalam kegiatan tatalaksana pasien TB. Penemuan dan penyembuhan pasien TB menular, secara bermakna akan dapat menurunkan kesakitan dan kematian akibat TB, penularan TB di masyarakat dan sekaligus merupakan kegiatan pencegahan penularan TB yang paling efektif di masyarakat.

Tabel 2. 70.Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)	Kasus	220	304	370	379	236
2	Jumlah Penduduk pada kurun waktu yang sama	Jiwa	252.677	241.430	236.156	237.115	238.967
	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis	Per 100.000 Penduduk	87,07	125,92	156,68	159,84	98,76

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

2.1.3.1.2.19. Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Mortalitas karena TB adalah jumlah kematian yang disebabkan oleh TB pada orang dengan HIV negatif sesuai dengan revisi terakhir dari ICD-10 (*International Classification of Diseases*). Angka kematian karena Tuberkulosis di Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 sebesar 0,00 per 100.000 penduduk menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2. 71.Tingkat kematian karena Tuberkulosis per 100.000 penduduk Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pasien TB yang meninggal	Jiwa	6	8	8	7	0
2	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	Jiwa	252.677	241.430	236.156	237.115	238.967

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis	Per 100.000 Penduduk	2,37	3,31	3,39	2,95	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

2.1.3.1.2.20. Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS

Perkiraan jumlah semua kasus TB merupakan insiden dalam per 100.000 penduduk dibagi dengan 100.000 dikali dengan jumlah penduduk. Misalnya: perkiraan insiden di suatu wilayah adalah 200 per 100.000 penduduk dan jumlah penduduk sebesar 1.000.000 orang maka perkiraan jumlah semua kasus TB adalah (200:100.000) x 1.000.000 = 2.000 kasus. Program nasional pengendalian tuberkolosis mulai menerapkan strategi pengobatan jangka pendek dengan pengawasan langsung (Directly Observed Treatment Short-course, DOTS) yang dilaksanakan di Puskesmas secara bertahap.

Tabel 2.72. Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS	Jiwa	167	304	370	379	236
2	Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada	Jiwa	418	486	651	632	651
	Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS	%	39,95	62,55	56,84	59,97	36,25

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

Di Kabupaten Soppeng proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS pada tahun 2016 sebanyak 39,95% dan menurun di tahun 2020 menjadi 36,25%.

2.1.3.1.2.21. Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS

Adalah jumlah semua kasus TB yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan. Dengan demikian angka ini merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan semua kasus dan angka pengobatan lengkap semua kasus. Angka ini menggambarkan kualitas pengobatan TB. Angka kesembuhan semua kasus pada tahun 2016 sebesar 18,56% dan meningkat pada tahun 2019 sebesar 88,13%. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya kinerja petugas dalam penanganan penyakit Tuberkulosis.

Tabel 2.73. Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh	Jiwa	31	84	343	334	0
2	Jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati	Jiwa	167	304	370	379	236

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
	Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS	%	18,56	27,63	92,7	88,13	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

2.1.3.1.2.22. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Penyakit DBD merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh virus Dengue melalui Vektor nyamuk. Jumlah kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 sebanyak 112 kasus. Semua kasus tersebut telah dilakukan penanganan dengan baik sehingga tidak terjadi kematian akibat penyakit DBD. Jumlah kasus pada tahun 2020 lebih rendah jika dibandingkan tahun 2019. Meskipun tren ini menurun akan tetapi DBD perlu tetap diwaspadai di tengah pandemi infeksi Covid-19. Masyarakat diimbau untuk melakukan gerakan 3M plus dan menjadi juru pemantik jentik (jumantik) dalam lingkungan keluargasebagai langkah pencegahan. Jumantik bertanggung jawab memantau jentik nyamuk yang ada di lingkungan rumah.

Tabel 2.74. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP	Jiwa	471	35	130	85	112
2	Jumlah penderita DBD yang ditemukan	Jiwa	471	35	130	85	112
	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

2.1.3.1.2.23. Penderita diare yang ditangani

Jumlah kasus penyakit diare di Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 sebanyak 4.229 kasus, mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Penderita diare yang ditangani dari tahun 2016 hingga 2020 adalah sebesar 100%, hal ini menunjukkan seluruh penderita diare dapat ditangani oleh tenaga medis. Kualitas lingkungan yang sehat, pola hidup bersih serta pemanfaatan jamban keluarga dapat membantu menurunkan angka kesakitan terutama penyakit diare. Kabupaten Soppeng dinyatakan telah mencapai status sebagai Kabupaten yang sudah bebas dari perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF). Masyarakat telah menerapkan budaya Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS).

Tabel 2.75. Penderita Diare yang ditangani di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disaran kesehatan dan kader	Jiwa	10.008	7.051	8.375	7.651	4.229
2	Jumlah perkiraan penderita diare	Jiwa	12.220	12.220	6.115	6.123	6.123
	Penderita Diare yang Ditangani	%	81,9	57,7	136,96	124,96	60,07

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

2.1.3.1.2.24. Angka kejadian Malaria

Penyakit malaria merupakan penyakit yang menular yang disebabkan oleh vektor nyamuk anopheles. Pada tahun 2018, 2019 dan 2020 tidak ada kasus malaria di Kabupaten Soppeng. Jika ada kasus, hanya dari pendatang dari daerah endemik malaria. Indikator angka kejadian malaria yaitu kasus pada masyarakat lokal.

Tabel 2.76. Angka Kejadian Malaria di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk yang menderita malaria	Jiwa	12	10	0	0	0
2	Jumlah penduduk pada pertengahan tahun	Jiwa	252.677	241.430	236.156	237.115	238.967
	Angka Kejadian Malaria	Per 100.000 Penduduk	4,75	4,14	0	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

2.1.3.1.2.25. Tingkat kematian akibat malaria

Berdasar dari kejadian malaria di Kabupaten Soppeng pada tahun 2016 hingga 2020 tidak terjadi kematian, hal tersebut dikarenakan semua kasus tertangani dengan baik oleh petugas kesehatan.

2.1.3.1.2.26. Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida

Kejadian malaria merupakan hal yang wajib diwaspadai, untuk itu perlu dilakukan penanganan pencegahan penyakit malaria, salah satu cara yang dilakukan yaitu penggunaan kelambu berinsektisida. Namun di kabupaten Soppeng kejadian malaria bukanlah endemic, melainkan kejadian yang diperoleh dari kunjungan masyarakat dari luar daerah terutama dari Papua. Sehingga penularan penyakit malaria di kabupaten Soppeng tidak dianggap sebagai endemic dan suplai kelambu berinsektisida sudah tidak ada.

2.1.3.1.2.27. Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat

Kejadian malaria di Kabupaten Soppeng pada tahun 2016 dan 2017dilakukan penanganan dengan pemberian obat anti malaria yang diberikan dengan tepat terutama terhadap balita dengan demam dan terduga malaria. Adapun pada tahun 2018, 2019 dan 2020 tidak ada balita yang demam karena malaria, sehingga tidak ada pemberian obat anti malaria pada anak balita.

Tabel 2.77. Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penderita diobati dengan ACT	Jiwa	12	10	0	0	0
2	Jumlah penderita positif	Jiwa	12	10	0	0	0
	Proporsi Anak Balita Dengan Demam yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria yang Tepat	%	100	100	0	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

2.1.3.1.2.28. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi

Persentase prevalensi HIV/AIDS diperoleh dari jumlah pasien HIV dan AIDS pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 15 kasus (0,0063% dari total populasi). Angka tersebut merupakan angka tertinggi selama 5 (lima) tahun terakhir. Pada Tahun 2020 terdapat 7 pasien HIV/AIDS atau 0,0029 dari total populasi. Untuk menekan jumlah kasus HIV/AIDS maka perlu dilakukan penanggulangan. Upaya yang dilakukan antara lain survei pada masyarakat rawan (resiko tinggi) tertular HIV/AIDS, sosialisasi kepada masyarakat baik yang beresiko terinfeksi ataupun yang sudah terinfeksi HIV/AIDS. Pelatihan bagi petugas pada sarana RS,VCT, CST dan petugas laboratorium, serta menerapkan layanan VCT dan CST di RSUD Latemmamala.

Tabel 2.78. Prevalensi HIV/AIDS (Persen) Dari Total Populasi Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasien HIV dan AIDS	Jiwa	8	8	11	15	7
2	Jumlah penduduk	Jiwa	252.677	241.430	236.156	237.115	238.967
	Prevalensi HIV/AIDS (Persen) Dari Total Populasi	%	0,0032	0,0033	0,0047	0,0063	0,0029

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

2.1.3.1.2.29. Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir

Penggunaan kondom merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mencegah penyakit HIV/AIDS. Namun tidak ada data yang diperoleh terkait pengguna kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir tidak dapat diketahui. Karena tidak adanya pemantauan penggunaan kondom yang dilakukan petugas saat ada hubungan seks.

2.1.3.1.2.30. Proporsi jumlah penduduk usia 15- 24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS

Pemberian pengetahuan tentang HIV/AIDS pada usia 15-24 tahun harus dilakukan sebagai upaya pencegahan penyakit HIV/AIDS di masyarakat. Capaian indikator terhadap proporsi jumlah penduduk usia 15-24 yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS belum dapat disimpulkan, karena data tidak tersedia. Petugas kesehatan telah melakukan penyuluhan HIV/AIDSyang maksimal terhadap siswa SMP dan SMA. Namun belum menyentuh bagi yang berusia 15-24 tahun tetapi tidak mengenyam pendidikan yang lebih baik atau tidak sekolah.

2.1.3.1.2.31. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di puskesmas dibagi jumlah seluruh masyarakat miskin. Masyarakat miskin perlu mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Hal ini merupakan tujuan pokok upaya kesehatan dengan meningkatkan pemerataan dan mutu upaya kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna serta terjangkau oleh segenap anggota masyarakat.

Data jumlah seluruh miskin yang digunakan pada indikator ini adalah data Penerima Bantuan Iuran (PBI). PBI adalah peserta jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan. Adapun cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.79. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1	Jiwa	25.155	40.439	194.681	201.641	139.922
2	Jumlah seluruh miskin di Kab/Kabupaten	Jiwa	136.844	153.940	194.681	201.641	174.668
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	18,38	26,27	100,00	100,00	80,11

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

Capaian rujukan terhadap masyarakat miskin pada tahun 2020 adalah sebesar 80,11%, menurun jika dibandingkan dengan rujukan yang diberikan pada tahun 2018 dan 2019 yaitu 100%. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan tidak semua masyarakat miskin menggunakan layanan puskesmas. Selanjutnya, perlu upaya memaksimalkan sistem rujukan puskesmas dan penguatan lintas sektor serta mendorong masyarakat untuk datang ke puskesmas bukan hanya karena sakit, tapi untuk memeriksakan kesehatan rutin juga.

2.1.3.1.2.32. Cakupan kunjungan bayi

Cakupan kunjungan bayi merupakan salah satu upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan dalam memantau tingkat kesehatan bayi lahir. Cakupan kunjunan bayi pada tahun 2016-2020 sebesar 100%.

Tabel 2.80. Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	Jiwa	2.916	2.631	2.638	2.724	2.938
2	Jumlah seluruh bayi lahir hidup	Jiwa	2.916	2.631	2.638	2.724	2.938
	Cakupan Kunjungan Bayi	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

2.1.3.1.2.33. Cakupan puskesmas

Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan salah satu unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten. Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama dan terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan, harus melakukan upaya kesehatan wajib (*basic six*) dan beberapa upaya kesehatan pilihan yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, tuntutan, kemampuan dan inovasi serta kebijakan pemerintah daerah setempat. Puskesmas memiliki fungsi sebagai berikut: 1) pusat pembangunan berwawasan kesehatan; 2) pusat pemberdayaan masyarakat; 3) pusat

pelayanan kesehatan masyarakat primer; dan 4) pusat pelayanan kesehatan perorangan primer.

Jumlah Puskesmas di Kabupaten Soppeng hingga tahun 2016 sebanyak 17 (tujuh belas) unit, yang terdiri dari 6 (enam) Puskesmas Rawat Inap, 11 (sebelas) Puskesmas Non Rawat Inap yang tersebar di 8 kecamatan di Kabupaten Soppeng. Cakupan puskesmas dari tahun 2016 hingga 2020 adalah sebesar 212,50%.

2.1.3.1.2.34. Cakupan pembantu puskesmas

Jumlah Puskesmas di Kabupaten Soppeng sebanyak 17 (tujuh belas) unit terdiri dari 6 (enam) Puskesmas Rawat Inap, 11 (sebelas) Puskesmas Non Rawat Inap, dengan Jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu) sebanyak 44 (empat puluh empat) unit yang memberikan pelayanan kesehatan di 70 Desa/Kelurahan. Dan ditunjang dengan Poskesdes sebanyak 68 (enam puluh delapan) unit dengan pelayan KIA/KB. Cakupan puskesmas pembantu dari tahun 2016 hingga 2020 adalah sebesar 62,86%.

2.1.3.1.2.35. Cakupan kunjungan Ibu hamil K4

Cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang sudah mendapatkan pelayanan antenatal sesuai dengan standar yakni paling sedikit empat kali sesuai jadwal yang dianjurkan di tiap trimester, dengan distribusi sekali pada tri semester pertama, sekali pada trimester ke-2 dan dua kali pada trimester ke-3 dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahunAngka ini dapat dimanfaatkan untuk melihat kualitas pelayanan kesehatan kepada ibu hamil. Melalui ANC (K4) diharapkan deteksi dini dan perawatan kehamilan dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas. Dengan demikian komplikasi yang terjadi pada saat kehamilan dapat dicegah sehingga kematian pada ibu hamil dan janinnya dapat juga dicegah.

Tabel 2.81. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4	Jiwa	2.769	2.757	2.736	2.936	2.733
2	Jumlah sasaran ibu hamil	Jiwa	3.008	3.134	3.044	3.280	3.548
	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	92,05	87,97	89,88	89,51	77,03

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 pada tahun 2020 sebesar 77,03%. Jumlah ibu hamil diambil dari data riil (K1 Kunjungan pertama) dan belum semua ibu hamil yang ada pada tahun tersebut memperoleh pelayanan antenatal K4 karena umur kehamilan belum mencapai trimester ketiga (9 bulan) dan ada juga ibu hamil dari tahun sebelumnya baru mendapatkan pelayanan antenatal K4 pada tahun tersebut karena umur kehamilannya baru mencapaitrimster ketiga (9 bulan). Capaian kunjungan ibu haml telah mencapai target SPM, hal ini berarti akses pelayanan kepada sasaran ibu hamil sudah baik.

2.1.3.1.2.36. Cakupan pelayanan nifas

Cakupan Pelayanan ibu nifas adalah pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca persalinan oleh tenaga kesehatan.Untuk deteksi dini komplikasi pada ibu nifas diperlukan

pemantauan pemeriksaan terhadap ibu nifas dengan melakukan kunjungan nifas minimal sebanyak 3 kali dengan distribusi waktu: 1) kunjungan nifas pertama (KF1) pada 6 jam setelah persalinan sampai 3 hari; 2) kunjungan nifas ke-2 (KF2) dilakukan pada minggu ke-2 setelah persalinan; dan 3) kunjungan nifas ke-3 (KF3) dilakukan minggu ke-6 setelah persalinan.

Tabel 2.82. Cakupan pelayanan nifas di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar	Jiwa	2.878	2.721	2.807	2.921	2.880
2	Jumlah seluruh ibu nifas	Jiwa	2.858	2.867	2.770	2.978	3.386
	Cakupan Pelayanan Nifas	%	100,70	94,91	101,34	98,09	85,1

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

Cakupan Pelayanan ibu nifas di Kabupaten Soppeng pada Tahun 2020 sebesar 85,1%. Jumlah ibu nifas yang memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar pada tahun berkenaan tidak sama dengan jumlah ibu nifas, bisa lebih banyak atau lebih sedikit. Hal ini dikarenakan terkadang pada tahun berkenaan belum mencapai pelayanan 3 kali sehingga pelayanannya berpindah ke tahun berikutnya.

2.1.3.1.2.37. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

Neonatus dengan komplikasi adalah neonatus dengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan, dan kematian. Neonatus dengan komplikasi seperti asfiksia, ikterus, hipotermia, tetanus neonatorum, infeksisepsis, trauma lahir, BBLR berat badan lahir rendah 2500 gram, sindroma gangguan pernafasan, kelainan kongenital.Neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani secara definitif oleh tenaga kesehatan kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan. Jumlah neonatal resiko tinggi dengan komplikasi yang ditangani pada tahun 2020 sebanyak 216. Cakupan Neonatal dengan komplikasi semua ditangani oleh tenaga kesehatan.

Tabel 2.83. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani	Jiwa	199	190	188	278	216
2	Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada	Jiwa	199	190	188	278	216
	Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

2.1.3.1.2.38. Cakupan pelayanan anak balita

Cakupan pelayanan anak balita merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan balita. Jumlah perkiraan sasaran anak balita pada tahun 2020 di Kabupaten Soppeng Potensi Pembangunan Wilayah sebanyak 15.846 dan yang mendapatkan pelayanan

sebanyak 11.113 (70,13%). Belum semua anak balita memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali karena belum waktunya (sesuai umur).

Tabel 2.84. Cakupan pelayanan anak balita di Kabupaten Soppeng tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali	Jiwa	11.716	11.132	12.086	8.610	11.113
2	Jumlah seluruh anak balita	Jiwa	22.164	17.878	17.874	13.068	15.846
	Cakupan Pelayanan Anak Balita	%	52,86	62,27	67,62	65,89	70,13

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

2.1.3.1.2.39. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 -24 bulan keluarga miskin

Cara pemberian makanan pada bayi yang baik dan benar adalah menyusui bayi secara eksklusif sejak lahir sampai dengan umur 6 bulan dan meneruskan menyusui anak sampai umur 24 bulan. Mulai umur 6 bulan, bayi mendapat makanan pendamping ASI yang bergizi sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembangnya. Pada tahun 2016 hingga tahun 2020 di Kabupaten Soppeng cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin adalah 100%.

Tabel 2.85. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 Bulan keluarga miskin di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP-ASI	Jiwa	36	179	477	328	334
2	Jumlah seluruh anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	Jiwa	36	179	477	328	334
	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

2.1.3.1.2.40. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat dilakukan pada semua murid SD/setingkat yang duduk di kelas I. Penjaringan kesehatan siswa SD/setingkat adalah pemeriksaan kesehatan umum, kesehatan gigi dan mulut siswa SD/setingkat terhadap murid kelas I SD/setingkat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan Bersama guru dan dokter kecil. Pada tahun 2016 hingga tahun 2020 di Kabupaten Soppeng cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat mencapai 100%.

Tabel 2.86. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih	Murid	276	275	275	276	3584
2	Jumlah murid SD dan setingkat	Murid	276	275	275	276	3584
	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

2.1.3.1.2.41. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

Pemberian pelayanan kesehatan dasar secara cepat dan tepat diharapkan mampu mengatasi sebagian besar masalah kesehatan masyarakat. Berbagai pelayanan kesehatan dasar yang dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan adanya komitmen pemerintah terhadap pelayanan kesehatan, maka pelayanan kesehatan dasar terhadap masyarakat miskin dilakukan dengan fasilitas JKN. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masayarakat miskin pada tahun 2020 mencapai 80,11.

Tabel 2.87. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarkes strata 1	Jiwa	122.586	174.884	194.681	201.641	139.922
2	Jumlah seluruh masyarakat miskin	Jiwa	136.844	153.940	194.681	201.641	174.668
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	89,58	113,61	100,00	100,00	80,11

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

2.1.3.1.2.42. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)

Rumah sakit merupakan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang bergerak dalam kegiatan kuratif dan rehabilitatif. Rumah sakit juga berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan rujukan. Pada tahun 2016-2020 jumlah Rumah Sakit Umum (RSU) di Kabupaten Soppeng sebanyak 1 (satu) unit dengan pelayanan gawat darurat level 1. Sehingga cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan 100% pada tahun 2016-2020.

2.1.3.1.2.43. Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah salah satu status yang diterapkan di Indonesia untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit. Ketentuan penetapan KLB diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan. Kejadian Luar Biasa dijelaskan sebagai timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.

Tabel 2.88. Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 jam Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani > 24 jam	KLB	1	3	4	4	4
2	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi	KLB	1	3	4	4	4
	Cakupan Desa/ Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2020

Pada tahun 2020 terjadi penambahan Desa/Kelurahan dengan Kejadian Luar Biasa (KLB) dibandingkan dengan tahun 2016. Pandemi covid-19 menyebabkan warga dari 41 desa/kelurahan terinfeksi covid-19. Penyebaran covid-19 masuk ke dalam bencana non alam. Penanganan KLB dengan penyelidikan epidemiologi < 24 jam dilakukan dengan baik oleh petugas kesehatan sebagai upaya penanganan penyakit. Penanggulangan lainnya antara lain meliburkan sekolah untuk sementara waktu, menutup fasilitas umum untuk sementara waktu, melakukan pengamatan secara intensif atau surveilans selama KLB serta melakukan evaluasi terhadap upaya penanggulangan secara keseluruhan. Hal tersebut dibuktikan dengan 100% penyelidikan epidemiologi terhadap KLB.

2.1.3.1.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.3.1.3.1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Penyediaan infrastruktur yang memadai akan memberikan percepatan pergerakan arus barang dan jasa di wilayah sehingga aktivitas ekonomi juga akan semakin tinggi. Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang dan jasa maupun penumpang. Pengelolaan Jalan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Jalan untuk Jalan di wilayah Kabupaten menjadi kewajiban pemerintah Kabupaten, sehingga Jalan yang berada di Pedesaan pun yang utamanya menghubungkan antar Kecamatan, antar desa akan dipelihara oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Grafik 2. 28. Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Soppeng semakin meningkat pada periode 2016-2020. Dimana pada tahun 2016 panjang jalan dalam kondisi baik sepanjang 335.065 km. dan meningkat pada tahun 2020

yang sepanjang 524.937 km. peningkatan kondisi jalan dalam kondisi baik ini juga dapat dilihat dari data proporsi jumlah jalan dalam kondisi baik yang juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2016 proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik sebesar 0,37 dan pada tahun 2020 sebesar 0,58. Hal ini terjadi karena selama periode 2016 – 2020 pemerintah Kabupaten Soppeng sangat memperhatikan kondisi infrastruktur jalan. Dengan masifnya pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan yang dilakukan.

Tabel 2.89. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang Jalan Kondisi Baik	Km	335,065	293,136	286,196	356,391	524,937
2	Panjang Jalan Seluruhnya	Km	898,456	898,881	898,881	898,881	898,881
	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	0,37	0,33	0,32	0,40	0,58

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020

2.1.3.1.3.2. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk dan jumlah kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan., Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula jumlah masyarakat yang dilayani.

Di Kabupaten Soppeng sejak tahun 2016 jumlah rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk sebesar 0,0036, sedangkan tahun 2020 sebesar 0,0038. Panjang ruas jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten tidak bertambah sementara jumlah penduduk terus bertambah.

Tabel 2.90. Rasio. Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah panjang jalan	Km	898.456	898.881	898.881	898.881	898,881
2	Jumlah penduduk	Jiwa	252.677	241.430	236.156	237.115	238.967
	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk	Poin	0,0036	0,0037	0,0038	0,0038	0,0038

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020

2.1.3.1.3.3. Persentase Kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4

Persentase kawasan permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 mengindikasikan bahwa terdapat kawasan permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4. Persentase kawasan permukiman di Kabupaten Soppeng yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 pada tahun 2019 sebesar 10,28% dan pada tahun 2020 sebesar 10,28%. Data yang diperoleh pada tahun 2019 dan 2020 tidak mengalami perubahan dikarenakan tidak adanya pembaharuan pada data tersebut.

Tabel 2.91. Persentase Kawasan Permukiman yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kawasan pemukiman penduduk yang belum dilalui kendaraan roda 4	Ha	*)	*)	*)	80	80
2	Jumlah seluruh kawasan pemukiman penduduk	Ha	*)	*)	*)	778	778
	% Kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	%	*)	*)	*)	10,28	10,28

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020

2.1.3.1.3.4. Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)

Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/ jam) di Kabupaten Soppeng dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2016 sebesar 37,29% dan pada tahun 2017 sebesar 32,61%. Sedangkan pada tahun 2018 sebesar 31,84% dan meningkat pada tahun 2019 sebesar 39,65%. Pada tahun 2020 persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/ Jam) sebesar 58,40%. Hal ini diakibatkan karena masifnya pemerintah daerah kabupaten soppeng dalam melakukan pembangunan, pemeliharaan jalan di Kabupaten Soppeng.

Tabel 2.92. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (>40KM/Jam) Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Km	335.065	293.136	286.196	356.391	524,947
2	Panjang seluruh jalan kabupaten	Km	898.456	898.881	898.881	898.881	898,881
	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)	%	37,29	32,61	31,84	39,65	58,40

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020

2.1.3.1.3.5. Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase / saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)

Perentase jalan yang memiliki trotoar di Kabupaten Soppeng pada tahun 2016 sebesar 48,42% dan pada tahun 2017 sebesar 48,12 %. Sedangkan pada tahun 20020 sebesar 47,12%. Berdasarkan data persentase jalan yang memiliki trotoar dan darainase dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini diakibatkan karena jumlah trotoar dan drainase yang rusak tidak sebanding dengan jumlah trotoar yang dibangun dan dipelihara. Selain itu Sebagian besar jalan kabupaten berada di luar kawasan perkotaan sehingga belum dilengkapi dengan trotoar.

Tabel 2. 93. Jalan yang Memiliki Trotoar Dan Drainase / Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M) Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase	Km	435.000	432.561	426.621	423.590	423.590
2	Panjang seluruh jalan kabupaten	Km	898.456	898.881	898.881	898.881	898.881
	% Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (minimal 1,5 m)	%	48,42%	48,12%	47,46%	47,12%	47,12%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020

2.1.3.1.3.6. Persentase rumah tinggal bersanitasi

Persentase rumah tinggal bersanitasi dari tahun ke tahun mengalami terus peningkatan. Dimana pada tahun 2016 sebesar 46,18% dan meningkat pada tahun 2017 sebesar 48,49%. Pada tahun 2018 sebesar 53,10% dan meningkat pada tahun 2019 yang sebesar 66,84% dan untuk tahun 2020 persentase rumah tinggal bersanitasi sebesar 67, 83%. Indikator akses sanitasi yang digunakan adalah akses sanitasi layak yaitu rumah tangga perkotaan yang menggunakan leher angsa dan dilengkapi tangka septik dan untuk perdesaan, rumah tangga yang menggunakan akses Bersama (bukan umum) dengan leher angsa namun masih mungkin bangunan bawah cubluk/lubang tanah. Capaian akses sanitasi dasar sudah mencapai 100% sejak tahun 2018.

Seperti yang kita ketahui bahwa Pemerintah Pusat mencanangkan program 100-0-100 yaitu target 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak, yang harus dicapai oleh Kabupaten/kota pada Tahun 2019. Hal ini menjadi perhatian Pemerintah untuk memperhatikan rumah tangga kumuh sehingga target nasional tercapai 0% kawasan kumuh di Kabupaten Soppeng.

Tabel 2. 94. Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	Unit	26,808	28,296	30,27	38,095	38,661
2	Jumlah rumah tinggal	Unit	58,055	58,353	57,003	56,994	56,994
	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	46.18	48.49	53.10	66.84	67.83

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2020

2.1.3.1.3.7. Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat

Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat di Kabupaten Soppeng bersifat fluktuatif. Pada tahun 2016 persentase drainase dalam kondisi baik sebesar 55,73% kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 55,42%. Selanjutnya mengalami penurunan tahun 2018 menjadi 54,66% kemudian menurun kembali pada tahun 2019 dan 2020 menjadi 54,27%.

Tabel 2. 95. Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air	Km	435	432,561	426,62	423,59	423,59
2	Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten	Km	780,52	780,52	780,52	780,52	780,52
	% Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	%	55,73	55,42	54,66	54,27	54,27

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020

2.1.3.1.3.8. Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor: 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, menyebutkan indikator Bidang Cipta Karya terkait penyediaan sanitasi yaitu persentase penduduk

yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun. Genangan dapat terjadi apabila air buangan maupun air hujan tidak dapat mengalir ke badan air sehingga terperangkap di daerah cekungan ataupun daerah yang permukaanya lebih rendah. Hal tersebut juga dapat disebabkan oleh drainase yang tidak dapat berfungsi dengan baik dalam mengalirkan air. Pada daerah Kabupaten Soppeng persentase luas wilayah tergenang mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2019 sebesar 14,38% menjadi 1,79% pada tahun 2020.

Tabel 2. 96. Tidak Terjadi Genangan >2 Kali Setahun Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Luasan daerah yang tergenang	Ha	*)	*)	*)	1545	192,51
2	Luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang	Ha	*)	*)	*)	10740,57	10741
	Tidak Terjadi Genangan >2 Kali Setahun	%	*)	*)	*)	14,38%	1,79%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020

2.1.3.1.3.9. Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian. maka tujuan irigasi pada suatu daerah adalah upaya rekayasa teknis untuk penyediaaan dan pengaturan air dalam menunjang proses produksi pertanian, dari sumber air ke daerah yang memerlukan serta mendistribusikan secara teknis dan sistematis. Produksi dari hampir semua jenis tanaman akan meningkat, dengan adanya pemberian air yang tepat waktu dan tepat jumlah.

Selama tahun 2016 – 2019 persentase irigasi dalam kondisi baik terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2016 sebesar 72,57% dan pada tahun 2019 sebesar 79,37%. Sementara itu pada tahun 2020 luas irigasi dalam kondisi baik mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2019 dimana pada tahun 2020 luas irigasi dalam kondisi baik sebesar 62,06%. Hal ini diakibatkan karena selain adanya penambahan luas irigasi juga diakibatkan karena masih adanya saluran irigasi yang rusak sedang dan berat yang perlu direhabilitasi serta masih ada saluran tanah. Kondisi eksternal akibat banjir yang berdampak pada sebagian infrastruktur irigasi yang menambah kerusakan sarana dan prasarana jaringan irigasi.

Tabel 2. 97. Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Ha	7.045	7.235	7.525	7.705	5.999
2	Luas irigasi kabupaten	Ha	9.708	9.708	9.708	9.708	9.666
	% Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	72,57	74,53	77,51	79,37	62,06

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2020

2.1.3.1.3.10. Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan irigasi merupakan perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap lahan budidaya pertanian. Rasio Jaringan Irigasi ini memberikan gambaran ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian. Pada tahun 2020 rasio jaringan irigasi sebesar 0,022.

Tabel 2.98. Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang saluran irigasi	M	*)	*)	265.230	268.925	200,101
2	Luas lahan budidaya pertanian	M	95.914	97.972	*)	*)	9.018,62
	Rasio Jaringan Irigasi	Poin	-	-	-	-	0,022

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020

2.1.3.1.3.11. Persentase penduduk berakses air minum

Persentase penduduk berakses air minum dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 sebesar 85,84% dan pada tahun 2020 sebesar 94,55%, dari data terlihat bahwa cakupan persentase penduduk berakses air semakin meningkat, namun dengan semakin meningkatnya jumlah pelanggan air minum tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan pengelolaan pelayanannya. Saat ini masih sering dijumpai banyaknya keluhan masyarakat terkait pengelolaan air minum yang belum lancar distribusi maupun keluhan terhadap kualitas air yang dihasilkan. Hal ini diakibatkan karena Belum optimalnya kinerja PDAM dan belum terinventarisasi dengan baik potensi air baku untuk air minum.

Tabel 2.99. Penduduk berakses air minum Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Penduduk berakses air minum	Jiwa	216.890	218.407	222.476	222.512	226.874
2	Jumlah penduduk	Jiwa	252.677	241.430	236.156	237.115	238.967
	% Penduduk Berakses Air Minum	%	85,84%	90,46%	94,21%	93,84%	94,55%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020

2.1.3.1.3.12. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan

Terkait infrastruktur permukiman pemerintah berkomitmen untuk menjamin keberlanjutan lingkungan dengan target mengurangi hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak. Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Berdasarkan data yang diperoleh sejak tahun 2016 – 2020 proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan mengalami fluktuasi, rumah tangga yang ada di Kabupaten Soppeng telah masuk kategori rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Soppeng menunjukkan komitmen yang tinggi terkait dengan target yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat.

Tabel 2.100. Proporsi Rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan	Jiwa	7.253	7.253	9.196	15.605	16.005
2	Jumlah penduduk seluruhnya (Rumah Tangga)	Jiwa	58.055	58.353	57.003	56.994	56.994

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan	%	12,49%	12,43%	16,13%	27,38%	28,08%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020

2.1.3.1.3.13. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan

Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbunan sampah, pendaurulangan sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Ketersediaan fasilitas pengurangan sampah di perkotaan dipengaruhi oleh proses guna ulang, daur ulang dan pengelolaan sampah di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA. Rendahnya persentase tersedianya fasilitasa pengurangan sampah di perkotaan disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengolahan sampah dan keterbatasan lahan pembangunan sarana dan prasarana.

Tabel 2. 101. Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah Di Perkotaan Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Volume sampah di perkotaan yang mengalami guna ulang, daur ulang, pengelolaan di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA	M^3	*)	*)	*)	4.850	4.850
2	Total volume sampah (Ton)	Ton	*)	*)	*)	7040,12	7040,12
	Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan	%	*)	*)	*)	68,89%	68,89%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020

2.1.3.1.3.14. Rasio tempat pemakaman umum persatuan penduduk

Rasio tempat pemakaman umum diperoleh berdasarkan perbandingan antara jumlah daya tampung tempat pemakaman umum dengan jumlah penduduk. Rasio tempat pemakaman umum persatuan penduduk mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 0,015 menjadi 0,017 pada tahun 2020.

Tabel 2. 102. Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum	Jiwa	3,79	4,06	4,06	4,06	4,06
2	Jumlah penduduk	Jiwa	252.677	241.430	236.156	237.115	238.967
	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk	Per Satuan Penduduk	0,015	0,017	0,017	0,017	0,017

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020

2.1.3.1.3.15. Rasio Tempat Ibadah per satuan Penduduk

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk diperoleh berdasarkan perbandingan antara jumlah tempat ibadah dengan jumlah penduduk. Rasio tempat ibadah di Kabupaten Soppeng pada tahun 2016 sebesar 1,82 meningkat menjadi 2,00 pada tahun 2020. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk sempat mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 2,02 menjadi 2,00 pada tahun 2020 disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduk yang meningkat tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah fasilitas ibadah.

Tabel 2. 103. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tempat ibadah	Unit	461	469	478	478	478
2	Jumlah penduduk	Jiwa	252.677	241.430	236.156	237.115	238.967
	Rasio tempat Ibadah Per Satuan Penduduk	Per Satuan Penduduk	1,82	1,94	2,02	2,02	2,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020

2.1.3.1.3.16. Luas RTH public sebesar 20% dari luas wilayah Kota/Kawasan perkotaan

Luas RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan adalah persentase luas RTH publik yang tersedia terhadap luas RTH publik yang seharusnya tersedia di kawasan perkotaan.

Tabel 2. 104. Luas RTH Public Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Luasan RTH publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM	Ha	*)	*)	238,33	238,33	238,33
2	Luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan Perkotaan	Ha	382.72	388.72	372,75	372,75	372,75
	Luasan RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	%	-	-	63,94%	63,94%	63,94%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020

2.1.3.1.3.17. Ketaatan terhadap RTRW

Realisasi terhadap Rencana Tata Ruang Kabupaten Soppeng terus mengalami peningkatan setiap tahun pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Kendati demikan, dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng seharusnya telah mengalami proses revisi karena telah mengalami perubahan substansi dan dinilai tidak dapat mengakomodir pertumbuhan dan perkembangan wilayah yang ada di Kabupaten Soppeng. Selain itu, terdapat perubahan landasan hukum terkait penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yaitu Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota sehingga terdapat pembaharuan basis data yang menjadi pedoman dalam penyusunan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yaitu Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Republik Indonesia No. 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota. Dari tabel dibawah dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2017 jumlah rekomendasi kesesuaian tata ruang sebanyak 70 dan pada tahun 2020 sebanyak 165 rekomendasi.

Tabel 2. 105. Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi RTRW		*)	70	38	57	165
2	Rencana Peruntukan		*)	70	38	57	165
	Ketaatan Terhadap RTRW	%	-	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020

2.1.3.1.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

2.1.3.1.4.1. Rasio rumah layak huni

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Rasio rumah layak huni di Kabupaten Soppeng terus mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 0,19 dan pada tahun 2020 sebesar 0,21. Hal ini sebabkan karena seiring bertambahnya jumlah penduduk, jumlah rumah layak huni juga meningkat yang disebabkan karena masifnya program bedah rumah baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Tabel 2. 106. Rumah Layak Huni Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah layak huni	Unit	48,964	47,588	48,19	48,86	50,189
2	Jumlah penduduk	Jiwa	252,677	241,43	236,156	237,115	238,967
	Rasio Rumah Layak Huni	Poin	0.19	0.20	0.20	0.21	0.21

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2020

2.1.3.1.4.2. Rasio permukiman layak huni

Dalam kurun waktu 2018 – 2019, rasio permukiman layak huni di Kabupaten Soppeng mengalami penurunan yakni pada tahun 2018 sebesar 0,99 dan pada tahun 2019 sebesar 0,98.

Tabel 2. 107. Pemukiman Layak Huni Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas pemukiman layak huni	M^2	Na	Na	5,888.30	5,845.70	Na
2	Luas wilayah permukiman	M^2	Na	Na	5,943.55	5,943.55	5,943.55
	Rasio Permukiman Layak Huni	Poin	Na	Na	0.99	0.98	Na

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2020

2.1.3.1.4.3. Cakupan ketersediaan rumah layak huni

Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Di Kabupaten soppeng, cakupan ketersediaan rumah layak huni pada tahun 2016 sebesar 84,34 lalu di tahun 2017 sebesar 81,55 hingga pada tahun 2020 sebesar 88,06. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah rumah layak huni mengalami peningkatan.

Tabel 2. 108. Ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah seluruh rumah layak huni	Unit	48,964	47,588	48,19	48,86	50,189
2	Jumlah rumah	Unit	58,055	58,353	57,003	56,994	56,994
	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	84.34	81.55	84.54	85.73	88.06

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2020

2.1.3.1.4.4. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau

Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau di Kabupaten Soppeng terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2017 sebesar 63,58 dan pada tahun 2020 sebesar 65,19. Hal ini didukung oleh adanya program pemerintah seperti program Kotaku, Bantuan Stimulan

Perumahan Swadaya (BSPS), Rumah Susun Santri, dan Program Sejuta Rumah.

Tabel 2. 109. Layanan rumah layak huni yang terjangkau Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni	Unit	Na	36,913	36,959	37,255	38,04
2	Jumlah rumah tangga MBR	Unit	Na	58,055	58,353	58,353	58,353
	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau	%	Na	63.58	63.34	63.84	65.19

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2020

2.1.3.1.4.5. Persentase pemukiman yang tertata

Persentase pemukiman yang tertata di Kabupaten Soppeng mengami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 sebesar 0,68, tahun 2019 sebesar 0,70 dan pada tahun 2020 sebesar 0,74.

Tabel 2. 110. Pemukiman yang Tertata Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas area permukiman tertata	Ha	Na	35.38	40.41	41.81	43.78
2	Luas area permukiman keseluruhan	Ha	Na	Na	5,943.55	5,943.55	5,943.55
	Persentase Pemukiman yang Tertata	%	Na	Na	0.68	0.70	0.74

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2020

2.1.3.1.4.6. Persentase lingkungan pemukiman kumuh

Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bavngunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Di Kabupaten Soppeng, persentase lingkungan permukiman kumuh pada tahun 2018 sebesar 0.04 % dan pada tahun 2020 sebesar 0.06 %.

Tabel 2. 111. Lingkungan Pemukiman Kumuh Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas lingkungan permukiman kumuh	Ha	Na	Na	55.25	97.85	86.81
2	Luas wilayah	Ha	Na	Na	150,000	150,000	150,000
	% Lingkungan Pemukiman Kumuh	%	Na	Na	0.04	0.07	0.06

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2020

2.1.3.1.4.7. Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan

Rumah tangga kumuh didefinisikan sebagai rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap sumber air minum layak, sanitasi layak, luas lantai > 7, 2 m2 per kapita, kondisi atap, lantai, dan dinding yang layak. Di Kabupaten Soppeng Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan mengalami peningkatan yakni pada tahun 2018 sebesar 1,85% dan pada tahun 2020 mencapai 3,41%.

Tabel 2.112. Rumah tangga kumuh perkotaan Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan	Unit	Na	Na	1,057	1,945	1,945
2	Jumlah seluruh rumah	Unit	Na	Na	57,003	56,994	56,994
	Persentase Rumah Tangga Kumuh Perkotaan	%	Na	Na	1.85	3.41	3.41

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2020



2.1.3.1.4.8. Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU

Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU di Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan yang tidak begitu signifikan. Pada tahun 2017 sebesar 63,58 dan pada tahun 2020 sebesar 63,84. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya data PSU di lingkungan perumahan komersil dan perumahan umum.

Tabel 2.113. Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah lingkungan yang didukung PSU	Ha	Na	36,913	36,959	37,255	37,255
2	Jumlah lingkungan perumahan	Ha	Na	58,055	58,353	58,353	58,353
	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	Na	63.58	63.34	63.84	63.84

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2020

2.1.3.1.5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

2.1.3.1.5.1. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk membantu pelaksanaan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Mengacu ke target SPM maka Linmas setiap RT adalah 1 orang. Berdasarkan data yang ada, Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten Soppeng, yang dihitung dari jumlah petugas Linmas di Kabupaten dibagi dengan 1 Wilayah kerja Kabupaten (jumlah RT) pada tahun 2016 cakupan petugas perlindungan masyarakat sebesar 38,30% dan meningkat pada tahun 2020 yang sebesar 147,74%. Berdasarkan hal ini dapat dilihat bahwa pemerintah Kabupaten Soppeng telah memenuhi target dimana setiap RT terdapat minimal 1 petugas linmas. Peningkatan capaian yang sangat tinggi, hal ini disebabkan karena adanya perhelatan PILPRES, PILGUB, PILKADA, PILKADES, dan Pemilihan LEGISLAITF di Kabupaten Soppeng yang memerlukan petugas linmas untuk menjamin ketentraman di masyarakat.

Tabel 2. 114. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Petugas Linmas di Kab/Kota daerah pemekaran baru	Petugas	406	406	1566	1566	1566
2	1 Wilayah Kerja Kab/Kota	Jumlah RT	1060	1060	1060	1060	1060
	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat	%	38,30	38,30	147,74	147,74	147,74

Sumber : Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran, 2020

2.1.3.1.5.2. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten/Kota adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang

telah ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram, serta menjaga keindahan.

Pada tahun 2016 tingkat penyelesaian pelanggaran K3 sebesar 87,85% dan pada tahun 2017 sebesar 71,23%. Sementara itu pada tahun 2020 tingkat penyelesaian pelanggaran K3 sebesar 100%. Data Tingkat Penyelesaian K3 di Kabupaten Soppeng ini sudah berkoordinasi dengan Pihak POLRES soppeng.

Tabel 2. 115. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Tahun 2016-2020

No	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Pelanggaran K3 yang terselesaikan	Pelanggaran K3	434	104	190	223	107
2	Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat	Pelanggaran K3	494	146	256	286	107
	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	%	87,85	71,23	74,22	77,97	100

Sumber : Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran, 2020

2.1.3.1.5.3. Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten/Kota

Cakupan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran (PPK) adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran dengan membentuk Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) oleh daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai wilayah yurisdik urusan pemerintahannya.

Pengertian WMK menurut Kepmeneg PU No. 11/KPTS/2000 adalah sebagai berikut:

- WMK dibentuk oleh pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan.
- WMK perlu dilengkapi dengan sistem alarm dan pemberitahuan kebakaran yang terintegrasi dalam WMK.
- WMK ditentukan oleh waktu tanggap (response time) dari pos pemadam kebakaran terdekat.

Berdasarkan data Satpol PP & Damkar, pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 cakupan pelayanan bencana kebakaran sebesar 94,20%. Hal ini disebabkan untuk menentukan jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) digunakan pembulatan angka di atas 0,5. Target kinerja Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten Soppeng adalah merupakan jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang terbentuk mulai Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020. Subtansi dari pencapaian target tersebut adalah pembangunan Sektor/Pos Pemadam Kebakaran, dimana sampai dengan Tahun 2016 telah dibangun Sektor/Pos Pemadam Kebakaran sebanyak 5 unit, yaitu Lalabata,Marioriawa, Citta, Lilirilau dan Marioriwawo, Tahun 2017 tidak ada, Tahun 2018 sebanyak 3 unit, yaitu Donri-Donri, Liliriaja dan Lalabata (pindah lokasi/menempati Sektor/Pos baru), Tahun 2019 sebanyak 2 unit, yaitu Ganra dan Citta (pindah lokasi yang lebih strategis). Jadi Sektor/Pos Pemadam Kebakaran yang telah dibangun dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 adalah sebanyak 8 unit. Hal ini yang

membuat pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan setiap tahun.

Tabel 2.116. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jangkauan Luas Wilayah Manajemen Kebakaran	Km^2	529,89	883,15	1236,41	1413,04	1413,04
2	Luas Wilayah Kab/Kota	Km^2	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kab/Kota (%)	%	35,33	58,88	82,43	94,20	94,20

Sumber : Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran, 2020

2.1.3.1.5.4. Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) adalah pelayanan pemadam kebakaran pada saat tanggap darurat yang efektif, dan bereaksi cepat dan tepat tiba dilokasi kejadian kebakaran untuk penguragan resiko kebakaran dengan waktu minimal yang diperlukan, dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian kebakaran, yang langsung melakukan tindakan pemadaman api, penyelamatan jiwa dan harta benda. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan WMK adalah merupakan rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada permukiman, bangunan gedung, pabrik/industri dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

Pada tahun 2016 Respone Time Rate sebesar 59,09% dan meningkat pada tahun 2017 yang sebesar 71,43%. Sementara itu pada tahun 2018 respone time rate sebesar 56,86% menurun jika dibandingkan pada tahun 2017. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2018 baru dibangun 3 pos damkar. Pada tahun 2019 dengan bertambahnya pos damkar yang dibangun pada tahun 2018, walaupun jumlah kasus kebakaran lebih besar dari tahun 2018 tetapi respone time rate pada tahun 2019 meningkat jika disbanding tahun 2018 dimana pada tahun 2019 sebesar 65,73%. Dan pada tahun 2020 respone time rate meningkat jika dibanding tahun 2019, dimana pada tahun 2020 sebesar 90,70%. Hal ini diakibatkan karena semakin membaiknya sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan kebakaran di Kabupaten Soppeng.

Tabel 2. 117.Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu Maks.15 Menit	Kasus	13	20	29	188	39
2	Jumlah Kasus Kebakaran dalam jangkauan WMK	Kasus	22	28	51	286	43
	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah	%	59,09	71,43	56,86	65,73	90,70

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
	Manajemen Kebakaran (WMK) (%)						

Sumber : Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran, 2020

2.1.3.1.5.5. Persentase Penegakan PERDA

Penegakan Perda adalah kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran Perda yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh Anggota Satpol PP. selama tahun 2017 – 2020 persentase penegakan perda sebesar 100%. Penyelesaian pelanggaran Perda oleh Satpol PP dilakukan sesuai dengan SOP yaitu tindakan preventif non yustisial, dan apabila pelanggaran Perda mengandung unsur pidana dapat meneruskan proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Tabel 2. 118. Penegakan PERDA Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA	Pelanggaran	Na	20	60	38	15
2	Jumlah Pelanggaran PERDA	Pelanggaran	Na	20	60	38	15
	Persentase Penegakan PERDA	%	Na	100	100	100	100

Sumber : Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran, 2020

2.1.3.1.6. Bidang Urusan Sosial

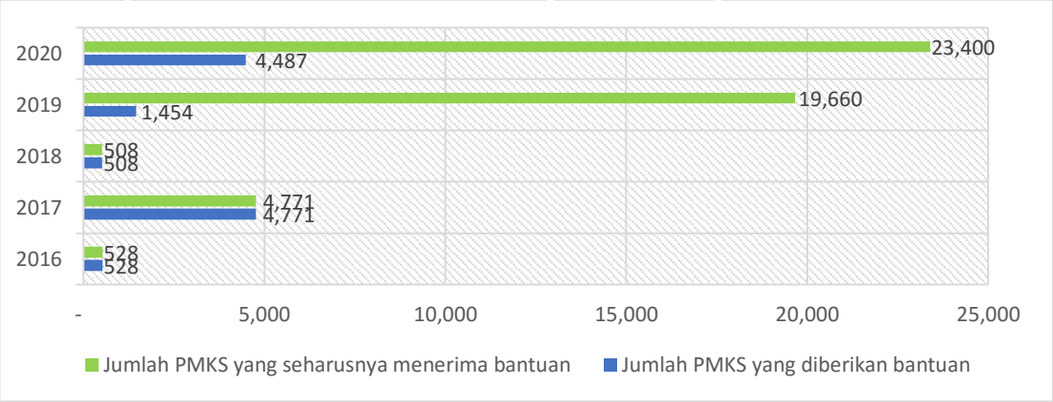
2.1.3.1.6.1. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, atau gangguan tersebut dapat berupa permasalahan sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/ketertinggalan, dan bencana alam maupun bencana sosial. PMKS yang memperoleh bantuan adalah proporsi jumlah PMKS yang memperoleh bantuan terhadap jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan.

Pada grafik berikut ini dapat dilihat bahwa jumlah PMKS pada tahun 2019 dan 2020 mengalami kenaikan drastis apabila dibandingkan dengan jumlah PMKS pada tahun-tahun sebelumnya. Pada Tahun 2016, 2017 dan 2018 secara keseluruhan jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan telah diberikan bantuan atau dengan capaian 100 persen. Namun persentase tersebut menurun pada tahun 2019 menjadi hanya 7 persen dan tahun 2020 sebesar 19 persen.

Pendataan dan pengelolaan data PMKS sebagai dasar dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial perlu dibenahi. Dalam penanganan PMKS diperlukan data yang akurat dan akuntabel, sehingga kualitas hasil pendataan dan pengelolaan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial perlu lebih ditingkatkan.

Grafik 2. 29. Jumlah PMKS Yang Seharusnya Menerima Bantuan



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Soppeng, 2020

2.1.3.1.6.2. Persentase PMKS yang tertangani

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan persentase jumlah PMKS yang ditangani terhadap jumlah PMKS yang ada. Data menunjukkan bahwa, persentase PMKS yang tertangani pada tahun 2016, 2017 dan 2018 adalah 100 persen yang berarti dari keseluruhan jumlah PMKS yang ada semuanya mendapatkan penanganan. Pada tahun 2019 jumlah PMKS yang ada meningkat tajam 19.660 dengan persentase jumlah PMKS yang tertangani mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi hanya sebesar 7 persen. Demikian pula pada tahun 2020, dengan jumlah 23.400 PMKS, persentase yang PMKS yang tertangani hanya 19 persen. Masih banyaknya jumlah PMKS di Kabupaten Soppeng mengindikasikan banyaknya masalah kesejahteraan sosial yang perlu penanganan dan menjadi tanggung jawab pemerintah melalui dinas-dinas terkait.

Tabel 2. 119. Persentase PMKS yang Tertangani Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PMKS yang tertangani	Orang	528	4771	508	1454	4487
2	Jumlah PMKS yang ada	Orang	528	4771	508	19660	23400
	Persentase PMKS yang tertangani	%	100	100	100	7	19

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Soppeng, 2020

2.1.3.1.6.3. Persentase PMKS skala Kab. yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

Berdasarkan data Dinas Sosial pada tahun 2016, 2017, 2018 persentase PMKS Skala Kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar adalah 100 persen. Semua PMKS yang seharusnya menerima bantuan sosial dalam 1 tahun telah diberikan bantuan. Sementara untuk tahun 2019 dan 2020 persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar menurun drastis, hanya 7,40 persen tahun 2019 dan 19,18 persen tahun 2020. Secara prinsip, bantuan diberikan untuk meringankan beban terhadap upaya-upaya pemenuhan kebutuhan dasar, namun seringkali kurang bersifat produktif. Oleh karena itu, besaran sebagian bantuan dialihkan pada kegiatan lain seperti kegiatan padat karya yang hasil akhirnya dapat meningkatkan kemampuan terhadap upaya pemenuhan kebutuhan dasarnya.

Tabel 2. 120. Persentase PMKS Skala Kab. Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial Dalam 1 tahun	Orang	528	4771	508	1454	4487
2	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima Bantuan Sosial dalam 1 Tahun	Orang	528	4771	508	19660	23400
	Persentase PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	100	100	100	7,40	19,18

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Soppeng, 2020

2.1.3.1.6.4. Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi jenis lainnya

Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya pada tahun 2020 adalah sebesar 40 persen menurun dari tahun 2016 sebesar 100 persen.

Tabel 2. 121. Persentase Panti Sosial Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi jenis lainnya Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	Orang	53	0	0	0	6
2	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang harusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	Orang	53	0	0	10	15
	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi jenis lainnya	%	100	0	0	0	40

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Soppeng, 2020

2.1.3.1.6.5. Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial

Persentase panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial dihitung dari jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial dibagi dengan Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial. Berdasarkan data Dinas Sosial, panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial hingga tahun 2020 sebanyak 7 panti.

Tabel 2.122. Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan sarana prasarana pelayanan Kesehatan sosial tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Panti Sosial dalam 1 tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos	Unit	6	6	6	7	7
2	Jumlah Panti Sosial dalam 1 tahun yang seharusnya menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos	Unit	6	6	6	7	7
	Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Soppeng, 2020

2.1.3.1.6.6. Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

Berdasarkan data Dinas Sosial, jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial di Kabupaten Soppeng yaitu 2 WKBSM dengan capaian 100 persen pada tahun 2018-2020.

Tabel 2.123. Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah WKBSM dalam 1 tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan sosial	Unit	0	0	2	2	2
2	Jumlah WKBSM dalam 1 tahun yang seharusnya menyediakan sarana dan prasarana pelayanan sosial	Unit	0	0	2	2	2
	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	%	0	0	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Soppeng, 2020

2.1.3.1.6.7. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat pada tahun 2016 hingga tahun 2020 adalah 100 persen. Hal ini berarti jumlah korban yang menerima bantuan sama dengan jumlah korban yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.

Tabel 2.124. Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun	Jiwa	127	132	388	1299	147

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
2	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun	Jiwa	127	132	388	1299	147
	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Soppeng, 2020

2.1.3.1.6.8. Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap

Berdasarkan data Dinas Sosial pada tahun 2016-2020 tidak ada korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap karena tidak ada korban bencana yang membutuhkan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap. Pada saat bencana banjir terjadi, masyarakat lebih memilih untuk tetap di rumah masing-masing.

2.1.3.1.6.9. Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang telah Menerima Jaminan Sosial

Indikator persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial mengalami peningkatan hingga tahun 2019 dengan capaian 19,8 persen. Peningkatan ini merupakan indikator meningkatnya pembangunan daerah yang lebih inklusif bagi warga yang rentan. Namun pada tahun 2020 persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial hanya 0,4 persen atau 80 dari 19.229 orang Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang harusnya telah menerima jaminan sosial hanya 166 orang yang telah menerima jaminan sosial.

Tabel 2.125. Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang telah Menerima Jaminan Sosial Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun	Jiwa	129	130	130	3806	80
2	Jumlah Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang harusnya telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun	Jiwa	2965	2965	4277	19192	19229
	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial	%	4,4	4,4	3	19,8	0,4

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Soppeng, 2020

2.1.3.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.1.3.2.1. Bidang Urusan Tenaga Kerja

2.1.3.2.1.1. Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun mengindikasikan hubungan antara pengusaha sebagai pemilik modal dan pekerja sebagai penyedia jasa tenaga. Semakin tinggi sengketa antara pengusaha dengan pekerja menunjukkan adanya ketidakharmonisan yang berakibat pada penurunan investasi. Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng tidak terdapat angka sengketa antara pengusaha pekerja pertahun.

2.1.3.2.1.2. Besaran Pencari Kerja Yang terdaftar Yang Ditempatkan

Penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan. Pada tahun 2016 jumlah pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan sebesar 14,46% dan meningkat pada tahun 2017 yang sebesar 30,61%. Pada tahun 2018 besaran pencari kerja yang ditempatkan sebesar 28,71% meningkat dibanding tahun 2017. Tetapi pada tahun 2019 mengalami penurunan dimana besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan sebesar 2,74%. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 4,41%.

Tabel 2.126. Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan	Jiwa	35	135	178	14	18
2	Jumlah Pencari Kerja Yang terdaftar	Jiwa	242	441	620	511	408
	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	14,46	30,61	28,71	2,74	4,41

Sumber : Dinas PMPTSPTKT, 2020

2.1.3.2.1.3. Keselamatan Dan Perlindungan

Keselamatan dan Perlindungan adalah indikator untuk mengukur seberapa banyak perusahaan yang memiliki komitmen terhadap keselamatan dan perlindungan terhadap karyawan, dihitung dari jumlah perusahaan yang menerapkan K3 dari total jumlah seluruh perusahaan di Wilayah Kabupaten Soppeng. Data keselamatan dan perlindungan terhadap pekerja di Kabupaten Soppeng pada tabel berikut :

Tabel 2.127. Keselamatan dan Perlindungan Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perusahaan yang menerapkan K3	Perusahaan	17	20	20	20	20
2	Jumlah Perusahaan di wilayah	Perusahaan	505	269	226	245	276
	Keselamatan dan perlindungan	%	3,36	7,43	8,84	8,16	7,24

Sumber : Dinas PMPTSPTKT, 2020

2.1.3.2.1.4. Besaran Pekerja Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek menunjukkan seberapa besar jumlah pekerja/buruh JAMSOSTEK dari total jumlah buruh/pekerja. Data Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi peserta program Jamsostek di Kabupaten Soppeng pada tabel berikut :

Tabel 2.128. Besaran Pekerja/ Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pekerja/ Buruh JAMSOSTEK	Pekerja/Buruh	200	450	575	310	5.176
2	Jumlah Pekerja/ Buruh	Pekerja/Buruh	1.171	737	620	532	5.477
	Besaran Pekerja/ Buruh yang menjadi peserta program JAMSOSTEK	%	17,07	61,05	92,74	58,27	94,50

Sumber : Dinas PMPTSPTKT, 2020

2.1.3.2.1.5. Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan menunjukkan jumlah tenaga kerja yang dilatih dari jumlah pendaftar pelatihan kewirausahaan. Data Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan di Kabupaten Soppeng pada tabel berikut :

Tabel 2.129. Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tenaga yang dilatih	Tenaga Kerja	120	40	110	40	0
2	Jumlah Pendaftar pelatihan kewirausahaan	Tenaga Kerja	120	40	110	40	0
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	100	100	100	100	0

Sumber : Dinas PMPTSPTKT, 2020

2.1.3.2.2. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kesetaraan gender ditempatkan sebagai aspek yang sangat penting dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs). Secara khusus disebutkan dalam tujuan 5 yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Pada tujuan 5 banyak menekankan pada usaha-usaha menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan dan aspek pemberdayaan perempuan.

Pemerintah Kabupaten Soppeng terus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak melalui pembangunan yang menjadikan kesetaraan gender menjadi arus utama. Program dan kegiatan yang dilakukan dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak antara lain pemberian beasiswa 10 Milyar, pelayanan kesehatan yang ramah anak, sekolah ramah anak, taman bermain anak (taman kalong) sebagai tempat bermain anak, perpustakaan ceria untuk anak. Juga perlindungan khusus

bagi anak dengan adanya call center Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak, PSC 119 dengan pelayanan kesehatan 24 jam termasuk bagi anak yang membutuhkan bantuan.

Pada tahun 2018 Kabupaten Soppeng menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dengan kategori madya. Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi Presiden Republik Indonesia bagi kementrian/lembaga dan daerah provinsi maupun kabupaten/kota yang memiliki komitmen tinggi terhadap pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan evaluasi setiap 2 tahun. Pada tahun yang sama, Kabupaten Soppeng juga menerima penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) predikat pratama, selanjutnya pada tahun 2019 menerima penghargaan untuk kedua kalinya.

Perkembangan capaian indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari tahun 2016-2020 secara lebih jelas dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1.3.2.2.1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Persentase perempuan di lembaga pemerintahan, menunjukkkan persentase jumlah perempuan di lembaga pemerintah dari jumlah pekerja perempuan secara keseluruhan. Persentase perempuan di lembaga pemerintahan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 sebesar 10,94 persen meningkat hingga tahun 2019 sebesar 12,97. Peningkatan tersebut disebabkan adanya penerimaan CPNS dan kontrak di lembaga pemerintahan. Meningkatnya persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan membuktikan bahwa peran perempuan di lembaga pemerintahan semakin menguat. Pada tahun 2020 capaian pekerja perempuan dilembaga pemerintah mengalami penurunan menjadi 12,10%.

Tabel 2.130. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Pekerja perempuan dilembaga pemerintah	Perempuan	3.878	4.626	4.642	5.918	5.539
2	Jumlah pekerja perempuan	Perempuan	35.455	40.092	40.092	45.639	45.794
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	10,94	11,54	11,58	12,97	12,10

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

2.1.3.2.2.2. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR

Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD adalah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tingkat daerah (anggota DPRD kabupaten). Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD menunjukkan jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan dari jumlah total kursi di keanggotaan DPRD. Indikator ini menunjukkan sejauh mana perempuan memiliki akses yang sama terhadap posisi penting pengambil keputusan dalam proses politik formal khususnya di lembaga legislatif di daerah. Partisipasi di jabatan terpilih merupakan aspek kunci peluang perempuan dalam kehidupan politik dan publik, serta dikaitkan dengan pemberdayaannya. Keikutsertaan di badan pengambil keputusan dapat mengubah dinamika dan membawa perubahan bagi perempuan.

Tabel 2.131. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kursi DPRD yang di duduki perempuan	Posisi	6	6	8	7	7
2	Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	Posisi	30	30	30	30	30
	Proporsi Kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	20,00	20,00	26,67	23,33	23,33

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan pada tahun 2016 dan 2017 sebanyak 6 kursi atau 20 persen dari jumlah total kursi keanggotaan DPRD sebanyak 30 kursi. Jumlah ini meningkat menjadi 8 kursi pada tahun 2018. Adapun pada tahun 2019 dan 2020 jumlahnya sebanyak 7 kursi atau 23,33 persen melampaui target RPJMD 2016-2021 yaitu 20 persen. Meskipun demikian, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat telah mengamanatkan kuota 30 persen, jumlah perolehan kursi yang sekarang tetap masih belum mencapai 30 persen.

Masih rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD karena kurangnya pemahaman pemilih perempuan untuk memilih perempuan, dan kurangnya minat perempuan untuk terjun ke dunia politik, serta kurangnya kualitas perempuan yang menjadi calon legislatif. Selain memenuhi minimal 30 persen keterwakilan, peningkatan kualitas anggota legislatif perempuan juga harus didorong agar keterwakilan perempuan di parlemen memberi dampak yang signifikan.

2.1.3.2.2.3. Partisipasi perempuan di lembaga swasta

Partisipasi perempuan di lembaga swasta, menunjukkan jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta dari total jumlah pekerja perempuan. Secara persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta berfluktuasi dari tahun ke tahun dengan kondisi akhir tahun 2020 sebanyak 90,27 persen. Secara umum dapat dikatakan bahwa kesempatan perempuan untuk berpartisipasi di lembaga swasta terbuka karena bertumbuhnya lembaga-lembaga swasta di daerah yang membutuhkan tenaga kerja baik perempuan maupun laki-laki.

Tabel 2. 132. Partisipasi perempuan di lembaga swasta Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Pekerja perempuan di lembaga swasta	Perempuan	31.577	30.455	30.513	40.025	41.339
2	Jumlah pekerja perempuan	Perempuan	35.455	40.092	40.092	45.663	45.794
	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	%	89,06	75,96	76,11	87,65	90,27

Sumber: Dinas P3APPKB. 2020

2.1.3.2.2.4. Rasio KDRT

Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menunjukkan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga dari total jumlah rumah tangga. Rasio KDRT ditargetkan 0, akan tetapi hingga tahun 2020 masih ada

kejadian kekerasan dalam rumah tangga. Pada tahun 2016 jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah 4 kasus atau 0,0069 dari jumlah seluruh rumah tangga. Pada tahun 2020 menurun menjadi hanya 2 kasus atau 0,0035 dari jumlah seluruh rumah tangga yaitu 56.994. Penurunan kasus KDRT tersebut dikarenakan adanya kesadaran masyarakat tentang hukum kekerasan dalam rumah tangga yang tidak lepas dari pembinaan dan penyadaran yang dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan sosialisasi.

Tabel 2. 133. Rasio KDRT Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah KDRT	Kasus	4	2	3	3	2
2	Jumlah Rumah Tangga	Rumah Tangga	58.055	58.353	57.003	56.994	56.994
	Rasio KDRT	%	0,0069	0,0034	0,0053	0,0053	0,0035

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

2.1.3.2.2.5. Persentase jumlah pekerja dibawah umur

Persentase jumlah pekerja dibawah umur tidak menjadi indikator kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB sehingga tidak ada data terkait indikator ini.

2.1.3.2.2.6. Partisipasi angkatan kerja perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan, menunjukkan jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dari total jumlah angkatan kerja perempuan. Pada tahun 2016 jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Soppeng sebanyak 38.563 atau 96,97 persen dari jumlah angkatan kerja perempuan sebanyak 39.770. Partisipasi angkatan kerja perempuan cenderung mengalami penurunan hingga hanya mencapai 89,1 persen pada tahun 2020, belum mencapai target yaitu 98,12 persen. Penurunan angka partisipasi kerja perempuan karena banyak dari perempuan pekerja meninggalkan pekerjaan untuk mengurus keluarga, terutama setelah melahirkan. Selain itu, juga diperburuk dengan adanya pandemi yang membuat sejumlah tenaga kerja perempuan kehilangan pekerjaan, serta beralihnya kegiatan belajar anak dari sekolah ke rumah yang membutuhkan pendampingan orangtua (ibu).

Tabel 2.134. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Partisipasi Angkatan kerja perempuan	Perempuan	38.563	39.025	40.092	40.484	45.794
2	Jumlah pekerja perempuan	Perempuan	39.770	39.775	44.718	45.693	51.394
	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	96,97	98,11	89,66	88,6	89,1

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

2.1.3.2.2.7. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalm unit pelayanan terpadu

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalm unit pelayanan terpadu, menunjukkan jumlah pengaduan/laporan yang ditindak lanjuti oleh unit pelayanan terpadu dari jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu. Pada tahun 2016 hingga tahun 2020 semua pengaduan/laporan yang masuk ke unit pelayanan terpadu ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu sejak tahun 2016-2020 sebesar 100 persen. Kecuali pada tahun 2018 yang cakupannya sebesar 90%.

Tabel 2.135. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Didalam Unit Pelayanan Terpadu Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pengaduan/laporan yang ditindak lanjuti oleh unit pelayanan terpadu	Pengaduan/ Laporan	25	21	35	37	24
2	Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu	Pengaduan/ Laporan	25	21	39	37	24
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalm unit pelayanan terpadu	%	100	100	90	100	100

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

2.1.3.2.2.8. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit, menunjukkan jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit dari jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A dan ke Rumah Sakit.

Tabel 2.136. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Jiwa	Na	Na	3	3	5
2	Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A dan ke Rumah Sakit	Jiwa	Na	Na	3	3	5
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	Na	Na	100	100	100

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

2.1.3.2.2.9. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu

Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu, menunjukkan jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial dari jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabilitasi sosial. Pada tahun 2018 hingga tahun 2020 realisasi sebesar 100 persen sesuai dengan target yang ditetapkan. Semua korban kekerasan yang membutuhkan rehabilitasi sosial memperoleh penanganan melalui koordinasi dengan pihak yang terkait dalam penanganan kasus perempuan dan anak korban kekerasan.

Anak direhabilitasi berdasarkan hasil kesepakatan diversi dan penetapan atau berdasarkan kebutuhan anak baik sebagai korban ataupun pelaku. Pada saat direhabilitasi anak tetap bisa ikut belajar, baik secara online atau belajar tatap muka. Setelah masa rehabilitasi selesai, anak dikembalikan ke orang tua namun tetap diawasi oleh pekerja sosial selama 3 kali kunjungan rumah.

Tabel 2.137. Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabsos	Jiwa	Na	Na	3	3	5
2	Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos	Jiwa	Na	Na	3	3	5
	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	Na	Na	100	100	100

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

2.1.3.2.2.10. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, menunjukkan jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak dari keseluruhan jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan. Jika dilihat dari persentase cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, meningkat dari tahun 2016 sebesar 11 persen menjadi 100 persen pada tahun 2020. Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan mengalami penurunan.

Tabel 2.138. Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Perkara	1	5	1	2	2
2	Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan	Perkara	9	11	6	5	2
	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	11	45	17	40	100

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

2.1.3.2.2.11. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum, menunjukkan jumlah korban yang mendapatkan layanan bantuan hukum, dari jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum. Pada tahun 2016 hingga tahun 2020 korban yang membutuhkan bantuan hukum seluruhnya mendapatkan layanan bantuan hukum. Upaya mengantisipasi dan menurunkan jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak juga dilakukan dengan sosialisasi baik disekolah, lingkungan masyarakat dan organisasi pemerintahan. Semua pihak harus terlibat dalam pencegahan, terutama keluarga sebab semakin baik ketahanan keluarga maka perempuan dan anak akan terhindar dari kekerasan.

Tabel 2.139. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum	Jiwa	25	21	39	37	24
2	Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum	Jiwa	25	21	39	37	24
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

2.1.3.2.2.12. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, menunjukkan jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan dari keseluruhan jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT. Pada tahun 2016 hingga tahun 2019, cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan 0 persen. Tahun 2020 jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan pemulangan 4 orang atau sebesar 16,67 persen dari jumlah yang tercatat di UPT.

Tabel 2. 140. Layanan Pemulangan Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan	Jiwa	0	0	0	0	4
2	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT	Jiwa	25	21	39	37	24
	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	0	0	0	0	16,67

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

2.1.3.2.2.13. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, menunjukkan jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya dari keseluruhan jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial. Berdasarkan data, pada tahun 2016 hingga tahun 2019 cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan 0 persen. Sementara pada tahun 2020 mencapai 100 persen atau keseluruhan jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial telah disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya.

Tabel 2. 141. Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya	Jiwa	0	0	0	0	4
2	Jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial	Jiwa	0	0	1	2	4
	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	0	0	0	0	100

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

2.1.3.2.2.14. Rasio APM perempuan/laki-laki di SD

Rasio APM perempuan/laki-laki pada jenjang pendidikan SD menunjukkan perbandingan APM SD perempuan dengan APM SD laki-laki. Indikator kesempatan memperoleh pendidikan antara perempuan dan laki-laki diukur dari rasio APM yang menunjukkan kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan. Pendidikan adalah salah satu aspek penting dari pembangunan manusia. Menghilangkan ketimpangan gender di semua jenjang pendidikan akan meningkatkan status dan kemampuan perempuan dan laki-laki. Jumlah penduduk perempuan adalah separuh dari seluruh jumlah penduduk, kesetaraan pendidikan perempuan akan memberikan peran aktif perempuan dalam pembangunan dan merupakan determinan yang penting dalam pembangunan ekonomi. Rasio APM perempuan/laki-laki cenderung meningkat.

Tabel 2. 142. Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	APM-SD Perempuan	Perempuan	10.017	10.495	10.047	9.281	9.239
2	APM-SD Laki-laki	Laki-laki	9.332	9.022	9.267	10.033	10.046
	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD	Poin	1,07	1,16	1,08	0,93	0,92

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

Berdasarkan data pada tabel di atas, rasio APM perempuan/laki-laki pada jenjang pendidikan SD pada tahun 2016 hingga tahun 2018 rasio

APM perempuan terhadap laki-laki pada jenjang SD menunjukkan angka di atas 1, menggambarkan murid perempuan lebih banyak dibandingkan murid laki-laki pada jenjang pendidikan tersebut. Sebaliknya, pada tahun 2019 dan 2020 rasio APM perempuan terhadap laki-laki pada jenjang yang sama menunjukkan angka di bawah 1. Hal ini berarti bahwa pada jenjang pendidikan SD murid perempuan yang bersekolah lebih sedikit dibandingkan dengan murid laki-laki. Angka realisasi 0,92 belum mencapai target yaitu 0,96.

2.1.3.2.2.15. Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP

Rasio APM perempuan/laki-laki pada jenjang pendidikan SMP menunjukkan perbandingan APM SMP perempuan dengan APM SMP laki-laki. Rasio APM perempuan/laki-laki pada jenjang pendidikan SMP berfluktuasi sepanjang tahun 2016 hingga tahun 2020. Namun capaian tetap pada angka di atas 1 atau jumlah perempuan yang bersekolah lebih banyak dibandingkan laki-laki setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2019. Kondisi terakhir pada tahun 2020 mencapai 1,07.

Tabel 2. 143. Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	APM-SMP Perempuan	Perempuan	5.149	5.879	5.137	3.982	4.182
2	APM-SMP Laki-laki	Laki-laki	4.363	4.034	4.217	4.157	3.907
	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP	Poin	1,18	1,46	1,22	0,96	1,07

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

Rasio APM perempuan/laki-laki pada jenjang pendidikan SMA menunjukkan perbandingan APM SMA perempuan dengan APM SMA laki-laki. Angka Partisipasi Murni perempuan setiap tahunnya lebih tinggi dibanding laki-laki. Pada tahun 2016 rasio APM perempuan/laki-laki adalah 1,38. Selanjutnya meningkat pada tahun 2017 dan 2018 menjadi masing-masing 1,48 dan 1,53. Pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 1,50. Pada Tahun 2020 Rasio APM Perempuan terhadap APM laki-laki di SMA mengalami penurunan menjadi 0,99.

Tabel 2. 144. Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMA Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Banyaknya murid SLTA perempuan usia 16-18	Perempuan	3.132	3.154	3.041	2.826	4.217
2	Banyaknya murid SLTA laki-laki usia 16-18	Laki-laki	2.265	2.135	1.989	1.886	4.271
	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMA	Poin	1,38	1,48	1,53	1,50	0,99

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

2.1.3.2.2.16. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di Perguruan Tinggi

Rasio APM perempuan/laki-laki pada jenjang Perguruan Tinggi menunjukkan perbandingan APM perempuan di Perguruan Tinggi dengan APM laki-laki. Pada tahun 2016 rasio APM perempuan/laki-laki adalah 4,77.

Selanjutnya menurun pada tahun 2017 dan 2018 menjadi masing-masing 2,57 dan 0,72. Pada tahun 2019 rasio APM perempuan/ Laki-laki di perguruan tinggi sebesar 3,00 dan pada Tahun 2020 menjadi 3,50.

Tabel 2. 145. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di Perguruan Tinggi Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anak perempuan di tingkat Perguruan tinggi usia 19-24 tahun	Perempuan	124	108	147	75	501
2	Jumlah anak laki-laki di tingkat Pendidikan Tinggi usia 19-24 tahun	Laki-Laki	26	42	205	25	143
	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di Perguruan Tinggi	Poin	4,77	2,57	0,72	3,00	3,50

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

2.1.3.2.2.17. Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun

Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun, menunjukkan perbandingan AMH 15-24 perempuan dengan AMH 15-24 laki-laki. Rasio AMH 15-24 perempuan terhadap laki-laki pada tahun 2016 adalah 142,12 persen, meningkat hingga tahun 2019 mencapai 151,81 persen.

Tabel 2. 146. Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	AMH 15-24 perempuan	Perempuan	3.256	3.262	3.188	2.901	98,71
2	AMH 15-24 laki-laki	Laki-laki	2.291	2.177	2.194	1.911	101,31
	Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun	Poin	1,42	1,49	1,45	1,51	0,97

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

2.1.3.2.2.18. Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian

Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian, dihitung dari banyaknya pekerja upahan perempuan di sektor non pertanian dari total banyaknya pekerja upahan di sektor non pertanian. Pada tahun 2017 kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian adalah 29,51 persen, meningkat hingga tahun 2019 mencapai 34,48 persen. Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya minat perempuan untuk berpenghasilan sendiri dan perempuan sudah memahami pentingnya kesetaraan gender. Pada tahun 2020, dari segi jumlah pekerja upahan perempuan sebanyak 124 orang atau 36,36 persen.

Tabel 2. 147. Kontribusi Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan Di Sektor Nonpertanian Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Banyaknya pekerja upahan perempuan di sektor non	Pekerja	28	352	234	220	124

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
	pertanian						
2	Banyaknya pekerja upahan di sektor non pertanian	Pekerja	77	1.193	704	638	341
	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian	%	36,36	29,51	33,24	34,48	36,36

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

2.1.3.2.3. Bidang Urusan Pangan

2.1.3.2.3.1. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan utama menggambarkan kondisi ketersediaan bahan pangan utama yang diproduksi terhadap kebutuhan pangan penduduk. Untuk wilayah Kabupaten Soppeng, bahan pangan utama yang dihasilkan terdiri dari Beras, Jagung, Ubi Kayu dan Ubi Jalar. Adapun kondisi capaian ketersediaan pangan utama tahun 2016-2020 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. 148. Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun	Kg	57,635,508	61,118,873	67,094,672	63,539,425	86,983,333
2	Jumlah penduduk	Jiwa	226,305	241,43	236,156	237,115	239,391
	Ketersediaan Pangan Utama	%	255	253	284	268	363

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, 2020
Ket : Data Tahun 2020 sampai dengan Kondisi Triwulan III (30 September 2020)

Ketersediaan Pangan Utama (%) dari tahun 2016-2020 selalu berada pada kondisi diatas 100% yang menunjukkan bahwa rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama melebihi kebutuhan penduduk atau mengalami surplus. Pada Tahun 2016 mencapai 255%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 253%. Tahun 2018 kembali meningkat menjadi 284% dan tahun 2019 menurun menjadi 268%. Kondisi tahun 2020 sampai dengan kondisi triwulan III (30 September 2020) sudah mencapai 363%. Capaian ketersediaan pangan utama ini sangat bergantung pada produksi hasil pertanian, khususnya 4 (empat) jenis komoditi pangan utama yaitu Beras, Jagung, Ubi Kayu dan Ubi Jalar.

2.1.3.2.3.2. Ketersediaan energi dan Protein

Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita menggambarkan kondisi ketersediaan jumlah energi dan protein yang terkandung dalam bahan pangan yang ada di Kabupaten Soppeng terhadap kebutuhan penduduk. Standar kebutuhan energi per kapita per hari ideal yaitu 2.400 Kkal, dan protein 63 gram per kapita per hari. Adapun kondisi ketersediaan energi dan protein di Kabupaten Soppeng tahun 2016-2020 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. 149. Ketersediaan Energi dan Protein Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan pangan/kapita/hari	Perkapita /hari	337.92	338.12	460.10	465.00	445.98
2	Kandungan Kalori	Kkal	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
3	Kandungan Protein	Gram	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00
4	BDD	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Ketersediaan Energi Perkapita (KKal/kapita/hari)	Kkal	8,539.00	9,438.00	11,179.00	11,401.00	11,287.00
	Ketersediaan Protein Perkapita (Gram/kapita/hari)	Gram	201.25	241.26	286.28	286.96	259.07

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, 2020

Ketersediaan Energi dan Protein dari tahun 2016-2020 selalu berada pada kondisi diatas standar konsumsi ideal karena melimpahnya bahan pangan yang dihasilkan, terutama komoditi pangan penghasil energi seperti Padi-padian dan Umbi-umbian, serta penghasil protein dari Hewani maupun Nabati. Pada Tahun 2016 Ketersediaan Energi mencapai 8.539 Kkal/kapita/hari, dan terus meningkat menjadi 9.438 Kkal/kapita/hari pada tahun 2017, tahun 2018 menjadi 11.179 Kkal/kapita/hari, tahun 2019 mencapai 11.401 Kkal/kapita/hari dan tahun 2020 sampai kondisi triwulan III (30 September 2020) sudah mencapai 11.287 Kkal/kapita/hari. Sedangkan untuk ketersediaan protein pada tahun 2016 yaitu 201,25 gram/kapita/hari, meningkat menjadi 241,26 gram/kapita/hari pada tahun 2017, kembali meningkat pada tahun 2018 menjadi 286,28 gram/kapita/hari dan tahun 2019 menjadi 286,96 gram/kapita/hari. Sedangkan untuk tahun 2020 sampai kondisi triwulan III (30 September 2020) sudah mencapai 259,07 gram/kapita/hari.

2.1.3.2.3.3. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Pengawasan dan Pembinaan terkait keamanan pangan menjadi salah satu aspek penting dalam pencapaian Ketahanan Pangan, tidak hanya dari segi ketersediaan, tetapi juga mencakup aman atau tidaknya suatu jenis pangan untuk dikonsumsi masyarakat. Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan salah satunya dengan melakukan pengujian terhadap sampel bahan pangan yang diperjual belikan di pasar-pasar yang ada. Adapun hasil pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Kabupaten Soppeng tahun 2016-2020 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. 150. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku	Sampel	3	5	2	5	6
2	Jumlah total sampel pangan yang di Perdagangkan pengum pul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan	Sampel	7	11	5	5	6
	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	42.86	45.45	40.00	100.00	100.00

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, 2020

Berdasarkan tabel tersebut diatas, tahun 2016 capaian pengawasan dan pembinaan keamanan pangan yaitu 42,86%, meningkat pada tahun 2017 menjadi 45,45%. Akan tetapi pada tahun 2018 turun menjadi 40% dan kembali meningkat pada tahun 2019 dan 2020 menjadi 100%. Upaya membangun kesadaran masyarakat khususnya pengusaha atau pedagang bahan pangan terus dilakukan melalui berbagai jenis kegiatan sosialisasi maupun kunjungan langsung, agar bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat aman dari berbagai jenis zat berbahaya.

2.1.3.2.4. Bidang Urusan Pertanahan

2.1.3.2.4.1. Persentase luas lahan bersertifikat

Persentase luas lahan bersertifikat di Kabupaten Soppeng pada tahun 2018 sebesar 41,77 & dan pada tahun 2019 sebesar 41,86 %

Tabel 2.151. Persentase Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Luas Lahan bersertifikat	Ha	Na	Na	342.42	342.97	Na
2	Jumlah luas wilayah	Ha	Na	Na	819.84	819.29	Na
	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	Na	Na	41.77	41.86	Na

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2020

2.1.3.2.4.2. Penyelesaian kasus tanah negara

Kasus tanah negara di Kabupaten Soppeng dari tahun 2016-2018 dapat diselesaikan dengan persentase 100%, di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 50% dan tahun 2020 masih terdapat kasus yang belum terselesaikan diakibatkan karena adanya pembatasan kegiatan tatap muka sebagai wujud dari kegiatan mediasi antara pihak pemerintah daerah dengan pihak-pihak yang melakukan klaim.

Tabel 2. 152. Penyelesaian Kasus Tanah Negara Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kasus yang diselesaikan	Kasus	8	8	2	1	0
2	Jumlah kasus yang terdaftar	Kasus	8	8	2	2	1
	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	100	100	100	50	0

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2020

2.1.3.2.4.3. Penyelesaiaan Izin Lokasi

Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. Izin lokasi tersebut dapat diselesaikan dengan persentase sebesar 100% dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 2. 153. Penyelesaiaan Izin Lokasi Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Izin Lokasi	Izin	5	5	5	3	2

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
2	Permohonan Izin Lokasi	Izin	5	5	5	3	2
	Penyelesaian Izin Lokasi	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2020

2.1.3.2.5. Bidang Urusan Lingkungan Hidup

2.1.3.2.5.1. Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Dokumen tersebut sampai saat ini belum disusun.

Tabel 2. 154. Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Dokumen RPPLH	Ada/Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2020

2.1.3.2.5.2. Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi

KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Dokumen KLHS di Kabupaten Soppeng telah disusun di tahun 2016 dalam rangka penyusunan RPJMD Kabupaten Soppeng periode 2016-2021.

Tabel 2. 155. Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Dokumen KLHS Untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi (Ada/Tidak ada)	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2020

2.1.3.2.5.3. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air

Indeks kualitas air adalah mekanisme matematis untuk menghitung data kualitas air yang mencerminkan tingkat kualitas air di sungai dan danau, selain untuk keperluan air yang digunakan seperti; air minum, air yang digunakan di pertanian, atau air yang digunakan di industry. Indeks kualitas air juga memberi data penting untuk menggambarkan status kualitas air secara umum yang dapat sangat membantu dalam memilih teknik pengolahan air yang sesuai untuk mengatasi masalah kontaminasi. Di kabupaten soppeng, Indeks kualitas air pada tahun 2016 sebesar 3,32 dan terus menurun pada tahun 2020 sebesar 70.

Tabel 2. 156. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks kualitas air	Poin	3.32	1.63	1.51	0.86	70

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2020

2.1.3.2.5.4. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. Indeks ini biasa digunakan oleh badan pemerintah untuk memperlihatkan seberapa buruk kualitas udara di suatu daerah. Di Kabupaten Soppeng, Indeks kualitas udara bersifat fluktuatif, pada tahun 2016 sebesar 89,86 meningkat di tahun 2017 sebesar 91,71 menurun di tahun 2018 sebesar 90, 70 bahkan mencapai 93,67 di tahun 2019 namun menurun Kembali di tahun 2020 sebesar 90,16.

Tabel 2. 157. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kualitas Udara	Poin	89.86	91.71	90.70	93.67	93.16

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2020

2.1.3.2.5.5. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Penghitungan IKTL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan) dilakukan dengan membanding luas hutan dengan luas wilayah administratifnya IKTL Pada tahun 2016-2019 nilainya konstan pada 0,48 kemudian nilai indeks kualitas tutupan lahan pada tahun 2020 sebesar 78,9. Perubahan data mencolok pada tahun 2020 diakibatkan oleh adanya perubahan parameter , dimana perhitungan tutupan lahan dilakukan penyempurnaan dengan menambahkan tutupan semak belukar dan belukar rawa yang berada di Kawasan hutan , sempadan sungai , danau dan pantai lereng, ruang terbuka hijau, kebun raya dan taman keanekaragaman hayati.

Tabel 2. 158. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks kualitas Tutupan lahan	Poin	0,48	0,48	0,48	0,48	78,9

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2020

2.1.3.2.5.6. Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng sebesar 100% di tahun 2016- 2020 dan 61% di tahun 2020.

Tabel 2. 159. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin Pplh Dan Puu Lh Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah	Izin	Na	30	71	136	103

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
	Daerah kabupaten/kota yang ditangani						
2	Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota		Na	30	71	136	169
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	%	Na	100%	100%	100%	61%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2020

2.1.3.2.5.7. Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan masyarakat

Pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dan kebersihan lingkungan. Pendidikan dan pelatihan tersebut setiap tahun dilaksanakan dengan frekuensi 2-3 kali setiap tahunnya.

Tabel 2. 160. Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan masyarakat Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota	Kali	2	3	3	3	3

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2020

2.1.3.2.5.8. Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup

Pemberian penghargaan lingkungan hidup dimaksudkan untuk memberikan apresiasi dan motivasi kepada individu dan masyarakat dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Setiap tahunnya di Kabupaten Soppeng dilaksanakan pemberian penghargaan lingkungan hidup dengan harapan masyarakat Kabupaten Soppeng semakin peduli dan berbudaya lingkungan.

Tabel 2. 161. Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup (Ada/Tidak ada)	Ada/Tidak ada	Ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2020

2.1.3.2.5.9. Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota

Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha

di Kabupaten Soppeng dapat ditangani dengan baik, setiap pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dapat segera ditangani dan diselesaikan di tahun berkenaan.

Tabel 2. 162. Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengaduan Masyarakat yang ditangani	Pengaduan	0	1	0	0	1
2	Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	Pengaduan	0	1	0	0	1
	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/kota.	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2020

2.1.3.2.5.10. Timbulan sampah yang ditangani

Timbulan sampah yang ditangani di Kabupaten Soppeng di tahun 2016 sebesar 24,00 %, jumlah tersebut terus meningkat pada tahun 2019 mencapai 73,93 % kemudian di tahun 2020 sebesar 65,85 %.

Tabel 2. 163. Timbulan sampah yang ditangani Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	volume timbulan sampah yang ditangani	M^3	3.294.987	8.099.027	4.112,54	4.157.69	7.672,30
2	total timbulan sampah	M^3	13729.11	13729.11	5.614,45	5.623.99	11.650,36
	Timbulan Sampah yang Ditangani	%	24	53.45	73.25	73.93%	65.85

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2020

2.1.3.2.5.11. Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R

Pendekatan pengelolaan sampah seyogyanya dilakukan melalui pendekatan berbasis 3R dan berbasis masyarakat, pengelolaan sampah secara terpadu dengan melaksanakan pengelolaan sejak dari sumbernya. 3R adalah upaya yang meliputi kegiatan mengurangi (reduce), menggunakan kembali (reuse) dan mendaur ulang sampah (recycle). Penerapan sampah dengan konsep 3R (Reuse, Reduce dan Recycle) dapat dijadikan solusi dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Di Kabupaten Soppeng, persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yakni pada tahun 2017 sebesar 12,69 % hingga 35,01 % di tahun 2020.

Tabel 2. 164. jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Sampah yang terkurangi melalui 3 R adalah jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan	M^3	Na	2,913.76	6,927.70	7,535.67	2,634.25
	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R	%	Na	12.69	30	32.3	35.01

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2020

2.1.3.2.5.12. Persentase cakupan area pelayanan

Cakupan area pelayanan persampahan di Kabupaten Soppeng mencakup wilayah Ibu kota Kecamatan di tiap kecamatan. Area pelayanan belum dapat menjangkau daerah-daerah terpencil disebabkan oleh masih kurangnya armada kendaraan pengangkut sampah yang dimiliki oleh pemerintah daerah sehingga persentase cakupan area pelayanannya hanya sebesar 26 %.

Tabel 2. 165. Cakupan area pelayanan Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	luas area pelayanan pengelolaan sampah (km2/ha)	Km^2/Ha	390	390	390	390	390
2	luas area kabupaten/kota (km2/ha)	Km^2/Ha	1500	1500	1500	1500	1500
	Persentase Cakupan Area Pelayanan	%	26%	26%	26%	26%	26%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2020

2.1.3.2.5.13. Persentase jumlah sampah yang tertangani

Persentase jumlah sampah yang tertangani dihitung dari jumlah sampah yang tertangani dibagi dengan total jumlah timbulan sampah yang ada. Data menunjukkan bahwa di Kabupaten Soppeng pada tahun 2016 persentase jumlah sampah yang tertangani sebesar 24,00 % dan terus meningkat hingga tahun 2019 sebesar 73,93 %. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 65,85 %.

Tabel 2. 166. jumlah sampah yang tertangani Tahun 2016-2020

NO	Uraian	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah sampah yang tertangani	Ton	9,884.96	24,297.08	24,334.55	24,601.73	23,016.90
2	Total jumlah timbulan sampah di kabupaten /kota	Ton	41,187.34	45,457.59	33,221.57	33,278.05	34,951.09
	Persentase	%	24.00	53.45	73.25	73.93	65.85

NO	Uraian	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
	Jumlah Sampah yang Tertangani						

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2020

2.1.3.2.5.14. Operasionalisasi TPA/ TPST /SPA di Kabupaten / Kota

Pengelolaan dan pengembangan tempat pembuangan akhir sampah (TPA) merupakan salah satu indikator dalam penilaian Program Adipura. Nilai TPA Kabupaten Soppeng pada tahun 2016 sebesar 73,05 dan terus meningkat hingga angka 75 pada tahun 2020.

Tabel 2. 167. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai TPA (Program Adipura)	Nilai	73.05	75.95	73.55	75	75

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2020

2.1.3.2.5.15. Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan

Pengelolaan sampah oleh swasta harus mendapatkan izin oleh pemerintah setempat. Pemerintah Kabupaten Soppeng telah menerbitkan sebanyak 2 izin di tahun 2019. Pada tahun 2020 bukan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup untuk memberikan izin, akan tetapi hanya akan memberikan rekomendasi pengelolaan sampah yang akan diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Tabel 2. 168. Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	jumlah izin pengelolaan sampah oleh swasta yang terbit	Izin	0	0	0	2	0
2	jumlah izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diajukan dalam satu tahun	Izin	0	0	0	2	0
	Persentase Izin Pengelolaan Sampah Oleh Swasta yang Diterbitkan	%	0	0	0	100	0

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2020

2.1.3.2.5.16. Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan

Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan di Kabupaten Soppeng mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 sebesar 62,50 % menurun hingga 4,35 % di tahun 2020. Jumlah pengelola sampah oleh swasta pada data dibawah termasuk pengelola yang belum memiliki izin.

Tabel 2. 169. Pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pengelolaan sampah oleh swasta yang taat pada peraturan	Pengelola Sampah Swasta	0	10	2	1	1

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
2	jumlah Pengelolaan sampah oleh swasta	Pengelola Sampah Swasta	0	16	22	22	23
	Persentase Pengelolaan Sampah Oleh Swasta yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	%	0	62.50	9.09	4.55	4.35

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2020

2.1.3.2.6. Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.1.3.2.6.1. Rasio penduduk ber-KTP per-satuan penduduk

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar kepemilikan KTP per satuan penduduk Kabupaten Soppeng, Angka ini dihitung dengan membandingkan antara jumlah penduduk usia >17 yang ber KTP dengan Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah (Wajib KTP) Dapat dilihat dari tabel berikut bahwa rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk kurun waktu 2016-2020 mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan. Rasio tersebut sudah tergolong dalam kondisi yang baik karena sudah mengalami peningkatan hampir tiap tahun dan sudah hampir mencapai angka 100.

Tabel 2. 170. Penduduk Ber-KTP Per-Satuan Penduduk Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP	Jiwa	171.630	177.785	177.749	177.801	177.197
2	Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah	Jiwa	190.568	183.416	178.255	178.080	177.767
	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Poin	0,9	0,97	0,99	0,99	0,99

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

2.1.3.2.6.2. Rasio bayi berakte kelahiran

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase bayi yang memiliki akte kelahiran. Kepemilikan akte lahir menunjukkan bahwa kelahirannya telah dicatat dalam data kependudukan. Kepemilikan akte kelahiran bermanfaat untuk kemudahan dalam mengakses pelayanan publik yang bersifat formal ataupun menjadi syarat untuk pembuatan surat keterangan diri penduduk. Rasio bayi berakte kelahiran dihitung dengan membandingkan jumlah bayi yang berakte kelahiran terhadap jumlah bayi, Berikut data Rasio bayi ber-akte kelahiran di Kabupaten Soppeng kurun waktu 2016-2020:

Tabel 2. 171. Rasio Bayi ber-Akte Kelahiran Tahun 2016-2020 Kabupaten Soppeng

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah bayi berakta kelahiran	Bayi	4.222	3.671	4.232	4.341	4.131
2	Jumlah bayi	Bayi	4.222	3.808	4.316	4.406	4.198
	Rasio Bayi Berakta Kelahiran	Poin	1,00	0,96	0,98	0,99	0,98

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

2.1.3.2.6.3. Rasio Pasangan Ber-Akte Nikah

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase penduduk menikah yang memiliki akte. Akte nikah merupakan bukti pernikahan suami istri yang sah diakui oleh negara dan agama. Kepemilikan akte nikah memudahkan dalam administrasi dan identifikasi kependudukan. Rasio pasangan berakte nikah dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pasangan berakte nikah dengan jumlah seluruh pasangan nikah. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, diketahui bahwa jumlah pasangan nikah yang ada di Kabupaten Soppeng sudah berakte nikah. Sebagai berikut:

Tabel 2. 172. Rasio Pasangan Ber-Akte Nikah Tahun 2016-2020 Kabupaten Soppeng

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasangan nikah berakta nikah	Pasangan	6.442	19.341	23.441	29.128	68.486
2	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	Pasangan	53.869	52.100	51.478	51.969	111.956
	Rasio pasangan berakta nikah	Poin	0,12	0,37	0,45	0,56	0,61

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

2.1.3.2.6.4. Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

Indikator ini bertujuan untuk melihat apakah Kabupaten Soppeng telah memiliki database kependudukan pada skala Provinsi. Data mengenai ketersediaan database kependudukan skala Provinsi, berdasarkan informasi dari instansi terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng sudah tersedia. Database kependudukan dilakukan secara rutin melalui program SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Melalui program tersebut, database kependudukan di Kabupaten Soppeng dapat dilihat secara berkala dan dapat diakses oleh siapa pun yang berkepentingan dengan data tersebut. Ditambah lagi, dengan adanya program yang dijalankan secara online terpadu, memudahkan koordinasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat provinsi untuk dilakukan.

2.1.3.2.6.5. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Indikator ini bertujuan untuk melihat apakah KTP yang diterbitkan sudah berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan). Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng telah menerapkan program e-KTP dan penerapan KTP berbasis NIK.

2.1.3.2.6.6. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Cakupan penerbitan KTP Elektronik adalah jumlah dokumen KTP Elektronik yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah wajib KTP dalam satu wilayah pada tahun yang sama. Jumlah wajib KTP dihitung berdasarkan database kependudukan kabupaten/kota mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun berjalan. Dalam database kependudukan

ini sudah termasuk data KTP Elektronik baru atau penggantian KTP Elektronik karena habis masa berlakunya, atau yang belum habis masa berlakunya dikarenakan pindah datang, rusak atau hilang.

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Soppeng, angka ini dihitung dari jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan dari total jumlah penduduk Wajib KTP. Berdasarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng Cakupan Penerbitan KTP, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 173. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tahun 2016-2020 Kabupaten Soppeng

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan	KTP	171.630	177.785	177.749	178.857	182.331
2	Jumlah penduduk wajib KTP	Jiwa	190.568	183.416	178.255	179.807	183.561
	Cakupan penerbitan KTP	%	90,06	96,93	99,72	99,47	99,33

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

2.1.3.2.6.7. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Cakupan penerbitan akta kelahiran adalah jumlah dokumen kutipan akta kelahiran yang telah diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil sampai dengan tahun yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah kelahiran yang terjadi dalam satu wilayah sampai dengan tahun yang bersangkutan. Jumlah kelahiran yang terjadi sampai dengan tahun yang bersangkutan adalah jumlah kelahiran yang harus diterbitkan kutipan akta kelahirannya yang dihitung berdasarkan penduduk yang mempunyai NIK sesuai dengan database kependudukan.

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar Cakupan penerbitan Akta Kelahiran di Kabupaten Soppeng, angka ini dihitung dari jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan dari total jumlah kelahiran di tahun bersangkutan. Berdasarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran, tahun 2016-2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 174. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2016-2020 Kabupaten Soppeng

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran ditahun bersangkutan	Jiwa	2.727	2.555	2.741	2.013	1.337
2	Jumlah kelahiran ditahun bersangkutan	Jiwa	2.929	2.708	2.768	2.061	1.376
	Cakupan Penerbitan Akta	%	93,1	94,35	99,02	97,67	97,16

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
	kelahiran						

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

2.1.3.2.7. Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.1.3.2.7.1. Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik adalah jumlah kantor pemerintahan desa yang berfungsi dengan kondisi baik dan layak pakai pada masing-masing pemerintahan desa. Pada Tahun 2016 hingga tahun 2020 terdapat 49 desa di Kabupaten Soppeng dengan keseluruhan pemerintahan desa telah memiliki kantor pemerintahan desa yang berfungsi baik dan beroperasi sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan desa. Sehingga cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik pada tahun 2016 hingga tahun 2020 telah mencapai 100%. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.175. Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik	Unit	49	49	49	49	49
2	Jumlah seluruh pemerintahan desa	Unit	49	49	49	49	49
	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2020

2.1.3.2.7.2. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Kelompok binaan LPM merupakan kelompok masyarakat yang dibina oleh LPM sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM dapat menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah. LPM mempunyai peran khusus dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa atau kelurahan. Di setiap desa dan kelurahan telah dibentuk LPM dengan ruang lingkup peran dalam satu wilayah desa atau kelurahan.

Jumlah LPM di Kabupaten Soppeng adalah 70 LPM. Sementara rata-rata jumlah kelompok binaan LPM di Kabupaten Soppeng pada Tahun 2016 hingga tahun 2017 terdapat 70 kelompok binaan LPM dari 70 jumlah LPM. Sehingga apabila dirata-ratakan terdapat 1 kelompok binaan LPM di Kabupaten Soppeng pada masing-masing LPM. Pada Tahun 2020 jumlahnya

meningkat menjadi rata-rata 3 kelompok binaan LPM pada masing-masing LPM.

Tabel 2. 176. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pembinaan Masyarakat (LPM) Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok binaan LPM	Kelompok	70	70	70	70	210
2	Jumlah LPM	Lembaga	70	70	70	70	70
	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Rata-Rata	1	1	1	1	3

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2020

2.1.3.2.7.3. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari oleh dan untuk masyarakat menuju kesejahteraan keluarga. Ruang lingkup pembinaan Tim Penggerak PKK baik desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten adalah pelaksanaan 10 program pokok PKK dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam melaksanakan program- program pembangunan daerah/pusat. Kelompok binaan PKK bergerak di penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat yang dibina secara teknis oleh Tim Penggerak PKK.

Rata-rata jumlah binaan PKK adalah jumlah kelompok binaan PKK dari jumlah seluruh PKK di Kabupaten Soppeng. PKK di Kabupaten Soppeng sejumlah 70 terdiri dari PKK Kabupaten 1, PKK Kecamatan 8 dan PKK Desa/Kelurahan 70. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK pada tahun 2016 hingga tahun 2020 yaitu 79 kelompok binaan PKK dari 79 jumlah PKK yang ada. atau rata-rata 1 kelompok binaan pada masing-masing PKK. Jumlah ini meningkat pada tahun 2020 menjadi rata-rata 4 kelompok binaan pada masing-masing PKK.

Tabel 2.177. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	79	79	79	79	350
2	Jumlah PKK	Lembaga	79	79	79	79	79
	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Kelompok	1	1	1	1	4

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2020

2.1.3.2.7.4. Persentase LPM Aktif

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa atau Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan. Jumlah LPM di Kabupaten Soppeng selama lima tahun terakhir (2016-2020) berjumlah 70 LPM dengan tingkat capaian persentase LPM aktif mencapai 100 persen.

Tabel 2.178. Persentase LPM Aktif Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah LPM aktif	Lembaga	70	70	70	70	70
2	Jumlah LPM	Lembaga	70	70	70	70	70
	Persentase LPM Aktif	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2020

2.1.3.2.7.5. Persentase LPM Berprestasi

LPM berprestasi adalah LPM yang mampu berperan pada aspek tertentu dalam menggalang persatuan dan kesatuan masyarakat mewujudkan pembangunan partisipatif meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dan tindak lanjut hasil pembangunan. Seleksi terhadap LPM untuk mendapatkan LPM berprestasi merupakan kebijakan yang sangat strategis untuk peran aktif lembaga-lembaga tersebut. Pelaksanaan lomba LPM berprestasi diharapkan dapat mendorong sinergitas antara peran pemerintah desa/kelurahan dan partisipasi aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan dalam proses pemberdayaan dan kemandirian masyarakat.

Pada kurun waktu 2016-2019 dari 70 LPM yang ada di Kabupaten Soppeng terdapat 3 LPM yang berprestasi atau 4,29 persen dari jumlah LPM. Namun pada tahun 2020, lomba LPM berprestasi ditiadakan akibat pandemi covid-19.

Tabel 2. 179. Persentase LPM Berprestasi Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah LPM berprestasi	Lembaga	3	3	3	3	0
2	Jumlah LPM	Lembaga	70	70	70	70	70
	Persentase LPM Berprestasi	%	4,29	4,29	4,29	4,29	0

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2020

2.1.3.2.7.6. Persentase PKK Aktif

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, disingkat PKK, adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui 10 segi pokok keluarga dengan membentuk Tim Penggerak PKK di semua tingkatan, yang keanggotaan timnya secara relawan dan terdiri dari tokoh/pemuka masyarakat, para isteri kepala dinas/jawatan dan isteri kepala daerah s.d. tingkat desa dan kelurahan yang kegiatannya didukung dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pada Tahun 2016-2020, terdapat 79 PKK yang aktif dari 79 PKK yang terdata di Kabupaten Soppeng, atau persentase PKK aktif di Kabupaten Soppeng mencapai 100 persen.

Tabel 2. 180. Persentase PKK Aktif Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PKK aktif	Lembaga	79	79	79	79	79
2	Jumlah PKK	Lembaga	79	79	79	79	79
	Persentase PKK Aktif	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2020

2.1.3.2.7.7. Persentase Posyandu Aktif

Pos Pelayanan Keluarga Berencana - Kesehatan Terpadu (Posyandu) adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Posyandu merupakan salah satu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Tujuan diselenggarakan Posyandu antara lain untuk: 1) mempercepat penurunan angka kematian bayi, anak balita dan angka kelahiran; 2) mempercepat penerimaan NKKBS; 3) meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan kesehatan dan lainnya yang menunjang, sesuai dengan kebutuhan.

Jumlah Posyandu di Kabupaten Soppeng yang ditempatkan di balai dusun, balai kelurahan, RW, dan sebagainya sebanyak 327 posyandu dengan Persentase Posyandu yang aktif mencapai 100 persen.

Tabel 2. 181. Persentase Posyandu Aktif Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Posyandu aktif	Unit	327	327	327	327	327
2	Total Posyandu	Unit	327	327	327	327	327
	Persentase Posyandu Aktif	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2020

2.1.3.2.7.8. Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana masyarakat berintegrasi dengan program-program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kondisi masyarakat di bidang ekonomi, sosial, politik dan kultural dimana masyarakat yang berswadaya dapat berupa kelompok organisasi yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri ataupun himpunan masyarakat tanpa organisasi.

Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Soppeng khususnya cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 dan 2017 persentase swadaya masyarakat sebesar 27,12 persen dari total program pemberdayaan masyarakat. Kegiatan tersebut antara lain kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh beberapa desa dengan kepanitiaan dilaksanakan oleh Badan Kerjasamanya antar Desa (BKAD). Tahun 2018 dan 2019 swadaya masyarakat meningkat menjadi 33,55 persen. Adapun persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat pada tahun 2020 sebesar 34,34 persen.

Tabel 2. 182. Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan Mayarakat Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Swadaya masyarakat mendukung	Juta Rp	4.375,3	4.376,3	7.950,8	7.950,8	8.139,0

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
	Program Pemberdayaan Masyarakat						
2	Total Program Pemberdayaan Masyarakat	Juta Rp	16.136,1	16.136,1	23.700,7	23.700,7	23.700,7
	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	27,12	27,12	33,55	33,55	34,34

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2020

2.1.3.2.7.9. Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat

Dalam struktur APBDESA Kabupaten soppeng terdapat keseragaman pelaksanaan program/kegiatan dengan melaksanakan 2 item Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yaitu Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Aparatur Pemerintah Desa serta BPD, dan program/kegiatan Peningkatan SDM Masyarakat Desa. Program/Kegiatan tersebut berbentuk non fisik berupa bimbingan teknis, pelatihan dan penyuluhan, sehingga tidak terdapat data yang dapat ditampilkan untuk program/kegiatan pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat khususnya pada Tahun 2016-2019. Pada Tahun 2020 pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat mencapai 80 persen.

Tabel 2. 183. Pemeliharaan Pasca program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat	Program	-	-	-	-	40
2	Total pasca program pemberdayaan masyarakat	Program	-	-	-	-	50
	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	%	-	-	-	-	80

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2020

2.1.3.2.8. Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penduduk adalah subjek dan objek pembangunan. Jumlah penduduk yang tidak terkendali akan menghambat proses-proses pembangunan menuju tujuan yang ingin dicapai karena sumberdaya pembangunan terserap untuk pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan manusia yang selalu bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan adanya pengendalian jumlah penduduk dan penggiatan program Keluarga Berencana. Indikator utama keberhasilan pengendalian penduduk adalah turunnya angka kesuburan (Total Fertility Rate/TFR). Selain itu terdapat pula indikator lain untuk mendukung terwujudnya penurunan TFR. Perkembangan capaian indikator pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Soppeng tahun 2015-2020 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

2.1.3.2.8.1. Laju pertumbuhan penduduk

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Laju pertumbuhan penduduk ditentukan oleh perubahan dinamika kependudukan seperti kelahiran, kematian, dan migrasi.

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Soppeng berfluktuasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020). Angka laju pertumbuhan tersebut masih termasuk dalam kategori lambat, karena angka pertumbuhan penduduk masih kurang dari 1% setiap tahunnya, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 184. Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	0,08	0,07	0,13	0,10	0,07

Sumber: BPS, 2020

2.1.3.2.8.2. Total Fertility Rate

Total Fertality Rate atau Angka Kelahiran Total adalah rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. Indikator utama keberhasilan pengendalian penduduk adalah turunnya angka kesuburan (*Total Fertility Rate*/TFR). Data ini sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

Tabel 2. 185. Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,3	2,3	2,19	2,16	2,16

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

TFR untuk tahun 2016 dan 2017 stagnan pada angka 2,3 artinya rata-rata satu keluarga memiliki 2-3 orang anak. Pada tahun 2018 TFR pada angka 2,19. Sedangkan pada tahun 2019-2020 dimana angka ini berhasil melampaui target nasional. Namun demikian harus tetap dilakukan konseling dan penyuluhan secara intens kepada para akseptor (PUS) dalam hal pemakaian alat kontrasepsi secara tepat.

2.1.3.2.8.3. Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB

Perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB semakin meningkat artinya adanya kepedulian stakeholder Perangkat Daerah dalam pengendalian penduduk dan KB di Kabupaten Soppeng. Hal ini ditunjukkan dengan upaya mereka untuk membantu baik berupa data maupun koordinasi terkait hal-hal yang diperlukan dalam operasional kampung KB.

Tabel 2. 186. Persentase Perangkat Daerah yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB	OPD	38	38	38	34	34
2	Jumlah semua perangkat daerah	OPD	38	38	38	34	34
3	Persentase Perangkat Daerah(Dinas/Badan) yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

2.1.3.2.8.4. Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk

Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk, adalah proporsi jumlah perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk terhadap Jumlah semua perangkat daerah.

Tabel 2. 187. Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	OPD	21	21	24	24	24
2	Jumlah semua perangkat daerah	OPD	38	38	38	34	34
	Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	%	55,26	55,26	57,89	70,59	70,59

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

Berdasarkan data Dinas P3APPKB, persentase SKPD yang memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk pada tahun 2016 dan 2017 mencapai 55,26%, artinya ada 21 dari 38 SKPD. Tahun 2018 ada penambahan 3 SKPD sehingga persentasenya meningkat menjadi 57,89%. Perubahan Nomenklatur kelembagaan pada tahun 2019 menjadi hanya 34 SKPD menyebabkan meningkatnya persentase SKPD yang memanfaatkan data pada rancangan induk pengendalian penduduk. Tahun 2019-2020 persentase menjadi 70,59% atau 24 dari 34 SKPD yang ada telah memanfaatkan data rancangan induk pengendalian penduduk.

2.1.3.2.8.5. Jumlah kebijakan yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk

Penduduk yang besar dan berkualitas akan menjadi aset bermanfaat bagi pembangunan, sebaliknya penduduk yang rendah kualitasnya akan menjadi beban pembangunan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan penduduk yang bermanfaat baik dari segi kualitas maupun kuantitas, diperlukan adanya regulasi yang mengatur tentang pengendalian

kuantitas dan kualitas penduduk. Namun regulasi atau kebijakan tentang pengendalian penduduk berupa Peraturan Daerah belum tersedia, dikarenakan masih sangat terbatasnya alokasi anggaran yang dapat digunakan dan masih terdapat beberapa kegiatan lain yang diprioritaskan. Di masa yang akan datang diharapkan penyusunan regulasi tentang pengendalian kualitas dan kuantitas penduduk bisa menjadi prioritas utama sehingga kegiatan DP3APPKB maupun SKPD dan stakeholder terkait akan mengacu pada *grand design* perencanaan kependudukan.

2.1.3.2.8.6. Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan

Data profil termasuk parameter dan proyeksi penduduk merupakan data yang diperlukan daerah dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Data profil (parameter dan proyeksi penduduk) belum sepenuhnya diperkenalkan ke Perangkat Daerah lain sehingga mengakibatkan ketidakseragaman penggunaan data kependudukan. Sementara penggunaan data kependudukan merupakan data pokok dalam hal pembagian dan penentuan beberapa data dan capaian pembangunan lainnya. Oleh karena itu, selanjutnya akan menjadi tugas bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng supaya dapat menyusun Parameter dan Proyeksi Penduduk sebagai dasar perencanaan pembangunan di masa yang akan datang untuk kepentingan Perangkat Daerah lain. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan kerja sama dan koordinasi secara intens dengan Para penyuluh KP (PLKB), aparat Desa/kelurahan, kecamatan dan SKPD terkait.

Tabel 2. 188. Jumlah Sektor Yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Program Pembangunan Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Sektor	6	6	6	6	7

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

2.1.3.2.8.7. Jumlah kerja sama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informasi yang melakukan pendidikan kependudukan

Indikator ini menunjukkan adanya kerjasama dengan lembaga pendidikan formal, informal maupun non formal yang melakukan pendidikan kependudukan. Kegiatan ini telah dilakukan pada tahun 2020 dalam bentuk sosialisasi, kunjungan maupun *Focus Group Discussion* pada tiap jenjang pendidikan, mulai jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, serta organisasi-organisasi perempuan dan anak, baik pemerintah maupun swasta. Dengan demikian informasi pendidikan kependudukan bisa diketahui lebih luas dan menyeluruh. Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam hal ini melakukan kerja sama dilakukan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan mengadakan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK).

Tabel 2. 189. Jumlah kerja sama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informasi yang melakukan pendidikan kependudukan Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidiakan Formal, Non Formal, Dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan	Kerja sama	0	0	0	0	1

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

2.1.3.2.8.8. Rata-rata jumlah anak per keluarga

Jumlah penduduk yang besar tetapi tidak diikuti dengan kualitas SDM yang baik akan menjadi beban bagi pembangunan suatu negara, sehingga diperlukan upaya penurunan tingkat fertilitas dengan Program Utama Keluarga Berencana. Seiring dengan meluasnya akses media massa terhadap informasi KB cukup mempengaruhi masyarakat untuk melakukan penundaan kelahiran maupun penundaan jarak kelahiran hingga adanya persepsi tentang jumlah anak ideal sebanyak 2 orang. Pasangan yang berniat memiliki satu atau dua orang anak akan memperpanjang jarak antara pernikahan dan kelahiran anak pertama yaitu dengan menunda kelahiran anak pertama dalam rangka membangun kehidupan yang lebih baik sebagai pasangan. Hal ini meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan alat kontrasepsi sebagai usaha untuk penundaan kehamilan.

Sebagai upaya mendukung program KB, para penyuluh melakukan penyuluhan secara aktif atau konseling terhadap Pasangan Usia Subur yang tidak ber-KB, melakukan sosialisasi pada pasangan usia subur, kelompok BKL, kelompok BKB, Kelompok BKR tentang pentingnya menjarangkan kehamilan dan penggunaan alat kontrasepsi. Berdasarkan data Dinas P3APPKB, rata-rata jumlah anak per keluarga di tahun 2020 sebanyak 1,36, jauh lebih rendah dari target provinsi sebanyak 2,3. Angka ini turun dari data jumlah anak perkeluarga di Tahun awal RPJMD 2016 sebanyak 1,85.

Tabel 2.190. Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Anak	Anak	99.812	85.610	102.120	96.307	105.789
2	Jumlah Keluarga	Keluarga	53.824	63.085	65.715	73.137	77.782
	Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga	Per Keluarga	1,85	1,36	1,6	1,31	1,36

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

2.1.3.2.8.9. Rasio akseptor KB

Akseptor KB adalah masyarakat pasangan usia subur yang salah seorang dari padanya menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi untuk tujuan pencegahan kehamilan baik melalui program maupun non program. Akseptor KB menurut sasarannya terbagi atas tiga fase yaitu, fase menunda dan mencegah kehamilan, fase penjarangan kehamilan dan fase

menghentikan dan mengakhiri kehamilan atau kesuburan. Data ini menunjukkan proporsi jumlah akseptor KB terhadap Jumlah pasangan Usia Subur. Secara umum, jumlah akseptor KB tidak mengalami perubahan signifikan, walau demikian Jumlah Pasangan Usia Subur mengalami penurunan, sehingga rasio akseptor KB juga tidak mengalami perubahan signifikan.

Rasio sebesar 0,77 di bulan oktober di tahun 2020 memperlihatkan cukup tingginya kesadaran masyarakat untuk menggunakan alat kontrasepsi sehingga rasio akseptor KB dapat tercapai. Hal ini dapat diwujudkan karena tersedianya alat kontrasepsi disarana kesehatan, kerja sama dengan tenaga penyuluh KB aktif di lapangan, melakukan konseling pada pasangan usia subur yang belum ber KB untuk menggunakan alat kontrasepsi baik jangka panjang maupun jangka menengah.

Tabel 2.191. Rasio Akseptor KB di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Akseptor KB	Pasangan	29.525	27.583	27.689	28.122	28.218
2	Jumlah Pasangan Usia Subur	Pasangan	37.882	36.774	36.711	36.483	36.072
	Rasio Akseptor KB	%	77,94	75,01	75,42	77,08	78,22

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

2.1.3.2.8.10. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49

Angka pemakaian kontrasepsi atau tingkat prevalensi kontarsepsi (CPR) adalah perbandingan antara PUS yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah PUS, dinyatakan dalam persentase. Indikator ini berguna untuk mengukur perbaikan kesehatan ibu melalui pengaturan kelahiran. Indikator ini juga digunakan sebagai proksi untuk mengukur akses terhadap pelayanan reproduksi kesehatan yang sangat esensial.

Tabel 2.192. Angka Pemakaian Kontrasepsi/Cpr Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah peserta KB aktif	Peserta	29.525	27.583	27.689	28.122	27.901
2	Jumlah Pasangan usia subur	Pasangan	37.882	36.774	36.711	36.483	36.056
	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49	%	77,94	75,01	75,42	77,08	77,38

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

Data pada table di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016-2020 angka pemakaian kontrasepsi berada pada kisaran 70%. Cenderung stagnan jika dibandingkan antara data tahun 2016 sebesar 77,94% dan tahun 2020 sebesar 77,38%, lebih tinggi dari persentase provinsi sebesar 66,74%. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran Pasangan Usia subur untuk menggunakan alat kontrasepsi cukup tinggi, ditunjang pula oleh

pelaksanaan penyuluhan secara aktif tentang penggunaan alat kontrasepsi serta tersedianya ALKON yang dibutuhkan oleh PUS.

2.1.3.2.8.11. Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)

Proporsi angka kelahiran remaja perempuan usia 15 - 19 Tahun adalah angka yang menunjukkan jumlah kelahiran dari perempuan kelompok umur 15 - 19 tahun terhadap keseluruhan jumlah penduduk perempuan kelompok 15 - 19 Tahun. Selama 5 tahun angka tersebut bergerak secara fluktuatif, mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi 27,69% dimana pada tahun 2016 sebesar 32,99%. Di tahun 2018 turun menjadi 7,99%, namun naik kembali menjadi 25,99% di tahun 2019. Kenaikan ini antara lain disebabkan karena meningkatnya angka pernikahan dini. Upaya advokasi dan sosialisasi pendewasaan usia pernikahan dan melahirkan bagi perempuan di tahun 2020 kembali turun menjadi 16,65%. Dalam hal ini diselenggarakan penyuluhan dan konseling terhadap para orang tua untuk tidak menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, dan juga penundaan kelahiran anak pertama bagi pasangan muda.

Tabel 2.193. Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) Per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (Asfr 15-19) Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15 -19	Jiwa	286	240	69	259	166
2	Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15 -19	Jiwa	8.668	8.668	8.637	9.967	9.967
	Angka kelahiran remaja (Perempuan Usia 15 -19) per 1.000 Usia 15 -19 tahun (ASFR 15 -19)	%	32,99	27,69	7,99	25,99	16,65

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

2.1.3.2.8.12. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun

Cakupan pasangan usia subur yang istrinya berusia dibawah 20 Tahun adalah proporsi jumlah pasangan usia subur dengan usia istri yang kurang dari 20 Tahun terhadap jumlah pasangan usia subur.

Tabel 2.194. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 tahun	Pasangan	1.148	2.937	919	911	901
2	Jumlah pasangan usia subur	Pasangan	37.882	36.774	36.711	36.483	36.056
	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	3,03	7,99	2,5	2,5	2,5

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun pada Tahun 2017 menjadi 7,99%. Pada tahun 2018 hingga 2020

stagnan dengan nilai persentase sebesar 2,50%. Rata-rata cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat menunda usia kawin muda atau masih banyak yang melangsungkan pernikahan di bawah umur. Oleh karena itu, penyuluhan dan konseling terhadap orang tua yang mempunyai anak usia 20 tahun kebawah harus tetap diaktifkan.

2.1.3.2.8.13. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)

Kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi/*unmet need* merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai alat/cara kontrasepsi. Angka ini didapatkan dengan membandingkan antara jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani dengan total jumlah pasangan usia subur. Semakin rendah angka *unmet need*, menjelaskan bahwa pelayanan KB telah memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya besarnya tingkat *unmet need* KB di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain karakteristik wilayah serta kondisi sosiologis masyarakat antara perdesaan dan perkotaan. Karakteristik *unmet need* berbeda menurut umur, daerah tempat tinggal, dan status sosial ekonomi. *Unmet need* pada perempuan usia muda (15- 29 tahun) lebih banyak untuk menjarangkan kelahiran, sementara di usia tua (30- 49 tahun) lebih banyak untuk membatasi kelahiran mengingat resiko melahirkan yang semakin besar seiring dengan usia ibu.

Tabel 2.195. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PUS yang ingin ber KB tetapi tidak terlayani	Pasangan	5.205	5.763	5.615	5.081	4.611
2	Jumlah pasangan usia subur	Pasangan	37.882	36.774	36.711	36.483	36.072
	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	Poin	13,74	15,67	15,3	13,93	12,78

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa, nilai cakupan tersebut bergerak secara fluktuatif selama 5 tahun, sempat mengalami kenaikan di angka 15, 67 pada tahun 2017, namun di tahun 2020 kembali turun di angka 12,78. yang artinya bahwa jumlah PUS yang ingin ber KB, terpenuhi, dapat dilayani dan mendapat fasilitas dengan baik. Hal ini karena Dinas DP3APKB berhasil dalam memberikan pelayanan akseptor dan konseling.

2.1.3.2.8.14. Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) adalah metode yang efektif untuk menunda dan menjarangkan kehamilan, serta menghentikan kesuburan. Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) cenderung meningkat pada periode 2016-2020 dengan kondisi terakhir pada tahun 2020 mencapai 19,19 persen. Namun belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 26 persen.

Tabel 2.196. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP	Akseptor	3.183	3.908	4.503	5.211	5.414
2	Jumlah akseptor KB	Akseptor	28.701	27.583	27.689	28.122	28.218
	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	%	11,09	14,17	16,26	18,53	19,19

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

Secara umum beberapa faktor yang menyebabkan PUS tidak menjadi peserta KB adalah pelayanan KB yang masih kurang berkualitas, penyampaian konseling maupun KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) belum dilaksanakan dengan baik, hambatan budaya, kelompok wanita yang sudah tidak ingin anak lagi tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi (*unmet need*), dan kelompok *hard core* yaitu kelompok wanita yang tidak mau menggunakan alat kontrasepsi baik pada saat ini maupun pada waktu yang akan datang.

Peran aktif tenaga medis (bidan) dan penyuluh KB sangat dibutuhkan dalam peningkatan jumlah pengguna metode kontrasepsi jangka panjang pada PUS, antara lain melalui pemberian penyuluhan-penyuluhan tentang kontrasepsi jangka panjang, pemberian informasi lengkap saat kunjungan pertama klien untuk menentukan pilihan berkontrasepsi dan memotivasi setiap calon akseptor KB baru untuk menggunakan kontrasepsi jangka panjang.

2.1.3.2.8.15. Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi

Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi adalah proporsi jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi terhadap jumlah akseptor KB. Keberlangsungan pemakaian kontrasepsi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : Faktor sosial, ekonomi antara lain meliputi keterlibatan dalam organisasi, norma dan hukum, pendapatan, kebiasaan, agama dan tempat pelayanan. Sedangkan faktor demografi antara lain meliputi karakteristik individu seperti umur, status perkawinan, pendidikan, lama perkawinan dan pekerjaan.

Tabel 2.197. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi	Pasangan	8.357	9.191	9.022	8.361	7.854
2	Jumlah akspetor KB	Akseptor	29.525	27.583	27.689	28.125	28.218
	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	28,3	33,32	32,58	29,73	27,83

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa persentase keberlangsungan ini mengalami penurunan sejak tahun 2018. Data di tahun 2017 senilai 33,32% terus menurun menjadi 27,83% di tahun 2020. Kelangsungan penggunaan kontrasepsi yang rendah apabila tidak diatasi dikhawatirkan dapat menambah laju pertumbuhan penduduk, yang dapat mengakibatkan masalah diberbagai segi kehidupan. Peran aktif perangkat daerah yang terkait diperlukan untuk meningkatkan penyuluhan dan konseling terhadap akseptor atau Pasangan Usia Subur untuk ber-KB.

2.1.3.2.8.16. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

Bina Keluarga Balita (BKB) bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua untuk mengasuh serta membina tumbuh kembang anak. Upaya tersebut melalui kegiatan stimulasi fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial dan moral. BKB lebih menyasar pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan mengasuh anak. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita mengalami peningkatan jika dilihat dari tahun 2016 hanya 54,04 persen, kemudian meningkat mencapai 60,67 persen pada tahun 2020.

Tabel 2.198. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anggota kelompok BKB yang ber KB	Anggota	1.352	1.318	1.728	1.768	1.749
2	Jumlah anggota kelompok BKB	Anggota	2.502	2.467	2.656	2.690	2.883
	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	%	54,04	53,43	65,06	65,72	60,67

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

2.1.3.2.8.17. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB

Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan wadah yang tepat untuk melaksanakan bimbingan, pembinaan, dan memberikan pengetahuan kepada keluarga yang mempunyai remaja berusia 10 – 24 tahun, dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang remaja melalui peran orang tua. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja mengalami fluktuasi selama periode 2016-2020 dengan kondisi akhir 56,73 persen pada tahun 2020. Faktor pendukung capaian tersebut antara lain adanya semangat dan kerjasama yang baik dari setiap kader, kemudian didukung oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang mendampingi dan membantu kader dalam melaksanakan kegiatan Bina Keluarga Remaja serta meningkatnya pemahaman dan kesadaran keluarga tentang Bina Keluarga Remaja.

Tabel 2.199. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anggota kelompok BKR yang ber KB	Anggota	1.106	1.070	1.290	1.419	1.365
2	Jumlah anggota kelompok BKR	Anggota	1.960	1.908	1.995	2.250	2.406
	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR)	%	56,43	56,08	64,66	63,07	56,73

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

2.1.3.2.8.18. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB

Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah salah satu program kegiatan di DP3APPKB yang menitik beratkan pada pembinaan lansia dan keluarga lansia. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB cenderung mengalami peningkatan. Data tahun 2016 menunjukkan capaian 33,33 persen, selanjutnya mengalami kenaikan pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 51,11 persen pada tahun 2020.

Tabel 2.200. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anggota kelompok BKL yang ber KB	Anggota	548	556	614	775	1.086
2	Jumlah anggota kelompok BKL	Anggota	1.644	1.622	1.767	1.695	2.125
	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL)	%	33,33	34,28	34,75	45,72	51,11

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

2.1.3.2.8.19. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) adalah wadah berbasis institusi dengan kegiatan pelayanan keluarga melalui pemberian KIE, penyediaan data, konsultasi dan konseling, pembinaan serta rujukan. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) yang telah dibentuk di Kabupaten Soppeng ada 2 yaitu UPPKS Kecamatan Lalabata dan UPPKS Kecamatan Marioriwawo. Jumlah ini masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah kecamatan yang ada, hanya mencapai 12,5 persen di tahun 2016 dan 25 persen dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, idealnya setiap kecamatan memiliki PPKS.

Tabel 2. 201. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PPKS	Unit	1	2	2	2	2
2	Jumlah Kecamatan	Kecamatan	8	8	8	8	8
	Pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	%	12,50	25,00	25,00	25,00	25,00

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

2.1.3.2.8.20. Cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa

Cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja/Mahasiswa adalah proporsi data jumlah PIK R/M terhadap jumlah kecamatan. Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja) adalah suatu wadah kegiatan program PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja), yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.

Tabel 2.202. Cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PIK R/M	PIK R/M	62	62	62	62	56
2	Jumlah kecamatan	Kecamatan	8	8	8	8	8
	Cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (%)	%	7,75	7,75	7,75	7,75	7,00

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

Berdasarkan tabel pada tahun 2016-2019 cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa dalam pusat sebanyak 775% dengan jumlah PIK R/M sebanyak 62. Namun di tahun 2020, mengalami penurunan karena PIK R/M turun menjadi 56, sehingga perbandingan cakupan hanya menjadi 700%. Hal ini disebabkan selama 2020 ini terjadi pembatasan kegiatan karena adanya pandemi Covid-19. Selanjutnya harus mencari cara agar dapat kembali meningkatkan cakupan dengan melakukan berbagai program penyuluhan terhadap remaja/mahasiswa untuk mengikuti informasi dan konseling. Selain itu, PIK Remaja adalah nama generic, maka untuk menampung kebutuhan program PKBR dan menarik minat remaja datang ke PIK Remaja, nama generik ini dapat dikembangkan dengan nama-nama yang sesuai dengan kebutuhan program dan selera remaja setempat.

2.1.3.2.8.21. Cakupan PKB dan PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk

Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) merupakan ujung tombak penyuluhan KB yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan atau sebagai penggerak masyarakat di desa/kelurahan binaannya agar mendapatkan akses dan kualitas pelayanan KB dan KS yang memadai. Peran PKB/PLKB sebagai komponen pemerintah, beserta masyarakat dilakukan dengan cara melakukan kegiatan penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan program KKBPK, dalam rangka mendukung pengembangan kualitas keluarga.

Tabel 2. 203. Cakupan PKB dan PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah Kb Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Bidang Pengendalian Penduduk Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PKB/PLKB yang didayagunakan	PKB/ PLKB	38	38	36	35	32
2	Jumlah PKB/PLKB	PKB/ PLKB	38	38	36	35	32
	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan darah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

Jumlah PKB/PLKB yang ada jumlahnya menurun yang dikarenakan ada yang pensiun dan belum ada penerimaan baru, yang semula berjumlah 38 orang di tahun 2016, kini hanya berjumlah 32 orang di tahun 2020. Sebagaimana diketahui bahwa PKB/PLKB ini mengalami pengalihan status kepegawaian PKB dari pegawai daerah (pemerintah kabupaten/kota) menjadi pegawai vertikal dalam hal ini BKKBN. Namun semua berperan secara aktif melakukan tugas dan fungsinya dalam pembinaan dan pendayagunaan KB sesuai kompetensi yang telah ditetapkan, seperti yang tertuang dalam manajemen ASN (UU No.5 Tahun 2014 pasal 69 point a, b dan c tentang Aparatur Sipil Negara), terdiri atas : 1. Kompetensi Teknis, 2 Kompetensi Manajerial dan 3. Kompetensi Sosial Kultural.

2.1.3.2.8.22. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri

Kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi/unmet need merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai alat/cara kontrasepsi. Angka ini didapatkan dengan membandingkan antara Jumlah PUS yang ingin ber KB tetapi tidak terlayani dengan Jumlah pasangan usia subur. Semakin rendah angka unmeet need, menjelaskan bahwa pelayanan KB telah memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena pada dasarnya Besarnya tingkat unmet need KB di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain karakteristik wilayah serta kondisi sosiologis masyarakat antara perdesaan dan perkotaan. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa, nilai cakupan tersebut bergerak secara fluktuatif selama 5 tahun, pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan, namun di tahun 2020 kembali meningkat menjadi 78,60 yang artinya bahwa jumlah PUS yang ingin ber KB terpenuhi dapat dilayani dan mendapat fasilitas dengan baik.

Tabel 2.204. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber KB	Anggota	817	800	611	560	507
2	Jumlah anggota kelompok UPPKS	Anggota	1.305	1.253	1.049	1.000	645
	Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber KB mandiri	%	62,61	63,85	58,25	56,00	78,60

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

2.1.3.2.8.23. Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan

Rasio Petugas Pembantu pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan adalah perbandingan jumlah Petugas Pembantu Pembina KB Desa terhadap jumlah Desa/Kelurahan. PPKBD sebagai mitra PLKB/PKB merupakan ujung tombak penyuluhan KB yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan atau sebagai penggerak masyarakat di

Desa/Kelurahan binaannya agar mendapatkan akses dan kualitas pelayanan KB dan KS yang memadai. Melihat pentingnya peran dan tugas PPKBD maka dibentuklah 1 (satu) orang PPKBD untuk setiap Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Soppeng, yang terdiri dari 49 PPKBD Desa dan 21 PPKBD Kelurahan.

Tabel 2.205. Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah petugas pembantu pembina KB desa	Petugas	70	70	70	70	70
2	Jumlah Desa/Kelurahan	Desa/ Kelurahan	70	70	70	70	70
	Rasio petugas pembantu pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/keluarahan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

2.1.3.2.8.24. Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat

Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat adalah perbandingan Jumlah alat kontrasepsi per mix kontrasepsi yang tersedia di faskes dan gudang alat kontrasepsi kab/kota terhadap Perkiraan permintaan masyarakat. Beradasarkan tabel di bawah, dapat dilihat bahwa meskipun terdapat penurunan dari data 2016 sebesar 19,32 menjadi 24,36 di Tahun 2020. Namun bukan berarti jumlah peserta KB Aktif rendah tetapi masih banyaknya masyarakat yang cenderung menggunakan alat kontrasepsi mandiri. Dengan demikian mengindikasikan tingkat pemahaman masyarakat khususnya pasangan usia subur yang tinggi dalam penggunaan alat kotrasepsi dan mendukung program Keluarga Berencana.

Tabel 2. 206. Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di faskes dan gudang alkon kab/kota	Unit	2.703	3.088	3.301	3.153	4.393
2	Perkiraan permintaan masyarakat	Unit	13.988	14.956	15.920	16.945	18.036
	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	19,32	20,65	20,73	18,61	24,36

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

2.1.3.2.8.25. Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerja sama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan

Dalam rangka menjamin agar setiap Pasangan Usia Subur (PUS) dapat secara mudah mendapatkan pelayanan dan upaya menjamin

tersedianya pelayanan yang berkualitas, adil dan merata merupakan hal penting yang harus diperhatikan dengan memanfaatkan peluang pelayanan KB bagi peserta BPJS melalui Fasilititasi Pelayanan KB yang telah bekerjasama dengan BPJS. Persentase fasilitas kesehatan dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS untuk memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan merupakan proporsi data yang menunjukkan perbandingan jumlah Fasilitas Kesehatan dan jejaring yang bekerja sama dengan BPJS terhadap jumlah Fasilitas kesehatan dan jejaring.

Tabel 2. 207. Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerja sama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah faskes dan jejaring yang bekerja sama dengan BPJS	Unit	31	18	18	18	18
2	Jumlah faskes dan jejaring	Unit	31	18	18	18	18
	Persentase faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

Tabel di atas menunjukkan target persentase faskes dan jejaringnya yang bekerja sama dengan BPJS mencapai 100% dengan jumlah fasilitas sebanyak 18 buah di tahun 2020, mengalami penurunan dibanding data pada tahun 2016 sebanyak 31 buah. Pencapaian 100% ini disebabkan karena adanya kerjasama dan koordinasi secara aktif antara Dinas DP3APKB dengan *stakeholder* Fasilitas Kesehatan dan jejaring yang ada di setiap tingkatan wilayah.

2.1.3.2.8.26. Persentase Remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)

Pendataan mengenai remaja terkena infeksi menular seksual belum dilaksanakan oleh dinas terkait.

2.1.3.2.8.27. Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa

Penyediaan data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan adalah ketersediaan data mikro keluarga dan pemanfaatannya dalam pelayanan KB dan KS serta pembinaan keluarga di masing-masing Desa/Kelurahan. Data mikro keluarga memuat informasi individu dan anggota keluarga yang mencakup aspek data demografi, data KB dan data tahapan KS untuk menunjang kegiatan operasional program KB di Desa/Kelurahan. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa didapatkan dengan membandingkan jumlah Informasi data mikro keluarga yang tersedia dengan jumlah seluruh informasi data mikro keluarga. Penyediaan data mikro keluarga di Desa/Kelurahan dilakukan dengan metoda pendataan keluarga yang dilakukan setiap tahun dalam waktu bersamaan. Hasil pendataan keluarga yang dilaksanakan setiap tahun, dilakukan analisis demografi, KB

dan tahapan KS sebagai bahan penyusunan kegiatan intervensi pelayanan KB dan KS.

Tabel 2.208. Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia	Desa/ Kelurahan	70	70	70	70	70
2	Jumlah seluruh informasi data mikro keluarga	Desa/ Kelurahan	70	70	70	70	70
	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

Data pada tabel di atas menunjukkan, setiap tahun seluruh Desa/Kelurahan mempunyai data mikro keluarga (100%) yang dilakukan dengan melakukan kerja sama dan pembinaan terhadap stakeholder yang ada di 70 desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Soppeng.

2.1.3.2.8.28. Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga

Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga di kelompok masing-masing pada tahun 2016-2020 mencapai 100% atau semua kelompok kegiatan yang ada melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi. Jumlah kelompok kegiatan mengalami peningkatan mulai pada tahun 2016 sebanyak 210 kelompok hingga pada tahun 2020 mencapai 360 kelompok.

Tabel 2. 209. Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Kelompok	210	351	300	267	360
2	Jumlah kelompok kegiatan	Kelompok	210	351	300	267	360
	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

2.1.3.2.8.29. Rata-rata usia kawin pertama wanita

Usia pertama menikah yang berarti juga saat dimulainya masa reproduksi pembuahan. Hubungan antara usia kawin pertama dengan fertilitas adalah negatif. Semakin muda usia kawin pertama maka akan semakin panjang masa reproduksinya atau semakin banyak anak yang dilahirkan. Rata-rata usia kawin pertama wanita di Kabupaten Soppeng pada tahun 2018 dan 2019 yaitu usia 20 tahun, dan pada tahun 2020 usia 19 tahun.

Tabel 2.210. Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah (umur kawin pertama wanita x jumlah wanita menurut usia kawin pertama)	Jiwa	Na	Na	212.400	199.340	193.876
2	Jumlah wanita menurut usia kawin pertama	Jiwa	Na	Na	10.620	9.967	10.204
	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	Na	Na	20	20	19

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

2.1.3.2.8.30. Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang

Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang mengalami peningkatan dari 81,96% pada tahun 2016 menjadi 85,85% pada tahun 2020. Hal ini tidak terlepas dari peran kader Bina Keluarga Balita.

Tabel 2.211. Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yang Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang	Keluarga	8.584	8.265	8.251	8.273	8.248
2	Jumlah keluarga mempunyai balita dan anak	Keluarga	10.473	10.070	9.769	9.515	9.608
	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang	%	81,96	82,08	84,46	86,95	85,85

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

2.1.3.2.8.31. Persentase pembiayaan program kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes

Persentase pembiayaan program kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD adalah perbandingan antara jumlah anggaran untuk urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terhadap jumlah APBD. Persentase pembiayaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan melalui APBD di Kabupaten Soppeng secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.212. Persentase pembiayaan program kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Anggaran untuk urusan PPKB	Rp	306.066.650	416.299.300	261.920.400	2.928.702.184	3.899.678.900.000
2	Jumlah APBD dan APBDes	Rp	1.295.711.766	1.931.160.500	3.501.636.350	1.271.512.024.838.520	1.298.262.158.702.950
	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Melalui APBD dan APBDes	%	23,62	21,56	7,48	0,23	0,30

Sumber: Dinas P3APPKB, 2020

2.1.3.2.9. Bidang Urusan Perhubungan

2.1.3.2.9.1. Jumlah arus penumpang angkutan umum

Angkutan umum adalah sarana kendaraan atau moda angkutan yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan dipungut bayaran. Jumlah arus penumpang angkutan umum pada tahun 2016 sebesar 1.920 orang namun pada tahun 2017 mengalami penurunan hingga 1.344 orang, begitu pula di tahun 2020 hanya sebesar 1.005 orang. Hal tersebut disebabkan oleh jumlah angkutan umum yang beroperasi semakin berkurang karena kepemilikan kendaraan pribadi masyarakat Kabupaten Soppeng semakin meningkat. Selain itu, wabah covid-19 menyebabkan mobilitas masyarakat berkurang cukup drastis.

Tabel 2. 213. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara) yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun.	Orang	1.920	1.344	1.340	1.340	1.005
2	Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah.	Orang	1.920	1.344	1.340	1.340	1.005

Sumber : Dinas Perhubungan, 2020

2.1.3.2.9.2. Rasio izin trayek

Izin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Setiap kendaraan yang mengangkut penumpang umum harus memiliki izin trayek. Di kabupaten soppeng, jumlah izin trayek yang dikeluarkan pada tahun 2016 sebanyak 659 izin, angka ini terus mengalami penurunan sehingga pada tahun 2020 jumlah izin yang dikeluarkan hanya 18 izin saja. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya pengusaha angkutan umum yang mengalihfungsikan kendaraannya menjadi kendaraan pribadi karena penumpang angkutan umum maupun barang sudah berkurang karena banyaknya masyarakat yang sudah mempunyai kendaraan pribadi.

Tabel 2. 214. Rasio izin trayek Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah izin trayek yang dikeluarkan	Izin	659	245	125	152	18
2	Jumlah penduduk	Jiwa	252,677	241,43	236,156	237,115	238,967
	Rasio izin trayek	Poin	0.003	0.001	0.001	0.001	0.0001

Sumber : Dinas Perhubungan, 2020

2.1.3.2.9.3. Jumlah uji kir angkutan umum

Uji KIR merupakan rangkaian tes untuk mengukur apakah sebuah kendaraan masih layak jalan atau tidak. Uji KIR adalah sesuatu yang mutlak dilakukan para pemilik kendaraan pengangkut. Baik yang menggunakan plat nomor kuning atau hitam. Baik yang mengangkut penumpang, atau mengangkut barang, atau bahkan keduanya. Di Kabupaten Soppeng, jumlah uji kir angkutan umum yang dilaksanakan pada tahun 2016 sebanyak 85 kendaraan, terus meningkat hingga mencapai 135 kendaraan di tahun 2018. Selanjutnya pengujian ini mengalami penurunan di tahun 2019 sebanyak 120 kendaran dan pada tahun 2020 hanya 85 kendaraan. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran pemilik angkutan umum untuk melakukan Uji KIR.

Tabel 2. 215. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Unit	85	89	135	120	85

Sumber : Dinas Perhubungan, 2020

2.1.3.2.9.4. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Pelabuhan/ Terminal merupakan tempat pemberhentian maupun pemberangkatan jasa angkutan baik barang maupun penumpang. Di kabupaten Soppeng, jumlah terminal pada tahun 2016-2018 sebanyak 3 terminal. Salah satu terminal kemudian dialihfungsikan menjadi bagian dari Pusat Pertokoan Watansoppeng karena sudah tidak memenuhi syarat untuk dijadikan terminal Tipe C. hal tersebut menyebabkan jumlah terminal pada tahun 2020 hanya 2 terminal.

Tabel 2. 216. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	3	3	3	2	2

Sumber : Dinas Perhubungan, 2020



2.1.3.2.9.5. Persentase layanan angkutan darat

Persentase layanan angkutan darat di Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yakni pada tahun 2016 sebesar 0,04% hingga tahun 2020 sebesar 0,09 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa layanan angkutan di Kabupaten Soppeng semakin baik yang di dukung oleh kondisi jaringan jalan yang baik serta kemudahan pengguna untuk mencapai rute kendaraan.

Tabel 2. 217. Persentase Layanan Angkutan Darat Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah angkutan darat	Unit	527	200	207	207	248
2	Jumlah penumpang angkutan darat	Orang	1,328,040	504	500	475	270
	Persentase Layanan Angkutan Darat	%	0.04	0.04	0.04	0.04	0.09

Sumber : Dinas Perhubungan, 2020

2.1.3.2.9.6. Persentase kepemilikan KIR angkutan umum

Persentase kepemilikan KIR angkutan umum di Kabupaten Soppeng sangat berfluktuatif, pada tahun 2016 sebesar 83,87% menurun di tahun 2017 sebesar 55,50% kemudian mengalami peningkatan di tahun 2020 sebesar 65,72%. Jumlah angkutan umum yang semakin berkurang sangat mempengaruhi. Berkurangnya kendaraan umum tersebut disebabkan oleh tergerus karena usia dan tidak adanya peremajaan kendaraan.

Tabel 2. 218. Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR	Unit	442	111	72	87	163
2	Jumlah angkutan umum	Unit	527	200	207	207	248
	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	83.87%	55.50%	34.78%	42.03%	65.72%

Sumber : Dinas Perhubungan, 2020

2.1.3.2.9.7. Pemasangan Rambu-rambu

Rambu-rambu lalu lintas yang merupakan bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan diantaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan. Keterpenuhan rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Soppeng pada tahun 2016 sebesar 84 namun mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 34,72 %. Hal tersebut disebabkan oleh adanya refocusing anggaran pengadaan rambu-rambu.

Tabel 2. 219. Pemasangan Rambu-rambu Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pemasangan rambu-rambu	Unit	84	20	29	82	50
2	Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia	Unit	100	50	50	100	144
	Pemasangan Rambu-rambu	%	84%	40%	58%	82%	34,72%

Sumber : Dinas Perhubungan, 2020



2.1.3.2.10. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

2.1.3.2.10.1. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

Kelompok informasi masyarakat adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat, yang secara mandiri dan kreatif melalui melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah taraf kehidupannya, sebagai lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan informasi, KIM memiliki arti yang penting sebagai mitra pemerintah dan sebagai bagian dari jaringan sistem informasi nasional dalam diseminasi informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan pada Kabupaten Soppeng menunjukkan bahwa disetiap kecamatan terdapat 8-9 KIM.

Tabel 2. 220. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah KIM	Kelompok	0	0	48	54	54
2	Jumlah kecamatan yang ada dalam kab/kota	Kecamatan	8	8	8	8	8
	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	0	0	600	675	675

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2020

2.1.3.2.10.2. Cakupan Layanan Telekomunikasi

Cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Soppeng menunjukkan bahwa lebih dari setengah wilayah Kabupaten Soppeng telah terjangkau oleh layanan telekomunkasi terlihat pada tahun 2018 cakupan layanan telekomunikasi mencapai 65,88 namun pada tahun 2019 dan 2020 tidak dilakukan pendataan kmbali seshingga data tersebut tidak terupdate.

Tabel 2. 221.Cakupan Layanan Telekomunikasi Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas Wilayah Yang *Tercoverage*	Km^2	N/a	N/a	988.15	988.15	988.15
2	Luas Wilayah Keseluruhan	Km^2	1500	1500	1500	1500	1500
	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	N/a	N/a	65.88	65.88	65.88

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2020

2.1.3.2.10.3. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon

Hp atau telepon adalah Alat komunikasi ini memudahkan kita dalam berkomunikasi secara langsung tanpa harus bertatap muka. Teknologi ini telah menggeser fungsi surat dan telegram sebagai alat komunikasi bagi mereka yang bertempat tinggal saling berjauhan. Di Kabupaten Soppeng, persentase penduduk yang menggunakan Hp/telepon pada tahun 2018 sebesar 77% dan pada tahun 2020 sebesar 76%. Tahun 2020 tidak dilakukan Kembali pendataan sehingga data jumlah penduduk yang menggunakan Hp/Telepon tidak terupdate.

Tabel 2. 222. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk menggunakan HP/telepon	Jiwa	0	0	181,044	181,044	181,044
2	Jumlah penduduk	Jiwa	252677	241,43	236,156	237,115	238,967
	Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/telepon	%	0%	0%	77%	76%	76%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2020

2.1.3.2.10.4. Proporsi rumah tangga dengan akses internet

Internet merupakan sebuah singkatan dari *Interconnection Networking*, atau yang berarti jaringan yang terhubung secara luas. Dengan jaringan inilah semua orang bisa berkomunikasi dengan mudah dan dalam waktu yang singkat dari seluruh dunia tanpa batas. Kehidupan modern telah menjadi lebih mudah berkat kontribusi besar teknologi internet untuk komunikasi dan berbagi informasi. Manfaat internet tak hanya sebatas pada akses komunikasi dan informasi. Kini manfaat internet telah merambah pada sektor ekonomi, sosial, hiburan, hingga keamanan. Di Kabupaten Soppeng, proporsi rumah tangga dengan akses internet pada tahun 2018 sebesar 81,48 sedangkan pada tahun 2020 sebesar 81,49.

Tabel 2. 223.Proporsi rumah tangga dengan akses internet Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet	Unit	0	0	46,444	46,444	46,444
2	Jumlah rumah tangga	Unit	0	0	57,003	56,994	56,994
	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet	%	0	0	81.48	81	81.49

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2020

2.1.3.2.10.5. Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi

Pada era digital saat ini kebutuhan komputer dan perangkat pintar lainnya sudah termasuk kedalam kebutuhan primer manusia. Setiap kegiatan manusia mulai dari kegiatan pendidikan, kegiatan ekonomi, kegiatan sosial sudah menggunakan perangkat komputer untuk mempermudahnya. Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi di Kabupaten Soppeng pada tahun 2018-2020 sebesar 61%.

Tabel 2. 224. Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	Unit	0	0	34,833	34,833	34,833
2	Jumlah rumah tangga	Unit	0	0	57,003	56,994	56,994
	Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi	%	0	0	61%	61%	61%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2020

2.1.3.2.11. Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2.1.3.2.11.1. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Jumlah koperasi aktif tahun 2016 adalah 177 unit, meningkat pada tahun 2018 dan 2019 yakni sebanyak 183 unit koperasi. Namun pada tahun 2019 tercacat koperasi aktif menurun menjadi 163 koperasi aktif. Berdasarkan data kondisi akhir pada tahun 2020, koperasi aktif tercatat sebanyak 166 unit koperasi dari 206 koperasi yang ada di Kabupaten Soppeng. Tercatat volume usaha koperasi keadaan 31 Oktober 2020 adalah sebesar Rp.2.604.017.000 dan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp.70.945.000.

Berikut ini adalah data Koperasi aktif yang ada di Kabupaten Soppeng pada tahun 2016 sampai tahun 2020.

Tabel 2. 225. Persentase Koperasi Aktif Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah koperasi aktif	Unit	177	183	183	163	166
2	Jumlah seluruh koperasi	Unit	199	204	203	204	206
3	Persentase Koperasi Aktif	%	88.94	89.71	90.15	79.90	80.58

Sumber : Dinas PPK dan UKM Kabupaten Soppeng, 2020

Persentase koperasi aktif pada tahun 2016 sebesar 88,94% mengalami peningkatan hanya 0,76% pada tahun 2017 menjadi 89,71%. Animo masyarakat untuk berkoperasi paling tinggi pada tahun 2018 yakni pada angka 90,15%. Walaupun akhirnya menurun sekitar 10,25% pada tahun 2019 menjadi 79,50%, hal ini disebabkan setelah diadakannya diidentifikasi secara kelembagaan dan usaha oleh Pemerintah dalam hal ini Dinas PPK dan UKM Kabupaten Soppeng, ternyata terdapat penambahan jumlah koperasi yang tdak aktif. Hal ini disebabkan antara lain karena pengurus kelembagaan koperasi sudah tidak aktif, usaha koperasi sudah tidak berjalan dan koperasi tersebut tidak melaksanakan RAT selama 3 tahun berturut-turut.

Pada tahun 2020 persentase koperasi aktif kembali naik yakni 80,58%, walaupun dengan peningkatan yang tidak signifikan. Peran Pemerintah (Dinas PPK dan UKM) dalam mengembangkan koperasi melalui pembinaan kelembagaan dan pengembangan usaha yang dilakukan antara lain, Pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi para pengurus, meningkatkan partisipasi anggota, bimbingan dan konsultasi tertib organisasi dalam penyelenggaraan RAT serta penerapan sistem akuntansi koperasi.

2.1.3.2.11.2. Persentase UKM non BPR/LKM aktif

Persentase UKM non BPR/LKM aktif adalah jumlah UKM non BPR/LKM aktif dibagi dengan jumlah seluruh UKM non BPR/LKM yang ada di Kabupaten Soppeng.

Jumlah UKM non BPR/LKM aktif adalah jumlah seluruh Usaha Mikro Kecil yang ada di Kabupaten Soppeng. Sedangkan jumlah UKM non

BPR/LKM adalah jumlah seluruh usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Soppeng. UKM non BPR/LKM aktif adalah jumlah lembaga keuangan mikro dan usaha mikro yang tidak berbadan hukum namun bergerak di bidang usaha dan pembiyaan dan masih aktif berjalan sampai sekarang. UKM non BPR/LKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UKM hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Padahal sebenarnya UKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di suatu daerah. UKM dapat menyerap banyak tenaga kerja , selain itu UKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara.

Berikut adalah data Persentase UKM non BPR/LKM aktif di Kabupaten Soppeng kurun waktu tahun 2016-2020

Tabel 2. 226. Persentase UKM non BPR/LKM Aktif Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah UKM non BPR/LKM aktif	Unit	6,371	6,471	6,491	6,514	7464
2	Jumlah seluruh UKM non BPR/LKM	Unit	6,442	6,542	6,562	6,585	7,535
3	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	%	98.90	98.91	98.92	98.92	99.06

Sumber : Dinas PPK dan UKM Kabupaten Soppeng, 2020

Jumlah UKM non BPR/LKM aktif pada tahun 2020 tercatat sebanyak 7464 unit dari 7535 UKM non BPR/LKM yang ada di Kabupaten Soppeng. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan 1.093 UKM non BPR/LKM aktif dari tahun 2016. Pada tahun 2016 jumlah UKM non BPR/LKM aktif sebanyak 6371 unit dan meningkat pada tahun 2017 sebanyak 6471 unit dengan persentase UKM non BPR/LKM aktif sebesar 98,91%. Pada tahun 2018 dan 2019 menunjukkan angka persentase yang sama yakni pada kisaran 98,92%. Pada tahun 2020 merupakan tahun dimana persentase UKM non BPR/LKM aktif menunjukkan capaian angka tertinggi yakni 99,06%.

2.1.3.2.11.3. Persentase BPR/LKM Aktif

Persentase BPR/LKM aktif adalah jumlah BPR/LKM aktif dibagi dengan jumlah seluruh BPR/LKM yang ada di Kabupaten Soppeng.

BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. sedangkan yang masuk kategori Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan/tabungan, kredit, dana atau jasa konsultasi pengembangan usaha bagi pengusaha kecil. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. LKM berperan dalam kegiatan usaha yang dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.

LKM formal terdiri dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Bumdes dan sejenisnya. LKM di Kabupaten Soppeng antara lain BPRS Niaga Madani, PT. Mandala, PT.Adira Multifinance, Bumdes dan lain.lain.

Berikut adalah data Persentase BPR/LKM aktif di Kabupaten Soppeng kurun waktu tahun 2016-2020.

Tabel 2. 227. Persentase BPR/LKM Aktif Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah BPR/LKM aktif	Unit	48	52	53	55	55
2	Jumlah seluruh BPR/LKM	Unit	48	52	53	55	55
3	Persentase BPR/LKM Aktif	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PPK dan UKM Kabupaten Soppeng, 2020

Persentase BPR/LKM aktif sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan persentase yang stagnant yakni 100%. Jumlah BPR/LKM aktif pada tahun 2016 yakni sebanyak 48 unit, bertambah 4 unit pada tahun 2017 menjadi 52 unit. Sedikit penambahan ditahun 2018 yakni menjadi 53 unit. Kondisi akhir pada tahun 2019 dan 2020 jumlah BPR/LKM aktif di kabupaten Soppeng tercatat sebanyak 55 unit.

Tabel 2.228. Data Bank Prekreditan Rakyat (BPR) / Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Aktif di Kabupaten Soppeng Tahun 2016 - 2020

NO	KECAMATAN	TAHUN																			
		2016				2017				2018				2019				2020			
		BUMDES	BPR	LKM	JUMLAH	BUMDES	BPR	LKM	JUMLAH	BUMDES	BPR	LKM	JUMLAH	BUMDES	BPR	LKM	JUMLAH	BUMDES	BPR	LKM	JUMLAH
1	Marioriwawo	10			10	11			11	11			11	11			11	11			11
2	Liliriaja	5			5	5			5	5			5	5			5	5			5
3	Lilirilau	7			7	7			7	7			7	8			8	8			8
4	Lalabata	3	1	3	7	3	1	3	7	3	1	4	8	3	1	5	9	3	1	5	9
5	Marioriawa	5			5	5			5	5			5	5			5	5			5
6	Donri-Donri	6			6	9			9	9			9	9			9	9			9
7	Ganra	4			4	4			4	4			4	4			4	4			4
8	Citta	4			4	4			4	4			4	4			4	4			4
JUMLAH		44	1	3	48	48	1	3	52	48	1	4	53	49	1	5	55	49	1	5	55

Sumber : Dinas PPK dan UKM Kabupaten Soppeng, 2020

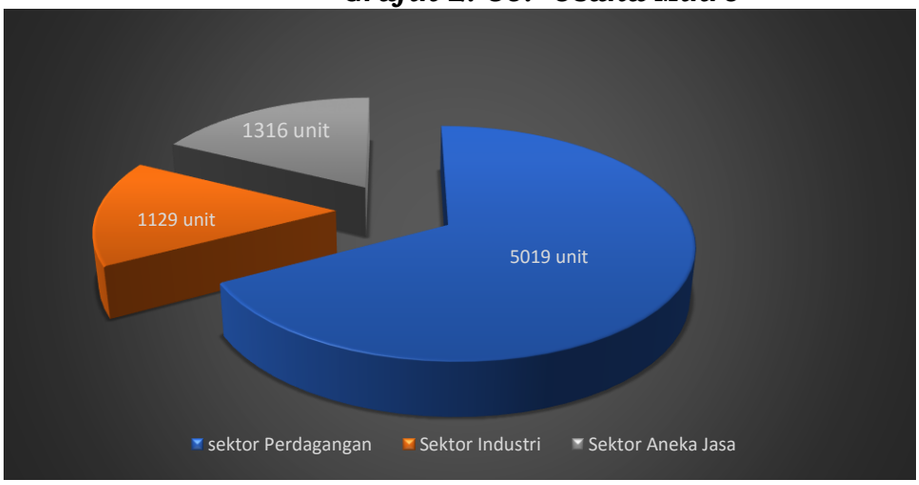
2.1.3.2.11.4. Persentase Usaha Mikro dan Kecil

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Dari sudut pandang pelaku usaha, UMKM bisa dideskripsikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

Grafik 2. 30. Usaha Mikro



Sumber : Dinas PPK dan UKM Kabupaten Soppeng

Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Soppeng di dominasi dari sektor perdagangan sebanyak 5019 unit, disusul sektor aneka jasa sebanyak 1316 unit dan sektor industri sebanyak 1129 unit. Jumlah usaha mikro dan kecil di Kabupaten Soppeng menunjukkan peningkatan sejak tahun 2016 sebanyak 6371 unit dan pada tahun 2020 menunjukkan jumlah 7464 unit. Peningkatan ini seiring dengan adanya kebijakan pemerintah dengan memberikan kemudahan fasilitas kredit KUR dengan bunga yang sangat rendah dengan tanpa jaminan dan kebijakan pemerintah tentang kemudahan pemasaran produk UMKM melalui retail modern dan pasar online.

Berikut adalah data Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Soppeng kurun waktu tahun 2016-2020.

Tabel 2.229. Persentase Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah usaha mikro dan kecil	Unit	6,371	6,471	6,491	6,514	7,464
2	Jumlah seluruh UKM	Unit	6,442	6,542	6,562	6,585	7,535
3	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	98.90	98.91	98.92	98.92	99.06

Sumber : Dinas PPK dan UKM Kabupaten Soppeng, 2020

Persentase Usaha Mikro dan Kecil pada tahun 2016 sebesar 98,90%. Adanya penambahan 100 unit UMKM menyebabkan persentase UMK naik menjadi 98,91% pada tahun 2017.

Adapun pada tahun 2018 dan 2019 Usaha mikro tidak menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi, yakni bertambah ±20 unit usaha mikro dengan persentase 98,92%. Jumlah Usaha mikro semakin melonjak pada tahun 2020 dengan penambahan sebanyak 950 unit usaha mikro dan persentase capaian sebesar 99,33%.

2.1.3.2.12. Bidang Urusan Penanaman Modal

2.1.3.2.12.1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Investor merupakan orang perorangan atau lembaga baik domestik atau non domestik yang melakukan suatu investasi (bentuk penanaman

modal sesuai dengan jenis investasi yang dipilihnya) baik dalam jangka pendek atau jangka panjang dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Selama tahun 2016 sampai 2020 jumlah investor berskala nasional di Kabupaten Soppeng mengalami kenaikan tiap tahun dimana pada tahun 2016 sebanyak 3 investor dan pada tahun 2020 bertambah 18 investor dari tahun 2019 sehingga jumlah investor sebanyak 40 investor. Investor di Kabupaten Soppeng selama tahun 2016 sampai dengan 2020 lebih banyak diarahkan pada sektor tersier, seperti sektor; perdagangan besar dan eceran dan sektor jasa.

Tabel 2.230. Jumlah Investor Berskala Nasional Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Investor	3	11	17	22	40

Sumber : Dinas PMPTSP, 2020

2.1.3.2.12.2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Sejalan dengan peningkatan jumlah investor yang menginvestasikan modalnya di Kabupaten Soppeng, maka perkembangan nilai investasi perusahaan PMDN juga cenderung meningkat signifikan. Pada tahun 2017 nilai investasi perusahaan PMDN di Kabupaten Soppeng mencapai Rp 2.108.038.000,- kemudian meningkat menjadi Rp.1.700.091.116.933 di tahun 2020. Besarnya peningkatan nilai investasi tersebut diharapkan lebih menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten Soppeng.

Tabel 2.231. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	Rp	2,108.038.000	22.086.500.000	90.347.238.849	239.145.555.197	1.700.091.116.933

Sumber : Dinas PMPTSP, 2020

2.1.3.2.12.3. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

Secara umum, nilai realisasi PMDN di Kabupaten Soppeng kurun waktu 2016-2020 mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Kenaikan nilai realisasi ini terjadi seiring dengan penambahan jumlah investor PMDN. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu kenaikan/penurunan realisasi PMDN di tahun 2016 sebesar -33,77 persen dan kondisi yang berbeda terjadi di tahun 2017 dimana realisasi PMDN melonjak drastis dengan persentase kenaikan yang mencapai 94,73 persen. Sedangkan pada tahun 2018 sebesar 3,09%. Sedangkan pada tahun 2020 kenaikan nilai realisasi sebesar 61,1%.

Tabel 2.232. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah) Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi PMDN Tahun Evaluasi – Realisasi PMDN Tahun sebelum Evaluasi	Rp	-1.074.962.000	19.978.462.000	68.260.738.849	148.798.316.348	1.460.945.561.736
2	Realisasi PMDN sebelum evaluasi	Rp	3.183.000.000	2.108.038.000	22.086.500.000	90.347.238.849	239.145.555.197
3	Kenaikan / Penurunan nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	%	-33,70%	94,77%	3,09%	16,46%	61,1%

Sumber : Dinas PMPTSP, 2020

2.1.3.2.13. Bidang Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

2.1.3.2.13.1. Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif

Tabel 2.233. Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Organisasi Pemuda Yang Aktif	Organisasi	50	50	100	100	100
2	Jumlah Seluruh Organisasi Pemuda	Organisasi	50	50	100	100	100
	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng, 2020

2.1.3.2.13.2. Cakupan pembinaan olahraga

Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standardisasi bidang keolahragaan di daerah. Selama periode 2016 s/d 2020 cakupan pembinaan olahraga di Kabupaten Soppeng Mengalami Penurunan dimana pada tahun 2016 sebesar 100% dan pada tahun 2020 sebesar 25%. Hal ini diakibatkan karena berkurangnya cabang olahraga yang dibina. Berkurangnya cabang olahraga yang dibina diakibatkan karena pemerintah daerah Kabupaten Soppeng memfokuskan pembinaan pada cabang olahraga yang lolos pada ajang PraPORDA dan PORDA.

Tabel 2.234. Cakupan Pembinaan Olahraga 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Cabang Olahraga yang dibina	Cabang	12	21	19	11	6
2	Jumlah Seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar	Cabang	12	21	24	24	24

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
	Cakupan pembinaan olahraga (% realisasi)	%	100	100	79	46	25

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng, 2020

2.1.3.2.13.3. Cakupan Pelatih yang bersertifikasi

Para pelatih yang memegang cabang olahraga, wajib memiliki 'lisensi' atau sertifikat baik level Nasional maupun level Daerah Sertifikat kepelatihan ini sebagai syarat bagi para pelatih, agar menghasilkan atlet-atlet yang berkualitas dan meraih prestasi terbaik. Jumlah pelatih bersertifikat di Kabupaten Soppeng sejak tahun 2016 s/d 2020 terus mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2016 pelatih yang bersertifikat sebanyak 12 pelatih dan pada tahun 2020 sebanyak 38 pelatih. peningkatan jumlah pelatih bersertifikat ini sebagai hasil program pelatihan insan olahraga dan adanya inisiatif mengikuti pelatihan pelatih secara mandiri.

Tabel 2.235. Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pelatih bersertifikat	Orang	12	12	14	28	38
2	Jumlah Seluruh pelatih	Orang	18	18	20	35	42
	Cakupan pelatih yang bersertifikat	%	66,67	66,67	70	80	90

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng, 2020

2.1.3.2.13.4. Cakupan pembinaan atlet muda

Pembinaan atlet usia dini dapat menjadi program strategis di daerah. Sebab, tidak akan muncul atlet berprestasi tanpa partisipasi, sedangkan partisipasi hanya bisa dimulai dari pembinaan di usia dini. Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng sejak tahun 2016 s/d 2020 cukup konsisten dalam pelaksanaan pembinaan atlet muda. Dimana setiap tahun terdapat atlet muda yang berprestasi. Untuk tahun 2020 tidak terdapat atlet muda yang berprestasi diakibatkan karena adanya pandemic Covid-19.

Tabel 2.236. Cakupan Pembinaan Atlet Muda 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah atlet muda berprestasi	Orang	34	80	54	30	0
2	Jumlah Seluruh atlet muda	Orang	80	179	190	190	190
	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	42,5	44,69	28,42	15,79	0

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng, 2020

2.1.3.2.13.5. Jumlah atlet berprestasi

Pada tahun 2016 terdapat dua atlet Kab. Soppeng yang berprestasi di tingkat nasional. Hal ini meningkat pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Yaitu sebanyak 3 atlet yang berprestasi tingkat nasional pada tahun 2017 dan 10 pada tahun 2020. Bahkan pada tahun 2018 terdapat 2 atlet yang berprestasi di tingkat internasional. Tetapi pada tahun 2020 akibat adanya pandemi COVID-19 Menyebabkan prestasi olahraga berkurang drastis akibat tertundanya berbagai kejuaraan.

Tabel 2.237. Jumlah Atelet Yang Berprestasi 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Atlet yang memenangi kejuaraan tingkat dalam satu tahun						
	a. Internasional	Orang	0	0	2	0	0
	b. Nasional	Orang	2	3	3	10	0
	c. Provinsi	Orang	40	107	67	24	0

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng, 2020

2.1.3.2.13.6. Jumlah prestasi olahraga

Jumlah prestasi olahraga Kabupaten Soppeng di tiap kejuaran berfluktuasi tiap tahun. Dimana pada tahun 2016 terdapat 7 Cabang Olahraga dan meningkat pada tahun 2017 sebesar 14 cabang olahraga. Pada tahun 2018 cabang olahraga yang berprestasi sebanyak 14 cabang olahraga dan menurun pada tahun 2019 sebesar 8 cabang olahraga. Pada tahun 2020 terjadi penurunan kuantitas prestasi olahraga akibat adanya penundaan berbagai kejuaraan akibat pendemi COVID-19

Tabel 2.238. Jumlah Prestasi Olahraga 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun						
	a. PRAPORDA	Prestasi		14			
	b. PORDA	Prestasi			12		
	c. POPDA	Prestasi			1		
	d. KEJURDA	Prestasi	2			4	
	e. KEJUARAAN LAIN	Prestasi	5		1	4	4

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng, 2020

2.1.3.2.14. Bidang Statistik

2.1.3.2.14.1. Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi

Sistem data statistik yang terintegrasi adalah hasil pengolahan sumber data statistik yang terpusat dan terpadu dalam satu sistem yang sama sehingga dapat dengan mudah diakses dan diuji tingkat keakuratannya. Sumber data statistik Kabupaten Soppeng bersumber dari sensus yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng sebagai pelaksana tugas pemerintahan dibidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan di Kabupaten Soppeng serta data primer dan sekunder dari Instansi Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng.

Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Bidang Statistik dan Persandian sebagai pelaksana dalam mengintegrasikan data statistik hingga Tahun 2017 belum memiliki sistem terpadu dalam mengakomodir kebutuhan data dan statistik. Akan tetapi pada tahun 2019 Diskominfo berupaya memperbaiki diri dengan menerbitkan aplikasi e-data dalam menghimpun data dan statistik dari berbagai Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng.

Tabel 2.239. Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi (Ada/Tidak ada)	(Ada/Tidak Ada)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2020

2.1.3.2.14.2. Buku "Kabupaten Dalam Angka"

Buku Kabupaten Soppeng dalam Angka merupakan publikasi tahunan yang menyediakan data statistik yang lengkap, menyeluruh dan terintegrasi mengenai karakteristik dan keadaan sosial ekonomi Kabupaten Soppeng. Data yang dimuat bersumber dari BPS Kabupaten Soppeng dan perangkat/daerah atau instansti terkait. Sejak tahun 2016, Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng telah merilis Buku Soppeng dalam angka, begitu juga pada tahun-tahun selanjutnya.

Tabel 2.240. Buku "Kabupaten Dalam Angka" Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Buku "Kabupaten Dalam Angka"(Ada/Tidak ada)	(Ada/Tidak ada)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2020

2.1.3.2.14.3. Buku "PDRB"

Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan buku yang memuat salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Buku PDRB pada dasarnya memuat jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng sebagai pelaksana tugas pemerintahan dibidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan di Kabupaten Soppeng tidak menerbitkan Buku PDRB Kabupaten Soppeng pada Tahun 2017. Akan tetapi pada Buku Soppeng Dalam Angka Tahun 2017 telah memuat BAB tersendiri yang memuat Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2017 demikian juga untuk tahun -tahun selanjutnya.

Tabel 2.241. Buku "PDRB" Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Buku "PDRB" (Ada/Tidak ada)	(Ada/Tidak ada)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2020

2.1.3.2.15. Bidang Persandian

2.1.3.2.15.1. Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah

Praktek komunikasi persandian di Kabupaten Soppeng belum dapat dilaksanakan secara merata kualitasnya. Jenis risiko dan ancaman yang paling mendominasi pengelolaan persandian di Kabupaten Soppeng terkait dengan terbatasnya sumber daya manusia (SDM) sandi berkualifkasi

ahli sandi dan kemampuan pemerintah daerah dalam menetapkan informasi berklasifkasi walaupun disadari bahwa pengelolaan persandian di pemerintah daerah akan meningkatkan pengamanan data dan membantu fungsi pemda dalam melaksansakan fungsi pelayanan publik, terhadap ancaman berupa interupsi, intersepsi, modifkasi, serta fabrikasi data dan informasi. Namun sampai saat ini urgensi untuk menggunaka persandian dalam berkomunikasi di Kabupaten Soppeng masih sangat minim sehingga persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam berkomunikasi masih 0 %.

Tabel 2.242. Rasio Jumlah pengunjung perpustakaan Kab Soppeng Tahun 2016 – 2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perangkat daerah yang telah mengunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah	OPD	0	0	0	0	0
2	Jumlah total perangkat daerah	OPD	38	38	38	34	34
	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunkasi Perangkat Daerah	%	0%	0%	0%	0%	0%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2020

2.1.3.2.16. Bidang Kebudayaan

2.1.3.2.16.1. Penyelenggaraan festival seni, budaya dan adat

Penyelenggaraan festival seni dan budaya dan adat merupakan wujud pelestarian budaya yang dimiliki. Salah satu bentuk kegiatan festival seni dan budaya yang diselenggarakan di Kabupaten Soppeng yaitu Pattaungeng. Beberapa rangkaian acara pada penyelenggaraan pattaungeng yang dilaksanakan diantaranya: mappadendang, massure', mattojang, maddaga dan tarian tradisional lainnya. Pada tahun 2016 dan 2017 pattaungeng diselenggarakan sebanyak 10 kali, tahun 2018 sebanyak 8 kali, tahun 2019 sebanyak 10 kali. Pada tahun 2020 diselenggarakan 7 kali, penyelenggaraan kegiatan seni budaya mengalami hambatan karena adanya pembatasan sosial akibat pandemi covid-19. Beberapa kegiatan yang telah dijadwal harus diundur pelaksanaannya sebagai langkah antisipasi penyebaran wabah virus corona (covid-19). Memasuki masa normal baru, pattaungeng mulai diselenggarakan kembali dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Tabel 2.243. Penyelenggaraan Festival, seni, budaya dan adat Tahun 2016 – 2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Festival	10	10	8	10	7

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

2.1.3.2.16.2. Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Indikator ini menunjukkan persentase jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dari total benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki daerah. Pelestarian cagar budaya adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Semua benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki oleh daerah secara keseluruhan dilestarikan oleh daerah. Salah satu bentuk pelestarian adalah melakukan perlindungan. Perlindungan terdiri dari penyelamatan dan pengamanan, zonasi, serta pemeliharaan dan pemugaran. Sebagian besar tugas pelestarian dilakukan oleh BPCB, dan sebagian lainnya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Penyelamatan dan pengamanan dilakukan dengan berbagai hal sebagai upaya menghindarkan cagar budaya dari kerusakan, kehancuran atau kemusnahan, dan juga upaya menjaga agar tidak hilang. Upaya tersebut dilakukan dengan perawatan situs secara berkala sekaligus pelaksanaan pemantauan. Kemudian, ditempatkan pula juru pelihara, selain sebagai pemelihara juga sebagai orang yang menjaga keamanan situs.

Adapun benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.244. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Tahun 2016 – 2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	29	29	11	7	7
2	Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah	Unit	29	29	29	29	29
	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	100	100	37,93	24,13	24,13

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

2.1.3.2.16.3. Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi

Data terkait jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi di Kabupaten Soppeng selama tahun 2016-2020 belum ada.

2.1.3.2.16.4. Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu

Berdasarkan Undang-undang No.11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat. Sehingga, dapat dikatakan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya merupakan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah. pengelolaan dan pelestarian cagar budaya merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Pengelolaan cagar budaya merupakan upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk kesejahteraan rakyat.

Salah satu tujuan pengelolaan cagar budaya yaitu kebermanfaatan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Cagar budaya yang dikelola bukan hanya berdampak pada lestarinya cagar budaya, tetapi juga memberikan manfaat berupa kesejahteraan bagi masyarakat. Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu hingga tahun 2020 adalah 3 (tiga) cagar budaya yaitu Cagar Budaya Calio, Villa Yuliana, Kompleks Makam Jera Lompoe.

Tabel 2.245. Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu Tahun 2016 – 2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu	Unit	2	2	3	3	3

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

2.1.3.2.17. Bidang Perpustakaan

2.1.3.2.17.1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun

Indikator ini menunjukkan berapa banyak pengunjung perpustakaan yang datang di perpustakaan yang telah disediakan Pemerintah Daerah dalam setahun. Rasio jumlah pengunjung perpustakaan per tahun di Kabupaten Soppeng mengalami fluktuasi setiap tahun. Pada tahun 2019 sebesar 5,06 dari sebelumnya sebesar 4,37 di tahun 2018 serta 5,14 di tahun 2017, dan 4,59 di tahun 2016. Pada tahun 2020 jumlah pengunjung perpustakaan menurun drastis akibat pandemi covid-19. Pada Tahun 2020 rasio jumlah pengunjung hanya 0,013. Pandemi covid-19 mendorong pemerintah mengambil kebijakan pembatasan sosial (sosial distancing) demi mencegah meluasnya penularan covid-19. Pengunjung perpustakaan dibatasi dan perpustakaan keliling tidak dilaksanakan.

Tabel 2.246. Rasio Jumlah pengunjung perpustakaan Kab Soppeng Tahun 2016 – 2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun	Orang	8.342	8.148	9.155	10.856	2.750
2	Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	Orang	181.751	158.670	209.662	214.520	199.780
	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	%	4,59	5,14	4,37	5,06	0,013

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2020

2.1.3.2.17.2. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Indikator ini menunjukkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam memberi akses yang cukup bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan bahan bacaan. Pengadaan bahan pustaka baru sangat berguna untuk menyegarkan koleksi bahan pustaka yang ada, sekaligus untuk menggantikan bahan pustaka yang sudah kadaluwarsa untuk distock opname. Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2020 tidak ada penambahan koleksi buku. Adanya refocusing anggaran untuk penanggulangan covid-19 menyebabkan anggaran untuk pengadaan koleksi buku perpustakaan ditiadakan.

Tabel 2.247. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Kab Soppeng Tahun 2016 – 2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah	Koleksi	10.441	11.585	12.425	13.284	13.284
2	Jumlah koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah	Koleksi	40.287	42.636	44.317	47.858	47.858
	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	%	25,92	27,17	28,04	27,76	27,76

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2020

2.1.3.2.17.3. Rasio perpustakaan per satuan penduduk

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara jumlah perpustakaan dengan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Soppeng. Pada tahun 2019 dan 2020 rasio perpustakaan persatuan penduduk mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah penduduk bertambah sedangkan jumlah perpustakaan tetap.

Tabel 2.248. Rasio perpustakaan per satuan penduduk Kab Soppeng Tahun 2016 - 2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perpustakaan	Unit	364	365	375	375	375
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	252.677	241.430	236.156	237.115	239.391
	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	Poin	1,14	1,51	1,59	1,58	1,56

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2020

2.1.3.2.17.4. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/ tahun

Indikator ini menunjukkan seberapa besar minat masyarakat untuk datang berkunjung ke perpustakaan-perpustakaan yang telah disediakan. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan mengalami peningkatan setiap tahun. Namun pada tahun 2020, sampai bulan Oktober hanya mencapai 2.730. Penyebab utama terjadinya penurunan jumlah pengunjung adalah adanya pandemi covid-19.

Tabel 2.249. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan Kab Soppeng Tahun 2016 – 2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rata - Rata Pengunjung Perpustakaan / Tahun	Orang	8.342	8.148	9.155	10.856	2.730

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2020

2.1.3.2.17.5. Jumlah koleksi judul buku perpustakaan

Indikator ini menunjukkan jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan, karena semakin banyak koleksi judul buku, maka akan semakin banyak alternatif bagi pengunjung yang datang ke perpustakaan. Semakin bervariasi koleksi perpustakaan akan semakin menarik bagi pengunjung. Penambahan jumlah koleksi judul buku dilaksanakan setiap

tahun, kecuali pada tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya refocusing anggaran untuk penanggulangan covid-19.

Tabel 2. 250. Jumlah koleksi judul buku perpustakaan Kab Soppeng Tahun 2016 – 2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul Buku	10.441	11.585	12.425	13.284	13.284

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2020

2.1.3.2.17.6. Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat

Perpustakaan di Kabupaten Soppeng sampai saat ini sudah memiliki pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat sebesar 100%. Namun jika dibandingkan dengan jumlah perpustakaan yang ada, masih dibutuhkan tambahan tenaga pengelola perpustakaan untuk memaksimalkan pelayanan perpustakaan. Jumlah tenaga pengelola perpustakaan yang ada, belum sebanding dengan jumlah perpustakaan yang ada.

Tabel 2. 251. Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat Tahun 2016 – 2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat	Orang	19	33	43	48	48
2	Jumlah Seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	19	33	43	48	48
	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan penilai yang Memiliki Sertifikat	%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2020

2.1.3.2.18. Bidang Kearsipan

2.1.3.2.18.1. Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku

Pada dasarnya arsip yang ada di setiap Perangkat Daerah memiliki umur tertentu, sehingga ada arsip yang dalam periode waktu tertentu dapat dimusnahkan, hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi penumpukan berkas dan arsip di tiap-tiap Perangkat Daerah. Dalam hal penyelolaan arsip, Dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Soppeng setiap tahun melakukan pembinaan kepada perangkat daerah secara bertahap. Namun demikian, belum semua perangkat daerah telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku. Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku hingga tahun 2020 mencapai 61,76 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Perangkat Daerah masih perlu peningkatan keperdulian terhadap pengelolaan arsip.

Tabel 2.252. Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku di Kab Soppeng Tahun 2016 – 2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perangkat Daerah yang telah Menerapkan Arsip Secara Baku	OPD	4	9	14	18	21
2	Jumlah Perangkat Daerah	OPD	37	37	37	34	34

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip secara Baku	%	10,81	24,32	37,84	52,94	61,76

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2020

2.1.3.2.18.2. Peningkatan SDM pengelola kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng menyelenggarakan kegiatan sosialisasi untuk peningkatan kemampuan SDM pengelola kearsipan setiap tahun. Namun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan pada tahun 2020 karena adanya pandemi covid-19.

Tabel 2. 253. Peningkatan SDM pengelola kearsipan Tahun 2016 – 2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM kearsipan	Kegiatan	0	1	1	1	0

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2020

2.1.3.3. Pelayanan Urusan Pilihan

2.1.3.3.1. Bidang Pariwisata

2.1.3.3.1.1. Kunjungan Wisata

Pemerintah Kab.Soppeng melalui Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, terus berupaya untuk mengoptimalkan jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Soppeng, Kepariwisataan adalah salah satu sektor yang memiliki prospek dikembangkan di Kabupaten Soppeng, karena sektor ini memiliki potensi yang cukup besar. Selama ini kepariwisataan menjadi salah satu sumber pendapatan bagi daerah, khususnya dari objek wisata yang dikembangkan, seperti objek wisata permandian alam ompo, permandian alam Lejja, permandian citta dan beberapa objek wisata lainnya yang dikelola pemerintah desa.

Kinerja Kunjungan Wisata dihitung dari jumlah capaian kinerja kunjungan wisata se-Kab.Soppeng dibagi dengan jumlah kunjungan wisata yang direncanakan, berikut adalah data kunjungan wisata di Kabupaten Soppeng kurun waktu tahun 2016-2020 :

Tabel 2. 254. Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah capaian kinerja kunjungan wisata se-Kabupaten	Orang	218.367	224.018	162.767	125.411	48.574
2	Jumlah kunjungan Wisata yang direncanakan se-Kabupaten	Orang	192.776	201.300	211.100	221.920	234.126
3	Kunjungan Wisata (%)	%	113,27	111,29	77,1	56,51	20,75

Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, 2020

Pada tahun 2016 jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Soppeng adalah 218.387 orang atau 113 persen dari target sebanyak 192.776 orang, pada tahun 2017 jumlah kunjungan mencapai 224.018 atau 111 persen dari target sebanyak 201.300, tahun 2018 jumlah kunjungan wisata menurun menjadi 162.767 atau 77,10 persen dari target sebanyak 211.100, tahun 2019 kembali menurun menjadi 125,411 orang dari target sebanyak 221.920 orang atau 56,51 persen dan tahun 2020 jumlah kunjungan hanya mencapai 48.574 orang atau hanya 20,75 persen dari target 234.126 orang.

Dari tabel di atas terlihat jika jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Soppeng selama tahun 2016-2020, cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Salah satu penyebab dari penurunan tersebut karena ketidaksiapan destinasi wisata yang ada. Ketidaksiapan tersebut dalam arti minimnya pengembangan objek wisata. Disisi lain destinasi wisata di daerah lain berkembang pesat baik dari segi jumlah maupun pengembangan.

2.1.3.3.1.1.1. ***Lama Kunjungan Wisata***

Lama Kunjungan Wisata, menunjukkan berapa hari rata-rata lama tinggal wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Soppeng, karena semakin lama waktu tinggal wisatawan diharapkan dapat lebih banyak kontribusinya terhadap penerimaan daerah. Semakin lama waktu tinggal wisatawan maka semakin banyak mereka membelanjakan uang yang dimiliki, ini tentu bernilai positif dalam pergerakan ekonomi daerah yang pada gilirannya akan semakin banyak pemasukan daerah dari sektor tersebut. Rata-rata lama kunjungan wisata selama tahun 2016-2020 pada tabel berikut :

Tabel 2. 255. Rata-Rata Kunjungan Wisata Dalam Satu Tahun Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata-rata kunjungan wisata dalam satu tahun	Hari	2	2	2	2	1

Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, 2020

Pada tabel di atas terlihat, jika kurun waktu tahun 2016-2019, rata-rata lama kunjungan wisata di Kabupaten Soppeng, stagnan, yaitu rata-rata 2 (dua) hari, sementara untuk tahun 2020, lama kunjungan wisata menurun menjadi 1 hari, ini salah satunya disebabkan karena mewadahnya Corona Virus Disease (Covid-19) di awal tahun 2020 yang berdampak pada menurunnya minat wisata masyarakat. Secara keseluruhan rata-rata lama kunjungan wisata tersebut masih rendah akibat masih kurangnya objek wisata dan masih kurangnya jumlah sarana akomodasi.

2.1.3.3.1.1.2. ***PAD Sektor Pariwisata***

Sektor kepariwisataan merupakan salah satu potensi daerah yang berkontribusi dalam penerimaan daerah. Potensi tersebut, di harapkan dapat terus meningkatkan sumbangannya dalam penerimaan pendapatan asli daerah, temasuk pendapatan sektor kepariwisataan selain retribusi tempat rekreasi, seperti pajak hotel, pajak restoran dan retribusi penginapan, villa, dan pesangrahan. Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata, selama kurun waktu tahun 2016-2020 pada tabel berikut:

Tabel 2. 256. PAD Sektor Pariwisata Tahun 2016-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	PAD sektor Pariwisata	Rp	1.920.142.093	2.332.697.400	2.392.979.010	2.734.581.838	1.809.057.228

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
2	Total PAD	Rp	91.123.526.502,24	125.892.548.021	131.607.491.253,80	138.447.182.182	151.857.742.474
3	PAD sektor Pariwisata (%)	%	2,11	1,85	1,82	1,98	1,19

Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, 2020

Kontribusi sektor pariwisata terhadapPendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi pada tahun 2016, yaitu 2,11% dari total PAD, terendah pada tahun 2020 hanya 1,19% walau demikian sampai akhir desember diprediksi kontribusinya tetap tidak akan melampaui kontribusi tahun-tahun *sebelumnya*. Rincian Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 257. Rincian Penerimaan Sektor Kepariwisataan Tahun 2016-2020

JENIS PENDAPATAN	SATUAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Hotel	Rp	59.874.000,00	58.402.140,00	95.205.750,00	170.512.926,80	106.643.080,00
Pajak Restoran	Rp	325.204.093,00	762.709.260,00	762.709.260,00	1.382.555.911,00	718.206.196,00
Retribusi Tempat Penginapan /Villa	Rp	32.250.000,00	29.550.000,00	32.250.000,00	27.300.000,00	2.000.000,00
Retribusi tempat rekreasi	Rp	1.502.814.000,00	1.482.036.000,00	1.502.814.000,00	1.154.213.000,00	281.157.000,00
PAD Pariwisata	Rp	1.920.142.093,00	2.332.697.400,00	2.392.979.010,00	2.734.581.837,80	1.108.006.276,00

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng, 2020

Dari tabel diatas, tergambar rincian penerimaan dari sektor kepariwisataan, yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, retribusi tempat penginapan/villa, dan rekribusi tempat rekreasi. Jenis pendapatan yang paling besar kontribusinya yaitu retribusi tempat rekreasi dengan rata-rata kontribusi setiap tahun cenderung fluktuatif dengan nilai di atas satu milyar. Yang berkontribusi paling rendah adalah Retribusi tempat penginapan/Villa. Ini dapat berarti wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Soppeng rata-rata wisatawan lokal yang tidak menginap.

2.1.3.3.2. Bidang Pertanian

2.1.3.3.2.1. Cakupan Bina Kelompok Petani

Pelayanan Urusan Pertanian tidak terlepas dari pembinaan kelompok tani, wadah kelompok tani menjadi sasaran utama pembangunan pertanian. Cakupan bina kelompok tani menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam pembangunan sektor pertanian. Pembinaan kelompok tani diwujudkan dalam bentuk fasilitasi bantuan, baik fisik berupa Sarana dan Prasarana maupun non fisik berupa pelatihan, kunjungan dan fasilitasi-fasilitasi yang dilakukan Instansi Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng melalui penyuluh pertanian. Adapun capaian Cakupan Bina Kelompok Tani Tahun 2016-2020 Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 258. Bina Kelompok Petani Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda	Kelompok tani	1,181	920	957	879	910
2	jumlah kelompok tani	Kelompok tani	1,200	953	957	981	910
	Cakupan Bina Kelompok Petani	%	98.42	96.54	100.00	89.60	100.00

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Katahanan Pangan, 2020

Pada Tahun 2016 Jumlah Kelompok Tani yang bergerak pada Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan sebanyak 1.200 Kelompok, masing-masing sub sektor terpisah dalam registrasi kelompok tani. Dan yang terbina sebanyak 1.181 atau 98,42%. Sedangkan pada tahun 2017, adanya kebijakan untuk melakukan pendataan atau registrasi ulang tanpa memilah masing-masing sub sektor, jumlah kelompok berkurang menjadi 953 Kelompok, dan yang terbina sebanyak 920 atau 96,54%. Tahun 2018 jumlah kelompok 957 dan 100% terbina, sedangkan pada tahun 2019, dari 981 Kelompok hanya terbina 879 Kelompok atau 89,60%, rendahnya capaian 2019 ini karena banyaknya kelompok terdaftar yang sudah tidak aktif. Pada tahun 2020, jumlah kelompok berkurang menjadi 910 Kelompok, dan 100% terbina. Fluktuasi capaian cakupan bina kelompok petani ini sangat bergantung pada ketersediaan tenaga penyuluh, updating data kelompok serta keaktifan kelompok tani itu sendiri.

2.1.3.3.3. Bidang Perdagangan

2.1.3.3.3.1. Ekspor Bersih Perdagangan

Neraca perdagangan atau balance of trade (BoT) ialah perbedaan antara nilai semua barang dan jasa yang diekspor dan diimpor dari suatu negara dalam periode waktu tertentu. Net exports, ekspor neto atau ekspor bersih sama dengan ekspor dikurangi impor. Ekspor mewakili pembelian orang asing untuk barang dan jasa dalam negeri. Impor adalah pembelian produk dan layanan asing oleh konsumen lokal.

Pertumbuhan domestik yang tinggi biasanya meningkatkan permintaan barang impor. Akibatnya, ekspor bersih menurun, ceteris paribus. Barang domestik yang lebih mahal membuat barang asing lebih kompetitif bagi konsumen domestik. Permintaan impor meningkat karena lebih banyak konsumen lebih memilih barang asing. Di pasar Regional dan

Internasional, barang domestik juga kurang kompetitif, sehingga mengurangi permintaan mereka.

Apresiasi mata uang mengurangi ekspor neto. Impor meningkat karena barang asing lebih murah untuk konsumen dalam negeri dan ekspor menurun karena barang dalam negeri lebih mahal untuk orang asing. Disamping itu biaya produksi memiliki implikasi untuk harga jual. Biaya produksi yang lebih rendah membuat barang dan jasa dalam negeri lebih murah. Ini akan menyebabkan peningkatan ekspor neto karena barang-barang domestik relatif lebih kompetitif.

Hambatan perdagangan seperti kuota impor, standar keselamatan, lisensi impor, persyaratan konten lokal, dll. mempengaruhi neraca perdagangan suatu daerah. Ekspor mendorong produksi dalam negeri meningkat. Sementara itu, impor merusak produksi dalam negeri karena pasokannya berasal dari luar negeri. Demikan juga di Kabupaten Soppeng masih tingginya nilai import perdagangan disebabkan masih terbatasnya jumlah jenis komoditi dan jumlah produksi perdagangan antar daerah/ekspor, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kebutuhan produk-produk industri dari luar

Tabel 2. 259. Ekspor Bersih Perdagangan Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Ekspor Bersih Perdagangan	Us $	-622,209.47	-542,197.15	-378,912.76	-572,571.90	-468,970.00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2020

Dari tabel di atas terlihat jika Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Soppeng dalam kurun waktu 5 tahun adalah defisit. Hal ini menujukkan bahwa nilai import lebih tinggi dibanding nilai ekspor. Pada tahun 2016 ekspor bersih perdagangan menunjukan defisit -622.209,47. Pada tahun 2017 terjadi sedikit penurunan nilai defisit berada pada angka -542.197,15. Bertambahnya import barang yang diiringi dengan kenaikan niai ekspor membuat defisit ekspor bersih perdagangan semakin menurun pada tahun 2018 yakni pada nilai -378.912,76. Namun pada tahun 2019 nilai defisit semakin naik hingga -572.571,90. Kemudian di tahun 2020 penurunan defisit sebesar -468,970.00.

Salah satu potensi sektor penyumbang nilai ekspor di Kabupaten Soppeng adalah sutera. Persuteraan alam memiliki prospek yang baik sebagai komoditas ekspor maupun substitusi impor. Namun perkembangan industri persuteraan alam di Kabupaten Soppeng cenderung lambat dan kurang merespon potensi tersebut. Ketersediaan bibit ulat sutera yang masih impor dari Cina sehingga ketersediaan kokon (sektor hulu) lebih lambat dibandingkan kebutuhan. Demikian juga perkembangan impor lebih besar dibandingkan dengan perkembangan ekspor produk-produk sutera

2.1.3.3.3.2. Cakupan Bina Kelompok Pedagang

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal, menunjukkan jumlah cakupan pembinaan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kepada kelompok pedagang (informal). Pedagang informal dalam hal ini adalah kelompok pedagang pasar. Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM terus berupaya untuk

mengoptimalkan jumlah pembinaan terhadap kelompok pedagang utamanya kelompok Pedagang Pasar. Perhatian pemerintah baik Pusat maupun Daerah yang cukup besar telah dioptimalkan melalui adanya kegiatan Revitalisasi 8 unit sarana dan prasarana perdagangan (pasar) di Kabupaten Soppeng. Optimaliasasi sarana perdagangan berupa pasar semi tradisional dengan diaktifkannya kembali Pasar Lolloe pada tahun 2018. Dengan bertambahnya sarana perdagangan maka akses kelompok pedagang untuk memasarkan dagangannya semakin meningkat. Program revitalisasi melalui Dana Alokasi Khusus, Tugas Pembantuan dan sharing APBD merupakan program revitalisasi Kementerian Perdagangan yang diatur dalam Permendag Nomor : 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang pedoman pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan

Pembinaan pedagang pasar oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng juga meliputi pengawasan barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. Hal ini untuk memastikan barang beredar dapat sesuai dengan parameter pengawasan dan para pedagang mengetahui dan menyadari hak-hak konsumen dalam mengkonsumsi barang yang tidak terdistorsi atau tercampur dengan barang yang rusak/kadaluwarsa, tidak terdaftar, atau hal yang menurunkan kualitas lainnya, ketika sudah beredar di pasar. Termasuk pengawasan untuk menjaga ketersediaan dan menjaga stabilitas harga barang pokok serta tertib niaga.

Kinerja cakupan bina kelompok pedagang dihitung dari Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan dibagi dengan jumlah kelompok pedagang/uasaha informal, berikut adalah data cakupan bina kelompok pedagang di Kabupaten Soppeng kurun waktu tahun 2016-2020

Tabel 2. 260. Cakupan Bina Kelompok Pedagang Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda	Kelompok Pedagang	17	17	17	18	18
2	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal	Kelompok Pedagang	17	17	17	18	18
3	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PPK dan UKM Kabupaten Soppeng, 2020

Dari tabel di atas terlihat jika jumlah cakupan bina kelompok pedagang selama tahun 2016-2020, cenderung stagnant dari tahun ke tahun dan tidak mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2016 Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda di Kab.Soppeng adalah 17 kelompok pedagang atau 100 persen dari target sebanyak 17 kelompok pedagang pasar. Pembinaan ini berlanjut hingga ke tahun 2017 dan 2018 dengan jumlah kelompok pedagang yang mendapatkan bantuan binaan masih sama dengan tahun sebelumnya yakni 17 kelompok pedagang. Peningkatan pembinaan pedagang.Peningkatan jumlah binaan cakupan kelompok pedagang baru menunjukkan peningkatan pada tahun 2019 dan 2020 yakni 18 kelompok pedagang informal.

Salah satu faktor yang mendorong penggunaan fasilitas sarana perdagangan/pasar semi tradisional adalah bahwa peran pasar disamping

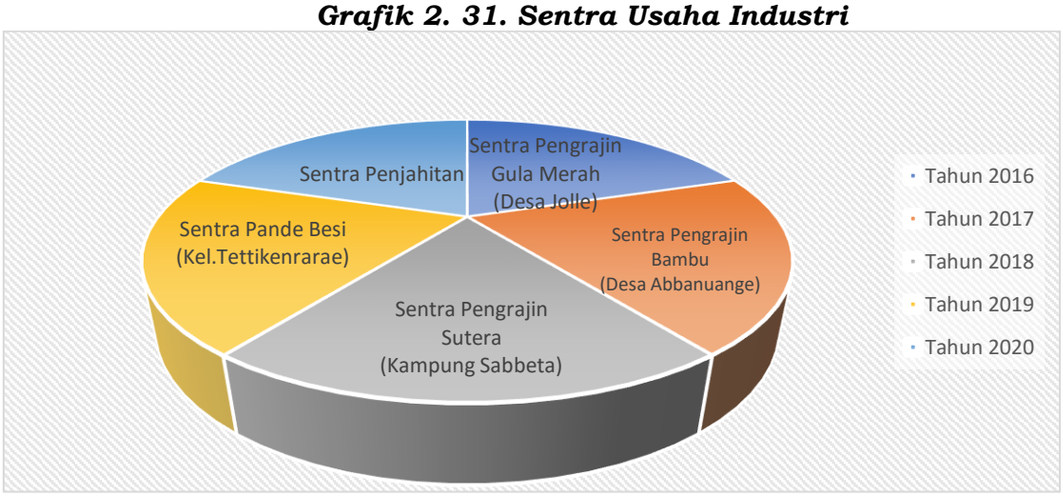
sebagai sumber retribusi daerah, tempat pertukaran barang, pusat pengembangan ekonomi rakyat, pusat perputaran uang daerah, pasar juga sebagai salah satu tempat lapangan pekerjaan.

2.1.3.3.4. Bidang Perindustrian

2.1.3.3.4.1. ***Cakupan Bina Kelompok Pengrajin***

Cakupan bina kelompok pengrajin merupakan perbandingan antara jumlah industri pengrajin yang difasilitasi oleh Pemerintah dengan jumlah keseluruhan industri pengrajin. Jumlah kelompok binaan terhadap Industri Kecil dan Menengah IKM yang dilaksanakan meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang inovatif dan terampil, penerapan teknologi tepat guna, peningkatan kualitas dan kuantitas produksi, peningkatan akses pasar dan bahan baku, serta promosi dan pameran produk unggulan.

Grafik 2. 31. Sentra Usaha Industri



Sumber : Dinas PPK dan UKM Kabupaten Soppeng

Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam hal ini Dinas PPK dan UKM selama kurun waktu 5 tahun terakhir telah berhasil membentuk dan membina sentra industri pada 5 Kecamatan. Sentra ini sebagai pusat kegiatan di kawasan/lokasi tertentu dimana terdapat usaha yang menggunakan bahan baku/sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama/sejenis serta memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi klaster.

Berikut adalah data kinerja cakupan bina kelompok pedagang di Kabupaten Soppeng kurun waktu tahun 2016-2020

Tabel 2. 261. Cakupan Bina Kelompok PengrajinTahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda	Kelompok Pengrajin	21	29	39	50	62
2	Jumlah kelompok pengrajin	Kelompok Pengrajin	42	58	78	100	124
3	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	%	50	50	50	50	50

Sumber : Dinas PPK dan UKM Kabupaten Soppeng, 2020

Persentase cakupan bina kelompok pengrajin menunjukkan angka stagnant yakni sebesar 50% selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2016 s.d 2020). Perkembangan Industri kerajinan di Kabupaten Soppeng memang

sangat rendah, namun industri kerajinan senantiasa mendapatkan perhatian dari Pemerintah dan tetap dilakukan pembinaan sehingga akan terus berkembang. Lambatnya pertumbuhan industri kerajinan disebabkan karena animo masyarakat yang masih kurang terhadap industri kerajinan karena mereka beranggapan bahwa perputaran ekonomis industri pangan lebih cepat dari industri kerajinan yang butuh kreatifitas dan keahlian khusus.

Komitmen pemerintah untuk selalu mengembangkan Industri Kecil dan Menengah diantaranya melalui pemberian kemudahan ijin usaha dan pembinaan kepada Industri Kecil, penyusunan kebijakan industri terkait dengan industri penunjang, pelatihan, pembinaan dan bantuan alat dalam bentuk pinjam pakai (bantuan sarpras untuk IKM tidak dilanjutkan karena terkendala oleh kebijakan nasional tentang pemberian hibah kepada masyarakat), serta pengembangan sentra-sentra industri potensial.

Peluang dan potensi pengembangan industri kerajinan di Kabupaten Soppeng adalah industri kerajinan/barang dari kayu, rotan, bambu, serat, dan industri sutera, industri olahan pertanian dan perkebunan (ecoprint) karena bahan baku cukup banyak namun persoalannya sangat sedikit masyarakat kita yang mau menggeluti industri kerajinan karena proses perputaran ekonominya cukup lambat dan pemasarannya masih terbatas.

2.1.3.3.5. Bidang Kelautan dan Perikanan

2.1.3.3.5.1. Produksi perikanan

Kegiatan usaha perikanan di Kabupaten Soppeng, meliputi perikanan tangkap di perairan umum dan perikanan budidaya dikolam dan budidaya ikan di sawah (minapadi). Berikut tabel Kontribusi Produksi Perikanan terhadap Total Produksi Tahun 2016-2020 :

Tabel 2. 262. Produksi Perikanan Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Produksi Ikan	Ton	4.688,89	5.381,21	2.600,70	3.120,90	3.383,72
2	Target Daerah	Ton	2.700	3.000	3.300	3.630	3.993
	Produksi Perikanan	%	173,66	179,37	78,81	85,98	84,74

Sumber : Dinas Peternakan, Kesehaan Hewan, dan Perikanan, 2020

Berdasarkan data produktivitas tersebut diatas, ada peningkatan dari 4.688,89 ton pada tahun 2016 menjadi 5.381,21 ton pada tahun 2017 dan menurun drastis pada tahun 2018 menjadi 2.600,70 Ton dan mengalami peningkatan menjadi 3.120,90 ton pada tahun 2019, dan Tahun 2020 menjadi 3.384,72 Ton. Terjadinya penurunan drastis pada tahun 2018 disebabkan berkurangnya populasi ikan kegiatan akibat puncak revitalisasi Danau Tempe dan menyerap tenaga kerja dari kalangan nelayan lokal sehingga aktifitas penangkapan ikan berkurang yang berujung pada penurunan produksi tangkapan. Namun pada tahun 2019 terjadi peningkatan dikarenakan selesainya kegiatan revitalisasi dan kembali normalnya aktifitas penangkapan di Danau Tempe dan kegiatan restocking

(penebaran benih ikan) mulai rutin dilakukan untuk menormalkan kembali ekosistem perairan pasca revitalisasi.

2.1.3.3.5.2. Konsumsi Ikan

Komsumsi Ikan merupakan tolak ukur yang sangat penting dalam penentuan Indikator Kinerja Utama di sektor kelautan dan perikanan, karena data komsumsi ikan merupakan data yang menjadi acuan pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara nasional Berikut tabel kontribusi komsumsi ikan Tahun 2016-2019.

Tabel 2. 263. Konsumsi Ikan Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Konsumsi Ikan	Kg	7.578.270	7.605.340	7.253.700	7.884.130	8.624.230
2	Target Daerah	Kg	7.150.000	7.200.000	7.250.000	7.300.000	7.350.000
	Konsumsi Ikan	%	105,99	105,63	100,05	108	117,34

Sumber : Dinas Peternakan, Kesehaan Hewan, dan Perikanan, 2020

Berdasarkan data diatas, ada peningkatan dari 7.578.270 kg pada tahun 2016 menjadi 7.605.340 kg pada tahun 2017 dan menurun menjadi 7.253.700 kg pada tahun 2018, dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 7.884.130 kg, dan Tahun 2020, meningkat menjadi 8.624.230 kg. terjadinya penurunan komsumsi ikan pada tahun 2018 disebabkan menurunnya produksi perikanan tangkap pada tahun tersebu, namun secara target Daerah sudah tercapai. Peningkatan komsumsi ikan terus terjadi disebabkan meningkatnya produksi perikanan dari hasil tangkapan dan budidaya perikanan dari tahun ke tahun.

2.1.3.3.5.3. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Pelayanan Urusan Perikanan tidak terlepas dari pembinaan kelompok Nelayan,. Cakupan bina kelompok Nelayan menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam pembangunan sektor Perikanan tangkap. Pembinaan kelompok tani diwujudkan dalam bentuk fasilitasi bantuan, baik fisik berupa Sarana dan Prasarana maupun non fisik berupa pelatihan, kunjungan dan fasilitasi-fasilitasi yang dilakukan Instansi Dinas Peternakan, kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng melalui penyuluh perikanan. Adapun capaian Cakupan Bina Kelompok Tani Tahun 2016-2020 Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 264. Bina Kelompok Nelayan Tahun 2016-2020

NO	Uraian	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda	Kelompok Nelayan	0	0	0	5	0
2	Jumlah kelompok nelayan	Kelompok Nelayan	33	36	37	39	44
	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	0	0	0	12,82	0

Sumber : Dinas Peternakan, Kesehaan Hewan, dan Perikanan, 2020

Ket : Data Tahun 2020 sampai dengan Kondisi Triwulan III (30 September 2020)

Pada Tahun 2016 – 2020 Jumlah Kelompok Nelayan terus meningkat. Pada dasarnya capaian pembinanaan nelayan dari tahun ke tahun yang meliputi pembinaan kunjungan, pelatihan serta fasilitasi kelompok nelayan tercapai 100% namun yang menjadi indikator Bina nelayan yaitu Kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda dimana ketersediaan anggaran untuk bantuan Hibah kepada Masyarakat nelayan tidak sebanding dengan peningkatan kelompok nelayan dan jumlah terbatas setiap tahunnya serta jumlah penyuluh perikanan yang sangat minim.

2.1.3.3.5.4. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Berdasarkan data produktivitas tersebut diatas, ada peningkatan dari 4.390,9 ton pada tahun 2016 menjadi 5063,2 ton pada tahun 2017 dan menurun drastis pada tahun 2018 menjadi 2.235,9 ton dan mengalami peningkatan menjadi 2.703,1 ton pada tahun 2019, Tahun 2020 menjadi 2.957,90 ton. Terjadinya penurunan drastis pada tahun 2018 disebabkan berkurangnya populasi ikan akibat puncak

Tabel 2. 265. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Produksi Ikan kontribusi hasil kelompok nelayan	Ton	4390,9	5063,2	2235,9	2703,1	2.957,90
2	Jumlah produksi ikan di daerah	Ton	4688,89	5381,21	2600,7	3120,9	3.383
	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	%	93,64	94,09	85,97	86,61	87,42

Sumber : Dinas Peternakan, Kesehaan Hewan, dan Perikanan, 2020

kegiatan revitalisasi Danau Tempe dan menyerap tenaga kerja dari kalangan Nelayan lokal sehingga aktifitas penangkapan ikan berkurang yang berujung pada penurunan produksi tangkapan. Namun pada tahun 2019 terjadi peningkatan dikarenakan selesainya kegiatan revitalisasi dan kembali normalnya aktifitas penangkapan di Danau Tempe dan kegiatan restocking (penebaran benih ikan) mulai rutin dilakukan untuk menormalkan kembali ekosistem perairan pasca revitalisasi

2.1.3.3.5.5. Proporsi Tangkapan Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis Yang Aman

Berdasarkan data , Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman cenderung tetap dikarenakan belum diketahui cara penghitungan potensi hasil tangkapan secara keseluruhan dan diperlukannya data awal terkait potensi sumberdaya ikan yang ada di perairan umum yang meliputi Danau, Sungai dan Rawa secara keseluruhan dan perlu dilakukan penghitungan MSY (pendugaan Stok Ikan di Perairan) per jenis ikan di perairan.

Tabel 2. 266. Proporsi Tangkapan Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis yang Aman Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tangkapan ikan	Ton	4.390,90	5.063,20	2.235,90	2.703,10	2.957,90

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
2	80% dari tangkapan maksimum lestari	Ton	3.512,72	4.050,56	1.788,72	2.162,48	2.366,32
	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada Dalam Batasan Biologis yang Aman	%	125	125	125	125	125

Sumber : Dinas Peternakan, Kesehaan Hewan, dan Perikanan, 2020

2.1.3.3.5.6. Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial

Berdasarkan data diatas, Rasio Kawasan Lindung Perairan terhadap total luas perairan teritorial cenderung tetap dikarenakan Luas areal penangkap dan kawasan lindung perairan tidak mengalami perubahan.

Tabel 2. 267. Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Kawasan lindung perairan	Ha	413	413	413	413	413
2	Total luas perairan teritorial	Ha	3000	3000	3000	3000	3000
	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial	Poin	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Sumber : Dinas Peternakan, Kesehaan Hewan, dan Perikanan, 2020

2.1.3.4. Urusan Penunjang Urusan

2.1.3.4.1. Urusan Perencanaan Pembangunan

2.1.3.4.1.1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun. Perencanaan pembangunan jangka panjang memuat penjabaran Visi dan Misi ke dalam tujuan jangka panjang, penjabaran sasaran pembangunan daerah ke dalam arah kebijakan pembangunan dan prioritas alokasi sumberdaya daerah. Karena RPJPD adalah salah dokumen perencanaan strategis Pemerintah Kabupaten Soppeng telah menyusun Dokumen RPJPD Periode 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010.

Tabel 2. 268. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2020

2.1.3.4.1.2. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Dengan mengacu pada Dokumen RPJPD selanjutnya diturunkan kedalam perencanaan daerah yang lebih substansial yaitu RPJMD. Setiap RPJMD ditetapkan oleh Peraturan daerah. RPJMD periode tahun 2016-2021 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun Kabupaten Soppeng 2016 – 2021. Di tahun 2018 dilakukan perubahan RPJMD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2021.

Tabel 2. 269. Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan– RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2020

2.1.3.4.1.3. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

Dokumen yang memuat tentang perencanaan pembangunan daerah dalam jangka pendek (satu tahun) adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dokumen tersebut disusun setiap tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng.

Tabel 2. 270. Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2020

2.1.3.4.1.4. Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah adalah dokumen yang berisi arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No.8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032. Namun, karena sebagian besar data sudah tidak sesuai sehingga dokumen RTRW Kabupaten Soppeng perlu dilakukan peninjauan Kembali.

Tabel 2. 271. Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2020

2.1.3.4.1.5. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD

Setelah RPJMD ditetapkan, pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dalam kurun waktu tahun 2017-2020 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kabupaten Soppeng kedalam RKPD dapat dilaksanakan dengan persentase 100%. Hal tersebut didukung dengan adanya sistem informasi atau aplikasi yang terintegrasi antara perencanaan dan penganggaran.

Tabel 2. 272. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah program RKPD Tahun berkenaan	Program	80	149	149	149	159
2	Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan	Program	149	149	149	149	159
	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	53,69	100	100	100	100

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2020

2.1.3.4.1.6. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD

Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan oleh kepala daerah. Kemudian Kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan nota kesepakatan. Setelah RKA-SKPD dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi kemudian ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD di Kabupaten Soppeng dari tahun 2016 – 2020 dapat dilaksanakan dengan persentase 100% setiap tahunnya.

Tabel 2. 273. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Tahun 2016-2020

NO	Uraian	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah program APBD Tahun berkenaan	Program	2,425	2,425	1,661	1,281	1,34
2	Jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan	Program	2,425	2,425	1,661	1,281	1,34
	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2020

2.1.3.4.1.7. Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW

RTRW kabupaten memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten (penataan kabupaten). rencana struktur ruang wilayah kabupaten; rencana pola ruang wilayah kabupaten; penetapan kawasan strategis kabupaten; arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. RTRW disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten/kota, acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten/kota, acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten/kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta, pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten/kota, dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten/kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi, serta acuan dalam administrasi pertanahan. Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Kabupaten Soppeng secara garis besar dapat dikatakan telah sesuai 100%. Namun, data pada dokumen RTRW masih sangat umum, tidak spesifik dan perlu di update sehingga dokumen RTRW tersebut perlu dilakukan peninjauan kembali.

2.1.3.4.2. Urusan Keuangan

2.1.3.4.2.1. Persentase SILPA

SiLPA adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu Pengeluaran Anggaran selama satu periode anggaran. Berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng persentase SiLPA dari Total APBD pada Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. SiLPA merupakan dana sisa yang hanya boleh digunakan, dalam konteks pembiayaan yang fungsinya untuk menutupi defisit anggaran pada pembiayaan. Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam penggunaan SiLPA selalu mengoptimalkan pada perubahan APBD. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2. 274. Persentase SILPA Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Total SILPA	Rp	110,190,519,757.82	111,780,078,528.82	108,188,097,254.52	119,890,735,353.61	63,500,223,512.94
2	Total APBD	Rp	1,320,871,298,370.00	1,234,881,325,604.00	1,221,166,254,699.82	1,281,641,633,837.52	1,251,860,939,169.68
	Persentase SILPA	%	8.34	9.05	8.86	9.35	5.07

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2020

2.1.3.4.2.2. Persentase SILPA terhadap APBD

SILPA atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan, yaitu adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan neto. Berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng persentase SILPA dari Total APBD (Pendapatan) sepanjang tahun 2016-2020 mengalami fluktiasi. SiLPA yang ada dalam struktur APBD merupakan asumsi yang dipengaruhi oleh target penerimaan dan belanja yang mengakibatkan APBD berada pada kondisi surplus/defisit. Dalam penyusunan APBD kebijakan Pemerintah Daerah dalam penetapan SiLPA selalu berasumsi null, sehingga terjadi keseimbangan antara pembiayaan dan belanja.

Tabel 2. 275. Persentase SILPA terhadap APBD Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Total SILPA	Rp	110,190,519,757.82	111,780,078,528.82	108,188,097,254.52	119,890,735,353.61	63,500,223,512.94
2	Total APBD	Rp	1,320,871,298,370.00	1,234,881,325,604.00	1,221,166,254,699.82	1,281,641,633,837.52	1,202,470,518,866.01
	Persentase SILPA Terhadap APBD	%	8.34	9.05	8.86	9.35	5.28

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2020

2.1.3.4.2.3. Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana

Pada Tahun 2018 dan 2019, persentase program yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Soppeng lebih kecil dibandingkan pada

Tahun 2016 dan 2017. Demikian halnya dengan persentase kegiatan, masih terdapat beberapa kegiatan pada APBD yang tidak terlaksana dengan berbagai pertimbangan dan alasan seperti gagal kontrak dan sebagainya. sedang untuk tahun 2020 masih dalam progres penyelesaian.

Tabel 2. 276. Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana Tzhun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Program dalam APBD yang tidak dilaksanakan	Program	4	5	1	2	12
2	Total Program dalam APBD	Program	354	305	318	324	233
3	Jumlah Kegiatan dalam APBD yang tidak dilaksanakan	Kegiatan	30	72	23	34	220
4	Total Kegiatan dalam APBD	Kegiatan	1240	1352	1224	1252	1289
	Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana						
	Persentase Program yang Tidak Terlaksana	%	1.13	1.64	0.31	0.62	5.15
	Persentase Kegiatan yang Tidak Terlaksana	%	2.42	5.33	1.88	2.72	17.07

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2020

2.1.3.4.2.4. Persentase belanja pendidikan (20%)

Salah satu mandatory spending dalam penyusunan APBD adalah belanja Pendidikan. Alokasi tersebut digunakan untuk pembangunan sekolah, rehabilitasi ruang kelas, dan sebagainya. Alokasi dana untuk belanja pendidikan di Kabupaten Soppeng telah sesuai Mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1), dengan pengalokasian belanja pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya. Bahkan untuk Tahun 2020 Belanja Pendidikan dialokasikan sebesar Rp. 370.804.822.895,07 dari Total APBD Rp.1.298.262.158.701,95 atau 28,56%. Untuk tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, namun tetap melebihi batas minimal 20%, hal ini disebabkan oleh Adanya Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19*).

Tabel 2.277. Persentase belanja pendidikan (20%) Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan	Rp	431,977,401,236.00	374,360,240,894.00	350,748,210,585	384,483,937,296.00	370,804,822,895.07

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
2	Total APBD	Rp	1,320,871,298,370.00	1,234,881,325,604.00	1,221,166,254,699.82	1,281,641,633,837.52	1,298,262,158,701.95
	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	%	32.70	30.32	28.72	30.00	28.56

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2020

2.1.3.4.2.5. Persentase belanja kesehatan (10%)

Sama halnya dengan Pendidikan, Kesehatan juga merupakan salah satu mandatory spending dalam penyusunan APBD dengan persentase sebesar minimal 10 %. Di Kabupaten Soppeng telah mengalokasikan belanja kesehatan melebihi dari amanat peraturan tersebut, bahkan mengalami peningkatan sejak 2016 sampai 2020, dari 14,20 % kini mencapai 19,88%. Bahkan untuk Tahun 2020 Belanja Kesehatan dialokasikan sebesar Rp.258.035.107.551,50 dari Total APBD Rp.1.298.262.158.701,95 atau sebesar 19,88 %.

Tabel 2. 278. Persentase belanja kesehatan (10%) Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan	Rp	187,555,785,699.00	212,145,677,240.00	227,082,865,711.00	237,425,771,752.00	258,035,107,551.50
2	Total APBD	Rp	1,320,871,298,370.00	1,234,881,325,604.00	1,221,166,254,699.82	1,281,641,633,837.52	1,298,262,158,701.95
	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	%	14.20	17.18	18.60	18.53	19.88

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2020

2.1.3.4.2.6. Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung

Berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 struktur belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung pada tahun 2016, 2017 dan 2019, berdasarkan data, persentase Belanja langsung lebih tinggi daripada belanja tidak langsung. Namun di tahun 2018 dan 2020 persentase belanja tidak langsung lebih besar daripada belanja langsung. Hal tersebut disebabkan oleh adanya Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 18 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 9 tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Tabel 2. 279. Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung Tahun 2016-2020

NO	Uraian	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Belanja Langsung	Rp	661,331,870,356.00	617,974,795,821.00	588,769,081,570.00	648,422,088,879.00	564,956,594,707.58
2	Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp	659,559,428,014.00	616,906,529,783.00	632,397,173,129.82	633,219,544,958.52	733,305,563,994.37
3	Total APBD	Rp	1,320,871,298,370.00	1,234,881,325,604.00	1,221,166,254,699.82	1,281,641,633,837.52	1,298,262,158,701.95
Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung							
	Persentase Belanja Langsung	%	50.07	50.04	48.21	50.59	43.52
	Persentase Belanja Tidak Langsung	%	49.93	49.96	51.79	49.41	56.48

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2020

2.1.3.4.2.7. Bagi hasil kabupaten/kota dan desa

Alokasi belanja bagi hasil Kabupaten Soppeng pada tahun 2016 awalnya adalah Rp 1.603.220.900,- atau 0,12 persen dari Total APBD dan namun pada tahun 2020 Bagi Hasil Kabupaten ke Desa meningkat menjadi Rp 2.723.530.114,- atau 0,21 persen dari Total APBD sebesar Rp. 1.298.262.158.701,95. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya dana transfer dari pusat dan PAD sehingga berpengaruh terhadap persentase dana bagi hasil ke desa.

Tabel 2.280. Bagi hasil kabupaten/kota dan desa Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Belanja Bagi Hasil Kab/kota/desa	Rp	1,603,220,900.00	1,916,133,440.00	2,472,902,412.00	2,549,749,931.00	2,723,530,114.00

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
2	Total APBD	Rp	1,320,871,298,370.00	1,234,881,325,604.00	1,221,166,254,699.82	1,281,641,633,837.52	1,298,262,158,701.95
	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	%	0.12	0.16	0.20	0.20	0.21

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2020

2.1.3.4.2.8. Penetapan APBD

APBD ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah (Perda), yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Pemerintah Kabupaten Soppeng sangat berkomitmen dan memperhatikan tahapan penetapan APBD agar tepat waktu, dengan demikian pelaksanaan program kegiatan dapat dilaksanakan secara tepat waktu pula. Hal ini didukung oleh Adanya peningkatan kompetensi dan kapasitas bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD, hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif, adanya sanksi tegas apabila APBD terlambat ditetapkan, konsistensi aturan dalam penyusunan APBD, peraturan-peraturan terkait dana dari pemerintah atasan dikeluarkan tepat waktu, dan transparansi dalam proses penyusunan APBD, serta adanya analisis standar belanja (ASB) untuk menilai kewajaran belanja.

Tabel 2. 281. Penetapan APBD Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Penetapan APBD (Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu)	(Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu)	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2020

2.1.3.4.3. Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

2.1.3.4.3.1. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan

Pendidikan dan latihan merupakan salah satu bentuk pembinaan terhadap pegawai negeri sipil untuk menambah pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat mengikuti perkembangan, perubahan sistem dan teknologi dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya. Selain itu pendidikan dan Latihan mempunyai berbagai manfaat karier jangka panjang yang membantu pegawai untuk bertanggung jawab lebih besar di waktu yang akan datang. Pemerintah Kabupaten Soppeng setiap tahun menyiapkan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng. Berdasarkan data dari BPKSDM rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam tahun 2020 adalah 17 JP meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya yaitu 15 JP di

tahun 2019, 15 JP di tahun 2018, 11 JP di tahun 2017 dan 10 JP di tahun 2016. Pendidikan dan pelatihan tersebut termasuk Diklat yang diikuti PNS di luar dari Diklat yang dilaksanakan BKPSDM Kabupaten Soppeng.

Tabel 2. 282. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	JP	10 JP	11 JP	15 JP	15 JP	17 JP

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2020

2.1.3.4.3.2. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) bagi PNS sangat penting untuk peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur, Salah satu bentuk Diklat tersebut adalah diklat formal atau Diklat fungsional dimana Diklat tersebut merupakan Diklat Wajib oleh para calon dan pejabat fungsional tertentu. Pada tahun 2016 jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal adalah 360 ASN atau 6,49 % dari total ASN sebanyak 5.548 sedangkan pada tahun 2017 jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal adalah 400 ASN atau 7,55 % dari Total ASN sebanyak 5.300 ASN. Angka tersebut terus meningkat hingga pada tahun 2020 jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal adalah 423 orang atau 8,50 % dari total ASN sebanyak 4975 ASN.

Tabel 2. 283. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	ASN	360	400	340	340	423
2	Jumlah total ASN	ASN	5548	5300	5122	5162	4975
	Presentase Asn yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	%	6.49	7.55	6.64	6.59	8.50

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2020

2.1.3.4.3.3. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural

Diklat Kepemimpinan adalah diklat yang dilakukan guna memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap serta perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur, yang bertujuan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dalam jenjang jabatan struktural tertentu, Diklat Kepemimpinan ini dilaksanakan guna mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dari aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. Di Kabupaten Soppeng, Pada tahun 2020, Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural telah mencapai 88,54 %.

Tabel 2. 284. Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	Jabatan Pimpinan Tinggi	479	479	584	623	626
2	Jumlah Total Jabatan	Jabatan	773	776	732	708	707
	Presentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	%	61.97	61.73	79.78	87.99	88.54

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2020

2.1.3.4.3.4. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah

Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. pimpinan tinggi di Kabupaten/Kota adalah Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati. Pengisian JPT harus melalui tahapan Perencanaan , Pengumuman Lowongan, Pelamaran, Seleksi , Pengumuman Hasil seleksi dan terakhir adalah Penetapan dan Pengangkatan. Di Kabupaten Soppeng, pada tahun 2020 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah sebanyak 31 orang.

Tabel 2. 285. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	Jabatan Pimpinan Tinggi	30	27	30	26	31

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2020

2.1.3.4.3.5. Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Pada tahun 2016, jumlah jabatan administrasi di Kabupaten Soppeng sebanyak 2183 namun pada tahun 2020 jumlah jabatan administrasi hanya sebanyak 1994. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perampingan kelembagaan.

Tabel 2. 286. Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	Jabatan Administrasi	2183	1950	1887	1999	1994

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2020

2.1.3.4.3.6. Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah

Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dalam UU ASN merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Pada tahun 2016 di Kabupaten Soppeng, jumlah JFT sbanyak 3.335 orang sedangkan pada tahun 2020 menurun hanya sebanyak 2.950 orang.

Tabel 2. 287. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah	Jabatan Fungsional	3.335	3.277	3.205	3.139	2.950

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2020

2.1.3.4.4. Urusan Penelitian dan Pengembangan

2.1.3.4.4.1. Persentase implementasi rencana kelitbangan

Persentase implementasi rencana kelitbangan di Kabupaten Soppeng dari tahun 2016 sampai tahun 2020 adalah sebesar 100%. Namun dalam perumusan rencana kelitbangan kedepan perlu mengkoordinasikan dan merumuskan program dan kegiatan kelitbangan dengan stakeholder agar lebih terarah guna menjawab dinamika permasalahan dan mendukung pelaksanan kelitbangan satu pintu, serta perlu penyusunan dan penyempurnaan regulasi yang berorientasi pada dukungan kelitbangan di Pusat dan Daerah.

Tabel 2. 288. Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2020

2.1.3.4.4.2. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan

Dalam kurun waktu tahun 2016-2021 telah dilakukan beberapa penelitian dan pengembangan terhadap potensi-potensi yang ada di Kabupaten Soppeng, diharapkan hasil-hasil Litbang dapat segera dimanfaatkan oleh para stakeholder terkait sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

2.1.3.4.4.3. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Belum adanya perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah disebabkan oleh belum

disusunnya dokumen Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Sehingga data terkait persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah tahun 2016-2020 masih 0%

2.1.3.4.4.4. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah

Inovasi Daerah berbentuk inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah dan inovasi Pelayanan Publik; dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen. Inovasi Pelayanan Publik merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik. Inovasi Daerah lainnya merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah tahun 2016-2020 masih 0%.

2.1.3.4.5. Urusan Pengawasan

2.1.3.4.5.1. Persentase tindak lanjut temuan

Data Presentase tindak lanjut temuan merupakan proporsi data jumlah temuan yang ditindaklanjuti terhadap jumlah total temuan. Berdasarkan data capaian dapat dilihat mengalami penurunan yang signifikan, dari nilai 85,53 % pada Tahun 2016, turun menjadi 57,02 % di Tahun 2020. Hal ini sejalan dengan menurunnya jumlah total temuan yang juga makin berkurang. Terhadap Persentase tindak lanjut temuan, dapat dilihat bahwa tidak tercapainya target disebabkan karena adanya beberapa kendala yang dihadapi antara lain pihak terkait temuan telah pensiun/meninggal /tidak diketahui alamatnya serta sulitnya penanganan tindak lanjut bagi pejabat/ASN terkait temuan yang telah ditugaskan ke SKPD lain, selain itu dikarenakan kurangnya respon individu atau skpd atas laporan hasil pemeriksaan yang telah dikeluarkan terhadap temuan yang ada.

Tabel 2. 289. Persentase tindak lanjut temuan Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	Temuan	130	176	253	98	130
2	Jumlah total temuan	Temuan	152	284	352	146	228
	Persentase tindak lanjut temuan	%	85.53	61.97	71.88	67.12	57.02

Sumber : Inspektorat Daerah, 2020

2.1.3.4.5.2. Persentase pelanggaran pegawai

Data Presentase Pelanggaran Pegawai merupakan proporsi data jumlah ASN yang dikenakan sanksi terhadap jumlah total ASN. Berdasarkan data capaian dapat dilihat mengalami pergerakan yang fluktuatif, mengalami penurunan nilai di Tahun 2017 dan 2018, namun mengalami sedikit lonjakan di Tahun 2019 dan kembali turun di tahun 2020 dengan nilai 0,17 %. namun

pada dasarnya Pelanggaran pegawai yang dimaksud dalam hal ini baik dari segi kedisiplinan ataupun ASN yang terlibat dengan masalah hukum seperti pelanggaran terhadap hal keuangan dan belanja atas kegiatan yang dilakukan. Adanya jumlah ASN yang dikenai sanksi mengalami peningkatan pada tahun 2019 didominasi pelanggaran kedisiplinan berupa kehadiran.

Tabel 2. 290. Persentase Pelanggaran Pegawai Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ASN yang dikenai sanksi	ASN	35	10	9	17	9
2	Jumlah total ASN	ASN	5548	5300	5122	5165	5192
	Persentase Pelanggaran Pegawai	%	0.63	0.19	0.18	0.33	0.17

Sumber : Inspektorat Daerah, 2020

2.1.3.4.5.3. Jumlah temuan BPK

Data indikator Jumlah Temuan BPK merupakan data yang diperoleh dari Berita Acara Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK yang dikeluarkan setiap semester oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi selatan, dimana jumlah temuan dalam hal keuangan yaitu terkait laporan keuangan pemerintah daerah maupun pusat, kinerja terkait aspek ekonomis, efektif, efektifitas penggunaan anggaran dan temuan dari hasil pemeriksaan tujuan tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Di Kabupaten Soppeng, Sebagian besar temuan BPK dapat ditindaklanjuti walaupun masih terdapat beberapa temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti.

Tabel 2. 291. Jumlah Temuan BPK Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah temuan BPK	Temuan	486	500	539	639	674

Sumber : Inspektorat Daerah, 2020

2.1.3.4.6. Urusan Sekretariat Dewan

2.1.3.4.6.1. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng dalam melaksanakan fungsinya dibagi tugas dalam bentuk organisasi kerja kecil berupa alat kelengkapan DPRD yang ditetapkan dalam Keputusan DPRD yang terdiri dari Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Perda, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan Rapat Paripurna. Alat kelengkapan dewan tersebut memiliki rencana kerja tahunan yang dituang dalam Rencana Kerja DPRD setiap tahun anggaran. DPRD Soppeng mulai pada tahun 2016 hingga 2020 teleh memiliki Rencana Kerja Tahunan DPRD.

Tabel 2.292. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/ Kota Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 2020

2.1.3.4.6.2. Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng memiliki dan melaksanakan fungsi Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah; Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD). dan fungsi Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah. Fungsi tersebut sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah sebanyak dua kali. Perubahan pertama dilakukan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014, sedangkan perubahan kedua dilakukan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018. Dalam melaksanakan fungsi tersbut, DPRD Kabupaten Soppeng kemudian menetapkan Rencana Kerja DPRD Soppeng melalui Keputusan DPRD Kabupaten Soppeng yang tiap tahunnya menjadi acuan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Sekretariat DPRD Soppeng. Program kerja dalam melaksanakan Fungsi DPRD Soppeng tersebut selalu tertuang dalam dokumen RPJMD dan RKPD Kabupaten Soppeng mulai tahun 2016 hingga tahun 2020.

Tabel 2.293. Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 2020

2.1.3.4.6.3. Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng memiliki dan melaksanakan fungsi Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah; Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD). dan fungsi Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah. Fungsi tersebut sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah sebanyak dua kali. Perubahan pertama dilakukan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014, sedangkan perubahan kedua dilakukan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018. Dalam melaksanakan fungsi tersbut, DPRD Kabupaten Soppeng kemudian menetapkan Rencana Kerja DPRD Soppeng melalui Keputusan DPRD Kabupaten Soppeng yang tiap tahunnya menjadi acuan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan dan dokumen anggaran Sekretariat DPRD Soppeng.

Tabel 2.294. Terintegrasi program-program DPRD untuk pelaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 2020

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani (IT) dengan indeks harga yang dibayar petani (IB) yang dinyatakan dalam persentase. Secara konsepsional, Nilai Tukar Petani (NTP) diartikan sebagai pengukur kemampuan tukar produk pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang diperlukan petani baik berupa konsumsi rumah tangga maupun biaya produksi usaha pertanian yang dilakukan. Berikut capaian Nilai Tukar Petani di Kabupaten Soppeng 2016-2019 :

Tabel 2.295. Nilai Tukar Petani Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks yang diterima Petani	Poin	101.83	102.93	100.00	100.00	107.67
2	Indeks yang dibayar Petani	Poin	100.85	101.10	97.98	96.22	103.34
	Nilai Tukar Petani	Poin	100.97	101.81	102.06	103.93	104.4

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, 2020

Berdasarkan tabel tersebut diatas, Untuk NTP Tahun 2016-2020 mencapai diatas 100, yang artinya petani mengalami surplus, harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Sehingga pendapatan petani naik lebih besar daripada pengeluarannya. Nilai Tukar Petani di Kabupaten Soppeng 2016 yaitu 100,97, mengalami peningkatan menjadi 101,81 pada tahun 2017, dan 102,06 pada tahun 2018 serta menjadi 103,93 pada tahun 2019. Adapun nilai tukar petani pada tahun 2020 meningkat menjadi 104,4. Peningkatan tersebut salah satunya disebabkan oleh peningkatan nilai produksi hasil pertanian (yang diterima) petani baik karena adanya peningkatan produksi maupun harga jual dari komoditi hasil pertanian. Nilai Tukar Petani bisa terus meningkat diatas 100, jika terus dipacu melalui peningkatan produksi dan peningkatan harga jual ditingkat petani.

2.1.4.2. Persetanse Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa

Tingkat perkembangan desa diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- Desa Swadaya; adalah desa yang kekurangan sumber daya manusia atau tenaga kerja dan juga kekurangan dana sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada di desanya. Biasanya desa swadaya berada di wilayah yang terpencil jauh dari kota, taraf berkehidupan miskin dan tradisional serta tidak memiliki sarana dan prasarana penunjang yang mencukupi.
- Desa Swakarya; adalah desa yang mulai menggunakan dan memanfaatkan potensi fisik dan nonfisik yang dimilikinya tetapi masih kekurangan sumber keuangan atau dana. Desa swakarsa belum banyak memiliki sarana dan prasarana desa yang biasanya terletak di daerah peralihan desa terpencil dan kota. Masyarakat desa swakarsa masih sedikit yang berpendidikan tinggi dan tidak bermata pencaharian utama sebagai petani di pertanian saja serta banyak mengerjakan sesuatu secara gotong royong.
- Desa Swasembada; adalah desa yang berkecukupan dalam hal sumber daya manusia dan keuangan sehingga dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik desa secara maksimal. Kehidupan desa swasembada sudah mirip kota yang modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat pedesaan maju.

Tabel 2.296. Persentase Desa Berstatus Swasembada Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa berswasembada	Desa	3	3	3	3	3
2	Jumlah desa	Desa	49	49	49	49	49
	Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa	%	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2020

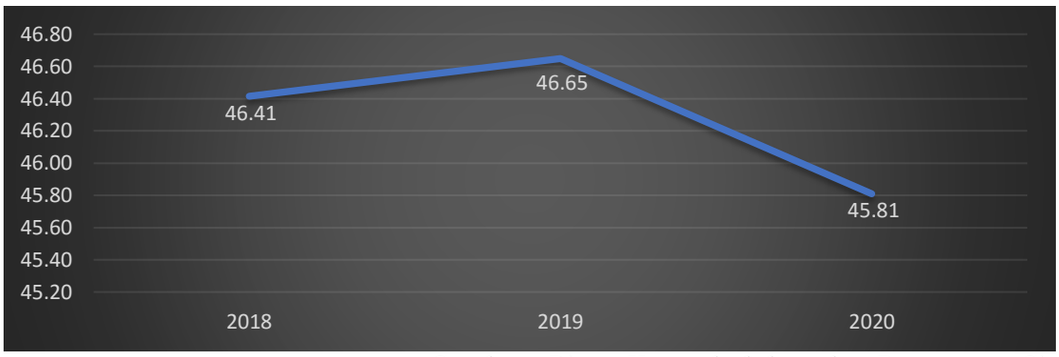
2.1.4.3. Rasio Ketergantungan

Angka Beban Ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif (umur 15-64 tahun) dengan penduduk usia

tidak produktif (umur di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas). Angka Beban Ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar menunjukkan keadaan ekonomi suatu wilayah.

Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Grafik 2. 32. Rasio Ketergantungan Kabupaten Soppeng



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pergeseran distribusi umur penduduk dan penurunan rasio ketergantunagn membentuk keadaan ideal yang berpotensi terjadinya bonus demografi. Kesempatan ini harus dipahami oleh pengambil kebijakan agar dapat memanfaat bonus demografi untuk kesejahteraan rakyat. Harus disadari juga bahwa pada masa yang akan datang, angka ketergantungan akan kembali meningkat yang disebabkan karena fertilitas rendah dan angka harapan hidup yang tinggi.

Rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Soppeng sepanjang 2018- 2020 berdasarkan data dinas kependudukan dan capil konsisten mengalami penurunan yaitu sebanyak 46,41% pada 2018 dan menjadi 45,81% pada 2020. Peningkatan angka ketergantungan menjadi 46,65% pada tahun 2019 tentu menarik perhatian tersendiri apakah angka ketergantungan sudah mencapai titik terendah dan akan kembali meningkat pada tahun selanjutnya. Peningkatan angka ketergantungan ini setidaknya menjadi bahan evaluasi awal apakah bonus demografi di Kabupaten Soppeng benar-benar sudah dimanfaatkan atau sebaliknya akan berlalu begitu saja.

2.1.5. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2020

Pada tahun 2020 terdapat beberapa kinerja Urusan pemerintah Kabupaten Soppeng yang telah tercapai, belum tercapai dan telah melebihi target. Dimana sebanyak 145 indikator yang belum tercapai, sebanyak 51 indikator yang melampaui dan sebanyak 74 indikator yang sesuai dangan target. Selain itu beberapa indikator yang tidak memiliki target tetapi terdapat realisasi sebanyak 38 indikator juga terdapat indikator yang tidak ada. Selengkapnya pada table berikut:

Tabel 2.297. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
1	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**													
1.1	Pertumbuhan PDRB	%	8,14	8,34	8,34	8,40	8,50	8,11	8,29	8,11	7,69	2,19	<	Belum Tercapai
1.2	Laju Inflasi		0,97	1,48	5,54	4-5	4-5	1,48	5,54	4,69	1,64	1,89	<	Belum Tercapai
1.3	PDRB per kapita (dalam juta rupiah)	Juta Rupiah	35	39,50	42,16	44,82	47,47	34,89	39,19	44,12	48,18	50,10	>	Melampaui
1.4	Indeks Gini		0,398	0,360	0,350	0,340	0,330	0,399	0,359	0,359	0,392	0,403	<	Belum Tercapai
1.7	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%						92,5	91,71	91,55	92,75	91,28		
1.10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		65,95	66,67	67,32	67,99	68,66	65,95	66,67	67,60	68,26	68,67	>	Melampaui
1.11	Angka melek huruf	%	99,7	99,64	99,7	99,76	99,82	99,75	99,64	99,62	99,62	87,51	<	Belum Tercapai
1.12	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)		7,06	7,42	7,55	7,73	7,92	7,06	7,42	7,63	7,74	7,81	<	Belum Tercapai
1.13	Angka usia harapan hidup (tahun)		68,62	68,72	68,82	68,92	69,02	68,62	68,72	69,02	69,43	69,65	>	Melampaui
1.14	Persentase balita gizi buruk	%	0,022	0,015	0	0	0	0,022	0,015	0,015	0,008	0,015	<	Belum Tercapai
1.15	Prevalensi balita gizi kurang		1,05	0,11	0	0	0	1,05	1,35	3,45	3,31	2,56	<	Belum Tercapai
1.16	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	98,57	100	100	100	100	98,57	100	97,14	100,00	100,00	=	Sesuai
1.17	Angka partisipasi angkatan kerja								60,84	63,64	57,47	57,05		



No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
1.18	Tingkat Partisipasi angkatan kerja	%	86	86	87	88	89		60,84	63,64	96,47	95,58	>	Melampaui
1.19	Tingkat pengangguran terbuka	%	2,9	2,71	2,61	2,48	2,36	2,9	2,71	2,66	3,53	4,42	<	Belum Tercapai
1.20	Rasio penduduk yang bekerja	%							59,19	61,94	55,45			
1.25	Indeks Kepuasan Masyarakat										78,81Baik)	84,34Baik)		
1.26	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	7%	10%	11%	12%	13%	7,43	10,89	11,38	11,39	13,17	>	Melampaui
1.27	Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	=	Sesuai
1.28	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)							89,9	91,8	87,8	88,2%	93,3		
1.29	Penguatan cadangan pangan	ton	10	10	20	20	20	10	10	20	10	20	=	Sesuai
1.30	Penanganan daerah rawan pangan		0	0	0	0	0	n.a	n.a	n.a	n.a	9,97		
1.31	Kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB	%	27,53	27,74	28,85	29,74	30,62	27,53	27,74	27,58	25,49	25,75	<	Belum Tercapai
1.32	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	16,44	11,18	11,5	12	12,5	16,44	11,18	12,45	18,48	22,93	>	Melampaui
1.33	Produksi sektor pertanian (ton)		377,89	396,68	377,89	396,68	377,89	377.895,30	396.681,00	436.361,00	418.290,40	475.376	>	Melampaui
1.34	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	27,53	27,74	28,85	29,74	30,62	27,97	28,24	28,02	27,66	27,57	<	Belum Tercapai
1.35	Produksi sektor perkebunan (Ton)	ton	16.532	14.093	16.532	18.972	21.412	16.532,9	14.093,3	11.997,2	10.637,1	10.575,7	<	Belum Tercapai



No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
								4	0	4	0	3		
1.36	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
1.39	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1,01	1,90	2,79	3,68	4,57	1,56	1,59	1,65	1,72	1,64	<	Belum Tercapai
1.40	kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	%	2,61	3,80	4,99	6,18	7,37	2,6	2,8	2,9	3,1	3,5	<	Belum Tercapai
1.41	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	9,54	11,13	12,72	14,31	15,9	14,22	14,33	14,53	14,98	14,07	<	Belum Tercapai
1.42	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	8,06	9,19	10,32	11,45	12,58	10,18	10,35	10,12	10,17	9,98	<	Belum Tercapai
1.44	Pertumbuhan industri	%	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,40	0,53	>	Melampaui
2	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**													
2.1	Nilai tukar petani		100,97	101,81	102,65	103,49	104,33	100,97	101,81	103,93	103,93	104,4	>	Melampaui
2.2	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	6,12	6,13	6,14	6,15	6,16	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	<	Belum Tercapai
2.3	Rasio ketergatungan		0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	46,41	46,65	45,52	<	Belum Tercapai
3	**ASPEK PELAYANAN UMUM**													
3,1	**Layanan Urusan Wajib**													



No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
3.1.1	**Pendidikan**													
3.1.1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	50,28	51,99	70	100	100	50,28	48,67	51,08	47,62	64,07	<	Belum Tercapai
3.1.1.2	Angka Partisipasi kasar													
3.1.1.2.1	Angka Partisipasi kasar SD/ MI Paket A	%	86,28	85,07	98,85	100	100	96,18	97,05	99,17	96,86	96,99	<	Belum Tercapai
3.1.1.2.2	Angka Partisipasi kasar (APM) SMP/ MTs Paket B	%						86,66	85,81	86,50	93,15	93,59		
3.1.1.3	Angka Partisipasi Murni													
3.1.1.3.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI Paket A	%	84,86	86,97	100	100	100	84,49	86,97	89,42	86,40	88,8	<	Belum Tercapai
3.1.1.3.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs Paket B	%	69,01	74,18	100	100	100	70,31	74,18	74,99	68,44	69,86	<	Belum Tercapai
3.1.1.4	Angka Partisipasi Sekolah:													
3.1.1.4.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD / MI Paket A	%	84,50	86,97	100	100	100	84,49	86,97	99,17	86,40	96,63	<	Belum Tercapai
3.1.1.4.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP / MTs Paket B	%	70,30	74,18	100	100	100	70,31	74,18	86,50	68,44	79,02	<	Belum Tercapai
3.1.1.5	Angka Putus Sekolah:													
3.1.1.5.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD / MI	%	0,09	0,03	0	0	0	0,086	0,032	0,187	0,313	0,005	<	Belum Tercapai
3.1.1.5.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP / MTs	%	0,34	0,12	0	0	0	0,34	0,12	1,51	1,26	0,03	<	Belum Tercapai
3.1.1.6	Angka Kelulusan:													
3.1.1.6	Angka Kelulusan (AL)	%	99,34	99,95	100	100	100	99,36	99,95	99,78	98,68	99,97	<	Belum



No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
.1	SD/ MI													Tercapai
3.1.1.6.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/ MTs	%	100	99,98	100	100	100	100	99,98	98,70	97,77	99,91	<	Belum Tercapai
3.1.1.7	Angka Melanjutkan (AM):													
3.1.1.7.1	Angka Melanjutkan (AL) SD/ MI ke SMP/ MTs		73,67	87,6	100	100	100	73,67	87,60	100,14	103,86	103,58	>	Melampaui
3.1.1.7.2	Angka Melanjutkan (AL) SMP/ MTs ke SMA/ SMK / MA	%	81,83	n.a	100	100	100	81,83	n/a	n/a	106,60	95,63	<	Belum Tercapai
3.1.1.8	Fasilitas Pendidikan:													
3.1.1.8.1	Sekolah Pendidikan SD / MI kondisi bangunan baik	%	na	89,54	90	90,46	90,92	93,41	89,54	86,11	85,73	85,73	<	Belum Tercapai
3.1.1.8.2	Sekolah Pendidikan SMP/ MTs DAN SMA/ SMK/ MA kondisi bangunan baik							96,15	88,89	80,83	81,86	81,86		
3.1.1.9	Rasio ketersedian sekolah/ penduduk usia sekolah pendidikan dasar		na	52,38	52,38	52,38	52,38	93,88	95,52	100,31	100,45	103,38	>	Melampaui
3.1.1.10	Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar		na	12	20	20	20	11,15	8,53	7,36	7,22	8,49	<	Belum Tercapai
3.1.1.11	Penduduk yang berusia . 15 Tahun melek huruf (tidak buta Aksara)	%	99,70	99,64	100	100	100	11,15	8,53	7,36	7,22	87,51	<	Belum Tercapai
3.1.1.12	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	88,31	91,31	94,31	97,31	100	88,79	99,06	90,99	88,25	93,53	<	Belum Tercapai



No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
3.2.2	**Kesehatan**													
3.1.2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup		3,51	3,5	0	0	0	13,69	13,29	11,60	11,74	10,6	<	Belum Tercapai
3.1.2.2	Angka kelangsungan hidup bayi		99,65	99,65	100	100	100	98,63	98,67	98,66	98,83	98,94	<	Belum Tercapai
3.1.2.3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup		3,16	1,40	0	0	0	3,2	1,4	0,7	1,0	1,2	<	Belum Tercapai
3.1.2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup		10,18	9,79	0	0	0	10,18	9,79	11,24	8,72	7,64	<	Belum Tercapai
3.1.2.5	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup		1,05	1,65	0	0	0	1,05	1,05	0,72	1,34	1,21	<	Belum Tercapai
3.1.2.6	Rasio posyandu per satuan balita		24,29	24,9	24,9	24,9	24,9	24,29	24,89	25,12	25,11	25,29	>	Melampaui
3.1.2.7	Rasio puskesmas. poliklinik. pustu per satuan penduduk		0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,24	0,25	0,27	0,27	0,27	<	Belum Tercapai
3.1.2.8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk		0,004	0,004	0,004	0,004	0,008	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	<	Belum Tercapai
3.1.2.9	Rasio dokter per satuan penduduk		0,218	0,298	0,298	0,414	0,414	0,16	0,21	0,25	0,34	0,41	=	Sesuai
3.1.2.10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk		0,898	0,990	1	1	1	0,90	0,99	2,40	2,81	3,49	>	Melampaui
3.1.2.11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani		64,55	71,93	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.1.2.12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan		88,48	95,82	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai



No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
	yang memiliki kompetensi kebidanan													
3.1.2.13	Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)		91,43	92,86	100	100	100	91,43	92,86	97,14	100,00	71,43	<	Belum Tercapai
3.1.2.14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.1.2.15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)		2,43	2,49	100	100	100	2,43	2,49	n.a	n.a	n,a		
3.1.2.16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak		96,16	90,77	100	100	100	96,16	90,77	100	93,81	62,6	<	Belum Tercapai
3.1.2.17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk		na	na	100	100	100	0	0	10,14	4,08	0	<	Belum Tercapai
3.1.2.18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani		36,84	22,67	100	100	100	13,82	8,48	43,59	37,72	9,9	<	Belum Tercapai
3.1.2.19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA		39,95	62,55	100	100	100	39,95	62,55	56,84	59,97	36,25	<	Belum Tercapai
3.1.2.20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		87	126	0	0	0	87,07	125,92	156,68	159,84	98,76	<	Belum Tercapai
3.1.2.2	Tingkat kematian		2,37	3,31	0	0	0	2,37	3,31	3,39	2,95	0	=	Sesuai



No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
1	karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)													
3.1.2.22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS		39,95	62,55	100	100	100	39,95	62,55	56,84	59,97	36,25	<	Belum Tercapai
3.1.2.23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS		18,56	43,3	100	100	100	18,56	27,63	92,70	88,13	0	<	Belum Tercapai
3.1.2.24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.1.2.25	Penderita diare yang ditangani		100	100	100	100	100	81,90	57,70	136,96	124,96	60,07	<	Belum Tercapai
3.1.2.26	Angka kejadian Malaria		5,3	4,42	0	0	0	4,75	4,14	0,00	0,00	0	=	Sesuai
3.1.2.27	Tingkat kematian akibat malaria		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=	Sesuai
3.1.2.28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=	Sesuai
3.1.2.29	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat		100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	<	Belum Tercapai
3.1.2.30	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi		0,0032	0,0033	0	0	0	0,0032	0,0033	0,0047	0,0004	0,00003	<	Belum Tercapai



No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
3.1.2.33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin		18,38	26,27	100	100	100	18,38	26,27	100,00	100,00	80,11	<	Belum Tercapai
3.1.2.34	Cakupan kunjungan bayi		100	93,5	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100	=	Sesuai
3.1.2.35	Cakupan puskesmas		212,5	212,5	212,5	212,5	212,5	212,50	212,50	212,50	212,50	212,5	=	Sesuai
3.1.2.36	Cakupan pembantu puskesmas		62,86	62,86	62,86	62,86	62,86	62,86	62,86	62,86	62,86	62,86	=	Sesuai
3.1.2.37	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4		82,62	87,97	100	100	100	92,05	87,97	89,88	89,51	77,03	<	Belum Tercapai
3.1.2.38	Cakupan pelayanan nifas		89,1	90,9	100	100	100	100,70	94,91	101,34	98,09	85,1	<	Belum Tercapai
3.1.2.39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani		43,17	45,34	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.1.2.40	Cakupan pelayanan anak balita		52,85	62,27	100	100	100	52,86	62,27	67,62	65,89	70,13	<	Belum Tercapai
3.1.2.41	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.1.2.42	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.1.2.43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin		89,58	113,61	100	100	100	89,58	113,61	100,00	100,00	80,11	<	Belum Tercapai
3.1.2.44	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai



No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
	sarana kesehatan (RS)													
3.1.2.45	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.1.3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**													
3.1.3.1	Pekerjaan Umum:													
3.1.3.1.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik		0,37	0,33	0,35	0,37	0,39	0,37	0,33	0,32	0,40	0,58	>	Melampaui
3.1.3.1.2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk							0,0036	0,0037	0,0038	0,0038	0,0038		
3.1.3.1.3	Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	%						*)	*)	*)	10,28	10,28		
3.1.3.1.4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	37,29	32,61	35	37	39	37,29	32,61	31,84	39,65	58,4	>	Melampaui
3.1.3.1.5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1.5 m)	%						48,42	48,12	47,46	47,12	47,12		



No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
3.1.3.1.6	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	83,29	90,84	100	100	100	46,18	48,49	53,1	66,84	67,83	<	Belum Tercapai
3.1.3.1.7	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%						55,73	55,42	54,66	54,27	54,27		
3.1.3.1.8	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun							*)	*)	*)	14,38	1,79		
3.1.3.1.9	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	%												
3.1.3.1.10	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%						72,57	74,53	77,51	79,37	62,06		
3.1.3.1.11	Rasio Jaringan Irigasi							-	-	-	-	0,022		
3.1.3.1.12	Persentase penduduk berakses air minum		85,84	90,46	100	100	100	85,84	90,46	94,21	93,84	94,55	<	Belum Tercapai
3.1.3.1.13	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak. perkotaan dan perdesaan		89,92	90,03	100	100	100	85,84	90,46	94,20	27,38	28,08	<	Belum Tercapai
3.1.3.1.14	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan							*)	*)	*)	68,89	68,89		
3.1.3.1.15	Rasio tempat pemakaman umum per satuan		-	15,58	15,58	15,58	15,58	0,015	0,017	0,017	0,017	0,017	<	Belum Tercapai



No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
	penduduk													
3.1.3.1.16	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk							1,82	1,94	2,02	2,02	2		
3.1.3.1.17	Penataan Ruang:													
3.1.3.1.18	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan		1651,05	1651,05	1651,05	1651,05	1651,05	-	-	63,94%	63,94%	63,94%		
3.1.3.1.19	Ketaatan terhadap RTRW							na	100	100	100	100		
3.1.4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**													
3.1.4.1	Rasio rumah layak huni		82,98	79,46	82,98	86,5	90,02	0,19	0,2	0,2	0,21	0,21		
3.1.4.2	Rasio permukiman layak huni							na	na	0,99	0,98	0,98		
3.1.4.3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni							84,34	81,55	84,54	85,73	88,06		
3.1.4.4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau							na	63,58	63,34	63,84	65,19		
3.1.4.5	Persentase pemukiman yang tertata	%						na	na	0,68	0,7	0,74		
3.1.4.6	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	0,0006	0,0007	0,0007	0,0005	0,0006	na	na	0,04	0,07	0,06	<	
3.1.4.7	Proporsi rumah tangga kumuh							na	na	1,85	3,41	3,41		



No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
	perkotaan													
3.1.4.8	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU							na	63,58	63,34	63,84	63,84		
3.1.5	**Ketentraman. Ketertiban Umum. dan Perlindungan Masyarakat**													
3.1.5.1	Cakupan petugas :													
3.1.5.1.1	Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	68,49	68,49	68,49	68,49	68,49	38,30	38,30	147,74	147,74	147,74	>	Melampaui
3.1.5.1.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban. ketentraman. keindahan)	%	na	71,23	72	73	74	87,85	71,23	74,22	77,97	100	>	Melampaui
3.1.5.2	Cakupan pelayanan :													
3.1.5.2.1	bencana kebakaran kabupaten/kota		35,33	58,88	100	100	100	35,33	58,88	82,43	94,20	94,2	<	Belum Tercapai
3.1.5.2.2	Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		59,09	71,43	80	100	100	59,09	71,43	56,86	65,73	90,7	<	Belum Tercapai
3.1.5.2.3	Persentase Penegakan PERDA		na	100	100	100	100	NA	100	100	100	100	=	Sesuai
3.1.6	**Sosial**													
3.1.6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	97,82	99,20	100	100	100	100	100	100	7	19	<	Belum Tercapai



No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
3.1.6.2	Persentase PMKS yang tertangani	%	97,82	99,20	100	100	100	100	100	100	7	19	<	Belum Tercapai
3.1.6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	97,82	99,20	100	100	100	100	100	100	7,4	19,18	<	Belum Tercapai
3.1.6.4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	100	0	100	100	100	100	0	0	0	40	<	Belum Tercapai
3.1.6.5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.1.6.6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	0	100	100	100	100	0	0	100	100	100	=	Sesuai
3.1.6.7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	67	155	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai



No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
3.1.6.8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	0	67	100	100	100	0	0	0	0	0	<	Belum Tercapai
3.2.6.9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental. serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	0	54	100	100	100	4,4	4,4	3	19,8	0,4	<	Belum Tercapai
3,2	**Layanan Urusan Wajib Non Dasar**													
3.2.1	**Tenaga Kerja**													
3.2.1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=	Sesuai
3.2.1.2	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	14,46	30,61	38,18	47,89	57,60	14,46	30,61	28,71	2,74	0	<	Belum Tercapai
3.2.1.3	Keselamatan dan perlindungan		1,8	4,06	3,90	4,35	4,80	3,36	7,43	8,84	8,16	0	<	Belum Tercapai
3.2.1.4	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	0,28	1,3	1,66	2,19	2,72	17,07	61,05	92,74	58,27	94,5	>	Melampaui
3.2.1.5	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	<	Belum Tercapai
3.2.2	**Pemberdayaan**													



No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
	Perempuan dan Perlindungan Anak													
3.2.2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	10,94	11,61	11,75	12	12,25	10,94	11,54	11,58	12,97	12,1	<	Belum Tercapai
3.2.2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	20	20	20	20	20	16,67	20,00	26,67	23,33	23,33	>	Melampaui
3.2.2.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	89,06	88,39	90	91	92	89,06	75,96	76,11	87,65	90,27	<	Belum Tercapai
3.2.2.4	Rasio KDRT		0,0064	0,0035	0	0	0	0,0069	0,0034	0,0053	0,0053	0,0035	<	Belum Tercapai
3.2.2.5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%										-		
3.2.2.6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	na	na	0	0	0	96,97	98,11	89,66	88,60	89,1	>	Melampaui
3.2.2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100	100	90	100	100	=	Sesuai
3.2.2.8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di	%	na	na	100	100	100	NA	NA	100	100	100	=	Sesuai



No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
	Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit													
3.2.2.9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	na	40	100	100	100	NA	NA	3	100	100	=	Sesuai
3.2.2.10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	11,11	45,45	50	55	60	11	45	17	40	100	>	Melampaui
3.2.2.11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.2.2.12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	na	100	100	100	100	0	0	0	0	16,67	<	Belum Tercapai
3.2.2.13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban	%	na	100	100	100	100	0	0	0	0	100	=	Sesuai



No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
	kekerasan													
3.2.2.14	Rasio APM perempuan/laki- laki di SD		91,57	92,5	93,43	94,36	95,29	1,07	1,16	1,08	0,93	0,92		
3.2.2.15	Rasio APM perempuan/laki- laki di SMP		1,01	1,31	1,31	1,31	1,31	1,18	1,46	1,22	0,96	1,07	<	Belum Tercapai
3.2.2.16	Rasio APM perempuan/laki- laki di SMA		1,15	1,1	1,1	1,1	1,1	138,28	147,73	152,89	149,84	1,1	=	Sesuai
3.2.2.17	Rasio APM perempuan/laki- laki di Perguruan Tinggi		na	na				1,38	1,48	1,53	3	1,1		
3.2.2.18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun		4,77	2,57	2,57	2,57	2,57	142,12	149,84	145,31	1,51	0,97	<	Belum Tercapai
3.2.2.19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	%	48,71	52,89	57,07	61,25	65,43	29,51	33,24	34,59	36,36	36,36	<	Belum Tercapai
3.2.3	**Pangan**													
3.2.3.1	Ketersediaan pangan utama	%	52,88	70,02	87,16	100	100	255	253	284	268	257	>	Melampaui
3.2.3.2	Ketersediaan energi perkapita	kkal	8539	54291	100043	145795	19154	8.539,00	9.438,00	11.179,00	11.401,00	10.775	<	Belum Tercapai
3.2.3.3	Ketersediaan protein perkapita	gram	201,25	476,70	752,15	1027,60	1303,05	201,25	241,26	286,28	286,96	271,01	<	Belum Tercapai
3.3.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	42,86	45,45	50	55	60	42,86	45,45	40	100	100	>	Melampaui



No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
3.2.4	**Pertanahan**													
3.2.4.1	Persentase luas lahan bersertifikat	%	66,9	67,12	67,34	67,56	67,78	66,9	67,12	na	na	na		
3.2.4.2	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	100	100	100	100	100	100	100	100	50	0	<	Belum Tercapai
3.2.4.3	Penyelesaian izin lokasi	%	86,6	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.2.5	**Lingkungan Hidup**													
3.2.5.1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada / Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	<	Belum Tercapai
3.2.5.2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada / Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	ada	Ada	Ada					Tidak ada	<	Belum Tercapai
3.2.5.3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada / Tidak ada	Ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	Sesuai
3.2.5.4	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air		3,32	1,63	1	1	1	3,32	1,63	1,51	0,86	70		
3.2.5.5	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara		89,86	91,71	91,71	91,71	91,71	89,86	91,71	90,46	93,67	91,42	<	Belum Tercapai
3.2.5.6	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan		0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	78,9		
3.2.5.7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang	%	-	46,67	50	55	60	N/a	100	100	100	61	>	Melampaui



No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
	diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan. izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota													
3.2.5.8	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat							2	3	3	3	3 / 50 ?		
3.2.5.9	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada / Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	=	Sesuai
3.2.5.10	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan. izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota. lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	%	-	100	100	100	100	(tidak ada pengaduan)	100	(tidak ada pengaduan)	100	100	=	Sesuai
3.2.5.11	Timbulan sampah yang ditangani	%	24	53	60	65	70	24	53,45	91,07	73,93	65,85	<	Belum Tercapai
3.2.5.12	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	%	39,54	94,53	95	96	97	-	12,69	30	32,3	22	<	Belum Tercapai
3.2.5.13	Persentase cakupan area pelayanan	%	18,53	18,53	18,53	33,33	33,33	26%	26%	26%	26%	27,2	<	Belum Tercapai



No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
3.2.5.14	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	24	53,45	60	65	70	24	53,45	73,25	73,93	63,85	<	Belum Tercapai
3.2.5.15	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota		73,05	75,95	78,85	81,75	84,65	73,05	75,95	73,55	75	75	<	Belum Tercapai
3.2.5.16	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	%	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	=	Sesuai
3.2.5.17	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	%	0	0	100	100	100	0	62,5	9,09	4,55	0	<	Belum Tercapai
3.2.6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**													
3.2.6.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk		0,9	0,97	1	1	1	0,90	0,97	0,99	0,99	0,99	<	Belum Tercapai
3.2.6.2	Rasio bayi berakte kelahiran		1	0,96	1	1	1	1,00	0,96	0,98	0,99	0,98	<	Belum Tercapai
3.2.6.3	Rasio pasangan berakte nikah		0,33	0,37	0,41	0,45	0,49	0,33	0,37	0,46	0,51	0,61	>	Melampaui
3.2.6.4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	Sesuai
3.2.6.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah / Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	=	Sesuai
3.2.6.6	Cakupan penerbitan	%	90,06	96,93	100	100	100	90,06	96,93	99,72	99,84	99,33	<	Belum



No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
	Kartu Tanda Penduduk (KTP)													Tercapai
3.2.6.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	93,1	94,35	95,6	96,85	98,1	93,10	94,35	99,02	97,67	97,16	<	Belum Tercapai
3.2.7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**													
3.2.7.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.2.7.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	1	3	5	7	9	1	1	1	1	3	<	Belum Tercapai
3.2.7.3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1	1	1	1	4	>	Melampaui
3.2.7.4	Persentase LSM aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.2.7.5	Persentase LPM Berprestasi	%	4	1	4	4	4	4,29	4,29	4,29	4,29	0%	<	Belum Tercapai
3.2.7.6	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.2.7.7	Persentase Posyandu aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.2.7.8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	26,6	27,48	28,36	29,24	30,12	27,12	27,12	33,55	33,55	34,34	>	Melampaui
3.2.7.9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%						-	-	-	-	80		



No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
3.2.8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**													
3.2.8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)		0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,07	0,13	0,10	0,07	=	Sesuai
3.2.8.2	Total Fertility Rate (TFR)		2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,19	2,19	2,16	>	Melampaui
3.2.8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	20,59	41,18	61,77	82,36	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.2.8.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	na	41,18	100	100	100	55,26	55,26	57,89	70,59	70,59	<	Belum Tercapai
3.2.8.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Perda/Perkada	na	na	0	1	1	0	0	0	0	0	<	Belum Tercapai
3.2.8.6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan	Sektor						6	6	6	6	7		



No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
	proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan													
3.2.8.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal. non formal. dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan							0	0	0	0	1		
3.2.8.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	jiwa	na	1,21	1,21	1,21	1,21	1,85	1,36	1,60	1,31	1,36	<	Belum Tercapai
3.2.8.9	Ratio Akseptor KB	%	na	0,75	0,75	0,75	0,75	77,94	75,01	75,42	77,08	78,22		
3.2.8.10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%	0,78	0,75	0,75	0,75	0,75	77,94	75,01	75,42	77,08	77,38		
3.2.8.11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)							32,99	27,69	7,99	25,99	16,65		
3.2.8.12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%						3,03	7,99	2,50	2,50	2,5		
3.2.8.13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	13,74	15,67	13,74	13,74	13,74	13,74	15,67	15,30	13,93	12,78	>	Melampaui
3.2.8.1	Persentase	%	18	14	18	22	26	11,09	14,17	16,26	18,53	19,19	<	Belum



No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
4	Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)													Tercapai
3.2.8.15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	28	33	38	43	48	28,30	33,32	32,58	29,73	27,83	<	Belum Tercapai
3.2.8.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	54	53	54	55	56	54,04	53,43	65,06	65,72	60,67	>	Melampaui
3.2.8.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	56	56	56	56	56	56,43	56,08	64,66	63,07	56,73	>	Melampaui
3.2.8.18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	54	53	53	53	53	33,33	34,28	34,75	45,72	51,11	<	Belum Tercapai
3.2.8.19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	12	25	25	25	25	12,50	25,00	25,00	25,00	25	=	Sesuai
3.2.8.20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	jiwa	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,8	7,8	7,8	775%	7	<	Belum Tercapai
3.2.8.21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai



No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
3.2.8.22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	83	83	83	83	83	62,61	63,85	58,25	56,00	78,6	<	Belum Tercapai
3.2.8.23	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.2.8.24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	19,32	20,65	21,98	23,31	24,64	19,32	20,65	20,73	18,61	24,36	<	Belum Tercapai
3.2.8.25	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.2.8.26	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.2.8.27	Persentase remaja yang terkena Infeksi	jiwa	0	0	0	0	0	n.a	n.a	n.a	n.a	n,a		



No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
	Menular Seksual (IMS)													
3.2.8.28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	67	71	75	79	83	100	100	100	100	100	>	Melampaui
3.2.8.29	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	10,11	9,81	10,11	10,41	10,71	81,96	82,08	84,46	86,95	85,85	>	Melampaui
3.2.8.30	Rata-rata usia kawin pertama wanita	tahun	na	na	17	17	17	n.a	n.a	0,65	2,60	19	>	Melampaui
3.2.8.31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan. Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%						23,6	21,6	7,5	5,2	0,3		
3.2.9	**Perhubungan**													
3.2.9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	1920	1344	1344	1344	1344	1920	1344	1340	1340	1005	<	Belum Tercapai
3.2.9.2	Rasio ijin trayek		0,02	0,08	0,14	0,2	0,26	0,003	0,001	0,001	0,001	0,0001	<	Belum Tercapai
3.2.9.3	Jumlah uji kir angkutan umum		92	89	92	95	98	85	89	135	120	85	<	Belum Tercapai
3.2.9.4	Jumlah Pelabuhan		-	-	-	-	-	3	3	3	2	2		



No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
	Laut/Udara/Termina l Bis													
3.2.9.5	Persentase layanan angkutan darat	%	40	30	40	50	60	3,97%	3,97%	4,14%	0,04%	0,09%	<	Belum Tercapai
3.2.9.6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	0,07	0,2	0,33	0,46	0,59	83,87%	55,5%	34,78%	42,03%	65,72%	>	Melampaui
3.2.9.7	Pemasangan Rambu-rambu							84%	40%	58%	82%	34,72%		
3.2.10	**Komunikasi dan Informatika**													
3.2.10.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan		na	575	575	575	575		0	600	675	675	>	Melampaui
3.2.10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi		na	66	66	66	66	N/a	N/a	65,88	65,88	65,88	<	Belum Tercapai
3.2.10.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	na	80	80	80	80	0	0	77	76	76	<	Belum Tercapai
3.2.10.4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet		na	80	80	80	80	0	0	81,48	81	81,49	>	Melampaui
3.2.10.5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi		na	60	60	60	60	0	0	61	61	61	>	Melampaui
3.2.11	**Koperasi. Usaha kecil. dan Menengah**													
3.2.11.	Persentase koperasi	%	89,16	89,71	90,26	90,81	91,36	88,94	89,71	90,15	79,9	80,58	<	Belum



No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
1	aktif													Tercapai
3.2.11.2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	%						98,9	98,91	98,92	98,92	99,06		
3.2.11.3	Persentase BPR/LKM aktif	%						100	100	100	100	100		
3.2.11.4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	98,9	98,91	98,92	98,93	98,94	98,9	98,91	98,92	98,92	99,06	>	Melampaui
3.2.12	**Penanaman Modal**													
3.2.12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)		3	11	15	20	25	3	11	17	22	40	>	Melampaui
3.2.12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	RP	Rp 2.108.038.000	Rp 22.086.500.000	Rp 22.100.500.000	Rp 22.200.500.000	Rp 22.300.500.000	Rp 2.108.038.000	Rp 22.086.500.000	Rp 90.347.238.849	Rp 239.145.555.197	Rp 1.700.091.116.933	>	Melampaui
3.2.12.3	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	%	-33,7%	947,7%	947,7%	947,7%	947,7%	-33,7%	947,7%	3,09%	16,46%	57,65%	<	Belum Tercapai
3.2.13	**Kepemudaan dan Olah Raga**													
3.2.13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	50	50	100	100	100	52	52	26	100	100	=	Sesuai
3.2.13.2	Cakupan pembinaan olahraga	%	100	100	100	100	100	100	100	79	46	25	<	Belum Tercapai
3.2.13.	Cakupan Pelatih	%	66,67	66,67	70	80	90	66,66	66,67	70	80	90	=	Sesuai



No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
3	yang bersertifikasi													
3.2.13.4	Cakupan pembinaan atlet muda	%	42,05	44,72	47,39	50,06	52,73	42,5	44,69	28,42	15,79	0	<	Belum Tercapai
3.2.13.5	Jumlah atlet berprestasi	Atlet	2	3	5	6	7	2	3	5	10	0	<	Belum Tercapai
3.2.13.6	Jumlah prestasi olahraga	Atlet	7	14	14	14	14	7	14	14	8	4	<	Belum Tercapai
3.2.14	**Statistik**													
3.2.14.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/ Tidak ada	Tidak ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	=	Sesuai
3.2.14.2	Buku ”kabupaten dalam angka”	Ada/ Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	Sesuai
3.2.14.3	Buku ”PDRB”	Ada/ Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	Sesuai
3.2.15	**Persandian**													
3.2.15.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	%	na	13	13	13	13	0%	0%	0%	0%	0%	<	Belum Tercapai
3.2.16	**Kebudayaan**													
3.2.16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya		11	9	11	11	11	10	10	8	10	7	<	Belum Tercapai
3.2.16.2	Benda. Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan		100	97	100	100	100	100	100	100	24,13	24,13	<	Belum Tercapai
3.2.16.	Jumlah karya		na	na				n.a	n.a	n.a	n.a	n,a		



No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
3	budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi													
3.2.16.4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu		2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	>	Melampaui
3.2.17	**Perpustakaan**													
3.2.17.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	%	3,3	3,37	3,44	3,51	3,58	4,59	5,14	4,37	5,06	0,013	<	Belum Tercapai
3.2.17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	%	28,16	28,89	29,59	30,29	30,99	25,92	27,17	28,04	27,76	27,76	<	Belum Tercapai
3.2.17.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk		0,14	0,15	0,16	0,17	0,18	1,44	1,51	1,59	1,58	1,56	>	Melampaui
3.2.17.4	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	pengunjung	8342	8148	8342	8536	8730	8,342	8,148	9,155	10,856	2,73	<	Belum Tercapai
3.2.17.5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	judul buku	11967	12711	13455	14199	14943	10,441	11,585	12,425	13,284	13.284	<	Belum Tercapai
3.2.17.6	Jumlah pustakawan. tenaga teknis. dan penilai yang memiliki sertifikat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.2.18	**Kearsipan**													
3.2.18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	10,81	24,32	37,83	51,43	64,58	10,81	24,32	37,84	52,94	61,76	<	Belum Tercapai
3.2.18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan		0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	<	Belum Tercapai
3,3	**Layanan Urusan**													



No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
	Pilihan													
3.3.1	**Pariwisata**													
3.3.1.1	Kunjungan wisata	%	1,13	1,11	1,13	1,15	1,17	113,27	111,29	80,03	58,19	20,75	>	Melampaui
3.3.1.2	Lama kunjungan Wisata (hari)	Hari	2	2	3	3	3	2	2	2	2	1	<	Belum Tercapai
3.3.1.3	PAD sektor pariwisata	%	16,4	0,012	0,02	0,025	0,03	2,11	1,85	1,82	1,98	1,19	<	Belum Tercapai
3.3.2	**Pertanian**													
3.3.2.1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	32	31,27	32	32,3	32,6	27,53	27,74	27,58	25,49	25,75	<	Belum Tercapai
3.3.2.2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	16,44	11,18	11,5	11,82	12,14	16,44	11,18	12,45	18,48	22,93	>	Melampaui
3.3.2.3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	27,97	28,24	28,51	28,78	29,05	27,97	28,24	28,02	27,66	27,57	<	Belum Tercapai
3.3.2.4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.3.2.5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar		5,53	5,82	5,85	5,87	5,89	na	na	na	na	5,67	<	Belum Tercapai
3.3.2.6	Cakupan bina kelompok petani	%	98,42	96,54	98,42	98,5	98,6	98,42	96,54	100	89,6	100	>	Melampaui
3.3.3	**Perdagangan**													
5.1.	Ekspor Bersih Perdagangan (US$)		-	-	-	-	-	-622.209,47	-542.197,15	-378.912,76	-572.571,90	na		



No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
5.2.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%		
3.3.4	**Perindustrian**													
3.3.4.1	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	na	na	98,92	50	98,93	50	50	50	50	50	<	Belum Tercapai
3.3.5	**Kelautan dan Perikanan**													
3.3.5.1	Produksi perikanan	%	173,66	179,37	185,08	190,79	196,5	173,66	179,37	78,81	85,98	84,74	<	Belum Tercapai
3.3.5.2	Konsumsi ikan	%	106	106	100	100	100	105,99	105,63	100,05	108	117,34	>	Melampaui
3.3.5.3	Cakupan bina kelompok nelayan	%	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	12,82	0,00	=	Sesuai
3.3.5.4	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	93,6	94,1	94,6	95,1	95,6	93,64	94,09	85,97	86,61	87,42	<	Belum Tercapai
3.3.5.5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	na	na				125	125	125	125	125		
3.3.5.6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	%	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	=	Sesuai
3,4	**Penunjang Urusan**													
3.4.1	**Perencanaan Pembangunan**													
3.4.1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	Sesuai



No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
	yang telah ditetapkan dengan PERDA													
3.4.1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	Sesuai
3.4.1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	Sesuai
3.4.1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	Sesuai
3.4.1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	53,96	100	100	100	100	53,69%	100%	100%	100%	100%	=	Sesuai
3.4.1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	=	Sesuai
3.4.1.7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%						100%	100%	100%	100%	100%		
3.4.2	**Keuangan**													
2.1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	=	Sesuai
2.2.	Persentase SILPA	%	8,91	9,87	8,91	7,95	6,99	8,34	9,05	8,86	9,35	5,07	<	Belum Tercapai



No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
2.3.	Persentase SILPA terhadap APBD	%	9,03	10,09	9,03	7,97	6,91	8,34	9,05	8,86	9,35	5,28	<	Belum Tercapai
2.4.	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	%	0	0	0	0	0	2,42	5,33	1,88	2,72	17,07	<	Belum Tercapai
2.5.	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	32,70	30,32	32,7	32,7	32,7	32,7	30,32	28,72	30	28,56	<	Belum Tercapai
2.6.	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	14,2	17,18	20,16	23,14	26,12	14,2	17,18	18,6	18,53	19,88	<	Belum Tercapai
2.7.	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung		50,07	50,04	50,01	49,98	49,95	49,93	49,96	51,79	49,41	56,55	>	Melampaui
2.8.	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa		0,12	0,16	0,2	0,24	0,28	0,12	0,16	0,2	0,2	0,21	<	Belum Tercapai
2.9.	Penetapan APBD		Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	=	Sesuai
3.4.3	**Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan**													
3.4.3.1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	5,14	7,54	9,94	12,34	14,74	10	11	15	15	17	>	Melampaui
3.4.3.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	7,21	4,92	7,21	9,5	11,79	6,49	7,55	6,64	6,59	8,5	<	Belum Tercapai
3.4.3.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti	%	61,97	61,73	61,97	62,21	62,45	61,97	61,73	79,78	87,99	88,54	>	Melampaui



No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
	pendidikan dan pelatihan struktural													
3.4.3.4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah		30	35	35	37	37	30	27	30	26	31	<	Belum Tercapai
3.4.3.5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah		142	146	146	146	146	2183	1950	1887	1999	1994	>	Melampaui
3.4.3.6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah		3334	3277	3277	3277	3277	3.335	3.277	3.205	3.139	2.950	<	Belum Tercapai
3.4.4	**Penelitian dan pengembangan**													
3.4.4.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=	Sesuai
3.4.4.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	<	Belum Tercapai
3.4.4.3	Penerapan SIDa:													
3.4.4.4	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=	Sesuai
3.4.4.5	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=	Sesuai
3.4.5	**Pengawasan**													
3.4.5.1	Persentase tindak lanjut temuan	%	87,68	27,49	100	100	100	85,53	61,97	71,88	67,12	57,02	<	Belum Tercapai
3.4.5.2	Persentase	%	0,63	0,19	0,19	0	0	0,63	0,19	0,18	0,33	0,17	<	Belum



No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
	pelanggaran pegawai													Tercapai
3.4.5.3	Jumlah temuan BPK	Temuan	18	8	8	8	8	361	413	215	77,78%	77,6%		
3.4.6	**Sekretariat Dewan**													
3.4.6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	Sesuai
3.4.6.2	Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan. Fungsi Pembentukan Perda. dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	Sesuai
3.4.6.3	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan. pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	Sesuai



2.1.6. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan SPM. Adapun capain SPM di Kabupaten Soppeng yaitu:

2.1.6.1. Bidang Pendidikan

2.1.6.1.1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Berdasarkan indikator yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, SPM Pendidikan PAUD yang sesuai jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan.

Rendahnya capaian SPM PAUD dimana pada tahun 2016 sebesar 50,28%, tahun 2017 51,99% , pada tahun 2019 sebesar 51,26%. Sedangkan pada tahun 2020 capaian SPM sebesar 59,91%, hal ini menunjukkan bahwa masih banyak warga negara yang belum berpartisipasi dalam pendidikan PAUD, padahal jumlah lembaga PAUD yang ada di Kabupaten Soppeng sudah banyak. Berdasarkan data, jumlah TK di Kabupaten Soppeng sebanyak 79 unit, dan RA di Kabupaten Soppeng sebanyak 53 unit. Jika jumlah TK dan RA dibandingkan dengan Jumlah penduduk usia 5-6 tahun maka rasio ketersediaan sekolah TK dan RA sebesar 0,041 atau 1 : 24. Jika dilihat dari rasio ketersediaan sekolah TK dan RA, maka jumlah lembaga PAUD yang ada di Kabupaten Soppeng sudah sangat berlebih untuk menampung keseluruhan pendudukan usia 5-6 tahun. Namun kenyataannya belum semua penduduk usia 5-6 tahun sudah terlayani oleh lembaga PAUD.

Keberadaan sebahagian PAUD swasta dipelosok-pelosok kurang menarik minat masyarakat untuk memasukkan anaknya pada lembaga tersebut, hal ini antara lain disebabkan Lembaga PAUD swasta pada umumnya memiliki sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Tabel 2.298. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2016-2020

No	Indikator SPM Pendidikan	Satuan	Realisasi Kinerja (%)				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Warga Negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD;	%	50,28	51,99	51,08	51,26	59,91

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

2.1.6.1.2. Pendidikan Dasar

SPM Pendidikan dasar adalah Jumlah Warga Negara Usia 7 – 1 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar. SPM Pendidikan dasar di Kabupaten Soppeng selama tahun 2016 – 2019 mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2016 sebesar 76,94% dan meningkat pada tahun 2017 sebesar 80,58%. Sedangkan pada tahun 2018 SPM Pendidikan dasar meningkat sebesar 96,77%. Pada tahun 2019 mengalami penurunan dimana SPM Pendidikan dasar sebesar 88,23%. Dan pada tahun 2020 meningkat 2% sehingga capaian SPM Pendidikan Dasar menjadi 90,67%

Faktor penyebab sehingga SPM Pendidikan dasar belum maksimal antara lain karena masih adanya peserta didik yang bersekolah pada jenjang SD/MI sederajat yang belum cukup usia yang diwajibkan yaitu 7 tahun pada jenjang SD/MI sederajat dan 13 tahun pada jenjang SMP/MTs. Untuk memperbaiki kondisi ini, maka pada kegiatan penerimaan siswa baru pemerintah sebaiknya menerapkan kebijakan penerimaan siswa baru sesuai usia wajib.

Faktor selanjutnya yang menyebabkan APM masih rendah yakni adanya peserta didik yang mengulang termasuk yang tidak lulus pada ujian akhir. Untuk memperbaiki kondisi ini, maka pemerintah daerah dapat melakukan intervensi pendidikan dalam bentuk peningkatan mutu pendidik melalui pelatihan-pelatihan dan sejenisnya. Sedangkan untuk mendorong minat baca peserta didik dapat dilakukan bimbingan belajar bagi siswa. Selain dari itu, tentunya kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan harus menjadi prioritas.

Faktor lain yang menyebabkan SPM Pendidikan dasar masih rendah yakni Angka Putus Sekolah dan kondisi peserta didik yang bermukim di daerah perbatasan. Jika indikator Angka Melanjutkan rendah, hal ini juga membuat indikator angka putus sekolah ikut berpengaruh. Ini menggambarkan bahwa ada penduduk usia sekolah yang tidak lagi berpartisipasi dalam layanan pendidikan. Namun demikian tidak semua penduduk usia sekolah tersebut belum berpartisipasi dalam layanan pendidikan, hal ini bisa disebabkan karena peserta didik melanjutkan di luar wilayah Kabupaten Soppeng, sama halnya dengan peserta didik yang bermukim di daerah perbatasan yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Soppeng namun bersekolah di luar wilayah Kabupaten Soppeng, sehingga objek pembagi dalam formulasi indikator menjadi lebih kecil. Rata-rata peserta didik yang tidak melanjutkan dan putus sekolah disebabkan oleh faktor ekonomi, sehingga intervensi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah memberikan beasiswa khusus bagi peserta didik yang kurang mampu.

Tabel 2.299. Pendidikan Dasar Tahun 2016-2020

No	Indikator SPM Pendidikan	Satuan	Realisasi Kinerja (%)				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs).	%	76,94	80,58	96,77	88,23	90,67

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

2.1.6.1.3. Pendidikan Kesetaraan

SPM Pendidikan Kesetaraan adalah Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. Selama tahun 2016 – 2020 pencapaian SPM Pendidikan kesetaraan masih kurang maksimal dimana pada tahun 2016 sebesar 51,19% dan pada tahun 2017 sebesar 61,09%. Tetapi pada tahun 2018 menurun sebesar 31,87% ,pada tahun 2019 sebesar 37,25% dan pada tahun 2020 sebesar 66,66%. Realisasi SPM ini belum maksimal karena tidak mencapai target yang ditetapkan berdasarkan regulasi yang sebesar 100%. Hal ini diakibatkan karena masih rendahnya minat masyarakat yang belum tammat SD/SMP/SMA untuk mengikuti program pendidikan kesetaraan dan Adanya sebagian sasaran yang terdata sebagai penduduk Kabupaten Soppeng namun bertempal tinggal di luar Kabupaten Soppeng. Selain itu jumlah PKBM di Kabupaten Soppeng juga masih kurang.

Tabel 2.300. Pendidikan Kesetaraan Tahun 2016-2020

No	Indikator SPM Pendidikan	Satuan	Realisasi Kinerja (%)				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	%	51,19	61,09	31,87	37,25	66,66

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

2.1.6.2. Bidang Kesehatan

Jenis SPM Kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng terdiri dari: Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pelayanan Kesehatan Balita, Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut, Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, Pelayanan Kesehatan dengan Gangguan Jiwa Berat, Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis, Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinveksi HIV Pencapaian SPM Kesehatan untuk tahun 2020 adalah:

Tabel 2. 301. Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan Tahun 2016-2020

Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal Indikator	Angka Absolut			
		Target (%)	Pembilang	Penyebut	%
Pelayanan Kesehatan Dasar	1 Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	3,085	3,085	100
	2 Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	2,955	2,955	100
	3 Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	2,938	2,938	100
	4 Cakupan pelayanana kesehatan balita	100	8,540	8,540	100

Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal Indikator	Angka Absolut			
		Target (%)	Pembilang	Penyebut	%
	5 Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	7,279	7,279	100
	6 Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	14,902	74,082	20.11
	7 Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	10,433	10,433	100
	8 Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100	24,118	24,118	100
	9 Cakupan pelayamnan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100	2,310	2,310	100
	10 Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100	507	507	100
	11 Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TB	100	277	277	100
	12 Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100	14	14	100

Sumber : Dinas Kesehatan, 2020

2.1.6.2.1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil

Kunjungan ibu hamil adalah pelayanan antenatal sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga dengan memenuhi kriteria 10 T. Tahun 2019 jumlah sasaran 3.085 dengan capaian 3.085 (100%) dengan target (100%), jumlah sasaran bumil tahun 2019 adalah 3.280 dengan capaian 3.280 (100%). adapun kegiatan yang dilakukan adalah :

- Adanya pelaksanaan pelatihan bagi tenaga bidan baik di puskesmas maupun poskesdes untuk meningkatkan kompetensi mereka
- Sosialisasi tanda bahaya kehamilan
- Monev bidan desa di poskesdes
- Kelas ibu hamil dan balita
- Timbang berat badan dan ukur tinggi badan
- Adanya bimbingan teknis yang rutin dilaksanakan ke 17 puskesmas

Yang disebut dengan standar pelayanan antenatal adalah pelayanan yang dilakukan kepada ibu hamil dengan memenuhi kriteria 10 T yaitu:

- Timbang berat badan dan ukur tinggibadan;
- Ukur tekanan darah;
- Nilai status gizi (Ukur Lingkar Lengan Atas /LILA)
- Ukur tinggi puncak rahim (fundusuteri).
- Tentukan presentasi janin dan Denyut Jantung Janin

2.1.6.2.2. Cakupan Pertolongan Persalinan

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Pertolongan persalinan yang diberikan oleh tenaga terlatih akan membantu menurunkan kejadian kesakitan, kecacatan dan kematian pada bayi baru lahir. Tahun 2020 terdapat persalinan yang ditolong oleh nakes yang memilki kompetensi kebidanan dengan sasaran 2.955 dan capaian 2.955 bulin dengan target (100%) dan realisasi (100%), adapun capaian indikator (100%). Tahun 2019 terjadi 2.978 persalinan yang di tolong oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan dari target 2.978 ibu bersalin. dan capaian indikator ini adalah (100%), adapun kiat-kiat yang dilakukan dalam pertolongan persalinan oleh bidan atau nakes yang memiliki kompetensi kebidanan adalah:

- Pendataan ibu bersalin
- Peningkatan SDM melalui pertemuan dan pembelajaran Audit Maternal Neonatal (AMP)
- Skreening Hypotiroid kongenital
- Asuhan persalinan normal
- Penanganan Asfiksia dan BBLR
- Kemitraan bidan dan dukun
- Kelas Ibu Hamil
- Sosialisasi rumah tunggu kelahiran (RKT)
- Melaksanakan Monev bidan desa di poskesdes
- Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual. Adapun untuk persalinan dengan komplikasi mengikuti acuan dari Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Rujukan.

2.1.6.2.3. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Cakupan kunjungan bayi setiap tahun di atas target yang direncanakan, hal tersebut tidak lepas dari kesadaran masyarakat yang tinggi akan kesehatan bayi, dimana pengaruhnya sangat besar kepada masa depan bayi yang bersangkutan. Capaian tahun 2020 adalah (100%) dengan sasaran 2.938 dan capaian 2.938 dengan target (100%) dan realisasi (100%). Dan Capaian tahun 2019 adalah (100%) dengan sasaran 2.742 dan 2.742 capaian, dengan target (100%) dan realisasi (100%) dan tahun 2018 (100%) dengan 2.759 sasaran dan 2.759 realisasi, target (100%) dan realisasi (100%), indikator ini mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun persentase capaian indikator tahun 2018 dan 2019 adalah (100%). Adapun kiat-kiat yang dilakukan adalah :

- Pendataan bayi baru lahir
- Penimbangan balita dan pemberian imunisasi
- Pelayanan kesehatan pada bayi melalui perawatan tali pusat
- Melakukan pijatan bayi setelah dimandikan

- Pemberian ASI eksklusif
- Pemberian makanan pendamping ASI pada bayi umur 6 bulan ke atas
- Adanya kelas ibu dan bayi di puskesmas
- Pencatatan dan Pelaporan sudah baik

2.1.6.2.4. Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita

Cakupan pelayanan anak balita juga dimaksudkan untuk monitoring tumbuh kembang anak balita.Tahun 2020 cakupan pelayanan anak balita dengan sasaran 8.540 dan capaian 8.540 adapun targetnya (100%) dan realisasi (100%) Adapun capaian indicator ini (100%), tahun 2019 cakupan pelayanan anak balita dengan sasaran 7.824 dan capaian 7.824 adapun targenya (100%) dengan realisasi (100%) adapun capaian indikator ini (100%), tahun 2018 capaian pelayanan anak balita (100%) dengan sasaran 14.528 capaian 14.528 balita dengan target (100%) dan indikator ini mencapai target hal ini disebabkan karena setelah anak balita mendapatkan semua imunisasi yang diberikan ibu balita menimbang anaknya di posyandu. Adapun kiat-kiat yang dilakukan dengan :

- Pendataan balita 0 – 59 bulan
- Mengaktifkan kembali untuk datang keposyandu walaupun pemberian imunisasinya sudah lengkap
- Defenisi operasional cakupan pelayanan kesehatan anak balita sudah dipahami dengan baik
- Pencatatan dan pelaporan kohort balita sudah per-posyandu
- Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM

2.1.6.2.5. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah pemeriksaaan kesehatan terhadap murid baru kelas 1 SD dan madrazah ibtidaiyah dan SMP yang meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, pemeriksaan ketajaman mata, ketajaman pendengaran, kesehatan gigi, kelainan mental emosional dan kebugaran jasmani. Tahun 2020 target (100%) dan realisasi (100%) dengan persentase capaian indikator (100%), persentase capaian tahun 2018 dengan target (100%) dan realisasi (100%). Persentase pada indikator ini meningkat karena intensitas petugas ke sekolah yang sering, jumlah tenaga yang dalam pemeriksaan ataupun skreening pada anak sekolah sudah memadai dan aktifnya guru yang terlibat langsung untuk membantu kegiatan tersebut. adapun kegiatan yang dilakukan adalah :

- Perlunya tambahan tenaga kesehatan untuk mempercepat proses pemeriksaan pada siswa-siswi
- Pelatihan pada guru SD/Madrazah ibtidaiyah
- Pembinaan UKS
- Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor dalam penjaringan anak sekolah

2.1.6.2.6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar. Pelayanan skrining kesehatan usia 15-59

tahun dilakukan di Puskesmas dan jaringanya (Posbindu PTM) serta fasilitas pelayanan kesehatan lainya yang bekerja saama dengan pemerintah daerah . Tahun 2020 cakupan pelayanan anak pada usia produktif dengan sasaran 74.082 dan capaian 14.902 adapun targenya (100%) dengan realisasi (20.11%).

- Posbindu masyarakat belum semua berkunjung dan faktor ketenagan
- Solusinya lakukan Posbindu di kantor, sekolah, tempat kerja
- Perlunya tambahan tenaga kesehatan untuk mempercepat proses pemeriksaan untuk di Posbindu.

2.1.6.2.7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Jumlah sasaran Usila pada tahun 2020 di Kabupaten Soppeng sebanyak 10.433 dan yang mendapatkan pelayanan sebanyak 10,433 (100%). Jumlah sasaran usila pada tahun 2019 sebanyak 15,761. Setiap warga negara Indonesia usia (60) tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar.

1. Pelayanan skrining kesehatan warga negara usia 60 tahun ke atas sesuai standar adalah:
   a. Dilakukan sesuai kewenangan oleh:
      - Dokter;
      - Bidan;
      - Perawat;
      - Nutrisionis/TenagaGizi;
      - Kader Posyandulansia/Posbindu

   b. Pelayanan skrining kesehatan diberikan di Puskesmas dan jaringannya, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, maupun pada kelompok lansia,bekerja sama dengan pemerintahdaerah.
   c. Pelayanan skrining kesehatan minimal dilakukan sekali setahun.
   d. Lingkup skrining adalah sebagai berikut:
      - Deteksi hipertensi dengan mengukur tekanandarah.
      - Deteksi diabetes melitus dengan pemeriksaan kadar gula darah.
      - Deteksi kadar kolesterol dalamdarah
      - Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku, termasuk kepikunan menggunakan *Mini Cog* atau *Mini Mental Status Examination (MMSE)/Test Mental Mini* atau *Abreviated Mental Test (AMT)* dan *Geriatric Depression Scale(GDS).*
2. Pengunjung yang ditemukan memiliki faktor risiko wajib dilakukan intervensi secara dini
3. Pengunjung yang ditemukan menderita penyakit wajib ditangani atau dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menanganinya

2.1.6.2.8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Jumlah sasaran penderita hipertensi pada tahun 2020 di Kabupaten Soppeng sebanyak 24,118 dan yang mendapatkan pelayanan sebanyak 24,118 (100%).

1. Sasaran adalah penduduk usia 15 tahun keatas

2. Penderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar; dan upaya promosi kesehatan melalui modifikasi gaya hidup di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama(FKTP).
3. Penderita hipertensi dengan komplikasi (jantung, stroke dan penyakit ginjal kronis, diabetes melitus) perlu dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) yang mempunyai kompetensi untuk penanganankomplikasi.
4. Standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi adalah:
   a. Mengikuti Panduan Praktik Klinik Bagi Dokter diFKTP.
   b. Pelayanan kesehatan sesuai standar diberikan kepada penderita Hipertensi diFKTP.
   c. Pelayanan kesehatan hipertensi sesuai standar meliputi: pemeriksaan dan monitoring tekanan darah, edukasi, pengaturan diet seimbang, aktifitas fisik, dan pengelolaan farmakologis.
   d. Pelayanan kesehatan berstandar ini dilakukan untuk mempertahankan tekanan darah pada <140/90 mmHg untuk usia di bawah 60 th dan <150/90 mmHg untuk penderita 60 tahun ke atas dan untuk mencegah terjadinya komplikasi jantung, stroke, diabetes melitus dan penyakit ginjalkronis. Selama menjalani pelayanan kesehatan sesuai standar, jika tekanan darah penderita hipertensi tidak bisa dipertahankan sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya atau mengalami komplikasi, maka penderita perlu dirujuk ke FKTL yang berkompeten.

2.1.6.2.9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Jumlah sasaran penderita diabetes melitus pada tahun 2020 di Kabupaten Soppeng sebanyak 2.310 dan yang mendapatkan pelayanan sebanyak 2.310 (100%). Setiap penderita Diabetes Melitus mendapapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

1. Sasaran indikator ini adalah penyandang DM di wilayah kerja Puskesmas.
2. Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dan upaya promotif dan preventif di FKTP.
3. Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM dengan komplikasi perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan untuk penangananselanjutnya.
4. Pelayanan kesehatan penyandang DM diberikan sesuai kewenangannya oleh:
   a) Dokter/DLP
   b) Perawat
   c) Nutrisionis/TenagaGizi
5. Pelayanan kesehatan diberikan kepada penyandang DM di FKTP sesuai standar meliputi 4 (empat) pilar penatalaksanaan sebagai berikut:
   a) Edukasi
   b) Aktifitas fisik

c) Terapi nutrisi medis
d) Intervensi farmakologis

6. Setiap penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar termasuk pemeriksaan HbA1C.
7. Bagi penyandang DM yang belum menjadi peserta JKN diwajibkan menjadi peserta JKN.

2.1.6.2.10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Jumlah sasaran penderita gangguan jiwa berat pada tahun 2020 di Kabupaten Soppeng sebanyak 507 dan yang mendapatkan pelayanan sebanyak 507 (100%). Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat di berikan oleh perawat dan dokter Puskesmas di wilayah kerja.

Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat adalah:

- Pelayanan promotif preventif yang bertujuan meningkatkan kesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik) dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasungan.
- Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat diberikan oleh perawat dan dokter Puskesmas di wilayah kerjanya.

Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat meliputi:

- Edukasi dan evaluasi tentang: tanda dan gejalagangguan jiwa, kepatuhan minum obat dan informasi lain terkait obat, mencegahtindakan pemasungan, kebersihan diri, sosialisasi, kegiatan rumah tangga dan aktivitas bekerja sederhana, dan Tindakan kebersihan diri ODGJ berat.

2.1.6.2.11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan terduga TB BTA

Pelaksanaan program TB dengan DOTS di layanan selain puskesmas untuk meningkatkan cakupan penanganan pasien TB sesuai standar Penanggulangan penderita terduga TB BTA tahun 2020 277 orang , 100% dan target 100% bila dibandingkan dengan tahun 2019 381 orang terjadi penurunan hal ini disebabkan karena masih adanya masyarakat dengan TB yang berobat kelayanan swasta dengan layanan DOTS yang kurang berkualitas (masyarakat yang mempunyai perilaku pencarian layanan kesehatan ke swasta/dokter swasta), belum optimalnya peran PMO (pengawas menelan obat). Kunci sukses pengobatan TB adalah kepatuhan dalam minum obat TB. Adapun upaya yang dilakukan adalah penerapan strategi DOTS dan peningkatan jejaring TB dengan fasilitas kesehatan swasta (dokter dan apotik).

2.1.6.2.12. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinveksi HIV

Jumlah Kasus HIV di Kabupaten Soppeng pada Tahun 2020 sebanyak 14 orang. Upaya pelayanan dalam rangka pemberantasan penyakit HIV di samping ditujukan pada penanganan penderita yang ditemukan juga diarahkan pada upaya pencegahan yang dilakukan melalui skrining HIV terhadap donor darah dan upaya pemantauan yang tidak hanya pada orang-orang yang beresiko akan tetapi luas pada masyarakat umum dan pengobatan penderita penyakit menular seksual (PMS).

2.1.6.3. Bidang Pekerjaan Umum

Jenis SPM bidang Pekerjaan Umum yang dilaksanakan adalah Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik. Realisasi pada tahun 2020

untuk indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Tabel 2. 302.Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2016-2020

No	Jenis Pelayanan SPM	Indikator Pencapaian			
		Jumlah yang harus dilayani (Rumah Tangga)	Jumlah yang sudah terlayani (Rumah Tangga)	Jumlah yang belum terlayani (Rumah Tangga)	Capaian %
1	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	58.054	55.825	2.229	96.16
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	58.054	34.123	23.931	58,78

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2020

2.1.6.3.1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari

Jumlah penduduk di Kabupaten Soppeng yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari pada tahun 2020, memperoleh capaian kinerja berada pada kisaran *96,16 %* dengan jumlah rumah tangga pengguna air bersih adalah sebanyak 55.825 rumah tangga, sedangkan jumlah seluruh rumah tangga adalah adalah sebanyak 58,054 rumah tangga, Hal ini berarti pula masih terdapat *3,84 %* penduduk Kabupaten Soppeng yang belum memperoleh akses pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.

2.1.6.3.2. Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik

Jumlah penduduk di Kabupaten Soppeng yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik pada tahun 2020 mencapai target 100 % dengan jumlah rumah tangga yang mendapatkan pelayanan pengolahan air limbah domestik adalah sebanyak 34,123 rumah tangga, sedangkan jumlah seluruh rumah tangga adalah sebanyak 58,054 rumah tangga.

2.1.6.4. Bidang Perumahan Rakyat

Jenis SPM Bidang Perumahan Rakyat yang dilaksanakan terdiri dari Cakupan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Cakupan Rehab Rumah Tidak Layak Huni dengan realisasi pada tahun 2020 yaitu:

Tabel 2. 303. Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2016-2020

No	Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang sudah terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian %
1	Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	27	27	-	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni Bagi masyarakat yang terkena relokasi program	0	0	0	100

No	Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang sudah terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian %
	Pemerintah Daerah kabupaten/ kota				

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2020

2.1.6.4.1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana

Penyediaan dan rehabilitasi rumah rumah yang layak huni bagi korban bencana adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang mengalami bencana yang di akibatkan adanya bencana alam yang terjadi yang mengakibatkan kerusakan total atau sebagian pada bangunan rumah masyarakat. Selama tahun 2020 jumlah rumah korban bencana yang seharusnya direhab sebanyak 27 unit dan yang telah direhab sebanyak 27 unit sehingga capaian SPM sebesar 100%.

2.1.6.4.2. Penyediaan rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota adalah pelayanan terhadap warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni. Selama tahun 2020 jumlah warga negara yang terkena dampak relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota sebanyak 0 rumah.

2.1.6.5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Jenis SPM Bidang Ketentraman, Ketertinban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan terdiri dari Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum, Pelayanan informasi rawan bencana, Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan realisasi pada tahun 2019 yaitu:

Tabel 2. 304. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2020

No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Jumlah yang seharusanya dilayani	yang dilayani	Persentase
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	0	0	100%
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memproleh layanan informasi rawan bencana	101.735	101.735	100%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan	101.735	101.735	100%

No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Jumlah yang seharusanya dilayani	yang dilayani	Persentase
	terhadap bencana	kesiapsiagaan terhadap bencana			
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memproleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1	1	100%
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	121 jiwa	121 jiwa	100%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, 2020

2.1.6.5.1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator pencapaian SPM Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada. Selama tahun 2020 tidak ada warga yang terdampak gangguan trantibum berupa kerugian materiil maupun terkena cedera akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada maka bisa dikatakan capaian SPM pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sebesar 100%

2.1.6.5.2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Realisasi pelaksanaan pelayanan informasi rawan bencana dengan indikator pencapaian yakni jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana terlaksana dengan persentase pelaksanaan 100 Kegiatan yang dilaksanakan berupa sosialisasi pencegahan bencana dan pelatihan evakuasi bencana yang dilaksanakan di 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Soppeng yang melibatkan seluruh aparat kecamatan, kelurahan/desa, kepala lingkungan, kepala dusun, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan kelompok-kelompok masyarakat di masing-masing kecamatan. %. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Informasi rawan bencana sebanyak 101. 735 jiwa sedangkan jumlah warga yang berada di Kawasan rawan bencana sebanyak 101.735 jiwa. Maka capaian SPM sebesar 100%.

2.1.6.5.3. Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Realisasi pelayanan dasar ini dilaksanakan dengan mengacu pada indikator pencapaian yakni jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Dalam pelaksanaan pencegahan bencana alam dan evakuasi bencana, badan penanggulangan melaksanakan kegiatan pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC) 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, melakukan pembentukan kelompok pemuda siaga bencana di masing-masing kelurahan/desa, dan melakukan apel kesiapsiagaan tiap tahun untuk inspeksi kesiagaan petugas bencana dalam menghadapi bencana alam di Kabupaten Soppeng. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

sebanyak 101. 735 jiwa sedangkan jumlah warga yang berada di Kawasan rawan bencana sebanyak 101.735 jiwa. Maka capaian SPM sebesar 100%.

2.1.6.5.4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Realisasi pelayanan dasar ini mengacu pada indikator jumlah warga Negara yang memperloleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Untuk tahun 2020, pelayanan dasar ini terealisasi 100% . Dukungan sarana dan prasarana penanggulangan bencana alam.

2.1.6.5.5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Indikator Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Pada tahun 2020 jumlah warga negara yang memperoleh penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebanyak 121 jiwa dan semua tertangani. Hal ini tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan kebakaran.

2.1.6.6. Bidang Sosial

Jenis SPM Bidang sosial yang dilaksanakan terdiri dari Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar Panti Sosial, Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial, Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial, Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusunya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial, Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan telah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi pada tahun 2020 yaitu:

Tabel 2. 305. Bidang Sosial Tahun 2016-2020

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Seharus-nya dilayani	dilayani	Persen-tase (%)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabiliasi sosial diluar panti	813	45	5,53%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	2	2	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	80	18.305	0,43%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	0	0	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	3.283	440	13,48 %

Sumber : Dinas Sosial, 2020

***2.1.6.6.1.* Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar Panti Sosial**

Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti tahun 2020 sebanyak 45 orang dari jumlah penyandang disabilitas sebanyak 813 jiwa.

2.1.6.6.2. **Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial**

Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti pada tahun 2020 ditemukan 2 (dua) kasus anak terlantar yang semuanya dapat ditangani dinas sosial (100%).

2.1.6.6.3. **Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial**

Jumlah warga negara lanjut usia yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti pada tahun 2020 sebanyak 80 jiwa. Adapun jumlah keseluruhan warga Negara lanjut usia sebanyak 18.305 jiwa

2.1.6.6.4. **Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial**

Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna wisma diluar panti. Pada tahun 2020 tidak ditemukan adanya warga yang berstatus sebagai pengemis dan gelandangan di Kabupaten Soppeng.

2.1.6.6.5. **Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan telah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota**

Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial. Pada tahun 2020 pelaksanaan perlindungan jaminan sosial pada saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana bagi korban bencana jumlah warga yang dilayani 440 jiwa dari jumlah korban bencana dikabupaten soppeng sebanyak 3.283 jiwa atau persentase 13,48, dengan rincian Jumlah korban bencana alam yang dilayani sebanyak 409 jiwa dari jumlah korban bencana alam di kabupaten soppeng sebanya 3.252 jiwa. Pada bencana sosial jumlah warga masyarakat yang dilayani sebanyak 31 jiwa dari jumlah total bencana sosial di kabupaten soppeng sebanyak 31 jiwa.

Tabel 2. 306 Hasil Analisis Capaian Kinerja SPM Tahun 2020

Urusan	Indikator SPM	Target	Capaian	Keterangan
PENDIDIKAN	Jumlah Warga Negara usia 5-6 Tahun yang berpartispasi dalam pendidikan PAUD;	100	59,91	Belum Tercapai
	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs).	100	90,67	Belum Tercapai

Urusan	Indikator SPM	Target	Capaian	Keterangan
	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	100	66,66	Belum Tercapai
KESEHATAN	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	100	Tercapai
	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	100	Tercapai
	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	100	Tercapai
	Cakupan pelayanana kesehatan balita	100	100	Tercapai
	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	100	Tercapai
	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	20.11	Belum Tercapai
	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	100	Tercapai
	Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100	100	Tercapai
	Cakupan pelayamnan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100	100	Tercapai
	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100	100	Tercapai
	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TB	100	100	Tercapai
	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100	100	Tercapai

Urusan	Indikator SPM	Target	Capaian	Keterangan
PEKERJAAN UMUM	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	100	96.16	Belum Tercapai
	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100	58,78	Belum Tercapai
PERUMAHAN DAN PEMUKIMAM	Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	100	100	Tercapai
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni Bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	100		
KETENTRAMAN KETERTIBAN	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	100	100%	Tercapai
	Pelayanan Informasi rawan bencana	100	100%	Tercapai
	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100%	Tercapai
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100%	Tercapai
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100%	Tercapai
SOSIAL	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100	5,53%	Belum Tercapai
	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	100	100%	Tercapai
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	100	0,43%	Belum Tercapai

Urusan	Indikator SPM	Target	Capaian	Keterangan
	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	100	100%	Tercapai
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	100	13,48%	Belum Tercapai

2.1.7. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ TPB / SDGs

Sesuai dengan pembagian wewenang yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten memiliki wewenang sebanyak 220 indikator capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Namun, berdasarkan hasil identifikasi yang mempertimbangkan karakteristik wilayah maka pemerintah Kabupaten Soppeng hanya memiliki 196 indikator TPB. Salah satunya dikarenakan TPB (14), yaitu Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng, mengingat Kabupaten Soppeng tidak memiliki laut. Berdasarkan hasil analisis data, kategori capaian TPB Kabupaten Soppeng terbagi atas empat kategori, yaitu:

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target
3. Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target
4. Indikator TPB yang belum/tidak memiliki data
5. Realisasi capaian indicator TPB yang terlaksana dan belum mencapai target

Tabel 2. 307 Realisasi Capaian TPB yang dilaksanakan belum mencapai target

No. TPB	Target		Indikator		Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Capaian	Total Indikator
1	1.2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi,	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	7,5%	8

No. TPB	Target		Indikator		Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Capaian	Total Indikator
		sesuai dengan definisi nasional.					
	1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Meningkat menjadi 95%	86%	
			1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Menurun	7.233	
	1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	94,3 %	
			1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	63,4 %	
			1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	Meningkat menjadi 94,78%	86,4 %	
			1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	Meningkat menjadi 82,2%	68,44 %	
			1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Meningkat menjadi 100%	77,13 %	

No. TPB	Target		Indikator		Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Capaian	Total Indikator
2	2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*).	Menurun	18,94 %	4
	2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Menurun	16%	
			2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun , berdasarkan tipe.	Menurun	0,04 %	
			2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Menurun menjadi 28%	0,01 %	
3	3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Meningkat menjadi 95%	86,59 %	5
	3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%	60%	

No. TPB	Target		Indikator		Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Capaian	Total Indikator
	3.9	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Menurun	0,98 %	
	3.a	Memperkuat pelaksanaan *The Framework Convention on Tobacco Control WHO* di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Menurun	8,81 %	
	3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek- Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Meningkat	100%	
4	4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 84,2%	38,34 %	6

No. TPB	Target		Indikator		Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Capaian	Total Indikator
		pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 81%	68,42 %	
			4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	Meningkat menjadi 114,09%	96,86 %	
			4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	Meningkat menjadi 106,94%	93,15 %	
			4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 8,8 tahun	7,63 Tahun	
		Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Meningkat menjadi 77,2%	70,97 %	
5	5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	25%	4
			5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam	Menurun	25%	

No. TPB	Target		Indikator		Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Capaian	Total Indikator
				12 bulan terakhir.			
	5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan *Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.*	5.6.1.(a)	*Unmet need* KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak *terpenuhi).*	Menurun menjadi 9,9%	22,76 %	
			5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Meningkat menjadi 85%	57,59 %	
6	6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Meningkat menjadi 100%	94,3 %	6
			6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	90,05 %	
	6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Meningkat menjadi 100%	63,4 %	
			6.2.1.(e)	Jumlah kecamatan yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Meningkat	1 Kecamatan	
	6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi	6.3.1.(a)	Jumlah kecamatan yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan	Meningkat menjadi 409 kabupaten/ kota	1 Kecamatan	

No. TPB	Target		Indikator		Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Capaian	Total Indikator
		setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.		Lumpur Tinja (IPLT).			
			6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Meningkat	0,86	
8	8.1	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa.	Meningkat	40 kantor bank	7
		Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Meningkat	7,69 %	
			8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	Rp 48.180.000,-	
	8.5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun	3,53 %	
	8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)	0 Orang	
			8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Meningkat	200.597 Orang	
			8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Meningkat	Rp 1.148.566.000	
10	10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan	10.1.1*	Koefisien Gini.	Menurun menjadi 0,36	0,35	5

No. TPB	Target		Indikator		Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Capaian	Total Indikator
		mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	7,5%	
			10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	80 Kabupaten (skala nasional)	43 daerah	
			10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Berkurang sebanyak 5.000 desa (skala nasional)	6 desa	
			10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Meningkat paling sedikit 2.000 desa	0 desa	
11	11.3	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	ada	Tidak Ada	2
	11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Meningkat menjadi 80%	73,59 %	
15	15.3	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	5,5 juta Ha (skala nasional)	20.508 Ha	2

No. TPB	Target		Indikator		Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Capaian	Total Indikator
	15.9	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Meningkat	Tidak Ada	
16	16.2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18- 24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun Persentase instansi	Menurun	31%	5
	16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(d)	pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45%	0%	
	16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Meningkat	2%	
	16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Meningkat	12.077 Anak	
			16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Meningkat menjadi 85%	75,5 %	
17	17.1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Meningkat	0,91 %	6

No. TPB	Target		Indikator		Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Capaian	Total Indikator
		kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Di atas 12%	1,15 %	
			17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Meningkat	1,15 %	
	17.17	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	ada	Tidak Ada	
			17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	ada	Tidak Ada	
	17.18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Meningkat	12 Data	

Tabel 2. 308 Realisasi Capaian TPB yang belum dilaksanakan

No. TPB	Target		Indikator		Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Total Indikator
1	1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Meningkat menjadi 39 daerah	3
			1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Meningkat menjadi 450	
			1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat- pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Menurun menjadi 118,6	
2	2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Menurun menjadi 8,5 %	1
3	3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.1.(a)	*Unmet need* pelayanan kesehatan.	Menurun menjadi 9,91%	1



No. TPB	Target		Indikator		Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Total Indikator
5	5.1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	bertambah sebanyak 16	**3**
	5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Menurun menjadi kurang dari 20,48%	
	5.3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Menurun	
7	7.2	Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	10-16%	2
	7.3	Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.	7.3.1*	Intensitas energi primer.	Menurun menjadi 463,2 SBM (skala nasional)	
10	10.3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	Meningkat menjadi 87	**2**
			10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	ada	



No. TPB	Target		Indikator		Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Total Indikator
11	11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Menurun menjadi 30%	**2**
	11.7	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Meningkat/ada	
12	12.4	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)	1
16	16.1	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Meningkat	**4**



No. TPB	Target		Indikator		Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Total Indikator
	16.5	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Meningkat menjadi 4,0	
	16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota: 80%	
	16.b	Menggalakkan dan menegakkan undang- undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	ada	
17	17.18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Meningkat	**1**

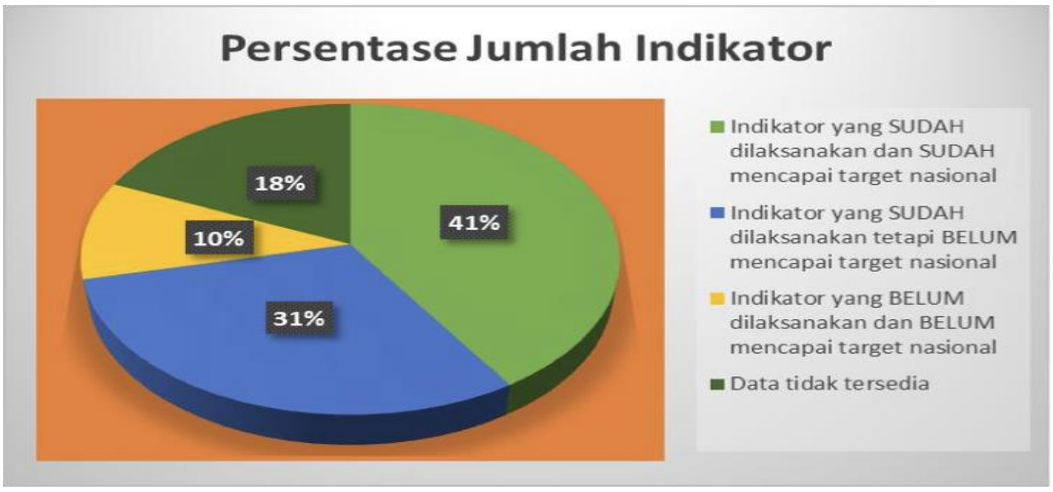


No. TPB	Target		Indikator		Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Total Indikator
		karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.				



Dari hasil pengolahan data, terlihat bahwa Indikator TPB Kabupaten Soppeng yang telah dilaksanakan dan mencapai target adalah 41% atau sebanyak 80 indikator, dari total 196 indikator yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Soppeng. Sementara itu, sebanyak 31% (60 indikator) telah dilaksanakan, namun belum mencapai target. Sebanyak 20 indikator atau 10% dari total indikator TPB masih belum terlaksana dan belum mencapai target, serta sebanyak 18% atau 36 indikator belum/tidak memiliki data. Persentase perbandingan capaian indikator TPB Kabupaten Soppeng secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut.

Grafik 2. 33. Presentase Capaian Indikator TPB Kabupaten Soppeng



Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Jika dilihat berdasarkan jumlah indikatornya, TPB yang paling banyak mencapai target nasional adalah TPB 3, yakni menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia dan TPB 1, yakni mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Untuk kategori indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target, TPB 1 memiliki jumlah yang paling banyak, yakni delapan indikator. Sementara itu, pada indikator belum dilaksakan dan belum mencapai target, TPB 16 dengan empat indikator yang paling tinggi, yakni menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediaan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Selain itu, pada kategori indikator TPB yang belum/tidak memiliki data, TPB 8 memiliki jumlah terbanyak, yaitu sebelas indikator dengan tujuan menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2021 dan Realisai RPJMD

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2020 berdasarkan urusan menunjukkan bahwa 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan menunjukkan capaian kinerja rata-rata sebesar 94,97 % dan realisasi anggaran rata-rata sebesar 83,91 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini:

2.2.1. Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD

Tabel 2. 309 Evaluasi Realisasi Capaian RPJMD

Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2021)		Target RPJMD Kabupaten Soppeng 2020		Realisasi Kinerja RPJMD Kabupaten Soppeng 2020		Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Soppeng (%) 2020		Capaian Pada Akhir Tahun 2020		Rasio Capaian Akhir (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6 = 4/3x100		7 = 5		8 =(5/3)x100%		9
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Meningkatkannya Produktivitas Pertanian (S1)	Peningkatan PDRB dari Sektor Pertanian/ Perkebunan (Juta Rupiah)	8,8	106.852.045.482	9,65	22.175.854.500	4,88	20.031.031.271	50,57	90,33	4,88	20.031.031.271	10000%	18,7	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Produksi Sektor Pertanian	Padi (GKG) = 314.550 ton	6.420.413.157	Padi (GKG) = 312.239 ton	359.865.000	276.589	313.899.500	88,58	87,23	276.589	313.899.500	87,93	4,89	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
		Jagung (Pipilan Kering) = 46.861 ton		Jagung (Pipilan Kering) = 46.377 ton		195.504		421,55		195.504		417,20		
		Kedelai (Pipilan Kering) = 1.706 ton		Kedelai (Pipilan Kering) = 1.308 ton		525		40,14		525		30,77		
		Kacang Tanah (Ton) = 625		Kacang Tanah (Ton) = 530		1.067		####		1.067		170,72		
		Kacang Hijau = 341 ton		Kacang Hijau = 291 ton		61,00		20,96		61		17,89		
		Ubi kayu = 923 ton		Ubi kayu = 845 ton		1.526		180,59		1.526		165,33		
		Ubi Jalar = 286 ton (19%)		Ubi Jalar = 351 ton		104		29,63		104		36,36		
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah populasi ternak	Populasi Sapi = 57.000 ekor	13.029.062.200	Populasi Sapi = 55.000 ekor	2.642.612.000	Populasi Sapi = 35.341 ekor	519.552.700	64,26	19,66	35341	519.552.700	62,00	0,04	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
		Populasi Kambing = 35.000 ekor		Populasi Kambing = 33.500 ekor		Populasi Kambing = 35.726 ekor		106,6		35726		102,07		
		Populasi Unggas = 2.365.000 ekor		Populasi Unggas = 2.250.000 ekor		Populasi Unggas = 4.517.913 ekor		200,80		4517913		191,03		
Program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan	Persentase Peningkatan luas areal tanaman komoditi tanaman pangan (%)	36,92	10.434.978.000	36,92	1.870.660.000	81,26	1.452.348.000	220,10	77,64	81,26	1452348000	220,10	13,92	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu dan Pemasaran Hasil Pertanian	Jumlah jenis komoditi yang dipasarkan	25	596.000.000	4	144.650.000	6	142.875.000	150	98,77	6	142.875.000	24,00	23,97	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
Program penguatan Kelembagaan Pelaku Utama	Cakupan bina kelompok tani	98,7	302.000.000	98,5	17.400.000	90,93	16.600.000	92,31	95,4	90,93	16.600.000	92,13	5,50	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan

Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2021)		Target RPJMD Kabupaten Soppeng 2020		Realisasi Kinerja RPJMD Kabupaten Soppeng 2020		Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Soppeng (%) 2020		Capaian Pada Akhir Tahun 2020		Rasio Capaian Akhir (%)		SKPD Penanggung Jawab
Program Peningkatan Produksi, produktivitas dan mutu Hasil Perkebunan	Produksi Sektor Perkebunan (ton)	Kakao = 72042.1 ton Tembakau = 604.68 ton	4.959.542.125	12052 94,11	583.567.500	4.158,15 101,25	583.547.500	34,50 107,59	100	4158,15 101,25	583.547.500	5,77 16,74	11,8	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Pasca Panen, Pemasaran dan Promosi Hasil Perkebunan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan (Unit)	36	22.000.000	32	0	32	0	100	####	32	0	88,89	0,00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
Program Pengembangan Sutra Alam	Produksi kokon (kg)	19,721	530.000.000	17	468.750.000	15.011,00	424.590.000	88300	90,58	15011	424.590.000	#####	80,11	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	94	67.491.000.000	92,00	13.021.300.000	62	16.577.618.571	67,39	127,3	62	1657761857 1	65,96	24,56	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program rehabilitasi/ pemeliharaan dan pembangunan embung/ cekdam	volume embung/cekdam yang terbangun (m3)	121.549	3.067.050.000	4.8	3.067.050.000	NA	-	NA	0	NA	-	NA	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan (S2)	APM SD/ Sederajat	100	152.853.187.000	100	40.981.000.000	88,88	39.369.630.538	88,88	96,07	88,88	39.369.630.538	88,88	25,8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	APM SMP/ Sederajat	100		100		69,86		69,86		69,86		69,86		
Program Pendidikan Gratis	Angka Putus Sekolah SD sederajat (%)	0	69.433.968.000	0	3.000.000.000	0,00	895.690.000	100	30	0,00	895.690.000	100	1,3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka Putus Sekolah SMP sederajat (%)	0		0		0,03		99,97		0,03		99,97		
Program Peningkatan Layanan Pendidikan	Cakupan Penerima Beasiswa, bimbel (%)	100	7.273.000.000	100	12.000.000.000	100	9.944.730.000	100	83	100	9.944.730.000	100	136,7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah Sekolah SD yang berakreditasi A	100	1.501.600.000	21	391.000.000	95	142.702.220	452	36	95	142.702.220	95,00	9,5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Jumlah Sekolah SMP yang berakreditasi A	27		4		26		650		26		96,30		
Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Pendidikan	Kualifikasi Guru yang berpendidikan minimal S1/ D4 (%)	100	2.328.526.000	100	100.000.000	95,51	3.205.000	96	3	95,51	3.205.000	95,51	0,1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pembinaan dan Pengembangan Kesiswaan	Jumlah Siswa yang berprestasi di lomba Olimpiade	20	2.882.125.000	20	490.000.000	0	79.312.500	0	16	0	79.312.500	0	2,8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Dana Bantuan Operasional Sekolah	Cakupan Sekolah Penerima BOS	100	69.433.968.000	100	25.000.000.000	100	28.303.990.818	100	113	100	28.303.990.818	100	40,8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya kualitas pelayanan dasar berbasis SPM (S3)	IKM atas pelayanan dasar berbasis SPM	82%	231.008.122.500	81,75	64.004.978.500	81,75	69.013.747.373	100	107,8	4,88	69.013.747.373	597%	29,9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100	10.592.000.000	100	1.900.000.000	59,91	3.044.270.811	59,91	160,2	59,91	3.044.270.811	59,9	28,7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100	212.250.000.000	100	35.450.000.000	90,67	47.571.085.880	90,67	134,2	90,67	47.571.085.880	90,7	22,4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pendidikan Non Formal	Jumlah yang mengikuti Pendidikan Kesetaraan, (Orang)	580	1.820.000.000	0	0	2.141	0	####	#DIV/0!	2.141	0	369,1	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2021)		Target RPJMD Kabupaten Soppeng 2020		Realisasi Kinerja RPJMD Kabupaten Soppeng 2020		Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Soppeng (%) 2020		Capaian Pada Akhir Tahun 2020		Rasio Capaian Akhir (%)		SKPD Penanggung Jawab
Program Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	580	1.518.150.000	100	2.000.000.000	66,66	479.173.750	66,66	23,96	66,66	479.173.750	11,5	31,6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan (%)	100		100	17.571.973.000	100	12.674.769.557	100	72,13	100	12.674.769.557	100	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	Persentase penanganan penyakit	100,00		100	3.932.250.000	100	3.817.075.175	100	97,07	100	3.817.075.175	100	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Balita, Anak dan Lansia	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu, Balita, Anak dan Lansia	100,00		100	1.731.732.500	100	107.630.000	100	6,22	100	107.630.000	100	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Melahirkan	% ibu hamil dan melahirkan yang mendapatkan pelayanan kesehatan minimal sesuai standar	100,00		100	6.000.000	100	6.000.000	100	100	100	6.000.000	100	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Bayi Baru Lahir, Balita, dan Anak Usia Pendidikan Dasar Serta Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	% Bayi baru lahir, Balita dan anak usia pendidikan dasar serta usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00		100	56.000.000	100	55.994.400	100	99,99	100	55.994.400	100	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Usia Produktif dan Pencegahan Penyakit	% Masyarakat yang produktif mendapatkan pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit sesuai dengan standar pelayanan minimal	100,00		100	12.600.000	100	11.900.000	100	94,44	100	11.900.000	100	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	101.100.000	100	111.100.000	125	25.179.900	125	22,66	125	25.179.900	125	24,9	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100		100		0		0		0		0		Dinas Perumahan dan Permukiman
Program Peningkatan dan Kesiagaan serta Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	0	100	0	100	0						#DIV/0!	Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	29.282.000	100	111.625.000	100	111.505.000	100	99,89	100	111.505.000	100	381	BPBD
Program tanggap darurat dan logistik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	639.642.000	100	848.900.000	100	845.072.900	100	99,55	100	845.072.900	100	132	BPBD



Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2021)		Target RPJMD Kabupaten Soppeng 2020		Realisasi Kinerja RPJMD Kabupaten Soppeng 2020		Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Soppeng (%) 2020		Capaian Pada Akhir Tahun 2020		Rasio Capaian Akhir (%)		SKPD Penanggung Jawab
Program Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100	3.941.832.550	100	0	100	0	100	####	100	0	100	0	Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran
Program rehabilitasi sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	116.115.950	100	272.798.000	100	264.090.000	100	96,81	100	264.090.000	100	227	Dinas Sosial
	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitas sosial diluar panti	100		100		100		100		100		100		Dinas Sosial
	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100		100		100		100		100		100		Dinas Sosial
	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100		100		100		100		100		100		Dinas Sosial
	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100		100		100		100		100		100		Dinas Sosial
Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada PTSP (S4)	IKM atas layanan PTSP	82	507.500.000	81,75	507.500.000	100	130.874.250	122,3	25,79	4,88	820.183.083.226	488%	###	Dinas Penanaman Modal, PTSP, NakerTrans
Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan perizinan dan Non Perizinan	Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan rekomendasi teknis (%)	100	507.500.000	100	507.500.000	100	130.874.250	100	25,79	100	130.874.250	100	25,79	Dinas Penanaman Modal, PTSP, NakerTrans
Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan dan catatan sipil (S5)	Rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk	1	540.000.000	1	550.643.100		505.111.414	0	91,73	88,88	505.111.414	8888	9.353.915.074	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Rasio bayi berakte kelahiran	1		1				0		69,86		6986		
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	100	120.000.000	100	129.675.800	99,01	129.468.800	99,01	99,84	99,01	129.468.800	99,01	107,9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	0	0			0	0			0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	99,35	420.000.000	98,1	420.967.300	99,23	375.642.614	101,2	89,23	99,23	375.642.614	99,88	89,4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat (S6)	Angka Kriminalitas yang tertangani	12,21	3.962.772.550	12,14	4.592.851.560	5,05	4.430.469.400	41,6	96,46	4,88	4.430.469.400	9663%	112	Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran
Program peningkatan kapasitas keamanan dan ketertiban	Patroli siaga, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100	3.962.772.550	1	4.592.851.560	1	4.430.469.400	100	96	1	4.430.469.400	1	112	Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran
Program Perlindungan masyarakat	Cakupan petugas perlindungan Masyarakat (Linmas)	68,49		68,49	0	174,47		255	####	174,47	0	255	#DIV/0!	Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran
Meningkatnya daya tarik destinasi wisata (S7)	Peningkatan PDRB Sektor Pariwisata	2,5		2,000		0,72		36	####	4,88	408.270.468.215	67778%	#DIV/0!	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2021)		Target RPJMD Kabupaten Soppeng 2020		Realisasi Kinerja RPJMD Kabupaten Soppeng 2020		Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Soppeng (%) 2020		Capaian Pada Akhir Tahun 2020		Rasio Capaian Akhir (%)		SKPD Penanggung Jawab
Program Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Wisatawan	1.357.751		234126		41818		17,86		41818		3,08		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Meningkatnya jangkauan dan kualitas sistem transportasi (S8)	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,41	899.590.284.000	0,39	151.913.747.450	0,39	99.781.447.161	100	65,68	4,88	294.432.725.072	125128 %	32,7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/Jam)	41	897.318.090.000	40	150.000.000.000	58,4	97.876.116.703	146,00	65,25	58	97.876.116.703	142,44	10,91	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Pemasangan rambu-rambu	95	272.194.000	90	258.957.900	97,16	258.184.458	108	99,7	97,16	258.184.458	102,27	94,85	Dinas Perhubungan
Program penerangan jalan	Panjang jangkauan penerangan (km)	139	2.000.000.000	136	1.654.789.559	99,78	1.647.146.000	73,37	99,54	99,78	1.647.146.000	71,78	82,36	Dinas Perhubungan
Menningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur perumahan dan pemukiman dalam mendukung kehidupan masyarakat yang bersih dan sehat (S9)	Persentase rumah tingal bersanitasi layak	100	63.124.908.000	100	15.923.280.000	100	4.075.918.155	100	25,60	88,88	4.075.918.155	88,88	6.456.909.458	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	100		100		100		100		69,86		69,86		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program pembangunan sarana dan prasarana air bersih	jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	15.851.685.000	100	5.000.000.000	97,16	803.870.255	97,16	16,08	97,16	803.870.255	97,16	5,07	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan dan Air Limbah	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	100	46.228.223.000	100	10.120.600.000	100	2.816.618.500	100,00	27,83	100	2.816.618.500	100,00	6,09	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengembangan Kawasan Pemukiman	Persentase kawasan pemukiman yang tertata	80		70		0,73		1,04		0,73	0	0,91		Dinas Perumahan dan Permukiman
Program Pemanfaatan Ruang	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	14	1.045.000.000	13,50	353.000.000	23,31	19.999.400	172,7	5,67	23,31	19.999.400	166,50	1,91	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Rumah Tangga ber- PHBS (%)	100		100	13.000.000	52,27	13.000.000	52,27	100	52,27	13.000.000	52,27	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Akses Sanitasi yang layak (%)	100		100	436.680.000	100	422.430.000	100	96,74	100	422.430.000	100,00	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Meningkatnya penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan efesiensi dalam perencanaan, penganggaran dan pertanggungan kinerja (S10)	Nilai Akuntabilitas Daerah	8	13.224.446	B	842.727.200	CC	806.702.550	75	95,73	CC	806.702.550	#####	6100	Bappelitbangda
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	% Ketersediaan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang sesuai dengan regulasi	100	9.082.076	100	779.102.200	100	749.852.550	100	96,25	100	749.852.550	100	8256	Bappelitbangda
Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	% Program RPJMD yang dijabarkan ke dalam RKPD	100	2.894.957	100	39.625.000	100	32.850.000	100	82,90	100	32.850.000	100	1135	Bappelitbangda

Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2021)		Target RPJMD Kabupaten Soppeng 2020		Realisasi Kinerja RPJMD Kabupaten Soppeng 2020		Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Soppeng (%) 2020		Capaian Pada Akhir Tahun 2020		Rasio Capaian Akhir (%)		SKPD Penanggung Jawab
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Evaluasi Kinerja dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Cakupan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang disusun tepat waktu	B	1.247.413	100	24.000.000	100	24.000.000	100	100,00	100	24.000.000	100	1924	Bappelitbangda
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan daerah (S11)	Opini laporan keuangan	WTP	4.268.550.000	WTP	2.793.962.725	WTP	2.410.474.812	WTP	86,27	WTP	2.410.474.812	100	56	BPKPD
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	% Penetapan dokumen pengelolaan keuangan daerah tepat waktu	100	3.000.000.000	100	2.027.791.700	100	1.880.579.750	100	92,74	100	1.880.579.750	100	63	BPKPD
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah	% SKPD dengan pencatatan aset yang benar	100	1.268.550.000	90	766.171.025	100	529.895.062	111	69,16	100	529.895.062	100	42	BPKPD
Meningkatnya akses dan Kualitas Layanan Kesehatan (S12)	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar	47,07		41,18	175.868.099.352	69,19	180.065.086.877	168,02	102,39	69,19	180.065.086.877	168,02	102	Dinas Kesehatan
	Persentase Balita gizi buruk			0		0,02		100		100		100		
	Prevalensi balita gizi kurang			0		3,52		100		3,52		100		
	Prevalensi Balita Stunting	<25%		<25%		14,32		100		14,32		100		
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Persentase sarana dan prasarana kesehatan yang sesuai standar (%)	41,16		5,88	11.178.626.000	69,19	11.005.487.927	1177	98,45	69,19	11.005.487.927	168,1	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Program standarisasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas	Persentase Puskesmas BLUD (%)	70,59		58,82	21.270.518.513	100	19.338.107.597	170	90,92	100	19.338.107.597	141,7	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Persentase Masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	100		100	47.159.677.102	100	46.746.305.002	100,00	99,12	100	46.746.305.002	100,0	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD	Kemandirian keuangan Rumah Sakit (Cost recovery) (%)	1,12		1,12	68.768.724.737	1,1	76.775.359.791	98,21	111,6	1,1	76.775.359.791	98,2	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Akreditasi Rumah Sakit	PARIPURNA		PARIPURNA	119.300.000	PARIPURNA	64.095.000	#VALUE!	53,73	PARIPURNA	64.095.000	#####	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Program upaya kesehatan masyarakat	Persentase puskesmas yang terakreditasi (%)	100		100	1.170.710.000	100	523.074.850	100,00	44,68	100	523.074.850	100	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Program pengadaan obat dan Perbekalan Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan (%)	98		98	2.507.853.000	98	2.225.766.115	100,00	88,75	98	2.225.766.115	100	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit	Persentase penanganan penyakit	100		100	3.932.250.000	100	3.817.075.175	100,00	97,07	100	3.817.075.175	100	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Program Pengembangan SDM Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan Terlatih (%)	0		0	85.000.000	0	81.996.500	####	96,47	0	81.996.500	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Persentase ketersediaan sarana RS (%)	80		100	19.565.440.000	100	19.389.545.920	100,00	99,10	100	19.389.545.920	125	#DIV/0!	Dinas Kesehatan

Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2021)		Target RPJMD Kabupaten Soppeng 2020		Realisasi Kinerja RPJMD Kabupaten Soppeng 2020		Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Soppeng (%) 2020		Capaian Pada Akhir Tahun 2020		Rasio Capaian Akhir (%)		SKPD Penanggung Jawab
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Persentase kelayakan peralatan dan pelayanan pada rawat jalan, rawat inap dan penunjang medis (%)	80		100	110.000.000	100	98.273.000	100,00	89,34	100	98.273.000	125	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Meningkatnya kesejahteraan pengelola rumah ibadah (S13)	Persentase penyelenggara ibadah (imam masjid dan guru mengaji) yang difasilitasi	100	2.000.000.000	100	1.000.000.000	100	3.879.912.900	100	387,99	100	3.879.912.900	100	194,00	Bag Kesra Setda Kab.Soppeng
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat Desa/Kelurahan	Persentase Kelembagaan dan Penyelenggara Ibadah Desa/Kelurahan yang dibina	100	1.000.000.000	0				####	####	0	0	0		8 Kecamatan
Program Penyelenggaraan Pemerintah Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintah Umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan yang dilaksanakan	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	3.879.912.900	100	38,799,129	100	3.879.912.900	100		8 Kecamatan
Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan (S14)	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	12,50	9.276.277.395	12,25	7.445.649.907	13,79	6.919.468.835	112,57	92,93	13,79	6.919.468.835	110,32	74,59	DPPPA PP dan KB
Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	98,12	61.259.700	98,12	23.781.600	89,10	23.781.600	90,81	100	89,10	23.781.600	90,81	38,82	DPPPA PP dan KB
Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan (S15)	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	100		100		100		100		100		100		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah Organisasi Pemuda	28		28		100		357,14		100		357,14		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional	26		5		0		0		0		0		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	Jumlah prestasi olahraga tingkat nasional	42		7		0		0		0		0		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Meningkatnya Produksi Pertanian Padi Sawah (S16)	Produksi Beras	220750 ton	943.000.000	214.219	243.400.000	176.214,85	242.800.000	82,26	99,75	176.214,85	242.800.000	79,83	25,75	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
Program Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	Ketersediaan Pangan Utama	4,27	943.000.000	3,96	243.400.000	3,64	242.800.000	91,92	99,75	3,64	242.800.000	85,25	25,75	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup (S17)	Indeks Kualitas Air	1		1		0,71		71		0,71		71		Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara	91,71		91,71		91,42		99,68		91,42		99,68		Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	0,48		0,48		0,48		100		0,48		100		Dinas Lingkungan Hidup
Program Pembangunan, Penataan, dan Pemeliharaan taman kota	Luas tanaman kota yang dibangun, ditata, dan dipelihara (m2)	68.011		1.465		9.351		638		9.351		13,75		Dinas Lingkungan Hidup
Program Ruang Terbuka Hijau	Persentase tersedianya luasan RTH publik selesai 20% dari luas perkotaan	60,00		55,00		55		100		55		91,67		Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertagani	75,00		70,00		65,9		94,14		66		87,87		Dinas Lingkungan Hidup



Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2021)		Target RPJMD Kabupaten Soppeng 2020		Realisasi Kinerja RPJMD Kabupaten Soppeng 2020		Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Soppeng (%) 2020		Capaian Pada Akhir Tahun 2020		Rasio Capaian Akhir (%)		SKPD Penanggung Jawab
Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan lingkungan hidup	Persentasi peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup	100		100		100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya daya saing investasi (S18)	Jumlah investasi berskala nasional		600.000.000	22,300	500.000.000	89,2	28.800.000	400	5,76	4,88	12.152.765.450	547%	2025	Dinas Penanaman Modal, PTSP, NakerTrans
Program Peningkatan iklim dan promosi investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	104,00	600.000.000	25	500.000.000	89,21	28.800.000	356,84	5,76	89,21	28.800.000	85,78	4,8	Dinas Penanaman Modal, PTSP, NakerTrans
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat lapis bawah (S19)	Angka Kemiskinan	16.446	1.834.287.850	16.941	3.622.902.064	17.23	3.539.682.575	101,7	97,7	4,88	6.061.982.575	3%	330	Dinas Sosial
Program Perlindungan dan Pemberian Jaminan Sosial	Persentase jumlah KK miskin yang mendapatkan layanan kartu MACCA (%)	100	1.805.137.850	100	3.393.690.164	100	3.367.310.675	100	99,22	100	3.367.310.675	100	187	Dinas Sosial
Program Pemenuhan Hak-Hak dasar penduduk miskin	Persentase RTM yang dibantu dalam pemenuhan hak dasar/ beras sejahtera(%)	100		100	123.825.000	100	120.735.000	100	97,5	100	120.735.000	100	#DIV/0!	Dinas Sosial
Program Pemberian Pertimbangan, pendapat, dan pendampingan hukum keluarga miskin	Warga miskin yang mendapat bantuan hukum (%)	100	29.150.000	100	53.750.000	0		0		0		0		Bag. Hukum Setda Kab. Soppeng
Program Usaha Kemandirian Penduduk Miskin	Persentase penduduk miskin yang dilatih and pemberian modal usaha	0,055		0,18	51.636.900	100	51.636.900	55556	100	100	51.636.900	181818	#DIV/0!	Dinas Sosial
Berkembangnya Lapangan Kerja dan Usaha (S20)	Tingkat Pengangguran terbuka	2,23	735.065.000	2,36	3.427.000.000	99,1	151.200.000	4199,15	4,41	99,10	151.200.000	0,04	20,57	Dinas Penanaman Modal, PTSP, NakerTrans
Program Peningkatan Kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100	734.000.000	100	2.362.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal, PTSP, NakerTrans
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	67,31	1.065.000	67,31	1.065.000.000	99,05	151.200.000	147,15	14,20	99,05	151.200.000	147,15	14197	Dinas Penanaman Modal, PTSP, NakerTrans
Meningkatnya daya saing UKM dan Industri (S21)	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	17,49	6.453.000.000	15,9	5.853.000.000	12,43	1.109.950.000	78,2	18,96	12,43	1.109.950.000	71,07	17,2	Dinas Perdagangan, Perindustrian, UKM dan Koperasi
	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	13,71		12,58		9,93		78,9		9,93		72,43		Dinas Perdagangan, Perindustrian, UKM dan Koperasi
Program Peningkatan kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	91,91	156.000.000	91	156.000.000	80,58	173.635.000	88,55	111,3	80,58	173.635.000	87,67	111	Dinas Perdagangan, Perindustrian, UKM dan Koperasi
Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha MIKRO dan kecil	98,95	397.000.000	98,94	397.000.000	99,06	277.093.000	100,12	69,8	99,06	277.093.000	100,11	69,8	Dinas Perdagangan, Perindustrian, UKM dan Koperasi
Program pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah pasar tipe C	4	5.000.000.000	1	4.400.000.000	0	599.812.000	0	13,63	0	599.812.000	0	12,0	Dinas Perdagangan, Perindustrian, UKM dan Koperasi
Program pengembangan dan peningkatan kemampuan teknologi industri kecil menengah	Cakupan bina kelompok pengrajin	50	900.000.000	50	900.000.000	50	59.410.000	100	6,60	50	59.410.000	100	6,6	Dinas Perdagangan, Perindustrian, UKM dan Koperasi



2.2.2. Evaluasi pelaksanaan RKPD sampai Tahun 2021

Tabel 2. 310 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Sampai Tahun 2021

No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**															
1	1,1	**Bidang Urusan Kesehatan**														Dinas Kesehatan	
	1.1.1	**Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan**	**Persentase Sarana dan prasarana kesehatan yang sesuai standar (%)**	41,16		68,29	20.665.363.959				**11.005.487.927**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			Dinas Kesehatan	
	1.1.1.1	Pengadaan , peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)	Jumlah UPTD yang mendapatkan peningkatan sarana dan prsarana kesehatan (Paket)					1	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Kesehatan	
	1.1.1.2	Pengadaan , peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan (DAK)	Jumlah UPTD yang mendapatkan peningkatan sarana dan prsarana kesehatan (Paket)					17	11.178.626.000	17	11.005.487.927	100,00 %	98,45%			Dinas Kesehatan	
	1.1.2	**Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan**	**Persentase Masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan**	100		100	40.508.605.790				**46.746.305.002**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				
	1.1.2.1	Jaminan Pelayanan Kesehatan Nasional (JKN) -Kapitasi	Cakupan Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (100%)					100	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Kesehatan	
	1.1.2.2	Jaminan Pelayanan Kesehatan Nasional (JKN) - Non Kapitasi	Jumlah Peserta JKN yang terdaftar di FKTP (Jiwa)					272000	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Kesehatan	
	1.1.2.3	pelayanan kesehatan masyarakat (Umum)	Jumlah pelayanan kesehatan masyarakat (Umum) (100%)					100	5.740.000.000	100	5.451.896.500	100,00 %	94,98%			Dinas Kesehatan	
	1.1.2.4	Pelayanan Kesehatan Gratis	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Kesehatan Gratis (Jiwa)					242720	40.354.077.102	242720	40.354.077.102	100,00 %	100,00 %			Dinas Kesehatan	
	1.1.2.5	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Puskesmas (JKN-Kapitasi)	Jumlah sarana dan prasarana puskesmas yang diadakan (Paket)					1	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Kesehatan	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	1.1.2.6	Peningkatan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu	Cakupan Pelayanan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu yang susuai Standar (100%)					100	1.065.600.000	100	940.331.400	100,00 %	88,24%			Dinas Kesehatan	
	1.1.3	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas**	**Persentase Puskesmas BLUD (%)**	70,59		35,29	8.657.440.346				**19.338.107.597**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			Dinas Kesehatan	
	1.1.3.1	Penyusunan profil Kesehatan	Jumlah Dokumen Profil yang Tersusun (Dokumen)					25	2.000.000	25	2.000.000	100,00 %	100,00 %			Dinas Kesehatan	
	1.1.3.2	sosialisasi dan Monev SPM	Jumlah Kegiatan Monev yang diadakan (Kali)					2	2.450.000	2	2.450.000	100,00 %	100,00 %			Dinas Kesehatan	
	1.1.3.3	Pengembangan BLUD Puskesmas	Jumlah Puskesmas yan BLU (Puskesmas)					17	4.750.000	17	4.748.000	100,00 %	99,96%			Dinas Kesehatan	
	1.1.3.4	Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang menerapkan BLUD (Puskesmas)					17	21.261.318.513	17	19.328.909.597	100,00 %	90,91%			Dinas Kesehatan	
	1.1.4	**Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD**	**Persentase Puskesmas BLUD (%)**	70,59		35,29	8.657.440.346				**76.775.359.791**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			Dinas Kesehatan	
	1.1.4.1	Penyediaan dan peningkatan pelayanan BLUD-RSUD	Jumlah paket Pelayanan dan pendukung pelayanan yang mempertimbangkan kebutuhan laki laki dan perempuan (Paket)					3	68.768.724.737	3	76.775.359.791	100,00 %	111,64 %			Dinas Kesehatan	
	1.1.5	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit**	**Akreditasi Rumah Sakit**	PARIPURNA		PARIPURNA	61.066.400				**64.095.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			Dinas Kesehatan	
	1.1.5.1	Penyusunan Standar Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Jenis Dokumen Akreditasi (Dokumen)					5	63.800.000	1	8.670.000	20,00%	13,59%			Dinas Kesehatan	
	1.1.5.2	Peningkatan Pelayanan Rekam Medik Rumah Sakit	Jumlah Unit Pelayanan Rekam Medis Rumah Sakit (Unit)					1	55.500.000	1	55.425.000	100,00 %	99,86%			Dinas Kesehatan	
	1.1.6	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	Persentase puskesmas yang terakreditasi (%)	100		100	906.384.008				**523.074.850**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			Dinas Kesehatan	
	1.1.6.1	Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)	Jumlah Puskesmas Yang Terakreditasi (Puskesmas)					11	1.154.280.000	0	506.809.850	0,00%	43,91%			Dinas Kesehatan	
	1.1.6.2	Peningkatan Kesehatan Primer dan Tradisional	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan program kesehatan Primer dan Trasional (Puskesmas)					17	15.150.000	17	14.985.000	100,00 %	98,91%			Dinas Kesehatan	
	1.1.6.3	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dengan kinerja baik (Pelayanan)					2	1.280.000	2	1.280.000	100,00 %	100,00 %			Dinas Kesehatan	
	1.1.7	**Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan**	**Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan (%)**	98		98	3.596.538.972				**2.225.766.115**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			Dinas Kesehatan	
	1.1.7.1	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah Paket Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Sesuai Kebutuhan (Paket)					3	2.056.900.000	3	2.056.650.115	100,00 %	99,99%			Dinas Kesehatan	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	1.1.7.2	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	Jumlah Sarana Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit Sesuai Standar (Sarana)					55	12.600.000	0	1.400.000	0,00%	11,11%			Dinas Kesehatan	
	1.1.7.3	Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah Kategori Pengguna Obat Rasional (Kategori)					3	190.738.000	3	101.959.000	100,00%	53,46%			Dinas Kesehatan	
	1.1.7.4	Peningkatan pengawasan Keamanan Pangan dan bahan berbahaya	Jumlah Pengawasan Terhadap Keamanan pangan dan bahan berbahaya yang memenuhi standar (Jenis)					2	247.615.000	1	65.757.000	50,00%	26,56%			Dinas Kesehatan	
	1.1.8.	**Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**									**13.000.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			Dinas Kesehatan	
	1.1.8.1	Pengembangan Media Promosi dan informasi sadar hidup sehat	Jumlah Media Promosi yang Diadakan (Paket)					1	8.000.000	1	8.000.000	100,00%	100,00%			Dinas Kesehatan	
	1.1.8.2	Penyuluhan Masyarakat Pola hidup sehat	Jumlah Rumah Tangga Ber-PHBS (Rumah Tangga)					39479	-	39479	-	100,00%	0,00%			Dinas Kesehatan	
	1.1.8.3	Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan	Jumlah Tenaga Penyuluh yang dilatih (Orang)					34	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Kesehatan	
	1.1.8.4	Kampanye Bahaya merokok	Jumlah Kegiatan Kampanye Bahaya Merokok yang dilaksanakan (Kegiatan)					1	5.000.000	1	5.000.000	100,00%	100,00%			Dinas Kesehatan	
	1.1.9	**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**									**12.674.769.557**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			Dinas Kesehatan	
	1.1.9.1	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium(GAKY), Kurang Vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapatkan Perawatan (%)					100	160.000.000	100	159.481.575	100,00%	99,68%			Dinas Kesehatan	
	1.1.9.2	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Prevalensi Gizi Kurang (%)					15	6.000.000	15	6.000.000	100,00%	100,00%			Dinas Kesehatan	
	1.1.9.3	Bantuan Operasional Kesehatan	Cakupan Bantuan Operasional Kesehatan yang Dilaksanakan (Persen)					100	17.405.973.000	55	12.509.287.982	55,00%	71,87%			Dinas Kesehatan	
	1.1.10	**Program Pengembangan Lingkungan Sehat**									**422.430.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			Dinas Kesehatan	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	1.1.10.1	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	Jumlah Akses Sanitasi Primer yang layak bagi masyarakat (%)					54	436.680.000	54	422.430.000	100,00%	96,74%			Dinas Kesehatan	
	1.1.10.2	Sosialisasi Kebiajakan Lingkungan sehat	Jumlah Kawasan yang STBM (Kawasan)					18	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Kesehatan	
	1.1.10.3	Penyuluhan menciptakan Lingkungan sehat	Jumlah Sarana Publik yang Saniter (Sarana)					265	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Kesehatan	
	1.1.10.4	Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman	Jumlah Dokumen Sanitasi yang Tersusun (Dokumen)					1	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Kesehatan	
	1.1.11	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit**									**3.817.075.175**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			Dinas Kesehatan	
	1.1.11.1	Penyemprotan /fogging sarang nyamuk	Jumlah Kasus Penderita DBD yang ditangani (Fokus)					13	50.000.000	13	49.513.000	100,00%	99,03%			Dinas Kesehatan	
	1.1.11.2	Vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Jumlah Sasaran Balita dan anak sekolah yang di imunisasi (Balita dan 10.823 Anak Sekolah)					22164	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Kesehatan	
	1.1.11.3	Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Angka Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif (%)					100	243.000.000	100	183.628.475	100,00%	75,57%			Dinas Kesehatan	
	1.1.11.4	Peningkatan Imunisasi	Cakupan UCI (%)					100	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Kesehatan	
	1.1.11.5	Peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah	Cakupan Penemuan AFP (Kasus)					1	3.639.250.000	1	3.583.933.700	100,00%	98,48%			Dinas Kesehatan	
	1.1.12	**Program Peningkatan pelayanan Kesehatan Ibu, Balita, Anak dan Lansia**									**107.630.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			Dinas Kesehatan	
	1.1.12.1	Jaminan Pesalinan (DAK Non isik)	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (%)					100	1.731.732.500	27,5	107.630.000	27,50%	6,22%			Dinas Kesehatan	
	1.1.13	**Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan prasarana Rumah Sakit**									**19.389.545.920**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			Dinas Kesehatan	
	1.1.13.1	Pembangunan Rumah Sakit	Jumlah Unit Gedung Rumah Sakit yang Terbangun (Bangunan)					1	4.111.800.000	1	3.955.595.500	100,00%	96,20%			Dinas Kesehatan	
	1.1.13.2	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah Alat Kesehatan Rumah Sakit yang diadakan (Paket)					5	13.241.136.500	5	13.236.826.920	100,00%	99,97%			Dinas Kesehatan	
	1.1.13.3	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien,	Jumlah Perlengkapan RT RS yang diadakan (Unit)					2	2.212.503.500	2	2.197.123.500	100,00%	99,30%			Dinas Kesehatan	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		laundry, ruang tunggu dll)															
	1.1.14	**Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit**	Persentase kelayakan peralatan dan pelayanan pada rawat jalan, rawat inap dan penunjang medis (%)	80		70	122.436.775				**98.273.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			Dinas Kesehatan	
	1.1.14.1	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Jumlah Sarana Rumah Sakit yang terpelihara (Jenis Bangunan)					16	10.000.000	16	10.000.000	100,00%	100,00%			Dinas Kesehatan	
	1.1.14.2	Pemeliharaan ruitn/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah Sarana Rumah Sakit yang terpelihara (Unit)					783	80.000.000	783	79.968.000	100,00%	99,96%			Dinas Kesehatan	
	1.1.14.3	Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah	Jumlah Mobil AMbulance yang Terpelihara (Unit)					11	20.000.000	8	8.305.000	72,73%	41,53%			Dinas Kesehatan	
	1.1.15	**Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan**									**81.996.500**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			Dinas Kesehatan	
	1.1.15.1	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)					23	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Kesehatan	
	1.1.15.2	Peningkatan Mutu Alat Kesehatan dan PKRT	Jumlah Sarana Kesehatan yang Dilakukan Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT (Sarana)					19	85.000.000	19	81.996.500	100,00%	96,47%			Dinas Kesehatan	
	1.1.16	**Program Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Melahirkan**									**6.000.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			Dinas Kesehatan	
	1.1.16.1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pesentase Ibu Hamil mendapatkan Pelayanan Ibu Hamil (%)					100	6.000.000	100	6.000.000	100,00%	100,00%			Dinas Kesehatan	
	1.1.16.2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan (%)					100	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Kesehatan	
	1.1.17	**Program Pelayanan Bayi Baru Lahir, Balita dan Anak Usia Pendidikan Dasar serta Pelayanan Kesehatan Usia lanjut**									**55.994.400**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			Dinas Kesehatan	
	1.1.17.1	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%)					100	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Kesehatan	
	1.1.17.2	Pelayanan Kesehatan Balita	Pesentase Anak Usia 0-59 Bulan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar (%)					100	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Kesehatan	
	1.1.17.3	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pesentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar (%)					100	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Kesehatan	
	1.1.17.4	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pesentase Warga Negara Usia 60 tahun ke atas yang Skrining Kesehatan Sesuai Standar (%)					100	56.000.000	100	55.994.400	100,00%	99,99%			Dinas Kesehatan	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	1.1.18	**Program Pelayanan Kesehatan Usia Produktif dan Pencegahan Penyakit**									**11.900.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			Dinas Kesehatan	
	1.1.18.1	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase Warga negara usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)					100	4.200.000	100	4.200.000	100,00 %	100,00 %			Dinas Kesehatan	
	1.1.18.2	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehtaan sesuai standar (%)					100	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Kesehatan	
	1.1.18.3	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	Persentase Penyandang DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%)					100	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Kesehatan	
	1.1.18.4	Pelayanan Kesehatan Jiwa pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%)					100	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Kesehatan	
	1.1.18.5	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB	Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar (%)					100	4.200.000	100	4.200.000	100,00 %	100,00 %			Dinas Kesehatan	
	1.1.18.6	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Terinfeksi HIV	Persentase Orang Berisiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV sesuai Standar (%)					100	4.200.000	100	3.500.000	100,00 %	83,33%			Dinas Kesehatan	
2	1,2	**Pendidikan**															
	1.2.1	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	**APK PAUD**								**2.392.426.988**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			DISDIKBUD	
	1.2.1.1	Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana/infrastruktur PAUD negeri	Jumlah Sarana dan Prasarana PAUD Negeri yang dibangun / diadakan (Lembaga)					15	1.827.829.000	15	1.541.404.000	100,00 %	84,33%			DISDIKBUD	
	1.2.1.2	Sosialisasi PAUD dan deteksi tumbuh kembang anak	Jumlah peserta sosialisasi yang PAUD yang dilaksanakan (Orang)					95	-	0	-	0,00%	0,00%			DISDIKBUD	
	1.2.1.3	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan ank usia dini	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan (Orang Peserta Pelatihan)					50	-	50	-	100,00 %	0,00%			DISDIKBUD	
	1.2.1.4	Pembinaan lembaga penyelenggara PAUD	Jumlah pengelola PAUD yang dibina (orang)					40	-	40	-	100,00 %	0,00%			DISDIKBUD	
	1.2.1.5	Penyelenggaraan pendidikan anak usia diniPenyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Jumlah Penyelenggara PAUD yang dibina	60	6.565.747.800			15	1.333.200.000	15	821.022.988	100,00 %	61,58%			DISDIKBUD	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	1.2.1.6	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Jumlah Lembaga PAUD Negeri yang di Bina (TK Negeri We Temmauleng Marioriawa) (Lembaga TK Negeri)					1	1.333.200.000	0,44	821.022.988	44,00%	61,58%			DISDIKBUD	
	1.2.1.22	Lomba Apresiasi Gebyar PAUD	Jenis lomba yang dilaksanakan (Kali)					5	30.000.000	5	30.000.000	100,00%	100,00%			DISDIKBUD	
	1.2.2	**Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun**	**APK SD Sederajat, APK SMP Sederajat**								**30.507.740.800**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				
	1.2.2.1	Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan tingkat SMP	Jumlah sarana dan prasarana SMP Negeri yang dibangun/diadakan (Paket)					1	300.000.000	1	74.535.600	100,00%	24,85%			DISDIKBUD	
	1.2.2.2	Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan dasar tingkat SD (DAK)	Jumlah sekolah SD/Sederajat yang mendapatkan sarana dan prasarana (Sekolah)					250	39.480.120.000	250	22.999.922.700	100,00%	58,26%			DISDIKBUD	
	1.2.2.3	Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan dasar tingkat SMP (DAK)	Jumlah sekolah SMP/Sederajat yang mendapatkan sarana dan prasarana (Sekolah)					38	8.407.191.000	38	7.433.282.500	100,00%	88,42%			DISDIKBUD	
	1.2.3	**Program Pendidikan Gratis**									**897.270.300**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				
	1.2.3.1	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan gratis (APBD Kabupaten)	Jumlah dokumen yang dibuat (Dokumen)					1	1.580.300	1	1.580.300	100,00%	100,00%			DISDIKBUD	
	1.2.3.2	Pendidikan gratis pendidikan dasar (APBD-Kabupaten)	% SDN yang menyelenggarakan Pendidikan Gratis					100	904.045.000	100	895.690.000	100,00%	99,08%			DISDIKBUD	
	1.2.3.3	Pendidikan gratis pendidikan dasar (APBD-Kabupaten)	Terlaksananya Pendidikan Gratis Jenjang SD (SDN 63 Kawarang Kec. Marioriawa) (%)					100		100	895.690.000	100,00%	0,00%			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.2.4	**Program Peningkatan Layanan Pendidikan**									**3.613.080.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				
	1.2.4.1	Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan siswa kurang mampu	Jumlah siswa tingkat SD, SMP dan SMA yang diberikan Beasiswa (Org)					3	45.000.000	3	30.000.000	100,00%	66,67%			DISDIKBUD	
	1.2.4.2	Pemberian beasiswa bagi Mahasiswa berprestasi dan mahasiswa kurang mampu	Jumlah Mahasiswa S1 dan S2 yang diberikan beasiswa (Org)					700	4.950.000.000	700	3.441.930.000	100,00%	69,53%			DISDIKBUD	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	1.2.4.3	Pelaksanaan Bimbingan Belajar Bagi Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti bimbingan belajar (Siswa)					290	141.150.000	290	141.150.000	100,00%	100,00%			DISDIKBUD	
	1.2.5	**Program Pendidikan Non Formal**									**1.399.635.400**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				
	1.2.5.1	Pembangunan, Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana/ Infrastruktur Pendidikan	Jumlah Lembaga yang memperoleh sarana dan prasarana (Lembaga)					6	1.454.947.000	6	1.399.635.400	100,00%	96,20%			DISDIKBUD	
	1.2.6	**Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**									**132.022.220**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				
	1.2.6.1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen yang dibuat (Kali)					4	2.950.000	4	2.938.500	100,00%	99,61%				
	1.2.6.2	Monitoring dan evaluasi Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah	Jumlah dokumen monev (dokumen)					1	7.130.000	1	3.450.000	100,00%	48,39%			DISDIKBUD	
	1.2.6.3	Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)	Jumlah sekolah yang dibina (Sekolah)					50	6.945.000	50	6.945.000	100,00%	100,00%			DISDIKBUD	
	1.2.6.4	Penyediaan barang cetakan sekolah	Jumlah Rapor Yang Dicetak (exp)					1000	70.000.000	1000	69.850.000	100,00%	99,79%			DISDIKBUD	
	1.2.6.5	Pelaksanaan Akreditasi Sekolah	Jumlah sekolah yang difasilitasi (Sekolah)					25	12.800.000	25	12.800.000	100,00%	100,00%			DISDIKBUD	
	1.2.6.6	Penyusunan Profil Pendidikan	Jumlah dokumen yang dibuat (Dokumen)					16	36.088.850	16	36.038.720	100,00%	99,86%			DISDIKBUD	
	1.2.6.7	Penyelenggaraan Ujian Nasional/Ujian Sekolah	persentase siswa yang ikut ujian (persen)					100	7.000.000	0	-	0,00%	0,00%			DISDIKBUD	
	1.2.7	**Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**									**-**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			DISDIKBUD	
	1.2.7.1	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Jumlah guru yang diusulkan untuk menerima sertifikasi (Orang)					0	-	0	-	0,00%	0,00%			DISDIKBUD	
	1.2.7.2	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti uji kompetensi (orang)					100	5.890.000	100	-	100,00%	0,00%			DISDIKBUD	
	1.2.7.3	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Jumlah tenaga pendidik yang ikut pelatihan (orang)					0	-	0	-	0,00%	0,00%			DISDIKBUD	
	1.2.7.4	Pembinaan dan pengembangan karir berkelanjutan	Jumlah guru yang terbina karir berkelanjutan (orang)					0	-	0	-	0,00%	0,00%			DISDIKBUD	
	1.2.8	**Program Pembinaan dan Pengembangan Kesiswaan**									**5.079.062.500**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	1.2.8.1	Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti lomba (Orang)					192	79.312.500	192	79.312.500	100,00%	100,00%			DISDIKBUD	
	1.2.8.2	Penyelenggaraan lomba-lomba bidang kesiswaan	Jumlah lomba yang dilaksanakan (Jenis Lomba)					0	-	0	-	0,00%	0,00%			DISDIKBUD	
	1.2.8.3	Pemberian penghargaan bagi siswa berprestasi	Jumlah siswa berprestasi yang memperoleh penghargaan (orang)					6000	5.000.000.000	6000	4.999.750.000	100,00%	100,00%			DISDIKBUD	
	1.2.9	**Program Dana Bantuan Operasional Bantuan Sekolah**									**16.404.329.699**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				
		Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	**Terlaksananya Penyaluran Dana Bos SD**					**100**	**32.019.772.713**		**16.404.329.699**	**64,07%**	**51,23%**			DISDIKBUD	
	1.2.9.1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Terlaksananya Penyaluran Dana Bos Satuan Pendidikan Negeri (SDN 59 Penre Kec. Marioriawa) (tahun)					1	32.019.772.713	0,7	16.404.329.699	70,00%	51,23%				
	1.2.10	**Program Pendidikan Kesetaraan**									**252.612.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				
	1.2.10.1	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	Jumlah orang yang mengikuti Paket A (Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)) (Orang Peserta Lanjutan)					60	42.900.000	60	33.520.000	100,00%	78,14%			DISDIKBUD	
	1.2.10.2		Jumlah orang yang mengikuti Paket A (Orang)					240		0		0,00%				DISDIKBUD	
	1.2.10.3	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Jumlah orang yang mengikuti Paket B (Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)) (80 Orang Peserta Lanjutan dan 20 orang peserta baru)					100	145.500.000	100	72.202.000	100,00%	49,62%			DISDIKBUD	
	1.2.10.4		Jumlah orang yang mengikuti Paket B (Orang)					360		0		0,00%				DISDIKBUD	
	1.2.10.5	Penyelenggaraan Paket C Setara SMA	Jumlah orang yang mengikuti Paket C (Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)) (Orang)					400	291.600.000	400	146.890.000	100,00%	50,37%			DISDIKBUD	
	1.2.10.6		Jumlah orang yang mengikuti Paket C (Orang)					400		0		0,00%				DISDIKBUD	
3	1,3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**															
	1.3.1	**Program Rehabiltasi/ Pemeliharaan dan pembangunan jalan**									**97.876.116.703**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				
	1.3.1.1	Peningkatan Jalan	Panjang Jalan ditingkatkan statusnya (km)					15,62	70.215.202.005	15,62	69.909.196.004	100,00%	99,56%			PUPR	
	1.3.1.2	Pembangunan /Rehabilitasi Jalan (DAK)	Panjang jalan direhabilitasi secara berkala/ dibangun melalui DAK (Km)					8,8	27.295.872.000	8,8	27.290.988.799	100,00%	99,98%			PUPR	
	1.3.1.3	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	Panjang Jalan direhabilitasi secara rutin (Km)					37,5	680.000.000	37,5	675.931.900	100,00%	99,40%			PUPR	
	1.3.2'	**Program Rehabiltasi/ Pemeliharaan dan**									**251.974.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		pembangunan jembatan															
	1.3.2.1	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan terbangun (Unit)					0	3.000.000	0	3.000.000	0,00%	100,00%			PUPR	
	1.3.2.2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi (Unit)					10	250.000.000	10	248.974.000	100,00%	99,59%			PUPR	
	1.3.3.	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya**									**16.577.618.571**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				
	1.3.3.1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Panjang saluran yang terpelihara (meter/1 Buah)					5722	7.595.561.000	5722	7.307.891.820	100,00%	96,21%			PUPR	
	1.3.3.2	Pembangunan jaringan Irigasi	Panjang saluran yang dibangun (meter)					0	190.000.000	0	189.530.000	0,00%	99,75%			PUPR	
	1.3.3.3	Pengelolaan Irigasi Secara Partisipatif	Jumlah DI yang terehabilitasi secara partisipatif (Daerah Irigasi)					3	10.129.944.000	3	8.886.996.751	100,00%	87,73%			PUPR	
	1.3.3.4	Pengadaan Peralatan Penunjang Operasi	Jumalah peralatan OP yang diadakan (Paket)					1	-	0	-	0,00%	0,00%			PUPR	
	1.3.3.5	Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan	Panjang saluran yang dipelihara (Meter)					50	223.200.000	30	193.200.000	60,00%	86,56%			PUPR	
	1.3.3.6	Penyusunan sistem informasi database irigasi	Jumlah Dokumen DI yang tersusun (Dokumen)					1	-	0	-	0,00%	0,00%			PUPR	
	1.3.3.7	Pendampingan komisi irigasi	Jumlah sekretariat komisi irigasi yang terfasilitasi (Paket)					1	-	0	-	0,00%	0,00%			PUPR	
	1.3.4	**Program Pembangunan sarana dan prasarana air bersih**									**803.870.255**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				
	1.3.4.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Jumlah SAB yang terbangun (Paket)					1	264.539.255	1	263.870.255	100,00%	99,75%			PUPR	
	1.3.4.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Program Nasional PAMSIMAS	Jumlah SAB yang terbangun (PAMSIMAS) (Paket)					2	540.000.000	2	540.000.000	100,00%	100,00%			PUPR	
	1.3.5	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan dan Air Limbah**									**2.816.618.500**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				
	1.3.5.1	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	Jumlah sarana air limbah yang terbangun (Paket)					1	-	1	-	100,00%	0,00%			PUPR	
	1.3.5.2	Pelaksanaan Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Jumlah Dokumen sanitasi yang tersusun (Dokumen)					1	-	1	-	100,00%	0,00%			PUPR	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	1.3.5.3	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK)	Jumlah sarana air limbah yang terbangun (Paket)					5	1.948.612.000	5	1.924.610.300	100,00 %	98,77%			PUPR	
	1.3.5.4	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK Penugasan)	Jumlah sarana air limbah yang terbangun (Paket)					3	750.000.000	3	749.822.900	100,00 %	99,98%			PUPR	
	1.3.5.5	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah - Layanan Lumpur Tinja	Jumlah sarana air limbah (LLT) yang tersedia (Paket)					1	142.200.000	1	142.185.300	100,00 %	99,99%			PUPR	
	1.3.5.6	Penyusunan Rencana Induk/Database Air Limbah	Jumlah Dokumen Rencana Induk/Database Air Limbah yang tersusun (Dokumen)					1	-	1	-	100,00 %	0,00%			PUPR	
	1.3.6	**Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong**									**-**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				
	1.3.6.1	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	Panjang drainase yang terbangun (km)					2	-	0	-	0,00%	0,00%			PUPR	
	1.3.6.2	Penyusunan Rencana Induk/Database Saluran Drainase/Gorong-gorong	Jumlah dokumen Rencana Induk/Database saluran drainase/gorong-gorong yang tersusun (Dokumen)					1	-	0	-	0,00%	0,00%			PUPR	
	1.3.7	**Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang**									**19.999.400**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				
	1.3.7.1	Pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang (kali)					12	20.000.000	12	19.999.400	100,00 %	100,00 %			PUPR	
	1.3.8	**Program Perencanaan Tata Ruang**									**-**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				
	1.3.8.1	Penyusunan rencana tata ruang wilayah	Jumlah dokumen ranperda/perda RTRW yang direview/direvisi/disusun (Dokumen)					1	-	0	-	0,00%	0,00%			PUPR	
	1.3.8.2	Penyusunan Database Tata Ruang	Jumlah dokumen database tata ruang yang tersusun (Dokumen)					1	-	0	-	0,00%	0,00%			PUPR	
	1.3.8.3	Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Jumlah dokumen KLHS terkait produk tata ruang yang tersusun (Dokumen)					2	-	0	-	0,00%	0,00%			PUPR	
	1.3.9	**Program pemeliharaan bantaran, Tanggul dan Normalisasi sungai**									**668.649.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				
	1.3.9.1	Pembangunan turap/talud/bronjong	Panjang turap/talud/bronjong yang terbangun (m)					700	674.607.000	700	668.649.000	100,00 %	99,12%			PUPR	
	1.3.9.2	Pengerukan/Normalisasi Sungai	Panjang sungai yang dinormalisasi (km)					2	-	0	-	0,00%	0,00%			PUPR	
	1.3.9.3	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang tanggul sungai yang terbangun (meter)					300	-	0	-	0,00%	0,00%			PUPR	
	1.3.9.4	Penyusunan Sistem Informasi / Database Sungai	Jumlah dokumen database yang tersusun (dokumen)					1	-	0	-	0,00%	0,00%			PUPR	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	1.3.10	**Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan**									**340.239.950**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				
	1.3.10.1	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan	Jumlah alat ukur dan bahan lab. kebinamargaan yang diadakan (Set)					1	-	0	-	0,00%	0,00%			PUPR	
	1.3.10.2	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Jumlah Alat berat direhabilitasi (Unit)					6	340.250.000	6	340.239.950	100,00%	100,00%			PUPR	
	1.3.10.3	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan	Jumlah alat laboratorium yang dipelihara (Unit)					5	-	0	-	0,00%	0,00%			PUPR	
	1.3.11	**Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan**									**134.550.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				
	1.3.11.1	Pemutakhiran Data Kondisi Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen database jalan dan jembatan yang tersusun (Dokumen)					2	135.000.000	2	134.550.000	100,00%	99,67%			PUPR	
	1.3.12	**Program Pengaturan Jasa Konstruksi**									**3.199.875**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				
	1.3.12.1	Penerbitan Rekomendasi IUJK	Jumlah rekomendasi IUJK yang direkomendasikan (Rekomendasi)					35	3.200.000	35	3.199.875	100,00%	100,00%			PUPR	
	1.3.12.2	Pembinaan Jasa Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang dibina (Orang)					40	-	0	-	0,00%	0,00%			PUPR	
	1.3.13	**Program Penataan Bangunan dan Lingkungan**									**3.228.918.984**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				
	1.3.13.1	Pembangunan Gedung/ Rumah Dinas/ Rumah Jabatan	Jumlah bangunan gedung/ rumah dinas/ rumah jabatan yang terbangun (Unit)					0	-	0	-	0,00%	0,00%			PUPR	
	1.3.13.2	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/ Rumah Dinas/ Rumah Jabatan	Jumlah bangunan yang direhabilitasi (Unit)					6	1.784.000.000	6	1.630.030.550	100,00%	91,37%			PUPR	
	1.3.13.3	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	Jumlah Dokumen perencanaan yang tersusun (Dokumen)					1	93.000.000	1	92.870.000	100,00%	99,86%			PUPR	
	1.3.13.4	Pembangunan prasarana bangunan gedung	Jumlah Prasarana Bangunan Gedung yang dibangun (Unit)					4	997.600.934	4	946.781.334	100,00%	94,91%			PUPR	
	1.3.13.5	Pembangunan / Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Panjang jalan lingkungan yang dibangun/direhabilitasi (Ruas)					3	553.993.100	3	544.217.000	100,00%	98,24%			PUPR	
	1.3.13.6	Penyusunan RPI2JM Keciptakaryaan	Jumlah dokumen RPI2JM yang tersusun (Dokumen)					1	5.400.000	1	5.395.850	100,00%	99,92%			PUPR	
	1.3.13.7	Perizinan dan Pengawasan Bangunan	Jumlah rekomendasi IMB yang ditertibkan (Rekomendasi)					50	11.575.000	34,75	9.624.250	69,50%	83,15%			PUPR	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
4	1.4.	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**														PERKIM	
	1.4.1	**Program Pengembangan Perumahan**	**Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni (%)**					**100**	**4.225.507.970**	**0**	**3.414.489.150**	**0,00%**	**80,81%**			PERKIM	
	1.4.1.1		Jumlah Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni (%)					100		0						PERKIM	
	1.4.1.2	Pembangunan/ Perbaikan Rumah Sehat Layak Huni	Jumlah rumah tinggal yang dibangun/ direhabilitasi (Rumah)					204	3.354.700.000	202	3.333.753.250	99,02%	99,38%			PERKIM	
	1.4.1.3	Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Jumlah rumah tinggal korban bencana yang dibangun/ direhabilitasi (Rumah)					20	25.150.000	25	25.149.900	125,00 %	100,00 %			PERKIM	
	1.4.1.4	Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	Jumlah Dokumen yang dihasilkan (Dokumen)					1	55.750.000	1	55.586.000	100,00 %	99,71%			PERKIM	
	1.4.1.5	Sosialisasi Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi (Orang)					100	-	0	-	0,00%	0,00%			PERKIM	
	1.4.2	**Program Pengembangan Kawasan Permukiman**	**Persentase Permukiman yang Tertata (%)**					**70**	**379.000.000**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**				
	1.4.2.1	Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah PSU yang dibangun (Rumah)					40	-	0	-	0,00%	0,00%			PERKIM	
6	1,5	**Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**															
	1.5.1	**Program Peningkatan dan Kesiagaan serta Pencegahan Bahaya Kebakaran**									**3.194.099.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			SATPOLPP DAMKAR	
	1.5.1.1	Kegiatan penyuluhan dan pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah lokasi penyuluhan (Kecamatan)					8	46.200.000	8	14.400.000	100,00 %	31,17%			SATPOLPP DAMKAR	
	1.5.1.2	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah jenis sarana dan prasarana pencegahan kebakaran (Jenis)					4	218.950.000	4	120.575.000	100,00 %	55,07%			SATPOLPP DAMKAR	
	1.5.1.3	Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	Jumlah tenaga pemadam kebakaran (Orang (210 laki-laki, 14 perempuan))					224	3.079.674.000	224	3.059.124.000	100,00 %	99,33%			SATPOLPP DAMKAR	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	1.5.2	**Program Peningkatan Kapasitas Keamanan dan Ketertiban**									**4.430.469.400**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				
	1.5.2.1	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah anggota sat pol pp (Orang (259 laki-laki, 50 perempuan)					309	3.708.150.000	309	3.690.950.000	100,00%	99,54%			SATPOLPP DAMKAR	
	1.5.2.2	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah patroli keamanan yang dilaksanakan (Hari)					365	884.701.560	365	739.519.400	100,00%	83,59%			SATPOLPP DAMKAR	
	1.5.3	**Program pengembangan dan pembinaan PPNS Kabupaten/ Kota**									-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				
	1.5.3.1	Pembinaan PPNS	Persentase PPNS yang terbina (Orang)					3	-	0	-	0,00%	0,00%			SATPOLPP DAMKAR	
	1.5.4	**Program Perlindungan Masyarakat**									-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				
	1.5.4.1	Pengembangan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah anggota linmas yang terbina (Orang)					1566	-	783	-	50,00%	0,00%			SATPOLPP DAMKAR	
	1.5.5	**Program Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum**									**128.240.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				
	1.5.5.1	Penegakan dan pengawasan Perda	Jumlah penegakan dan pengawasan perda (Kali)					72	112.600.000	72	111.240.000	100,00%	98,79%			SATPOLPP DAMKAR	
	1.5.5.2	Kegiatan pelatihan dasar/kesamaptaan Sat. Pol. PP	Jumlah sat pol pp yang terbina (Orang)					309	17.033.863	309	17.000.000	100,00%	99,80%			SATPOLPP DAMKAR	
	1.6.	**Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**															
	1.6.1	**Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan**									**111.505.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				
	1.6.1.1	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Tersusunnya laporan rawan/potensi bencana (Dokumen)					1	111.625.000	1	111.505.000	100,00%	99,89%			BPBD	
	1.6.2	**Program tanggap darurat dan logistik**									**845.072.900**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				
	1.6.2.1	Penyediaan Peralatan dan Logistik Bencana	Jumlah peralatan dan logistik (Paket)					1	204.025.000	1	203.939.800	100,00%	99,96%			BPBD	
	1.6.2.2	Penanganan Darurat Bencana	Tertanganinya penanganan darurat (Paket)					1	150.125.000	1	149.886.800	100,00%	99,84%			BPBD	
	1.6.2.3	Pemberdayaan TRC	Jumlah anggota TRC (Orang)					55	494.750.000	55	491.246.300	100,00%	99,29%			BPBD	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	1.6.3	**Program rehabilitasi/ rekonstruksi pasca bencana**									**10.133.720.616**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				
	1.6.3.1	Kegiatan pendataan dan pelaporan kerusakan akibat bencana	Tersedianya laporan kerusakan bencana (dokumen)					1	8.937.500	1	8.936.500	100,00 %	99,99%			BPBD	
	1.6.3.2	Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana	% Kerusakan dan kerugian akibat bencana yang di rehabilitasi / rekonstruksi (paket)					1	10.129.609.000	1	10.124.784.116	100,00 %	99,95%			BPBD	
	1,7	**Sosial**															
	1.7.1	**Program Perlindungan dan Pemberian Jaminan Sosial**	**Persentase (jumlah) KK Miskin yang terlayani (%)**					**100**	**1.590.415.000**	**0**	**3.366.710.675**	**0,00%**	**211,69 %**			Dinas Sosial	
	1.7.1.1	Peningkatan kemapuan (capacity bulding) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin KAT dan PMKS lainnya	Jumlah Petugas yang mendapatkan Penguatan kapasitas dan melakukan pendampingan sosial (PKH dan UPPKH) (Orang)					31	102.549.500	31	100.274.500	100,00 %	97,78%			Dinas Sosial	
	1.7.1.2	Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota	Persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan (%)					100	2.230.117.364	100	2.423.722.000	100,00 %	108,68 %			Dinas Sosial	
	1.7.1.3	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Persentase Warga Miskin yang terlayani BPJS (%)					100	21.600.000	100	21.600.000	100,00 %	100,00 %			Dinas Sosial	
	1.7.1.4	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Persentase anak panti asuhan dan panti cacat yang mendapatkan bantuan (%)					100	109.500.000	100	103.380.875	100,00 %	94,41%			Dinas Sosial	
	1.7.1.5	Pendataan dan pengelolaan data bagi warga miskin	Persentase Warga Miskin yang terdata (%)					100	82.015.000	100	607.228.300	100,00 %	740,39 %			Dinas Sosial	
	1.7.1.6	Pelestarian, kepahlawanan, keperintisan, dan kestiakawanan sosial	Jumlah TMP yang terpelihara, Jumlah KeluargaVeteran yang dibantu (%)					100	113.400.000	100	110.505.000	100,00 %	97,45%			Dinas Sosial	
	1.7.2	**Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penduduk Miskin**	**Persentase RTM yang dibantu dalam pemenuhan hak dasar/ beras sejahtera (%)**					**100**	**356.600.000**	**0**	**120.735.000**	**0,00%**	**33,86%**			Dinas Sosial	
	1.7.2.1	Pendataan , pengelolaan data , monitoring dan Evaluasi Penerima Raskin	Jumlah RT Miskin yang di data dan mendapat Raskin (%)					100	123.825.000	100	120.735.000	100,00 %	97,50%			Dinas Sosial	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	1.7.3	**Program Usaha Kemandirian Penduduk Miskin**	**Persentase Penduduk Miskin yang dilatih dan diberi modal usaha (%)**					**100**	**1.310.000.000**	**0**	**51.636.900**	**0,00%**	**3,94%**			Dinas Sosial	
	1.7.3.1	Peningkatan kualitas petani tembakau (klp petani miskin)	Jumlah kelompok tani tembakau yang mendapatkan bantuan (Kelompok)					0	36.636.900	0	36.636.900	0,00%	100,00%			Dinas Sosial	
	1.7.3.2	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Jumlah Kelompok Karang Taruna Yang mendapatkan bantuan (Kelompok)					1	15.000.000	1	15.000.000	100,00%	100,00%			Dinas Sosial	
	1.7.4	**Program Rehabilitasi Sosial**	**Persentase Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis (%)**					**100**	**500.000.000**	**0**	**264.090.000**	**0,00%**	**52,82%**			Dinas Sosial	
	1.7.4.1	Pemberian bantuan kepada PMKS (Kelompok Usaha Bersama) KUBE	Jumlah Kelompok yang memperoleh bantuan KUBE (Kelompok)					6	101.698.000	6	97.000.000	100,00%	95,38%			Dinas Sosial	
	1.7.4.2	Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia	Jumlah lansia yang dibantu (Orang)					80	52.500.000	80	50.990.000	100,00%	97,12%			Dinas Sosial	
	1.7.4.3	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks truma	Jumlah penyandang cacat disabilitas tubuh, tuna wicara, tuna rungu, tuna netra, wanita tuna susila dan eks trauma (kusta) yang dibantu (KK)					41	118.600.000	41	116.100.000	100,00%	97,89%			Dinas Sosial	
	2	**Urusan Wajib non Pelayanan Dasar**															
	2,1	**Tenaga Kerja**															
	2.1.1	**Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja**	**Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)**					**100**	**2.362.000.000**	**0**	**151.200.000**	**0,00%**	**6,40%**			DPMPTSPTKT	
	2.1.1.1	Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah	Tersusunya Data Base Tenaga Kerja Daerah (Persen)					65	152.650.000	65	151.200.000	100,00%	99,05%			DPMPTSPTKT	
	2.1.1.2	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Terlaksanya pelatihan keterampilan bagi pencari kerja (Persen)					75	-	0	-	0,00%	0,00%			DPMPTSPTKT	
	2.1.2	**Program Peningkatan Kesempatan Kerja**	**Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (Persentase)**					**67,31**	**1.065.000.000**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**			DPMPTSPTKT	
	2.1.2.1	Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri	Jumlah Pengangngur dan Setengah Penganggur yang terserap (Persen)					72	-	0	-	0,00%	0,00%			DPMPTSPTKT	
	2.1.3	**Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**	**Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (Persentase)**					**3,25**	**380.000.000**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**			DPMPTSPTKT	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	2.1.3.1	Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Presentase Penyelesaian perselisihan dilluar pengadilan HI (Persen)					10	-	0	-	0,00%	0,00%			DPMPTSPTKT	
	2,2	**Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak**															
	2.2.1	**Program Pemberdayaan Perempuan dan Kestaraan Gender**	**Persentase partsipasi angkatan kerja perempuan (%)**					**98,12**	**330.000.000**	**0**	**23.781.600**	**0,00%**	**7,21%**			DP3APPKB	
	2.2.1.1	Pembinaan Organisasi Perempuan	jumlah organisasi perempuan yang dibina (Organisasi)					20	-	0	-	0,00%	0,00%			DP3APPKB	
	2.2.1.2	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender	Jumlah peserta pelatihan (Orang)					20	-	0	-	0,00%	0,00%			DP3APPKB	
	2.2.1.3	Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	Jumlah kelompok usaha yang mendapatkan bimbingan (orang)					50	3.420.000	50	3.420.000	100,00%	100,00%			DP3APPKB	
	2.2.1.4	Sosialsiasi kebijakan peningkatan peran dan fungsi perempuan di bidang politik dan jabatan publik	Jumlah peserta sosialisasi (Orang)					50	-	0	-	0,00%	0,00%			DP3APPKB	
	2.2.1.5	Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan	Jumlah peserta workshop (Peserta)					50	3.520.000	50	3.520.000	100,00%	100,00%			DP3APPKB	
	2.2.1.6	Workshop penyusunan PPRG	Jumlah peserta workshop (peserta)					50	-	0	-	0,00%	0,00%			DP3APPKB	
	2.2.1.7	Penyusunan Profil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah profil (dokumen)					2	6.800.000	2	6.800.000	100,00%	100,00%			DP3APPKB	
	2.2.1.8	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	jumlah lokus yang dibina (lokus)					34	4.475.000	34	4.475.000	100,00%	100,00%			DP3APPKB	
	2.2.1.9	Penyuluhan ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Jumlah keluarga yang dibina (keluarga)					100	5.566.600	100	5.566.600	100,00%	100,00%			DP3APPKB	
	2.2.3	**Program Peningkatan Kualitas keluarga dan Perlindungan Anak**	**Ratio KDRT (%)**					**0**	**350.000.000**	**0**	**16.285.000**	**#DIV/0!**	**4,65%**			DP3APPKB	
	2.2.3.1	Pertemuan Forum Anak Kabupaten dan Pemilihan Dewan Anak	Jumlah peserta forum anak (Peserta)					165	11.365.000	165	11.365.000	100,00%	100,00%			DP3APPKB	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	2.2.3.2	Pembentukan dan Pengembangan Kota Layak Anak	jumlah kecamatan ramah anak yang dibina (kecamatan)					2	-	0	-	0,00%	0,00%			DP3APPKB	
	2.2.3.3	Sosialisasi Partisipasi Anak dalam Pembangunan	jumlah peserta sosialisasi (peserta)					80	-	0	-	0,00%	0,00%			DP3APPKB	
	2.2.3.4	Pelatihan Pola Asuh Anak dalam Keluarga dan Penghapusan Kekerasan terhadap anak	jumlah peserta pelatihan (Orang)					80	-	0	-	0,00%	0,00%			DP3APPKB	
	2.2.3.5	Sosialsiasi pencegahan anak dari tindak kekerasan	jumlah peserta yang mengikuti sosialisai (peserta)					80	-	0	-	0,00%	0,00%			DP3APPKB	
	2.2.3.6	Sosialisasi Partisipasi Ibu dalam Perlindungan Anak	jumlah peserta sosialisasi (peserta)					150	-	0	-	0,00%	0,00%			DP3APPKB	
	2.2.3.7	Pelatihan peningkatan SDM pelayanan dan pendampingan korban tindak kekerasan	jumlah peserta pelatihan (orang)					30	-	0	-	0,00%	0,00%			DP3APPKB	
	2.2.3.8	Penguatan dan pengembangan kelembagaan P2TP2A	jumlah lembaga yang terlibat dalam penguatan p2tp2a (lembaga)					5	-	0	-	0,00%	0,00%			DP3APPKB	
	2.2.3.9	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	jumlah peserta sosialisasi (peserta)					50	-	0	-	0,00%	0,00%			DP3APPKB	
	2.2.3.10	Pembinaan lembaga dan penyedia layanan bagi anak yang berkebutuhan khusus	jumlah lembaga yg berkebutuhan khusus dibina (lembaga)					4	-	0	-	0,00%	0,00%			DP3APPKB	
	2.2.3.11	Penguatan Kota Layak Anak (KLA)	Jumlah lokus yang di bina (lokasi)					10	4.920.000	10	4.920.000	100,00 %	100,00 %			DP3APPKB	
	2,3	**Pangan**															
	2.3.1	**Program Penyelenggaraan Ketahanan Pangan**									**242.800.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	2.3.1.1	Laporan Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	Laporan Dewan Ketahanan Pangan Tingkat Desa/Kel, Kecamatan dan Kabupaten (Dokumen)					1	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
																dan Ketahanan Pangan	
	2.3.1.2	Pemetaan Daerah Rawan Pangan	Laporan Kondisi Daerah Rawan Pangan melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen)					1	9.600.000	1	9.600.000	100,00 %	100,00 %			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	2.3.1.3	Analisis Ratio Jumlah Penduduk terhadap Kebutuhan Pangan	Laporan Analisis Ratio Jumlah Penduduk Terhadap Kebutuhan Pangan (Dokumen)					1	6.750.000	1	6.750.000	100,00 %	100,00 %			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	2.3.1.4	Koordinasi Kebijakan Perberasan	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Perberasan (Kali)					8	8.350.000	8	8.350.000	100,00 %	100,00 %			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	2.3.1.5	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Jumlah Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah dalam Mengatasi Kerawanan Pangan (Ton)					20	204.300.000	20	203.700.000	100,00 %	99,71%			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	2.3.1.6	Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat	Laporan Akses Pangan Masyarakat (Dokumen)					1	4.800.000	1	4.800.000	100,00 %	100,00 %			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	2.3.1.7	Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien	Pembinaan dan Evaluasi Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia (Gapoktan & Pedagang Pasar)					7	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	2.3.1.8	Pemantauan dan Harga Pangan Pokok.	Laporan Stabilisasi Harga Pangan Strategis (Dokumen)					1	9.600.000	1	9.600.000	100,00 %	100,00 %			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	2.3.2	**Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Pengawasan Keamanan Pangan**									**41.975.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	2.3.2.1	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	Laporan Analisis Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan (Dokumen)					1	24.000.000	1	24.000.000	100,00 %	100,00 %			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	2.3.2.2	Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan melalui P2KP	Pengembangan Tanaman Pekarangan melalui Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (Kelompok)					20	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	2.3.2.3	Promosi dan Sosialisasi Produk Olahan Pangan Lokal	Jumlah Produk Olahan Pangan Lokal yang Dipromosikan (Jenis)					12	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	2.3.2.4	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah Jenis Pangan Segar yang Diuji (Jenis)					3	18.075.000	3	17.975.000	100,00 %	99,45%			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	2.3.2.5	Pembinaan dan Pemantauan dan Sosialisasi Preferensi Pangan Masyarakat (PPM)	Jumlah Frekuensi Pembinaan, Pemantauan dan Sosialisasi Preferensi Pangan Masyarakat (Kali)					9	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	2,4	**Pertanahan**															
	2.4.1	**Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah**	**Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)**					**68**	**1.215.000.000**	**0**	**36.000.000**	**0,00%**	**2,96%**			PERKIM	
	2.4.1.1	Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Luas Tanah Sarana Pemerintah, Pemakaman Umum, Taman, dan Tempat pengelolaan Sampah yang ditata (Ha)					300	40.850.000	0	36.000.000	0,00%	88,13%			PERKIM	
	2.4.2	**Program Penyelesaiaan Konflik-Konflik Pertanahan**	**Penyelesaian kasus tanah Negara (%)**					**100**	**70.000.000**	**0**	**1.427.500**	**0,00%**	**2,04%**			PERKIM	
	2.4.2.1	Pembinaan/Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Jumlah penyelesaian konflik-konflik pertanahan (Konflik)					7	2.450.000	3	1.427.500	42,86%	58,27%			PERKIM	
	2,5	**Pertanian**															
	2.5.1	**Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan**									**519.552.700**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				
	2.5.1.1	Pembibitan dan perawatan ternak	Jumlah IB Sapi (dosis)					1200	243.770.000	1200	238.585.200	100,00%	97,87%			Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	
	2.5.1.2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan dana bergulir	Jumlah laporan yang tersusun (laporan)					1	2.400.000	1	2.400.000	100,00%	100,00%			Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	
	2.5.1.3	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Jumlah kegiatan fasilitasi pengembangan usaha agribisnis peternakan (kegiatan)					2	283.000.000	2	278.567.500	100,00%	98,43%			Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	
	2.5.1.4	Penyusunan Data Base Peternakan	Jumlah Data Base Peternakan (Data Fungsi dan Data Statistik Peternakan) yang Dihasilkan (dokumen)					2	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	
	2.5.2	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak**									**157.750.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				
	2.5.2.1	Pendataan masalah peternakan	Dokumen Pendataan Masalah Peternakan (dokumen)					1	7.450.000	1	-	100,00%	0,00%			Dinas Peternakan, Kesehatan	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
																Hewan dan Perikanan	
	2.5.2.2	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Jumlah Vaksin dan Pengobatan Ternak (dosis)					12000	148.750.000	1200	147.950.000	10,00%	99,46%			Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	
	2.5.2.3	Pembinaan Kesmavet pada Usaha Peternakan	Jumlah pemeriksaan sampel daging yang diuji (sampel)					60	20.000.000	60	9.800.000	100,00 %	49,00%			Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	
	2.5.3	**Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan**									**372.827.300**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				
	2.5.3.1	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Jumlah Sarana dan Prasarana Peternakan tepat guna yang Diadakan (unit)					6	381.350.000	6	372.827.300	100,00 %	97,77%			Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	
	2.5.3.2	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna	Jumlah Pelatihan/ Sosialisasi Inseminasi Buatan (kali)					2	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	
	2,6	**Lingkungan Hidup**															
	2.6.1	**Program Pembangunan, Penataan dan Pemeliharaan Taman Kota**	**Luas Taman Kota yang dibangun, ditata dan dipelihara (M2)**					**1465**	**4.159.500.000**	**0**	**219.535.100**	**0,00%**	**5,28%**			Dinas Lingkungan Hidup	
	2.6.1.1	Pemeliharaan Taman Kota	Jumlah Taman Kota yg dipelihara (Taman)					7	219.950.000	7	219.535.100	100,00 %	99,81%			Dinas Lingkungan Hidup	
	2.6.2	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	**Presentase Jumlah sampah yang tertangani (%)**					**29,26**	**4.102.474.000**	**0**	**2.090.106.000**	**0,00%**	**50,95%**				
	2.6.2.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan (Jenis)					17	55.234.000	16	49.991.000	94,12%	90,51%			Dinas Lingkungan Hidup	
	2.6.2.2	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Prasarana	Jumlah Petugas Persampahan (Orang)					169	2.104.400.000	169	2.020.040.000	100,00 %	95,99%			Dinas Lingkungan Hidup	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		dan Sarana Persampahan															
	2.6.2.3	Koordinasi penilaian kota sehat/ ADIPURA	Jumlah koordinasi penilaian ADIPURA (Kali)					15	20.075.000	15	20.075.000	100,00 %	100,00 %			Dinas Lingkungan Hidup	
	2.6.2.4	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (DAK)	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan (Jenis)					5	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Lingkungan Hidup	
	2.6.3	**Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup (%)**					**100**	**600.000.000**	**0**	**156.713.375**	**0,00%**	**26,12%**				
	2.6.3.1	Pemantauan Kualitas Lingkungan	jumlah lokasi sungai, sumber mata air dan industri yang dipantau kualitas lingkungannya (Sungai, 3 Sumber Mata air dan 20 Industri)					6	67.700.000	6	67.029.875	100,00 %	99,01%			Dinas Lingkungan Hidup	
	2.6.3.2	Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan	Jumlah Pupuk Kompos Organik yang dihasilkan (Kg) (Kg)					3000	85.050.000	3000	84.671.000	100,00 %	99,55%			Dinas Lingkungan Hidup	
	2.6.3.3	Pengkajian Dampak Lingkungan	Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (Dokumen)					1	5.012.500	1	5.012.500	100,00 %	100,00 %			Dinas Lingkungan Hidup	
	2.6.3.4	Pengembangan mutu dan kapasitas laboratorium LH	Jumlah jenis parameter yang terakreditasi (Jenis Parameter)					12	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Lingkungan Hidup	
	2.6.4	**Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam**	**Luas daerah longsor yang tertangani (Ha)**					**773,65**	**2.235.000.000**	**0**	**4.057.000**	**0,00%**	**0,18%**				
	2.6.4.1	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Jumlah kampung iklim binaan (Kampung Iklim)					3	4.662.500	3	4.057.000	100,00 %	87,01%			Dinas Lingkungan Hidup	
	2.6.4	**Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**	**Jumlah Penyelesaian pengaduan, penegakan hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat (%)**					**100**	**165.000.000**	**0**	**10.250.000**	**0,00%**	**6,21%**				
	2.6.4.1	Pembinaan sekolah berwawasan lingkungan	Jumlah sekolah ADIWIYATA yang dibina (Sekolah)					48	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Lingkungan Hidup	
	2.6.4.2	Sosialisasi/ penyuluhan lingkungan hidup	Jumlah Peserta Penyuluhan lingkungan dan Lomba Kebersihan (Orang Peserta Penyuluhan Lingkungan serta 2 Kali Lomba Kebersihan)					150	10.800.000	150	10.250.000	100,00 %	94,91%			Dinas Lingkungan Hidup	
	2,7	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**															
	2.7.1	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**									**613.687.914**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				
	2.7.1.1	Pengembangan Data Base Kependudukan	Jumlah KK yang diterbitkan (KK)					24000	477.924.000	16956	477.818.114	70,65%	99,98%			Dinas Kependudukan	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
																dan Pencatatan Sipil	
	2.7.1.2	Penyusunan Kebijakan Kependudukan	Jumlah Peraturan yang diterbitkan (Perbup)					1	1.499.900	1	1.499.900	100,00 %	100,00 %			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.7.1.3	Peningkatan Pelayanan Publik pada pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Kependudukan (KIA)					3000	129.675.800	11681	129.468.800	389,37 %	99,84%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.7.1.4	Pelayanan pindah datang penduduk	Persentase SKPWNI yang diterbitkan (%)					100	4.901.100	100	4.901.100	100,00 %	100,00 %			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.7.5	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**									**72.535.700**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				
	2.7.5.1	Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	Jumlah Software / Hardware/ server / clean yang dipelihara (paket)					2	9.400.000	2	9.400.000	100,00 %	100,00 %			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.7.5.2	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Profil Kependudukan Kab. Soppeng (dokumen)					3	40.150.500	3	40.150.500	100,00 %	100,00 %			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.7.5.3	Sosialisasi berbagai kebijakan peraturan peraturan perundang-undangan bidang kependudukan	Jumlah peserta sosialisasi (orang)					89	22.985.200	89	22.985.200	100,00 %	100,00 %			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.7.6	**Program Pelayanan Pencatatan Sipil**									**385.315.214**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				
	2.7.6.1	Peningkatan pelayanan publik dalam pelayanan pencatatan sipil	Jumlah Akta Capil yang diterbitkan (Akta)					6900	420.967.300	7571	375.642.614	109,72 %	89,23%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.7.6.2	Pelayanan penerbitan akta kematian, status anak dan pewarganegaraan	Persentase akta kematian yang diterbitkan (%)					100	6.997.500	100	6.997.500	100,00 %	100,00 %			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.7.6.3	Pelayanan penerbitan akta perkawinan dan perceraian	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan (%)					100	2.675.100	100	2.675.100	100,00 %	100,00 %			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2,8	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**															



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	2.8.1	**Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa/ Kelurahan**	**Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat (%)**					**30**	**680.041.000**	**0**	**108.229.850**	**0,00%**	**15,92%**			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	2.8.1.1	Pemberian Makanan Anak Sekolah (PMT-AS)	Jumlah anak sekolah yang diberikan makanan tambahan (anak)					300	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	2.8.1.2	Penyelenggaraan 10 Program Pokok PKK	Jumlah Desa/Keluarahan yang di fasilitasi (Desa/Kel)					70	111.487.425	70	99.999.850	100,00%	89,70%			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	2.8.1.3	Evaluasi Tingkat Partisipasi Masayarakat Dalam Membangun Desa/Kelurahan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa (D/K)					1	1.950.000	1	1.950.000	100,00%	100,00%			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	2.8.1.4	Evaluasi dan monitoring lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan (orang)					200	6.280.000	200	6.280.000	100,00%	100,00%			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	2.8.2	**Program Perencanaan Pembangunan Desa**	**Persentase Desa menyusun RPJMDesa,RKPDesa dan APBDesa tepat waktu (%)**					**100**	**153.000.000**	**0**	**16.203.450**	**0,00%**	**10,59%**				
	2.8.2.1	Pembinaan dan Pendampingan Penyusunan RKPDesa dan APBDesa	Jumlah desa yang dipasilitasi dalam penyusunan rkpd/apbdesa (Desa)					49	11.770.000	49	11.768.750	100,00%	99,99%			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	2.8.2.2	Pendampingan Penyusunan Profil Desa/Kel.	Jumlah desa yang dipasilitasi dalam penyusunan profil Desa/Kel. (D/K)					70	4.435.000	70	4.434.700	100,00%	99,99%			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	2.8.3	**Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan**	**Persentase Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan ekonomi masyarakat. (%)**					**100**	**485.000.000**	**0**	**2.202.500**	**0,00%**	**0,45%**			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	2.8.3.1	Sosialisasi Posyantekdes (pos pelayanan TTG)	Jumlah pemahaman aparat kecamatan ttg TTG (kec)					8	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	2.8.3.2	Monev pengelolaan dan pengembangan bumdes	Jumlah bumdes yang terbina (bumdes)					49	2.202.500	49	2.202.500	100,00%	100,00%			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	2.8.4	**Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa**	**Persentase pemerintah desa yang difasilitasi (Desa)**					**49**	**450.000.000**	**0**	**311.193.050**	**0,00%**	**69,15%**			Dinas Pemberdayaan	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
																Masyarakat dan Desa	
	2.8.4.1	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah aparatur pemerintah desa dengan pelaksanaan bimtek keuangan desa (orang)					294	12.675.000	294	12.675.000	100,00 %	100,00 %			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	2.8.4.2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Desa yang dievaluasi (Desa)					49	105.652.500	49	105.312.500	100,00 %	99,68%			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	2.8.4.3	Pembinaan dan Pendampingan penggunaan Dana ADD/DAD	Jumlah yang dipasilitasi pengelolaan dana ADD/DAD (Desa)					49	24.930.000	49	24.930.000	100,00 %	100,00 %			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	2.8.4.4	Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan Pembentukan BPD	Jumlah Kepala Desa dan BPD yang difasilitasi (Desa)					6	145.790.000	6	145.790.000	100,00 %	100,00 %			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	2.8.4.5	Pendampingan penyusunan peraturan Desa tentang Desa	Jumlah ttg produk hukum ttg Desa (Desa)					4	610.000	4	520.000	100,00 %	85,25%			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	2.8.4.6	Penyusunan Produk Hukum terkait dengan desa	Jumlah Produk Hukum ttg desa (peraturan bupati)					1	12.787.500	1	12.787.500	100,00 %	100,00 %			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	2.8.4.7	Pelatihan sistem aplikasi pengelolaan keuangan desa (SISKEUDES)	Jumlah peserta pelatihan (orang)					147	9.178.050	147	9.178.050	100,00 %	100,00 %			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	2,9	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**															
	2.9.1	**Program Pengendalian Penduduk**	**Total Fertility Rate (TFR) (%)**					**2,3**	**175.010.000**	**0**	**22.080.000**	**0,00%**	**12,62%**			DP3APPKB	
	2.9.1.1	Sosialisasi kajian kebijakan pengendalian penduduk bagi Pengelola Program KB dan Organisasi Kemasyarakatan	Peserta sosialisasi (Orang)					80	-	0	-	0,00%	0,00%			DP3APPKB	
	2.9.1.2	Pengolahan data dan informasi program KB	Jumlah Laporan (Laporan)					24	10.440.000	24	10.440.000	100,00 %	100,00 %			DP3APPKB	
	2.9.1.3	Pelaksanaan rapat kerja daerah program pengendalian penduduk dan KB	Jumlah Peserta Rakerda (orang)					100	-	0	-	0,00%	0,00%			DP3APPKB	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	2.9.1.4	Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan IMP	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang dibina (orang)					100	-	0	-	0,00%	0,00%			DP3APPKB	
	2.9.1.5	Pemantapan advokasi kepada Lembaga Kemasyarakatan dan Klp Keg KKBPK	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang diadvokasi (lembaga)					10	-	0	-	0,00%	0,00%			DP3APPKB	
	2.9.1.6	Pelaksanaan updating keluarga melalui pendataan Keluarga	Jumlah desa/kelurahan wilayah pendataan (desa/kelurahan)					70	11.650.000	70	11.640.000	100,00%	99,91%			DP3APPKB	
	2.9.2	**Program KB**	**Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%)**					**56**	**3.999.950.000**	**0**	**3.459.511.631**	**0,00%**	**86,49%**			DP3APPKB	
	2.9.2.1	Pelayanan KB Momentum Khusus (IBI-KB-Kes, Bhayangkara, TNI Manunggal, dan PKK) KB-Kes	Jumlah peserta KB yang dilayani (akseptor KB)					7000	35.534.400	7000	35.311.100	100,00%	99,37%			DP3APPKB	
	2.9.2.2	Pengadaan sarana dan prasarana Penyuluhan dan Pelayanan Keluarga Berencana	Jumlah sarana dan prasarana KB (paket)					15	1.642.000.000	15	1.548.300.000	100,00%	94,29%			DP3APPKB	
	2.9.2.3	Penyediaan Biaya Operasional Program KKBPK (BOKB)	Jumlah Balai PLKB yang dibiayai (Balai)					8	2.185.604.000	7	1.874.455.531	87,50%	85,76%			DP3APPKB	
	2.9.2.4	Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah Kegiatan pembinaan KB (kegiatan)					1	1.766.100	1	1.445.000	100,00%	81,82%			DP3APPKB	
	2.9.2.5	Pembentukan dan Pengembangan PIK Remaja/Mahasiswa	Jumlah kelompok yang dibina (kelompok)					2	-	0	-	0,00%	0,00%			DP3APPKB	
	2.9.3	**Program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga**	**Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan sejahtera yang tertangani (%)**					**25**	**190.000.000**	**0**	**12.682.200**	**0,00%**	**6,67%**			DP3APPKB	
	2.9.3.1	Pembinaan dan pengembangan poktan dan UPPKS	Jumlah kelompok yang dibina (kelompok)					13	2.471.100	13	2.470.000	100,00%	99,96%			DP3APPKB	
	2.9.3.2	Pembinaan Klp Bina Keluarga Balita (BKB)	Jumlah anggota kelompok yang mengikuti pelatihan (orang)					70	3.871.100	70	3.871.100	100,00%	100,00%			DP3APPKB	
	2.9.3.3	Pembinaan Klp Bina Keluarga Lansia (BKL)	Jumlah anggota kelompok yang mengikuti pelatihan (orang)					70	3.871.100	70	3.871.100	100,00%	100,00%			DP3APPKB	
	2.9.3.4	Pembinaan Klp Bina Keluarga Remaja (BKR)	jumlah anggota kelompok yang mengikuti pelatihan (orang)					35	2.471.100	35	2.470.000	100,00%	99,96%			DP3APPKB	
	2.10.	**Perhubungan**															



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	2.10.1	**Program Penerangan Jalan**	**Panjang jangkauan penerangan (km)**					**136**	**2.000.000.000**	**0**	**1.647.146.000**	**0,00%**	**82,36%**			Dinas Perhubungan	
	2.10.1.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Penerangan Lampu Jalan	Jumlah titik lampu yang dipelihara (Titik)					1500	465.888.559	1496	459.049.300	99,73%	98,53%			Dinas Perhubungan	
	2.10.1.2	Pemasangan baru titik lampu jalan	Jumlah lampu jalan yang terpasang (Set)					100	80.201.000	100	80.201.000	100,00%	100,00%			Dinas Perhubungan	
	2.10.1.3	Pengadaan lampu LED	Jumlah lampu LED yang diadakan (Titik)					178	1.108.700.000	178	1.107.895.700	100,00%	99,93%			Dinas Perhubungan	
	2.10.2	**Program Pelayanan Angkutan**	**Jumlah orang/barang yang terlayani angkutan umum (Orang/barang)**					**504000**	**340.500.000**	**0**	**699.732.500**	**0,00%**	**205,50%**			Dinas Perhubungan	
	2.10.2.1	Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	Jumlah Sopir Juru Mudi yang mendapatkan penyuluhan (Sopir)					100	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Perhubungan	
	2.10.2.2	Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Jumlah pelaksanaan pengawasan disiplin pengendara mobil penumpang/barang (kali)					77	502.640.000	77	484.800.000	100,00%	96,45%			Dinas Perhubungan	
	2.10.2.3	Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Jumlah kendaraan umum yang wajib uji (Unit)					3000	14.400.000	0	14.400.000	0,00%	100,00%			Dinas Perhubungan	
	2.10.2.4	Sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Jumlah personil LLAJ mengikuti sosialisasi/penyuluhan (Personil)					75	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Perhubungan	
	2.10.2.5	Pemilihan dan penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan teladan	Jumlah sopir yang lolos seleksi ketingkat provinsi (orang)					1	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Perhubungan	
	2.10.2.6	Monitoring dan evaluasi pelayanan angkutan	Jumlah monitoring dan evaluasi angkutan (kali)					48	1.200.000	48	1.200.000	100,00%	100,00%			Dinas Perhubungan	
	2.10.2.7	Monitoring dan pengawasan bengkel kendaraan bermotor	jumlah bengkel yang diawasi (Bengkel)					40	7.862.500	40	7.862.500	100,00%	100,00%			Dinas Perhubungan	
	2.10.2.8	Monitoring dan Evaluasi peningkatan pendapatan retribusi terminal dan perparkiran	Jumlah monitoring dan evaluasi retrebusi terminal dan perparkiran (Kali)					4	187.900.000	4	187.700.000	100,00%	99,89%			Dinas Perhubungan	
	2.10.2.9	Peningkatan dan pengendalian pelayanan perijinan angkutan umum dalam trayek	Jumlah kendaraan angkutan umum yang wajib memiliki izin trayek maupun bukan dalam trayek (Kali)					8	3.792.500	8	3.770.000	100,00%	99,41%			Dinas Perhubungan	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	2.10.3	**Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi LLAJ**	**Pemasangan Rambu - Rambu (Buah)**					**90**	**243.030.000**	**0**	**258.184.458**	**0,00%**	**106,24 %**			Dinas Perhubungan	
	2.10.3.1	Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah alat kendaraan bermotor yang direhab/dipelihara (Jenis)					8	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Perhubungan	
	2.10.3.2	Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal	Jumlah terminal yang direhab/dipelihara (Terminal)					1	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Perhubungan	
	2.10.3.3	Rehabilitasi dan pemeliharaan rambu-rambu	Jumlah rambu-rambu yang direhab/dipelihara (Kecamatan)					8	58.957.900	8	58.650.000	100,00 %	99,48%			Dinas Perhubungan	
	2.10.3.4	Pemeliharaan marka jalan	Panjang marka jalan yang dipelihara (M2)					0	200.000.000	300	199.534.458	0,00%	99,77%			Dinas Perhubungan	
	2.10.4	**Program Peningkatan dan Pengamanan lalu lintas**	**Pemenuhan Sarana Pengamanan Lalu Lintas (%) (Paket)**					**98**	**975.000.000**	**0**	**249.228.000**	**0,00%**	**25,56%**			Dinas Perhubungan	
	2.10.4.1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Jumlah rambu-rambu yang diadakan (Buah)					50	50.000.000	50	49.720.000	100,00 %	99,44%			Dinas Perhubungan	
	2.10.4.2	Pengadaan fasilitas keselamatan	Jumlah fasilitas keselamatan yang diadakan (Jenis)					1	200.000.000	1	199.508.000	100,00 %	99,75%			Dinas Perhubungan	
	2,11	**Komunikasi dan Informatika**															
	2.11.1	**Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi**	**Jumlah layanan cakupan IT (titik)**					**15**	**360.000.000**	**0**	**1.623.967.260**	**0,00%**	**451,10 %**			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.11.1.1	Pembangunan Sarana jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah sarana jaringan komunikasi dan informasi yang terbangun (paket)					1	764.500.000	1	744.232.500	100,00 %	97,35%			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.11.1.2	Penyediaan akses internet	jumlah langganan provider internet (line)					2	650.000.000	2	649.917.760	100,00 %	99,99%			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.11.1.3	Pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan Komunikasi dan Informasi	Persentase sarana jaringan komunikasi dan informasi yang terpelihara (%)					100	235.000.000	100	229.817.000	100,00 %	97,79%			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.11.2	**Program pengembangan komunikasi dan informatika**	**Jumlah desa/kelurahan yang terakses informasi (desa/kel)**					**70**	**137.136.000**	**70**	**459.330.000**	**100,00 %**	**334,94 %**				
	2.11.2.1	Pengelolaan dan pemutakhiran informasi situs web pemerintah	jumlah domain dan subdomain pemkab. soppeng yang dikelola (domain)					1	257.200.000	1	253.440.000	100,00 %	98,54%			Dinas Komunikasi dan Informatika	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	2.11.2.2	Pengelolaan layanan Soppeng Command Center	jumlah jenis informasi yang tersaji (jenis)					5	196.900.000	5	196.650.000	100,00 %	99,87%			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.11.2.3	Pengawasan dan Site Audit Menara Telekomunikasi	jumlah menara yang diawasi (menara)					70	10.000.000	100	9.240.000	142,86 %	92,40%			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.11.2.4	Pengembangan dan Penguatan Layanan Media Center	jumlah media center yang dikelola (paket)					1	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.11.3	**Program Peningkatan SDM di Bidang Komunikasi dan Informatika**	**Persentase peningkatan SDM bidang komunikasi dan informatika (%)**					**85**	**86.385.000**	**85**	**-**	**100,00 %**	**0,00%**				
	2.11.3.1	Peningkatan Kapasitas dan Kompentensi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	jumlah SKPD yang terlibat dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi daerah (SKPD)					34	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.11.3.2	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	jumlah peserta yang mengikuti kegiatan (orang)					100	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.11.3.3	Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat	jumlah KIM yang terbina (klp (50 wanita + 30 pria))					48	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.11.3.4	Orientasi Kehumasan	jumlah peserta orientasi kehumasan (orang)					80	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.11.3.5	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	jumlah SDM di bidang komunikasi dan informatika yang mengikuti pelatihan (orang)					90	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.11.4	**Program Kerjasama Informasi dan Media Massa**	**Jumlah pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi pembangunan daerah (kali)**					**30**	**79.500.000**	**30**	**1.936.172.500**	**100,00 %**	**2435,44%**			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.11.4.1	Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah media penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah (Jenis)					5	1.944.515.000	5	1.738.527.500	100,00 %	89,41%			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.11.4.2	Peliputan dan pendokumentasian	Jumlah kegiatan pemerintah yang diliput dan didokumentasikan (kegiatan)					40	177.300.000	40	177.045.000	100,00 %	99,86%			Dinas Komunikasi	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Penyelengaraan pemerintahan daerah														dan Informatika	
	2.11.4.3	Penyebarluasan informasi Pembangunan daerah melalui media pameran	Jumlah kegiatan keikutsertaan dalam pameran (kegiatan)					1	5.000.000	1	5.000.000	100,00 %	100,00 %			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.11.4.4	Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah opini dan aspirasi yang dikelola (Pengaduan dan Aspirasi)					20	8.110.000	20	8.110.000	100,00 %	100,00 %			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.11.4.5	Visualisasi Profil Kabupaten	jumlah dokumen visualisasi yang tersusun (video)					2	5.050.000	2	4.390.000	100,00 %	86,93%			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.11.4.6	Pelaksanaan forum komunikasi kehumasan	Jumlah kegiatan forum komunikasi kehumasan (Kali)					1	3.100.000	1	3.100.000	100,00 %	100,00 %			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2,12	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**															
	2.12.1	**Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**	**Persentase Koperasi aktif (%)**					**91**	**156.000.000**	**0**	**173.635.000**	**0,00%**	**111,30 %**			Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	
	2.12.1.1	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah koperasi yang dibina (koperasi)					184	9.164.000	184	7.600.000	100,00 %	82,93%			Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	
	2.12.1.2		Jumlah operator tenaga komputer (OB) (OB)					12		12		100,00 %				Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	
	2.12.1.3	Monitoring, evaluasi dan peaporan dana perkuatan koperasi	Jumlah koperasi yang dimonitor dan dievaluasi (koperasi)					62	7.250.000	62	7.250.000	100,00 %	100,00 %			Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	
	2.12.1.4	Pembinaan dan evaluasi kelembagaan koperasi aktif	Jumlah koperasi yang dibina dan dievaluasi (koperasi)					0	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	2.12.1.5	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD	Jumlah peserta pelatihan (orang)					60	130.930.000	60	130.910.000	100,00 %	99,98%			Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	
	2.12.1.6	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoprasian	Jumlah peserta sosialisasi (orang)					0	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	
	2.12.1.7	Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	Jumlah koperasi yang dinilai (koperasi)					50	1.350.000	50	1.350.000	100,00 %	100,00 %			Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	
	2.12.1.8	Sosialisasi gerakan gemar berkoperasi	Jumlah peserta sosialisasi (orang)					50	26.525.000	50	26.525.000	100,00 %	100,00 %			Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	
	2.12.2	**Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**	**Persentase Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (%)**					**98,94**	**397.000.000**	**0**	**277.093.000**	**0,00%**	**69,80%**				
	2.12.2.1	Penyelenggaraan promosi pruduk usaha mikro kecil menengah	Jumlah operator tenaga administrasi (OB) (OB)					12	6.000.000	12	6.000.000	100,00 %	100,00 %			Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	
	2.12.2.2		Jumlah keikutsertaan promosi produk UMKM (kali)					1		1		100,00 %				Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	
	2.12.2.3	Pelatihan teknologi peningkatan mutu produk umkm	Jumlah peserta yang dilatih (orang)					30	48.725.500	30	48.525.500	100,00 %	99,59%			Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	
	2.12.2.4	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah peserta yang dilatih (orang)					60	141.360.000	60	141.350.000	100,00 %	99,99%			Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	
	2.12.2.5	Pendataan usaha lembaga keuangan mikro	Jumlah LKM/UKM (LKM/UKM)					1500	6.400.000	1005	6.400.000	67,00%	100,00 %			Dinas Perdagangan, Perindustrian,	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
																Koperasi dan UKM	
	2.12.2.6	Penyelenggaraan pembinaan usaha rumah tangga	Jumlah usaha rumah tangga yang dibina (orang)					30	32.300.000	30	32.300.000	100,00 %	100,00 %			Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	
	2.12.2.7	Monitoring dan evaluasi UMKM	Jumlah UMKM yang dimonitor dan dievaluasi (UMKM)					91	7.000.000	91	5.000.000	100,00 %	71,43%			Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	
	2.12.2.8	Pelatihan manajemen usaha bagi KUEP dan ULP	Jumlah pelaku KUEP dan ULP yang dilatih (pelaku KUEP/ULP)					35	37.517.500	35	37.517.500	100,00 %	100,00 %			Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	
	2,13	**Penanaman Modal**															
	2.13.1	**Program Peningkatan Iklim dan Promosi Investasi**	**Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (investor)**					**25**	**500.000.000**	**0**	**28.800.000**	**0,00%**	**5,76%**			DPMPTSPTKT	
	2.13.1.1	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah kegiatan (kali kegiatan)					4	29.612.500	0	28.800.000	0,00%	97,26%			DPMPTSPTKT	
	2.13.1.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Daerah	Jumlah dokumen (dokumen)					1	-	0	-	0,00%	0,00%			DPMPTSPTKT	
	2.13.1.3	Pemantauan dan evaluasi pelaporan penanaman modal	Jumlah laporan (dokumen)					4	2.670.000	0	-	0,00%	0,00%			DPMPTSPTKT	
	2,14	**Kepemudaan dan Olahraga**															
	2.14.1	**Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan**	**Jumlah organisasi pemuda (OKP)**					**27**	**457.725.900**	**0**	**17.865.000**	**0,00%**	**3,90%**			Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
	2.14.1.1	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Jumlah peserta pelatihan ()					0	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
	2.14.1.2	Pelaksanaan seleksi anggota paskibraka	jumlah hasil lulus seleksi / Kegiatan paskibraka (orang)					8	9.500.000	8	9.500.000	100,00 %	100,00 %			Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	2.14.1.3	Pembinaan anggota paskibraka	Jumlah anggota paskibraka yang dibina (orang)					71	370.618.500	7	7.215.000	9,86%	1,95%			Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
	2.14.1.4	Pembinaan Kepramukaan	Jumlah anggota keperamukaan yang di bina (orang)					20	1.150.000	20	1.150.000	100,00 %	100,00 %			Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
	2.14.1.5	Pembinaan Karang Taruna	Jumlah anggota karang Taruna yang di fasilitasi ()					0	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
	2.14.1.6	Pembinaan Pemuda Pelopor	jumlah anggota pemuda pelopor yang dibina ()					0	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
	2.14.1.7	Pembinaan Organisasi-Organisasi Kepemudaan	Jumlah anggota organisasi pemuda yang dibina ()					0	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
	2.14.2	**Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda**	**Persentase wirausaha muda (%)**					**40**	**31.575.000**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**			Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
	2.14.2.1	Pelatihan usaha kelompok pemuda kreatif	Jumlah anggota kelompok pemuda kreatif yang mengikuti pelatihan ()					0	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
	2.14.3	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga**	**Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional (Atlet/Orang)**					**6**	**31.575.000**	**0**	**299.140.000**	**0,00%**	**947,40 %**			Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
	2.14.3.1		Jumlah prestasi olahraga tingkat nasional (Cabang olahraga)					16		14						Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
	2.14.3.2	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Jumlah cabang olahraga prestasi tingkat daerah yang dibina ()					0	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
	2.14.3.3	Penyelenggaraan kompetensi olahraga	jumlah kegiatan kompetisi cabang olahraga yang dilaksanakan (kegiatan)					5	10.220.000	5	10.220.000	100,00 %	100,00 %			Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
	2.14.3.4	Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih,	jumlah pelatih. Peneliti, praktisi, teknisi yang ikut pelatihan (orang)					30	8.100.000	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Pariwisata,	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		peneliti, praktisi dan teknisi olahraga														Kepemudaan dan Olahraga	
	2.14.3.5	Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana Olahraga	Jumlah sarana prasarana olahraga yang dibangun, diadakan dan direhab (paket)					2	200.000.000	2	198.970.000	100,00 %	99,49%			Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
	2.14.3.6	Pembinaan cabang-cabang olahraga	jumlah cabang olahraga yang dibina (cabang olahraga)					4	57.650.000	4	50.950.000	100,00 %	88,38%			Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
	2.14.3.7	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	Jumlah Insan Olahraga berdedikasi dan berprestasi (0rang)					22	40.000.000	10	20.250.000	45,45%	50,63%			Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
	2.14.3.8	Pembinaan cabang olahraga tradisional, olahraga rekreasi dan olahraga khusus	jumlah olahraga tradisional , rekreasi dan Khusus yang dibina (cabang olahraga)					1	20.250.000	1	18.750.000	100,00 %	92,59%			Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
	2.14.3.9	Pembinaan cabang olahraga unggulan daerah	jumlah cabang olahraga unggulan daerah yang dipertandingkan ()					0	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
	2,15	**Persandian**															
	2.15.1	**Program penyelenggaraan Persandian**	**Persentase informasi yang diamankan (%)**					**30**	**104.425.000**	**30**	**5.175.000**	**100,00 %**	**4,96%**			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.15.1.1	Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah daerah kabupaten Soppeng	jumlah informasi yang diamankan (informasi)					24	5.175.000	24	5.175.000	100,00 %	100,00 %			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.15.1.2	Sosialisasi Hubungan Komunikasi Sandi	jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi (orang)					70	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2,16	**Kebudayaan**															
	2.16.1	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman dan Kekayaan Budaya**									**68.053.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			DISDIKBUD	
	2.16.1.1	Pelestarian/Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Jumlah Pelestarian/ Aktualisasi Adat Budaya (kegiatan)					10	56.000.000	10	18.600.000	100,00 %	33,21%			DISDIKBUD	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	2.16.1.2	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	Jumlah Peninggalan dan Pengembangan Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air (paket)					2	50.000.000	2	49.453.000	100,00 %	98,91%			DISDIKBUD	
	2.16.2	**Program Pengembangan Kesenian Daerah**									**22.500.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				
	2.16.2.1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah (kali)					6	22.500.000	6	22.500.000	100,00 %	100,00 %			DISDIKBUD	
	2,17	**Perpustakaan**															
	2.17.1	**Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan**	**Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan / Tahun (Pengunjung)**					**8730**	**300.000.000**	**8342**	**87.585.500**	**95,56 %**	**29,20%**			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.17.1.1	Pengembangan Minat dan Budaya Baca;	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Ceria (Pengunjung Perpustakaan Ceria - 7 Orang)					1250	50.937.500	1250	50.937.500	100,00 %	100,00 %			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.17.1.2	Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat;	Jumlah Pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan yang Mengikuti Supervisi (Orang)					40	-	20	-	50,00%	0,00%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.17.1.3	Pengembangan Potensi dan Bakat Pidato bagi Siswa Sekolah;	Jumlah Peserta Lomba Pidato (Orang)					32	15.090.000	32	15.089.000	100,00 %	99,99%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.17.1.4	Pengembangan Minat dan Bakat pada Bidang Pengetahuan Umum;	Jumlah Peserta Cerdas Cermat (Orang)					32	21.560.000	32	21.559.000	100,00 %	100,00 %			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.17.1.5	Lomba Perpustakaan Desa / Kelurahan;	Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan yang Mengikuti Lomba (Desa/Kelurahan)					8	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.17.1.6	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum	Jumlah Gedung Yang Direhab (Paket)					1	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.17.2	**Program Pengembangan Koleksi dan Pelestarian Bahan Pustaka**	**Persentase Bahan Pustaka yang Diadakan (Persen)**					**3023**	**200.000.000**	**0**	**18.264.000**	**0,00%**	**9,13%**			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.17.2.1	Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca	Jumlah Peserta Lomba Bercerita (Orang)					32	13.140.000	32	13.139.000	100,00 %	99,99%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	2.17.2.2	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Jumlah Bahan Pustaka yang Diadakan (Judul)					180	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.17.2.3	Workshop Story Telling	Jumlah Peserta Workshop Storytelling (Orang)					70	5.125.000	70	5.125.000	100,00 %	100,00 %			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2,18	**Kearsipan**															
	2.18.1	**Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen/ arsip daerah**	**Jumlah Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Daerah (SKPD)**					**25**	**200.397.000**	**0**	**25.250.000**	**0,00%**	**12,60%**			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.18.1.1	Pendatan dan Penataan Dokumen Arsip Daerah	Jumlah Arsip yang Didata dan Ditata (Lembar)					1800	25.250.000	1800	25.250.000	100,00 %	100,00 %			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.18.1.2	Penyimpanan dan Penataan Arsip	Jumlah SKPD yang Dibina (SKPD)					6	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.18.1.3	Sosialisasi Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta	Jumlah Peserta Sosialisasi (Orang)					70	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.18.1.4	Pembuatan Regulasi Kearsipan	Jumlah Regulasi Kearsipan yang Diterbitkan (Dokumen)					1	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	3	**Urusan Pilihan**															
	3,1	**Kelautan dan Perikanan**															
	3.1.1	**Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan**									**63.390.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				
	3.1.1.1	Pengembangan Agribisnis Perikanan	Peningkatan produk hasil olahan perikanan (event / produk)					12	13.800.000	3	12.600.000	25,00%	91,30%			Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	
	3.1.1.2	Pengembangan Daya Saing Produk Perikanan	Jumlah kelompok yang mengikuti pelatihan pengolahan dan pengemasan hasil perikanan (Kelompok)					20	50.940.000	20	50.790.000	100,00 %	99,71%			Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	
	3.1.2	**Program Pengembangan Perikanan Budidaya**									**364.960.320**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	3.1.2.1	Pengembangan Perikanan (Bibit Ikan Unggul Air Tawar)	Jumlah benih ikan yang dihasilkan (Ekor dan 1 paket)					3500000	357.265.000	3500000	351.620.320	100,00%	98,42%			Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	
	3.1.2.2	Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP-PB) dan Pengelolaan Pemasaran Hasil Perikanan (PUMP-PPHP)	Jumlah anggota yang dibina (Orang)					50	5.250.000	50	5.250.000	100,00%	100,00%			Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	
	3.1.2.3	Pengembangan Kelembagaan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang dibina (orang)					60	8.090.000	60	8.090.000	100,00%	100,00%			Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	
	3.1.2.4	Monitoring dan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Jumlah Penurunan Kasus Penyakit Ikan (Kasus)					4	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	
	3.1.2.5	Pengembangan dan Pembinaan Kelompok CPIB dan CBIB	Jumlah Kelompok UPR dan Pembudidaya Ikan yang dibina (Kelompok)					6	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	
	3.1.3	**Program Pengembangan Perikanan Tangkap**									**269.380.900**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				
	3.1.3.1	Pembinaan dan Pengawasan Danau Tempe	Jumlah penanganan kasus penggunaan alat tangkap ilegal (Kasus)					95	270.260.000	17	269.380.900	17,89%	99,67%			Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	
	3.1.3.2	Pengembangan Kelembagaan Usaha Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan yang dibina (kelompok)					20	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	
	3,2	**Pariwisata**															
	3.2.1	**Program Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata**	**Jumlah Wisatawan (Orang)**					**234126**	**1.055.000.000**	**0**	**510.333.200**	**0,00%**	**48,37%**			Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	3.2.1.1	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	Jumlah Duta Wisata yang terlatih (Orang)					20	682.415.000	20	510.333.200	100,00 %	74,78%			Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
	3.2.2	**Program Pengelolaan Objek Wisata**	**Persentase Objek Wisata Yang dikelola (%)**					**100**	**2.300.000.000**	**0**	**1.459.071.900**	**0,00%**	**63,44%**				
	3.2.2.1	Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	Jumlah Objek Wisata Unggulan yang dipelihara (Objek)					3	65.705.000	3	46.091.500	100,00 %	70,15%			Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
	3.2.2.2	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah Objek Wisata yang Dikelola dan Dikembangkan (Objek)					1	150.000.000	1	145.247.000	100,00 %	96,83%			Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
	3.2.2.3	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (DAK)	Jumlah Objek Wisata yang dikelola dan dikembangkan (Objek)					3	1.446.233.000	3	1.267.733.400	100,00 %	87,66%			Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
	3,3	**Pertanian**															
	3.3.1	**Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu hasil tanaman pangan**									**313.899.500**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	3.3.1.1	Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian	Luas areal penangkaran benih unggul tanaman pangan (Hektar)					6	128.270.000	6	100.410.500	100,00 %	78,28%			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	3.3.1.2	Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan (RDKK) Pupuk Bersubsidi	Jumlah RDKK pupuk bersubsidi yang tersusun tepat waktu (Dokumen)					1	5.570.000	1	5.570.000	100,00 %	100,00 %			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	3.3.1.3	Pembinaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Jumlah pengecer dan distributor pupuk bersubsidi yang terbina (Orang)					52	750.000	52	750.000	100,00 %	100,00 %			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
																dan Ketahanan Pangan	
	3.3.1.4	Peningkatan produksi dan produktivitas Tanaman Serealia	Luas areal pengembangan tanaman serealia melalui peningkatan produktivitas (Hektar)					45	71.485.000	45	70.784.000	100,00 %	99,02%			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	3.3.1.5	Peningkatan produksi dan produktivitas Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	Luas areal pengembangan tanaman aneka kacang dan umbi melalui peningkatan produktivitas (Hektar)					21	43.310.000	21	43.307.500	100,00 %	99,99%			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	3.3.1.6	Pengembangan pertanian pada lahan kering	Luas areal pengembangan padi ladang (Hektar)					25	27.160.000	25	27.157.500	100,00 %	99,99%			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	3.3.1.7	Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari gangguan OPT dan DPI	Pelaksanaan SL PHT gerakan pengendalian OPT dan Dokumen Pemetaan Lahan Rawan banjir dan kekeringan (Kali dan 1 Dokumen)					8	25.250.000	8	10.250.000	100,00 %	40,59%			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	3.3.1.8	Perlindungan tanaman untuk peningkatan pengamanan produksi tanaman pangan	Jumlah pestisida/bahan perlindungan tanaman yang diadakan (Jenis)					3	40.470.000	3	40.470.000	100,00 %	100,00 %			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	3.3.1.9	Penyusunan data base potensi produk pangan	Jumlah data base potensi produk pangan yang tersusun (Dokumen)					2	17.600.000	2	15.200.000	100,00 %	86,36%			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	3.3.2	**program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan**									**1.452.348.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	3.3.2.1	Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian	Panjang jaringan irigasi yang terbangun/terehabilitasi JITUT/JIDES (Meter)					204	130.000.000	204	128.132.000	100,00 %	98,56%			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	3.3.2.2	Peningkatan Pengelolaan Lahan	Panjang jalan usaha tani yang dikembangkan/direhabilitasi (Kilometer)					1	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	3.3.2.3	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna	Jumlah Alat dan Mesin Pertanian yang Tersedia (Unit)					13	65.000.000	13	64.985.000	100,00 %	99,98%			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	3.3.2.4	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah Peserta Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian Tepat Guna (Orang)					50	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	3.3.2.5	Pengelolaan sumber-sumber air untuk pertanian	Jumlah Sumber-Sumber Air untuk Pertanian yang Dibangun/Direhabilitasi (Unit)					14	1.653.800.000	12	1.237.371.000	85,71%	74,82%			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	3.3.2.6	Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan	Kegiatan Pendampingan Pembangunan Infrastruktur Pertanian (Kegiatan)					2	21.860.000	2	21.860.000	100,00 %	100,00 %			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	3.3.2.7	Pembinaan dan pengembangan Kelembagaan P3A/GP3A	Jumlah Kelembagaan P3A dan GP3A yang Dibina (Kelompok)					10	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	3.3.3	**Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu dan Pemasaran Hasil Pertanian**									**142.875.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	3.3.3.1	Penanganan Pengolahan Hasil Pertanian	Jumlah Jenis Usaha Pengolahan Hasil Pertanian (Jenis)					3	19.850.000	3	19.525.000	100,00 %	98,36%			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	3.3.3.2	Pengembangan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Jumlah Alat Mesin Pengolahan Hasil Pertanian yang Dikembangkan/Diadakan (Unit)					2	83.200.000	2	82.950.000	100,00 %	99,70%			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	3.3.3.3	Promosi atas hasil produksi pertanian unggulan daerah	Jumlah Keikutsertaan dalam Pelaksanaan Pameran Promosi Tingkat Kab, Prop dan Nasional (Kali)					1	27.200.000	1	26.000.000	100,00 %	95,59%			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	3.3.3.4	Penyuluhan dan bimbingan pengelolaan sumber daya petani melalui bantuan pemerintah	Jumlah Peserta Penyuluhan dan Bimbingan Pengelolaan Sumber Daya Petani Melalui Bantuan Pemerintah (Orang)					10	14.400.000	10	14.400.000	100,00 %	100,00 %			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	3.3.3.5	Pelatihan dan bimbingan kewirausahaan bagi kelompok tani	Jumlah Petani yang Mengikuti Pelatihan Kewirausahaan (Orang)					50	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	3.3.4	**Program penguatan Kelembagaan Pelaku Utama**									**16.600.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	3.3.4.1	Pendidikan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah Petani yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)					320	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	3.3.4.2	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	Pendampingan Kemitraan Usaha Gapoktan dalam Beragribisnis (Gapoktan)					70	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	3.3.4.3	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani dan KTNA	Jumlah Kelembagaan Pelaku Utama yang dibina (Poktan)					910	17.400.000	910	16.600.000	100,00 %	95,40%			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	3.3.4.4	Pekan Nasional Kelompok Tani Andalan	Jumlah Petani yang mengikuti PENAS (Orang)					20	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	3.3.5	**Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu Hasil Perkebunan**									**583.547.500**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	3.3.5.1	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Jumlah bibit sambung pucuk kakao (Pohon)					41100	387.282.500	41100	387.282.500	100,00 %	100,00 %			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	3.3.5.2	Pengembangan Tanaman Alternatif Perkebunan	Jumlah bibit tanaman alternatif perkebunan yang diadakan (Pohon)					13000	118.675.000	13000	118.670.000	100,00 %	100,00 %			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	3.3.5.3	Peningkatan Produksi dan Kualitas Tembakau	Tersedianya sarana dan prasaranapada kelompok tani pembudidaya tanaman tembakau (Kelompok)					0	3.000.000	0	3.000.000	0,00%	100,00 %			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	3.3.5.4	Pengadaan Sarana Produksi	Tersedianya sarana produksi (Ha)					33	74.610.000	33	74.595.000	100,00 %	99,98%			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	3.3.5.5	Pelatihan petani SL-PHT	Jumlah kelompok lokasi pelaksanaan SL-PHT (Kelompok)					2	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	3.3.5.6	Pengembangan Jalan Produksi	Tersedianya prasarana pertanian berupa jalan produksi (Kilometer)					1	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	3.3.5.7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkebunan	Jumlah alat transportasi perkebunan (Unit)					2	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	3.3.6	**Program Peningkatan Pasca Panen, Pemasaran dan promosi Hasil Perkebunan**									-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	3.3.6.1	Pelatihan Pengolahan Pasca Panen	Jumlah peserta pelatihan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan (Orang)					30	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	3.3.7	**Program Pengembangan Sutra Alam**									**424.590.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				
	3.3.7.1	Pengembangan sutera alam	Jumlah bibit ulat yang diadakan dan Luas Areal Pengembangan Sutera Alam (Box dan 60 Ha)					500	468.750.000	500	424.590.000	100,00%	90,58%			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	3.3.7.2	Pelatihan petani sutera alam	Jumlah peserta pelatihan pengembangan sutera alam (Orang)					50	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	3.3.8	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Perlindungan Lahan Pertanian**									**94.245.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	3.3.8.1	Pengembangan pertanian organik	Luas areal pengembangan usaha tani organik (Hektar)					25	76.370.000	25	76.370.000	100,00%	100,00%			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	3.3.8.2	Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian (TP)	Jumlah dokumen SID (Survey, Investigasi, Desain) mendukung perluasan dan pengolahan lahan pertanian melalui APBN/TP (Dokumen)					2	18.000.000	2	17.875.000	100,00%	99,31%			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	3.3.9	**Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura**									**592.692.200**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	3.3.9.1	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman sayuran	Luas areal pengembangan tanaman sayuran unggulan dan tanaman sayuran lainnya (Hektar (BM = 3 Ha, CM = 12 Ha, CR = 20 Ha))					35	97.380.000	35	96.680.000	100,00 %	99,28%			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	3.3.9.2	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman buah	Jumlah Pohon tanman buah unggulan dan tanaman buah lainnya yang dikembangkan (Pohon)					2000	99.600.000	2000	99.600.000	100,00 %	100,00 %			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	3.3.9.3	Pengembangan bibit unggul pertanian	Jumlah bibit unggul yang dikembangkan (Kilogram)					820	55.920.000	820	55.510.000	100,00 %	99,27%			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	3.3.9.4	Pengembangan diversifikasi tanaman	Jumlah pengembangan komoditi hortikultura yang diusahakan (Komoditi)					4	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	3.3.9.5	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Jumlah komoditi hortikultura yang dikembangkan melalui pola pekarangan (Komoditi)					6	14.865.000	6	14.260.000	100,00 %	95,93%			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	3.3.9.6	Penyediaan Sarana dan Prasaran Tanaman Hortikultura	Jumlah sarana dan Prasarana Tanaman Hortikultura yang Diadakan (Paket)					3	284.950.000	3	284.925.000	100,00 %	99,99%			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	3.3.9.7	Pengembangan dan Pengendalian OPT Hortikultura	Jumlah Bahan OPT Hortikultura yang diadakan (Paket)					1	42.965.000	1	41.717.200	100,00 %	97,10%			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	3.3.9.8	Penyusunan Data Base Hortikultura	Jumlah data base hortikultura yang dihasilkan (Dokumen)					1	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	3.3.10.	**Program Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Penyuluh**									**909.286.200**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	3.3.10.1	Penyuluhan dan Pendampingan bagi pertanian perkebunan	Penyusunan program penyuluhan dan rencana kerja penyuluhan (Dokumen)					79	14.400.000	79	13.600.000	100,00 %	94,44%			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	3.3.10.2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Tenaga Penyuluhan	Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan yang diadakan (Jenis)					2	79.045.000	2	28.017.500	100,00 %	35,44%			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	3.3.10.3	Penyuluhan Diseminasi Teknologi Pertanian/Perkebunan Spesifik Lokasi	Frekuensi penyuluhan informasi teknologi spesifikasi lokasi yang telah direkomendasikan (Kali)					8	40.000.000	8	36.520.000	100,00 %	91,30%			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	3.3.10.4	Penyuluhan dan Pendampingan Penyusunan RDK/RDKK	Frekuensi pendampingan dan pengawalan peningkatan produksi (Kali)					70	-	70	-	100,00 %	0,00%			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	3.3.10.5	Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)	Jumlah Daerah Irigasi yang terbina melalui IPDMIP (Daerah Irigasi)					5	951.416.000	5	769.836.200	100,00 %	80,91%			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	3.3.10.6	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian	Jumlah Penyuluh yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas (Orang)					97	16.412.500	97	14.812.500	100,00 %	90,25%			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	3.3.10.7	Penyediaan dukungan operasional penyuluh pertanian	Jumlah Penyuluh yang Memperoleh Dukungan Operasional (Orang)					32	48.000.000	31	46.500.000	96,88%	96,88%			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	3,4	**Statistik**															
	3.4.1	**Program Pengembangan Statistik Daerah**	**Persentase ketersediaan data/informasi pembangunan daerah (ada/tidak ada)**					**1**	**290.200.000**	**1**	**106.625.000**	**100,00 %**	**36,74%**			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	3.4.1.1	Penyelenggaraan statistik sektoral skala kabupaten	jumlah dokumen yang dihasilkan (dokumen)					3	109.250.000	3	106.625.000	100,00 %	97,60%			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	3,5	**Perdagangan**															
	3.5.1	**Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Jumlah pasar Tipe C (unit)**					**1**	**5.000.000.000**	**0**	**599.812.000**	**0,00%**	**12,00%**				
	3.5.1.1	Pembangunan dan revitalisasi pasar	Jumlah Unit Pasar (unit)					2	85.000.000	2	84.612.000	100,00 %	99,54%			Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	
	3.5.1.2	Pengelolaan sarana perdagangan	Jumlah sarana perdagangan yang dikelola (pasar)					18	532.000.000	18	515.200.000	100,00 %	96,84%			Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	3.5.1.3	Pembinaan kelompok pedagang	Jumlah kelompok pedagang yang dibina (kelompok)					0	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	
	3.5.2	**Program Peningkatan Pelayanan Perdagangan dan Stabilisasi Harga Barang**	**Persentase tingkat kestabilan harga barang (%)**					**98**	**37.000.000**	**0**	**12.900.000**	**0,00%**	**34,86%**				
	3.5.2.1	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan							6.450.000							Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	
	3.5.2.2	Pemantauan harga dan stock barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya di tingkat pasar							6.450.000							Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	
	3.5.3	**Program Perlindungan Konsumen**	**Peningkatan jumlah barang beredar yang diawasi dan peralatan yang digunakan (jenis /alat)**					**9000**	**1.000.000.000**	**0**	**34.415.000**	**0,00%**	**3,44%**			Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	
	3.5.3.1	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Jumlah barang yang diawasi (barang)					5040	8.100.000	6923	8.000.000	137,36 %	98,77%			Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	
	3.5.3.2	Operasional dan pengembangan UPT kemetrologian daerah	jumlah alat yang ditera ulang (alat)					3960	22.500.000	2082	22.365.000	52,58%	99,40%			Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	
	3.5.3.3	Pendampingan penyelesaian permaslahan-permasalahan pengaduan konsumen	Jumlah konsumen dan pelaku usaha cerdas (orang)					80	4.450.000	80	4.050.000	100,00 %	91,01%			Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	
	3,6	**Perindustrian**															
	3.6.1	**Program Pengembangan dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Kecil Menengah**	**Cakupan bina kelompok penrajin (%)**					**50**	**900.000.000**	**0**	**59.410.000**	**0,00%**	**6,60%**				



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	3.6.1.1	Pelatihan kerajinan souvenir/ kerajinan tangan	Jumlah peserta yang dilatih (orang perempuan dan 10 orang laki-laki)					0	-	0	-	0,00%	0,00%			Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	
	3.6.1.2	Penguatan sentra dan kelompok penrajin	Jumlah sentra yang terbentuk (sentra)					1	16.085.000	1	16.085.000	100,00%	100,00%			Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	
	3.6.1.3		Jumlah IKM yang dibina (iKM)					20		20		100,00%				Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	
	3.6.1.4	Pelatihan pengembangan usaha industri (sertifikasi mutu produk, PKP, HAKI, HALAL)	Jumlah IKM yang dilatih (IKM)					30	43.465.000	30	43.325.000	100,00%	99,68%			Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	
	3,7	**Transmigrasi**															
	3.7.1	**Program Perencanaan, dan Pengembangan kawasan transmigrasi**	**Pendapatan perkapita transmigran ()**					**245675**	**245.675.000**	**0**	**59.774.500**	**0,00%**	**24,33%**			DPMPTSPTKT	
	3.7.1.1	Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	Jumlah sarana dan prasarana sosial ekonomi dikawasan transmigrasi (Persen)					100	60.000.000	100	59.774.500	100,00%	99,62%			DPMPTSPTKT	
	4	**Urusan Penunjang Urusan**															
	4,1	**Pelayanan Terpadu**															
	4.1.1	**Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**	**Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan rekomendasi tehnis (%)**					**100**	**507.500.000**	**0**	**130.874.250**	**0,00%**	**25,79%**			DPMPTSPTKT	
	4.1.1.1	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedür pelayanan publik	Jumlah dokumen regulasi (dokumen)					1	1.125.000	1	1.124.850	100,00%	99,99%			DPMPTSPTKT	
	4.1.1.2	Pengelolaan perizinan dan non perizinan dan penanaman modal	Jumlah rekomendasi yang ditindak lanjuti (rekomendasi)					2500	1.000.000	2035	999.700	81,40%	99,97%			DPMPTSPTKT	
	4.1.1.3	Penyusunan dan pengolahan data dan	Jumlah dokumen perizinan, non perizinan dan penanaman modal (izin)					2500	126.500.000	2035	126.499.850	81,40%	100,00%			DPMPTSPTKT	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		informasi pelayanan periziano dan non perizinan															
	4.1.1.4	Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi pelayanan	Jumlah sarana komunikasi dan informasi pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal yang up to date (paket)					1	-	0	-	0,00%	0,00%			DPMPTSPTKT	
	4.1.1.5	Monitoring dan evaluasi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi (dokumen)					4	2.250.000	4	2.249.850	100,00%	99,99%			DPMPTSPTKT	
	4.1.1.6	Sosialisasi dan penyebarluasan informasi pelayanan publik	Jumlah pelaksanaan sosialisasi informasi pelayanan publik (kali)					1	-	0	-	0,00%	0,00%			DPMPTSPTKT	
	4,2	**Perencanaan Pembangunan daerah**															
	4.2.1	**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**									**749.852.550**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			BAPPELITBANGDA	
	4.2.1.1	Penyusunan RKPD	Jumlah doumen yang tersusun (dokumen)					2	25.084.500	2	24.453.550	100,00%	97,48%			BAPPELITBANGDA	
	4.2.1.2	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah dokumen musrenbang (dokumen)					5	91.200.200	5	90.460.200	100,00%	99,19%			BAPPELITBANGDA	
	4.2.1.3	Penyusunan KUA-PPAS	Jumlah dokumen KUS-PPAS, Pokok dan perubahan (Dokumen)					4	21.637.500	4	21.546.000	100,00%	99,58%			BAPPELITBANGDA	
	4.2.1.4	Asistensi Penyusunan RAPBD	Jumlah SKPD yang di asistensi (SKPD)					34	77.530.000	34	74.654.000	100,00%	96,29%			BAPPELITBANGDA	
	4.2.1.5	Koordinasi Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	Jumlah Peserta Sosialisasi (Peserta)					180	223.000.000	306	212.294.000	170,00%	95,20%			BAPPELITBANGDA	
	4.2.1.6	Koordinasi Pembinaan Kabupaten Sehat	Jumlah kecamatan dan desa yang dibina (Kecamatan, 49 Desa)					8	4.405.000	8	4.405.000	100,00%	100,00%			BAPPELITBANGDA	
	4.2.1.7	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi (Dokumen)					2	4.745.000	2	1.995.000	100,00%	42,04%			BAPPELITBANGDA	
	4.2.1.8	Koordinasi Perencanaan Responsif Gender	Jumlah SKPD yang menerapkan PPRG (SKPD)					34	3.750.000	34	3.750.000	100,00%	100,00%			BAPPELITBANGDA	
	4.2.1.9	Koordinasi Perencanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP)	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Koordinasi (Dokumen)					1	3.900.000	1	3.648.800	100,00%	93,56%			BAPPELITBANGDA	
	4.2.1.10	Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah peserta sosialisasi (Orang)					350	-	350	-	100,00%	0,00%			BAPPELITBANGDA	
	4.2.1.11	Pendampingan Penyusunan RPJM Desa	Jumlah desa yang didampingi (Desa)					6	-	6	-	100,00%	0,00%			BAPPELITBANGDA	
	4.2.1.12	Koordinasi penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak	Jumlah dokumen Hasil pelaksanaan koordinasi (Orang)					100	2.550.000	100	2.550.000	100,00%	100,00%			BAPPELITBANGDA	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	4.2.1.13	Pembangunan sistem informasi perencanaan pembangunan	Jumlah Aplikasi/Software (Aplikasi)					3	35.000.000	3	35.000.000	100,00 %	100,00 %			BAPPELITBANGDA	
	4.2.1.14	Penyusunan, Pengumpulan dan Analisis Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang Ekonomi	Jumlah dokumen (Dokumen)					1	-	0	-	0,00%	0,00%			BAPPELITBANGDA	
	4.2.1.15	Penyusunan, Pengumpulan dan Analisis Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang Sosial Budaya	Jumlah dokumen (Dokumen)					1	-	0	-	0,00%	0,00%			BAPPELITBANGDA	
	4.2.1.16	Penyusunan, Pengumpulan dan Analisis Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana	Jumlah dokumen (Dokumen)					1	-	0	-	0,00%	0,00%			BAPPELITBANGDA	
	4.2.1.17	Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	Jumlah dokumen perjanjian Kinerja (Dokumen)					1	2.250.000	1	2.100.000	100,00 %	93,33%			BAPPELITBANGDA	
	4.2.1.18	Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Jumlah dokumen SIPD (Dokumen)					1	57.250.000	1	56.661.000	100,00 %	98,97%			BAPPELITBANGDA	
	4.2.1.19	Penyusunan indikator ekonomi	Jumlah dokumen indikator ekonomi (Dokumen)					1	-	0	-	0,00%	0,00%			BAPPELITBANGDA	
	4.2.1.20	Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja SKPD	jumlah renja SKPD yang diverifikasi (SKPD)					34	17.350.000	34	15.460.000	100,00 %	89,11%			BAPPELITBANGDA	
	4.2.1.21	Penyusunan Dokumen Teknokratif RPJMD Kab. Soppeng	Dokumen teknokratif RPJMD kabupaten Soppeng (Dokumen)					1	88.800.000	1	80.375.000	100,00 %	90,51%			BAPPELITBANGDA	
	4.2.1.22	Penyusunan KLHS RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS (Dokumen)					1	120.650.000	1	120.500.000	100,00 %	99,88%			BAPPELITBANGDA	
	4.2.2	**Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan**									**32.580.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			BAPPELITBANGDA	
	4.2.2.1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen hasil Monev pelaksanaan APBD dan APBN Rencana pembangunan Daerah pemerintah kabupaten soppeng (Dokumen)					2	14.625.000	2	13.510.000	100,00 %	92,38%			BAPPELITBANGDA	
	4.2.2.2	Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen LKPD Kabupaten (Dokumen)					1	18.150.000	1	14.650.000	100,00 %	80,72%			BAPPELITBANGDA	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	4.2.2.3	Pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Jumlah Dokumen hasil evaluasi (Dokumen)					1	6.850.000	1	4.420.000	100,00 %	64,53%			BAPPELITBANGDA	
	4.2.3	**Program Peningkatan Kapasitas SDM Perencanaan Pembangunan Daerah**									**24.000.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				
	4.2.3.1	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	Jumlah tenaga perencana yang lulus bersertifikat dan yang mengikuti diklat/bintek (jenis)					2	13.500.000	2	13.500.000	100,00 %	100,00 %			BAPPELITBANGDA	
	4.2.3.2	Workshop Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah peserta Workshop (Orang)					100	10.500.000	100	10.500.000	100,00 %	100,00 %			BAPPELITBANGDA	
	4.2.4	**Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah**									**540.335.500**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			BAPPELITBANGDA	
	4.2.4.1	Penyusunan penelitian dan pengembangan daerah pembangunan daerah	Jumlah dokumen penelitian & Pengembangan (dokumen)					3	536.325.000	3	511.880.500	100,00 %	95,44%			BAPPELITBANGDA	
	4.2.4.2	Inovasi pelayanan publik	Jumlah SKPD yang difasilitasi (Inovasi)					3	31.372.000	3	28.455.000	100,00 %	90,70%			BAPPELITBANGDA	
	4,3	**Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**															
	4.3.1	**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.**	**Persentase Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah Tepat Waktu (%)**					**100**	**3.000.000.000**	**100**	**1.880.579.750**	**100,00 %**	**62,69%**			BPKPD	
	4.3.1.1	Penyusunan standar Satuan Harga.	Jumlah buku standarisasi harga barang dan jasa (Buku)					2	91.150.000	2	63.900.000	100,00 %	70,10%			BPKPD	
	4.3.1.2	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.	Jumlah Rancangan PERDA tentang APBD (Rancangan Perda)					1	344.085.000	1	330.776.850	100,00 %	96,13%			BPKPD	
	4.3.1.3	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD.	Jumlah Rancangan Perbup tentang penjabaran APBD (Rancangan Perbup)					1	59.750.000	1	57.936.900	100,00 %	96,97%			BPKPD	
	4.3.1.4	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.	Jumlah rancangan PERDA tentang perubahan APBD (Rancangan Perda)					1	820.930.000	1	806.169.375	100,00 %	98,20%			BPKPD	
	4.3.1.5	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD.	Jumlah rancangan Perbup tentang penjabaran perubahan APBD (Rancangan Perbup)					1	67.600.000	1	64.673.275	100,00 %	95,67%			BPKPD	
	4.3.1.6	Penyusunan rancangan perda tentang	Jumlah Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Rancangan Perda)					1	67.826.700	1	67.767.400	100,00 %	99,91%			BPKPD	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.															
	4.3.1.7	Penyusunan rancangan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Jumlah Rancangan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Rancangan Perbup)					1	40.740.000	1	40.737.075	100,00 %	99,99%			BPKPD	
	4.3.1.8	Sinkronisasi dan rekonsiliasi pengelolaan dana perimbangan dengan instansi terkait.	Jumlah SKPD pengelola Dana DAK (SKPD)					9	11.087.500	9	11.057.500	100,00 %	99,73%			BPKPD	
	4.3.1.9	Peningkatan manajemen tuntutan ganti kerugian keuangan daerah.	Jumlah pelaksanaan sidang Majelis (Kali)					2	166.750.000	2	93.450.000	100,00 %	56,04%			BPKPD	
	4.3.1.10	Penyusunan rancangan peraturan-perundang undangan.	Jumlah Rancangan Peraturan Perundang - undangan tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Ranperpu)					1	95.975.000	1	95.975.000	100,00 %	100,00 %			BPKPD	
	4.3.1.11	Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan.	Persentase penyelesaian verifikasi SP2D tepat waktu (%)					100	67.607.500	100	67.567.500	100,00 %	99,94%			BPKPD	
	4.3.1.12	Sosialisasi APBD pokok dan perubahan.	Jumlah peserta sosialisasi (Orang PerempuanOrang laki-Laki)					200	22.500.000	200	15.000.000	100,00 %	66,67%			BPKPD	
	4.3.1.13	Penyusunan standar biaya umum	Jumlah dokumen standar biaya umum (Dokumen)					1	10.850.000	1	6.985.875	100,00 %	64,39%			BPKPD	
	4.3.1.14	Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah.	Jumlah Laporan Keuangan yang akuntabel (Laporan)					2	2.825.000	2	2.450.000	100,00 %	86,73%			BPKPD	
	4.3.1.15	Pembinaan dan peningkatan pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang dibina pengelolaan keuangannya (Desa)					0	-	0	-	0,00%	0,00%			BPKPD	
	4.3.1.16	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kabupaten	Jumlah laporan keuangan akhir tahun (Laporan)					1	36.375.000	1	35.313.000	100,00 %	97,08%			BPKPD	
	4.3.1.17	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kabupaten	Jumlah laporan keuangan semesteran (Laporan)					2	61.225.000	2	60.510.000	100,00 %	98,83%			BPKPD	
	4.3.1.18	Pengelolaan Gaji dan Tunjangan PNSD	Persentase pembayaran gaji tepat waktu dan tepat jumlah (%)					100	24.940.000	100	24.940.000	100,00 %	100,00 %			BPKPD	
	4.3.1.19	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Kas (Dokumen)					5	35.575.000	5	35.370.000	100,00 %	99,42%			BPKPD	
	4.3.2	**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah.**	**Persentase Jumlah SKPD dengan Pencatatan Aset yang Benar (%)**					**80,73**	**1.500.000.000**	**0**	**529.895.062**	**0,00%**	**35,33%**			BPKPD	
	4.3.2.1	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (Dokumen)					3	110.278.225	3	91.898.812	100,00 %	83,33%			BPKPD	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	4.3.2.2	Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.	Jumlah Dokumen Penjualan dan Penghapusan BMD (Dokumen)					4	77.364.000	4	52.335.150	100,00 %	67,65%			BPKPD	
	4.3.2.3	Penilaian Aset Daerah.	Jumlah Dokumen Penilaian Aset Daerah (Dokumen)					1	82.900.000	1	80.586.550	100,00 %	97,21%			BPKPD	
	4.3.2.4	Pengamanan aset-aset pemerintah daerah	Jumlah Aset Pemda yang diamankan (Aset pemda dan 2 Titik Penjagaan)					60	495.205.000	60	304.650.750	100,00 %	61,52%			BPKPD	
	4.3.2.5	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah SKPD yang dibina dan diawasi dalam pengelolaan BMD (SKPD)					34	423.800	34	423.800	100,00 %	100,00 %			BPKPD	
	4.3.3	**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**Persentase Peningkatan PAD (%)**					**1,8**	**2.500.000.000**	**0**	**892.316.200**	**0,00%**	**35,69%**			BPKPD	
	4.3.3.1	Penyediaan barang cetakan/ benda berharga.	Jumlah Barang Cetakan / Benda Berharga (Jenis)					120	313.102.599	120	294.554.000	100,00 %	94,08%			BPKPD	
	4.3.3.2	Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.	Persentase pencapaian target pajak daerah (UPTD Wilayah Kecamatan Liliriaja) (%)					100	459.270.000	100	425.990.900	100,00 %	92,75%			BPKPD	
			Persentase pencapaian target pajak daerah (UPTD Wilayah Kecamatan Marioriwawo) (%)					100		100		100,00 %				BPKPD	
			Persentase pencapaian target pajak daerah (UPTD Wilayah Kecamatan Lalabata) (%)					100		95		95,00%				BPKPD	
			Persentase pencapaian target pajak daerah (UPTD Wilayah Kecamatan Lilirilau) (%)					100		96		96,00%				BPKPD	
			Persentase pencapaian target pajak daerah (UPTD Wilayah Kecamatan Ganra) (%)					100		96		96,00%				BPKPD	
			Persentase capaian target pajak daerah (UPTD Wilayah Kecamatan Donri-Donri) (%)					100		103		103,00 %				BPKPD	
			Persentase pencapaian target pajak daerah (UPTD Wilayah Kecamatan Marioriawa) (%)					100		100		100,00 %				BPKPD	
			Persentase capaian target Pajak Daerah (%)					100		104,68		104,68 %				BPKPD	
			Persentase pencapaian target pendapatan retribusi daerah (UPTD Wilayah Kecamatan Citta) (%)					100		91		91,00%				BPKPD	
	4.3.3.3	Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah.	Persentase capaian target retribusi daerah (%)					100	62.650.000	155,08	55.950.000	155,08 %	89,31%			BPKPD	
	4.3.3.4	Pembentukan dan pemutakhiran Basis data obyek pajak daerah dan retribusi daerah.	Jumlah laporan pemutakhiran basis data bangunan objek pajak dan retribusi (Laporan)					3	117.575.000	3	115.821.300	100,00 %	98,51%			BPKPD	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	4,4	**Kepegawaian dan Diklat**															
	4.4.1	**Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur**	**Tingkat Kedisiplinan ASN (%)**					**98,58**	**116.906.000**	**0**	**40.050.000**	**0,00%**	**34,26%**			BKPSDM	
	4.4.1.1	Pemberian Penghargaan ASN Berprestasi	Jumlah PNS Yang Diberikan Penghargaan Karena Prestasi dan Pengabdiannya (Orang)					400	38.750.000	585	38.750.000	146,25 %	100,00 %			BKPSDM	
	4.4.1.2	Pengelolaan Kinerja dan Disiplin Pegawai	Pelaksanaan Pengelolaan Absensi PNS dan Penegakan Disiplin PNS Secara Berkala, Pengadaan Mesin Absensi (Dokumen)					1	1.300.000	1	1.300.000	100,00 %	100,00 %			BKPSDM	
	4.4.2	**Program Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Dalam Jabatan**	**Persentase ASN Yang Mengikuti Diklat Prajabatan dan Diklat Dalam Jabatan Pada BKD Kabupaten Soppeng Sesuai Dengan Analisis Kebutuhan Diklat (%)**					**6,2**	**2.872.172.000**	**0**	**251.702.500**	**0,00%**	**8,76%**			BKPSDM	
	4.4.2.1	Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan dan Diklat dalam Jabatan	Jumlah Pengiriman Peserta Diklat Ke Lembaga Diklat Yang Tidak Tercover Dalam Pelaksanaan Kelas Di BKD Soppeng (Orang)					3	90.783.000	3	90.783.000	100,00 %	100,00 %			BKPSDM	
	4.4.2.2	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III	Jumlah Kelas Diklat Prajabatan Golongan III (Kelas)					2	-	0	-	0,00%	0,00%			BKPSDM	
	4.4.2.3	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi	Jumlah Kelas Diklat Teknis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi (Kelas)					1	77.790.875	1	77.750.875	100,00 %	99,95%			BKPSDM	
	4.4.2.4	Pendidikan dan Pelatihan bagi Tenaga Pendidikan	Jumlah Kelas Diklat Untuk Tenaga Pendidik (Kelas)					1	83.208.625	1	83.168.625	100,00 %	99,95%			BKPSDM	
	4.4.2.5	Pendidikan dan Pelatihan bagi Tenaga Kesehatan	Jumlah Kelas Diklat Untuk Tenaga Kesehatan (Kelas)					1	-	0	-	0,00%	0,00%			BKPSDM	
	4.4.2.6	Pendidikan dan Pelatihan bagi Tenaga Penyuluh	Jumlah Kelas Diklat Untuk Tenaga Penyuluh (Kelas)					1	-	0	-	0,00%	0,00%			BKPSDM	
	4.4.3	**Program Perencanaan dan Mutasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara**	**Persentase Pemenuhan ASN (%)**					**92,27**	**2.500.000.000**	**0**	**485.584.725**	**0,00%**	**19,42%**			BKPSDM	
	4.4.3.1	Perencanaan, penyeleksian dan pengangkatan ASN	Kebutuhan Pemenuhan Kebutuhan ASN Melalui Seleksi CPNS (%)					100	400.075.000	100	388.317.100	100,00 %	97,06%			BKPSDM	
	4.4.3.2	Penempatan ASN	Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi (ASN)					5169	24.615.000	5169	23.415.000	100,00 %	95,12%			BKPSDM	
	4.4.3.3	Pemberhentian ASN	Persentase Realisasi Pengusulan PNS Yang Memasuki Usia Pensiun Berdasarkan PNS Yang Memenuhi Syarat (%)					100	3.475.000	100	3.475.000	100,00 %	100,00 %			BKPSDM	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	4.4.3.4	Penilaian kompetensi ASN	Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator (Kali)					1	186.694.995	0	-	0,00%	0,00%			BKPSDM	
	4.4.3.5	Mutasi kepangkatan ASN	Persentase Terbitnya SK Kenaikan Pangkat PNS Yang Bersyarat (%)					100	15.215.125	100	15.215.125	100,00%	100,00%			BKPSDM	
	4.4.3.6	Pemberian tugas belajar kepada ASN	Jumlah PNS Yang Lulus Seleksi Tugas Belajar (Orang)					1	55.162.500	1	55.162.500	100,00%	100,00%			BKPSDM	
	4.4.3.7	Sosialisasi Peraturan Kepegawaian	Jumlah Sosialisasi/Rapat Koordinasi Kepegawaian Yang Dilaksanakan (kali)					1	-	0	-	0,00%	0,00%			BKPSDM	
	4.4.4	**Program Penyelenggaraan Pelayanan Kepegawaian**	**Persentase Pelayanan Kepegawaian Secara Tepat Waktu (%)**					**100**	**317.190.000**	**0**	**351.241.100**	**0,00%**	**110,74%**			BKPSDM	
	4.4.4.1	Pelayanan Pengadministrasian Berkas-Berkas Kepegawaian	Persentase Realisasi Cuti PNS, LP2P, KPE, Karis Karsu dan Taspen Berdasarkan Pengusulan Yang Memenuhi Syarat (%)					100	21.031.850	100	17.251.850	100,00%	82,03%			BKPSDM	
	4.4.4.2	Pelayanan Kartu Identitas dan Atribut Pegawai	Persentase Penertiban Tanda Pengenal Bagi PNS Berdasarkan Usulan (%)					100	6.500.000	100	6.500.000	100,00%	100,00%			BKPSDM	
	4.4.4.3	Pengembangan dan pengelolaan Data Base Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian Yang Digunakan (Sistem)					3	329.100.000	3	324.039.250	100,00%	98,46%			BKPSDM	
	4.4.4.4	Pelayanan izin belajar dan seleksi calon mahasiswa ke perguruan tinggi berikatan dinas	Persentase PNS Yang Mendapatkan Izin Belajar Berdasarkan Hasil Seleksi, Jumlah Calon Mahasiswa Yang Diperoses Berdasarkan Yang Memenuhi Syarat (%)					100	5.950.000	100	3.450.000	100,00%	57,98%			BKPSDM	
	4,5	**Sekretariat Daerah**															
	4.5.1	**Program Pemberian pertimbangan, pendapat dan pendampingan Hukum keluarga miskin**							**100.000.000**		**-**	**#DIV/0!**	**0,00%**			Sekretariat Daerah	
	4.5.1.1	Kegiatan Layanan Bantuan Hukum Magi Masyarakat Miskin	Warga miskin yang mendapat bantuan hukum (Bagian Hukum dan Perundang-Undangan) (Orang)					10	53.750.000	0	-	0,00%	0,00%			Sekretariat Daerah	
	4.5.2	**Program Peningkatan Kedinesan KDH dan WKDH**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (%)**					**100**	**3.909.879.000**	**0**	**1.887.034.600**	**0,00%**	**48,26%**			Sekretariat Daerah	
	4.5.2.1	Dialog/Audiense dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	Jumlah Kedinasan Bupati dan Wakil Bupati yang dilayani (Bagian Umum) (Kali)					29	995.969.125	29	927.535.000	100,00%	93,13%			Sekretariat Daerah	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	4.5.2.2	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	jumlah kunjungan Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri yang dilayani (Bagian Umum) (Kali)					25	619.696.670	25	612.341.000	100,00 %	98,81%			Sekretariat Daerah	
	4.5.2.3	Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya yang dilaksanakan (Bagian Umum) (Kali)					116	300.000.000	25,75	237.958.600	22,20%	79,32%			Sekretariat Daerah	
	4.5.2.4	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Kunjungan Kerja/Inspeksi Bupati dan Wakil Bupati yang terlayani (Bagian Umum) (Tahun)					1	141.200.000	1	109.200.000	100,00 %	77,34%			Sekretariat Daerah	
	4.5.3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Evaluasi Kinerja dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**Cakupan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun tepat waktu (%)**					**100**	**170.000.000**	**0**	**31.070.000**	**0,00%**	**18,28%**			Sekretariat Daerah	
	4.5.3.1	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Bupati	Buku laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Soppeng (Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah) (Dokumen)					1	15.870.000	1	15.870.000	100,00 %	100,00 %			Sekretariat Daerah	
	4.5.3.2	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten	Buku laporan penyelenggaraan pemerintahan Kab. Soppeng (Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah) (Dokumen)					1	9.150.000	1	9.150.000	100,00 %	100,00 %			Sekretariat Daerah	
	4.5.3.3	Koordinasi Penyelenggaraan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal	Dokumen koordinasi SPM (Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah) (Dokumen)					1	6.050.000	1	6.050.000	100,00 %	100,00 %			Sekretariat Daerah	
	4.5.4	**Program Pembinaan dan Pengembangan Keprotokoleran**	**terlaksananya aktifitas keprotokolan daerah (%)**					**0**	**213.735.000**	**0**	**-**	**#DIV/0!**	**0,00%**			Sekretariat Daerah	
	4.5.4.1	Orientasi Keprotokoleran	Jumlah Peserta Orientasi (Orang)					0	-	0	-	0,00%	0,00%			Sekretariat Daerah	
			Jumlah Peserta Orientasi (Bagian Humas dan Protokol) (Orang)					0		0		0,00%				Sekretariat Daerah	
	4.5.4.2	Peningkatan Kegiatan Keprotokoleran	Jumlah acara keprotokoleran yang dilayani (Bagian Humas dan Protokol) (kali)					0	-	0	-	0,00%	0,00%			Sekretariat Daerah	
			Persentase kegiatan Keprotokoleran yang dilayani (%)					0		0		0,00%				Sekretariat Daerah	
	4.5..5	**Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah**	**Cakupan Administrasi bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang dikoordinasikan (100)**					**100**	**500.000.000**	**0**	**52.610.000**	**0,00%**	**10,52%**			Sekretariat Daerah	
	4.5.5.1	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan dan					8	14.400.000	8	14.400.000	100,00 %	100,00 %			Sekretariat Daerah	

No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Kecamatan dan Kelurahan	kelurahan (Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah) (Kali)														
	4.5.5.2	Pendampingan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan	Jumlah PATEN yang terlaksana di Kecamatan (Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah) (Kali)					8	3.500.000	8	3.500.000	100,00 %	100,00 %			Sekretariat Daerah	
	4.5.5.3	Kegiatan Koordinasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Kerjasama di Kabupaten Soppeng	Data koordinasi kependudukan, catatan sipil dan kerjasama di Kabupaten Soppeng (Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah) (Dokumen)					1	25.450.000	1	25.450.000	100,00 %	100,00 %			Sekretariat Daerah	
	4.5.5.4	Pelaksanaan Koordinasi Wilayah Perbatasan Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Dokumen wilayah perbatasan Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan Di Kabupaten Soppeng (Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah) (Dokumen)					1	3.300.000	1	3.300.000	100,00 %	100,00 %			Sekretariat Daerah	
	4.5.5.5	Koordinasi Pembakuan Unsur Rupabumi Kabupaten Soppeng	Dokumen pembakuan unsur rupabumi di setiap Kecamatan (Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah) (Dokumen)					1	5.400.000	1	5.400.000	100,00 %	100,00 %			Sekretariat Daerah	
	4.5.5.6	Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD	Dokumen pelaksanaan Administrasi KDH/WKDH dan DPRD (Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah) (Dokumen)					1	560.000	1	560.000	100,00 %	100,00 %			Sekretariat Daerah	
	4.5.6	**Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Hukum dan Perundang-Undangan**	**Cakupan Administrasi bidang hukum dan perundang-undangan yang dikoordinasikan (N/A)**					**100**	**500.000.000**	**0**	**96.456.250**	**0,00%**	**19,29%**			Sekretariat Daerah	
	4.5.6.1	Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Proses Tindak Lanjut Hasil Temuan (Bagian Hukum dan Perundang-Undangan) (LHP)					85	4.925.000	0	-	0,00%	0,00%			Sekretariat Daerah	
	4.5.6.2	Pendampingan Hukum bagi Pemerintah Daerah	jumlah kasus di lingkup Pemerintah Daerah yang ditangani (Bagian Hukum dan Perundang-Undangan) (Kasus)					2	65.250.000	2	63.160.000	100,00 %	96,80%			Sekretariat Daerah	
	4.5.6.3	Kegiatan Pengelolaan Data LHKPN	Data LHKPN di Kabupaten Soppeng (Bagian Hukum dan Perundang-Undangan) (orang)					37	3.700.000	37	1.950.000	100,00 %	52,70%			Sekretariat Daerah	
	4.5.6.4	Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Rancangan PERDA (Bagian Hukum dan Perundang-Undangan) (PHD)					100	50.375.000	95	23.596.250	95,00%	46,84%			Sekretariat Daerah	
	4.5.6.5	Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan	jumlah Kelompok Kadarkum (Bagian Hukum dan Perundang-Undangan) (Kelompok)					8	17.325.000	0	-	0,00%	0,00%			Sekretariat Daerah	
	4.5.6.6	Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi dan Keserasian antara Peraturan Perundang-undangan Daerah	jumlah produk hukum daerah yang terpublikasi (Bagian Hukum dan Perundang-Undangan) (Produk Hukum)					15	11.125.000	15	6.937.500	100,00 %	62,36%			Sekretariat Daerah	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	4.5.6.7	Publikasi Peraturan Perundang-undangan berupa Sosialisasi Peraturan tentang Rokok/Pajak Tembakau	jumlah yang tersosialisasi publikasi perundang-undangan tentang rokok (Bagian Hukum dan Perundang-Undangan) (Orang)					320	49.884.578	0	-	0,00%	0,00%			Sekretariat Daerah	
	4.5.6.8	Penyusunan dan Pengelolaan Data dan Informasi Pelayanan	Data Pelaksanaan HAM di Kabupaten Soppeng (Bagian Hukum dan Perundang-Undangan) (Dokumen)					1	2.212.500	1	812.500	100,00 %	36,72%			Sekretariat Daerah	
	4.5.7	**Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Organisasi dan Tata laksana**	**Cakupan Administrasi bidang organisasi dan tatalaksana yang dikoordinasikan (N/A)**					**100**	**700.000.000**	**0**	**149.111.450**	**0,00%**	**21,30%**			Sekretariat Daerah	
	4.5.7.1	Evaluasi Kelembagaan serta Tugas dan Fungsi	Dokumen Hasil Evaluasi Kelembagaan dan Fungsi (Dokumen)					2	16.760.000	2	13.360.000	100,00 %	79,71%			Sekretariat Daerah	
	4.5.7.2	Proses Pelaksanaan Ketatalaksanaan	Pedoman tata naskah, pakaian dinas, mekanisme dan produksi kerja. (Bagian Organisasi dan Tatalaksana) (Dokumen)					1	12.310.000	1	11.328.650	100,00 %	92,03%			Sekretariat Daerah	
	4.5.7.3	Penyususnan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Dokumen hasil perumusan, pengolahan revisi jabatan dan beban kerja & evaluasi jabatan serta Standar Komptensi Jabatan (Bagian Organisasi dan Tatalaksana) (Dokumen)					3	20.670.000	3	20.161.300	100,00 %	97,54%			Sekretariat Daerah	
	4.5.7.4	Penyususnan Road Map Program Reformasi Birokrasi	Laporan pelaksanaan reformasi birokrasi dan PMPRB (Bagian Organisasi dan Tatalaksana) (Dokumen)					1	16.885.000	1	16.885.000	100,00 %	100,00 %			Sekretariat Daerah	
	4.5.7.5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bimbinagn Teknis yang diikuti (Bagian Organisasi dan Tatalaksana) (kali)					2	8.618.000	2	8.618.000	100,00 %	100,00 %			Sekretariat Daerah	
	4.5.7.6	Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Aparatur yang meningkat kedisiplinannya (Bagian Organisasi dan Tatalaksana) (org)					0	-	0	-	0,00%	0,00%			Sekretariat Daerah	
	4.5.7.7		Jumlah Aparatur yang meningkat kedisiplinannya (org)					0		0		0,00%				Sekretariat Daerah	
	4.5.7.8	Administrasi Kepegawaian	Data Administrasi Kepegawaian (Bagian Organisasi dan Tatalaksana) (Dokumen)					1	24.000.000	1	24.000.000	100,00 %	100,00 %			Sekretariat Daerah	
	4.5.7.9	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Dokumen Standar operasional prosedur (Bagian Organisasi dan Tatalaksana) (Dokumen)					1	34.156.800	1	33.012.250	100,00 %	96,65%			Sekretariat Daerah	
	4.5.7.10	Peningkatan Kualitas Kinerja Pelayanan Publik	dokumen Standar Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat. (Bagian Organisasi dan Tatalaksana) (Dokumen)					1	5.978.000	1	5.728.000	100,00 %	95,82%			Sekretariat Daerah	
	4.5.7.11	Penilaian Kinerja Pelayanan Publik	UKPP yang bersyarat untuk di nilai (Bagian Organisasi dan Tatalaksana) (SKPD)					0	-	0	-	0,00%	0,00%			Sekretariat Daerah	
	4.5.7.12	Pendampingan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD (Bagian Organisasi dan Tatalaksana) (kali)					11	29.955.000	11	16.018.250	100,00 %	53,47%			Sekretariat Daerah	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	4.5.8	**Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam**	**Cakupan Administrasi bidang perekonomian, pembangunan dan sumber daya alam yang dikoordinasikan (N/A)**					**100**	**600.000.000**	**0**	**50.237.925**	**0,00%**	**8,37%**			Sekretariat Daerah	
	4.5.8.1	Pengendalian dan Peningkatan Data Pembangunan Se-Kabupaten Soppeng	Dokumen laporan dan capaian realisasi fisik proyek/kegiatan pembangunan (Bagian Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam) (Dokumen)					0	-	0	-	0,00%	0,00%			Sekretariat Daerah	
	4.5.8.2	Koordinasi Pembinaan dan pengumpulan Informasi hasil Tembakau Ilegal	Data Peningkatan Koordinasi,Pembinaan dan Monitoring Kebijakan DBHCHT dan tersusunnya Data Tembakau Ilegal (Bagian Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam) (Dokumen)					4	2.825.500	4	2.825.500	100,00%	100,00%			Sekretariat Daerah	
	4.5.8.3	Pembinaan Agen/Pangkalan BBM dan LPG Bersubsidi	Penertiban dan Pengawasan harga, distribusi BBM dan LPG Bersubsidi (Bagian Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam) (Dokumen)					1	6.237.500	1	4.487.500	100,00%	71,94%			Sekretariat Daerah	
	4.5.8.4	Koordinsi Pembinaan dan Pengawasan BUMD	Data Pembinaan dan Pengawasan BUMD (Bagian Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam) (Perda)					1	30.000.000	1	30.000.000	100,00%	100,00%			Sekretariat Daerah	
	4.5.8.5	Koordinasi Penguatan dan pengendalian Stabilitas Perekonomian Daerah	Data Koordinasi Stabilitas perekonomian daerah (Bagian Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam) (Dokumen)					1	4.975.000	1	4.975.000	100,00%	100,00%			Sekretariat Daerah	
	4.5.8.6	Sosialisasi Regulasi dan Kebijakan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Mineral	Data pengendalian Sumber daya Alam dan mineral (Bagian Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam) (Dokumen)					1	6.149.925	1	6.149.925	100,00%	100,00%			Sekretariat Daerah	
	4.5.8.7	Pelaksanaan Koordinasi Pengendalian Pembangunan	Data Koordinasi pengendalian pembangunan (Bagian Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam) (Dokumen)					1	1.800.000	1	1.800.000	100,00%	100,00%			Sekretariat Daerah	
	4.5.9	**Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Pengadaan Barang/Jasa**	**Cakupan Administrasi bidang pengadaan barang/jasa yang dikoordinasikan (N/A)**					**100**	**1.000.000.000**	**0**	**619.665.000**	**0,00%**	**61,97%**			Sekretariat Daerah	
	4.5.9.1	Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa	Dokumen data evaluasi pelaksanaan tender (Bagian Pengadaan Barang/Jasa) (Dokumen)					1	2.550.000	1	2.550.000	100,00%	100,00%			Sekretariat Daerah	
	4.5.9.2	Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang dilayani secara elektronik (Bagian Pengadaan Barang/Jasa) (%)					100	53.375.000	100	51.665.000	100,00%	96,80%			Sekretariat Daerah	
	4.5.9.3	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa yang ditender (Bagian Pengadaan Barang/Jasa) (Paket)					120	560.500.000	50	560.200.000	41,67%	99,95%			Sekretariat Daerah	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	4.5.9.4	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah pembinaan/ advokasi pengadaan barang/jasa (Bagian Pengadaan Barang/Jasa) (Kali)					2	5.250.000	2	5.250.000	100,00 %	100,00 %			Sekretariat Daerah	
	4.5.10	**Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat**	**Cakupan Administrasi bidang kesejahteraan rakyat yang dikoordinasikan (N/A)**					**100**	**800.000.000**	**0**	**1.091.656.250**	**0,00%**	**136,46 %**			Sekretariat Daerah	
	4.5.10.1	Pembinaan Pelaksanaan Sekolah Sehat	Jumlah lomba sekolah sehat (Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat) (kali)					3	20.750.000	0	2.888.750	0,00%	13,92%			Sekretariat Daerah	
	4.5.10.2	Pelaksanaan Pemberangkatan/Pemulangan Jamaah Haji	Jumlah Jamaah Haji yang diberangkatkan/dipulangkan (Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat) (orang)					0	-	0	-	0,00%	0,00%			Sekretariat Daerah	
	4.5.10.3	Pelaksanaan Perayaan hari-hari besar Keagamaan	Jumlah Perayaan Hari Besar Keagamaan yang dilaksanakan (Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat) (kali)					7	222.300.000	7	213.145.000	100,00 %	95,88%			Sekretariat Daerah	
	4.5.10.4	Pelaksanaan/Keikutsertaan MTQ & STQ	Jumlah pelaksanaan MTQ & STQ (Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat) (kali)					2	489.725.000	2	485.140.000	100,00 %	99,06%			Sekretariat Daerah	
	4.5.10.5	Pelaksanaan Festival Anak Saleh	Jumlah Festival anak Saleh (Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat) (kali)					1	87.200.000	1	83.600.000	100,00 %	95,87%			Sekretariat Daerah	
	4.5.10.6	Pengembangan Nilai Budaya LASQI	Jumlah Festifal LASQI (Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat) (kali)					1	73.700.000	0	-	0,00%	0,00%			Sekretariat Daerah	
	4.5.10.7	peningkatan Nilai-nilai Keagamaan	Jumlah Kajian Agama untuk Peningkatan Nilai-Nilai Keagamaan (Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat) (kali)					15	514.650.000	15	306.882.500	100,00 %	59,63%			Sekretariat Daerah	
	4,6	**Sekretariat Dewan**															
	4.6.1	**Program Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah DPRD**									**3.939.210.614**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			Sekretariat DPRD	
	4.6.1.1	Penyelenggaraan pembahasan ranperda	Jumlah kegiatan pembahasan ranperda (kegiatan)					10	35.200.000	11	35.140.525	110,00 %	99,83%			Sekretariat DPRD	
	4.6.1.2	Pengkajian produk-produk hukum penyusunan ranperda inisiatif	Jumlah naskah akademik ranperda inisiatif DPRD (naskah)					2	90.000.000	2	90.000.000	100,00 %	100,00 %			Sekretariat DPRD	
	4.6.1.3	Pelaksanaan rapat paripurna DPRD	Jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan (keputusan)					13	207.750.000	27	171.355.800	207,69 %	82,48%			Sekretariat DPRD	
	4.6.1.4	Sosialisasi ranperda	Jumlah pelaksanaan sosialisasi ranperda inisiatif DPRD (kegiatan)					8	13.600.000	8	5.296.000	100,00 %	38,94%			Sekretariat DPRD	
	4.6.1.5	Penyusunan produk-produk hukum DPRD	Jumlah produk hukum yang dihasilkan (produk hukum)					5	37.000.000	5	35.851.475	100,00 %	96,90%			Sekretariat DPRD	
	4.6.1.6	Pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokoleran	Jumlah fasilitasi kehumasan dan keprotokoleran (kali)					12	236.000.000	12	235.255.000	100,00 %	99,68%			Sekretariat DPRD	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		pimpinan dan anggota DPRD															
	4.6.1.7	Pelaksanaan koordinasi, konsultasi,kunjungan kerja, orientasi dan pendalaman tugas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah perjalanan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, kunjungan kerja, orientasi dan pendalaman tugas oleh tiap-tiap pimpinan dan anggota DPRD (orang kali)					845	3.524.500.000	972	3.366.311.814	115,03 %	95,51%			Sekretariat DPRD	
	4.6.2	**Program Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD**									**677.813.925**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			Sekretariat DPRD	
	4.6.2.1	Pembahasan APBD	Jumlah kegiatan pembahasan APBD (kegiatan)					3	19.500.000	3	9.386.350	100,00 %	48,14%			Sekretariat DPRD	
	4.6.2.2	Pembahasan laporan pertanggungjawaban kepala daerah	Jumlah pembahasan pertanggungjawaban Kepala Daerah (kegiatan)					1	3.361.725	1	3.361.725	100,00 %	100,00 %			Sekretariat DPRD	
	4.6.2.3	Pelaksanaan reses	Jumlah pelaksanaan reses (kegiatan)					3	553.600.000	3	545.940.000	100,00 %	98,62%			Sekretariat DPRD	
	4.6.2.4	Dengar pendapat dengan pejabat pemerintah dan masyarakat	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan dari penjaringan aspirasi (aspirasi)					10	10.525.000	7	9.382.525	70,00%	89,15%			Sekretariat DPRD	
	4.6.2.5	Pelaksanaan rapat-rapat internal DPRD	Jumlah rapat yang dilaksanakan (kegiatan)					10	5.845.000	10	3.360.800	100,00 %	57,50%			Sekretariat DPRD	
	4.6.2.6	Pengawasan pelaksanaan peraturan daerah	Jumlah kegiatan peninjauan lapangan yang dilaksanakan (kegiatan)					4	10.500.000	4	2.883.800	100,00 %	27,46%			Sekretariat DPRD	
	4.6.2.7	Monitoring dan evaluasi kinerja DPRD	Jumlah kegiatan monev yang dilaksanakan (kegiatan)					1	103.850.000	1	103.498.725	100,00 %	99,66%			Sekretariat DPRD	
	4,7	**Inspektorat**															
	4.7.1	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Profesionalisme Pengawas**	**Persentase Tindaklanjut Temuan (%)**					**100**	**2.860.000.000**	**100**	**2.381.057.000**	**100,00 %**	**83,25%**			Inspektorat Daerah	
	4.7.1.1		Menurunnya Jumlah Temuan dalam LHP (LHP)					0		150						Inspektorat Daerah	
	4.7.1.2	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Reguler yang Terbit (LHP)					200	1.227.900.000	200	1.227.762.000	100,00 %	99,99%			Inspektorat Daerah	
	4.7.1.3	Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan (Pemutakhiran DAta)	Terlaksananya Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan (-)					0	-	0	-	0,00%	0,00%			Inspektorat Daerah	
	4.7.1.4	Evaluasi LAKIP	Lakip SKPD yang tepat Sasaran (SKPD)					34	87.365.000	34	86.595.000	100,00 %	99,12%			Inspektorat Daerah	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	4.7.1.5	Review Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penyerapan Anggaran Belanja Barang/Jasa	Jumlah SKPD yang Review Dokumen Perencanaannya (SKPD)					34	451.250.000	34	450.990.000	100,00 %	99,94%			Inspektorat Daerah	
	4.7.1.6	Pelatihan Teknis Pengawasan, Pengadaan Barang/Jasa, Penilaian Akuntabiltas Kinerja Pemerintah	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan (-)					0	-	0	-	0,00%	0,00%			Inspektorat Daerah	
	4.7.1.7	Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang di evaluasi (Desa)					49	99.745.000	49	99.745.000	100,00 %	100,00 %			Inspektorat Daerah	
	4.7.1.8	Pelaksanaan Pengawasan/Pemeriksaan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tujuan tertentu yang terbit (Kasus)					65	384.965.000	65	382.990.000	100,00 %	99,49%			Inspektorat Daerah	
	4.7.1.9	Monitoring & Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan APIP & Pemeriksaan BPK	Terlaksananya Monitoring & Evaluasi Temuan Hasil Pengawasan APIP & Pemeriksaan BPK (Kali)					4	136.715.000	4	132.975.000	100,00 %	97,26%			Inspektorat Daerah	
	4,8	**Kesatuan Bangsa dan Politik**															
	4.8.1	**Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**Terciptanya situasi konduusif (%)**					**100**	**1.211.985.000**	**0**	**453.279.000**	**0,00%**	**37,40%**			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	4.8.1.1	Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	jumlah pertemuan anggota FKDM (kali)					2	7.069.800	1	7.050.600	50,00%	99,73%			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	4.8.1.2		Jumlah Operator Peralatan/Mesin (Bulan)					12		12		100,00 %				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	4.8.1.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai - nilai luhur budaya bangsa	jumlah peserta sarasehan (orang)					0	-	0	-	0,00%	0,00%			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	4.8.1.4	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Jumlah Operator Peralatan/Mesin (Bulan)					12	9.459.900	12	8.809.900	100,00 %	93,13%			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	4.8.1.5		jumlah pelaksanaan pertemuan FPK (kali)					2		0		0,00%				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	4.8.1.6	Pencapaian halaqah dan berbagai forum	jumlah pelaksanaan pertemuan FKUB (kali)					2	13.609.800	0	13.609.800	0,00%	100,00 %			Badan Kesatuan	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wasbang														Bangsa dan Politik	
	4.8.1.7		Jumlah Operator Peralatan/Mesin (Bulan)					12		12		100,00 %				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	4.8.1.8	Pelatihan seminar, Talk Show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	jumlah peserta pelaksanaan sosialisasi / talk show (orang)					0	-	0	-	0,00%	0,00%			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	4.8.1.9	Penyelenggaraan Unit Layanan Pemberantasan Pungli (UPP)	jumlah pelaksanaan pertemuan saber pungli (Kali)					12	140.100.000	9	137.640.400	75,00%	98,24%			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	4.8.1.10		Jumlah Operator Peralatan/Mesin dan Buruh/Tenaga Lapagan (OB)					48		48		100,00 %				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	4.8.1.11	Penguatan Kewasapadaan dini dan penanganan terorisme, radikalisme, konflik sosial dan penyakit sosial masyarakat	Jumlah pelaksanaan pertemuan/rekomendasi (Kali)					12	237.273.300	11	234.873.300	91,67%	98,99%			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	4.8.1.12		Jumlah Jasa Operator Peralatan/Mesin dan Buruh/Tenaga Lapangan (OB)					24		18		75,00%				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	4.8.1.13	Penanganan narkoba melalui sistem pencegahan, penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah pelaksanaan pertemuan lintas sektor dan penyuluhan di delapan kecamatan (Kali)					0	-	0	-	0,00%	0,00%			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	4.8.1.14	Penyusunan Rancangan Perda Narkoba	Jumlah Pelaksanaan Penyusunan Rancangan PERDA Narkoba (Kali)					1	51.300.000	1	51.295.000	100,00 %	99,99%			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	4.8.2	**Program Pendidikan Politik Masyarakat**	**Tingkat partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi (%)**					**82**	**163.800.000**	**0**	**28.227.500**	**0,00%**	**17,23%**			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	4.8.2.1	Penyuluhan Kepada Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi (Orang)					0	-	0	-	0,00%	0,00%			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	4.8.2.2	Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	Jumlah Operator Peralatan/Mesin (Bulan)					12	6.502.500	12	6.502.500	100,00 %	100,00 %			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	4.8.2.3		Jumlah Partai Politik (Parpol)					7		7		100,00 %				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	4.8.2.4	Pembinaan Ormas/LSM dalam Bidang Kesbangpol	Jumlah peserta kegiatan pembinaan ormas/LSM (Orang)					0	-	0	-	0,00%	0,00%			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	4.8.2.5	Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik	Jumlah anggota yang melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan politik (Orang)					10	21.728.690	10	21.725.000	100,00 %	99,98%			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	4,9	**Kecamatan**															
	4	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan yang dilaksanakan (%)**					**100**	**651.920.000**	**0**	**357.640.000**	**0,00%**	**54,86%**			Kecamatan Marioriwawo	
		Bupati menyapa							-							Kecamatan Marioriwawo	
		Penyuluhan Kamtibmas	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan (orang (90 pria, 90 perempuan))					180	11.025.000	180	11.025.000	100,00 %	100,00 %			Kecamatan Marioriwawo	
		Pendampingan pengelolaan dana ADD desa	Jumlah desa yang difasilitasi (desa)					11	11.780.000	11	10.800.000	100,00 %	91,68%			Kecamatan Marioriwawo	
		Pembinaan guru mengaji, imam masjid kelurahan dan penghulu syara	Jumlah guru mengaji dan imam masjid (Kelurahan Labessi) (orang)					17	130.800.000	17	128.400.000	100,00 %	98,17%			Kecamatan Marioriwawo	
			Jumlah guru mengaji, imam masjid kelurahan dan penghulu syara yang diberi insentif (orang)					51		51		100,00 %				Kecamatan Marioriwawo	
			Jumlah guru mengaji dan imam masjid (Kelurahan TettikenraraE) (orang)					34		34		100,00 %				Kecamatan Marioriwawo	
		Pembinaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan	Jumlah RW, RT dan LPMK (Kelurahan TettikenraraE) (orang)					31	101.640.000	31	101.490.000	100,00 %	99,85%			Kecamatan Marioriwawo	
			Jumlah RW, RT dan LPMK (Kelurahan Labessi) (orang)					22		22		100,00 %				Kecamatan Marioriwawo	
			Jumlah RT, RW dan LPMK yang diberi insentif (orang)					53		53		100,00 %				Kecamatan Marioriwawo	
		Pembinaan kader posyandu kelurahan	Jumlah Kader Posyandu (Kelurahan Labessi) (orang)					20	82.500.000	20	82.500.000	100,00 %	100,00 %			Kecamatan Marioriwawo	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Jumlah kader posyandu yang diberi insentif (orang)					55		55		100,00 %				Kecamatan Marioriwawo	
			Jumlah kader Posyandu (Kelurahan TettikenraraE) (orang)					35		35		100,00 %				Kecamatan Marioriwawo	
		Penyelenggaraan kecamatan sehat	Jumlah pelaksanaan koordinasi kecamatan sehat (kali)					2	23.425.000	2	23.425.000	100,00 %	100,00 %			Kecamatan Marioriwawo	
		Penyusunan Profil kelurahan							-							Kecamatan Marioriwawo	
		Program Penyelenggaraan Kewenangan yang Dilimpahkan	**Persentase pelimpahan kewenangan yang terlaksana (%)**					**100**	**2.867.000.000**	**0**	**1.020.464.200**	**0,00%**	**35,59%**			Kecamatan Marioriwawo	
		Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kecamatan	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan (buah)					250	16.800.000	250	13.650.000	100,00 %	81,25%			Kecamatan Marioriwawo	
		Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	Jumlah sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Labessi) (paket)					2	375.500.000	2	375.341.000	100,00 %	99,96%			Kecamatan Marioriwawo	
			Jumlah sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan TettikenraraE) (Paket)					3		3		100,00 %				Kecamatan Marioriwawo	
		Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	Jumlah sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan TettikenraraE) (paket)					1	50.000.000	1	49.999.600	100,00 %	100,00 %			Kecamatan Marioriwawo	
		Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehataan	Jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan TettikenraraE) (paket)					1	221.500.000	1	221.473.600	100,00 %	99,99%			Kecamatan Marioriwawo	
			Jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Labessi) (paket)					2		2		100,00 %				Kecamatan Marioriwawo	
		Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi							-							Kecamatan Marioriwawo	
		Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam							-							Kecamatan Marioriwawo	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		pelayanan pendidikan dan kebudayaan															
		Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah							-							Kecamatan Marioriwawo	
		Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengelolaan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat							-							Kecamatan Marioriwawo	
		Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya	Jumlah masyarakat yang telah mengikuti pelatihan pelatihan (KK)					300	360.000.000	300	360.000.000	100,00 %	100,00 %			Kecamatan Marioriwawo	
			Jumlah masyarakat yang telah mengikuti pelatihan pelatihan (KK)					300		300		100,00 %				Kecamatan Marioriwawo	
		Kecamatan															
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan yang dilaksanakan (%)**					**100**	**1.122.510.000**	**100**	**1.427.450.000**	**100,00 %**	**127,17 %**			Kecamatan Lalabata	
		Bupati menyapa	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan (kali)					0	-	0	-	0,00%	0,00%			Kecamatan Lalabata	
		Penyuluhan Kamtibmas	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan (orang)					120	12.120.000	120	12.120.000	100,00 %	100,00 %			Kecamatan Lalabata	
		Pendampingan pengelolaan dana ADD desa	Jumlah desa yang difasilitasi (desa)					3	4.620.000	3	4.620.000	100,00 %	100,00 %			Kecamatan Lalabata	
		Pembinaan guru mengaji, imam masjid kelurahan dan penghulu syara	Jumlah guru mengaji, imam masjid, pendeta kelurahan dan penghulu syara yang diberi insentif (Kelurahan Bila) (Orang)					41	718.200.000	41	694.850.000	100,00 %	96,75%			Kecamatan Lalabata	
			Jumlah guru mengaji, imam masjid kelurahan dan penghulu syara yang diberi insentif (orang)					276		276		100,00 %				Kecamatan Lalabata	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Jumlah Guru Mengaji, Imam Masjid, Pendeta Kelurahan, dan Penghulu Syara yang diberi insentif (Kelurahan Botto) (Orang)					46		46		100,00 %				Kecamatan Lalabata	
			Jumlah Guru Mengaji, imam masjid, dan penghulu syara yang diberi insentif (Kelurahan Lapajung) (Orang)					49		49		100,00 %				Kecamatan Lalabata	
			Jumlah guru mengaji, imam masjid, pendeta kelurahan, dan penghulu syara yang diberi insentif (Kelurahan Lalabata Rilau) (Orang)					64		64		100,00 %				Kecamatan Lalabata	
			Jumlah Guru Mengaji, Imam Masjid, Pendeta Kelurahan dan Penghulu Syara yang diberi insentif (Kelurahan Lemba) (Orang)					31		31		100,00 %				Kecamatan Lalabata	
			Jumlah Guru Mengaji, Imam Masjid, pendeta kelurahan dan penghulu syara yang diberi insentif (Kelurahan Salokaraja) (Orang)					20		20		100,00 %				Kecamatan Lalabata	
			Jumlah Guru Mengaji, Imam Masjid, Pendeta Kelurahan dab Penghulu Syara yang diberi inesntif (Kelurahan Ompo) (Orang)					21		21		100,00 %				Kecamatan Lalabata	
		Pembinaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan	Jumlah RT, RW dan LPMK (Kelurahan Bila) (Orang)					45	363.000.000	45	363.000.000	100,00 %	100,00 %			Kecamatan Lalabata	
			Jumlah RT/RW/LPMK yang diberi insentif (orang)					191		191		100,00 %				Kecamatan Lalabata	
			Jumlah RT, RW, dan LPMK (Kelurahan Botto) (Orang)					21		21		100,00 %				Kecamatan Lalabata	
			Jumlah RT, RW dan LPMK yang diberi insentif (Kelurahan Lapajung) (Orang)					28		28		100,00 %				Kecamatan Lalabata	
			Jumalah RT, RW, Dan LPMK Yang diberi insentif (Kelurahan Lalabata Rilau) (Orang)					33		33		100,00 %				Kecamatan Lalabata	
			Jumlah RT, RW, dan LPMK (Kelurahan Lemba) (Orang)					14		14		100,00 %				Kecamatan Lalabata	
			Jumlah RT, RW, dan LPMK yang diberi insentif (Kelurahan Salokaraja) (Orang)					25		25		100,00 %				Kecamatan Lalabata	
			Jumlah RT, RW dan LPMK (Kelurahan Ompo) (Orang)					27		27		100,00 %				Kecamatan Lalabata	
		Pembinaan kader posyandu kelurahan	Jumlah kader posyandu yang diberi insentif (orang)					220	330.000.000	220	330.000.000	100,00 %	100,00 %			Kecamatan Lalabata	
			Jumlah kader posyandu yang diberi insentif (Kelurahan Botto) (Orang)					35		35		100,00 %				Kecamatan Lalabata	
			Jumlah kader posyandu yang diberi insentif (Kelurahan Lapajung) (Orang)					25		25		100,00 %				Kecamatan Lalabata	
			JUmlah kader posyandu yang di beri insentif (Kelurahan Lalabata Rilau) (Orang)					40		40		100,00 %				Kecamatan Lalabata	
			Jumlah kader posyandu yang diberi insentif (Kelurahan Lemba) (Orang)					35		35		100,00 %				Kecamatan Lalabata	
			Jumlah Kader Posyandu Yang Diberi Insentif (Kelurahan Salokaraja) (Orang)					25		25		100,00 %				Kecamatan Lalabata	
			Jumlah kader posyandu yang diberi insentif (Kelurahan Ompo) (Orang)					20		20		100,00 %				Kecamatan Lalabata	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Jumlah kader posyandu yang diberi insentif (Kelurahan Bila) (Orang)					40		40		100,00 %				Kecamatan Lalabata	
		Penyelenggaraan kecamatan sehat	Jumlah pelaksanaan koordinasi kecamatan sehat (kali)					2	15.000.000	2	15.000.000	100,00 %	100,00 %			Kecamatan Lalabata	
		Penyusunan Profil kelurahan	Jumlah profil kelurahan (Kelurahan Ompo) (Dokumen)					0	14.000.000	0	7.860.000	0,00%	56,14%			Kecamatan Lalabata	
			Jumlah profil kelurahan (Kelurahan Bila) (Dokumen)					0		0		0,00%				Kecamatan Lalabata	
			Jumlah dokumen yang dihasilkan (dokumen)					0		0		0,00%				Kecamatan Lalabata	
			Jumlah profil kelurahan (Kelurahan Botto) (Dokumen)					0		0		0,00%				Kecamatan Lalabata	
			Jumlah Profil kelurahan (Kelurahan Lapajung) (Dokumen)					1		1		100,00 %				Kecamatan Lalabata	
			Jumlah profil kelurahan (Kelurahan Lalabata Rilau) (Dokumen)					1		1		100,00 %				Kecamatan Lalabata	
			Jumlah profil kelurahan (Kelurahan Lemba) (Dokumen)					0		0		0,00%				Kecamatan Lalabata	
			Jumlah profil kelurahan (Kelurahan Salokaraja) (Dokumen)					0		0		0,00%				Kecamatan Lalabata	
		Program Penyelenggaraan Kewenangan yang Dilimpahkan	**Persentase pelimpahan kewenangan yang terlaksana (%)**					**100**	**5.467.000.000**	**100**	**2.408.790.695**	**100,00 %**	**44,06%**			Kecamatan Lalabata	
		Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kecamatan	jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan (Buah)					250	15.000.000	250	15.000.000	100,00 %	100,00 %			Kecamatan Lalabata	
		Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	Jumlah sarana dan prasarana pemukiman yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Lapajung) (Paket)					2	619.004.232	2	606.802.115	100,00 %	98,03%			Kecamatan Lalabata	
			Jumlah sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang dibangun (Kelurahan Lalabata Rilau) (Unit 1 Paket)					1		1		100,00 %				Kecamatan Lalabata	
			Jumlah sarana dan prasarana pemukiman yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Lemba) (Paket)					4		4		100,00 %				Kecamatan Lalabata	
			Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun dan diadakan dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Salokaraja) (Paket)					1		1		100,00 %				Kecamatan Lalabata	
			Jumlah sarana dan prasarana pemukiman yang di bangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Ompo) (Paket)					1		1		100,00 %				Kecamatan Lalabata	
			Jumlah sarana dan prasarana pemukiman yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Bila) (Paket)					2		2		100,00 %				Kecamatan Lalabata	
			Jumlah sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang dibangun (paket)					1		1		100,00 %				Kecamatan Lalabata	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Jumlah sarana dan prasarana pemukiman yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Botto) (Paket)					2		2		100,00 %				Kecamatan Lalabata	
		Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	Jumlah sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Botto) (Paket)					0	-	0	-	0,00%	0,00%			Kecamatan Lalabata	
			Jumlah sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Lemba) (Paket)					0		0		0,00%				Kecamatan Lalabata	
			Jumlah sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yang dibangun (paket)					0		0		0,00%				Kecamatan Lalabata	
		Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehataan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan yang dibangun (Kelurahan Lalabata Rilau) (Paket)					1	504.253.116	1	499.146.116	100,00 %	98,99%			Kecamatan Lalabata	
			Jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Lemba) (Paket)					1		1		100,00 %				Kecamatan Lalabata	
			Jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Ompo) (Paket)					1		1		100,00 %				Kecamatan Lalabata	
			Jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Lapajung) (Paket)					1		1		100,00 %				Kecamatan Lalabata	
			Jumlah sarana dan prasarana Kesehatan yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Botto) (Paket)					1		1		100,00 %				Kecamatan Lalabata	
		Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	Jumlah sarana dan prasarana jalan yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Bila) (Paket)					1	859.607.464	1	859.607.464	100,00 %	100,00 %			Kecamatan Lalabata	
			Jumlah sarana dan prasarana transportasi yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (paket)					1		1		100,00 %				Kecamatan Lalabata	
			Jumlah sarana dan prasarana transportasi yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Botto) (Paket)					1		1		100,00 %				Kecamatan Lalabata	
			Jumlah sarana dan prasarana jalan yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Lapajung) (Paket)					1		1		100,00 %				Kecamatan Lalabata	
			Jumlah sarana dan prasarana Transportasi yang dibangun (Kelurahan Lalabata Rilau) (Paket)					1		1		100,00 %				Kecamatan Lalabata	
			Jumlah sarana dan prasarana transportasi yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Lemba) (Paket)					1		1		100,00 %				Kecamatan Lalabata	
			Jumlah sarana dan prasarana jalan yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Salokaraja) (Paket)					1		1		100,00 %				Kecamatan Lalabata	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Jumlah sarana dan prasarana transportasi yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Ompo) (Paket)					1		1		100,00 %				Kecamatan Lalabata	
		Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pelayanan kesehatan masyarakat	Jumlah Peserta Sosialisasi, Pelatihan (Kelurahan Bila) (Orang)					0	8.300.000	0	8.235.000	0,00%	99,22%			Kecamatan Lalabata	
			Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan (Kelurahan Ompo) (Orang)					0		0		0,00%				Kecamatan Lalabata	
			Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan (Kelurahan Lapajung) (Orang)					0		0		0,00%				Kecamatan Lalabata	
			Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kader posyandu (Kelurahan Lemba) (Orang)					46		46		100,00 %				Kecamatan Lalabata	
			Jumlah Peserta Sosialisasi/Pelatihan (Kelurahan Salokaraja) (Orang)					0		0		0,00%				Kecamatan Lalabata	
			Jumlah orang (Orang)					0		0		0,00%				Kecamatan Lalabata	
		Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pelayanan pendidikan dan kebudayaan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan (Kelurahan Bila) (Orang)					0	-	0	-	0,00%	0,00%			Kecamatan Lalabata	
			Jumlah orang (Orang)					0		0		0,00%				Kecamatan Lalabata	
			Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan (Kelurahan Lapajung) (Orang)					0		0		0,00%				Kecamatan Lalabata	
			Jumlah Peserta yang dibina (Kelurahan Lemba) (Orang)					0		0		0,00%				Kecamatan Lalabata	
		Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah	Jumlah orang (Orang)					0	-	0	-	0,00%	0,00%			Kecamatan Lalabata	
			Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi (Kelurahan Bila) (Orang)					0		0		0,00%				Kecamatan Lalabata	
			Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan (Kelurahan Botto) (Orang)					0		0		0,00%				Kecamatan Lalabata	
			Jumlah peserta pembinaan dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (Kelurahan Salokaraja) (Orang)					0		0		0,00%				Kecamatan Lalabata	
			Jumlah peserta pelatihan bagi UMKM (Kelurahan Lemba) (Orang)					0		0		0,00%				Kecamatan Lalabata	
		Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengelolaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan/pembinaan (Kelurahan Ompo) (Orang)					0	-	0	-	0,00%	0,00%			Kecamatan Lalabata	
			Jumlah Peserta Kursus Seni Budaya (Kelurahan Bila) (Orang)					0		0		0,00%				Kecamatan Lalabata	
			Jumlah orang (orang)					0		0		0,00%				Kecamatan Lalabata	
			Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan (Kelurahan Botto) (Orang)					0		0		0,00%				Kecamatan Lalabata	
			Jumlah peserta pelatihan (Kelurahan Lapajung) (Orang)					0		0		0,00%				Kecamatan Lalabata	
			Jumlah Peserta Tim Penggerak PKK (Kelurahan Lalabata Rilau) (Orang)					0		0		0,00%				Kecamatan Lalabata	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Jumlah Peserta Pembinaan Majelis Taklim, PKK dan Forum Anak (Kelurahan Lemba) (Orang)					0		0		0,00%				Kecamatan Lalabata	
			jumlah peserta yang mengikuti pelatihan (Kelurahan Salokaraja) (Orang)					0		0		0,00%				Kecamatan Lalabata	
		Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengelolaan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan (Kelurahan Botto) (Orang)					0	-	0	-	0,00%	0,00%			Kecamatan Lalabata	
			Jumlah orang/jumlah pos (Orang)					0		0		0,00%				Kecamatan Lalabata	
			Jumlah peserta pelatihan sosialisasi KDRT, UU PA dan Bimtek Linmas (Kelurahan Lemba) (Orang)					0		0		0,00%				Kecamatan Lalabata	
			Jumlah peserta penyuluhan (Kelurahan Ompo) (Orang)					0		0		0,00%				Kecamatan Lalabata	
			Jumlah Peserta Pelatihan/ Sosialisasi (Kelurahan Bila) (Orang)					0		0		0,00%				Kecamatan Lalabata	
		Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya	Jumlah masyarakat yang telah mengikuti pelatihan (Paket 100 KK)					3	1.260.000.000	3	420.000.000	100,00 %	33,33%			Kecamatan Lalabata	
			Jumlah masyarakat yang telah mengikuti pelatihan (Paket 100 KK)					3		3		100,00 %				Kecamatan Lalabata	
			Jumlah masyarakat yang telah mengikuti pelatihan (Paket 100 KK)					3		3		100,00 %				Kecamatan Lalabata	
			Jumlah masyarakat yang telah mengikuti pelatihan (Paket 100 KK)					3		3		100,00 %				Kecamatan Lalabata	
			Jumlah masyarakat yang telah mengikuti pelatihan (Paket 100 KK)					3		3		100,00 %				Kecamatan Lalabata	
			Jumlah masyarakat yang telah mengikuti pelatihan (paket dan 100 KK)					3		3		100,00 %				Kecamatan Lalabata	
			Jumlah masyarakat yang telah mengikuti pelatihan (Paket 100 KK)					3		3		100,00 %				Kecamatan Lalabata	
		Kecamatan															
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan									**49.800.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			Kecamatan Donri-Donri	
		Bupati menyapa	Jumlah Tatap Muka Yang Dilaksanakan (Kali)					2	-	0	-	0,00%	0,00%			Kecamatan Donri-Donri	
		Penyuluhan Kamtibmas	Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Penyuluhan (Orang)					300	15.000.000	300	15.000.000	100,00 %	100,00 %			Kecamatan Donri-Donri	
		Pendampingan pengelolaan dana ADD desa	Jumlah Desa Yang Difasilitasi (Desa)					9	15.600.000	9	15.600.000	100,00 %	100,00 %			Kecamatan Donri-Donri	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Penyelenggaraan kecamatan sehat	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kecamatan Sehat (Kali)					2	19.200.000	2	19.200.000	100,00 %	100,00 %			Kecamatan Donri-Donri	
									49.800.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00 %	100,00 %				
										Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
		Program Penyelenggaraan Kewenangan yang Dilimpahkan									**24.000.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			Kecamatan Donri-Donri	
		Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kecamatan	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Diterbitkan (Buah)					300	24.000.000	300	24.000.000	100,00 %	100,00 %			Kecamatan Donri-Donri	
		Kecamatan															
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan									**575.885.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			Kecamatan Liliriaja	
		Bupati menyapa	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan (Kali)					2	-	0	-	0,00%	0,00%			Kecamatan Liliriaja	
		Penyuluhan Kamtibmas	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan (70 orang, Perempuan 50 orang = 120 Orang)					120	12.000.000	120	12.000.000	100,00 %	100,00 %			Kecamatan Liliriaja	
		Pendampingan pengelolaan dana ADD desa	Jumlah desa yang difasilitasi (Desa)					5	6.250.000	2,5	6.250.000	50,00%	100,00 %			Kecamatan Liliriaja	
		Pembinaan guru mengaji, imam masjid kelurahan dan penghulu syara	Jumlah Guru Mengaji dan Imam Mesjid yang diberikan insentifnya (Kelurahan Appanang) (Orang)					42	241.800.000	42	238.000.000	100,00 %	98,43%			Kecamatan Liliriaja	
			Jumlah Guru Mengaji dan Imam Mesjid yang diberi Insentif (Kelurahan Galung) (Orang)					20		20		100,00 %				Kecamatan Liliriaja	
			Jumlah guru mengaji dan Imam mesjid yang diberi insentif (Kelurahan JennaE) (Orang)					32		32		100,00 %				Kecamatan Liliriaja	
		Pembinaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan	Jumlah RT, RW, LPMK yang diberi Insentif (Kelurahan Galung) (Orang)					22	170.640.000	22	170.640.000	100,00 %	100,00 %			Kecamatan Liliriaja	
			Jumlah RT/RW/LPMK yang diberi insentif (Orang)					90		90		100,00 %				Kecamatan Liliriaja	
			Jumlah RT, RW, LPMK yang diberi insentif (Kelurahan JennaE) (Orang)					40		40		100,00 %				Kecamatan Liliriaja	
			Jumlah RT, RW, LPMK yang diberi insentifnya (Kelurahan Appanang) (orang)					28		28		100,00 %				Kecamatan Liliriaja	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Pembinaan kader posyandu kelurahan	Jumlah kader posyandu yang diberi insentif (Kelurahan Appanang) (orang)					35	120.000.000	35	120.000.000	100,00 %	100,00 %			Kecamatan Liliriaja	
			Jumlah Kader Posyandu yang diberi Insentif (Kelurahan Galung) (Orang)					15		15		100,00 %				Kecamatan Liliriaja	
			Jumlah Kader Posyandu yang diberi Insentif (Kelurahan JennaE) (Orang)					30		30		100,00 %				Kecamatan Liliriaja	
		Penyelenggaraan kecamatan sehat	Jumlah pelaksanaan koordinasi kecamatan sehat (Kali)					2	8.500.000	2	8.000.000	100,00 %	94,12%			Kecamatan Liliriaja	
		Penyusunan Profil kelurahan	Jumlah dokumen yang dihasilkan (Dokumen)					3	21.000.000	3	20.995.000	100,00 %	99,98%			Kecamatan Liliriaja	
			Jumlah profil kelurahan yang tersusun (Kelurahan JennaE) (Dokumen)					1		1		100,00 %				Kecamatan Liliriaja	
			Jumlah profil kelurahan yang tersusun (Kelurahan Appanang) (Dokumen)					1		1		100,00 %				Kecamatan Liliriaja	
			Jumlah Profil Kelurahan yang tersusun (Kelurahan Galung) (Dokumen)					1		1		100,00 %				Kecamatan Liliriaja	
		Program Penyelenggaraan Kewenangan yang Dilimpahkan									**1.256.214.231**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			Kecamatan Liliriaja	
		Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kecamatan	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan tepat waktu (Buah)					150	28.800.000	150	28.800.000	100,00 %	100,00 %			Kecamatan Liliriaja	
		Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	Jumlah sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang diadakan (Kelurahan Galung) (Paket)					1	601.462.116	1	601.462.116	100,00 %	100,00 %			Kecamatan Liliriaja	
			Jumlah volume pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman (paket)					5		5		100,00 %				Kecamatan Liliriaja	
			Jumlah sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang diadakan (Kelurahan JennaE) (paket)					2		2		100,00 %				Kecamatan Liliriaja	
			Jumlah sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang diadakan (Kelurahan Appanang) (Paket)					5		5		100,00 %				Kecamatan Liliriaja	
		Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	Jumlah sarana dan prasrana pendidikan yang dibangun (Kelurahan Appanang) (PAket)					1	-	0	-	0,00%	0,00%			Kecamatan Liliriaja	
			Jumlah sarana dan prasarana pendidikan yang dibangun (Kelurahan Galung) (Paket)					1		0		0,00%				Kecamatan Liliriaja	
			Jumlah volume pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan (Meter/Paket)					1		0		0,00%				Kecamatan Liliriaja	
		Pengadaan, pembangunan,	Jumlah volume pengadaan/pembangunan/pengembangan/pe					1	-	0	-	0,00%	0,00%			Kecamatan Liliriaja	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan	meliharaan sarana prasarana kesehatan (Meter/Paket)														
			Jumlah sarana dan prasarana kesehatan masyarakat yang dibangun (Kelurahan Appanang) (Paket)					1		0		0,00%				Kecamatan Liliriaja	
		Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	Jumlah volume pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana transportasi (Meter/Paket)					5	325.952.116	5	325.952.115	100,00 %	100,00 %			Kecamatan Liliriaja	
			Jumlah sarana dan prasarana transportasi yang dibangun (Kelurahan Galung) (Paket)					3		3		100,00 %				Kecamatan Liliriaja	
		Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pelayanan kesehatan masyarakat	Jumlah orang (Orang)					40	-	0	-	0,00%	0,00%			Kecamatan Liliriaja	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang dilaksanakan (Kelurahan JennaE) (PAket)					2		0		0,00%				Kecamatan Liliriaja	
		Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pelayanan pendidikan dan kebudayaan	Jumlah kursus yang dilaksanakan (Kelurahan JennaE) (Paket)					1	-	0	-	0,00%	0,00%			Kecamatan Liliriaja	
			Jumlah orang (Orang)					40		0		0,00%				Kecamatan Liliriaja	
		Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah	Jumlah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan (Kelurahan JennaE) (Paket)					1	-	0	-	0,00%	0,00%			Kecamatan Liliriaja	
			Jumlah orang (Orang)					40		0		0,00%				Kecamatan Liliriaja	
		Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengelolaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan (Kelurahan JennaE) (Paket)					1	-	0	-	0,00%	0,00%			Kecamatan Liliriaja	
			Jumlah kelompok (Kelurahan Appanang) (Kelompok)					1		0		0,00%				Kecamatan Liliriaja	
			Jumlah pelatihan yang terlaksana (Kelurahan Galung) (Paket)					2		0		0,00%				Kecamatan Liliriaja	
			Jumlah orang (Orang)					40		0		0,00%				Kecamatan Liliriaja	
		Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya	Jumlah masyarakat yang telah mengikuti pelatihan (KK)					100	540.000.000	100	300.000.000	100,00 %	55,56%			Kecamatan Liliriaja	
			-					0		0		0,00%				Kecamatan Liliriaja	
			Jumlah masyarakat yang telah mengikuti pelatihan (KK)					100		100		100,00 %				Kecamatan Liliriaja	
			Jumlah masyarakat yang telah mengikuti pelatihan (KK)					100		100		100,00 %				Kecamatan Liliriaja	
		Kecamatan															



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan yang dilaksanakan (%)**					**100**	**643.700.000**	**0**	**800.451.100**	**0,00%**	**124,35 %**			Kecamatan Lilirilau	
		Bupati menyapa	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan (kali)					2	-	0	-	0,00%	0,00%			Kecamatan Lilirilau	
		Penyuluhan Kamtibmas	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan (orang (30 perempuan/20 laki-laki))					50	14.000.000	50	14.000.000	100,00 %	100,00 %			Kecamatan Lilirilau	
		Pendampingan pengelolaan dana ADD desa	Jumlah desa yang difasilitasi (desa)					8	13.851.300	8	13.851.300	100,00 %	100,00 %			Kecamatan Lilirilau	
		Pembinaan guru mengaji, imam masjid kelurahan dan penghulu syara	Jumlah guru mengaji, imam masjid kelurahan dan penghulu syara yang diberi insentif (Kelurahan Cabbeng) (orang/OB)					33	300.600.000	33	294.000.000	100,00 %	97,80%			Kecamatan Lilirilau	
			Jumlah guru mengaji, imam masjid kelurahan dan penghulu syara yang diberi insentif (orang)					123		123		100,00 %				Kecamatan Lilirilau	
			Jumlah guru mengaji, imam masjid kelurahan dan penghulu syara yang diberi insentif (Kelurahan Pajalesang) (orang)					32		32		100,00 %				Kecamatan Lilirilau	
			Jumlah guru mengaji, imam masjid kelurahan dan penghulu syara yang diberi insentif (Kelurahan Ujung) (orang)					26		26		100,00 %				Kecamatan Lilirilau	
			Jumlah guru mengaji, imam masjid kelurahan dan penghulu syara yang diberi insentif (Kelurahan Macanre) (orang)					28		28		100,00 %				Kecamatan Lilirilau	
		Pembinaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan	jumlah RTRW/LPMK yang diberi insentif (Kelurahan Ujung) (orang)					21	232.200.000	21	232.200.000	100,00 %	100,00 %			Kecamatan Lilirilau	
			jumlah RTRW/LPMK yang diberi insentif (Kelurahan Macanre) (orang)					29		29		100,00 %				Kecamatan Lilirilau	
			jumlah RTRW/LPMK yang diberi insentif (Kelurahan Cabbeng) (orang)					51		51		100,00 %				Kecamatan Lilirilau	
			jumlah RTRW/LPMK yang diberi insentif (orang)					123		123		100,00 %				Kecamatan Lilirilau	
			jumlah RTRW/LPMK yang diberi insentif (Kelurahan Pajalesang) (orang)					32		32		100,00 %				Kecamatan Lilirilau	
		Pembinaan kader posyandu kelurahan	Jumlah kader Posyandu yang diberi insentif (Kelurahan Pajalesang) (orang)					40	202.500.000	40	202.500.000	100,00 %	100,00 %			Kecamatan Lilirilau	
			Jumlah kader Posyandu yang diberi insentif (Kelurahan Ujung) (orang)					20		20		100,00 %				Kecamatan Lilirilau	
			Jumlah kader Posyandu yang diberi insentif (Kelurahan Macanre) (orang)					35		35		100,00 %				Kecamatan Lilirilau	
			Jumlah kader Posyandu yang diberi insentif (Kelurahan Cabbeng) (orang)					40		40		100,00 %				Kecamatan Lilirilau	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Jumlah kader Posyandu yang diberi insentif (orang)					135		135		100,00 %				Kecamatan Lilirilau	
		Penyelenggaraan kecamatan sehat	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kecamatan Sehat (kali)					2	16.000.000	2	15.899.800	100,00 %	99,37%			Kecamatan Lilirilau	
		Penyusunan Profil kelurahan	Jumlah dokumen yang dihasilkan (dokumen)					1	28.000.000	1	28.000.000	100,00 %	100,00 %			Kecamatan Lilirilau	
			Jumlah dokumen yang dihasilkan (Kelurahan Pajalesang) (dokumen)					1		1		100,00 %				Kecamatan Lilirilau	
			Jumlah dokumen yang dihasilkan (Kelurahan Ujung) (dokumen)					1		1		100,00 %				Kecamatan Lilirilau	
			Jumlah dokumen yang dihasilkan (Kelurahan Macanre) (dokumen)					1		1		100,00 %				Kecamatan Lilirilau	
			Jumlah dokumen yang dihasilkan (Kelurahan Cabbeng) (dokumen)					1		1		100,00 %				Kecamatan Lilirilau	
		Program Penyelenggaraan Kewenangan yang Dilimpahkan	**Persentase pelimpahan kewenangan yang terlaksana (%)**					**0**	**4.267.000.000**	**0**	**1.617.341.032**	**#DIV/0!**	**37,90%**			Kecamatan Lilirilau	
		Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kecamatan	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan (rekomendasi)					200	21.600.000	200	21.600.000	100,00 %	100,00 %			Kecamatan Lilirilau	
		Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	Jumlah sarana dan prasarana pemukinan yag di laksanakan (Kelurahan Cabbeng) (Paket)					4	709.452.116	4	656.247.885	100,00 %	92,50%			Kecamatan Lilirilau	
			Tersedianya ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman (paket)					8		8		100,00 %				Kecamatan Lilirilau	
			Jumlah sarana dan prasarana lingkungan yang di adakan (Kelurahan Pajalesang) (Paket)					2		2		100,00 %				Kecamatan Lilirilau	
			Jumlah sarana dan prasarana yang di adakan (Kelurahan Ujung) (Paket)					1		0,5		50,00%				Kecamatan Lilirilau	
			Jumlah sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang di bangun (Kelurahan Macanre) (Unit Rumah, Paket Irigasi)					1		0,5		50,00%				Kecamatan Lilirilau	
		Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	Jumlah sarana dan prasarana pendidkan yang di bangun (Kelurahan Cabbeng) (Paket)					1	27.500.000	0	22.500.000	0,00%	81,82%			Kecamatan Lilirilau	
			Tersedianya ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan pendidikan dan kebudayaan (paket)					4		0		0,00%				Kecamatan Lilirilau	
			Jumlah sarana dan prasarana yang di serahkan ke masyarakat (Kelurahan Macanre) (Unit)					1		1		100,00 %				Kecamatan Lilirilau	
			Jumlah sarana dan prasarana pendidikan yang di bangun (Kelurahan Ujung) (Paket)					1		0		0,00%				Kecamatan Lilirilau	
		Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana	Tersedianya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan (paket)					3	151.274.116	0	151.274.116	0,00%	100,00 %			Kecamatan Lilirilau	
			Jumlah jamban layak yang di adakan (Kelurahan Macanre) (Unit)					25		25		100,00 %				Kecamatan Lilirilau	

No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		dan prasarana kesehatan	Panjang bangunan yang di bangun (Kelurahan Ujung) (PAKET)					1		1		100,00 %				Kecamatan Lilirilau	
			Jumlah sarana dan prasarana yang di bangun (Kelurahan Pajalesang) (paket)					1		0		0,00%				Kecamatan Lilirilau	
		Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	Jumlah sarana dan prasarana transportasi di kelurahan ujung (Kelurahan Ujung) (Paket)					5	475.719.031	5	475.719.031	100,00 %	100,00 %			Kecamatan Lilirilau	
			Jumlah sarana dan prasarana yang di laksanakan (Kelurahan Macanre) (Paket)					1		1		100,00 %				Kecamatan Lilirilau	
			Jumlah sarana dan prasarana transportasi yang di bangun (Kelurahan Cabbeng) (Paket)					1		1		100,00 %				Kecamatan Lilirilau	
			Tersedianya ketersediaan sarana dan prasarana Transportasi di kelurahan (paket)					0		0		0,00%				Kecamatan Lilirilau	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Transportasi yang dibangun (Kelurahan Pajalesang) (Paket)					2		2		100,00 %				Kecamatan Lilirilau	
		Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pelayanan kesehatan masyarakat	Jumlah orang (orang)					80	-	0	-	0,00%	0,00%			Kecamatan Lilirilau	
			Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan / sosialisasi (Kelurahan Macanre) (Tahun)					1		0		0,00%				Kecamatan Lilirilau	
		Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah	Jumlah orang (orang)					30	40.000.000	0	40.000.000	0,00%	100,00 %			Kecamatan Lilirilau	
			Jumlah Kelompok UKM yang terlatih (Kelurahan Ujung) (Kelompok)					1		1		100,00 %				Kecamatan Lilirilau	
			Jumlah mesin jahit yang di adakan (Kelurahan Cabbeng) (Unit)					20		20		100,00 %				Kecamatan Lilirilau	
		Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengelolaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Qasida Rebana yang di adakan (Kelurahan Pajalesang) (Paket)					1	21.052.116	0	-	0,00%	0,00%			Kecamatan Lilirilau	
			jumlah orang (orang/kelompok)					20		0		0,00%				Kecamatan Lilirilau	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang di latih (Kelurahan Macanre) (Tahun)					1		0		0,00%				Kecamatan Lilirilau	
			Jumlah kelompok masyarakat yang di latih (Kelurahan Ujung) (Klp)					10		0		0,00%				Kecamatan Lilirilau	
		Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya	Jumlah masyarakat yang telah mengikuti pelatihan (Kelurahan Macanre) (Klp dan 2 Unit)					2	730.000.000	2	250.000.000	100,00 %	34,25%			Kecamatan Lilirilau	
			jumlah orang (orang)					40		40		100,00 %				Kecamatan Lilirilau	
		Kecamatan															



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan pemerintahn desa/ kelurahan yang dilaksanakan (%)**					**100**	**528.880.000**	**0**	**637.277.000**	**0,00%**	**120,50 %**			Kecamatan Marioriawa	
		Bupati menyapa	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan (kali)					2	-	0	-	0,00%	0,00%			Kecamatan Marioriawa	
		Penyuluhan Kamtibmas	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan (orang)					360	15.600.000	360	15.600.000	100,00 %	100,00 %			Kecamatan Marioriawa	
		Pendampingan pengelolaan dana ADD desa	Jumlah Desa yang difasilitasi (Desa)					5	8.200.000	5	8.200.000	100,00 %	100,00 %			Kecamatan Marioriawa	
		Pembinaan guru mengaji, imam masjid kelurahan dan penghulu syara	Jumlah guru mengaji dan imam mesjid yang diberi insentif (Kelurahan Limpomajang) (18 orang guru mengaji dan 3 orang imam mesjid)					21	280.200.000	15,75	265.800.000	75,00%	94,86%			Kecamatan Marioriawa	
			Jumlah Guru Mengaji dan Imam Mesjid Yang Diberi Insentif (Kelurahan Attangsalo) (10 Orang Guru Mengaji dan 4 Orang Imam Mesjid)					14		10,5		75,00%				Kecamatan Marioriawa	
			Jumlah Guru mengaji & Imam Mesjid yang menerima Isentif (Kelurahan Batu-Batu) (14 orang Guru Mengaji & 2 orang Imam Mesjid)					16		12		75,00%				Kecamatan Marioriawa	
			Jumlah Imam Mesjid dan Guru Mengaji Yang Diberi Insentif (Kelurahan Manorangsalo) (37 Orang Imam mesjid dan 7 Orang Guru Mengaji)					44		33		75,00%				Kecamatan Marioriawa	
			Jumlah guru mengaji, imam mesjid yang diberi insentif (Kelurahan Kaca) (14 orang Guru mengaji dan 3 orang Imam mesjid)					17		12,75		75,00%				Kecamatan Marioriawa	
		Pembinaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan	Jumlah RW/RT yang diberi insentif (Kelurahan Kaca) (5 orang RW, 13 orang RT dan 1 orang LPMK)					19	169.680.000	14,25	169.680.000	75,00%	100,00 %			Kecamatan Marioriawa	
			Jumah RW/RT dan LPMK yang diberi insentif (Kelurahan Limpomajang) (3 orang RW, 14 orang RT dan 1 orang LPMK)					18		13,5		75,00%				Kecamatan Marioriawa	
			Jumlah RW/RT dan LPMK Yang Diberi Insentif (Kelurahan Attangsalo) (6 Orang RW dan 10 Orang RT dan 1 Orang LPMK)					17		12,75		75,00%				Kecamatan Marioriawa	
			Jumlah RW/RT dan LPMK yang diberi Insentif (Kelurahan Batu-Batu) (orang RW, 12 Orang RT dan 1 Orang LPMK)					17		12,75		75,00%				Kecamatan Marioriawa	
			Jumlah RW/RT dan LPMK Yang Diberi Insentif (Kelurahan Manorangsalo) (4 Orang, RT 12 Orang dan LPMK 1 Orang)					17		12,75		75,00%				Kecamatan Marioriawa	
		Pembinaan kader posyandu kelurahan	Jumlah KaderPosyandu yang diberi insentif (Kelurahan Batu-Batu) (orang kader posyandu)					15	127.500.000	11,25	127.500.000	75,00%	100,00 %			Kecamatan Marioriawa	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Jumlah Kader Posyandu Yang Diberi Insentif (Kelurahan Manorangsalo) (Orang Kader Posyandu)					20		15		75,00%				Kecamatan Marioriawa	
			Jumlah kader posyandu yang diberi insentif (Kelurahan Kaca) (orang kader posyandu)					20		15		75,00%				Kecamatan Marioriawa	
			Jumlah kader posyandu yang diberi insentif (Kelurahan Limpomajang) (orang kader posyandu)					15		11,25		75,00%				Kecamatan Marioriawa	
			Jumlah Kader Posyandu Yang Diberi Insentif (Kelurahan Attangsalo) (Orang kader Posyandu)					15		11,25		75,00%				Kecamatan Marioriawa	
		Penyelenggaraan kecamatan sehat	Jumlah pelaksanaan koordinasi kecamatan sehat (kali)					2	16.050.000	2	16.050.000	100,00 %	100,00 %			Kecamatan Marioriawa	
		Penyusunan Profil kelurahan	Jumlah dokumen yang dihasilkan (Kelurahan Kaca) (dokumen)					1	35.000.000	1	34.447.000	100,00 %	98,42%			Kecamatan Marioriawa	
			Jumlah dokumen yang dihasilkan (Kelurahan Limpomajang) (dokumen)					1		1		100,00 %				Kecamatan Marioriawa	
			Jumlah dokumen yang dihasilkan (Dokumen)					1		1		100,00 %				Kecamatan Marioriawa	
			Jumlah Dokumen Yang Dihasikan (Kelurahan Attangsalo) (Dokumen)					1		1		100,00 %				Kecamatan Marioriawa	
			Jumlah Dokumen yang dihasilkan (Kelurahan Batu-Batu) (Dokumen)					1		1		100,00 %				Kecamatan Marioriawa	
			JumlahDokumenYang Dihasilkan (Kelurahan Manorangsalo) (Dokumen)					1		1		100,00 %				Kecamatan Marioriawa	
		Program Penyelenggaraan Kewenangan yang Dilimpahkan	**Persentase pelimpahan kewenangan yang terlaksana (%)**					**100**	**5.027.000.000**	**0**	**2.754.358.810**	**0,00%**	**54,79%**			Kecamatan Marioriawa	
		Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kecamatan	JUmlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan (Buah)					200	21.600.000	200	21.600.000	100,00 %	100,00 %			Kecamatan Marioriawa	
		Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	Jumlah Sarana & Prasarana Lingkungan Pemukiman yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Manorangsalo) (paket,titik, set)					3	374.000.100	3	348.455.000	100,00 %	93,17%			Kecamatan Marioriawa	
			Jumlah Sarana & Prasarana Lingkungan yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Batu-Batu) (paket)					2		2		100,00 %				Kecamatan Marioriawa	
			Jumlah sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Attangsalo) (titik,)					3		3		100,00 %				Kecamatan Marioriawa	
			Jumlah Sarana & Prasarana Lingkungan yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Limpomajang) (paket,titik)					5		5		100,00 %				Kecamatan Marioriawa	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Jumlah sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Kaca) (paket, titik)					2		2		100,00 %				Kecamatan Marioriawa	
		Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	Jumlah Sarana & Prasarana pendidikan dan kebudayaan yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Limpomajang) (paket)					1	197.032.116	1	197.032.116	100,00 %	100,00 %			Kecamatan Marioriawa	
		Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan	Jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Kaca) (buah/4 paket)					104	339.166.116	104	339.166.116	100,00 %	100,00 %			Kecamatan Marioriawa	
			Jumlah Sarana & Prasarana Kesehatan yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Manorangsalo) (Paket)					1		1		100,00 %				Kecamatan Marioriawa	
			Jumlah pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan yang direhab/dibangun (paket)					0		0		0,00%				Kecamatan Marioriawa	
			Jumlah Sarana & Prasarana kesehatan yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Attangsalo) (Buah)					55		55		100,00 %				Kecamatan Marioriawa	
			Jumlah Sarana & Prasarana kesehatan yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Limpomajang) (paket)					1		1		100,00 %				Kecamatan Marioriawa	
		Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	Jumlah sarana dan prasarana Transportasi yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Attangsalo) (Paket)					3	935.806.348	3	935.755.578	100,00 %	99,99%			Kecamatan Marioriawa	
			Jumlah Sarana & Prasarana transportasi yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Limpomajang) (paket)					0		0		0,00%				Kecamatan Marioriawa	
			Jumlah sarana dan prasarana transportasi yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Kaca) (paket)					5		5		100,00 %				Kecamatan Marioriawa	
			Jumlah Sarana dan Prasrana Transportasi Yang Dibangun, Dikembangkan & Dipelihara (Kelurahan Manorangsalo) (Paket)					3		3		100,00 %				Kecamatan Marioriawa	
			Jumlah Sarana prsarana transportasi yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara (Kelurahan Batu-Batu) (paket)					6		6		100,00 %				Kecamatan Marioriawa	
		Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengelolaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan (Kelurahan Batu-Batu) (Orang)					200	13.000.000	200	12.350.000	100,00 %	95,00%			Kecamatan Marioriawa	
			Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan PKK (Kelurahan Manorangsalo) (orang)					0		0		0,00%				Kecamatan Marioriawa	
			Jumlah Peserta yang mengikuti Pembinaan PKK dan Karang Taruna (Kelurahan Kaca) (orang)					0		0		0,00%				Kecamatan Marioriawa	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan (Kelurahan Limpomajang) (Orang)					0		0		0,00%				Kecamatan Marioriawa	
			Jumlah orang (orang)					0		0		0,00%				Kecamatan Marioriawa	
			Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan (Kelurahan Attangsalo) (orang)					0		0		0,00%				Kecamatan Marioriawa	
		Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya	Jumlah masyarakat yang telah mengikuti pelatihan pelatihan (KK)					100	900.000.000	100	900.000.000	100,00 %	100,00 %			Kecamatan Marioriawa	
			Jumlah masyarakat yang telah mengikuti pelatihan pelatihan (KK)					100		100		100,00 %				Kecamatan Marioriawa	
			Jumlah masyarakat yang telah mengikuti pelatihan pelatihan (KK)					100		100		100,00 %				Kecamatan Marioriawa	
			Jumlah masyarakat yang telah mengikuti pelatihan pelatihan (KK)					100		100		100,00 %				Kecamatan Marioriawa	
			Jumlah masyarakat yang telah mengikuti pelatihan pelatihan (KK)					100		100		100,00 %				Kecamatan Marioriawa	
		Kecamatan															
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan									**37.390.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			Kecamatan Ganra	
		Bupati menyapa	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan (kali)					2	-	0	-	0,00%	0,00%			Kecamatan Ganra	
		Penyuluhan Kamtibmas	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan (orang)					264	14.640.000	264	14.640.000	100,00 %	100,00 %			Kecamatan Ganra	
		Pendampingan pengelolaan dana ADD desa	Jumlah desa yang difasilitasi (desa)					4	7.750.000	4	7.750.000	100,00 %	100,00 %			Kecamatan Ganra	
		Penyelenggaraan kecamatan sehat	Jumlah pelaksanaan koordinasi kecamatan sehat (kali)					2	15.000.000	2	15.000.000	100,00 %	100,00 %			Kecamatan Ganra	
		Program Penyelenggaraan Kewenangan yang Dilimpahkan									**21.600.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				
		Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kecamatan	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan (buah)					250	21.600.000	250	21.600.000	100,00 %	100,00 %			Kecamatan Ganra	
		Kecamatan															
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum,									**33.619.800**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			Kecamatan Citta	



No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan															
		Bupati menyapa	Jumlah Tatap Muka yang dilaksanakan (kali)					2	-	0	-	0,00%	0,00%			Kecamatan Citta	
		Penyuluhan Kamtibmas	jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan (orang (terdiri dari 110 orang Laki-laki dan 130 orang Perempuan))					240	14.500.000	210	13.370.000	87,50%	92,21%			Kecamatan Citta	
		Pendampingan pengelolaan dana ADD desa	Jumlah Desa yang difasilitasi (Desa)					4	6.490.000	4	6.490.000	100,00 %	100,00 %			Kecamatan Citta	
		Penyelenggaraan kecamatan sehat	Jumlah pelaksanaan koordinasi kecamatan sehat (kali)					2	15.000.000	2	13.759.800	100,00 %	91,73%			Kecamatan Citta	
									35.990.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		94,96%	93,41%				
										Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
		Program Penyelenggaraan Kewenangan yang Dilimpahkan									**21.600.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			Kecamatan Citta	
		Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kecamatan	Jumlah Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan (Buah)					150	21.600.000	150	21.600.000	100,00 %	100,00 %			Kecamatan Citta	
									21.600.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00 %	100,00 %				
										Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				



2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "gap expectation" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Untuk mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah dan bagaimana visi dan misi daerah dibuat dengan sebaik-baiknya, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan sehubungan dengan peluang dan tantangan yang dihadapi.

Permasalahan pembangunan selalu berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini, didasarkan pada isu strategis daerah. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang jika tidak diantisipasi, akan berdampak pada kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka tertentu, dan juga berdampak pada permasalahan daerah yang berhubungan dengan proritas dan sasaran pembangunan daerah.

Adapun permasalahan daerah yang terkait dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah disajikan pada table berikut :

MASALAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR SASARAN
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Kerakyatan dan Penguatan Kapasitas Infrastruktur Wilayah			
Belum terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) secara menyeluruh yang menyebabkan kualitas hidup manusia relatif tertinggal dan struktur serta produktivitas perekonomian daerah belum menjamin kesejahteraan yang tinggi dan merata	- Meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat	Meningkatnya mutu penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar	Nilai rata-rata tingkat capaian penerapan SPM
		Meningkatnya mutu pelayanan publik non pelayanan dasar	IKM pelayanan publik non pelayanan dasar
		Meningkatnya Derajat Pendidikan Literasi dan Kualitas Fisik Masyarakat	Indeks Pendidikan
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan
		Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	% Pertumbuhan ekonomi
			Tingkat pengangguran terbuka

		Meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan bawah	Angka kemiskinan
Daya saing daerah yang masih tertinggal dan terjadinya degradasi lingkungan serta sumberdaya alam yang mengancam keberlanjutan pembangunan	- Memperkuat kapasitas infrastruktur daerah untuk mendukung fasilitas ekonomi wilayah dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur Daerah
		Meningkatnya fasilitas ekonomi wilayah	Kontribusi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Jasa Lainnya terhadap PDRB
		Terpeliharanya situasi aman dan damai dalam masyarakat	Angka Kriminalitas
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana	Indeks resiko bencana
			Indeks GRK
			Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLH)
Tatakelola pemerintahan yang baik belum terwujud sepenuhnya	- Meningkatnya kualiatas reformasi birokrasi secara inovatif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta kapasitas inovasi daerah	Nilai LPPD
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
			Indeks Inovasi Daerah

Kualitas hidup manusia merupakan muara dari semua upaya pembangunan. Ini diindikasikan oleh indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Soppeng yang relatif tertinggal jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Pada tahun 2019 IPM sebesar 68,26 dan masih pada kategori sedang, sementara nilai IPM Sulawesi Selatan sudah mencapai 71,66 dan nasional sebesar 71,92. Untuk itu pada tahun 2022 dilakukan upaya umum dalam mewujudkan kualitas manusia seutuhnya baik upaya dalam peningkatan derajat pendidikan dan Kesehatan.

Adapun bidang urusan yang terkait dengan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik lainnya adalah sebagai berikut:

A. Pendidikan

Masalah untuk SPM pendidikan adalah angka partisipasi pendidikan dasar yang baru mencapai 88,23%, partisipasi pendidikan kesetaraan yang baru sebesar 37,25%, dan partisipasi pendidikan anak usia dini (PAUD) yang baru mencapai 51,26%. Akar masalah belum tercapainya target SPM pendidikan dasar adalah masih adanya anak usia SD yang tidak bersekolah karena faktor ekonomi dan perhatian orang tua atas pendidikan yang rendah, adanya yang tidak melanjutkan dari SD ke SMP dan adanya yang putus sekolah pada level SD ataupun SMP, sebagian besar hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi.

Akar masalah belum tercapainya SPM pendidikan kesetaraan, dalam arti masih banyaknya warga negara usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan, adalah rendahnya minat masyarakat yang belum tammat SD/SMP/SMA untuk mengikuti program pendidikan kesetaraan, jumlah pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dengan mutu yang baik masih terbatas, dan dari segi pendataan terdapat sebagian sasaran yang terdata sebagai penduduk Kabupaten Soppeng namun bertempal tinggal di luar Kabupaten Soppeng.

Penyebab belum tercapainya target SPM PAUD adalah keberadaan sebagian PAUD swasta dipelosok-pelosok yang kurang menarik minat masyarakat untuk memasukkan anaknya pada lembaga tersebut, hal ini antara lain disebabkan Lembaga PAUD swasta pada umumnya memiliki sarana dan prasarana yang kurang memadai. Sementara itu PAUD yang berstatus negeri baru sebesar 15 unit sekolah. Data yang ada menunjukkan jumlah TK di Kabupaten Soppeng sebanyak 79 unit dan RA sebanyak 53 unit. Jika jumlah TK dan RA dibandingkan dengan Jumlah penduduk usia 5-6 tahun maka rasio ketersediaan sekolah TK dan RA sebesar 386,87%.

Jika dilihat dari rasio ketersediaan sekolah TK dan RA, maka jumlah lembaga PAUD yang ada di Kabupaten Soppeng sudah sangat berlebih untuk menampung keseluruhan pendudukan usia 5-6 tahun. Namun kenyataannya belum semua penduduk usia 5-6 tahun sudah terlayani oleh lembaga PAUD.

B. Kesehatan

Masalah untuk SPM kesehatan adalah belum terpenuhinya target pelayanan kesehatan untuk warga usia produktif (41%). Untuk Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pelayanan Kesehatan Balita, Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut, Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, Pelayanan Kesehatan dengan Gangguan Jiwa Berat, Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis, Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinveksi HIV, telah terpenuhi 100%.

Tidak terpenuhinya target 100% untuk pelayanan warga usia produktif diakibatkan karena belum maksimalnya pelaksanaan skrining kesehatan pada warga usia tersebut. Akar masalah yang menjadi tantangan lima tahun kedepan adalah soal akurasi data calon penerima layanan agar kalkukasi penyiapan unsur pendukung pelayanan bisa diupayakan dengan optimal.

C. Pekerjaan Umum

Masalah untuk SPM pekerjaan umum adalah belum terpenuhinya target 100% untuk penyediaan air minum sehari-hari (93,17%) dan pelayanan pengelolaan limbah domestic (5,56% layak di perkotaan dan 57,69% layak di pedesaan. Akar masalah belum terpenuhinya SPM air minum sehari-hari adalah menurunnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas air baku air minum, terbatasnya penyediaan air minum oleh PDAM dan Non PDAM yang sehat, dan belum optimalnya sistem perencanaan penyediaan air minum. Akar masalah belum terpenuhinya SPM penyediaan layanan

pengolahan air limbah domestic adalah rendahnya kesadaran dan kemampuan masyarakat atas penyediaan sarana penanganan limbah domestic yang memenuhi kriteria layak dan belum tercukupinya fasilitasi pemerintah atas layanan yang memenuhi standar kelayakan dimaksud yakni penggunaan kloset leher angsa yang dilengkapi dengan tangki septik baik di pedesaan maupun di perkotaan serta adanya layanan penyedotan lumpur tinja secara terjadwal terutama di perkotaan.

D. Perumahan

Masalah untuk SPM perumahan rakyat, adalah belum tercapainya target 100% jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (95% tahun 2019) dan jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (84% tahun 2019). Ini disebabkan belum tersedianya data yang lengkap dan akurat mengenai jumlah warga negara yang berhak menerima layanan tersebut, belum adanya penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar perumahan rakyat.

E. Ketentraman dan Ketertiban

Masalah untuk SPM ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat adalah masih adanya masyarakat yang belum mendapatkan layanan akibat penegakan Perda dan Perkada serta pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (76,41% pada 2019). Pelayanan informasi rawan bencana juga belum sepenuhnya berjalan disebabkan belum tersedianya peta wilayah rawan bencana secara detail. Untuk pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan korban kebakaran sudah mencapai target 100%. Akar masalah lain terkait SPM ini adalah kurang lengkapnya data mengenai warga negara yang berhak menerima layanan, serta belum adanya penghitungan kebutuhan pemenuhan kebutuhan penerima layanan.

F. Sosial

Masalah terkait SPM untuk urusan sosial adalah belum terpenuhinya target 100% untuk layanan rehabilitasi sosial dasar penyandang diasabilitas di luar panti (35% tahun 2019), layanan untuk rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti (19% tahun 2019), serta layanan rehabilitasi sosial dasar untuk tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti belum ada terealisasi. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta kelengkapan data terkait warga yang berhak menerima layanan tersebut. Layanan sosial yang telah mencapai target 100% adalah rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti serta perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana.

Dalam upaya meningkatkan fasilitas ekonomi wilayah, kepariwisataan adalah salah satu sektor yang memiliki prospek dikembangkan di Kabupaten Soppeng, karena sektor ini memiliki potensi yang cukup besar. Selama ini kepariwisataan menjadi salah satu sumber pendapatan bagi daerah, khususnya dari objek wisata yang dikembangkan, seperti objek wisata permandian alam ompo, permandian alam Lejja, permandian citta dan beberapa objek wisata lainnya yang dikelola pemerintah

desa. Kunjungan wisata di Kabupaten Soppeng cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Salah satu penyebab dari penurunan tersebut karena ketidaksiapan destinasi wisata yang ada. Ketidaksiapan tersebut dalam arti minimnya pengembangan objek wisata.

Pemerintah Kabupaten Soppeng selama kurun waktu 5 tahun terakhir telah berhasil membentuk dan membina sentra industri pada 5 Kecamatan. Sentra ini sebagai pusat kegiatan di kawasan/lokasi tertentu dimana terdapat usaha yang menggunakan bahan baku/sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama/sejenis serta memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi klaster. Salah satu sentra yang dikembangkan adalah sentra sutera yang dikenal dengan “Kampung Sabbeta”.

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB yang dihasilkan suatu daerah pada tahun tertentu dibandingkan nilai PDRB tahun sebelumnya, dengan menggunakan nilai PDRB Harga Konstan. Laju pertumbuhannya untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan serta sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan daerah untuk perncanaan pembangunan daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng lima tahun terakhir tumbuh positif dengan besaran yang fluktuatif, diakibatkan oleh peranan sektor pertanian yang memberikan kontribusi selama lima tahun terakhir yang juga mengalami fluktuatif. Namun pada tahun 2019, laju pertumbuhan ekonomi Kab Soppeng sedikit melambat dibanding tahun 2018 yang sebesar 8,11 persen.

Selama tahun 2016-2019 angka Indeks Gini di Kabupaten Soppeng berfluktuasi, dimana pada tahun 2016 indeks gini sebesar 0,399 dan menurun pada tahun 2017 yang sebesar 0,359 dan pada tahun 2018 sebesar 0,359. Dan pada tahun 2019 sebesar 0,392. Walaupun mengalami kenaikan pada tahun 2019, Kabupaten Soppeng masih berada pada ketimpangan sedang. Hal ini berarti bahwa pendapatan penduduk Kabupaten Soppeng pada kurun waktu 2016 – 2019 cukup merata. Jika dibandingkan dengan daerah lain di Prov. Sulawei Selatan maka indeks gini Kabupaten Soppeng cukup tinggi. Begitupun jika dibandingkan dengan indeks gini nasional.

Penyediaan infrastruktur yang memadai akan memberikan percepatan pergerakan arus barang dan jasa di wilayah sehingga aktivitas ekonomi juga akan semakin tinggi. Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang dan jasa maupun penumpang. Pengelolaan Jalan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Jalan untuk Jalan di wilayah Kabupaten menjadi kewajiban pemerintah Kabupaten, sehingga Jalan yang berada di Pedesaan pun yang utamanya menghubungkan antar Kecamatan, antar desa akan dipelihara oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng karena kinerja jalan dan jembatan masih perlu ditingkatkan agar dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan penyelenggaraannya, dan memenuhi aspek aksesibilitas, aspek mobilitas dan aspek keselamatan.

Pada tahun 2020 luas irigasi dalam kondisi baik mengalami penurunan. Hal ini diakibatkan karena selain adanya penambahan luas irigasi juga diakibatkan karena masih adanya saluran irigasi yang rusak sedang dan berat yang perlu direhabilitasi serta masih ada saluran tanah,

Kondisi eksternal akibat banjir yang berdampak pada Sebagian infrastruktur irigasi yang menambah kerusakan sarana dan prasarana jaringan irigasi.

Permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Soppeng adalah terkait pemulihan lahan kritis dan peningkatan luasan kawasan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Lahan kritis akibat aktivitas pertambangan dan perkebunan yang tidak terkendali yang berakibat pada rendahnya kualitas lingkungan hidup serta meningkatnya frekuensi terjadinya bencana khususnya bencana banjir.

Salah satu tugas besar dari pelaksanaan urusan lingkungan hidup lain yang langsung berhubungan dengan masyarakat adalah terkait penanganan persampahan, yang sampai saat ini masih fokus pada Ibu kota kecamatan di 8 Kecamatan. Kemampuan daerah untuk menangani persampahan belum maksimal karena keterbatasan sarana dan prasarana serta personil yang ada.

Berbicara tentang tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Tidak dapat disangkal lagi bahwa good governance telah dianggap sebagai elemen penting untuk menjamin kesejahteraan masyarakat.

Reformasi birokrasi telah dijalankan pada delapan area, namun demikian perwujudan good governance dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta partisipasi belum optimal. Ini ditandai dengan skor reformasi birokrasi yang masih rendah (C), nilai sistem akuntabilitas kinerja (SAKIP) masih CC, indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik yang belum tinggi, meskipun pengelolaan keuangan sudah berlangsung dengan wajar (WTP). Akar masalahnya adalah perencanaan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerja perangkat daerah yang belum sepenuhnya mencrminkan akuntabilitas kinerja, pembinaan administrasi dan keuangan beserta pengawasannya yang belum didukung oleh tenaga APIP berkompetensi dalam jumlah cukup, terbatasnya pendidikan dan pelatihan SDM aparatur untuk mengoptimalkan kinerja tertentu, belum optimalnya penerapan e-government dalam mendukung integrasi perencanaan dan penganggaran yang transparan sehingga dapat lebih diakses publik.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2.3.2.1. Urusan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.2.1.1. Bidang Pendidikan

Berikut adalah Indentifikasi permasalahan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan adalah

a) Pendidikan Anak Usia Dini yang masih rendah belum mencapai 100%. Jika dilihat dari rasio ketersediaan sekolah TK dan RA, maka jumlah Lembaga PAUD yang ada di Kabupaten Soppeng sudah sangat berlebihan untuk menampung keseluruhan penduduk usia 4-6 tahun. Namun kenyataannya belum semua penduduk usia 4-6 tahun sudah terlayani oleh Lembaga PAUD. Keberadaan sebahagian PAUD

swasta dipelosok-pelosok kurang menarik minat masyarakat untuk memasukkan anaknya pada Lembaga tersebut, hal ini antara lain disebabkan Lembaga PAUD Swasta pada umumnya memiliki sarana dan prasarana yang kurang memadai.

b) Belum tercapainya target APM 100 persen, baik pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A maupun pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B antara lain disebabkan oleh masih adanya peserta didik yang putus sekolah dan anak tidak sekolah (ATS), masih adanya penduduk usia 7-12 tahun yang tinggal di daerah perbatasan kabupaten terdata sebagai penduduk Kabupaten Soppeng namun bersekolah di luar Kabupaten Soppeng.
c) Masih terdapat angka putus sekolah yang disebabkan karena Faktor ekonomi keluarga, Faktor jarak tempuh ke sekolah, masih adanya orang tua/wali yang belum mendukung program wajib belajar 9 tahun.
d) Fasilitas pendidikan SD kondisi bangunan baik pada tahun 2020 terealisasi sebesar 85,73% dari target 90,92%. Penyebab tidak tercapainya target tersebut adalah masih ada bangunan sekolah yang sudah tua dan belum dilakukan rehabilitasi.
e) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV belum mencapai 100%, hal ini berdampak pada kemampuan memberikan materi , dimana Kemampuan materi seorang guru akan bertambah seiring dengan latar belakang pendidikan yang diterima, dengan pendidikan yang lebih tinggi maka pemahaman akan materi pendidikan akan menjadi lebih baik.

2.3.2.1.2. Bidang Kesehatan

Berikut adalah Indentifikasi permasalahan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan adalah

1. Masih adanya angka kematian bayi di Soppeng. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan ibu bersalin belum optimal.
2. Masih adanya balita dengan gizi buruk di Kabupaten Soppeng. Pada tahun 2020 mencapai 0,015% yaitu termasuk kategori rendah menurut WHO (di bawah 10%) tetapi meningkat dibanding tahun 2019 yang sebesar 0,008.
3. Prevalensi balita gizi kurang pada tahun 2020 tercatat sebesar 2,56%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar 3,31%. Pada tahun 2016 dan tahun 2017 untuk menentukan status gizi secara manual dengan menggunakan buku standar antropometri. Pada tahun 2018 hingga tahun 2020 menggunakan aplikasi e-PPGBM dengan standar Kemenkes, sehingga jumlah balita gizi kurang mengalami peningkatan. Prevalensi balita gizi kurang perlu terus ditekan melalui upaya peningkatan kualitas balita secara lebih baik yang disertai dengan kualitas lingkungan keluarga secara lebih baik pula.

2.3.2.1.3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berikut adalah Indentifikasi permasalahan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan adalah

1. Masih perlunya peningkatan Persentase Infrastruktur Kondisi Baik. Infrastrukur yang ditingkatkan meliputi Infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, dan jaringan irigasi.
2. Terdapatnya 5.45% Akses Air Minum yang Tidak Layak. Dari Akses Air Minum Layak masih terdapat 25% (2019) akses dengan perpipaan. Menurunnya Debit Air Produksi Andalan (Ompo) untuk wilayah Perkotaan. Karena kondisi geografis maka beberapa area layanan tidak terlayani maksimal.
3. Walaupun akses sanitasi sudah mencapai 100%, tetapi berdasarkan Target pembangunan sanitasi nasional dalam TPB/RPJMN 2019-2024 sebesar 90% Layak (termasuk 15% Aman) dan 10% dasar pada tahun 2024. Defenisi Layak dalam Target Nasional adalah:
   - Perkotaan dan Perdesaan: Menggunakan Kloset Leher angsa dan menggunakan Tangki Septik.
   - Khusus Perdesaan masih bisa menggunakan Kloset leher angsa meskipun tangkinya tidak kedap air.
   - Sedangkan Defenisi Aman dalam Target Nasional diatas adalah:
   - Akses Layak yang sudah melakukan Layanan Penyedotan Lumpur Tinja Terjadwal terutama pada area perkotaan.
   - Berdasarkan hal tersebut maka didapatkan penyesuaian Cakupan Sanitasi Layak di Soppeng sebesar 63.34% dengan pembagian:
   - 5.56% Layak di Perkotaan dan
   - 57.69% Layak di Perdesaan.

   Dengan demikian Kabupaten Soppeng masih membutuhkan peningkatan 26.66% Sanitasi Layak dan 14.07% Sanitasi Aman.
4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Soppeng perlu ditinjau kembali karena RTRW yang ada tidak memuat program yang lebih detail dan tidak ada spesifikasi program dan lokasi yang direncanakan selain itu substansi RTRW telah mengalami perubahan sehingga perda RTRW yang sekarang tidak dapat mengakomodir pertumbuhan yang ada di Soppeng. Sehingga pembangunan yang dilaksanakan tidak bisa dikaji atau diperhitungkan kesesuaiannya dengan Perda RTRW.
5. Belum optimalnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten Soppeng yang diakibatkan karena kapasitas TPA yang terbatas dan teknologi pengolahan sampah sangat terbatas.
6. Belum optimalnya Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten Soppeng dimana jalan yang memiliki drainase pada tahun 2020 masih sebesar 47%.

2.3.2.1.4. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berikut adalah Indentifikasi permasalahan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan adalah

1. Belum optimalnya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah di Kabupaten Soppeng
2. Belum optimalnya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
3. Masih kurangnya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
4. Belum optimalnya peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum.

2.3.2.1.5. Bidang Ketentraman Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Berikut adalah Indentifikasi permasalahan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan adalah

1. Belum optimalnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dimana pada tahun 2020 tingkat penyelesaian pelanggaran K3 sebesar 47,58%.
2. Belum optimalnya Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah
3. Belum optimalnya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
4. Masih perlunya peningkatan cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana
5. Belum optimalnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana yang diakibatkan diantaranya masih terbatasnya Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.
6. Belum optimanya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran. Dimana Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran masih sebesar 94,20%. Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 96,88%.

2.3.2.1.6. Bidang Sosial

Berikut adalah Indentifikasi permasalahan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan adalah

1. Belum optimalnya pemberdayaan sosial yang diakibatkan karena Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial belum maksimal
2. Belum optimalnya rehabilitasi sosial
3. Belum maksimalnya perlindungan dan jaminan sosial

2.3.2.2. Urusan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.3.2.2.1. Bidang Tenaga Kerja

Belum optimalnya kesempatan kerja untuk menyerap angkatan kerja yang ada di Kabupaten Soppeng. Dimana Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Soppeng pada tahun 2018 baru mencapai 63,64%.

2.3.2.2.2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Belum optimalnya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dimana rasio KDRT di Soppeng pada tahun 2020 sebesar 0,002. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran juga belum menyeluruh pada OPD.

2.3.2.2.3. Bidang Pangan

Perlunya peningkatan Skor Pola Pangan Harapan. Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Soppeng Tahun 2019 mencapai 88,2%, dengan angka idealnya 100.

2.3.2.2.4. Bidang Pertanahan

Belum optimalnya penatagunaan tanah dimana yang diakibatkan oleh belum adanya Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota.

2.3.2.2.5. Bidang Lingkungan Hidup

a) Belum maksimalnya perencanaan lingkungan hidup di Soppeng yang diakibatkan karena belum adanya Perda RPPLH dan Perbub RPPLH
b) Belum optimalnya pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan karena Belum terakreditasinya Laboratorium lingkungan serta masih kurang lengkapnya peralatan laboratorium lingkungan
c) Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
d) Belum maksimalnya pengelolaan persampahan dimana timbulan sampah yang ditangani pada tahun 2020 sebesar 63,15%, Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R sebesar 35,01%, Cakupan area pelayanan persampahan di Kabupaten Soppeng sebesar 26%.

2.3.2.2.6. Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

a) Belum optimalnya pendaftaran penduduk dimana Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk masih sebesar 0,99.
b) Belum optimalnya pencatatan sipil dimana Rasio Bayi Berakta Kelahiran sebesar 0,98%.

2.3.2.2.7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Masih rendahnya desa berstatus swsembada dimana pada tahun 2020 Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa sebesar 6,12%. Berdasarkan perhitungan Indeks Desa Membangun Kementerian

Desa dan PDT, pada tahun 2020 belum ada Desa Mandiri di Kabupaten Soppeng.

2.3.2.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Belum efektifinya keterlibatan perangkat daerah dalam pengembangan kampung KB. Ini terkait dengan belum adanya regulasi daerah yang mengatur tentang pengendalian dan kuantitas dan kualitas penduduk.

2.3.2.2.9. Bidang Perhubungan

Belum optimalnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dimana Persentase kepemilikan KIR angkutan umum di Kabupaten Soppeng di tahun 2020 masih sebesar 89,11% dan pemasangan rambu-rambu masih sebesar 56%.

2.3.2.2.10. Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Belum optimalnya cakupan teknologi, informasi, dan komunikasi dimana Cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Soppeng masih sebesar 65,88%.
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
3. Belum optimalnya integrasi sistem informasi pemerintah daerah.

2.3.2.2.11. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a) Belum optimalnya pengawasan dan pemeriksaan koperasi dimana pada tahun 2020 jumlah koperasi sehat di Kabupaten Soppeng sebesar 80,58%.
b) Belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan UMKM dimana pada tahun 2020 Persentase Usaha Mikro dan Kecil masih sebesar 99,33%. Hal ini diakibatkan karena Minimnya akses pasar dan ruang usaha yang layak dan sesuai standar bagi produk Koperasi dan UMKM, dan Keterbatasan akses permodalan yang dimiliki karena terbentur jenis usaha, skala usaha, persyaratan permodalan dan kepemilikan asset.

2.3.2.2.12. Bidang Penanaman Modal

1. Laju Investasi di Kabupaten masih fluktuatif, Laju Investasi tahun 2017 sebesar 39,92%.
2. Belum banyak investasi yang masuk ke komoditas unggulan daerah.
3. Persebaran investasi yang belum merata.

2.3.2.2.13. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

1. Masih perlunya penguatan organisasi kepemudaan yang aktif.
2. Capaian organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten soppeng masih rendah
3. Perlunya peningkatan prestasi olah raga. Capaian prestasi cabang olah raga di Kabupaten Soppeng sekitar 40 %.

2.3.2.2.14. Bidang Statistik

Belum maksimalnya penyelenggaraan statistic sectoral dimana belum tersedianya data statistik dasar pada tahun berjalan karena baru tersedia pada awal semester II tahun berikutnya sehingga terjadi ketertinggalan 2 tahun dengan tahun perencanaan, belum adanya sumber daya manusia yang berbasis statistik, masih ada beberapa data yang berbeda dihasilkan dari sumber data yang sama.

2.3.2.2.15. Bidang Perpustakaan

1. Masih rendahnya pengunjung perpustakaan daerah.
2. Belum optimalnya kesadaran dan minat budaya baca (literasi).

2.3.2.2.16. Bidang Kearsipan

Perlunya peningkatan kualitas cakupan penerapan arsip di tingkat desa secara baku.

2.3.2.3. Urusan Pilihan

2.3.2.3.1. Bidang Kelautan dan Perikanan

1. Belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan budaya, dimana jumlah produksi ikan pada tahun 2020 sebesar 2.366 ton lebih rendah disbanding target daerah.
2. Perlunya peningkatan konsumsi ikan. Tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Soppeng tahun 2020 masih sebesar 91,36% dari target daerah.
3. Belum optimalnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dimana pada tahun 2020 cakupan bina kelompok nelayan sebesar 0%.

2.3.2.3.2. Bidang Pariwisata

1. Belum optimalnya pengembangan terutama dalam hal destinasi wisata, pengembangan sarana prasarana kepariwisataan, ini terlihat pada capaian kinerja jumlah kunjungan yang terus menurun dari tahun ke tahun,
2. Masih rendahnya rata-rata waktu kunjungan wisatawan, sehingga berdampak pada stagnannya penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor kepariwisataan.
3. Penurunan fungsi objek wisata, khususnya objek wisata alam, terkadang berbagi fungsi dengan kepentingan lainnya, dan juga berdampak pada pendeknya waktu kunjungan wisatawan rata-rata hanya dua malam.

2.3.2.3.3. Bidang Pertanian

1. Perlunya peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan.
2. Belum optimalnya pemasaran produk pertanian.
3. Belum efektif dan efisiennya sarana dan prasarana pertanian khususnya infrastruktur irigasi tersier.
4. Belum optimalnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian

***2.3.2.3.4.* Bidang Perdagangan**

1. Perlunya peningkatan sarana prasarana perdagangan dimana masih ada srarana dan prasarana perdagangan yang harus direvitalisasi.
2. Perlunya peningkatan kemitraan antara pelaku usaha dengan swalayan/ toko modern.
3. Perlunya peningkatan manajemen pengelolaan pasar.
4. Belum optimalnya informasi harga pasar.

***2.3.2.3.5.* Bidang Perindustrian**

1. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manuasia, tingkat pendidikan, keterampilan, dan produktivitas tenaga kerja.
2. Terbatasnya kemampuan pelaku IKM dalam Inovasi dan update teknologi industri
3. Belum adanya keserasian dan sinergitas program antar perangkat daerah yang terfokus pada komoditas unggulan yang disepakati untuk dibina
4. Rendahnya daya saing dan kualitas industri lokal
5. Belum optimalnya regulasi pemerintah dalam mendukung kemajuan sektor industri
6. Belum adanya ikon produk industri yang identik dan menjadi ciri khas Kabupaten Soppeng
7. Terbatasnya akses permodalan bagi IKM.
8. Belum maksimalnya penataan sentra industri
9. Kurangnya tenaga penyuluh industri

2.3.2.4. Fungsi Penunjang urusan

***2.3.2.4.1.* Bidang Perencanaan**

1. Perlunya mengoptimalkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah
2. Perlunya peningkatan kualitas pengendalian evaluasi pelaksanan program pembangunan.

***2.3.2.4.2.* Bidang Penelitian dan Pengembangan**

1. Belum optimalnya hasil-hasil penelitian dan pengkajian yang belum ditindaklanjuti dengan kebijakan;
2. Belum adanya sumber daya manusia khususnya fungsional peneliti bidang penelitian dan pengembangan.

***2.3.2.4.3.* Bidang Kepegawaian**

Rasio ASN di Kabupaten Soppeng yang mengikuti diklat masih rendah;

***2.3.2.4.4.* Bidang Keuangan**

1. Tingkat kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan masih rendah
2. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dibidang pendapatan yang belum memadai

***2.3.2.4.5.* Bidang Pengawasan**

Belum optimalnya penyelenggaraan pengawasan dimana persentase tindak lanjut temuan sebesar 17,07% dan temuan BPK yang ditindaklanjuti sebesar 514 dari 6745 temuan.

2.4. Isu Strategis

1) Identifikasi Isu Strategis dari Level Global

✓ **Pemulihan kondisi dari dampak pandemik *Covid-19***

Pandemik Covid-19 merupakan masalah global, nasonal hingga daerah yang mempengaruhi perekonomian global, pergerakan manusia dan barang antar negara, selain masalah kesehatan itu sendiri. Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang terpapar, telah berupaya optimal dalam penanganan pandemic *Covid-19* dari sisi pelayanan kesehatan, khususnya dalam bentuk berfungsinya laboratorium uji swab sehingga menjadi rujukan bagi daerah lain. Selain itu, dengan fasilitas uji swab tersebut pemerintah daerah lebih mudah melakukan identifikasi dan tracing bila ada warga terpapar, selain terus menegakkan protokol kesehatan untuk memutus rantai penularan. Dalam pembangunan Kabupaten Soppeng TAHUN 2022, dampak *Covid-19* merupakan faktor yang penting diperhatikan pengaruhnya. Selain terhadap kesehatan masyarakat melalui upaya penegakan protokol kesehatan dan vaksinasi, upaya strategis juga diperlukan untuk pemenuhan berbagai aspek kehidupan seperti stagnasi pertumbuhan UMKM, kemunduran pariwisata, stagnasi bisnis transportasi dan penginapan/perhotelan, dan sebagainya. Isu strategis terkait *Covid-19* lebih kepada kepada upaya pemulihan pada berbagai aspek kehidupan yang terdampak negative oleh pandemic *Covid-19*.

✓ **Perubahan Iklim**

Dampak perubahan iklim kemungkinan akan semakin signifikan. Lembaga internasional seperti FAO, lembaga nasional dalam bidang klimatologi, serta beberapa ahli, memprediksi akan terjadinya fenomena kekeringan yang ekstrim secara bergantian dengan fenomena hujan lebat. Kabupaten Soppeng yang mengandalkan perekonomian dan sumber nafkah masyarakatnya dari pertanian akan terdampak dengan perubahan iklim tersebut tidak hanya terhadap produksi pertanian tetapi juga dengan dampak bencana yang menyertainya. Tantangan bukan hanya pada diperlukannya tindakan pengurangan efek rumah kaca pada berbagai sektor pembangunan, tetapi terutama pada tindakan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim pada pertanian, peternakan, dan perikanan.

✓ **Revolusi Industri 4.0**

Bila pandemic Covid-19 telah berakhir, kemungkinan pengaruh revolusi industri 4.0 kembali signifikan terhadap perekonomian dan aspek kehidupan lainnya. Pada dunia bisnis, perkembangan bisnis berbasis aplikasi internet akan mendorong lahirnya start-up UMKM, industri kreatif, serta tergusurnya sejumlah model bisnis dan digantikan oleh model bisnis baru berbasis elektornik tersebut. Dunia

birokrasi akan terpengaruh dengan semakin diterapkan sejumlah aplikasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan berbasis elsktornik sehingga transparansi akan semakin terbuka dan dengan itu kontrol masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintahan semakin terfasilitasi. Isu strategis lain terkait revolusi industri 4.0 adalah semakin dituntutnya inovasi dalam pelayanan public, penyelenggaraan pemerintahan, ataupun pengembangan ekonomi masyarakat.

- ✓ **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)**

  Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan agenda global yang dipatuhi oleh semua negara di bawah arahan PBB. Di dalamnya termuat 17 tujuan dan 169 target/indikator. TPB tersebut mencakup: 1. Menghapus segala bentuk kemiskinan; 2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan; 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia; 4. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua; 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan; 6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan dari air dan sanitasi untuk semua; 7. Memastikan seluruh penduduk mendapat akses untuk energi yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan; 8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua secara berkelanjutan; 9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif berkelanjutan, dan inovasi; 10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara; 11. Membuat pemukiman kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan; 12. Memastikan penerapan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan; 13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya; 14. Melestarikan dan memanfaatkan samudera, laut dan sumber daya kelautan berkelanjutan dalam rangka pembangunan berkelanjutan; 15. Melindungi, memulihkan dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat, lestari mengelola hutan, memerangi penggurunan, dan menghentikan serta membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati; 16. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; 17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam pembangunan daerah lima tahun 2022 di Kabupaten Soppeng, indikator dan target dari TPB akan diintegrasikan dengan indikator dan target lainnya.

2) Identifikasi Isu Strategis dari Level Nasional

✓ **Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024**

RPJMN 2020-2024 memuat visi dan misi, agenda pembangunan nasional, serta tujuan dan sasaran pembangunan. Adapun agenda pembangunan yang menjadi prioritas nasional.

✓ **Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Pelayanan Dasar**

Peraturan Pemerintah No.2/2018 dan Permendagri 100/2019 mengamanahkan seluruh daerah untuk menyelenggarakan SPM pada sejumlah urusan yakni urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat serta sosial. Sejumlah indikator untuk masing-masing SPM telah ditetapkan dan targetnya adalah 100%. Kabupaten Soppeng konsisten akan memenuhi target SPM tersebut.

3) Identifikasi Isu Strategis Provinsi

RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan memuat beberapa kebijakan/program nyata Gubernur yang dapat mempengaruhi pembangunan daerah yakni:

1. Pembangunan infrastruktur
2. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru;
3. Perbaikan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi;
4. Hilirisasi pengelolaan sumberdaya alam;
5. Pembangunan rest-area
6. Pembangunan rumah sakit regional bertaraf internasional.

Dari berbagai kebijakan tersebut, yang relevan sebagai isu strategis Kabupaten Soppeng adalah pembangunan infrastruktur jalan untuk koneksi antar wilayah dan memperlancar pelayanan. Selain itu, hilirisasi pengelolaan produk sumberdaya alam relevan sebagai isu strategis, khususnya pengembangan industri pengolahan beras dan bisnis kuliner berbahan baku beras seperti tape beras, kue bolu dan sebagainya.

4) Identifikasi Isu Strategis dari Masalah Pembangunan Daerah

Dari masalah pembangunan daerah yang telah dipaparkan pada bab 2 sebelumnya, faktor yang dianggap penting dalam mempengaruhi pembangunan tahun 2022 adalah:

1. Peningkatan kualitas hidup manusia;
2. Pemenuhan SPM pelayanan dasar dan pelayan public lainnya;
3. Pertumbuhan ekonomi inklusif
4. Pembangunan infrastruktur
5. Pengembangan fasilitas ekonomi wilayah
6. Reformasi birokrasi untuk tata kelola yang baik
7. Pelestarian lingkungan dan sumberdaya alam.

Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu strategis dari level global, nasional, provinsi dan masalah pembangunan daerah, maka isu strategis yang dianggap relevan untuk pembangunan Kabupaten Soppeng lima tahun kedepan adalah:

1. Pemulihan kondisi dari dampak Covid-19;
2. Pengembangan inovasi dalam merespons revolusi industri 4.0;

3. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
4. Pengurangan kesenjangan dan pemerataan pembangunan;
5. Revolusi mental;
6. Pembangunan kebudayaan;
7. Pembangunan infrastruktur;
8. Hilirisasi pengelolaan produksi sumberdaya alam;
9. Peningkatan kualitas hidup manusia;
10. Pemenuhan SPM pelayanan dasar dan pelayan public lainnya;
11. Pertumbuhan ekonomi inklusif;
12. Pengembangan fasilitas ekonomi wilayah untuk daya saing daerah;
13. Reformasi birokrasi untuk tata kelola yang baik;
14. Pelestarian lingkungan dan sumberdaya alam;
15. Pembangunan pertanian
16. Pengembangan UMKM
17. Penguatan kapasitas desa
18. Pengembangan pariwisata.

2.5. Inovasi Daerah

Dalam mempercepat dan mendukung tujuan pembangunan daerah, terdapat beberapa inovasi yang dilakukan oleh SKPD di Kabupaten Soppeng. Pada dokumen RKPD ini, terdapat Tiga Inovasi Daerah yang merupakan *Top Three* inovasi daerah di Kabupaten Soppeng.

1. E-LaJURKEL (Laporan Jurnal Kelas berbasis Barkode)

1.1. Latar Belakang dan Tujuan

Selama ini guru, Kepala Sekolah dan orang tua tidak dapat memantau kehadiran peserta didik secara akurat di sekolah. Orang tua tidak dapat mengetahui apakah anaknya sampai di sekolah, sebaliknya guru juga tidak mengetahui peserta didik meninggalkan rumah. Masalah lain yang ditemukan yaitu adanya kecenderungan guru mengajar tidak tepat waktu dan peserta didik cenderung tidak disiplin, sehingga sulit terpantau oleh Kepala Sekolah dan orang tua khususnya ketepatan dan keterlambatan peserta didik masuk ke sekolah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka muncullah gagasan inovasi yang menawarkan solusi *E-Lajurkel* dengan memanfaatkan teknologi yang menggunakan aplikasi *google formulir* yang telah dirancang untuk melakukan absensi peserta didik dan pembuatan jurnal harian guru dengan menggunakan *handphone* atau laptop guru. Tujuan inovasi ini adalah:

1) Untuk memantau kehadiran guru dan peserta didik secara *real time* di sekolah oleh orang tua dan Kepala Sekolah.
2) Meningkatkan kedisiplinan guru dan peserta didik untuk tepat waktu datang ke sekolah melaksanakan pembelajaran.
3) Inovasi ini dilaksanakan SMPN 1 Lilirilau Kabupaten Soppeng dengan jumlah peserta didik 473 orang sasaran dan target inovasi jumlah 53 orang sedangkan SMPN 3 Watansoppeng, SDN 1 Lamappoloware, dan SDN 135 Salebbo Mario sebagai sekolah reflikasi program.

1.2. Deskripsi Inovasi

Inovasi ini adalah asli karena aplikasi ini tidak pernah dilakukan sebelumnya sebagai upaya untuk mengefektifkan kinerja sekolah khususnya guru, tenaga kependidikan dan peserta didik. Aplikasi ini memanfaatkan aplikasi yang disediakan oleh google secara bebas yaitu aplikasi google formulir yang dibuat dengan menyesuaikan kebutuhan data yang diperlukan. Laporan jurnal kelas yang memuat kegiatan proses pembelajaran mulai dari awal sampai akhir termasuk kehadiran guru dan peserta didik di kelas.
Langkah kerja dari aplikasi inovasi ini adalah sebagai berikut:

a. Setiap kelas dipasangkan barkode peserta didik pada setiap meja.
b. Sebelum memulai pelajaran guru melakukan scan pada barcode yang terpasang di meja masing-masing peserta didik dengan *handphone*.
c. Setelah melakukan scan secara otomatis aplikasi akan membuka link google formulir yang berisi absensi peserta didik dan jurnal harian kelas.
d. Guru melakukan absensi dan pengisian jurnal harian kelas dan pada saat terakhir pengisian guru di haruskan untuk melakukan perekaman foto selfi dengan latar belakang peserta didik sebagai bukti bahwa guru berada di dalam kelas melaksanakan tugas.
e. Langkah terakhir adalah mengklik tombol kirim, pada saat yang sama data akan terekam dan terkirim ke *google Drive* atau aplikasi WA ke pihak-pihak yang berkepentingan yaitu kepala sekolah, orang tua dan pengawas sekolah.

1.3. Inovatif (Kebaruan, nilai tambah dan keunikan)

Kebaruan dari inovasi ini adalah pemantau kedisplinan guru dan peserta didik yang sebelumnya secara manual menjadi berbasis aplikasi yang *real time*. Laporan kehadiran peserta didik bagi orang tua sebelumnya tidak ada, dan setelah inovasi berjalan laporan dapat diterima secara *real time* setiap saat.
Unsur nilai tambah bagi stakeholders sekolah antara lain:

1) Bagi sekolah adalah kedisiplinan guru dalam pelaksanaan pembelajaran dan mudahnya Kepala Sekolah mendeteksi kelas.
2) Nilai tambah bagi orang tua yaitu dengan mudahnya mengetahui kehadiran anaknya sampai ke sekolah.
3) Nilai tambah bagi pengawas (Dinas Pendidikan dan Kebuadayaan) yaitu dengan mudahnya mendapatkan data dari pihak sekolah berkaitan dengan aktivitas pembelajaran.

Unsur keunikan yang terdapat dalam inovasi ini adalah *low cost* dengan impact yang jauh lebih besar. Komunikasi sekolah dengan orang tua yang lebih intens, informasi yang disajikan aplikasi ini *real time.*

1.4. Strategi Keberlanjutan

Untuk mendukung keberlanjutan inovasi ini beberapa langkah dan strategi yang dilakukan antara lain:

a. Stategi institusional berupa regulasi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa penetapan SMPN 1

Lilirilau Kecamatan Lilirilau sebagai pilot pronyek dari pelaksanaan inovasi E-Lajurkel (Eletronik-Laporan Jurnal Kelas) berbasis Barkode dan beberapa sekolah yakni SMPN 3 Watansoppeng, SDN 1 Lamappoloware, dan SDN 135 Salebbo Mario yang menjadi reflikasi program.

b. Strategi sosial berupa sosialisasi awal kepada stakeholders SMPN 1 Lilirilau yang dilakukan oleh tim teknis aplikasi inovasi, yang selanjutnya masing-masing *stakeholder* sekolah yang akan mereflikasi aplikasi Elektronik-Laporan Jurnal Kelas berbasis Barkode untuk membangun komitmen bersama.
c. Strategi manajerial berupa peningkatan SDM; untuk menjamin kualitas keterlaksanaan program yaitu melakukan diklat singkat operator tiap sekolah (operator utama dan operator pembantu) untuk mengoperasikan aplikasi secara benar. Diklat yang dilakukan tidak membutuhkan waktu yang lama yaiyu pemateri/narasumber cukup menyiapkan *video* tutotial cara pembuatan dan penggunaan aplikasi tersebut dan langsung diuji coba. Dengan demikian persiapan yang dilakukan tidak memerlukan waktu yang lama dan biayapun sangat efisien.

1.5. Evaluasi

Evaluasi internal ini dilakukan dengan melakukan pertemuan guru dengan Kepala Sekolah secara berkala dua kali dalam sebulan untuk mengukur dampak pengimplementasian aplikasi inovasi.
Evaluasi eksternal dilakukan setiap bulan oleh Tim Inovasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng dengan Pengawas Sekolah melalui kunjungan ke sekolah. Agendanya, melihat secara langsung guru dalam menggunakan aplikasi dan meminta laporan dari tiap sekolah dan hasil kegiatan selama sebulan termasuk keberhasilan dan hambatan yang terjadi.

No	Tolak ukur (indikator)	Sebelum 2019 (%)	Setelah 2020 (%)
1	Ketidakhadiran peserta didik di sekolah	25%	10%
2	Kehadiran guru mengajar di dalam kelas	10%	2%
3	Kehadiran guru dan peserta didik	Sulit di pantau	Terpantau secara *real time* oleh Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan orang tua
4	Kedisiplinan guru dan peserta didik	Kurang disiplin	Lebih disiplin

5	Keterlibatan orang tua	Kurang komunikasi antara sekolah dengan orang tua	Terjadinya komunikasi yang lebih intens antara sekolah dengan orang tua
6	Motivasi belajar peserta didik	Rendah	Terjadi peningkatan
7	Hasil belajar peserta didik	Tidak mencapai KKM	peningkatan

Berdasarkan data hasil evaluasi di atas, dapat disimpulkan bahwa inovasi ini sangat efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah dikemukakan sebelumnya. Selain itu menjadi faktor penentu keberhasilan terkait dengan kemajuan dan keberhasilan sekolah dalam melakukan pelayanan pendidikan dengan mengoptimalkan fungsi seluruh sumber daya sekolah secara efektif. Kondisi tersebut terjadi karena terjadinya konektivitas antara stakeholder sekolah.

Tidak disangkal pula bahwa dalam pengoperasian aplikasi terdapat kendala yaitu, *memory hp* guru yang terbatas daya tampungnya, baterai hp *lowbath*, jaringan intenet tidak stabil, orang tua peserta didik ganti kartu telpon. Namun demikian gambaran kendala tersebut tidak mempengaruhi kinerja guru, kepala sekolah, operator dan stakeholder lainnya melanjutkan inovasi ini.

2. Gerakan Digitalisasi Layanan Desa (Gadis Desa)

2.1. Latar Belakang dan Tujuan Inovasi

Pemerintah Desa Pising dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih dilakukan secara manual dan masyarakat tidak mendapatkan informasi terkait jenis pelayanan dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan administrasi yang dibutuhkannya. Pelayanan yang diberikan juga cenderung lebih lama dan masyarakat harus datang secara langsung ke kantor Desa untuk mengurus keperluannya. Warga juga harus mengantri sehingga menimbulkan kerumunan yang berpotensi menjadi *cluster* pandemi Covid-19. Selain itu warga membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar untuk datang ke kantor desa belum lagi jika ada kekurangan kelengkapan berkas yang mengharuskan bolak balik ke rumah dan kantor desa.
Perangkat Desa Pising masih banyak yang belum memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi, demikian pula masyarakat banyak yang belum mampu menggunakan teknologi informasi secara maksimal.
Berdasarkan permasalahan yang dialami oleh Desa Pising di atas, pemerintah desa menginisiasi Gerakan Digitalisasi Layanan Desa atau **GADIS DESA** dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menciptakan sistem layanan desa dari yang manual menjadi sistem yang berbasis aplikasi yang lebih cepat.

2. Mendekatkan layanan kepada masyarakat tanpa harus mendatangi kantor Desa yang dapat menghemat waktu dan biaya.
3. Menghindari antrian dan kerumunan yang berpotensi menciptakan *cluster* Pandemi Covid-19.
4. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan kepada perangkat desa dan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi.

2.2.Deskripsi Inovasi

Sistem pelayanan administrasi di Desa saat ini masih dilakukan dengan manual yaitu dengan datang langsung ke kantor Desa dan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan dengan tentunya ada antrian yang sebagian belum tersistem, hal tersebut terkadang menyebabkan perangkat desa kurang maksimal dalam melakukan pelayanan terlebih lagi fasilitas ruang tunggu di kantor Desa belum semua tersedia. Dengan adanya Gerakan Digitalisasi Layanan Desa (GADIS DESA), dengan menggunakan aplikasi *Klan Desa* sehingga tata kelola Pemerintahan di Desa akan dimaksimalkan, dengan sistem baru yaitu hanya dengan mengklik pada layar ponsel layanan yang diinginkan kemudian mengisi beberapa form yang dibutuhkan sehingga setelah selesai perangkat desa dapat langsung mengantar dokumen yang diperlukan. Gerakan ini berperan penting dalam mengatasi keterbatasan tata kelola administrasi atau pelayanan publik khususnya masyarakat Desa Pising Kabupaten Soppeng.
Melalui Gerakan Digitalisasi Layanan Desa (Gadis Desa), dengan menggunakan aplikasi *Klan Desa* sistem pelayanan publik di desa yang awalnya berbelit-belit, dan secara administratif tidak tertata dan terekam dengan baik karena proses yang serba manual dirombak total menjadi sebuah sistem pelayanan publik yang berorientasi teknologi informasi digital sehingga lebih rapih, transparan, cepat, dan responsif, terhadap kebutuhan masyarakat di desa.

Terdapat beberapa pelayanan GADIS DESA antara lain pelayanan administrasi persuratan dan pengelolaan arsip desa secara *online* dengan Klan *Desa*

- **Inovatif (Kebaruan, Nilai Tambah, dan Keunikan)**

Adapun kebaruan atau nilai tambah serta keunikan yang dapat ditemukan dari Inovasi ini adalah : **Pelayanan Cepat dan** Responsif, pelayanan administrasi lebih cepat dimana masyarakat hanya perlu mengisi *form* surat keperluannya melalui aplikasi di *smartphone* tanpa harus datang langsung ke kantor desa. Surat diproses dalam waktu 2 (dua) menit saja dan diantarkan langsung ke rumah warga bersangkutan atau orang yang membutuhkan.

- **Gadis Desa** adalah produk proyek perubahan DIKLAT PIM II LAN 2019 yang digagas oleh Kepala Dinas PMD Soppeng A. Agus Nongki, S.IP, M..Si dan melibatkan pemuda-pemuda penggiat IT untuk ikut berkontibusi nyata sebagai vendor infrastruktur aplikasi pendukung program ini.
- **Transferabilitas**
  Gadis Desa dengan aplikasi *Klan Desa* yang telah di *launching* di

tahun 2019 yaitu Desa Pising Kecamatan Donri- Donri Kabupaten Soppeng. Pada pelaksanaan inovasi ini telah melewati beberapa tahap diantaranya yaitu, tahap pertama dengan membuat peta desa secara elektronik dengan membuat denah Desa Pising yang dapat diakses melalui akses jaringan internet, dalam hal ini Peta Desa sangat membantu dalam menampilkan keadaan Desa Pising secara visual yang dapat diakses melalui *Google Map*. Tampilan berupa lokasi atau keadaan bagunan, jalan serta informasi mengenai Kartu Keluarga serta foto dari penampakan dari rumah warga dari Desa Pising. Selanjutnya pengaplikasian *Klan Desa* yang menampilkan beberapa jenis pelayanan administrasi yang dibutuhkan oleh masing- masing masyarakat. Dalam hal ini warga mengisi *form* yang dibutuhkan yang disediakan oleh *Klan Desa* sesuai dengan bentuk kepengurusan administrasinya masing- masing. Tahun 2020 inovasi Gadis Desa ini telah dilaksanakan beberapa desa di Kecamatan Donri-Donri yaitu Desa Leworeng, Pesse, Sering, Tottong, Kessing dan desa Pattojo di Kecamatan Liliriaja. Tahun 2021 inovasi ini dilaksanakan oleh Desa LabaE Kecamatan Ganra. Program GADIS DESA merupakan aplikasi yang mudah untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan administrasi kepengurusan warga di desa sehingga harapan jangka panjangnya, aplikasi ini dapat diimplementasikan dan direplikasi pada semua Desa yang ada di Kabupaten Soppeng.

2.3.Strategi Keberlanjutan

Keberlanjutan Sumber Daya yang digunakan dalam inovasi GADIS DESA ini yaitu terletak pada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berkompeten dan profesional dalam menjalankan program, para penggiat IT (*Information Technology*) dan *Budgetting* atau pembiayaan yang ada di Desa. Tiga aspek tersebut menjadi peran penting dalam keberlanjutan inovasi GADIS DESA ini. Disamping itu masyarakat sebagai pengguna dalam inovasi Gadis Desa dituntut untuk dapat menggunakan teknologi yang digunakan dalam Gerakan Digitalisasi Layanan Desa (Gadis Desa) yaitu aplikasi *Klan Desa*.

Dalam pelaksanaan inovasi Gadis Desa yaitu melalui aplikasi *Klan Desa* yang telah dibuatkan Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Soppeng, dimana inovasi ini telah mendapat dukungan dari Bupati Soppeng serta *support* atau dukungan dari instansi terkait. Dengan adanya kolaborasi di antara Dinas terkait, pemerintah Desa, penggiat IT (*Information Technology*), masyarakat serta dukungan *budgetting* maka inovasi ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan kedepannya. Gerakan Digitalisasi Layanan Desa (Gadis Desa) ini akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan administrasi masyarakat. Demikian pula dengan sumber daya manusia yang berkontribusi aktif dalam pelaksanaan inovasi Gadis Desa melalui aplikasi *Klan Desa,* Kepala Desa dan perangkat desa sebagai pengeksekusi dari *Klan Desa,* masyarakat sebagai pengguna atau pemohon administrasi pelayanan dari kantor Desa, serta penggiat IT yang akan melakukan *maintenance* ataupun *upgrade* aplikasi.

2.4.Evaluasi

Dampak evaluasi GADIS DESA :

- Masyarakat Desa sebagai target/kelompok sasaran dan hasilnya masyarakat sangat terbantu dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa.
- Aspek tata pemerintahan yaitu tata kelola pemerintahan di Desa berjalan lebih efektif dan efiesien, menghemat waktu dan mempermudah uraian pekerjaan karena data yang dibutuhkan sudah diinput sendiri oleh masyarakat yang meminta pelayanan dan langsung tercatat di sistem.

Evaluasi yang dilakukan digambarkan bahwa GADIS DESA ini adalah program inovasi yang membantu pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Desa dan diharapkan Pemerintah Desa yang lain juga segera menggunakan aplikasi ini demi pengelolaan pelayanan dan tata pemerintahan di Desa yang lebih baik.

No	Tolok Ukur (indicator)	Sebelum Inovasi	Setelah Inovasi
1	Kelengkapan Berkas	Berkas untuk pengurusan persyaratan administrasi kadang tidak lengkap dibawa ke kantor desa.	Berkas persyaratan bisa diupload pada aplikasi.
2	Waktu	1Hari	1-2jam
3	Metode	Masyarakat datang ke kantor desa	Perangkat desa mengantarkan ke rumah warga
3	Biaya	Dari Dusun terjauh Rp.50.000,- (BBM,biaya manakan,minum)	Rp. 0
4	Transfer Informasi	Informasi dari desa kurang tersampaikan ke masyarakat	informasi Desa tersedia pada aplikasi Klandesa
5	Penguasaaan IT	Perangkat desa, masyarakat belum memanfaatkan IT	Perangkat desa, masyarakat mampu

			memanfaatkan IT
6	Penyebaran Covid-19	Berpotensi menciptakan antrian,kerumunan, menimbulkan *cluster* penyebaran Covid-19	Tidak ada lagi antrian dan kerumunan masyarakat

Hasil evaluasi GADIS DESA ini yang dilakukan baik secara internal di lingkup Desa dengan tetap melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng. GADIS DESA melalui aplikasi *Klan Desa* akan selalu dimonitor dan dievaluasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng serta tetap berkoordinasi dengan *stakeholder* yang terkait. Pada masa *pandemic* Covid-19 saat ini yang secara global terjadi di seluruh dunia dimana seluruh Negara di dunia sedang berjuang dalam menangani *pandemic* Covid-19, seperti halnya dengan di negara kita, Presiden Joko Widodo telah melakukan beberapa jenis kebijakan-kebijakan dalam hal penanganan Covid-19 ini. Adapaun beberpa kebijakan yang telah dilakuakn antara lain adalah keringanan biaya listrik, pembatasan sosial berskala besar, pembatasan sosial berskala mikro, larangan mudik, keringanan kredit serta lontaran dana sebesar Rp. 401,5 triliun melalui APBN pada tahun 2020. Begitu pula yang telah dilakukan dari tingkat Kabupaten, maupun Desa/ Kelurahan di Kabupaten Soppeng Mulai dari *Work From Home (WFH)* , dimana pelaksanaan inovasi GADIS DESA melalui aplikasi Klan Desa dirasakan sangat membantu masyarakat dalam hal ini Desa Pising secara khusus dalam mendapatkan berbagai jenis pelayanan administrasi di Kantor Desa. Dengan adanya *Klan Desa* dapat membatasi pergerakan masyarakat, masyarakat hanya menggunakan aplikasi dalam memenuhi keperluan administrasinya di kantor Desa.

3. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian “Database Dalam Genggaman”

3.1. Latar Belakang dan Tujuan

Dalam penyajian informasi data kepegawaian pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng, masalah yang sering dihadapi yaitu data pegawai yang belum *diupdate*/diperbaharui, contohnya tidak sesuai dengan status kepegawaian ataupun status pribadi. Jumlah Pegawai di lingkup Kabupaten Soppeng yang perlu diperbaharui adalah 5300 Orang.

Melihat kondisi saat ini dalam hal penyusunan informasi data pegawai ditemukan beberapa permasalahan yaitu :

1. pembuatan laporan rekapitulasi data (buku induk PNS) dan profil PNS masih membutuhkan biaya, proses dan waktu yang lama
2. keamanan data dan arsip dokumen PNS tidak aman

3. penyediaan data sebagai bahan untuk proses pengambilan keputusan pimpinan belum efektif dan efisien

Oleh karena itu, dalam percepatan proses pelayanan informasi kepegawaian maka kami mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah gagasan inovasi dengan judul **Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian "Database Dalam Genggaman".**

Tujuan inovasi dari aplikasi SIMPEG yaitu penyajian informasi data pegawai lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng lebih akurat karena dapat diakses secara *online*, sehingga memudahkan PNS melihat datanya untuk diperbaharui dan membawa dokumen kepegawaiannya dalam bentuk file elektronik. Sehingga pelayanan administrasi dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengambilan keputusan pimpinan. Adapun target dari inovasi adalah untuk dimanfaatkan oleh pengelola kepegawaian SKPD, para PNS dan pihak lain yang membutuhkan.

3.2. Deskripsi Inovasi

Dalam rangka pelaksanaan inovasi, salah satu tujuan yang ingin dicapai BKPSDM adalah pelayanan informasi data kepegawaian yang efektif dan efisien. Namun, melihat kondisi saat ini dalam hal penyusunan informasi data pegawai pada SIMPEG ditemukan data pegawai yang tidak terupdate, sehingga penyajian informasi data pegawai tidak akurat.

Menghadapi permasalah yang dimaksud, maka kondisi yang diharapkan adalah agar setiap pegawai dapat mengecek dan mengupdate data masing-masing melalui aplikasi sistem informasi kepegawaian yang berbasis online melalui laptop atau smartphone.
Pada aplikasi tersebut akan diberikan akses login kepada PNS dan pengelola kepegawaian dan masing-masing bertanggungjawab atas kewenangan dalam mengupdate. Sedangkan bagi pengelola kepegawaian yang juga sebagai admin SKPD, selain membantu PNS dalam mengupdate datanya juga bertugas sebagai verifikator. Apabila data pegawai terupdate maka akan memudahkan proses pengolahan data selanjutnya untuk penyajian informasi dan pelayanan kebutuhan.

Dengan adanya inovasi database dalam genggaman, dapat membantu PNS untuk mengarsipkan dokumen kepegawaiannya secara elektronik. Hal ini tentu saja dapat mengurangi resiko dokumen robek/ terbakar atau hal lain yang dapat merusak arsip, lebih cepat ditemukan saat dibutuhkan, meningkatkan keamanan arsip karena untuk mengakses hanya orang yang memiliki otorisasi saja. Selain itu, setiap PNS dengan mudah bisa membawa dokumen kepegawaiannya dalam bentuk file elektronik yang telah diunggah pada aplikasi SIMPEG.

3.3. Inovatif (Kebaruan, Nilai Tambah, Keunikan)

Keunggulan dari inovasi SIMPEG "Database Dalam Genggaman" adalah sistem aplikasi yang berbasis web yang dapat diakses langsung oleh setiap PNS melalui laptop atau handphone. PNS login dengan menggunakan NIP, selanjutnya dapat melihat status kepegawaian, data

kepegawaian dan data pribadi pada aplikasi tersebut.

Pada aplikasi ini, terdapat beberapa menu pilihan yang juga dapat memudahkan SKPD dalam pengolahan data kepegawaian dalam menjalankan tupoksi. Misalnya dalam pengolahan data Buku Induk Pegawai yang merupakan tupoksi pejabat kepegawaian pada SKPD. Dengan login pada aplikasi SIMPEG, selanjutnya memperbaharui data PNS, maka secara otomatis perubahan data tersinkronisasi pada Buku Induk yang dicetak dan dilaporkan setiap akhir tahun.

3.4. Strategi Keberlanjutan

Untuk mendukung terlaksananya inovasi ini dibuatkan Surat Keputusan Kepala BKPSDM Nomor : 227.a/BKPSDM/II/2017, dan telah dilaksanakan sosialisasi ke setiap SKPD dan sekolah. Sedangkan untuk keberlanjutannya pada setiap tahun dibuatkan Surat Keputusan Kepala BKPSDM tentang penunjukan admin/operator aplikasi.

Inovasi ini dapat menciptakan jaringan kerja sama yang kuat antar SKPD khususnya bagi pejabat pengelola kepegawaian, sekaligus memunculkan kepedulian dan rasa kepemilikan PNS terhadap pentingnya data kepegawaian. Inovasi ini dianggap hemat dalam penggunaan anggaran, karena untuk memperoleh data dari setiap SKPD tidak diperlukan biaya dalam melakukan koordinasi.

Menciptakan ide kreatif dan inovatif sangat diperlukan agar SIMPEG semakin mudah memperoleh akses pelayanan public. Adapun kebutuhan yang diharapkan dapat mendukung peningkatan dan keberlanjutan proyek perubahan ini adalah :

1. Penambahan tenaga pelaksana dalam pengelolaan data sistem informasi manajemen kepegawaian, sehingga notifikasi permintaan untuk validasi updating data dari pegawai dapat diproses segera karena terkontrol oleh beberapa admin.
2. Tersedianya jaringan internet yang memadai, baik untuk lingkup BKPSDM maupun lingkup SKPD masing-masing.
3. Terwujudnya pengadaan smartphone/handphone dengan spesifikasi yang memadai demi mendukung kelancaran pelaksanaan tugas untuk para admin simpeg lingkup BKPSDM Pemkab Soppeng, sehingga setiap permintaan updating data yang terkirim ke admin dapat segera disetujui atau divalidasi oleh admin setiap saat.

3.5. Evaluasi

1. Inovasi Telah Dievaluasi

Berdasarkan survey dilapangan, inovasi SIMPEG memberikan dampak positif bagi BKPSDM dan seluruh PNS Kab.Soppeng. Dampak yang sudah terasa adalah memudahkan pengelolaan data dan pencarian dokumen kepegawaian pada saat dibutuhkan.

Dari sisi tata kelola pemerintahan, inovasi ini memudahkan proses pencarian riwayat jabatan/pendidikan PNS. Sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk proses penempatan tugas PNS.

Tahun 2020 telah dilakukan rakor dan verifikasi data pada Sistem

Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KPNS). Salah satu indikator penilaian adalah evaluasi SIMPEG daerah. Berdasarkan hasil evaluasi KPNS bahwa SIMPEG Pemkab Soppeng sudah layak dan terintegrasi dengan beberapa aplikasi lainnya.

2. Indikator Yang Digunakan Dalam Evaluasi

Indikator yang digunakan dalam evaluasi adalah jumlah kegiatan yang dilakukan, jumlah stakeholder yang menjadi tim kerja sama dalam pengembangan sistem aplikasi SIMPEG, peningkatan sarana prasarana, dampak dari pelayanan (akses komputer dan internet dan bimbingan teknis), dan pihak-pihak yang mengakses SIMPEG.

Penggunaan inovasi SIMPEG database dalam genggaman telah dilakukan evaluasi secara berkala oleh tim kerja selaku admin kabupaten. Evaluasi dilakukan terhadap SKPD yang masih belum melengkapi updating data PNS. Evaluasi ini dilakukan setiap 2 (dua) kali dalam setahun, tujuannya adalah untuk memperbaharui data dan jumlah PNS yang akan dijadikan sebagai databate dalam penyusunan Buku Induk Pegawai setiap akhir tahun.

No	Tolok Ukur (indicator)	Sebelum Inovasi	Setelah Inovasi
1	Waktu	Sebanyak 5300 PNS yang diupdate datanya dan membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan untuk penyusunan rekapitulasi buku induk pegawai.	Penginputan data PNS dilakukan pada aplikasi, sehingga memudahkan perhitungan rekapitulasi jumlah PNS dan waktu yang relatif singkat kurang lebih 1 bulan
2		Rekonsialisasi data pns dengan pihak keuangan membutuhkan waktu kurang lebih 3 hari.	Rekonsialisasi data diselesaikan dalam waktu 1 hari
3		• Penyusunan laporan buku induk PNS membutuhkan waktu 1 bulan	Penyusunan laporan buku induk PNS membutuhkan waktu kurang lebih 3 hari.
4	Keamanan data	Penyajian data rekapitulasi jumlah PNS berdasarkan jenis kelamin, golongan dan	Penyajian data rekapitulasi jumlah PNS berdasarkan jenis kelamin,

		Pendidikan membutuhkan waktu 1 minggu.	golongan dan Pendidikan membutuhkan waktu 15 menit.
5	Biaya	Tidak aman, dokumen arsip tidak tertata rapi, hilang, terbakar	Aman, arsip digital/file elektronik
6	Pengambilan keputusan	Cetak profil sebanyak 5300 PNS, setiap profil minimal 3 lembar dengan biaya Rp. 500,- per PNS sebanyak Rp. 7.950.000,-	Tidak ada biaya cetak karena profil bisa didownload dan diarsipkan secara digital
			Tersedianya profil PNS



BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

"Pada Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah "

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Formulasi kerangka ekonomi dan pendanaan daerah merupakan salah satu elemen vital dalam proses perencanaan daerah. Keberadaan kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan yang komprehensif serta akurat dapat merepresentasikan kondisi dan prospek daerah dari perspektif ekonomi. Rancangan kerangka ekonomi daerah yang baik juga telah melalui tahapan sinkronisasi dan integrasi dengan kerangka ekonomi regional dan nasional. Sinkronisasi ini sangat diperlukan karena daerah akan menikmati eksternalitas positif dan sekaligus turut menanggung derita eksternalitas negatif dari kondisi ekonomi pada level regional maupun nasional.

Rancangan kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Soppeng Tahun 2022 secara detil mendeskripsikan kondisi perekonomian Kab. Soppeng serta arah kebijakan pendanaan Pemerintah Daerah Kab. Soppeng. Rancangan ini akan memberikan kontribusi dalam upaya memproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah secara akurat. Selain itu rancangan kerangka ekonomi dan pendanaan ini juga dapat dijadikan sebagai dasar asumsi operasionalisasi kebijakan di tahun 2022.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Tahun 2022 merupakan tahun Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural yang merupakan tema Pembangunan nasional, upaya pemulihan ekonomi dan reformasi struktural diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2–6,0 persen pada tahun 2022 (Tabel 2.9). Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan meningkatkan Gross National Income (GNI) per kapita (Atlas Method) menjadi US$4400–4430 pada tahun 2022, membawa kembali Indonesia ke dalam kategori Upper-Middle Income Countries.

Sementara itu perekonomian Sulawesi Selatan pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Penerapan adaptasi Kebiasaan Baru disertai dengan upaya pemerintah dalam menggerakkan kembali roda perekonomian diperkirakan akan meningkatkan perbaikan konsumsi rumah tangga serta investasi yang mulai terakselerasi mendorong tren pemulihan ekonomi. Dilihat dari segala perkembangan yang ada, serta mempercepat potensi pemulihan ekonomi global maupun nasional di tahun depan, maka prediksi target indikator ekonomi makro Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 yaitu: Pertumbuhan ekonomi 4,62 – 5,98 persen; Tingkat Kemiskinan 9,19 persen; Tingkat Pengangguran Terbuka 6,95 persen; Gini Rasio 0,398; PDRB Perkapita (adhb) Rp. 62,43 Juta dan Tingkat Inflasi 3,0-1,0 persen;

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kab. Soppeng untuk tahun 2022 tidak terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2020 dan awal tahun 2021, target tahun 2022, prospek serta tantangan perekonomian pada tahun 2021 dan 2022. Pada awal tahun 2020, pandemi COVID-19 membuat kondisi ekonomi global memburuk yang memberikan dampak juga pada melambatnya kondisi ekonomi di Kab. Soppeng. Implikasi pandemi COVID-19 di seluruh dunia telah merenggut korban jiwa serta kerugian material

sehingga berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut tentunya mengharuskan pemerintah melakukan berbagai upaya untuk melakukan penyelamatan baik dari aspek kesehatan maupun ekonomi yang berfokus pada belanja di sektor kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net) serta penanganan dampak ekonomi yang didalamnya termasuk dunia usaha dan masyarakat terdampak. Pada tahun 2022 kondisi kesehatan masyarakat akibat pandemi COVID-19 diprediksi membaik akibat adanya penanganan kesehatan misalnya diadakannya vaksinasi pada tahun 2021, sehingga perekonomian Kab. Soppeng diperkirakan sudah mulai bangkit. Prediksi perbaikan kondisi perekonomian berdasarkan kepada asumsi meningkatnya aktivitas di beberapa sektor lapangan usaha khususnya sector industry pengolahan dan sector perdagangan yang mengalami kontraksi pada tahun 2020. Untuk sector industry dorongan Pertumbuhan kategori industri pengolahan pada tahun 2022 akan bersumber dari **terkendalinya Covid-19 dengan selesainya vaksinasi**. Hal ini akan menyebabkan peningkatan omzet terutama untuk industri makan minum yang memiliki share terbesar. Sementara itu Aktifitas ekonomi yang berangsur pulih pada tahun 2022 akan menyebabkan dampak daya beli masyarakat yang akan membaik sehingga sektor perdagangan diprediksi akan tumbuh pada tahun 2022. Selain itu pada tahun 2022 sector pertanian, kehutanan dan kehutanan diprediksi akan tumbuh dan memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah, hal ini akan dilakukakn melalui Penguatan akses petani ke input produksi, Pengawalan dan pendampingan lapangan. Dengan semakin berkurangnya dampak Covid 19 pada tahun 2022 rantai pasok &sistem distribusi pangan, daya beli konsumen, ketidakstabilan harga,serta penurunan akses pasar akan lebih baik di tahun 2022. Pertumbuhan kategori konstruksi kabupaten soppeng tahun 2022 diprediksi akan tumbuh positve. Hal ini disebabkan karena jumlah proyek konstruksi yang ada di tahun 2022 akan meningkat baik dari APBN, APBD 1 dan APBD 2. Hal-hal tersebut menjadi dasar pemulihan ekonomi sebagai salah satu kebijakan prioritas pembangunan ekonomi daerah Kab. Soppeng tahun 2022.

3.1.1. Kondisi Pembangunan Ekonomi Kab. Soppeng Tahun 2020

Kondisi pembangunan ekonomi di Kab. Soppeng di tahun 2020 membahas gambaran mengenai capaian indikator makro tahun 2020, gambaran dampak COVID-19 pada sektorsektor ekonomi serta dampak COVID-19 terhadap perubahan anggaran atau refocusing APBD Tahun 2021. Gambaran indikator makro Kab. Soppeng yang terdiri atas laju pertumbuhan ekonomi Kab. Soppeng, inflasi, ketenagakerjaan, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan diuraikan sebagai berikut.

3.1.1.1. Pertumbuhan PDRB

✓ ***Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)***

Salah satu indikator utama dalam mengukur perekonomian daerah adalah penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dimana PDRB merupakan jumlah keseluruhan dari nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan berdasarkan semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam kurun waktu satu tahun.

Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB

dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Analisis ekonomi daerah harus mampu menggambarkan dengan jelas kinerja PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk perhitungannya ke sektor-sektor usaha. Analisis ekonomi daerah dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah.

Pada tahun 2020 Perekonomian Kabupaten Soppeng tetap menunjukkan laju perkembangan yang positif, meskipun ditengah kondisi bencana akibat Covid 19 yang mempengaruhi semua sektor ekonomi global, nasional dan daerah. Hal ini tercermin dari nilai produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) tahun 2020 yang sebesar Rp.11.382.122,02 juta rupiah, dimana pada tahun 2019 sebesar Rp.10.937.388,00 juta rupiah. Hal tersebut menggambarkan aktivitas ekonomi di Kabupaten Soppeng masih tumbuh menggeliat ditengah pandemic Covid-19. Untuk selengkapnya gambaran terkait PDRB ADHB Kabupaten Soppeng tahun 2015-2020 terangkum dalam berikut:

Tabel 3.1. Produk Domestik Regional Bruto Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah), 2016–2020

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.391.150,6	2.731.526,1	3.057.935,7	3.138.491,0	3.336.193,4
B	Pertambangan dan Penggalian	356.041,70	384.274,80	432.920,40	477.330,90	506.494,11
C	Industri Pengolahan	822.548,30	936.725,30	1.048.113,0	1.150.263,2	1.130.157,0
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6.096,40	7.449,30	8.125,20	8.682,00	9.068,90
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.553,30	4.050,10	4.461,90	4.717,80	4.975,43
F	Konstruksi	964.170,60	1.098.866,0	1.290.274,6	1.468.400,1	1.537.616,9
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	980.946,00	1.101.069,0	1.276.053,6	1.458.273,2	1.414.753,1
H	Transportasi dan Pergudangan	257.663,50	273.810,80	303.263,30	335.477,30	324.709,77
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	113.746,10	128.377,60	147.031,70	167.153,60	163.898,42
J	Informasi dan Komunikasi	218.035,40	261.882,20	299.074,30	332.939,00	369.116,18
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	276.358,40	295.267,60	324.413,00	352.304,60	384.579,91
L	Real Estate	438.088,30	483.696,50	527.386,20	568.306,40	592.730,77
M,N	Jasa Perusahaan	15.896,00	17.835,60	19.750,50	22.149,90	21.350,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	521.439,50	561.179,30	607.050,80	685.513,70	722.368,41
P	Jasa Pendidikan	344.565,70	379.408,50	418.110,50	488.576,70	562.871,42
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	128.931,50	145.963,10	167.871,50	192.962,00	218.892,78
R,S, T,U	Jasa lainnya	56.708,30	64.825,10	74.102,00	85.846,60	82.344,87
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	7.895.939,50	8.876.207,00	10.005.938,30	10.937.388,00	11.382.122,02

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2021

Jika dilihat dari besaran PDRB atas dasar harga konstan yang menggambarkan produktivitas ekonomi yang dihitung berdasarkan tahun dasar konstan, PDRB ADHK Kabupaten Soppeng menggambarkan pola yang sama dengan PDRB ADHB yang mengalami kinerja positif. Nilai PDRB ADHK Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 sebesar Rp.7.146.654,36 juta rupiah, lebih tinggi dibanding tahun 2019 yang sebesar Rp.6.993.513,10 juta rupiah. Kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan kategori dengan nilai PDRB ADHK terbesar di tahun 2020 sebesar Rp. 1.995.488,51 juta rupiah.

Tabel 3.2. Produk Domestik Regional Bruto Soppeng Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah), 2016 - 2020

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.613.107,00	1.757.019,70	1.896.925,70	1.946.887,40	1.995.488,51
B	Pertambangan dan Penggalian	175.714,50	189.228,40	207.354,40	228.338,70	237.152,57
C	Industri Pengolahan	564.498,30	621.778,80	657.200,80	710.969,20	691.955,40
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7.244,90	7.615,90	8.068,70	8.627,30	9.141,62
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.155,10	3.391,50	3.712,90	3.915,30	4.129,08
F	Konstruksi	672.422,90	728.663,30	793.817,00	876.612,10	916.147,34
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	789.092,60	860.583,90	943.562,00	1.047.940,10	1.005.657,51
H	Transportasi dan Pergudangan	160.047,70	172.636,30	190.016,30	209.471,00	196.819,02
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	86.675,10	95.683,30	107.252,30	120.543,40	117.067,77
J	Informasi dan Komunikasi	201.083,80	225.201,30	245.823,90	273.085,80	305.146,03
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	169.575,70	174.714,40	185.203,20	196.578,50	213.335,14
L	Real Estate	280.586,90	290.107,20	306.756,60	324.701,80	337.560,00
M,N	Jasa Perusahaan	12.291,80	13.248,40	14.568,10	16.045,40	15.183,72
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	351.948,20	369.224,50	385.072,20	423.603,10	438.879,32
P	Jasa Pendidikan	317.755,90	342.203,40	376.713,30	415.966,80	461.390,37
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	103.499,80	113.580,00	124.167,00	136.049,70	150.430,20
R,S, T,U	Jasa lainnya	38.990,60	42.575,30	48.178,00	54.177,60	51.170,75
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5.547.690,87	6.007.455,72	6.494.392,43	6.993.513,10	7.146.654,36

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2021

Berdasarkan dari komponen penyusunnya, kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi lapangan usaha utama yang memberikan produktivitas tertinggi di Kabupaten Soppeng dengan

kontribusi pada tahun 2020 sebesar Rp.3.336.193,48 juta rupiah. Selanjutnya kategori lapangan usaha yang memberikan kontribusi tinggi yaitu konstruksi sebesar Rp.1.537.616,97 juta rupiah dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp.1.414.753,16 juta rupiah. Hal ini membuktikan bahwa meskipun ditengah pandemik Covid-19, tetapi sektor utama perekonomian di Kab. Soppeng pada tahun 2020 tetap memberikan kontribusi yang cukup.

Selaras dengan karakteristik Kabupaten Soppeng sebagai Kabupaten yang mengandalkan sektor pertanian sebagai aktifitas ekonomi utama masyarakatnya. Besarnya produktivitas sektor pertanian tersebut menjadi pengungkit dalam mendorong tumbuhnya lapangan usaha penunjang lainnya yaitu kategori lapangan usaha kontruksi. Kontruksi menjadi kategori lapangan usaha yang memiliki prospek tumbuh tinggi dikarenakan semakin berkembangnya suatu wilayah maka semakin tinggi pula permintaan akan pembangunan fisik di Kabupaten Soppeng.

✓ ***Distribusi Sektoral***

Distribusi sektoral memberikan gambaran sejauh mana peranan sektor lapangan usaha memberikan andil terhadap pembentukan perekonomian Kabupaten Soppeng. Distribusi PDRB Kabupaten Soppeng pada tahun 2015-2020 didominasi oleh sektor primer, dimana pada tahun 2020 berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku kontribusi tertinggi pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 29,31 persen. Adapun sektor kedua dengan kontribusi tertinggi pada tahun 2020 yaitu konstruksi sebesar 13,51 persen.

Tabel 3.3. Distribusi PDRB Tahunan Kabupaten Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2016-2020 (Persen)

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30,28	30,77	30,56	28,70	29,31
B	Pertambangan dan Penggalian	4,51	4,33	4,33	4,36	4,45
C	Industri Pengolahan	10,42	10,55	10,47	10,52	9,93
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04
F	Konstruksi	12,21	12,38	12,90	13,43	13,51
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,42	12,40	12,75	13,33	12,43
H	Transportasi dan Pergudangan	3,26	3,08	3,03	3,07	2,85
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,44	1,45	1,47	1,53	1,44
J	Informasi dan Komunikasi	2,76	2,95	2,99	3,04	3,24
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,50	3,33	3,24	3,22	3,38
L	Real Estate	5,55	5,45	5,27	5,20	5,21
M,N	Jasa Perusahaan	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,60	6,32	6,07	6,27	6,35
P	Jasa Pendidikan	4,36	4,27	4,18	4,47	4,95
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,63	1,64	1,68	1,76	1,92
R,S, T,U	Jasa lainnya	0,72	0,73	0,74	0,78	0,72
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng , 2021

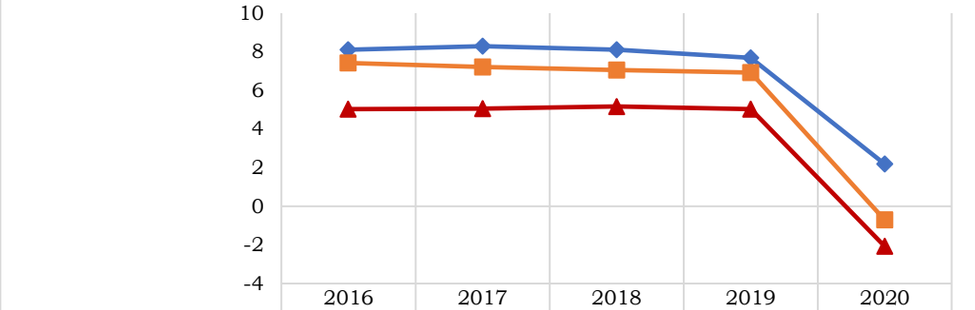
Berdasarkan distribusi PDRB menurut lapangan usaha, perlu dicermati tentang peranan setiap sektor dan sektor apa saja yang merupakan sektor basis (base sector) dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Soppeng terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Prov. Sulawesi Selatan.

✓ ***Pertumbuhan Ekonomi***

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB yang dihasilkan suatu daerah pada tahun tertentu dibandingkan nilai PDRB tahun sebelumnya, dengan menggunakan nilai PDRB Harga Konstan. Laju pertumbuhannya untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan serta sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan daerah untuk perncanaan pembangunan daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng lima tahun terakhir tumbuh positif dengan besaran yang fluktuatif, diakibatkan oleh peranan sektor pertanian yang memberikan kontribusi selama lima tahun terakhir yang juga mengalami fluktuatif.

Grafik 3.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng, Prov. Sul-sel dan Nasional Tahun 2016-2020



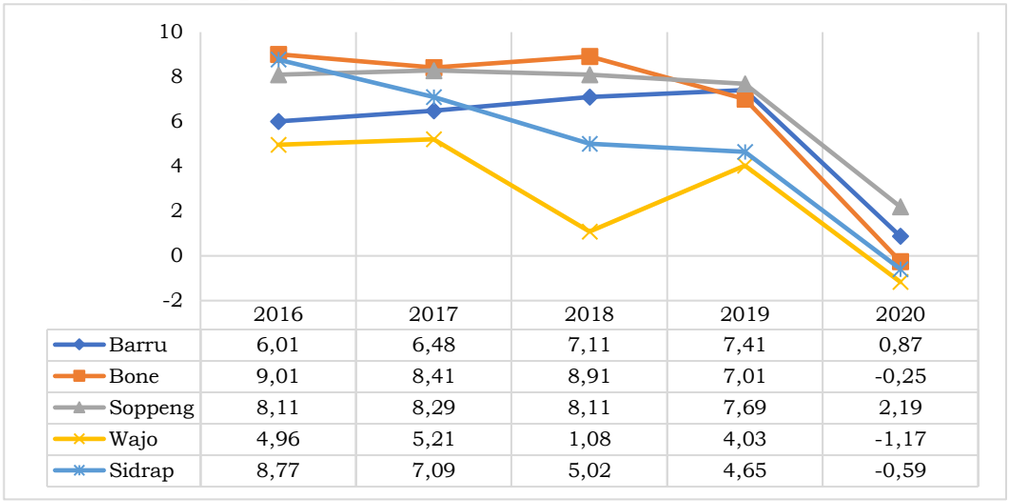
	2016	2017	2018	2019	2020
Soppeng	8,11	8,29	8,11	7,69	2,19
Sulawesi Selatan	7,42	7,21	7,06	6,92	-0,7
Nasional	5,03	5,07	5,17	5,02	-2,07

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2021

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 menunjukkan kinerja yang cukup baik, dimana laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng Tahun 2020 sebesar 2,19 persen lebih besar dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang terkontraksi sebesar -2,07 persen dan pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar -0,7 persen. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun pada tahun 2020 terdapat pandemic Covid-19 tetapi dengan antisipasi pemerintah daerah di sektor Kesehatan, ekonomi dan social melalui beberapa program misalnya pe;laksanaan 3T (tracking, Testing, dan treatment), peningkatan kapasitas laboratorium daerah, pembuatan ruang isolasi, pemberian bansos bagi masyarakat yang terkena dampak, dan program pemulihan ekonomi.

Apabila disandingkan dengan pertumbuhan Ekonomi wilayah sekitar, pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng pada empat tahun terakhir berada pada posisi yang baik. Pada tahun 2020 walaupun dalam masa pandemic Covid-19 pertumbuhan ekonomi kabupaten Soppeng lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi wilayah sekitar yang setara. Perbandingan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

Grafik 3.2. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng dengan Wilayah Sekitar Tahun 2016 - 2020

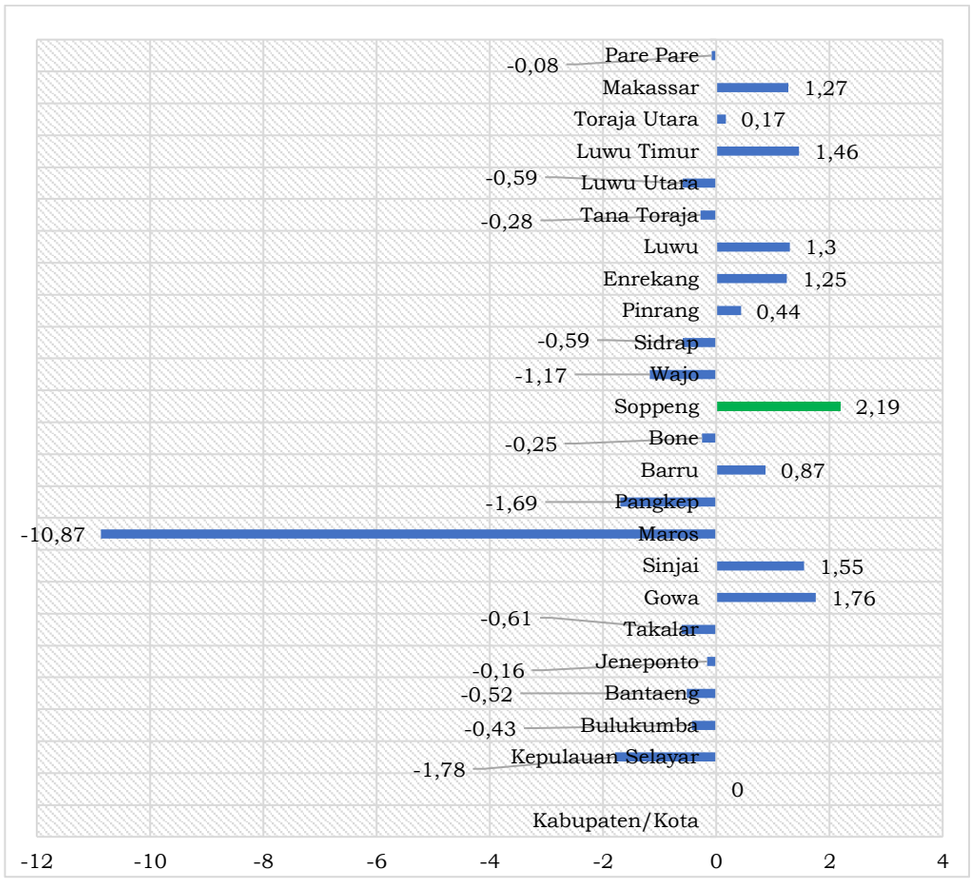


	2016	2017	2018	2019	2020
Barru	6,01	6,48	7,11	7,41	0,87
Bone	9,01	8,41	8,91	7,01	-0,25
Soppeng	8,11	8,29	8,11	7,69	2,19
Wajo	4,96	5,21	1,08	4,03	-1,17
Sidrap	8,77	7,09	5,02	4,65	-0,59

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2021

Untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng jika dibandingkan dengan daerah lain di Prov. Sul-Sel, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Soppeng berada pada urutan pertama. Hal ini menunjukkan bahwa aktifitas ekonomi di Kabupaten Soppeng di tengah pandemi Covid -19 cukup menggeliat pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan daerah lain di Prov. Sulawesi Selatan.

Grafik 3.3. Pertumbuhan Ekonomi Kab./ Kota di Prov. Sul-Sel Tahun 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2021

Selama lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng terjadi pada seluruh kategori lapangan usaha kecuali pada tahun 2020, dimana

akibat dampak dari covid-19 beberap sektor mengalami kontraksi yaitu industri pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Perusahaan dan jasa lainnya. Kategori lapangan usaha Pertanian, kehutanan dan perikanan masih memberikan andil terbesar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng meskipun pada tahun 2020, mengalami sedikit perlambatan dibanding tahun 2019. Kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2020 yaitu kategori informasi dan komunikasi yang sebesar 11,74 persen.

Tabel 3.4.Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng, Menurut Lapangan usaha Kabupaten Soppeng Tahun 2016 - 2020

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10,07	8,19	7,38	2,57	2,50
B	Pertambangan dan Penggalian	9,78	7,14	8,74	9,19	3,86
C	Industri Pengolahan	6,26	9,21	5,39	7,56	-2,68
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,68	4,87	5,61	6,47	5,96
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,4	6,97	8,66	5,17	5,46
F	Konstruksi	4,11	7,72	8,21	9,44	4,51
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,92	8,31	8,79	9,96	-4,03
H	Transportasi dan Pergudangan	5,77	7,29	9,15	9,29	-6,04
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,33	9,41	10,79	11,03	-2,88
J	Informasi dan Komunikasi	9,53	10,71	8,39	9,98	11,74
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,36	2,94	5,66	5,79	8,52
L	Real Estate	2,82	3,28	5,43	5,53	3,96
M,N	Jasa Perusahaan	7,94	7,22	9,06	9,21	-5,37
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,55	4,68	4,12	9,1	3,61
P	Jasa Pendidikan	8,79	7,14	9,16	9,44	10,92
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,13	8,87	8,53	8,73	10,57
R,S, T,U	Jasa lainnya	7,4	8,42	11,63	11,07	-5,55
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	8,11	8,29	8,11	7,69	2,19

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2021

✓ **Inflasi**

Secara umum angka inflasi yang menggambarkan kecenderungan tentang perkembangan harga dan perubahan nilai yang dapat dipakai sebagai informasi dasar untuk pengambilan keputusan baik tingkat ekonomi makro atau mikro, baik fiskal maupun moneter. Pada tingkat mikro, rumah tangga/masyarakat misalnya, dapat memanfaatkan angka inflasi untuk dasar penyesuaian pengeluaran kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan mereka yang relatif tetap. Pada tingkat korporat angka inflasi dapat dipakai untuk perencanaan pembelanjaan dan kontrak bisnis. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa Inflasi merupakan indikator penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

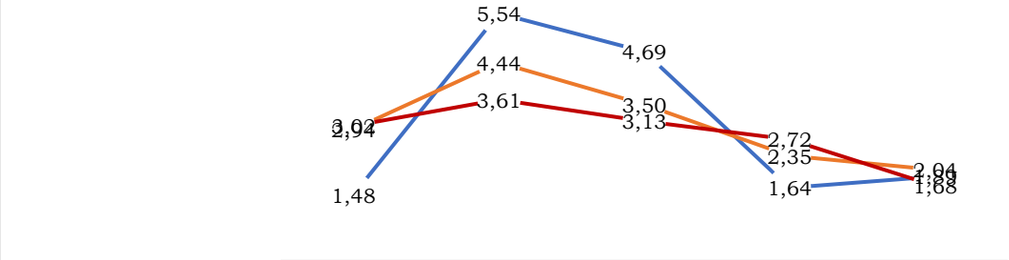
Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa

di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Tingkat inflasi dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi maupun biaya hidup yang ada di masyarakat. Fluktuasi inflasi daerah akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng yang cukup tinggi pada tahun terakhir tentu tidak akan terlalu bermakna terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat manakala laju inflasi juga cukup tinggi.

Pengendalian inflasi merupakan indikator yang erat kaitannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun inflasi memberikan dampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi bukan berarti tidak adanya inflasi dapat berdampak baik bagi perekonomian. Inflasi yang terlalu rendah bahkan diangka nol justru akan berdampak pada lesunya perekonomian bahkan dapat menimbulkan stagnansi. Alhasil pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak dapat terlaksana.

Laju inflasi tahunan Kabupaten Soppeng tahun 2020 adalah sebesar 1,89 persen, kondisi tersebut memberi gambaran bahwa sepanjang tahun 2020 keadaan harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan sebesar 1,89 persen. Kondisi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi yang terjadi pada tahun 2019. Laju inflasi terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu 1,48 persen dan tertinggi pada tahun 2017 yang mencapai 5,54 persen, selanjutnya tahun 2018 yaitu 4,69 persen. Laju inflasi atau rata-rata kenaikan harga barang dan jasa sepanjang tahun 2020 lebih rendah dari laju inflasi Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 2,04 persen. Namun lebih tinggi dari laju inflasi nasional sebesar 1,68 persen.

Grafik 3.4. Perbandingan Inflasi Nasional, Sulawesi Selatan Dan Kabupaten Soppeng Tahun 2016 - 2020



	2016	2017	2018	2019	2020
Soppeng	1,48	5,54	4,69	1,64	1,89
Sulawesi Selatan	2,94	4,44	3,50	2,35	2,04
Nasional	3,02	3,61	3,13	2,72	1,68

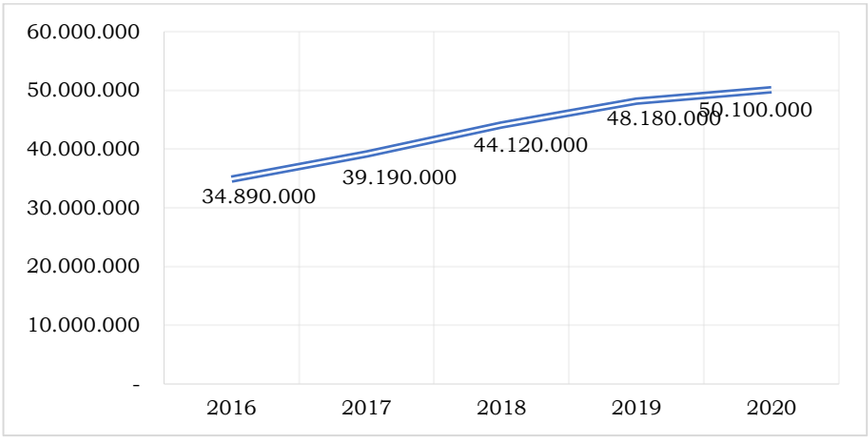
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

✓ **PDRB Perkapita**

PDRB PerKapita atau pendapatan perkapita merupakan pendapatan rata-rata untuk masing-masing penduduk dalam suatu daerah selama satu periode tertentu. Pendapatan Per Kapita juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah sebagai indicator kesejahteraan suatu daerah, standar pertumbuhan kemakmuran daerah, sebagai pedoman bagi pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi, dan pembanding tingkat kemakmuran antar daerah. PDRB per kapita atas harga berlaku berguna untuk menunjukkan nilai

PDRB per-kepala atau satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita atas harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah. PDRB perkapita Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 sebesar Rp.50,10 juta rupiah meningkat dibanding tahun 2019 yang sebesar Rp.48,18 juta rupiah.

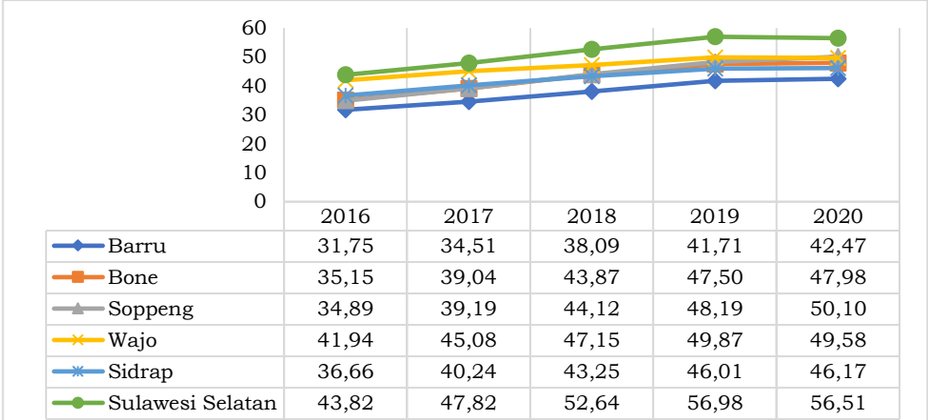
Grafik 3.5. PDRB Per Kapita Kabupaten Soppeng Menurut Lapangan Usaha, 2016-2020 (Juta Rupiah)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2021

Jika dibandingkan dengan wilayah disekitar Kabupaten Soppeng yaitu Kab. Bone, Kab. Sidrap, Kab. Barru, dan Kab. Wajo. PDRB perkapita di Kabupaten Soppeng juga cukup tinggi.

Grafik 3.6. Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten Soppeng dan Wilayah Sekitar, 2016-2020 (Juta Rupiah)



	2016	2017	2018	2019	2020
Barru	31,75	34,51	38,09	41,71	42,47
Bone	35,15	39,04	43,87	47,50	47,98
Soppeng	34,89	39,19	44,12	48,19	50,10
Wajo	41,94	45,08	47,15	49,87	49,58
Sidrap	36,66	40,24	43,25	46,01	46,17
Sulawesi Selatan	43,82	47,82	52,64	56,98	56,51

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2021

✓ **Indeks Gini/ Gini Ratio**

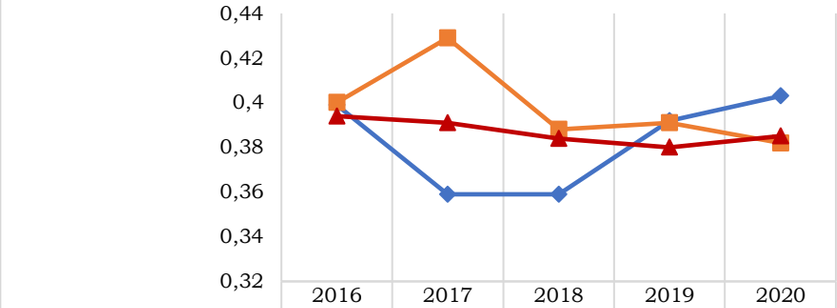
Indeks Gini merupakan alat ukur atau indikator yang menerangkan distribusi pendapatan aktual, pengeluaran pengeluaran konsumsi atau variable-variabel lain yang terkait dengan distribusi dimana setiap orang menerima bagian secara sama atau identik. Indeks Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.

Nilai koefisen Indeks Gini berada pada selang 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi nilai gini rasio, maka semakin tinggi pula ketidakmerataan pendapatan dalam suatu wilayah. Jika nilai gini rasio mendekati satu, maka terjadi ketidakmerataan dalam pembagian pendapatan. Sebaliknya apabila nilai

gini rasio kecil atau mendekati nol, makan semakin merata distribusi pendapatan aktual dan pengeluaran konsumsi. Klasifikasi nilai gini rasio:

GR < 0,3 → ketimpangan rendah
0,3 ≤ GR ≤ 0,5 → ketimpangan sedang
GR > 0,5 → ketimpangan tinggi

Grafik 3.7. Perbandingan Indeks Gini Nasional, Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020



	2016	2017	2018	2019	2020
Soppeng	0,399	0,359	0,359	0,392	0,403
Sulawesi Selatan	0,400	0,429	0,388	0,391	0,382
Nasional	0,394	0,391	0,384	0,380	0,385

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

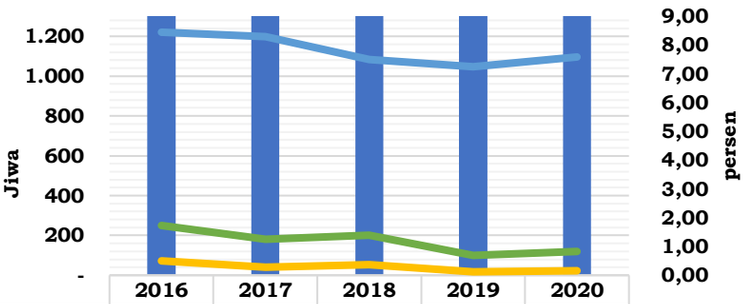
Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Soppeng yang diukur oleh gini ratio selama tahun 2016-2020 berfluktuasi, dengan capaian gini ratio terendah sebesar 0,359 pada tahun 2017 dan 2018. Pada Tahun 2020, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Soppeng yang diukur oleh gini ratio adalah sebesar 0,403, naik 0,011 poin dari tahun 2019. Jika dibandingkan dengan gini ratio di Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, gini ratio Kabupaten Soppeng pada Tahun 2020 lebih tinggi dimana gini ratio Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,382 dan Nasional sebesar 0,385. Walaupun mengalami kenaikan pada tahun 2020, tetapi Kabupaten Soppeng masih berada pada ketimpangan sedang.

✓ **Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang /rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik untuk makanan maupun non makanan. Kemiskinan dapat dilihat dari dua ukuran makro yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Data kemiskinan absolut adalah data kemiskinan yang merefleksikan suatu standar seperti kebutuhan pokok minimal. Kemiskinan absolut diukur berdasarkan indikator bersifat uang (garis kemiskinan) dengan pendekatan kebutuhan dasar.

Sumber utama lahirnya kemiskinan disebabkan masalah kesejahteraan sosial masyarakat. Sejatinya kemiskinan berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu kemiskinan merupakan masalah pokok daerah yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Berikut tabel kondisi Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020 :

Grafik 3.8. Kondisi Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020



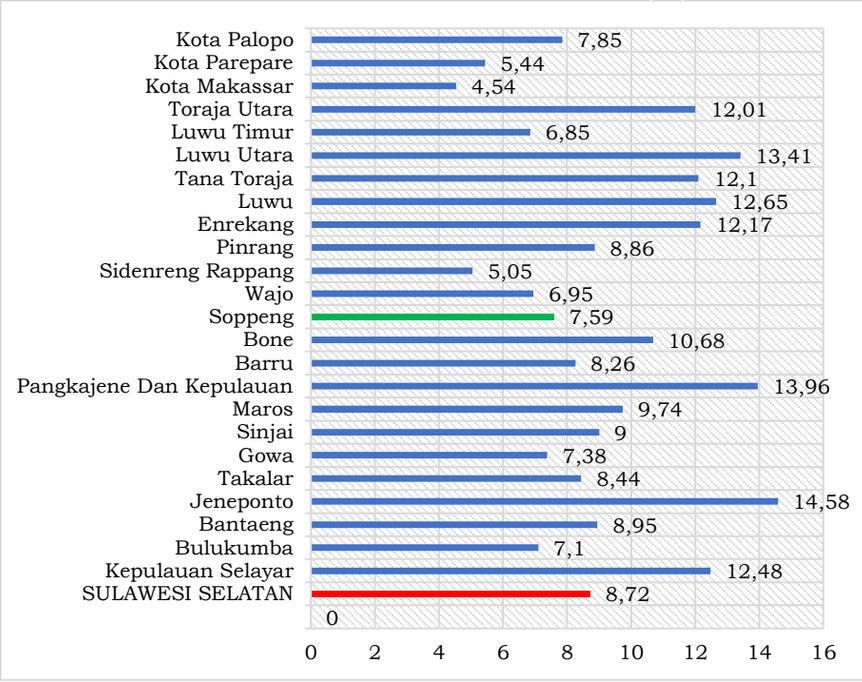
	2016	2017	2018	2019	2020
JUMLAH PENDUDUK MISKIN (JIWA)	19.120	18.760	17.000	16.450	17.230
INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2) (%)	0,50	0,28	0,37	0,12	0,16
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (%)2	8,45	8,29	7,50	7,25	7,59
INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1) (%)3	1,73	1,25	1,39	0,69	0,83

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2021

Pada kurun 2016 – 2019 penduduk miskin di Kabupaten Soppeng terus mengalami penurunan dimana pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin sebanyak 19.120 jiwa (8,45%) dan pada tahun 2019 sebanyak 16.450 jiwa (7,25%). Tetapi dampak dari pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin yaitu sebesar 17.230 jiwa (7,59%).

Selain dari aspek persentase kemiskinan, suatu daerah juga dapat dilihat dari ineks kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sementara itu Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index/P2) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi angka indeksnya, semakin parah kemiskinannya. Selama periode 2016 – 2020 indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Soppeng berfluktuatif dan cenderung menurun dimana pada tahun 2016 indeks kedalaman kemiskinan sebesar 1,73%, dan pada tahun 2020 sebesar 0,83%. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Grafik 3.9. Persentase Penduduk Miskin Kab./ Kota Provinsi Sul-Sel Tahun 2020 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2021

Selain ideks kedalaman kemiskinan yang terus menurun Indeks keparahan Kemiskinan (P2) juga berfluktuatuif dan cenderung menurun, dimana pada tahun 2016 Indeks Keparahan Kemiskinan sebesar 0,50 dan pada tahun 2020 sebesar 0,16. Hal ini berarti bahwa jurang kemiskinan (poverty gap) di Kabupaten Soppeng rendah atau ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin juga semakin rendah.

Jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin dengan daerah di Prov. Sulawesi selatan dan jumlah penduduk miskin dengan nasional maka persentase penduduk miskin di Kabupaten Soppeng masih lebih rendah.

Kompleksitas masalah kemiskinan ini tentu tidak bisa dijawab melalui program pembangunan yang bersifat parsial apalagi kontradiktif, tetapi diperlukan sebuah rumusan kebijakan yang bersifat holistik, ada keterkaitan satu sama lain meskipun tidak bisa menghindari pendekatan sektoral. Rumusan kebijakan pembangunan hendaknya disatukan oleh dua isu sentral dan mendasar yaitu penanggulangan kemiskinan (Pro Poor) dan penciptaan lapangan kerja (Pro Job).

✓ ***Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)***

Salah satu indikator utama dalam mengukur perekonomian daerah adalah penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dimana PDRB merupakan jumlah keseluruhan dari nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan berdasarkan semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam kurun waktu satu tahun.

Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Analisis ekonomi daerah harus mampu menggambarkan dengan jelas kinerja PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk perhitungannya ke sektor-sektor usaha. Analisis ekonomi daerah dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah

saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah.

Pada tahun 2020 Perekonomian Kabupaten Soppeng tetap menunjukkan laju perkembangan yang positif, meskipun ditengah kondisi bencana akibat Covid 19 yang mempengaruhi semua sektor ekonomi global, nasional dan daerah. Hal ini tercermin dari nilai produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) yang sebesar Rp.11.382.122,02 juta rupiah, dimana pada tahun 2019 sebesar Rp.10.937.388,00 juta rupiah. Hal tersebut menggambarkan aktivitas ekonomi di Kabupaten Soppeng masih tumbuh menggeliat ditengah pandemic Covid-19. Untuk selengkapnya gambaran terkait PDRB ADHB Kabupaten Soppeng tahun 2016-2020 terangkum dalam berikut:

Tabel 3.5. Produk Domestik Regional Bruto Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2016—2020

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.391.150,60	2.731.526,10	3.057.935,70	3.138.491,00	3.336.193,48
B	Pertambangan dan Penggalian	356.041,70	384.274,80	432.920,40	477.330,90	506.494,11
C	Industri Pengolahan	822.548,30	936.725,30	1.048.113,00	1.150.263,20	1.130.157,01
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6.096,40	7.449,30	8.125,20	8.682,00	9.068,90
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.553,30	4.050,10	4.461,90	4.717,80	4.975,43
F	Konstruksi	964.170,60	1.098.866,00	1.290.274,60	1.468.400,10	1.537.616,97
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	980.946,00	1.101.069,00	1.276.053,60	1.458.273,20	1.414.753,16
H	Transportasi dan Pergudangan	257.663,50	273.810,80	303.263,30	335.477,30	324.709,77
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	113.746,10	128.377,60	147.031,70	167.153,60	163.898,42
J	Informasi dan Komunikasi	218.035,40	261.882,20	299.074,30	332.939,00	369.116,18
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	276.358,40	295.267,60	324.413,00	352.304,60	384.579,91
L	Real Estate	438.088,30	483.696,50	527.386,20	568.306,40	592.730,77
M,N	Jasa Perusahaan	15.896,00	17.835,60	19.750,50	22.149,90	21.350,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	521.439,50	561.179,30	607.050,80	685.513,70	722.368,41
P	Jasa Pendidikan	344.565,70	379.408,50	418.110,50	488.576,70	562.871,42
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	128.931,50	145.963,10	167.871,50	192.962,00	218.892,78
R,S, T,U	Jasa lainnya	56.708,30	64.825,10	74.102,00	85.846,60	82.344,87
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	7.895.939,50	8.876.207,00	10.005.938,30	10.937.388,00	11.382.122,02

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng

Jika dilihat dari besaran PDRB atas dasar harga konstan yang menggambarkan produktivitas ekonomi yang dihitung berdasarkan tahun dasar konstan, PDRB ADHK Kabupaten Soppeng menggambarkan pola yang sama dengan PDRB ADHB yang mengalami kinerja positif. Nilai PDRB ADHK Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 sebesar Rp.7.146.654,36 juta rupiah, lebih tinggi dibanding tahun 2019 yang sebesar Rp.6.993.513,10 juta rupiah. Kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan kategori dengan nilai PDRB ADHK terbesar di tahun 2020 sebesar Rp. 1.995.488,51 juta rupiah.

Tabel 3.6. Produk Domestik Regional Bruto Soppeng Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2016–2020

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.613.107,00	1.757.019,70	1.896.925,70	1.946.887,40	1.995.488,51
B	Pertambangan dan Penggalian	175.714,50	189.228,40	207.354,40	228.338,70	237.152,57
C	Industri Pengolahan	564.498,30	621.778,80	657.200,80	710.969,20	691.955,40
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7.244,90	7.615,90	8.068,70	8.627,30	9.141,62
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.155,10	3.391,50	3.712,90	3.915,30	4.129,08
F	Konstruksi	672.422,90	728.663,30	793.817,00	876.612,10	916.147,34
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	789.092,60	860.583,90	943.562,00	1.047.940,10	1.005.657,51
H	Transportasi dan Pergudangan	160.047,70	172.636,30	190.016,30	209.471,00	196.819,02
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	86.675,10	95.683,30	107.252,30	120.543,40	117.067,77
J	Informasi dan Komunikasi	201.083,80	225.201,30	245.823,90	273.085,80	305.146,03
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	169.575,70	174.714,40	185.203,20	196.578,50	213.335,14
L	Real Estate	280.586,90	290.107,20	306.756,60	324.701,80	337.560,00
M,N	Jasa Perusahaan	12.291,80	13.248,40	14.568,10	16.045,40	15.183,72
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	351.948,20	369.224,50	385.072,20	423.603,10	438.879,32
P	Jasa Pendidikan	317.755,90	342.203,40	376.713,30	415.966,80	461.390,37
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	103.499,80	113.580,00	124.167,00	136.049,70	150.430,20
R,S, T,U	Jasa lainnya	38.990,60	42.575,30	48.178,00	54.177,60	51.170,75
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5.547.690,87	6.007.455,72	6.494.392,43	6.993.513,10	7.146.654,36

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng

Berdasarkan dari komponen penyusunnya, kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi lapangan usaha utama yang memberikan produktivitas tertinggi di Kabupaten Soppeng dengan kontribusi pada tahun 2020 sebesar Rp.3.336.193,48 juta rupiah. Selanjutnya kategori lapangan usaha yang memberikan kontribusi tinggi yaitu konstruksi sebesar Rp.1.537.616,97 juta rupiah dan Perdagangan Besar dan Eceran,

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp.1.414.753,16 juta rupiah. Hal ini membuktikan bahwa meskipun ditengah pandemik Covid-19, tetapi sektor utama perekonomian di Kab. Soppeng pada tahun 2020 tetap memberikan kontribusi yang cukup.

Selaras dengan karakteristik Kabupaten Soppeng sebagai Kabupaten yang mengandalkan sektor pertanian sebagai aktifitas ekonomi utama masyarakatnya. Besarnya produktivitas sektor pertanian tersebut menjadi pengungkit dalam mendorong tumbuhnya lapangan usaha penunjang lainnya yaitu kategori lapangan usaha kontruksi. Kontruksi menjadi kategori lapangan usaha yang memiliki prospek tumbuh tinggi dikarenakan semakin berkembangnya suatu wilayah maka semakin tinggi pula permintaan akan pembangunan fisik di Kabupaten Soppeng.

✓ ***Distribusi Sektoral***

Distribusi sektoral memberikan gambaran sejauh mana peranan sektor lapangan usaha memberikan andil terhadap pembentukan perekonomian Kabupaten Soppeng. Distribusi PDRB Kabupaten Soppeng pada tahun 2015-2020 didominasi oleh sektor primer, dimana pada tahun 2020 berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku kontribusi tertinggi pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 29,31 persen. Adapun sektor kedua dengan kontribusi tertinggi pada tahun 2020 yaitu konstruksi sebesar 13,51 persen.

Tabel 3.7.. Distribusi PDRB Tahunan Kabupaten Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2016-2020 (Persen)

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30,28	30,77	30,56	28,70	29,31
B	Pertambangan dan Penggalian	4,51	4,33	4,33	4,36	4,45
C	Industri Pengolahan	10,42	10,55	10,47	10,52	9,93
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04
F	Konstruksi	12,21	12,38	12,90	13,43	13,51
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,42	12,40	12,75	13,33	12,43
H	Transportasi dan Pergudangan	3,26	3,08	3,03	3,07	2,85
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,44	1,45	1,47	1,53	1,44
J	Informasi dan Komunikasi	2,76	2,95	2,99	3,04	3,24
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,50	3,33	3,24	3,22	3,38
L	Real Estate	5,55	5,45	5,27	5,20	5,21
M,N	Jasa Perusahaan	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,60	6,32	6,07	6,27	6,35
P	Jasa Pendidikan	4,36	4,27	4,18	4,47	4,95
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,63	1,64	1,68	1,76	1,92
R,S, T,U	Jasa lainnya	0,72	0,73	0,74	0,78	0,72
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten

Berdasarkan distribusi PDRB menurut lapangan usaha, perlu dicermati tentang peranan setiap sektor dan sektor apa saja yang merupakan sektor basis

(base sector) dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Soppeng terhadap Produk Domestik Regional Bruto Prov. Sulawesi Selatan (PDB).

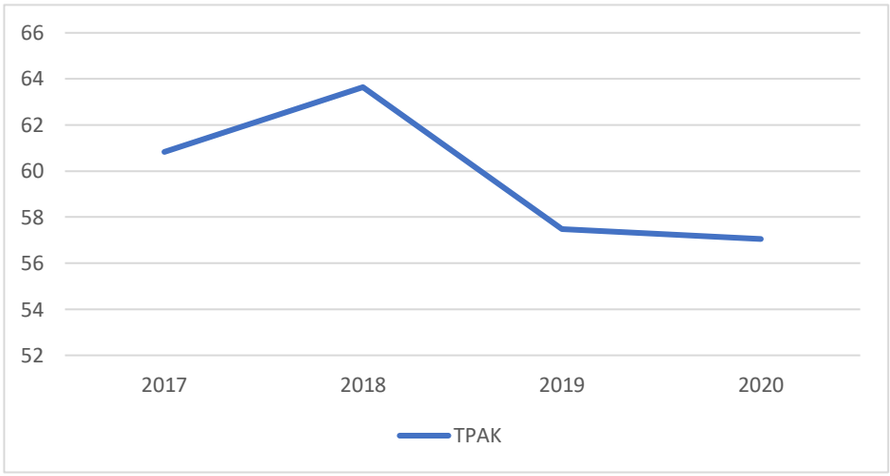
✓ **Ketenakerjaan**

Tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja. Di Indonesia disebutkan bahwa penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Selanjutnya tenaga kerja dipilah menjadi dua kelompok ialah kelompok angkatan kerja dan kelompok bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan penduduk yang menganggur dan mencari pekerjaan. Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bersekolah, penduduk yang mengurus rumah tangga dan penduduk yang menerima pendapatan. Kelompok bukan angkatan kerja ini sewaktu-waktu bisa menawarkan jasanya untuk bekerja sehingga menjadi masuk dalam kelompok angkatan kerja.

Terciptanya lapangan kerja baru akan membuka kesempatan kerja yang akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan. Hal tersebut terkait dengan semakin bertambahnya tenaga kerja yang terserap sehingga mampu mengurangi pengangguran dan memberikan pendapatan sehingga kesejahteraan yang diharapkan mampu terpenuhi.

Dari total penduduk usia kerja (15 tahun ke atas), lebih dari setengah penduduk Kabupaten Sopppeng termasuk dalam angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mengalami penurunan dari 57,47 persen pada tahun 2019 menjadi 57,05 persen pada tahun 2020. Berdasarkan BPS 2021, Pada tahun 2020, ada sebanyak 104.857 angkatan kerja usia 15 tahun ke atas dan 4.630 penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan pengangguran terbuka.

Grafik 3.10. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kab. Soppeng Tahun 2017-2020



Berdasarkan status pekerjaannya, masyarakat kabupaten Soppeng yang memiliki usaha sendiri sebesar 41,36 % atau sebanyak 41.454 orang. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar sebesar 15,39 % atau sebanyak 15.428 orang sedangkan yang Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar sebesar 2,27 % atau sebanyak 2.279 orang. Yang menjadi Buruh/Karyawan atau pegawai sebesar 24,82 % atau sebanyak 24.881 orang. Masyarakat yang bekerja sebagai pekerja bebas sebesar 3,34 % atau sebanyak 3.345 orang

sedangkan yang bekerja sebagai pekerja keluarga tak dibayar sebesar 12,81% atau sebanyak 12.840 orang.

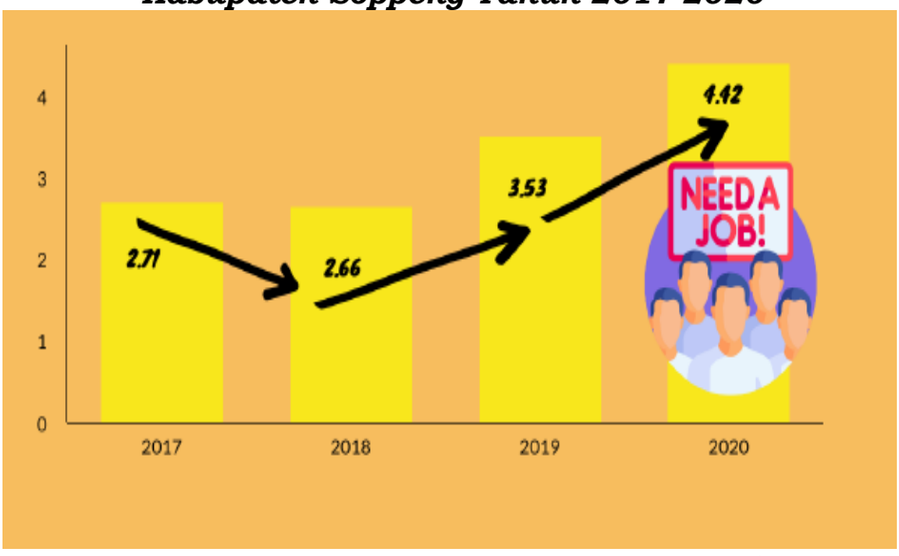
Tabel 3.8. Jumlah Pekerja berdasarkan Status Pekerjaan Tahun 2020

Status Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha sendiri	32.857	8.597	41.454
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	11.784	3.644	15.428
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	2.003	276	2.279
Buruh/Karyawan/Pegawai	12.222	12.659	24.881
Pekerja Bebas	2.624	721	3.345
Pekerja Keluarga/tak dibayar	5.754	7.086	12.840

Sumber data : BPS, 2021

Konsep status pekerjaan dan pengangguran di samping mencakup penduduk yang aktif mencari pekerjaan, mencakup pula kelompok penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/ pekerjaan baru, kelompok penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Grafik 3.11. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2020



Sumber: BPS, 2021

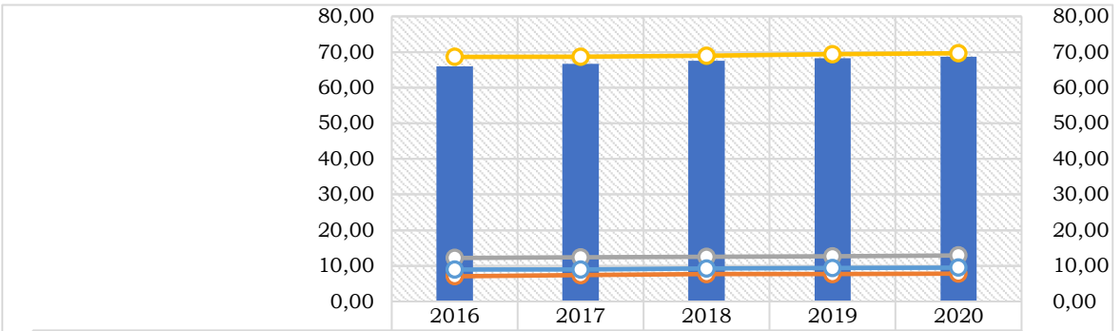
Lonjakan jumlah pengangguran di tahun 2020 disebabkan oleh adanya pandemik virus corona. Pandemi ini menyebabkan kegiatan ekonomi mengalami kemandekan sebagai akibat dari pembatasan sosial untuk menekan penyebaran virus. Beberapa Pengusaha terpaksa mengurangi jumlah pekerja dikarekan omset yang berkurang di masa pandemi.

✓ **Indeks Pembangunan Manusia**

Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Grafik 3.12. IPM dan Komponen pembentuk IPM Kabupaten Soppeng, Tahun 2016 – 2020



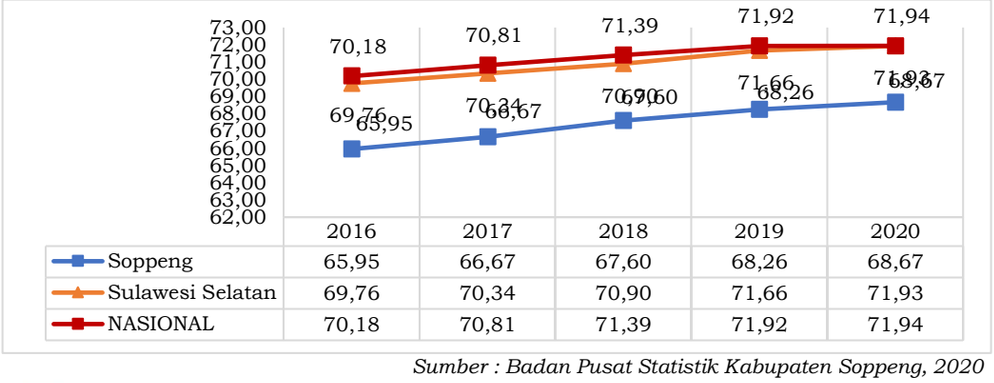
	2016	2017	2018	2019	2020
IPM	65,95	66,67	67,60	68,26	68,67
RATA-RATA LAMA SEKOLAH (TAHUN)	7,06	7,42	7,63	7,74	7,81
HARAPAN LAMA SEKOLAH (TAHUN)	12,20	12,33	12,57	12,73	12,90
UMUR HARAPAN HIDUP (TAHUN)	68,62	68,72	69,02	69,43	69,65
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (juta Rupiah/Orang/Tahun)	8,965	9,035	9,291	9,444	9,483

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2020

Selama lima tahun terakhir IPM Kabupaten Soppeng terus mengalami tren peningkatan dimana pada tahun 2020 IPM Kabupaten Soppeng sebesar 68,67 lebih tinggi dibanding tahun 2019 yang sebesar 68,26. Hal ini membuktikan bahwa slama kurun waktu lima tahun terakhir akses masyarakat Kabupaten Soppeng terhadap kesehatan, Pendidikan dan kehidupan yang layak semakin baik.

Namun, jika dibandingkan dengan IPM Nasional dan Provinsi Sulawei Selatan Nilai IPM Kab. Soppeng masih sangat rendah bahkan berada pada peringkat 19 pada tahun 2020.

Grafik 3.12. IPM Kabupaten Soppeng, Prov. Sul-Sel dan Nasional Tahun 2016 – 2020



	2016	2017	2018	2019	2020
Soppeng	65,95	66,67	67,60	68,26	68,67
Sulawesi Selatan	69,76	70,34	70,90	71,66	71,93
NASIONAL	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2020

3.1.2. Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah

Pandemi COVID-19 telah mengontraksi kinerja pembangunan ekonomi di Kab. Soppeng, dampaknya sudah terasa pada berbagai sektor usaha. Diantaranya sektor **Pertanian, Kehutanan dan Perikanan**, dimana Pertumbuhan untuk kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan cenderung melambat dikarenakan adanya perlambatan pertumbuhan untuk beberapa subkategori, yaitu subkategori tanaman perkebunan baik semusim maupun tahunan, dan juga peternakan. Produksi tanaman pangan mengalami peningkatan di tahun 2020. Peningkatan ini disumbangkan dari komoditas jagung dan ubi jalar. **Industri Pengolahan** Pertumbuhan untuk kategori industri pengolahan cenderung menurun bahkan negatif pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena hampir seluruh subkategori pada Industri Pengolahan mengalami kontraksi. Selain itu, adanya penurunan omzet terutama untuk industri makan minum yang memiliki share terbesar untuk industri pengolahan di Kabupaten Soppeng menyebabkan pertumbuhan industri pengolahan menjadi negatif. **Konstruksi** Pertumbuhan kategori konstruksi kabupaten soppeng tahun 2020 cenderung melambat. Hal ini disebabkan karena jumlah proyek konstruksi yang ada di tahun 2020 menurun signifikan hampir sebesar 50 persen. **Perdagangan Besar dan Eceran** Pandemi corona juga menyebabkan pertumbuhan sektor perdagangan baik besar maupun eceran mengalami penurunan bahkan negatif. Hal ini dikarenakan daya beli masyarakat yang menurun selama pandemi corona, terutama untuk subkategori perdagangan besar.

Kinerja pada sektor-sektor tersebut mengalami pelambatan pada tahun 2020. Namun demikian, dibalik pelambatan kinerja pada sektor-sektor tersebut terjadi peningkatan pada sektor kimia dan farmasi dalam konteks peruntukan industri kesehatan yang besar peranannya dalam upaya pemulihan COVID-19. Pelaksanaan upaya pemulihan ekonomi di Kab. Soppeng terus digalakan oleh Pemerintah Kab. Soppeng melalui beragam program pemulihan ekonomi yang memperhitungkan potensi yang dimiliki, penerapan protokol kesehatan dalam berbagai bidang usaha, serta pelayanan publik sebagai salah satu wujud dari implementasi “new normal” atau adaptasi kebiasaan baru (AKB).

Berdasarkan hal tersebut kondisi perekonomian Kab. Soppeng kedepan tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi akibat dari COVID-19 yaitu penanganan dampak pada sektor ksesehatan, sektor sosial dan sector perekonomian. Sektor yang menyerap tenaga kerja seperti industri, UMKM, dan pariwisata yang tidak dapat berusaha menghasilkan efek domino bagi kondisi ketenagakerjaan di Kab. Soppeng. Hal ini dapat terlihat dengan semakin meningkatnya angka pengangguran yang dikhawatirkan akan menambah jumlah penduduk miskin di Kab. Soppeng jika tidak ditangani dengan tepat. Tantangan yang dihadapi Kab. Soppeng pada tahun 2022 yaitu Pemulihan kondisi dari dampak pandemik Covid-19 dimana Pandemik Covid-19 merupakan masalah global, nasonal hingga daerah yang mempengaruhi perekonomian global, pergerakan manusia dan barang antar negara, selain masalah kesehatan itu sendiri. Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang terpapar, telah berupaya optimal dalam penanganan pandemic Covid-19 dari sisi pelayanan kesehatan, khususnya dalam bentuk berfungsinya laboratorium uji swab sehingga menjadi rujukan bagi daerah lain. Selain itu, dengan fasilitas

uji swab tersebut pemerintah daerah lebih mudah melakukan identifikasi dan tracing bila ada warga terpapar, selain terus menegakkan protokol kesehatan untuk memutus rantai penularan. Dalam pembangunan Kabupaten Soppeng tahun 2022, dampak Covid-19 merupakan faktor yang penting diperhatikan pengaruhnya. Selain terhadap kesehatan masyarakat melalui upaya penegakan protokol kesehatan dan vaksinasi, upaya strategis juga diperlukan untuk pemenuhan berbagai aspek kehidupan seperti stagnasi pertumbuhan UMKM, kemunduran pariwisata, stagnasi bisnis transportasi dan penginapan/perhotelan, dan sebagainya. Isu strategis terkait Covid-19 lebih kepada kepada upaya pemulihan pada berbagai aspek kehidupan yang terdampak negative oleh pandemic Covid-19. Untuk itu tahun 2022 beberapa tantangan yang akan dihadapi adalah:

- Perkembangan perekonomian global
  Kondisi perekonomian global diperkirakan relatif baik pada tahun 2022. Meskipun pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 diperkirakan masih berada pada tingkat yang relatif tinggi, yakni 4,2 persen. Hal ini sejalan dengan meningkatnya volume perdagangan global yang diperkirakan tumbuh tinggi, sebesar 6,3 persen. Kondisi ini didukung oleh berhasilnya penanganan pandemi Covid-19 dan besarnya stimulus yang diberikan oleh berbagai pemerintah negara dunia. Kembali meningkatnya kasus Covid-19 atau kendala pada proses vaksinasi berpotensi menyebabkan terhambatnya pemulihan aktivitas ekonomi global
- Perkembangan Perekonomian Nasional
  Keberhasilan pengendalian Covid-19 masih menjadi kunci utama bagi upaya pemulihan ekonomi dalam negeri. Upaya pengendalian pandemi Covid-19 telah menunjukkan perbaikan, tercermin dari penurunan kasus harian dan terus meningkatnya jumlah vaksinasi. Pemerintah perlu terus meningkatkan efektivitas pengendalian untuk menurunkan kasus penularan dan melakukan vaksinasi dengan target mencapai herd immunity pada awal tahun 2022. Hal ini menjadi tantangan strategis yang perlu dipercepat dan ditingkatkan efektivitasnya untuk menjamin berlangsungnya pemulihan ekonomi. Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 juga menjadi tantangan pencapaian sasaran ekonomi tahun 2022. Akibat pandemi Covid-19, sebagian dunia usaha telah bangkrut dan menutup permanen usahanya. Perusahaan yang bertahan mengalami tekanan dari sisi neraca keuangan. Konsumsi rumah tangga juga tertekan karena pendapatannya menurun secara signifikan, bahkan tidak sedikit yang kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan. Kelas menengah juga masih menahan konsumsi, seiring dengan tingkat keyakinan konsumen yang masih pada zona pesimis. Tanpa adanya upaya untuk mengembalikan kondisi dunia usaha dan rumah tangga kembali ke tingkat sebelum krisis, pemulihan ekonomi akan berjalan lambat.

3.1.3. Arah Kebijakan dan Target Ekonomi Makro Tahun 2022

Tahun 2022 akan menjadi tahun kunci bagi pemulihan ekonomi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah. Percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan dan

penguatan kapasitas infrastruktur wilayah diarahkan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan permintaan agregat. Upaya pemulihan juga dilakukan melalui diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar dari Covid-19 dan mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat.

Di samping pemulihan ekonomi, peningkatan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat akan terus dilakukan melalui penyelinggaraan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Memperkuat kapasitas infrastruktur daerah untuk mendukung fasilitas ekonomi wilayah dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Serta peningkatan kualiatas reformasi birokrasi secara inovatif.

1) Peningkatan Kualitas Hidup dan Produktifitas Mayarakat
   Terkendalinya pandemi Covid-19 menjadi faktor utama dalam menjalankan aktivitas dalam masyarakat. Penurunan kasus Covid-19 dan vaksinasi yang berjalan cepat akan mendorong tingkat keyakinan masyarakat dan dunia usaha untuk kembali melakukan aktivitas ekonomi secara normal. Dengan terkendalinya Covid 19 program dan kegiatan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat khususnya di sektor Pendidikan dan pemenuhan SPM dapat lebih maksimal. Selain itu bantuan pelatihan prakerja akan meningkatkan keterampilan dan menjaga tingkat produktivitas tenaga kerja yang dapat membantu mempercepat pencarian pekerjaan dan meningkatkan produktifitas masyarakat.
2) Memperkuat kapasitas infrastruktur daerah untuk mendukung fasilitas ekonomi wilayah dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan
   Memperkuat kapasitas infrastruktur daerah melalui percepatan pembangunan infrastruktur. Selain membantu meningkatkan daya beli masyarakat, pembangunan infrastruktur juga akan berkontribusi bagi peningkatan investasi. Selain itu penciptaan iklim investasi yang kondusif dapat meningkatkan investasi pada daerah baik yang berasal dari dalam maupun luar Kab. Soppeng. Sektor pariwisata juga akan tetap diperhatikan sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya di skitar Kawasan pariwisata.
3) Peningkatan kualiatas reformasi birokrasi secara inovatif
   Pelaksanaan reformasi birokrasi tetap akan dilaksanakan pada 2022. Reformasi kelembagaan dan tata kelola dilakukan, antara lain dengan mendorong reformasi birokrasi dan penyempurnaan ekosistem inovasi dan pengetahuan. Peningkatan kualitas SDM, terutama untuk menghadapi tantangan digitalisasi dan perubahan pekerjaan ke depan (future of work) khususnya di pemerintahan.

Berdasarkan hasil evaluasi dan mepertimbangkan arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi Sulawesi Selatan dan daearah maka ditetapkan indikator makro pembangunan Kab. Soppeng pada tahun 2022 sebagai berikut :

1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kualitas hidup manusia merupakan muara dari semua upaya pembangunan. Upaya untuk percepatan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing ditandai dengan terus meningkatnya IPM hingga mencapai 69,13 (2020). Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Walaupun meningkat, pembangunan SDM juga terkena imbas dari pandemi Covid-19. Rendahnya kenaikan IPM dari tahun 2019 ke tahun 2020 yaitu 0,60 poin, menunjukkan bahwa kenaikan komponen kesehatan dan pendidikan dikoreksi oleh menurunnya pengeluaran per kapita penduduk sebagai dampak dari menurunnya aktivitas ekonomi selama pandemi. Pemulihan ekonomi pada tahun 2022 akan sangat bergantung pada penanganan dan pengendalian Covid-19. Pada tahun 2022, IPM Kab. Soppeng ditargetkan mencapai 69,71, melalui:

- Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang difokuskan pada percepatan penurunan kematian ibu dan bayi, perbaikan gizi masyarakat, penguatan upaya promotif dan preventif, serta penguatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah;
- Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran termasuk pembelajaran jarak jauh dan pemanfaatan teknologi dalam pendidikan, akses di semua jenjang pendidikan khususnya perguruan tinggi, percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun, dengan perhatian khusus penanganan anak tidak sekolah dan keberpihakan pada anak dari keluarga kurang mampu; dan
- Upaya di bidang ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat.

2) Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan diperkirakan sebesar 16.276 jiwa pada tahun 2022. Untuk itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, inflasi yang stabil, Meningkatkan produktivitas perekonomian dan pendapatan masyarakat secara merata menjadi sasaran yang harus dicapai. Selain kondisi ekonomi makro yang membaik, upaya penurunan penduduk miskin dan rentan baru akibat pandemi Covid-19 di tahun 2020 terus dilakukan melalui strategi dan arah kebijakan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan. Dua strategi utama pemerintah melalui penurunan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan penduduk miskin dan rentan terus dipertajam.

3) Tingkat Pengangguran Terbuka

Keberhasilan upaya pemulihan ekonomi melalui penanganan penyebaran Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi menjadi faktor kunci pencapaian target pembangunan kedepan. Keberhasilan ini diperkirakan dapat menurunkan TPT pada kisaran 4,31 persen pada tahun 2022. Dengan kembalinya aktivitas sektor perdagangan, industry, pariwisata akan membuka kembali lapangan kerja bagi masyarakat. Penciptaan kesempatan kerja ini dapat tercapai melalui upaya penumbuhan investasi padat pekerja, penguatan konsumsi masyarakat, dan pengembangan UMKM. Upaya strategis lainnya antara lain (1) peningkatan keahlian tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, (2) penguatan sistem informasi pasar kerja yang kredibel sebagai dasar intervensi kebijakan ketenagakerjaan, dan (3) penguatan sistem perlindungan sosial bagi pekerja.

4) Pertumbuhan Ekonomi

Tahun 2022 merupakan tahap percepatan pertumbuhan ekonomi setelah mengalamipelambatan akibat Covid 19 dimana pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 6,00 persen. Kebijakan pemerintah diarahkan pada perbaikan secara fundamental dan menyeluruh untuk menyediakan fondasi

yang kokoh bagi percepatan pertumbuhan Ekonomi. Dari sisi lapangan usaha sektor pertanian menjadi motor peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sektor-sektor yang terkena dampak negatif pandemi diharapkan dapat pulih cepat sejalan dengan kembali-normalnya kondisi global dan domestik, sehingga mampu menggerakkan roda produksi bersumber dari investasi, perdagangan, dan industri pengolahan. Sektor jasa yang terkena dampak besar akibat pandemi Covid-19 akan mengalami akselerasi.

5) PDRB Per Kapita

Dengan semakin mebaiknya kondisi perekoniman pada tahun 2022 maka akan berdampak pada PDRB Perkapita dimana pada tahun 2022 PDRB Per Kapita ditargetkan Rp. 59.060.000,-

6) Gini Rasio

Pada tahun 2022, target rasio gini sebesar 0,387 . Kebijakan untuk menjaga rasio gini agar dapat memenuhi target, terus diarahkan pada kelompok masyarakat pendapatan menengah-bawah dan masyarakat pendapatan tinggi. Intervensi pada kelompok 40 persen terbawah melalui peningkatan akurasi penargetan; penyaluran bantuan secara cepat, dan responsif kebencanaan. Selanjutnya, penguatan kelembagaan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja. Pengembangan UMKM sebagai salah satu penggerak utama ekonomi kelompok menengah.

Tabel 3.9. Target Indikator Makro Kab. Soppeng Tahun 2022

No	Indikator Makro	Target		
		RKP Tahun 2022	Rankhir RKPD Provinsi Tahun 2022	RKPD Kab. Soppeng Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4 - 6,0	5,98 - 7,6	6,00
2	Tingkat Kemiskinan (%)	8,5 - 9,0	8,38 - 9,19	6,86
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,24 -5,52	6,16 - 6,95	4,31
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,44 - 73,88	72,68	69,71
5	Rasio Gini	0,376 - 0,378	0,398	0,387
6	PDRB PerKapita (Rp)		62.370.000	59.060.000

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

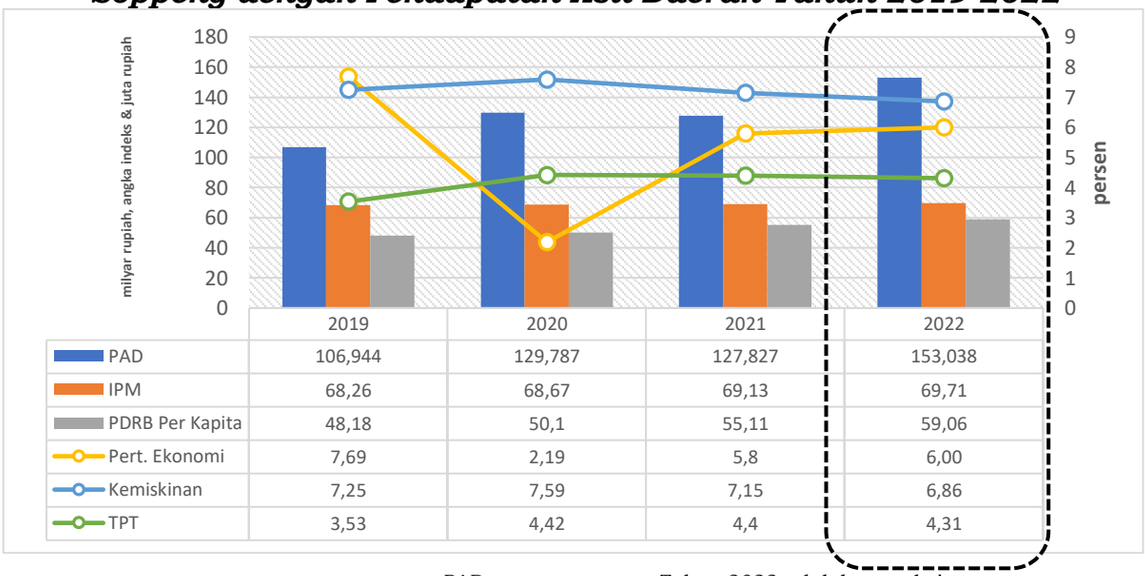
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah pada tahun 2022, diproyeksikan cukup moderat dan realistis sesuai dengan potensi pendapatan daerah yang tercipta dari tetap bertumbuhnya perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Soppeng yang secara perlahan mulai membaik setelah pandemic COVID-19. Untuk itu, pendapatan daerah yang bersumber dari PAD diproyeksikan bertumbuh lebih pesat dibandingkan dua komponen lainnya, Pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Hal ini diyakini sebagai langkah nyata guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, selain menciptakan adanya tingkat kepastian pendapatan daerah yang semakin baik pada tahun 2022.

Gambaran tingkat pertumbuhan ekonomi yang tetap meningkat meskipun sedikit melambat, PDRB per kapita yang bergerak pelan, IPM yang melambat tapi konsisten mengalami peningkatan, tingkat pengangguran yang terus menurun meskipun bergerak pelan, serta semakin berkurangnya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan meskipun tidak sepesat periode sebelumnya, merupakan kondisi yang diinginkan pada tahun 2022.

Akan semakin meningkatnya kemampuan masyarakat Kabupaten Soppeng dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara. Bukan hanya meningkatnya kemampuan dalam membayar pajak dan retribusi daerah, tetapi juga kewajiban-kewajiban perpajakan lainnya yang akan mendorong peningkatan bagi hasil pajak dan non pajak di Kabupaten Soppeng untuk tahun 2022.

Grafik 3.13. Korelasi Realisasi dan Proyeksi Indikator Makro Kab. Soppeng dengan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019-2022



	2019	2020	2021	2022
PAD	106,944	129,787	127,827	153,038
IPM	68,26	68,67	69,13	69,71
PDRB Per Kapita	48,18	50,1	55,11	59,06
Pert. Ekonomi	7,69	2,19	5,8	6,00
Kemiskinan	7,25	7,59	7,15	6,86
TPT	3,53	4,42	4,4	4,31

PAD	*Tahun 2022 adalah proyeksi*
IPM	*Tahun 2021 dan 2022 adalah proyeksi*
PDRB Per Kapita	*Tahun 2020, 2021 dan 2022 adalah proyeksi*
Pert. Ekonomi	*Tahun 2020, 2021 dan 2022 adalah proyeksi*
Kemiskinan	*Tahun 2021 dan 2022 adalah proyeksi*
TPT	*Tahun 2021 dan 2022 adalah proyeksi*

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan intensitas dan efektifitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang mengacu pada ketentuan

peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan serta kemampuan masyarakat.

Selain itu juga mempertimbangkan kebijakan pendapatan khususnya Dana Transfer, tidak memperlakukan secara defenitif, sebagai salah satu contoh Dana transfer DAU yang sifatnya Dinamis/tidak pasti.

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut, dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah (target) diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

- Penguatan kelembagaan dan SDM petugas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah terutama objek yang memiliki potensi yang belum dimaksimalkan.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan system informasi yang berbasis teknologi informasi.
- Mendorong pembentukan system pembayaran pendapatan daerah yang langsung ke bank/lembaga keuangan.
- Meningkatkan koordinasi, kerjasama antar OPD yang terkait.
- Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah.
- Pelaksanaan Uji petik pada objek pajak seperti warung, Kafe dan semacamnya
- Pelaksanaan Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan.
- Meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak;
- Penyederhanaan system dan prosedur pembayaran pajak;
- Meningkatkan informasi dan komunikasi perpajakan daerah.
- Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
- Meningkatkan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan Kementerian Keuangan cq Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan bagi hasil;
- Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran dana transfer (DAU, DAK, dan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak).

Pemerintah Daerah berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi di bidang pendapatan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki. Pendapatan daerah Kab. Soppeng bersumber dari PAD, pendapatan transfer, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Perbandingan realisasi pendapatan daerah selama kurun waktu tahun 2019-2020, target APBD Pokok Tahun 2021 serta proyeksi pendapatan tahun 2022 dan 2023 dari masing-masing jenis pendapatan daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.9. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan daerah Kab. Soppeng Tahun 2019-2023

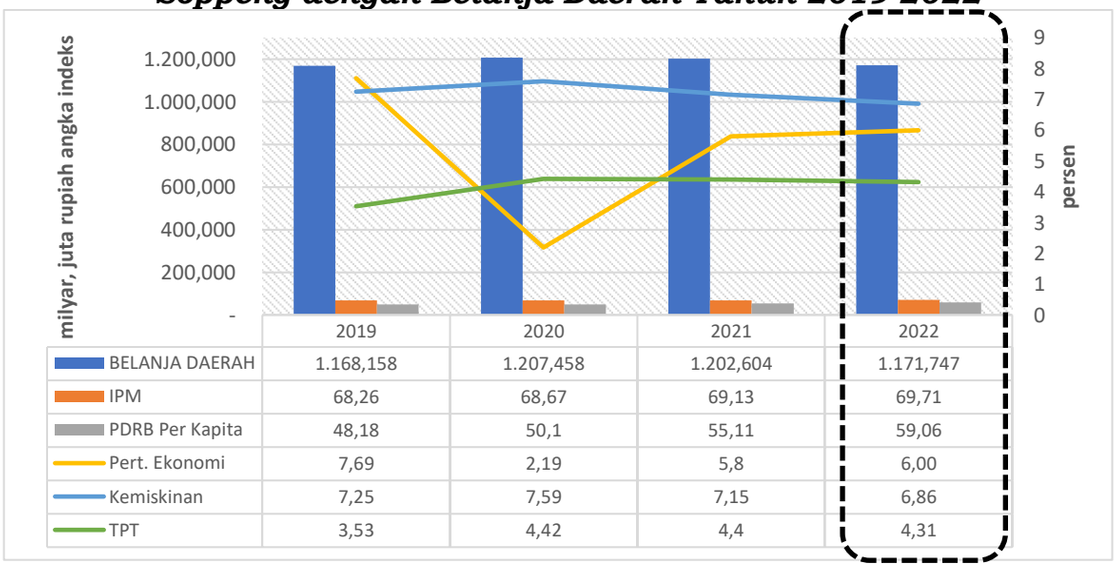
NO	URAIAN (PP 58 Tahun 2005)	REALISASI 2019 (Rp)	REALISASI 2020 (Rp)	URAIAN PP 12 Tahun 2019	TERGET 2021 (Rp)	PROYEKSI 2022 (Rp)	PROYEKSI 2023 (Rp)
1	**PENDAPATAN**	**1.215.328.628.940,57**	**1.202.470.518.866,01**	**Pendapatan**	**1.204.604.425.314,00**	**1.178.747.192.881**	**1.198.486.839.419**
1,1	**Pendapatan Asli Daerah**	**138.447.182.181,68**	**151.860.141.337,87**	**Pendapatan Asli Daerah**	**127.827.066.724,00**	**153.038.851.010**	**154.893.310.782**
1.1.1	Pajak Daerah	19.178.664.780,80	19.481.179.569,70	Pajak Daerah	19.740.000.000,00	20.900.595.200	20.470.049.890
1.1.2	Retribusi Daerah	6.646.739.915,00	6.264.366.345,50	Retribusi Daerah	5.726.236.410,00	6.933.852.731	6.407.052.228
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	16.688.437.676,00	18.396.001.683,00	Hasil Pengewlolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	18.396.001.683,00	18.396.001.683	19.704.049.383
1.1.4	Lain-Lain PAD Yang Sah	95.933.339.809,88	107.718.593.739,67	Lain-Lain PAD yang Sah	83.964.828.631,00	106.808.401.396	108.312.159.281
1,2	**Dana Perimbangan**	**899.763.975.382,00**	**854.758.766.531,00**	**Pendapatan Transfer**	**1.047.208.180.871,00**	**999.077.541.871**	**1.016.962.728.638**
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	17.538.971.950,00	19.341.877.608,00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.007.504.474.000,00	959.373.835.000	976.924.766.970
1.2.2	Dana Alokasi Umum	649.192.878.000,00	588.492.344.000,00	Pendapatan Transfer antar Daerah	39.703.706.871,00	39.703.706.871	40.037.961.668
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	233.032.125.432,00	246.924.544.923,00	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**29.569.177.719,00**	**26.630.800.000**	**26.630.800.000**
1,3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**177.117.471.376,89**	**195.851.610.997,14**	Pendapatan Hibah	4.938.377.719,00	2.000.000.000	2.000.000.000
1.3.1	Pendapatan Hibah	39.291.190.486,00	33.367.788.667,00	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	24.630.800.000,00	24.630.800.000	24.630.800.000
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	44.002.984.190,89	42.224.888.330,14				
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	73.816.614.000,00	9.877.479.000,00				
1.3.4	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	20.006.682.700,00	58.896.174.000,00				
4.3.06	Pendapatan Dana Desa dari APBN		51.485.281.000,00				



3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah pada tahun 2022, selain memperhitungkan kemampuan pendapatan daerah, juga sangat memperhatikan target-target pembangunan daerah yang telah ditetapkan, terutama target asumsi makro ekonomi dan sosial daerah yang hendak dicapai untuk lima tahun ke depan. Target tren pertumbuhan ekonomi yang melambat, peningkatan PDRB per kapita yang meningkat sedikit, peningkatan IPM yang konsisten meningkat tapi melambat, serta penurunan tingkat kemiskinan yang sedikit melambat serta tingkat pengangguran yang meningkat akibat pandemic COVID-19, tetapi kembali membaik seiring dengan perbaikan ekonomi daerah, akan menuntut kebutuhan pengeluaran dan belanja daerah yang meningkat pada tahun 2022. Target-target makro ekonomi pada tahun 2022 berimplikasi pada alokasi belanja, bukan hanya ditujukan untuk memastikan berjalannya roda pemerintahan daerah untuk pelayanan publik, tetapi juga untuk menjamin dukungan terhadap akselerasi kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat secara berkesinambungan untuk pemulihan pandemic COVID-19. Implikasinya, proyeksi alokasi kebutuhan belanja untuk dukungan pelayanan dasar, pelayanan publik serta kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah daerah Kabupaten Soppeng pada tahun 2022.

Grafik 3.13. Korelasi Realisasi dan Proyeksi Indikator Makro Kab. Soppeng dengan Belanja Daerah Tahun 2019-2022



	2019	2020	2021	2022
BELANJA DAERAH	1.168,158	1.207,458	1.202,604	1.171,747
IPM	68,26	68,67	69,13	69,71
PDRB Per Kapita	48,18	50,1	55,11	59,06
Pert. Ekonomi	7,69	2,19	5,8	6,00
Kemiskinan	7,25	7,59	7,15	6,86
TPT	3,53	4,42	4,4	4,31

PAD	*Tahun 2022 adalah proyeksi*
IPM	*Tahun 2021 dan 2022 adalah proyeksi*
PDRB Per Kapita	*Tahun 2020, 2021 dan 2022 adalah proyeksi*
Pert. Ekonomi	*Tahun 2020, 2021 dan 2022 adalah proyeksi*
Kemiskinan	*Tahun 2021 dan 2022 adalah proyeksi*
TPT	*Tahun 2021 dan 2022 adalah proyeksi*

Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (fixed cost), belanja bagi hasil, tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah walaupun pendapatan daerah Kab. Soppeng dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini berdampak pada kemampuan riil keuangan daerah yang cenderung semakin menurun. Dengan menggunakan indikator ruang fiskal (ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh daerah) dan ruang fiskal daerah Kab. Soppeng menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Kebijakan belanja

daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif.

Adapun kebijakan belanja daerah Kab. Soppeng tahun anggaran 2022, sebagai berikut:

1. Dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat. Komponen belanja langsung wajib dan mengikat meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan; belanja jasa kantor listrik, air, telepon/internet; belanja premi asuransi;.
2. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
3. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
4. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN).
5. Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).
6. Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan standar pelayanan SPM sertapemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah yang termuat dalam RPJMD.
7. Memprioritaskan pemenuhan kebutuhan belanja amanah undang-undang misalnya dana desa, Dana alokasi Desa, Dau Tambanhan Kelurahan, dan dau Tambahan P3K
8. Memprioritaskan pemenuhan kebutuhan belanja yang diarahkan misalnya Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
9. Penyediaan dana untuk kejadian luar biasa seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan kegiatan tanggap darurat.
10. Prioritas III, diperuntukkan untuk alokasi belanja urusan pemerintahan daerah lainnya yang belum tercover dalam prioritas I dan II, khususnya untuk penyelenggaraan urusan penunjang urusan.

Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Operasi

  Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kelompok Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

  1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai berupa Penganggaran alokasi belanja gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan Penganggaran dana tambahan penghasilan guru Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah disesuaikan dengan ketentuan perundangundangan.

2) Belanja barang dan Jasa
Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dan Pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

3) Belanja Bunga
Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4) Belanja Subsidi
Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan Usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lain yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit Keuangan oleh kantor akuntan public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat memberikan Hibah kepada pemerintah pusat; pemerintah daerah lain; Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Pengalokasian anggaran Hibah dan Bantuan Sosial berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari calon penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Belanja Modal

  Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya. Pengadaan asset tetap memenuhi kriteria: a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan; b. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c. Batas minimal kapitalisasi aset. Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan. Belanja modal meliputi belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; a. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap pakai; b. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; c. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; d. Belanja asset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; dan e. Belanja asset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuh idefinisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- Belanja Tidak Terduga

  Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2020 dan kemungkinan adanya kegiatankegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan daerah tahun tahun sebelumnya.

- Belanja Transfer

  Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa

Secara rinci target Perubahan Belanja Daerah tahun 2021 yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 3.10. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Soppeng,Tahun 2019-2022

NO	URAIAN (PP 58 Tahun 2005)	REALISASI 2019 (Rp)	REALISASI 2020 (Rp)	URAIAN PP 12 (Tahun 2019)	TARGET 2021 (Rp)	PROYEKSI 2022 (Rp)
2	**BELANJA DAERAH**	**1.189.972.761.946,48**	**1.251.860.939.169,68**	**Belanja Daerah**	**1.202.604.425.314,00**	**1.171.747.192.881,00**
2.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**588.035.833.576,83**	**706.933.607.928,00**	**Belanja Operasi**	**867.045.286.817,00**	**853.594.040.171**
2.1.1	Belanja Pegawai	459.399.696.543,83	511.995.592.944,00	Belanja Pegawai	589.877.029.747,00	587.249.482.312
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	-	Belanja Barang Jasa	269.452.037.518,00	259.078.337.077
2.1.3	Belanja Subsidi	1.754.400.000,00	438.600.000,00	Belanja Hibah	6.016.000.612,00	5.492.948.362
2.1.4	Belanja Hibah	4.237.614.800,00	41.390.943.200,00	Belanja Bansos	1.700.218.940,00	1.773.272.420
2.1.5	Belanja Bansos	0,00	1.315.800.000,00	**Belanja Modal**	**216.437.043.588,00**	**198.093.177.612**
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Kota/Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.549.749.931,00	2.669.471.526,00	Belanja Modal Tanah	300.000.000,00	216.075.000
2.1.7	Belanja bantuan Keuangan Kepada Kota/Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	119.650.759.052,00	112.819.470.725,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.625.332.619,00	40.746.001.834
2.1.8	Belanja tidak terduga	443.613.250,00	36.303.729.533,00	Belanja Modal gedung dan bangunan	111.339.378.355,00	102.232.693.953
				Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	49.092.932.614,00	54.782.156.825
2.2	**BELANJA LANGSUNG**	**601.936.928.369,65**	**544.927.331.241,68**	Belanja Modal Aset tetap lainnya	79.400.000,00	116.250.000
2.2.1	Belanja Pegawai	17.688.981.251,00	9.151.133.500,00	**Belanja Tidak Terduga**	**2.113.580.939,00**	**5.000.000.000**
2.2.2	Belanja Barang Jasa	321.091.392.625,00	305.285.428.376,00	Belanja Tidak Terduga	2.113.580.939,00	5.000.000.000
2.2.3	Belanja Modal	263.156.554.493,65	230.490.769.365,68	**Belanja Transfer**	**117.008.513.970,00**	**115.059.975.098**
				Belanja Bagi hasil	2.582.540.470,00	2.595.992.398
				Belanja Bantuan Keuangan	114.425.973.500,00	112.463.982.700



3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil dari belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang difisit sehingga harus ditutupi dengan surplus dari pembiayaan netto, sedangkan jika pendapatan lebih besar dari belanja daerah maka terjadi surplus sehingga harus digunakan untuk pengeluaran pembiayaan. Untuk itu pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, dan pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya.

3.2.3.1. Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan berdasarkan rapat koordinasi dengan Kementrian Keuangan, Kemntrian dalam Negeri dan PT SMI maka pemerintah Daerah Kab. Soppeng direncanakan akan mendapatkan pinjaman melalui program PEN yang akan direalisasikan pada tahun 2021 pada perubahan RKPD dan pada RKPD 2022 yang berasal dari penerimaan pinjaman daerah yang berasal dari PT. SMI.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19. Selain penanganan krisis kesehatan, Pemerintah juga menjalankan program PEN sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM. Dalam mengajukan Pinjaman PEN Daerah, Pemerintah Kab. Soppemg mengajukan beberapa tema kegiatan usulan alokasi skema PEN, antara lain:

1) Pembangunan Infrastruktur
   - Peningkatan Jalan Ruas Cirowali-Pangempange
   - Peningkatan Jalan Ruas Tikkao-Lappaloang-Waesuru
   - Peningkatan Jalan Ruas CikkeE-Lempongbakke
   - Peningkatan Jalan Kayangan-Bila TungkeE
2) Pemenuhan Standar Pelayayanan Minimal (SPM)
   - Pembangunan Infrastruktur Air Minum Kota Watansoppeng

3) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendapatan Daerah

- Rehabilitasi Pasar Sentral Watansoppeng

3.2.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk penyertaan Modal, yang diarahkan dalam pemenuhan air bersih. Dan pembayaran unga serta biaya pinjaman dari PEN.

Selengkapnya Target Perubahan Pembiayaan Daerah tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.10. Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Soppeng,Tahun 2021-2022

URAIAN	ANGGARAN 2021	PROYEKSI 2022	SELISIH 2022-2021
PEMBIAYAAN			**-**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**-**	**-**	**-**
Silpa	-	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**2.000.000.000**	**7.000.000.000**	**5.000.000.000**
PDAM	2.000.000.000	2.000.000.000	-
PEMBIAYAAN NETTO	**(2.000.000.000)**	**(7.000.000.000)**	**(5.000.000.000)**



BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

"Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan "

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perencanaan pembangunan Kab. Soppeng pada tahun 2022 menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Pendekatan tersebut diimplementasikan dengan (1) menjaga kesinambungan melalui penyesuaian arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kab. Soppeng Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, dan program prioritas nasional dalam RKP serta visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang termuat dalam RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2021-2026 (2) memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran Prioritas dan Sasaran Prioritas Pembangunan Kabupaten dengan pendekatan penganggaran berbasis program (money follows program), serta Program Prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2022; (3) kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, antara lain pendanaan kabupaten/kota (APBD kabupaten/kota), APBD Provinsi, APBN, CSR, (4) melibatkan secara aktif stakeholder di luar pemerintahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan penerapan konsep spasial di dalam penjabaran prioritas pembangunan daerah.

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2022 rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kab. Soppeng Tahun 2022 mengacu dan memperhatikan: (1) RTRW Kab. Soppeng Tahun 2012-2032; (2) arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kab. Soppeng Tahun 2005-2025; (3) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2020 dan RKPD Tahun 2021 Triwulan I; (4) Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022; (5) Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2022; dan (6) visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang telah termuat pada. Untuk visi, misi dan program prioritas Buapati terpilih telah dimuat pada Peraturan Daerah Kab. Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026. Pembangunan Kab. Soppeng tahun 2022 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran setiap misi pembangunan Kab. Soppeng periode 2021-2026. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu dengan ditetapkannya RPJMD Kab. Soppeng dengan Peraturan Daerah Kab. Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2021-2026 maka RKPD Kab. Soppeng Tahun 2022 mengacu pada peraturan tersebut.

Guna mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan, maka dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan. Hasil pengendalian dan evaluasi memberikan gambaran riil mengenai kondisi capaian pembangunan di Kab. Soppeng. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan dijadikan salah satu input bagi pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah Kab. Soppeng, selain berbagai pertimbangan lainnya seperti kebijakan pembangunan nasional tahun 2022, kebijakan pembangunan Provinsis

Sulawesi Selatan Tahun 2022, amanat penerapan standar pelayanan minimal, pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan dokumen perencanaan strategis lainnya, serta kondisi sosial dan ekonomi akibat pendemi COVID-19 di Kab. Soppeng. Upaya penerapan arah kebijakan dilakukan melalui program dan kegiatan perangkat daerah, yang diharapkan dapat memberi kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan umum, dan daya saing daerah.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2022: ***"Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural"***, pembangunan nasional diarahkan pada 10 (sepuluh) fokus pembangunan yang meliputi:

1. Industri
2. Pariwisata
3. Ketahanan Pangan
4. UMKM
5. Infrastruktur
6. Transformasi Digital
7. Pembangunan Rendah Karbon
8. Reformasi Perlindungan Sosial
9. Reformasi Pendidikan dan Keterampilan
10. Reformasi Kesehatan

Secara rinci 10 (sepuluh) fokus pembangunan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Fokus pembangunan industri dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah sektor industri, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Pertumbuhan Industri pengolahan Non Migas 5,8-6,5%
   b. Kontribusi PDB Industri Pengolahan Non Migas 17,97-17,99%
   c. Nilai realisasi PMA dan PMDN Industri Pengolahan Rp 352,5 T
2. Fokus pembangunan pariwisata dilakukan untuk pempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Jumlah Wisatawan Mancanegara 8,5-10,5 juta kunjungan
   b. Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index 36-39
3. Fokus pembangunan ketahanan pangan dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Skor Pola Pangan Harapan 92,8
   b. Nilai Tukar Petani 102-104
   c. Nilai Tukar Nelayan 102-105
   d. Ketersediaan Beras 44 juta ton
   e. Ketersediaan Protein Hewani 2,7 juta ton
   f. Nilai Tambah Tenaga Kerja Pertanian Rp. 54,3 juta/org/thn

4. Fokus pembangunan UMKM dilakukan untuk meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Pertumbuhan Wirausaha 3%
   b. Kontribusi UMKM terhadap PDB 63%
   c. UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal 20,9%
5. Fokus pembangunan infrastruktur dilakukan untuk meningkatkan pemerataan infrastruktur, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Pembangunan 4.600 unit Rumah Susun, Bantuan Perumahan Swadaya 118.650 unit, dan Penyaluran FLPP sebanyak 200.000 unit.
   b. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: 10 lokasi
   c. Panjang Jalan Tol Baru: 400 km
   d. Penambahan Debit Air Baku 5 m3/s
   e. Pembangunan Akses Air Minum Perpipaan 2.000.000 SR
   f. Pembangunan Akses Sanitasi Aman (sistem terpusat dan sistem setempat) 2.000.000 SR
   g. Rehabilitasi Jaringan Irigasi 250 ribu Ha h. Konsumsi listrik per kapita 1.268 kWh
6. Fokus transformasi digital dilakukan untuk Meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Masyarakat pengguna internet 79,20%
   b. Kecamatan yang terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik kumulatif 42,85%
   c. 72.500 SDM talenta digital
   d. 12,4 juta local champion literasi digital
   e. 27 Organisasi Tim Cepat Tanggap (CSIRT) yang Diregistrasi
   f. 100 Lulusan Pengembangan SDM di Bidang Keamanan Siber
7. Fokus pembangunan rendah karbon dilakukan untuk meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK), yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Penurunan Emisi GRK Nasional terhadap Baseline 26,87%
   b. Penurunan Intensitas Emisi GRK Nasional terhadap Baseline 21,54%
   c. Porsi Bauran EBT dalam Energi Nasional 15,7%
   d. Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT kumulatif 13,9 GW
8. Fokus reformasi perlindungan sosial dilakukan untuk mempercepat reformasi perlindungan sosial, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Tingkat Kemiskinan 8,5-9%
   b. Penduduk yang tercakup dalam Program Jaminan Sosial 87%
   c. Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Sosial 60% d. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari 40% penduduk berpendapatan terbawah 110.7 Juta Penduduk
9. Fokus reformasi pendidikan dan keterampilan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM dan Inovasi, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Pekerja pada Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi 41,55%
   b. Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMA Sederajat 70,6%
   c. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi 35,62%
   d. 400 Produk Inovasi dari Perusahaan Pemula Berbasias Teknologi (PPBT)
   e. 900 Paten Domestik

10. Fokus reformasi kesehatan dilakukan dalam rangka penanganan Covid-19 dengan meneruskan Vaksinasi Covid-19, serta untuk memperkuat Sistem Kesehatan Nasional, yang ditandai dengan pencapaian:
    a. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita 18,4%
    b. Insidensi TB 231/100.000 Penduduk
    c. Persalinan di fasilitas kesehatan 91%
    d. Imunisasi dasar lengkap anak usia 12-23 bulan 71%
    e. Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 59%
    f. RSUD kab/kota dengan 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya 80%
    g. Fasilitas Kesehatan terakreditasi: FKTP 80% & RS 90%
    h. Sistem surveilans: terpadu, real-time, berbasis lab

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai tahun 2022, antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 – 6,0 %
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6.24 - 5.52 %
3. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,44 – 73,48
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26,8 – 27,1 %
6. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 102-104
7. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 102-105
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

Kedudukan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 merupakan pelaksanaan tahun ke-3 (tiga) dari proses penyelesaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018- 2023 dalam rangka mencapai visi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Visi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode RPJMD 2018- 2023 adalah sebagai berikut:

"Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter".

Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya umum yang akan dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut.

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientas iMelayani dan Inovatif
2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel
3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif
4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter
5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber daya Alam yang Berkelanjutan

Tabel 4.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Target Kinerja Tahun 2022

Misi/Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/sasaran	Satuan	Realisasi 2020	Rencana Capaian 2021	Target 2022
Misi Mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif						
1	Tujuan 1 Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik	1. Indeks Reformasi Birokrasi	Huruf/ angka	B	BB (71-80)	BB (71-80)
	Sasaran 1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	2. Nilai SAKIP Provinsi	Huruf/ angka	B	BB (>70-80)	A (>80-90)
	Sasaran 2. Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	3. Indeks Pelayanan Publik	Huruf/ angka	B	B (3,51-4)	A (4,01-4,50)
Misi Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dna Aksesibel						
2	Tujuan 2 Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah	4. Indeks Williamsom	Angka	0,602	0,610	0,608
	Sasaran 3.Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur wilayah	5. Indeks layanan infrastruktur	Angka	77,79	81,69	83,38
Misi Mewujudkan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Inovatif						
3	Tujuan 3 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat secara merata	6. PDRB Perkapita AHB	Rp. Juta	56,51	59,32	62,43
		7. Tingkat Kemiskinan	%	8,99	8,70	8,10
	Sasaran 4. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah	8. Tingkat Pengangguran terbuka	%	6,31	6,08	5,90
	Sasaran 5. Menurunnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat	9. Rasio Gini	Angka	0,382	0,414	0,398
Misi Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter						
4	Tujuan 4 Meningkatkan Kualitas SDM yang kompetitif, Inklusif dab Berkarakter	10. IPM	Angka	71,93	72,27	72,68
	Sasaran 6. Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan	11. Indeks Pendidikan	Angka	65,29	65,87	66,39
	Sasaran 7. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	12. Indeks Kesehatan	Angka	77,80	77,76	77,90
	Sasaran 8. Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	13. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	76,32	75,21	76,36
	Sasaran 9. Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat	14. Angka kriminalitas	Kasus	24,845	24,709	24,573
Misi Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang berkelanjutan						
5	Tujuan 5 Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah	15. Pertumbuhan ekonomi	%	-0,70	4,10-5,55	4,62-5,98
	Sasaran 10. Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah	16. Produktivitas Total Daerah	Rp/Angkatan Kerja	76.913.142,88	84.745.947	86.643.579
	Tujuan 6 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup secara	17. IKLH	Poin	76,79	77,78	77,82



Misi/Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/sasaran	Satuan	Realisasi 2020	Rencana Capaian 2021	Target 2022
	berkelanjutan Lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim					
	Sasaran 11 Terpeliharanya kualitas Lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	18. Potensi Penurunan Emisi GRK Ton (Juta CO2Eq)	Juta Ton CO2Eq	0,96	1,07	1,198

Sumber: Rancangan Akhir RKPD Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2022

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2022

RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2021-2026 telah ditetapkan pada tanggal 29 Juni 2021 sehingga arah tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2022 yang termuat di RKPD tahun 2022 merupakan penjabaran dari tjuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan pad RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2021-2026,

Berdasarkan Permendagri 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2022 Pasal 8 ayat (1) mengatur bahwa Dalam hal daerah masih dalam proses penyusunan RPJMD sebagai tindak lanjut hasil Pilkada Serentak Tahun 2020, penyusunan program, kegiatan dan subkegiatan dalam RKPD Tahun 2022 mengacu pada: arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota, RPJMD Provinsi, dan program prioritas nasional dalam RKP untuk RKPD kabupaten/kota; c. evaluasi capaian kinerja RPJMD periode sebelumnya dan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya; d. evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2020 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020; dan e. visi, misi, dan program kepala daerah terpilih.

Tahun 2022 berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tentang Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pasca pemillihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020, berpedoman pada RPJPD 2005-2025, mempertimbangkan visi misi dan program kepala daerah terpilih serta memperhatikan RKP Tahun 2022, sehingga RKPD Kab. Soppeng Tahun 2022 mengacu pada RPJPD Kab. Soppeng Tahun 2005-2025 serta memperhatikan dan memuat substansi Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2021-2026, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2021-2026

Visi dan misi Kepala daerah terpilh tahun 2021 adalah

"Soppeng yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera"

Rumusan visi ini merupakan satu kesatuan dalam menggambarkan kondisi masa depan Kabupaten Soppeng yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Tiga pokok visi yang terkandung di dalamnya saling terkait sebagai gambaran tentang **kondisi pemerintahan, kondisi daerah, dan kondisi masyarakat** yang hendak diwujudkan.

Tabel 4.2. Penjelasan Visi Kepala Daerah Terpilh Kab. Soppeng

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Soppeng yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera	***Lebih Melayani***	***pemerintah daerah*** akan semakin memantapkan pelayanan publik yang selama ini telah mencapai peningkatan akses dan kualitas. Kondisi yang hendak diwujudkan adalah terpenuhinya semua standar pelayanan minimal untuk urusan wajib pelayanan dasar maupun urusan pemerintahan lainnya. Diekspektasi bahwa Kabupaten Soppeng akan termasuk lima besar Kabupaten terbaik di Sulawesi Selatan dalam hal pemenuhan SPM.
	Lebih Maju	***daerah Soppeng*** akan semakin berdaya saing dalam hal kualitas manusia. Dalam empat tahun terakhir ranking IPM Kabupaten Soppeng telah terakselerasi dari peringkat 20 menjadi peringkat 18 di Sulawesi Selatan. Dalam lima tahun kedepan diekspektasi bahwa capaian IPM Kabupaten Soppeng makin terakselerasi dan dapat menempati peringkat 17 diantara daerah Kabupaten di Sulawesi Selatan. Kemajuan dalam hal kualitas manusia akan didukung oleh infrastruktur daerah dan kondisi keamanan dan ketentraman daerah yang semakin kindusif serta fasilitas ekonomi wilayah yang semakin terpenuhi dan berkualitas. Selama ini pembangunan infrastruktur daerah dan fasilitas ekonomi wilayah telah terakselerasi sehingga dalam lima tahun kedepan capaian tersebut akan semakin dimantapkan. Kondisi yang hendak diwujudkan adalah semakin tingginya daya tarik Soppeng sebagai daerah perlintasan maupun daerah tujuan baik dari aspek sumberdaya alam maupun dari aspek sosial-budaya.
	Lebih Sejahtera	***masyarakat Soppeng*** akan semakin meningkat kesejahteraan sosial-ekonominya. Dalam lima tahun terakhir angka kemiskinan telah menurun, PDRB/kapita telah meningkat, dan pertumbuhan ekonomi cukup stabil, meskipun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi menurun karena dampak pandemic Covid-19. Dalam lima tahun kedepan, capaian dalam berbagai indikator perekonomian tersebut akan semakin dimantapkan melalui peningkatan produktivitas pertanian dalam arti umum, UMKM, industri kecil, perdagangan, dan pariwisata dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

Misi yang akan dijalankan untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan dalam sejumlah upaya umum. Substansi yang termuat dalam misi adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; memajukan daerah; meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; menyelesaikan persoalan daerah; menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah dengan provinsi dan nasional; dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. Misi juga harus mengacu pada permasalahan pokok daerah yang di rumuskan dalam bentuk pernyataan misi sebagai berikut:

(1) **Memantapkan Penyelenggaraan Pelayanan Dasar**
(2) **Memantapkan Perwujudan Kesejahteraan Masyarakat**
(3) **Memantapkan Pencapaian Daya Saing Daerah**
(4) **Memantapkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik**



(5) **Memantapkan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**

Tabel 4.3. Penjelasan Misi Kepala Daerah Terpilih

Visi	Misi	Penjelasan Misi
Soppeng yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera	***Misi-1:***Memantapkan Penyelenggaraan Pelayanan Dasar	Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan urusan wajib terkait pelayanan dasar berbasis standar perlayanan minimal (SPM) untuk mendukung kualitas manusia yang semakin unggul dan maju baik untuk jangka menengah maupun untuk jangka panjang. Pemenuhan SPM mencakup urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat, serta sosial.
	Misi-2: Memantapkan Perwujudan Kesejahteraan Masyarakat	Misi ini mencakup upaya umum untuk memantapkan kesejahteraan masyarakat dalam arti meningkatkan kualitas hidup manusia. Kualitas hidup manusia dalam konteks ini ditandai oleh penguasaan pengetahuan, harapan hidup, dan daya beli sehingga pilihan-pilihan dalam kehidupan selalu terbuka. Ini adalah hakikat dari pembangunan manusia. Misi ini juga mencakup upaya umum dalam perbaikan perekonomian rakyat berupa peningkatan produktivitas dan penyerapan tenaga kerja sektor-sektor perekonomian utama yakni pertanian dalam arti umum, usaha mikro dan kecil, industri kecil, dan perdagangan. Selain itu, tercakup upaya untuk penanggulangan kemiskinan.
	Misi-3: Memantapkan pencapaian daya saing daerah	Misi ini secara garis besar mencakup upaya umum dalam meningkatkan kapasitas infrastruktur daerah terutama infrastruktur transportasi, perhubungan, perumahan dan pemukiman, serta komunikasi dan informatika. Misi ini juga terkait dengan upaya pengembangan sarana/prasarana dan fasilitas ekonomi wilayah terutama dalam mendorong daya tarik pariwisata pada berbagai titik destinasi wisata. Selain itu salah satu kewajiban kepala daerah adalah menjaga keamanan dan ketentraman wilayah yang pada akhirnya akan menarik investasi dan meningkatkan daya saing daerah.
	Misi-4: Memantapkan tatakelola pemerintahan yang baik	Misi ini mencakup upaya umum dalam memantapkan reformasi birokrasi pada level OPD Kabupaten hingga Kecamatan dan melanjutkannya dengan perwujudan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif. Tata kelola pemerintahan yang kolaboratif diupayakan melalui penerapan akuntabilitas dan transparansi yang membuka ruang bagi kontribusi masyarakat sipil dan dunia usaha dalam pencapaian visi bersama Kabupaten Soppeng



Visi	Misi	Penjelasan Misi
	Misi-5: Memantapkan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Misi ini mencakup upaya umum dalam menjaga, memelihara dan memperbaiki daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup agar manfaatnya bisa berkelanjutan antar generasi. Misi ini juga mencakup upaya umum untuk pencapaian berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan yang relevan dengan permasalahan pembangunan dan isu strategis Kabupaten Soppeng.

Tujuan RPJMD diartikan sebagai kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan selama periode RPJMD. Menurut Permendagri 86/2017, rumusan tujuan pembangunan memiliki kriteria: 1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah dengan memperhatikan visi; 2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; 3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; 4) dapat diukur dalam jangka waktu lima tahunan; dan 5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Perumusan visi secara garis besar dengan langkah-langkah: 1) merumuskan rancangan pernyataan tujuan dari setiap misi dan melihat kesesuaian dengan program kepala daerah terpilih;2) menguji apakah rancangan pernyataan tujuan dapat memecahkan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; 3) merumuskan indikator tujuan yang memenuhi kriteria SMART-C.

Sasaran dalam RPJMD diartikan sebagai rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Kriteria sasaran adalah: 1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;2) satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; 3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan 4) memenuhi kriteria SMART-C. Sasaran dirumuskan melalui langkah-langkah: 1) merumuskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dari setiap tujuan; 2) merumuskan indikator sasaran yang terukur, sekurang-kurangnya memenuhi indikator sasaran pokok RPJPD yang relevan; dan 3) menyelaraskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dan capaian indikator yang terukur terhadap pernyataan arah kebijakan dan sasaran RPJMN untuk penyusunan rancangan awal RPJMD.

Berdasarkan pemahaman tersebut maka rumusan tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2022 yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.4. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022 yang termuat Dalam RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2021-2026

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2022
	SOPPENG YANG LEBIH MELAYANI MAJU DAN SEJAHTERA				
1	**Misi-1 Memantapkan Penyelenggaraan Pelayanan Dasar**				
		Tujuan-1.1: Memenuhi hak warga negara dalam memperoleh layanan minimal untuk hidup secara layak		IKM atas SPM pelayanan dasar dan non pelayanan dasar	86,4

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2022
			Sasaran-1.1.1: Meningkatnya mutu penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar	Nilai rata-rata tingkat capaian penerapan SPM	100
			Sasaran-1.1.2: Meningkatnya mutu pelayanan publik non pelayanan dasar	IKM pelayanan publik non pelayanan dasar	85
2	**Misi-2 Memantapkan Perwujudan Kesejahteraan Masyarakat**				
		Tujuan-2.1: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)		IPM	69,71
			Sasaran-2.1.1: Meningkatnya derajat pendidikan, literasi dan kualitas fisik masyarakat	Indeks Pendidikan	63,2
			Sasaran-2.1.2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	77,22
		Tujuan-2.2: Meningkatkan produktivitas perekonomian dan pendapatan masyarakat secara merata		Indeks Gini	0,387
				PDRB/kapita (Rp)	59.060.000
			Sasaran-2.2.1: Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	Pertumbuhan ekonomi (%)	6,00
				Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,31
			Sasaran-2.2.2: Meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan bawah	Angka kemiskinan (%)	6,86
3	**Misi-3 Memantapkan pencapaian daya saing daerah**				
		Tujuan-3.1: Memperkuat kapasitas infrastruktur serta keamanan dan ketertiban daerah dalam mendukung fasilitas ekonomi wilayah		Indeks daya saing infrastruktur daerah	71,65
			Sasaran-3.1.1: Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	63,74
			Sasaran-3.1.2: Meningkatnya fasilitas ekonomi wilayah	Nilai PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Jasa Lainnya (milyar)	301,348
			Sasaran-3.1.3: Terpeliharanya situasi aman dan damai dalam masyarakat	Angka Kriminalitas (kasus)	80
4	**Misi-4 Memantapkan tatakelola pemerintahan yang baik**				
		Tujuan-4.1: Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi secara inovatif		Indeks reformasi birokrasi (Nilai/kategori)	53/CC
			Sasaran-4.1.1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta kapasitas inovasi daerah	Nilai LPPD (Skor/status kinerja)	4,0/Tinggi
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	A
				Opini laporan keuangan	WTP
				Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	61 (B)
				Indeks Inovasi Daerah	601 (inovatif)

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2022
5	**Misi-5 Memantapkan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**				
		Tujuan-5.1: Memelihara daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup		Nilai daya dukung dan daya tampung lingkungan	Belum terlampaui
			Sasaran-5.1.1: Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana	Indeks Risiko Bencana	131,20 (Sedang)
				Potensi Penurunan Emisi GRK (Ton Co2)	36238
				Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLH)	66,2

2. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD Kab. Soppeng Tahun 2005-2025

RKPD Tahun 2022 merupakan bagian dari tahapan keempat atau pelaksanaan tahun ke 17 dalam periode RPJPD Kab. Soppeng Tahun 2005-2025. Tahapan keempat merupakan tahapan pemantapan dalam mencapai berbagai sasaran pokok RPJPD ini. Ini merupakan tahapan terakhir dari 20 tahun periode RPJPD. Pada tahapan ini, beberapa sasaran pokok yang kurang diprioritaskan arah kebijakan pembangunannya, pada tahapan ini sasaran pokok dan arah kebijakan tersebut menjadi prioritas. Pada tahapan ini, juga menjadi perhatian untuk mengejar target-target kinerja sasaran pokok yang belum tercapai berdasarkan akumulasi dampak dari prioritas arah kebijakan pembangunan periode sebelumnya.

Tabel 4.5. Arah Kebijakan RPJPD Kab. Soppeng Tahun 2005-2025

RPJPD KAB. SOPPENG TAHUN 2005-2025		
SASARAN POKOK	**INDIKATOR**	**TARGET**
Meningkatnya kualitas manusia dengan seutuhnya (S1)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,03 Poin
	Angka Rata-rata Lama Sekolah	10 Tahun
	Angka Harapan Lama Sekolah	15,25 Tahun
	Angka Harapan Hidup	70,23 Tahun
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	99,9 Persen
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,75 Persen
	Indeks Kekerasan Terhadap Anak (IKA)	Menurun Tingkat kekerasan Terhadap Anak
Berkembangnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan nyaman berlandaskan nilai-nilai spiritual (S2)	Angka Kriminalitas	3,75 Persen
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan)	97 Persen
Meningkatnya kapasitas infrastruktur dan fasilitas wilayah dalam mendukung investasi (S3)	Indeks Infrastruktur	Meningkatnya Insfrastruktur
	Porsi panjang jaringan jalan kualitas baik (km dan %)	86,7 persen
	Rasio jaringan irigasi	13,30 Persen
	Persentase rumah tangga berakses air bersih	86,2 Persen

RPJPD KAB. SOPPENG TAHUN 2005-2025		
SASARAN POKOK	**INDIKATOR**	**TARGET**
	Jumlah pengguna terminal	35.000 orang
	Rasio rumah layak huni	95,21 persen
	Persentase Desa yang terjangkau angkutan umum	100 Persen
Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah (S4)	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Sangat Tinggi
	Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)	BB
	Opini laporan keuangan	WTP
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik (S5)	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Dasar	100 Persen
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	90,00 Persen
Meningkatnya kualitas hidup golongan tidak mampu (S6)	Angka Kemiskinan	6,85 Persen
	Persentase PMKS yang terlayani	100 Persen
Berkurangnya ketertinggalan desa dan kawasan perdesaan (S7)	%Desa Tertinggal	0,2 Persen
	Meningkatnya desa kualifikasi Mandiri	Meningkatnya Desa Mandiri
Meningkatnya produktivitas dan pertumbuhan perekonomian daerah (S8)	% Pertumbuhan Ekonomi (%)	8,83
	PDRB/kapita (Rp)	62.296.000
	Gini Ratio	0,25 Persen
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,5
	% kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	33,5
	% kontribusi sektor industri terhadap PDRB	17,2
	% kontribusi sektor jasa terhadap PDRB	45
Terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam (S9)	Penegakan Hukum Lingkungan (%)	100
	Indeks Lingkungan Hidup	73,30 Persen
	Indeks Kualitas Air	1 Persen
	Indeks Kualitas Udara	92,45 Persen
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	0,45 Persen

3. Rumusan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

Berdasarkan sasaran pokok pada RPJPD, Tujuan dan Sasaran RKP Tahun 2022, tujuan dan sasaran pembangunan Prov. Sulawesi Selatan serta visi, misi dan program prioritas Bupati terpilih maka rumusan tujuan dan sasaran Pembangunan Kab. Soppeng Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut:



Tabel 4.6. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kab. Soppeng Tahun 2022

NO.	TUJUAN / SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET 2022
1	**Tujuan-1:** Memenuhi hak warga negara dalam memperoleh layanan minimal untuk hidup secara layak	IKM atas SPM pelayanan dasar dan non pelayanan dasar	86,4
	Sasaran-1.1.: Meningkatnya mutu penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar	Nilai rata-rata tingkat capaian penerapan SPM	100
	Sasaran-1.2: Meningkatnya mutu pelayanan publik non pelayanan dasar	IKM pelayanan publik non pelayanan dasar	85
2	**Tujuan-2:** Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	IPM	69,71
	Sasaran-2.1.: Meningkatnya derajat pendidikan, literasi dan kualitas fisik masyarakat	Indeks Pendidikan	63,2
	Sasaran-2.2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	77,22
3	**Tujuan-3:** Meningkatkan produktivitas perekonomian dan pendapatan masyarakat secara merata	Indeks Gini	0,387
		PDRB/kapita (Rp)	59.060.000
	Sasaran-3.1: Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	Pertumbuhan ekonomi (%)	6,00
		Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,31
	Sasaran-3.2: Meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan bawah	Angka kemiskinan (%)	6,86
4	**Tujuan-4:** Memperkuat kapasitas infrastruktur serta keamanan dan ketertiban daerah dalam mendukung fasilitas ekonomi wilayah	Indeks daya saing infrastruktur daerah	71,65
	Sasaran-4.1: Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	63,74
	Sasaran-4.2: Meningkatnya fasilitas ekonomi wilayah	Nilai PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Jasa Lainnya (milyar)	301,348
	Sasaran-4.3: Terpeliharanya situasi aman dan damai dalam masyarakat	Angka Kriminalitas (kasus)	80
5	**Tujuan-5:** Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi secara inovatif	Indeks reformasi birokrasi (Nilai/kategori)	53/CC
	Sasaran-5.1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta kapasitas inovasi daerah	Nilai LPPD (Skor/status kinerja)	4,0/Tinggi
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	A
		Opini laporan keuangan	WTP
		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	61 (B)
		Indeks Inovasi Daerah	601 (inovatif)
6	**Tujuan-6: Memelihara daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup**	Nilai daya dukung dan daya tampung lingkungan	Belum terlampaui



NO.	TUJUAN / SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET 2022
	Sasaran-6.1: Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana	Indeks Risiko Bencana	131,20 (Sedang)
		Potensi Penurunan Emisi GRK (Ton Co2)	36238
		Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLH)	66,2

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, menunjukkan tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun 2022 mengacu pada RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2021-2026 serta memperhatikan sasaran pokok yang telah ditetapkan pada RPJPD Kab. Soppeng Tahun 2005-2025. Indikator yang akan mendukung pencapaian Visi dan Misi Kab. Soppeng terdiri atas 6 tujuan, 11 sasaran dengan rumusan indikator tujuan sebanyak 7 indikator dan 18 indikator sasaran, sehingga total indikator yang digunakan untuk mengukur capaian Misi Kab. Soppeng Tahun 2022 sebanyak 25 indikator. Tujuan dan sasaran pembangunan yang mendukung sasaran yang telah ditetapkan pada RPJMD Kab. Soppengh Tahun 2021-2026 RPJPD 2005– 2025, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7. Keterkaitan antara Tujuan dan Pembangunan Tahun 2022 dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2021-2026 dan Sasaran Pokok RPJPD Kab. Soppeng Tahun 2005-2025

NO.	TUJUAN / SASARAN PEMBANGUNAN RKPD TAHUN 2022			RPJMD KAB. SOPPENG TAHUN 2021-2026			RPJPD KAB. SOPPENG TAHUN 2005-2025		
	TUJUAN / SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET 2022	TUJUAN / SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET 2022	SASARAN POKOK	INDIKATOR	TARGET 2025
1	**Tujuan-1.:** Memenuhi hak warga negara dalam memperoleh layanan minimal untuk hidup secara layak	IKM atas SPM pelayanan dasar dan non pelayanan dasar	86,4	**Tujuan-1.1:** Memenuhi hak warga negara dalam memperoleh layanan minimal untuk hidup secara layak	IKM atas SPM pelayanan dasar dan non pelayanan dasar	86,4	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik (S5)	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Dasar	100 Persen
	Sasaran-1.1: Meningkatnya mutu penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar	Nilai rata-rata tingkat capaian penerapan SPM	100	**Sasaran-1.1.1:** Meningkatnya mutu penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar	Nilai rata-rata tingkat capaian penerapan SPM	100	Meningkatnya kualitas manusia dengan seutuhnya (S1)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,03 Poin
	Sasaran-1.2: Meningkatnya mutu pelayanan publik non pelayanan dasar	IKM pelayanan publik non pelayanan dasar	85	**Sasaran-1.1.2:** Meningkatnya mutu pelayanan publik non pelayanan dasar	IKM pelayanan publik non pelayanan dasar	85	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik (S5)	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	90,00 Persen
2	**Tujuan-2:** Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	IPM	69,71	**Tujuan-2.1:** Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	IPM	69,71	Meningkatnya kualitas manusia dengan seutuhnya (S1)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,03 Poin
	Sasaran-2.1: Meningkatnya derajat pendidikan, literasi dan kualitas fisik masyarakat	Indeks Pendidikan	63,2	**Sasaran-2.1.1:** Meningkatnya derajat pendidikan, literasi dan kualitas fisik masyarakat	Indeks Pendidikan	63,2	Meningkatnya kualitas manusia dengan seutuhnya (S1)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,03 Poin
	Sasaran-2.2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	77,22	**Sasaran-2.1.2:** Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	77,22	Meningkatnya kualitas manusia dengan seutuhnya (S1)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,03 Poin
3	**Tujuan-3:** Meningkatkan produktivitas perekonomian dan pendapatan masyarakat secara merata	Indeks Gini	0,387	**Tujuan-2.2:** Meningkatkan produktivitas perekonomian dan pendapatan masyarakat secara merata	Indeks Gini	0,387	Meningkatnya produktivitas dan pertumbuhan perekonomian daerah (S8)	Gini Ratio	0,25 Persen

NO.	TUJUAN / SASARAN PEMBANGUNAN RKPD TAHUN 2022			RPJMD KAB. SOPPENG TAHUN 2021-2026			RPJPD KAB. SOPPENG TAHUN 2005-2025		
	TUJUAN / SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET 2022	TUJUAN / SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET 2022	SASARAN POKOK	INDIKATOR	TARGET 2025
		PDRB/kapita (Rp)	59.060.000		PDRB/kapita (Rp)	59.060.000	Meningkatnya produktivitas dan pertumbuhan perekonomian daerah (S8)	PDRB/kapita (Rp)	62.296.000
	Sasaran-3.1: Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	Pertumbuhan ekonomi (%)	6,92	**Sasaran-2.2.1:** Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	Pertumbuhan ekonomi (%)	6,00	Meningkatnya produktivitas dan pertumbuhan perekonomian daerah (S8)	% Pertumbuhan Ekonomi (%)	8,83
		Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,31		Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,31	Meningkatnya produktivitas dan pertumbuhan perekonomian daerah (S8)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,5
	Sasaran-3.2: Meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan bawah	Angka kemiskinan (%)	6,86	**Sasaran-2.2.2:** Meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan bawah	Angka kemiskinan (%)	6,86	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik (S5)	Angka Kriminalitas	3,75 Persen
4	**Tujuan-4:** Memperkuat kapasitas infrastruktur serta keamanan dan ketertiban daerah dalam mendukung fasilitas ekonomi wilayah	Indeks daya saing infrastruktur daerah	71,65	**Tujuan-3.1:** Memperkuat kapasitas infrastruktur serta keamanan dan ketertiban daerah dalam mendukung fasilitas ekonomi wilayah	Indeks daya saing infrastruktur daerah	71,65	Meningkatnya kapasitas infrastruktur dan fasilitas wilayah dalam mendukung investasi (S3)	Indeks Infrastruktur	Meningkatnya Insfrastruktur
	Sasaran-4.1: Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	63,74	**Sasaran-3.1.1:** Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	63,74	Meningkatnya kapasitas infrastruktur dan fasilitas wilayah dalam mendukung investasi (S3)	Indeks Infrastruktur	Meningkatnya Insfrastruktur
	Sasaran-4.2: Meningkatnya fasilitas ekonomi wilayah	Nilai PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Jasa Lainnya (milyar)	301,348	**Sasaran-3.1.2:** Meningkatnya fasilitas ekonomi wilayah	Nilai PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Jasa Lainnya (milyar)	301,348	Meningkatnya produktivitas dan pertumbuhan perekonomian daerah (S8)		
	Sasaran-4.3: Terpeliharanya situasi aman dan damai dalam masyarakat	Angka Kriminalitas (kasus)	80	**Sasaran-3.1.3:** Terpeliharanya situasi aman dan damai dalam masyarakat	Angka Kriminalitas (kasus)	80	Berkembangnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan nyaman berlandaskan nilai-nilai spiritual (S2)	Angka Kriminalitas	3,75 Persen
5	**Tujuan-5:** Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi secara inovatif	Indeks reformasi birokrasi (Nilai/kategori)	53/CC	**Tujuan-4.1:** Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi secara inovatif	Indeks reformasi birokrasi (Nilai/kategori)	53/CC	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah (S4)		
	Sasaran-5.1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta kapasitas inovasi daerah	Nilai LPPD (Skor/status kinerja)	4,0/Tinggi	**Sasaran-4.1.1:** Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta kapasitas inovasi daerah	Nilai LPPD (Skor/status kinerja)	4,0/Tinggi	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah (S4)	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Sangat Tinggi
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	A		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	A			
		Opini laporan keuangan	WTP		Opini laporan keuangan	WTP		Opini laporan keuangan	WTP



NO.	TUJUAN / SASARAN PEMBANGUNAN RKPD TAHUN 2022			RPJMD KAB. SOPPENG TAHUN 2021-2026			RPJPD KAB. SOPPENG TAHUN 2005-2025		
	TUJUAN / SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET 2022	TUJUAN / SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET 2022	SASARAN POKOK	INDIKATOR	TARGET 2025
		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	61 (B)		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	61 (B)	Berkurangnya ketertinggalan desa dan kawasan perdesaan (S7)	Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)	BB
		Indeks Inovasi Daerah	601 (inovatif)		Indeks Inovasi Daerah	601 (inovatif)			
6	**Tujuan-6: Memelihara daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup**	Nilai daya dukung dan daya tampung lingkungan	Belum terlampaui	**Tujuan-5.1: Memelihara daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup**	Nilai daya dukung dan daya tampung lingkungan	Belum terlampaui			
	Sasaran-6.1: Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana	Indeks Risiko Bencana	131,20 (Sedang)	**Sasaran-5.1.1:** Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana	Indeks Risiko Bencana	131,20 (Sedang)			
		Potensi Penurunan Emisi GRK (Ton Co2)	36238		Potensi Penurunan Emisi GRK (Ton Co2)	36238			
		Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLH)	66,2		Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLH)	66,2	Terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam (S9)	Indeks Lingkungan Hidup	73,30 Persen

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2022 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan UndangUndang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

   Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan

mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
   Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
   Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
   Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
   Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
   Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
   Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (RKP 2022) merupakan RKP tahun kedua dari pelaksanaan RPJMN 2020-2024, yang diharapkan menjadi tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Dalam rangka merespon kondisi saat ini dimana sedang terjadi bencana Global Pandemi Covid-19, Pemerintah Pusat menyampaikan Tema Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2022 yaitu ***"Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural"*** dengan fokus Meningkatkan nilai tambah sektor industri; Mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sector pariwisata; meningkatkan ketahanan pangan masyarakat; meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional; meningkatkan pemerataan infrastruktur; meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital; meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK); mempercepat reformasi perlindungan social; meningkatkan



kualitas SDM dan inovasi; dan memperkuat system kesehatan nasional serta penanganan Covid-19.

Dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 telah disepakati 7 Rancangan Prioritas Nasional yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

Prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang yang dijabarkan dari RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah. Prioritas tahun 2022 banyak dipengaruhi adanya pandemi Covid-19 yang telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi diseluruh negara dan berakibat pada resesi pada dunia. Dampak yang dirasakan Sulawesi selatan juga cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah daerah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2022. Dengan demikian perencanaan pembangunan pada tahun 2022 akan difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, peningkatan sistem kesehatan, memperkuat sistem ketahanan pangan nasional, membangun sistem perlindungan sosial secara terpadu. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah tahun 2022 yaitu ***Inovasi Pemanfaatan Potensi & Sumber Daya Alam Untuk Kebangkitan Ekonomi*** , dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pemantapan reformasi birokrasi
2. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan
3. Percepatan pemulihan ekonomi dan perlindungan social
4. Percepatan pembangunan Sumber daya manusia yang berkarakter dan berbudaya

5. Pengelolaan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup.

Dalam mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 difokuskan pada sasaran sebagai mana pada table 4.1 berikut:

Tabel 4.8 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2022

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2022
1	Pemantapan Reformasi Birokrasi	Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik	1 Indeks Reformasi Birokrasi	Huruf/ Angka	BB
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	2 Nilai SAKIP Provinsi	Huruf/ Angka	A(>80-90)
		Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	3 Indeks Pelayanan Publik	Huruf/ Angka	A-
2	Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan	Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah	4 Indeks Williamson	Angka	0,608
		Meningkatnya Aaksesibilitas infrastruktur wilayah	5 Indeks Layanan Infrastruktur	Angka	83,38
3	Percepatan pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata	6 PDRB Perkapita ADHB	Rp. Juta	62,43
			7 Tingkat Kemiskinan	%	8.38-9.19
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah	8 Tingkat Pengangguran terbuka	%	6,16- 6,95
		Menurunya kesenjangan Pendapatan antar lapisan masyarakat	9 Rasio Gini	Angka	0,398
4	Percepatan pembangunan Sumber daya manusia yang berkarakter dan berbudaya	Meningkatkan Kualitas SDM yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter	10 IPM	Angka	72,68
		Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan	11 Indeks Pendidikan	Angka	66,39
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	12 Indeks Kesehatan	Angka	77,9
		Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	13 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	76.36

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2022
		Meningkatnya aktualisas nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat	14 Angka kriminalitas	Angka	24,573
5	Pengelolaan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	15 Pertumbuhan ekonomi	%	5.98-7.6
		Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah	16 Produktifitas Total Daerah	RP / - Angkatan Kerja	86.643.579
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	17 IKLH	Poin	77,82
			18 Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO2Eq)	Juta Ton CO2Eq	1,198

Sumber: Rancangan Akhir RKPD Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2022

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2022

Bencana pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 memiliki dampak yang sangat luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat Kab. Soppeng terutama pada aspek perekonomian dan kesehatan sehingga berimplikasi cenderung negatif pada kesejahteraan masyarakat. Dampak negatif pada perekonomian masyarakat sangat dirasakan dengan terganggunya akitvitas dunia usaha terutama menurunnya aktivitas perdagangan pada sektor UMKM, penurunan produktivitas sektor industri yang mengakibatkan terjadinya gelombang PHK yang begitu besar, dan terhambatnya proyek-proyek infrasruktur yang mengakibatkan perlambatan pembentukan modal/investasi di Kab. Soppeng. Selain pada aspek perekonomian, dengan penyebarannya yang begitu massive, wabah ini tentunya berdampak buruk pada kondisi kesehatan masyarakat dan semuanya berujung pada kondisi kerentanan sosial masyarakat yang meningkat. Untuk itu, pada tahun 2022 pemerintah perlu untuk mengakselerasi pemulihan kondisi Kab. Soppeng pasca pandemi COVID-19 dengan menitikberatkan pada percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan sistem kesehatan daerah agar masyarakat dapat kembali memiliki ketahanan sosial pada diri dan keluarganya.

Berdasarkan hal tersebut dengan mengacu pada RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2021-2026, sasaran pokok RPJPD Kab. Soppeng Tahun 2005-2015 , RKP Tahun 2022 dan RKPD Prov. Sul-Sel Tahun 2022 serta visi, misi dan program prioritas Bupati Terpilih, maka tema RKPD Tahun 2022 adalah:

“Percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan kapasitas infrastruktur wilayah “

Tema tersebut memiliki makna bahwa pembangunan Kab. Soppeng Tahun 2022 diarahkan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang etrkontraksi pada tahun 2020 akibat covid-19 yang berdampak pada kualitas hidup dan produktivitas masyarakat dan kapasitas infrastruktur daerah untuk mendukung fasilitas ekonomi wilayah dengan tetap menjaga kelistarian lingkungan kualitas yang tentunya disukung oleh kualitas revormasi reformasi

birokrasi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah ini tentunya dapat dicapai melalui akselerasi pembangunan pada berbagai bidang (sosial, ekonomi, dan infrastruktur) baik dalam hal kuantitas maupun kualitas untuk mewujudkan "Soppeng yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera".

Berangkat dari Tema pembangunan, maka dirumuskan Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2022 yang diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) prioritas sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat;
2. Memperkuat kapasitas infrastruktur daerah untuk mendukung fasilitas ekonomi wilayah dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan;
3. Meningkatnya kualiatas reformasi birokrasi secara inovatif;

Gambar 4.1Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kab. Soppeng Tahun 2022



Penyusunan prioritas pembangunan ini selain mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan nasional, provinsi dan kondisi umum daerah, juga termasuk memperhatikan adanya masalah mendesak yang perlu segera diatasi serta tetap memperhatikan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki terutama sumberdaya finansial, selain itu juga memperhatikan usulan yang telah dilakukan melalui pembahasan dalam forum Musyawarah Perencanaan Daerah (musrenbang) yang melibatkan berbagai pihak (multi stakeholder) yang kemudian diselaraskan dengan program dari SKPD untuk pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 4.9. Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kab. Soppeng Tahun 2022

TEMA : PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS KERAKYATAN DAN PENGUATAN KAPASITAS INFRASTRUKTUR WILAYAH			
PRIORITAS PEMBANGUNAN	**SASARAN PEMBANGUNAN**	**INDIKATOR**	**TARGET TAHUN 2022**
Meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat;	Meningkatnya mutu penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar	Nilai rata-rata tingkat capaian penerapan SPM	100

TEMA : PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS KERAKYATAN DAN PENGUATAN KAPASITAS INFRASTRUKTUR WILAYAH			
PRIORITAS PEMBANGUNAN	**SASARAN PEMBANGUNAN**	**INDIKATOR**	**TARGET TAHUN 2022**
	Meningkatnya mutu pelayanan publik non pelayanan dasar	IKM pelayanan publik non pelayanan dasar	85
	Meningkatnya kualitas manusia seutuhnya	IPM	69,71
		Indeks Pendidikan	63,2
		Indeks Kesehatan	77,22
	Meningkatnya produktivitas perekonmian daerah	Indeks Gini	0,387
		PDRB/kapita (Rp)	59.060.000
		Pertumbuhan ekonomi (%)	6,92
		Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,31
	berkurangnya kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat	Pertumbuhan ekonomi (%)	6,00
		Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,31
	Meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan bawah	Angka kemiskinan (%)	6,86
Memperkuat kapasitas infrastruktur daerah untuk mendukung fasilitas ekonomi wilayah dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan;	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks daya saing infrastruktur daerah	71,65
		Indeks Infrastruktur Daerah	63,74
	Meningkatnya Fasilitas Ekonomi Wilayah	Nilai PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Jasa Lainnya (milyar)	301,348
	Terpeliharanya situasi aman dan damai dalam masyarakat	Angka Kriminalitas (kasus)	80
	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup	Nilai daya dukung dan daya tampung lingkungan	Belum terlampaui
		Indeks Risiko Bencana	131,20 (Sedang)
		Indeks GRK (Ton Co2)	36238
		Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLH)	66,2
Meningkatnya kualiatas reformasi birokrasi secara inovatif;	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta kapasitas inovasi daerah	Indeks reformasi birokrasi (Nilai/kategori)	53/CC
		Nilai LPPD (Skor/status kinerja)	4,0/Tinggi
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	A
		Opini laporan keuangan	WTP
		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	61 (B)
		Indeks Inovasi Daerah	601 (inovatif)



Prioritas Pembangunan Tahun 2022 di atas dimaksudkan sebagai fokus pembangunan tahun 2022 untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya dan isu strategis daerah tahun 2022 sebagai mana yang yang telah di bahas pada bab II (kedua), untuk melihat sinkronisasi permasalahan dan isu strategis terhadap prioritas pembangunan tahun 2022, sebagai mana tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.10. Keterkaitan Permasalahan Pembangunan daerah dan isu strategis dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kab. Soppeng Tahun 2022

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAAERAH	ISU STRATEGIS INTERNASIONAL	ISU STRATEGIS NASIONAL	ISU STRATEGIS PROV. SUL-SEL	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2022
Kualitas hidup manusia relatif tertinggal	Pemulihan kondisi dari dampak pandemik Covid-19	Standar Pelaynan Minimal (SPM)	Peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan	Meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat;	Meningkatnya mutu penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar	Nilai rata-rata tingkat capaian penerapan SPM	100
Belum terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) secara menyeluruh		Bonus Demografi	Keberadaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas		Meningkatnya mutu pelayanan publik non pelayanan dasar	IKM pelayanan publik non pelayanan dasar	85
Struktur dan produktivitas perekonomian daerah belum menjamin kesejahteraan yang tinggi dan merata	Revolusi Industri 4.0		Mendekatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat		Meningkatnya kualitas manusia seutuhnya	IPM	69,71
			Pemerataan Pendapatan bagi warga Sulawesi Selatan			Indeks Pendidikan	63,2
			Revitalisasi Paradigma pengelolaan Komoditi (Petik, Olah, Jual)			Indeks Kesehatan	77,22
					Meningkatnya produktivitas perekonmian daerah	Indeks Gini	0,387
						PDRB/kapita (Rp)	59.060.000
						Pertumbuhan ekonomi (%)	6,00
						Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,31
						Pertumbuhan ekonomi (%)	6,00
						Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,31
					berkurangnya kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat	Angka kemiskinan (%)	6,86



PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAAERAH	ISU STRATEGIS INTERNASIONAL	ISU STRATEGIS NASIONAL	ISU STRATEGIS PROV. SUL-SEL	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2022
Daya saing daerah yang masih tertinggal			Kualitas infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian	Memperkuat kapasitas infrastruktur daerah untuk mendukung fasilitas ekonomi wilayah dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan;	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks daya saing infrastruktur daerah	71,65
Terjadinya degradasi lingkungan dan sumberdaya alam yang mengancam keberlanjutan pembangunan	Perubahan Iklim		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam.			Indeks Infrastruktur Daerah	63,74
	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)				Meningkatnya Fasilitas Ekonomi Wilayah	Nilai PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Jasa Lainnya (milyar)	301,348
					Terpeliharanya situasi aman dan damai dalam masyarakat	Angka Kriminalitas (kasus)	80
					Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup	Nilai daya dukung dan daya tampung lingkungan	Belum terlampaui
						Indeks Risiko Bencana	131,20 (Sedang)
						Indeks GRK (Ton Co2)	36238
						Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLH)	66,2
Tatakelola pemerintahan yang baik belum terwujud sepenuhnya				Meningkatnya kualiatas reformasi birokrasi secara inovatif;	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta kapasitas inovasi daerah	Indeks reformasi birokrasi (Nilai/kategori)	53/CC
						Nilai LPPD (Skor/status kinerja)	4,0/Tinggi
						Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	A



PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAAERAH	ISU STRATEGIS INTERNASIONAL	ISU STRATEGIS NASIONAL	ISU STRATEGIS PROV. SUL-SEL	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2022
						Opini laporan keuangan	WTP
						Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	61 (B)
						Indeks Inovasi Daerah	601 (inovatif)



4.2.4. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2022

Untuk mencapai sasaran pembangunan tahun 2022 dirumuskan suatau strategi yang merupakan rangkaian tahapan berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi dirumuskan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Selain strategi juga dirumuskan arah kebijakan yang merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi dan arah kebijakan pembangunan tahun 2022 sebagaimana tabel 4.10 berikut.

Tabel 4.11. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kab. Soppeng Tahun 2022

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2022
Meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat	Meningkatnya mutu penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar	Mengembangkan sinergi pemerintah dengan masyarakat dalam memenuhi akurasi data, kecukupan sarana dan prasarana, dan cakupan penerima layanan untuk penerapan SPM pelayanan dasar	Pemenuhan sarana dan fasilitas penyelenggaraan SPM
	Meningkatnya mutu pelayanan publik non pelayanan dasar	Mendorong inovasi pelayanan publik berbasis pemanfaatan teknologi informasi dan SDM berkompetensi relevan diringi dengan dukungan regulasi	Perbaikan dan pemeliharaan sarana dan fasilitas penyelenggaraan pelayanan perzinan dan non perizinan berbasis PTSP, OPD dan mitra teknisnya
	Meningkatnya kualitas manusia seutuhnya	Memenuhi kebutuhan tenaga pendidik secara merata disertai dengan pengembangan kurikulum muatan lokal secara bersinergi dengan penguatan literasi masyarakat dan pengembangan prestasi olah raga serta kepemudaan	Pengembangan prestasi olah raga dan kepemudaan dan kesenian
		Mendorong kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam akselerasi upaya preventif, promotif, maupun kuratif diiringi dengan penyediaan sarana, prasarana dan tenaga medis berkualitas dan perbaikan pelayanan rumah sakit	Optimalisasi pelayanan rumah sakit, puskesmas dan jaringannya
	Meningkatnya produktivitas perekonmian daerah	Mengadopsi teknologi terkini dan mengembangkan jejaring pelaku utama dan pelaku usaha dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, industri, UMKM, dan ekonomi kreatif.	Pengembangan sistem budi-daya pertanian, peternakan dan perikanan terpadu
	berkurangnya kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat	Mendorong kolaborasi multipihak dalam penanggulangan kemiskinan serta perluasan cakupan layanan bagi PMKS diiringi dengan pencapaian SDGs Desa	Perlindungan sosial bagi individu miskin dan PMPKS
Memperkuat kapasitas infrastruktur daerah untuk mendukung fasilitas ekonomi wilayah dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Mengefektifkan fungsi infrastruktur transportasi dan perhubungan, perumahan dan pemukiman, irigasi, serta sumberdaya air sesuai karakteristik wilayah berbasis rencana tata ruang daerah dan partisipasi masyarakat	Kebijakan Jalan membuka sekat. (memantapkan jalan kabupaten di perdesaan) melalui: Pembangunan jalan, Pelebaran jalan menuju standar

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2022
	Meningkatnya Fasilitas Ekonomi Wilayah	Menciptakan situasi kondusif bagi dunia usaha untuk berkembangnya fasilitas ekonomi wilayah dalam mendukung daya tarik investasi dan perkembangan pariwisata.	Perbaikan iklim investasi, pengembangan potensi investasi, promosi investasi
	Terpeliharanya situasi aman dan damai dalam masyarakat	Memberdayakan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban, ketenteraman, kesatuan bangsa dan kepatuhan terhadap norma sosial secara bersinergi dengan teladan dari aparatur	Deteksi dan cegah dini gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta potensi konflik sosial
	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup	Menyadarkan dan mengkoordinasikan pemangku kepentingan untuk pengendalian pencemaran, pencegahan degradasi lahan, pemeliharaan keanekaragaman hayati, mitigasi perubahan iklim, dan perwujudan masyarakat tangguh bencana	Pengendalian pencemaran, bahan berbahaya, dan kerusakan lingkungan hidup
Meningkatnya kualiatas reformasi birokrasi secara inovatif;	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta kapasitas inovasi daerah	Mengakselerasi implementasi road-map reformasi birokrasi berbasis sistem elektronik yang mengintegrasikan data sektoral dan keuangan serta didukung dengan inovasi secara kontinyu.	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan tata kelola keuangan daerah

4.2.5. Program Prioritas Pembangunan Tahun 2022

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kab. Soppeng tahun 2022, dirumuskan program prioritas pembangunan yang merupakan pelaksanaan dari Visi, misi dan program prioritas bupati terpilih sebagai mana pada table 4.11 brikut.

Tabel 4.12. Program Prioritas Kab. Soppeng Tahun 2022

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PRORITAS	INDIKATOR KINERJA	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat	Meningkatnya mutu penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	
			Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah ibu hamil mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	DINAS KESEHATAN
			Jumlah ibu bersalin mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	
			Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	
			Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	
			Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
			Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	
			Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	
			Jumlah waga negara penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PRORITAS	INDIKATOR KINERJA	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
			Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
			Jumlah warga negara terduga Tubercolosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
			Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	DINAS PUPR
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	DINAS PUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
			Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemda yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	SATPOL PP DAN DAMKAR
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	BPBD
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	SATPOL PP DAN DAMKAR
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	BPBD
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	BPBD
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	BPBD
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	SATPOL PP DAN DAMKAR
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah warga negara Penyandang Disabilitas Terlantar yang memperoleh rehabiitasi sosial di luar panti	DINAS SOSIAL
			Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di Luar Panti	DINAS SOSIAL
			Jumlah warga negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di Luar Panti	DINAS SOSIAL



PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PRORITAS	INDIKATOR KINERJA	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di Luar Panti	DINAS SOSIAL
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	DINAS SOSIAL
	Meningkatnya mutu pelayanan publik non pelayanan dasar	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Persentase anak usia 1-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	DPMPTSPTKT
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Lalabata(%)	KECAMATAN LALABATA
			Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Donri-Donri(%)	KECAMATAN DONRI-DONRI
			Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Liliriaja(%)	KECAMATAN LILIRIAJA
			Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Marioriwawo(%)	KECAMATAN MARIORIWAWO
			Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Lilirilau(%)	KECAMATAN LILIRILAU
			Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Marioriawa(%)	KECAMATAN MARIORIAWA
			Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Ganra(%)	KECAMATAN GANRA
			Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Citta(%)	KECAMATAN CITTA
	Meningkatnya kualitas manusia seutuhnya	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase PTK Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/D-IV	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PRORITAS	INDIKATOR KINERJA	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan	DINAS KESEHATAN
			Persentase Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Sesuai Standar	DINAS KESEHATAN
			Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Sesuai Standar	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Keterpenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang sesuai standar	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa/Kelurahan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	DINAS KESEHATAN
	Meningkatnya produktivitas perekonmian daerah	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
			Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PRORITAS	INDIKATOR KINERJA	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
			Produksi daging (Kg)	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
			Produksi Telur (Kg)	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
			Produksi Hasil Ikutan Lainnya (Kg)	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana (Pertanian) yang Digunakan	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
			Persentase Prasarana (Peternakan) yang Digunakan	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Tani yang mencapai peningkatan kelas kemampuan	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pangan	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	DPMPTSPTKT
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota	DPMPTSPTKT
	berkurangnya kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan talangan pemda	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase RTLH RT Miskin yang ditingkatkan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pekerja Sosial yang Mendapatkan Layanan Pemberdayaan Sosial	DINAS SOSIAL
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin yang Mendapatkan Bantuan Sosial	DINAS SOSIAL
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Daerah Rawan Pangan (Poin)	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PRORITAS	INDIKATOR KINERJA	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Memperkuat kapasitas infrastruktur daerah untuk mendukung fasilitas ekonomi wilayah dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	DINAS PUPR
			Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	DINAS PUPR
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	DINAS PUPR
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	DINAS PERHUBUNGAN
			V/C Ratio	DINAS PERHUBUNGAN
	Meningkatnya Fasilitas Ekonomi Wilayah	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pembinaan/Pengawasan Investasi Bagi Investor dalam Rangka Meningkatkan Iklim Investasi yang Kondusif	DPMPTSPTKT
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Investor Kabupaten/Kota	DPMPTSPTKT
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Terpeliharanya situasi aman dan damai dalam masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat Terselesaikan	SATPOL PP DAN DAMKAR
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Keikutsertaan Masyarakat dan Remaja pada Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	KESBANGPOL
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Terkait Konflik Sosial	KESBANGPOL
	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Lembaga Penanggulangan Bencana yang Ditingkatkan Kapasitasnya	BPBD
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luasan Area Taman yang terkelola sesuai standar	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PRORITAS	INDIKATOR KINERJA	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Jumlah Pengaduan/Perkara LH yang Ditindak Lanjuti	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Meningkatnya kualiatas reformasi birokrasi secara inovatif;	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta kapasitas inovasi daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang Dirumuskan	SEKRETARIAT DAERAH
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD (%)	BAPPELITBANGDA
			Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)	BAPPELITBANGDA
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Keterpenuhan Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah Tepat Waktu	BPKPD
			Persentase Penyampaian SPJ Keuangan Tepat Waktu	BPKPD
			Persentase Penetapan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tepat Waktu	BPKPD
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Tertib Asset Manajemen	BPKPD
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio Efektivitas PAD	BPKPD
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi Temuan yang Selesai Ditindak Lanjuti	INSPEKTORAT DAERAH
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Penurunan Temuan Keuangan	INSPEKTORAT DAERAH
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja SKPD	SEMUA SKPD

Adapun keselarasan antara prioritas pembangunan Nasional, prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dan prioritas Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.12. Keterkaitan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi dan Prioritas Daerah Tahun 2022

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH
1	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Pemantapan reformasi birokrasi	Meningkatnya kualiatas reformasi birokrasi secara inovatif
2	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Percepatan pembangunan Sumber daya manusia yang berkarakter dan berbudaya	Meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat
3	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan		
4	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;	Percepatan pemulihan ekonomi dan perlindungan social	
5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan	Memperkuat kapasitas infrastruktur daerah untuk mendukung fasilitas ekonomi wilayah dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan
6	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan		
7	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pengelolaan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup	







BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

"Bagian ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat"

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Guna mencapai sasaran prioritas pembangunan pada Tahun 2022, ditetapkan Program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatif pendanaannya. Rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan dikelompokkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD). Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD untuk tahun berikutnya (prakiraan maju 1 (satu) tahun) dan tahun yang direncanakan, pendanaan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 juga ditempuh melalui sumber-sumber yang lain yaitu dengan melibatkan partisipasi dan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun sumber daya manusia dan teknologi.

RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2022 merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Soppeng yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan Tahun 2016 s.d 2019 dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2020. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk kemudian dibuat analisanya sebagai bahan perencanaan pembangunan untuk dapat memecahkan permasalahan di tahun-tahun sebelumnya, agar perencanaan menjadi lebih efektif dan dapat dirasakan oleh seluruh warga Kabupaten Soppeng. Perencanaan pembangunan yang telah disusun bersama ini tidak mungkin seluruhnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Soppeng. Namun demikian, melalui program/kegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan secara bertahap, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya.

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2022 Kabupaten Soppeng telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta pemutakhirannya yang dijabarkan dalam urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum.

Rincian rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Soppeng tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**370.913.517.163**				**383.964.097.000**	
1	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		100 %	**299.606.468.913**			100 %	**314.000.000.000**	
1	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu		100 % 100 % 100 %	**118.083.916**			100 % 100 % 100 %	**210.000.000**	
1	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dok	26.223.916	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2 Dok	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	312 Dok	44.490.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	312 Dok	80.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang tersusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	312 Dok	47.370.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	312 Dok	80.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**298.731.030.577**			100 %	**311.070.549.085**	
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2500 ASN	298.573.006.227	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2500 ASN	310.808.549.085	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1000 SPM	5.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1000 SPM	12.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dok	152.924.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2 Dok	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	**1**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	**9.999.550**			100 %	**100.000.000**	
1	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Dok	4.999.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3 Dok	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang terkelola	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Dok	4.999.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12 Dok	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**290.996.620**			100 %	**1.700.000.000**	
1	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Jenis	698.850	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4 Jenis	10.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Jenis	8.398.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4 Jenis	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Paket	86.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2 Paket	240.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	59445 Lembar	28.139.700	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	59445 Lembar	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	20 Jenis	45.377.670	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20 Jenis	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg terfasilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	500 Orang	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	500 Orang	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	148 Kali	118.632.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	148 Kali	1.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	**35.000.000**			100 %	**150.000.000**	
1	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Unit	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4 Unit	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	**350.710.000**			100 %	**509.450.915**	
1	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telepon Jumlah pemenuhan jasa air Jumlah pemenuhanlistrik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Kali 12 Kali 12 Kali	187.510.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12 Kali 12 Kali 12 Kali	259.450.915	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Jenis	163.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4 Jenis	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	**70.648.250**			100 %	**260.000.000**	
1	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	83 Unit	52.838.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	83 Unit	100.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata,	16 Unit	8.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	16 Unit	60.000.000	DINAS PENDIDIKAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Lalabata Rilau							DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	80 m2	9.760.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	80 m2	100.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesataraan		100 % 100 % 100 %	**95.033.208.600**			100 % 100 % 100 %	**95.033.208.600**	
1	**1**	**2**	2.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	jumlah warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		100 %	**50.113.570.800**			100 %	**50.113.570.800**	
1	1	2	2.01	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Sekolah SD/Sederajat yang mendapatkan pembangunan UKS	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	13 Sekolah	337.805.350	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	13 Sekolah	787.804.724	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.01	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah sekolah SD/sederajat yang mendapatkan rehabilitasi ruang kelas	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	53 Sekolah	15.195.748.900	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	53 Sekolah	15.195.748.976	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.01	9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Sekolah SD/sederajat yang mendapatkan rehabilitasi Ruang Guru/Kasek/TU	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	6 Sekolah	5.141.671.850	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	6 Sekolah	5.141.672.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Sekolah SD/sederajat yang mendapatkan rehabilitasi Ruang Perpustakaan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	9 Sekolah	1.299.750.650	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	9 Sekolah	1.299.750.800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Sekolah SD/Sederajat Yang Mendapatkan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	9 Sekolah	6.491.237.250	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	9 Sekolah	6.491.237.500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	1	2	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Tindak Lanjut	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dok	42.219.650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1 Dok	92.220.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Lomba	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	21000 Siswa	3.733.837.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	21000 Siswa	3.733.837.150	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Presentase sekolah SD yang mendapatkan Dana BOS	Kab. Soppeng,	100 %	17.871.300.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Kab. Soppeng	100 %	17.871.300.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	**1**	**2**	2.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	jumlah warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama		100 %	**37.816.399.000**			100 %	**36.900.496.000**	
1	1	2	2.02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah Yang Direhabilitasi		2 Sekolah	420.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2 Sekolah	420.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Sekolah SMP/Sederajat Yang Mendapatkan Rehabilitasi Ruang Kelas	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Sekolah	13.450.305.900	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12 Sekolah	13.450.306.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Sekolah SMP/Sederajat Yang Mendapatkan Rehabilitasi Ruang Guru	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Sekolah	2.600.189.700	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2 Sekolah	2.600.190.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Sekolah SMP/Sederajat Yang Mendapatkan Rehabilitasi Ruang Perpustakaan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Sekolah	1.062.050.000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Sekolah	1.062.050.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Sekolah SMP/Sederajat Yang Mendapatkan Rehabilitasi Ruang Guru	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Sekolah	3.138.290.700	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Sekolah	3.138.290.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sekolah SMP/Sederajat Yang Mendapatkan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Soppeng, Lalabata,	1 Sekolah	1.795.739.700	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Sekolah	1.795.740.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Lalabata Rilau							
1	1	2	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	\Jumlah Siswa Miskin Jenjang SMP/Sederajat Yang Diberikan Biaya Personil	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1500 Orang	5.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1500 Orang	5.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Sekolah SMP/Sederajat Yang Mendapatkan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	11 Sekolah	2.103.620.000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11 Sekolah	2.103.620.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Lomba	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	10000 Siswa	1.415.903.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10000 Siswa	1.415.903.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah SMP/sederajat yang dibina MBS	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Sekolah	70.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5 Sekolah	570.800.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Presentase sekolah SMP yang mendapatkan Dana BOS	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	100 %	6.759.500.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Kab. Soppeng	100 %	6.759.500.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	**1**	**2**	2.03		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 %	**5.459.038.500**			100 %	**4.481.629.850**	
1	1	2	2.03	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Sekolah PAUD yang mendapatkan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Sekolah	138.938.500	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4 Sekolah	138.938.500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.03	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sekolah PAUD yang mendapatkan Pembangunan Sarana,, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	8 Sekolah	794.724.650	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8 Sekolah	794.750.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.03	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Sekolah PAUD/sederajat yang mendapatkan rehabilitasi Ruang Kelas/Ruang Guru	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	10 Sekolah	1.792.975.350	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10 Sekolah	1.654.011.500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	1	2	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah Dokumen Tindak Lanjut	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	37.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	1.893.929.850	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Lembaga PAUD Negeri Yang Diselenggarakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	15 Lembaga	2.694.600.000	DAK Non Fisik-BOP PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15 Lembaga	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	**1**	**2**	2.04		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		100 %	**1.644.200.300**			100 %	**1.644.200.000**	
1	1	2	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Persentase Lembaga Nonformal/Kesetaraan Yang Mendapatkan Dana BOP	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 %	1.644.200.300	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 %	1.644.200.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	**1**	**3**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Jumlah Kurikulum Mulok yang Dikembangkan		1 Kurikulum	**32.750.000**			1 Kurikulum	**55.000.000**	
1	**1**	**3**	2.01		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	Jumlah kurikulum mulok yang dikembangkan		1	**32.750.000**			1	**55.000.000**	
1	1	3	2.01	1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Kali	32.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Kali	55.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	**1**	**4**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Persentase PTK Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/D-IV		100 %	**871.889.650**			100 %	**900.000.000**	
1	**1**	**4**	2.01		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Persentase PTK Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/D-IV		40 Orang	**871.889.650**			40 Orang	**900.000.000**	
1	1	4	2.01	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD,	Jumlah PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF yang dilakukan penataan	Kab. Soppeng, Lalabata,	40 Orang	871.889.650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DInas Pendidikan dan Kebudayaan	40 Orang	900.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Lalabata Rilau							
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2	**#**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**336.620.000**				**570.000.000**	
2	**#**	**3**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	Persentase Pengembangan Kesenian Daerah		94,12 %	**17.220.000**			94,12 %	**30.000.000**	
2	**#**	**3**	2.01		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pengembangan Kesenian Daerah		14	**17.220.000**			14	**30.000.000**	
2	22	3	2.01	3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Sanggar Seni yang tingkatkan kapasitasnya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	16 Sanggar Seni	17.220.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	16 Sanggar Seni	30.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	**#**	**5**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan		25 %	**285.900.000**			25 %	**500.000.000**	
2	**#**	**5**	2.02		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	Persentase cagar budaya yang dilestarikan		1 paket	**285.900.000**			1 paket	**500.000.000**	
2	22	5	2.02	2	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Paket	285.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DInas Pendidikan dan Kebudayaan	2 Paket	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	**#**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	Persentase Museum yang Dikelola Secara Terpadu		100 %	**33.500.000**			100 %	**40.000.000**	
2	**#**	**6**	2.01		**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	Persentase museum yang dikelolah secara terpadu		0	**33.500.000**			0	**40.000.000**	
2	22	6	2.01	4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum Yang Disediakan/Dipelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	1 paket	33.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 paket	40.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**76.351.400**				**76.351.400**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 %	**76.351.400**			100 %	**76.351.400**	
1	**1**	**2**	2.03		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 %	**76.351.400**			100 %	**76.351.400**	
1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Presentase Lembaga PAUD yang Mendapatkan Dana BOP	Kab. Soppeng,	100 %	76.351.400	DAK Non Fisik-BOP PAUD	TK Negeri Mario Takalala	100 %	76.351.400	DINAS PENDIDIKAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Marioriwawo , Tettikenraraे							DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**45.897.400**				**45.897.400**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 %	**45.897.400**			100 %	**45.897.400**	
1	**1**	**2**	2.03		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 %	**45.897.400**			100 %	**45.897.400**	
1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Presentase Lembaga PAUD yang Mendapatkan Dana BOP	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 %	45.897.400	DAK Non Fisik-BOP PAUD	TK Negeri Pembina Soppeng	100 %	45.897.400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**36.897.400**				**36.897.400**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 %	**36.897.400**			100 %	**36.897.400**	
1	**1**	**2**	2.03		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 %	**36.897.400**			100 %	**36.897.400**	
1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Presentase Lembaga PAUD yang Mendapatkan Dana BOP	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	100 %	36.897.400	DAK Non Fisik-BOP PAUD	TK Negeri Watanlipu Tajuncu	100 %	36.897.400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**31.497.400**				**31.497.400**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 %	**31.497.400**			100 %	**31.497.400**	
1	**1**	**2**	2.03		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 %	**31.497.400**			100 %	**31.497.400**	
1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Presentase Lembaga PAUD yang Mendapatkan Dana BOP	Kab. Soppeng, Marioriwawo , Marioriaja	100 %	31.497.400	DAK Non Fisik-BOP PAUD	TK Negeri Sipurennu Barata	100 %	31.497.400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**32.697.400**				**32.697.400**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 %	**32.697.400**			100 %	**32.697.400**	
1	**1**	**2**	2.03		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 %	**32.697.400**			100 %	**32.697.400**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Presentase Lembaga PAUD yang Mendapatkan Dana BOP	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	100 %	32.697.400	DAK Non Fisik-BOP PAUD	TK Negeri Isompa Cabenge	100 %	32.697.400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**26.097.400**				**26.097.400**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 %	**26.097.400**			100 %	**26.097.400**	
1	**1**	**2**	2.03		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 %	**26.097.400**			100 %	**26.097.400**	
1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Presentase Lembaga PAUD yang Mendapatkan Dana BOP	Kab. Soppeng, Liliraja, Rompegading	100 %	26.097.400	DAK Non Fisik-BOP PAUD	TK Negeri Nilla Gading Pattojo	100 %	26.097.400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**60.897.400**				**60.897.400**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 %	**60.897.400**			100 %	**60.897.400**	
1	**1**	**2**	2.03		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 %	**60.897.400**			100 %	**60.897.400**	
1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Presentase Lembaga PAUD yang Mendapatkan Dana BOP	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	100 %	60.897.400	DAK Non Fisik-BOP PAUD	TK Negeri Lamung Patue Watansoppeng	100 %	60.897.400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**28.497.400**				**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 %	**28.497.400**			100 %	**0**	
1	**1**	**2**	2.03		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 %	**28.497.400**			100 %	**0**	
1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Presentase Lembaga PAUD yang Mendapatkan Dana BOP	Kab. Soppeng, Citta, Citta	100 %	28.497.400	DAK Non Fisik-BOP PAUD	TK Negeri Ciddai Citta	100 %	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**22.497.400**				**22.497.400**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 %	**22.497.400**			100 %	**22.497.400**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	**1**	**2**	2.03		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 %	**22.497.400**			100 %	**22.497.400**	
1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Presentase Lembaga PAUD yang Mendapatkan Dana BOP	Kab. Soppeng, Lalabata, Umpungenga	100 %	22.497.400	DAK Non Fisik-BOP PAUD	TK Negeri La Timummung Jolle	100 %	22.497.400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**30.897.400**				**30.897.400**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 %	**30.897.400**			100 %	**30.897.400**	
1	**1**	**2**	2.03		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 %	**30.897.400**			100 %	**30.897.400**	
1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Presentase Lembaga PAUD yang Mendapatkan Dana BOP	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	100 %	30.897.400	DAK Non Fisik-BOP PAUD	TK Negeri Paola Cangadi	100 %	30.897.400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**38.097.400**				**38.097.400**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 %	**38.097.400**			100 %	**38.097.400**	
1	**1**	**2**	2.03		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 %	**38.097.400**			100 %	**38.097.400**	
1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Presentase Lembaga PAUD yang Mendapatkan Dana BOP	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	100 %	38.097.400	DAK Non Fisik-BOP PAUD	TK Negeri Pembina Cangadi	100 %	38.097.400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**41.697.400**				**41.697.400**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 %	**41.697.400**			100 %	**41.697.400**	
1	**1**	**2**	2.03		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 %	**41.697.400**			100 %	**41.697.400**	
1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Presentase Lembaga PAUD yang Mendapatkan Dana BOP	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 %	41.697.400	DAK Non Fisik-BOP PAUD	TK Negeri Samaturue Salotungo	100 %	41.697.400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**38.697.400**				**38.697.400**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 %	**38.697.400**			100 %	**38.697.400**	
1	**1**	**2**	2.03		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 %	**38.697.400**			100 %	**38.697.400**	
1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Presentase Lembaga PAUD yang Mendapatkan Dana BOP	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	100 %	38.697.400	DAK Non Fisik-BOP PAUD	TK Negeri We Temmauleng Marioriawa	100 %	38.697.400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**31.085.000**				**31.085.000**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 %	**31.085.000**			100 %	**31.085.000**	
1	**1**	**2**	2.03		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 %	**31.085.000**			100 %	**31.085.000**	
1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Presentase Lembaga PAUD yang Mendapatkan Dana BOP	Kab. Soppeng, Lilirilau, Tetewatu	100 %	31.085.000	DAK Non Fisik-BOP PAUD	TK Negeri Irennuang Tetewatu	100 %	31.085.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**39.297.400**				**39.297.400**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 %	**39.297.400**			100 %	**39.297.400**	
1	**1**	**2**	2.03		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 %	**39.297.400**			100 %	**39.297.400**	
1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Presentase Lembaga PAUD yang Mendapatkan Dana BOP	Kab. Soppeng, Marioriawawo, Labessi	100 %	39.297.400	DAK Non Fisik-BOP PAUD	TK Negeri Mamminasae Labessi	100 %	39.297.400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**532.496.950**				**511.799.700**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 %	**532.496.950**			100 %	**511.799.700**	
1	**1**	**2**	2.03		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 %	**20.697.250**			100 %	**0**	
1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Lembaga PAUD Negeri Yang Diselenggarakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	1 Lembaga	20.697.250	DAK Non Fisik-BOP PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Lembaga	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	**1**	**2**	2.04		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau		100 %	**511.799.700**			100 %	**511.799.700**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
						menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan								
1	1	2	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Persentase Lembaga Nonformal/Kesetaraan Yang Mendapatkan Dana BOP	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau; Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	100 %	511.799.700	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 %	511.799.700	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**115.711.467.387**				**128.828.413.742**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kesehatan		100 %	**65.253.745.952**			100 %	**67.289.353.125**	
1	**2**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu		100% 100% 100%	**70.300.000**			100% 100% 100%	**70.300.000**	
1	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	24.300.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Data Perencanaan dan Evaluasi	1 Dokumen	24.300.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	7.850.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Data Perencanaan dan Evaluasi	1 Dokumen	7.850.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	7.850.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Data Perencanaan dan Evaluasi	1 Dokumen	7.850.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	30.300.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Data Perencanaan dan Evaluasi	1 Dokumen	30.300.000	DINAS KESEHATAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	**2**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**63.306.198.021**			100 %	**66.051.133.946**	
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	917 Orang	63.264.998.021	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Dinas Kesehatan dan data Realisasi Keuangan	917 Orang	66.009.933.946	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	41.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Dinas Kesehatan dan data Realisasi Keuangan	1 Dokumen	41.200.000	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah		100 %	**34.300.000**			100 %	**34.300.000**	
1	2	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	21 Dokumen	34.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Barang Milik Daerah Dinas Kesehatan	21 Dokumen	34.300.000	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	**37.482.000**			100 %	**37.482.000**	
						Persentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian		100 Persen				100 Persen		
1	2	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang terkelola	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Unit	17.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan	2 Unit	17.500.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Orang	19.982.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan	2 Orang	19.982.000	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**419.918.900**			100 %	**411.139.100**	
1	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Jenis	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan	3 Jenis	6.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Lalabata,	3 Paket	63.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan	3 Paket	63.000.000	DINAS KESEHATAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Lalabata Rilau							
1	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	70000 Lembar	50.588.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan	70000 Lembar	51.180.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Jenis	89.950.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan	5 Jenis	80.579.100	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg terfasilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Kali	9.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan	12 Kali	9.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	300 Kali	201.380.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan	300 Kali	201.380.000	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	**93.600.000**			100 %	**0**	
1	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Barang Milik Daerah		0	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	9 Unit	93.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Barang Milik Daerah	9 Unit	0	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	**1.065.184.531**			100 %	**455.381.473**	
1	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telepon Jumlah pemenuhan jasa air Jumlah pemenuhan listrik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Kali 12 Kali 12 Kali	338.384.531	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan	12 Kali 12 Kali 12 Kali	425.131.473	DINAS KESEHATAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Paket	726.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan	3 Paket	30.250.000	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	**226.762.500**			100 %	**229.616.606**	
1	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	46 Unit	161.762.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Barang Milik Daerah	46 Unit	161.762.500	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43 Unit	27.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Barang Milik Daerah	43 Unit	27.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	200 Meter	38.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Barang Milik Daerah	200 Meter	40.854.106	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Sesuai Standar		72 %	**48.742.088.435**			72 %	**60.584.427.617**	
1	**2**	**2**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota yang tersedia		100 Persen	**27.851.067.000**			100 Persen	**25.983.294.400**	
1	2	2	2.01	2	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Paket	18.300.000.000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	Sarana dan Prasarana Kesehatan	3 Paket	18.000.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.01	3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang di bangun	Kab. Soppeng, Semua	1 Paket	1.500.000.000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-	Sarana dan Prasarana Kesehatan	1 Paket	1.500.000.000	DINAS KESEHATAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Kecamatan, Semua Kelurahan			Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar				
1	2	2	2.01	4	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Paket	489.188.000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	Sarana dan Prasarana Kesehatan	1 Paket	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya				0		Sarana dan Prasarana Kesehatan		0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan				0		Sarana dan Prasarana Kesehatan		0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan kesehatan yang dipelihara	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Paket	2.174.999.600	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	Sarana dan Prasarana Kesehatan	20 Paket	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Paket Alat kesehatan/ Alat penunjang Medik Fasilitas Kesehatan yang diadakan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	1.813.910.400	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	Sarana dan Prasarana Kesehatan	1 Paket	2.688.910.400	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah UPTD yang melakukan Kalibrasi alat kesehatan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	20 UPTD	99.100.000		Sarana dan Prasarana Kesehatan	20 UPTD	100.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat dan Vaksin yang diadakan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	1.412.170.000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	Sarana dan Prasarana Kesehatan	1 Paket	1.412.170.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah paket bahan habis pakai yang diadakan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	1.739.714.000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	Sarana dan Prasarana Kesehatan	1 Paket	1.939.714.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan kesehatan yang dipelihara	Kab. Soppeng, Semua	20 sarana	192.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sarana dan Prasarana Kesehatan	20 sarana	192.500.000	DINAS KESEHATAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Kecamatan, Semua Kelurahan							
1	2	2	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan ketersediaan Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	17 Puskesmas	129.485.000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Sarana dan Prasarana Kesehatan	17 Puskesmas	150.000.000	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pelaksanaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 Pers	**20.643.534.935**			100 Pers	**34.559.291.717**	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	83.126.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Masyarakat	100 Persen	15.500.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	615.704.000	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	Masyarakat	100 Persen	412.404.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan bayi baru lahir	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	26.217.000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Masyarakat	100 Persen	1.030.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	26.140.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Masyarakat	100 Persen	14.300.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	14.590.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	100 Persen	7.750.000	DINAS KESEHATAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15-59 yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	4.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	100 Persen	4.950.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	54.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	100 Persen	54.900.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	100 Persen	12.600.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	13.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	100 Persen	13.050.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12.150.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	100 Persen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	9.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	100 Persen	13.050.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan diteksi dini HIV sesuai standar	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Paket	9.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	100 Paket	9.200.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk	Jumlah Fasilitas Layanan kesehatan yang melakukan pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Kab. Soppeng, Semua	17 Puskesmas	749.995.335	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAK	Masyarakat	17 Puskesmas	49.995.335	DINAS KESEHATAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Kecamatan, Semua Kelurahan			Non Fisik - BOKKB - BOK				
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Fasilitas Layanan kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 Puskesmas	315.068.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Masyarakat	17 Puskesmas	1.039.713.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Fasilitas Layanan kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan Kerja dan Olahraga	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 Puskesmas	20.000.000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Masyarakat	17 Puskesmas	5.050.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Fasilitas Layanan kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 Puskesmas	53.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Masyarakat	17 Puskesmas	26.825.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Fasilitas Layanan kesehatan yang melakukan pengelolaan Promosi Kesehatan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	17 Fasilitas	243.472.000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Masyarakat	17 Fasilitas	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Fasilitas Layanan kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Puskesmas	10.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	6 Puskesmas	10.550.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Fasilitas Layanan kesehatan yang melakukan pengelolaan Surveylans kesehatan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 Puskesmas	10.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	17 Puskesmas	10.800.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Fasilitas Layanan kesehatan yang melakukan pengelolaan Upaya kesehatan Khusus (Upaya Keperawatan Kesehatan Masyarakat, Upaya Kesehatan Gigi Mulut dan Pengelolaan PIS-PK)	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 Puskesmas	10.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	17 Puskesmas	10.800.000	DINAS KESEHATAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Fasilitas Layanan kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 Puskesmas	417.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Masyarakat	17 Puskesmas	817.200.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Masyarakat Miskin (PBPU dan BP Kelas 3) yang mendapatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14000 Jiwa	15.695.580.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	14000 Jiwa	30.977.224.382	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Kali	7.810.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	12 Kali	7.810.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Tatanan Kabupaten/Kota Sehat	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Tatanan	24.570.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	6 Tatanan	7.810.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang melaksanakan akreditasi/re akreditasi	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Fasilitas Kesehatan	900.262.000	DAK Non Fisik - BOKKB - Akreditasi Puskesmas	Masyarakat	10 Fasilitas Kesehatan	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Sarana fasyankes yang melaksanakan Kewaspadaan dini dan respon Wabah	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 Puskesmas	1.302.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	17 Puskesmas	7.810.000	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**	2.03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		100 Persen	**214.986.500**			100 Persen	**14.986.500**	
1	2	2	2.03	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Data dan Informasi Puskesmas yang dikelola	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Data	103.986.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	data dan Informasi Kesehatan	10 Data	3.986.500	DINAS KESEHATAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	2	2.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Sistem Informasi Puskesmas (SIP)	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 Puskesmas	111.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	data dan Informasi Kesehatan	17 Puskesmas	11.000.000	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**	2.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki izin operasional		100 Persen	**32.500.000**			100 Persen	**26.855.000**	
1	2	2	2.04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang mendapatkan peningkatan mutu	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Fasilitas	20.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Fasilitas Kesehatan	20 Fasilitas	14.655.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.04	4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Fasilitas Layanan Rujukan yang disediakanpembimbinaan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Fasilitas	12.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Fasilitas Kesehatan	1 Fasilitas	12.200.000	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Keterpenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		92 %	**1.208.240.000**			92 %	**45.600.000**	
1	**2**	**3**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		100 Persen	**966.000.000**			100 Persen	**0**	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Tenaga Kesehatan yang di adakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	35 Orang	966.000.000		Tenaga Kesehatan	35 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**3**	2.03		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Tenaga Kesehatan yang mendapatkan pengembangan mutu dan kompetensi		100 Persen	**242.240.000**			100 Persen	**45.600.000**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	2.03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mendapatkan pengembangan mutu dan kompetensi	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	210 Tenaga Kesehatan	242.240.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Tenaga Kesehatan	210 Tenaga Kesehatan	45.600.000	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**4**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang Sesuai Standar		100 %	**249.091.000**			100 %	**601.183.000**	
1	**2**	**4**	2.01		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mendapatkan Izin		100 Persen	**20.449.000**			100 Persen	**30.000.000**	
1	2	4	2.01	2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Sarana Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dilakukan Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	51 Sarana	20.449.000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Sarana Farmasi, Alat Kesehatan dan Tempat Pengolahan Makanan dan Minuman	51 Sarana	30.000.000	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**4**	2.02		**Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga**	Persentase Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang mendapatkan Sertifikat Produksi		100 Persen	**49.800.000**			100 Persen	**49.800.000**	
1	2	4	2.02	2	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Sarana Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Sarana	49.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sarana Produksi Alat Kesehatan	12 Sarana	49.800.000	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**4**	2.03		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang**	Persentase Industri Rumah Tangga yang mendapatkan Sertifikat Produksi Pangan dan Nomor P-IRT		100 Persen	**97.745.000**			100 Persen	**521.383.000**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga									
1	2	4	2.03	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Sarana Industri Rumah Tangga yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	220 Sarana	97.745.000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Industri Rumah Tangga	220 Sarana	521.383.000	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**4**	2.06		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	Persentase Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang dilakukan pemeriksaan		100 Persen	**81.097.000**			100 Persen	**0**	
1	2	4	2.06	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang dilakukan pemeriksaan dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		270 Post Market	81.097.000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	270 Post Market	0	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Cakupan Desa/Kelurahan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat		50 %	**258.302.000**			50 %	**307.850.000**	
1	**2**	**5**	2.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Advokasi Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	**125.452.000**			100 Persen	**175.000.000**	
1	2	5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 Puskesmas	125.452.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Desa/Kelurahan	17 Puskesmas	175.000.000	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**5**	2.02		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif**	Persentase Pelaksanaan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka		100 Persen	**120.000.000**			100 Persen	**120.000.000**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota								
1	2	5	2.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 Puskesmas	120.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	17 Puskesmas	120.000.000	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**5**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	**12.850.000**			100 Persen	**12.850.000**	
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 Puskesmas	12.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	17 Puskesmas	12.850.000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**2.712.368.617**				**3.337.816.117**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kesehatan		100 %	**2.050.368.617**			100 %	**2.050.368.617**	
1	**2**	**1**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Kemandirian keuangan Puskesmas		100 Persen	**2.050.368.617**			100 Persen	**2.050.368.617**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah layanan BLUD Puskesmas yang terlaksana	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Fasilitas Kesehatan	2.050.368.617	Pendapatan dari BLUD	Masyarakat	1 Fasilitas Kesehatan	2.050.368.617	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Jumlah ibu hamil mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar. Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	**623.494.750**			100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	**1.248.942.250**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
						Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar. Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Jumlah warga negara terduga Tubercolosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar. Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Jumlah Warga Negara usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan talangan Pemda. Persentase Masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan.		100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %				100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %		
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pelaksanaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	**623.494.750**			100 Persen	**1.248.942.250**	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 Persen	12.455.000		Masyarakat	100 Persen	12.455.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 Persen	4.400.000		Masyarakat	100 Persen	12.455.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 Persen	5.025.000		Masyarakat	100 Persen	12.455.000	DINAS KESEHATAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 Persen	11.820.000		Masyarakat	100 Persen	12.455.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 Persen	22.400.000		Masyarakat	100 Persen	22.400.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 Persen	4.590.000		Masyarakat	100 Persen	4.590.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 Persen	4.590.000		Masyarakat	100 Persen	4.590.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 Persen	4.375.000		Masyarakat	100 Persen	4.590.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 Persen	4.125.000		Masyarakat	100 Persen	4.590.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksidini HIV sesuai Standar	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 Persen	825.000		Masyarakat	100 Persen	825.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah fasiitas layanan kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 layanan	207.975.000		Masyarakat	1 layanan	207.975.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah fasilitas layanan kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 layanan	32.115.500		Masyarakat	1 layanan	32.115.500	DINAS KESEHATAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan Pengelolaan pelayanan Kerja dan Olahraga	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Layanan	2.615.000		Masyarakat	1 Layanan	2.615.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Layanan	11.940.000		Masyarakat	1 Layanan	11.940.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan promosi kesehatan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Layanan	58.754.000		Masyarakat	1 Layanan	58.754.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan Surveilans kesehatan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Layanan	113.373.500		Masyarakat	1 Layanan	113.373.500	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Layanan	4.650.000		Masyarakat	1 Layanan	4.650.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Layanan	60.864.250		Masyarakat	1 Layanan	60.864.250	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang memanfaatkan bantuan Operasional Kesehatan dalam pelayanan kesehatan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Puskesmas	53.352.500	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Masyarakat	1 Puskesmas	662.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Kali	1.875.000		Masyarakat	2 Kali	1.875.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Kewaspadaan Dini dan respon wabah yang dilaksanakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Kali	1.375.000		Masyarakat	1 Kali	1.375.000	DINAS KESEHATAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Keterpenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		92 %	**12.000.000**			92 %	**12.000.000**	
1	**2**	**3**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		100 Persen	**12.000.000**			100 Persen	**12.000.000**	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Tenaga Kesehatan yang diadakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Tenaga Kesehatan	12.000.000		Tenaga Kesehatan	1 Tenaga Kesehatan	12.000.000	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Cakupan Desa/Kelurahan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat		50 %	**26.505.250**			50 %	**26.505.250**	
1	**2**	**5**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	**26.505.250**			100 Persen	**26.505.250**	
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Puskesmas	26.505.250		Masyarakat	1 Puskesmas	26.505.250	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1.817.987.302**				**2.465.516.802**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kesehatan		100 %	**1.122.787.302**			100 %	**1.122.787.302**	
1	**2**	**1**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Kemandirian keuangan Puskesmas		100 Persen	**1.122.787.302**			100 Persen	**1.122.787.302**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah layanan BLUD Puskesmas yang terlaksana	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	1 Fasilitas Kesehatan	1.122.787.302	Pendapatan dari BLUD	Masyarakat	1 Fasilitas Kesehatan	1.122.787.302	DINAS KESEHATAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		100 %	**640.150.000**			100 %	**1.276.879.000**	
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		100 %				100 %		
						Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		100 %				100 %		
						Jumlah ibu hamil mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara terduga Tubercolosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah Warga Negara usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		100 %				100 %		
						Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan talangan Pemda.		100 %				100 %		
						Persentase Masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan.		100 %				100 %		
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pelaksanaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	**640.150.000**			100 Persen	**1.276.879.000**	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentae Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	100 Persen	14.250.000		Masyarakat	100 Persen	14.250.000	DINAS KESEHATAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	100 Persen	10.975.000		Masyarakat	100 Persen	10.975.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	100 Persen	8.150.000		Masyarakat	100 Persen	8.150.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	100 Persen	17.150.000		Masyarakat	100 Persen	17.170.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	100 Persen	16.200.000		Masyarakat	100 Persen	16.200.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	100 Persen	1.050.000		Masyarakat	100 Persen	1.050.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	100 Persen	3.250.000		Masyarakat	100 Persen	3.287.500	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	100 Persen	3.250.000		Masyarakat	100 Persen	3.287.500	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	100 Persen	2.100.000		Masyarakat	100 Persen	2.100.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	100 Persen	2.100.000		Masyarakat	100 Persen	2.100.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksidini HIV sesuai Standar	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	100 Persen	1.050.000		Masyarakat	100 Persen	1.050.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah fasiitas layanan kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	1 layanan	202.800.000		Masyarakat	1 layanan	202.800.000	DINAS KESEHATAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah fasilitas layanan kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	1 layanan	18.750.000		Masyarakat	1 layanan	18.765.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	1 Layanan	21.350.000		Masyarakat	1 Layanan	22.350.500	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan promosi kesehatan	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	1 Layanan	59.350.000		Masyarakat	1 Layanan	59.390.100	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan Surveilans kesehatan	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	1 Layanan	99.500.000		Masyarakat	1 Layanan	99.500.150	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	1 Layanan	2.100.000		Masyarakat	1 Layanan	2.100.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	1 Layanan	84.250.000		Masyarakat	1 Layanan	84.253.250	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang memanfaatkan bantuan Operasional Kesehatan dalam pelayanan kesehatan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Puskesmas	70.425.000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Masyarakat	1 Puskesmas	706.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	2 Kali	1.400.000		Masyarakat	2 Kali	1.400.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Kewaspadaan Dini dan respon wabah yang dilaksanakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	1 Kali	700.000		Masyarakat	1 Kali	700.000	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Keterpenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		92 %	**25.200.000**			92 %	**36.000.000**	
1	**2**	**3**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan**	Persentase Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia		100 Persen	**25.200.000**			100 Persen	**36.000.000**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Tenaga Kesehatan yang diadakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	3 Tenaga Kesehatan	25.200.000		Tenaga Kesehatan	3 Tenaga Kesehatan	36.000.000	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Cakupan Desa/Kelurahan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat		50 %	**29.850.000**			50 %	**29.850.500**	
1	**2**	**5**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	**29.850.000**			100 Persen	**29.850.500**	
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	1 Puskesmas	29.850.000		Masyarakat	1 Puskesmas	29.850.500	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1.816.374.004**				**2.439.442.004**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kesehatan		100 %	**1.142.374.004**			100 %	**1.142.374.004**	
1	**2**	**1**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Kemandirian keuangan Puskesmas		100 Persen	**1.142.374.004**			100 Persen	**1.142.374.004**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah layanan BLUD Puskesmas yang terlaksana	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	1 Fasilitas Kesehatan	1.142.374.004	Pendapatan dari BLUD	Masyarakat	1 Fasilitas Kesehatan	1.142.374.004	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Jumlah ibu hamil mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.		100 % 100 % 100 % 100 %	**629.170.000**			100 % 100 % 100 % 100 %	**1.252.276.000**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
						Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara terduga Tubercolosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah Warga Negara usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		100 %				100 %		
						Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan talangan Pemda.		100 %				100 %		
						Persentase Masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan.		100 %				100 %		
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pelaksanaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	**629.170.000**			100 Persen	**1.252.276.000**	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	100 Persen	10.725.000		Masyarakat	100 Persen	10.725.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	100 Persen	4.800.000		Masyarakat	100 Persen	4.800.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	100 Persen	4.150.000		Masyarakat	100 Persen	4.150.000	DINAS KESEHATAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	100 Persen	7.850.000		Masyarakat	100 Persen	21.150.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	100 Persen	21.150.000		Masyarakat	100 Persen	21.150.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	100 Persen	3.490.000		Masyarakat	100 Persen	3.490.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	100 Persen	3.350.000		Masyarakat	100 Persen	3.350.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	100 Persen	4.375.000		Masyarakat	100 Persen	4.375.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	100 Persen	6.450.000		Masyarakat	100 Persen	6.450.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksidini HIV sesuai Standar	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	100 Persen	2.100.000		Masyarakat	100 Persen	2.100.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah fasiitas layanan kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	1 layanan	209.400.000		Masyarakat	1 layanan	209.400.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah fasilitas layanan kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	1 layanan	23.225.000		Masyarakat	1 layanan	23.225.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Fasilitas Layangan Kesehatan yang melakukan Pengelolaan pelayanan Kerja dan Olahraga	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	1 Layanan	5.115.000		Masyarakat	1 Layanan	5.115.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	1 Layanan	21.290.000		Masyarakat	1 Layanan	21.290.000	DINAS KESEHATAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan promosi kesehatan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	1 Layanan	42.025.000		Masyarakat	1 Layanan	42.070.500	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan Surveilans kesehatan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	1 Layanan	138.545.000		Masyarakat	1 Layanan	138.545.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	1 Layanan	3.200.000		Masyarakat	1 Layanan	3.200.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	1 Layanan	45.590.000		Masyarakat	1 Layanan	45.590.500	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang memanfaatkan bantuan Operasional Kesehatan dalam pelayanan kesehatan	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila; Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	1 Puskesmas	64.240.000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Masyarakat	1 Puskesmas	674.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	2 Kali	6.500.000		Masyarakat	2 Kali	6.500.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Kewaspadaan Dini dan respon wabah yang dilaksanakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	1 Kali	1.600.000		Masyarakat	1 Kali	1.600.000	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Keterpenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		92 %	**24.000.000**			92 %	**24.000.000**	
1	**2**	**3**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		100 Persen	**24.000.000**			100 Persen	**24.000.000**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Tenaga Kesehatan yang diadakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	2 Tenaga Kesehatan	24.000.000		Tenaga Kesehatan	2 Tenaga Kesehatan	24.000.000	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Cakupan Desa/Kelurahan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat		50 %	**20.830.000**			50 %	**20.792.000**	
1	**2**	**5**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	**20.830.000**			100 Persen	**20.792.000**	
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	1 Puskesmas	20.830.000		masyarakat	1 Puskesmas	20.792.000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**2.127.708.224**				**2.755.135.224**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kesehatan		100 %	**1.421.708.224**			100 %	**1.421.708.224**	
1	**2**	**1**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Kemandirian keuangan Puskesmas		100 Persen	**1.421.708.224**			100 Persen	**1.421.708.224**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah layanan BLUD Puskesmas yang terlaksana	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	1 Fasilitas Kesehatan	1.421.708.224	Pendapatan dari BLUD	Masyarakat	1 Fasilitas Kesehatan	1.421.708.224	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Jumlah ibu hamil mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar. Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh		100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	**644.445.000**			100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	**1.271.866.000**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
						manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar. Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Jumlah warga negara terduga Tubercolosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar. Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Jumlah Warga Negara usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan talangan Pemda. Persentase Masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan.		100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %				100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %		
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pelaksanaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	**644.445.000**			100 Persen	**1.271.866.000**	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	100 Persen	14.000.000		Masyarakat	100 Persen	14.005.300	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	100 Persen	10.350.000		Masyarakat	100 Persen	10.365.500	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	100 Persen	5.800.000		Masyarakat	100 Persen	5.800.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	100 Persen	21.565.000		Masyarakat	100 Persen	21.573.500	DINAS KESEHATAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	100 Persen	16.890.000		Masyarakat	100 Persen	16.899.600	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	100 Persen	3.050.000		Masyarakat	100 Persen	3.050.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	100 Persen	5.940.000		Masyarakat	100 Persen	5.940.500	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	100 Persen	5.640.000		Masyarakat	100 Persen	5.640.500	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	100 Persen	6.050.000		Masyarakat	100 Persen	6.050.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	100 Persen	9.000.000		Masyarakat	100 Persen	9.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksidini HIV sesuai Standar	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	100 Persen	3.000.000		Masyarakat	100 Persen	3.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah fasiitas layanan kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	1 layanan	209.000.000		Masyarakat	1 layanan	209.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah fasilitas layanan kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	1 layanan	33.865.000		Masyarakat	1 layanan	33.873.900	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Fasilitas Layangan Kesehatan yang melakukan Pengelolaan pelayanan Kerja dan Olahraga	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	1 Layanan	4.715.000		Masyarakat	1 Layanan	4.715.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	1 Layanan	8.150.000		Masyarakat	1 Layanan	8.073.400	DINAS KESEHATAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan promosi kesehatan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	1 Layanan	37.245.000		Masyarakat	1 Layanan	37.254.600	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan Surveilans kesehatan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	1 Layanan	95.625.000		Masyarakat	1 Layanan	95.625.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	1 Layanan	4.850.000		Masyarakat	1 Layanan	4.850.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	1 Layanan	61.240.000		Masyarakat	1 Layanan	61.249.200	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang memanfaatkan bantuan Operasional Kesehatan dalam pelayanan kesehatan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	1 Puskesmas	78.570.000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Masyarakat	1 Puskesmas	706.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	2 Kali	6.700.000		Masyarakat	2 Kali	6.700.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Kewaspadaan Dini dan respon wabah yang dilaksanakan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	1 Kali	3.200.000		Masyarakat	1 Kali	3.200.000	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Keterpenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		92 %	**36.000.000**			92 %	**36.000.000**	
1	**2**	**3**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		100 Persen	**36.000.000**			100 Persen	**36.000.000**	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Tenaga Kesehatan yang diadakan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	3 Tenaga Kesehatan	36.000.000		Tenaga Kesehatan	3 Tenaga Kesehatan	36.000.000	DINAS KESEHATAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	**2**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Cakupan Desa/Kelurahan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat		50 %	**25.555.000**			50 %	**25.561.000**	
1	**2**	**5**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	**25.555.000**			100 Persen	**25.561.000**	
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	1 Puskesmas	25.555.000		Masyarakat	1 Puskesmas	25.561.000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**2.064.038.353**				**2.744.603.853**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kesehatan		100 %	**1.315.370.353**			100 %	**1.315.370.353**	
1	**2**	**1**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Kemandirian keuangan Puskesmas		100 Persen	**1.315.370.353**			100 Persen	**1.315.370.353**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah layanan BLUD Puskesmas yang terlaksana	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	1 Fasilitas Kesehatan	1.315.370.353	Pendapatan dari BLUD	Masyarakat	1 Fasilitas Kesehatan	1.315.370.353	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Jumlah ibu hamil mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar. Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.		100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	**697.073.000**			100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	**1.377.634.550**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
						Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara terduga Tubercolosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah Warga Negara usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		100 %				100 %		
						Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan talangan Pemda.		100 %				100 %		
						Persentase Masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan.		100 %				100 %		
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pelaksanaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	**697.073.000**			100 Persen	**1.377.634.550**	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentae Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	100 Persen	22.755.000		Masyarakat	100 Persen	22.755.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	100 Persen	12.540.000		Masyarakat	100 Persen	12.540.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	100 Persen	3.025.000		Masyarakat	100 Persen	3.025.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	100 Persen	15.675.000		Masyarakat	100 Persen	15.675.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	100 Persen	26.550.000		Masyarakat	100 Persen	26.552.000	DINAS KESEHATAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	100 Persen	3.300.000		Masyarakat	100 Persen	3.300.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	100 Persen	4.640.000		Masyarakat	100 Persen	4.640.500	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	100 Persen	4.540.000		Masyarakat	100 Persen	4.540.500	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	100 Persen	3.850.000		Masyarakat	100 Persen	3.850.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	100 Persen	10.950.000		Masyarakat	100 Persen	10.950.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksidini HIV sesuai Standar	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	100 Persen	3.300.000		Masyarakat	100 Persen	3.300.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah fasiitas layanan kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	1 layanan	208.450.000		Masyarakat	1 layanan	208.450.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah fasilitas layanan kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	1 layanan	41.040.000		Masyarakat	1 layanan	41.040.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Fasilitas Layangan Kesehatan yang melakukan Pengelolaan pelayanan Kerja dan Olahraga	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	1 Layanan	4.775.000		Masyarakat	1 Layanan	4.775.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	1 Layanan	9.950.000		Masyarakat	1 Layanan	9.950.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan promosi kesehatan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	1 Layanan	43.145.000		Masyarakat	1 Layanan	43.148.500	DINAS KESEHATAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan Surveilans kesehatan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	1 Layanan	101.660.000		Masyarakat	1 Layanan	101.665.150	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	1 Layanan	1.650.000		Masyarakat	1 Layanan	1.650.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	1 Layanan	96.700.000		Masyarakat	1 Layanan	96.709.900	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang memanfaatkan bantuan Operasional Kesehatan dalam pelayanan kesehatan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	1 Puskesmas	68.128.000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Masyarakat	1 Puskesmas	748.668.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	2 Kali	8.850.000		Masyarakat	2 Kali	8.850.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Kewaspadaan Dini dan respon wabah yang dilaksanakan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	1 Kali	1.600.000		Masyarakat	1 Kali	1.600.000	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Keterpenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		92 %	**24.000.000**			92 %	**24.000.000**	
1	**2**	**3**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		100 Persen	**24.000.000**			100 Persen	**24.000.000**	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Tenaga Kesehatan yang diadakan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	2 Tenaga Kesehatan	24.000.000		Tenaga Kesehatan	2 Tenaga Kesehatan	24.000.000	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Cakupan Desa/Kelurahan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat		50 %	**27.595.000**			50 %	**27.598.950**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	**2**	**5**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	**27.595.000**			100 Persen	**27.598.950**	
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	1 Puskesmas	27.595.000		Masyarakat	1 Puskesmas	27.598.950	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1.403.509.559**				**1.997.538.159**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kesehatan		100 %	**729.509.559**			100 %	**729.509.559**	
1	**2**	**1**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Kemandirian keuangan Puskesmas		100 Persen	**729.509.559**			100 Persen	**729.509.559**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah layanan BLUD Puskesmas yang terlaksana	Kab. Soppeng, Lilirilau, Abbanuange	1 Fasilitas Kesehatan	729.509.559	Pendapatan dari BLUD	Masyarakat	1 Fasilitas Kesehatan	729.509.559	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Jumlah ibu hamil mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar. Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar. Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	**619.125.000**			100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	**1.234.352.150**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
						Jumlah warga negara terduga Tubercolosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar. Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Jumlah Warga Negara usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan talangan Pemda. Persentase Masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan.		100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %				100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %		
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pelaksanaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	**619.125.000**			100 Persen	**1.234.352.150**	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Kab. Soppeng, Lilirilau, Abbanuange	100 Persen	11.430.000		Masyarakat	100 Persen	11.400.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Abbanuange	100 Persen	5.300.000		Masyarakat	100 Persen	11.400.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Kab. Soppeng, Lilirilau, Abbanuange	100 Persen	5.600.000		Masyarakat	100 Persen	11.400.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Kab. Soppeng, Lilirilau, Abbanuange	100 Persen	9.050.000		Masyarakat	100 Persen	11.400.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Lilirilau, Abbanuange	100 Persen	16.150.000		Masyarakat	100 Persen	11.400.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Lilirilau, Abbanuange	100 Persen	14.590.000		Masyarakat	100 Persen	11.400.000	DINAS KESEHATAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Lilirilau, Abbanuange	100 Persen	14.590.000		Masyarakat	100 Persen	11.400.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Kab. Soppeng, Lilirilau, Abbanuange	100 Persen	2.725.000		Masyarakat	100 Persen	11.400.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Kab. Soppeng, Lilirilau, Abbanuange	100 Persen	5.000.000		Masyarakat	100 Persen	11.400.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksidini HIV sesuai Standar	Kab. Soppeng, Lilirilau, Abbanuange	100 Persen	3.300.000		Masyarakat	100 Persen	11.400.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah fasiitas layanan kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Kab. Soppeng, Lilirilau, Abbanuange	1 layanan	213.250.000		Masyarakat	1 layanan	213.250.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah fasilitas layanan kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Kab. Soppeng, Lilirilau, Abbanuange	1 layanan	37.000.000		Masyarakat	1 layanan	37.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Abbanuange	1 Layanan	14.965.000		Masyarakat	1 Layanan	37.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan promosi kesehatan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Abbanuange	1 Layanan	59.750.000		Masyarakat	1 Layanan	37.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan Surveilans kesehatan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Abbanuange	1 Layanan	98.225.000		Masyarakat	1 Layanan	37.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	Kab. Soppeng, Lilirilau, Abbanuange	1 Layanan	1.750.000		Masyarakat	1 Layanan	37.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Soppeng, Lilirilau, Abbanuange	1 Layanan	42.500.000		Masyarakat	1 Layanan	42.503.750	DINAS KESEHATAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang memanfaatkan bantuan Operasional Kesehatan dalam pelayanan kesehatan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Abbanuange	1 Puskesmas	60.800.000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Masyarakat	1 Puskesmas	674.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Soppeng, Lilirilau, Abbanuange	2 Kali	2.100.000		Masyarakat	2 Kali	2.799.200	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Kewaspadaan Dini dan respon wabah yang dilaksanakan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Abbanuange	1 Kali	1.050.000		Masyarakat	1 Kali	2.799.200	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Keterpenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		92 %	**24.000.000**			92 %	**2.799.200**	
1	**2**	**3**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		100 Persen	**24.000.000**			100 Persen	**2.799.200**	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Tenaga Kesehatan yang diadakan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Abbanuange	2 Tenaga Kesehatan	24.000.000		Tenaga Kesehatan	2 Tenaga Kesehatan	2.799.200	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Cakupan Desa/Kelurahan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat		50 %	**30.875.000**			50 %	**30.877.250**	
1	**2**	**5**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	**30.875.000**			100 Persen	**30.877.250**	
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Soppeng, Lilirilau, Abbanuange	1 Puskesmas	30.875.000		Masyarakat	1 Puskesmas	30.877.250	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**2.432.471.783**				**3.021.721.783**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kesehatan		100 %	**1.770.471.783**			100 %	**1.770.471.783**	
1	**2**	**1**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Kemandirian keuangan Puskesmas		100 Persen	**1.770.471.783**			100 Persen	**1.770.471.783**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah layanan BLUD Puskesmas yang terlaksana	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	1 Fasilitas Kesehatan	1.770.471.783	Pendapatan dari BLUD	Masyarakat	1 Fasilitas Kesehatan	1.770.471.783	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		100 %	**617.240.000**			100 %	**1.206.250.000**	
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		100 %				100 %		
						Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		100 %				100 %		
						Jumlah ibu hamil mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara terduga Tubercolosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah Warga Negara usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		100 %				100 %		
						Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan talangan Pemda.		100 %				100 %		



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
						Persentase Masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan.		100 %				100 %		
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pelaksanaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	**617.240.000**			100 Persen	**1.206.250.000**	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	100 Persen	10.775.000		Masyarakat	100 Persen	10.775.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	100 Persen	5.300.000		Masyarakat	100 Persen	10.775.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	100 Persen	6.775.000		Masyarakat	100 Persen	10.775.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	100 Persen	13.225.000		Masyarakat	100 Persen	10.775.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	100 Persen	31.450.000		Masyarakat	100 Persen	10.775.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	100 Persen	4.590.000		Masyarakat	100 Persen	10.775.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	100 Persen	4.590.000		Masyarakat	100 Persen	10.775.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	100 Persen	2.725.000		Masyarakat	100 Persen	10.775.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	100 Persen	5.750.000		Masyarakat	100 Persen	10.775.000	DINAS KESEHATAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksidini HIV sesuai Standar	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	100 Persen	3.300.000		Masyarakat	100 Persen	10.775.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah fasiitas layanan kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	1 layanan	208.500.000		Masyarakat	1 layanan	208.500.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah fasilitas layanan kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	1 layanan	21.720.000		Masyarakat	1 layanan	28.500.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	1 Layanan	23.600.000		Masyarakat	1 Layanan	28.500.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan promosi kesehatan	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	1 Layanan	42.000.000		Masyarakat	1 Layanan	28.500.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan Surveilans kesehatan	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	1 Layanan	101.800.000		Masyarakat	1 Layanan	28.500.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	1 Layanan	3.500.000		Masyarakat	1 Layanan	28.500.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	1 Layanan	50.840.000		Masyarakat	1 Layanan	28.500.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang memanfaatkan bantuan Operasional Kesehatan dalam pelayanan kesehatan	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	1 Puskesmas	73.650.000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Masyarakat	1 Puskesmas	662.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	2 Kali	2.100.000		Masyarakat	2 Kali	28.500.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Kewaspadaan Dini dan respon wabah yang dilaksanakan	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	1 Kali	1.050.000		Masyarakat	1 Kali	28.500.000	DINAS KESEHATAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Keterpenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		92 %	**12.000.000**			92 %	**12.500.000**	
1	**2**	**3**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		100 Persen	**12.000.000**			100 Persen	**12.500.000**	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Tenaga Kesehatan yang diadakan	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	1 Tenaga Kesehatan	12.000.000		Tenaga Kesehatan	1 Tenaga Kesehatan	12.500.000	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Cakupan Desa/Kelurahan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat		50 %	**32.760.000**			50 %	**32.500.000**	
1	**2**	**5**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	**32.760.000**			100 Persen	**32.500.000**	
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	1 Puskesmas	32.760.000		Masyarakat	1 Puskesmas	32.500.000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1.790.448.620**				**2.642.219.370**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kesehatan		100 %	**1.128.448.620**			100 %	**1.128.448.620**	
1	**2**	**1**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Kemandirian keuangan Puskesmas		100 Persen	**1.128.448.620**			100 Persen	**1.128.448.620**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah layanan BLUD Puskesmas yang terlaksana	Kab. Soppeng, Liliraja, Jennae	1 Fasilitas Kesehatan	1.128.448.620	Pendapatan dari BLUD	Masyarakat	1 Fasilitas Kesehatan	1.128.448.620	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN**	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		100 %	**619.305.000**			100 %	**1.473.660.250**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		100 %				100 %		
						Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		100 %				100 %		
						Jumlah ibu hamil mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara terduga Tubercolosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah Warga Negara usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		100 %				100 %		
						Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan talangan Pemda.		100 %				100 %		
						Persentase Masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan.		100 %				100 %		
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pelaksanaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	**619.305.000**			100 Persen	**1.473.660.250**	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentae Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kab. Soppeng, Liliraja, Barang	100 Persen	27.550.000		Masyarakat	100 Persen	27.555.250	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentae Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kab. Soppeng,	100 Persen	11.000.000		Masyarakat	100 Persen	27.555.250	DINAS KESEHATAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Liliraja, Barang							
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Kab. Soppeng, Liliraja, Barang	100 Persen	3.200.000		Masyarakat	100 Persen	27.555.250	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Kab. Soppeng, Liliraja, Barang	100 Persen	18.945.000		Masyarakat	100 Persen	27.555.250	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Liliraja, Barang	100 Persen	22.200.000		Masyarakat	100 Persen	27.555.250	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Liliraja, Barang	100 Persen	12.600.000		Masyarakat	100 Persen	27.555.250	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Liliraja, Barang	100 Persen	8.440.000		Masyarakat	100 Persen	27.555.250	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Liliraja, Barang	100 Persen	8.440.000		Masyarakat	100 Persen	27.555.250	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Kab. Soppeng, Liliraja, Barang	100 Persen	5.900.000		Masyarakat	100 Persen	27.555.250	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Kab. Soppeng, Liliraja, Barang	100 Persen	3.200.000		Masyarakat	100 Persen	27.555.250	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksidini HIV sesuai Standar	Kab. Soppeng, Liliraja, Barang	100 Persen	2.400.000		Masyarakat	100 Persen	27.555.250	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah fasiitas layanan kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Kab. Soppeng, Liliraja, Barang	1 layanan	206.100.000		Masyarakat	1 layanan	207.555.250	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah fasilitas layanan kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Kab. Soppeng,	1 layanan	36.510.000		Masyarakat	1 layanan	36.555.250	DINAS KESEHATAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Liliraja, Barang							
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Fasilitas Layangan Kesehatan yang melakukan Pengelolaan pelayanan Kerja dan Olahraga	Kab. Soppeng, Liliraja, Barang	1 Layanan	10.370.000		Masyarakat	1 Layanan	36.555.250	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Kab. Soppeng, Liliraja, Barang	1 Layanan	12.060.000		Masyarakat	1 Layanan	36.555.250	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan promosi kesehatan	Kab. Soppeng, Liliraja, Barang	1 Layanan	38.160.000		Masyarakat	1 Layanan	36.555.250	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan Surveilans kesehatan	Kab. Soppeng, Liliraja, Barang	1 Layanan	49.190.000		Masyarakat	1 Layanan	36.555.250	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	Kab. Soppeng, Liliraja, Barang	1 Layanan	0		Masyarakat	1 Layanan	36.555.250	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Soppeng, Liliraja, Barang	1 Layanan	75.000.000		Masyarakat	1 Layanan	36.555.250	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang memanfaatkan bantuan Operasional Kesehatan dalam pelayanan kesehatan	Kab. Soppeng, Liliraja, Barang	1 Puskesmas	57.300.000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Masyarakat	1 Puskesmas	662.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Soppeng, Liliraja, Barang	2 Kali	2.400.000		Masyarakat	2 Kali	36.555.250	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Kewaspadaan Dini dan respon wabah yang dilaksanakan	Kab. Soppeng, Liliraja, Barang	1 Kali	8.340.000		Masyarakat	1 Kali	8.555.250	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Keterpenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		92 %	**12.000.000**			92 %	**12.555.250**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	**2**	**3**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		100 Persen	**12.000.000**			100 Persen	**12.555.250**	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Tenaga Kesehatan yang diadakan	Kab. Soppeng, Liliraja, Barang	1 Tenaga Kesehatan	12.000.000		Tenaga Kesehatan	1 Tenaga Kesehatan	12.555.250	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Cakupan Desa/Kelurahan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat		50 %	**30.695.000**			50 %	**27.555.250**	
1	**2**	**5**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	**30.695.000**			100 Persen	**27.555.250**	
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Soppeng, Liliraja, Barang	1 Puskesmas	30.695.000		Masyarakat	1 Puskesmas	27.555.250	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1.409.720.399**				**2.030.870.599**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kesehatan		100 %	**735.720.399**			100 %	**735.720.399**	
1	**2**	**1**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Kemandirian keuangan Puskesmas		100 Persen	**735.720.399**			100 Persen	**735.720.399**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah layanan BLUD Puskesmas yang terlaksana	Kab. Soppeng, Citta, Citta	1 Fasilitas Kesehatan	735.720.399	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	1 Fasilitas Kesehatan	735.720.399	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Jumlah ibu hamil mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.		100 % 100 % 100 % 100 %	**622.260.000**			100 % 100 % 100 % 100 %	**1.243.403.200**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
						Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara terduga Tubercolosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah Warga Negara usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		100 %				100 %		
						Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan talangan Pemda.		100 %				100 %		
						Persentase Masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan.		100 %				100 %		
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pelaksanaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	**622.260.000**			100 Persen	**1.243.403.200**	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kab. Soppeng, Citta, Citta	100 Persen	17.750.000		Masyarakat	100 Persen	17.785.500	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	Kab. Soppeng, Citta, Citta	100 Persen	10.090.000		Masyarakat	100 Persen	17.785.500	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Kab. Soppeng, Citta, Citta	100 Persen	7.450.000		Masyarakat	100 Persen	17.785.500	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Kab. Soppeng, Citta, Citta	100 Persen	22.950.000		Masyarakat	100 Persen	22.995.500	DINAS KESEHATAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Citta, Citta	100 Persen	18.100.000		Masyarakat	100 Persen	18.102.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Citta, Citta	100 Persen	3.225.000		Masyarakat	100 Persen	3.250.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Citta, Citta	100 Persen	14.100.000		Masyarakat	100 Persen	14.140.500	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Citta, Citta	100 Persen	6.600.000		Masyarakat	100 Persen	6.640.500	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Kab. Soppeng, Citta, Citta	100 Persen	5.000.000		Masyarakat	100 Persen	5.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Kab. Soppeng, Citta, Citta	100 Persen	3.250.000		Masyarakat	100 Persen	5.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksidini HIV sesuai Standar	Kab. Soppeng, Citta, Citta	100 Persen	2.200.000		Masyarakat	100 Persen	5.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah fasiitas layanan kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Kab. Soppeng, Citta, Citta	1 layanan	204.650.000		Masyarakat	1 layanan	204.674.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah fasilitas layanan kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Kab. Soppeng, Citta, Citta	1 layanan	39.015.000		Masyarakat	1 layanan	39.015.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Fasilitas Layangan Kesehatan yang melakukan Pengelolaan pelayanan Kerja dan Olahraga	Kab. Soppeng, Citta, Citta	1 Layanan	5.200.000		Masyarakat	1 Layanan	5.200.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Kab. Soppeng, Citta, Citta	1 Layanan	6.375.000		Masyarakat	1 Layanan	6.390.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan promosi kesehatan	Kab. Soppeng, Citta, Citta	1 Layanan	53.700.000		Masyarakat	1 Layanan	53.746.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan Surveilans kesehatan	Kab. Soppeng, Citta, Citta	1 Layanan	37.375.000		Masyarakat	1 Layanan	53.746.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	Kab. Soppeng, Citta, Citta	1 Layanan	5.500.000		Masyarakat	1 Layanan	5.374.600	DINAS KESEHATAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Soppeng, Citta, Citta	1 Layanan	62.425.000		Masyarakat	1 Layanan	62.472.600	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pemanfaatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Kab. Soppeng, Citta, Citta	1 Puskesmas	92.205.000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Masyarakat	1 Puskesmas	674.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Soppeng, Citta, Citta	2 Kali	2.650.000		Masyarakat	2 Kali	2.650.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Kewaspadaan Dini dan respon wabah yang dilaksanakan	Kab. Soppeng, Citta, Citta	1 Kali	2.450.000		Masyarakat	1 Kali	2.650.000	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Keterpenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		92 %	**24.000.000**			92 %	**24.000.000**	
1	**2**	**3**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		100 Persen	**24.000.000**			100 Persen	**24.000.000**	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Tenaga Kesehatan yang diadakan	Kab. Soppeng, Citta, Citta	2 Tenaga Kesehatan	24.000.000		Tenaga Kesehatan	2 Tenaga Kesehatan	24.000.000	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Cakupan Desa/Kelurahan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat		50 %	**27.740.000**			50 %	**27.747.000**	
1	**2**	**5**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	**27.740.000**			100 Persen	**27.747.000**	
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Soppeng, Citta, Citta	1 Puskesmas	27.740.000		0	1 Puskesmas	27.747.000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**2.817.762.764**				**3.618.719.114**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kesehatan		100 %	**2.095.762.764**			100 %	**2.095.762.764**	
1	**2**	**1**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Kemandirian keuangan Puskesmas		100 Persen	**2.095.762.764**			100 Persen	**2.095.762.764**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah layanan BLUD Puskesmas yang terlaksana	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenraraे	1 Fasilitas Kesehatan	2.095.762.764	Pendapatan dari BLUD	Masyarakat	1 Fasilitas Kesehatan	2.095.762.764	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		100 %	**656.115.000**			100 %	**1.457.069.350**	
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		100 %				100 %		
						Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		100 %				100 %		
						Jumlah ibu hamil mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara terduga Tubercolosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah Warga Negara usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		100 %				100 %		



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
						Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan talangan Pemda. Persentase Masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan.		100 % 100 %				100 % 100 %		
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pelaksanaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	**656.115.000**			100 Persen	**1.457.069.350**	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenraraे	100 Persen	21.575.000		Masyarakat	100 Persen	36.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenraraे	100 Persen	15.800.000		Masyarakat	100 Persen	36.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenraraे	100 Persen	9.150.000		Masyarakat	100 Persen	36.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenraraे	100 Persen	30.750.000		Masyarakat	100 Persen	36.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenraraे	100 Persen	21.565.000		Masyarakat	100 Persen	36.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenraraे	100 Persen	7.250.000		Masyarakat	100 Persen	36.000.000	DINAS KESEHATAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenraree	100 Persen	2.500.000		Masyarakat	100 Persen	36.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenraree	100 Persen	2.000.000		Masyarakat	100 Persen	36.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenraree	100 Persen	5.000.000		Masyarakat	100 Persen	36.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenraree	100 Persen	4.550.000		Masyarakat	100 Persen	6.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksidini HIV sesuai Standar	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenraree	100 Persen	2.750.000		Masyarakat	100 Persen	6.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah fasiitas layanan kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenraree	1 layanan	220.075.000		Masyarakat	1 layanan	220.075.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah fasilitas layanan kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenraree	1 layanan	14.000.000		Masyarakat	1 layanan	14.250.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Fasilitas Layangan Kesehatan yang melakukan Pengelolaan pelayanan Kerja dan Olahraga	Kab. Soppeng, Marioriwawo	1 Layanan	10.130.000		Masyarakat	1 Layanan	14.250.000	DINAS KESEHATAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							, Tettikenraraе							
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenraraе	1 Layanan	5.290.000		Masyarakat	1 Layanan	14.250.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan promosi kesehatan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenraraе	1 Layanan	34.895.000		Masyarakat	1 Layanan	14.250.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan Surveilans kesehatan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenraraе	1 Layanan	86.975.000		Masyarakat	1 Layanan	14.250.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenraraе	1 Layanan	4.000.000		Masyarakat	1 Layanan	4.250.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenraraе	1 Layanan	90.500.000		Masyarakat	1 Layanan	90.494.350	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pemanfaatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenraraе	1 Puskesmas	58.860.000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Masyarakat	1 Puskesmas	722.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenraraе	2 Kali	6.500.000		Masyarakat	2 Kali	6.500.000	DINAS KESEHATAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Kewaspadaan Dini dan respon wabah yang dilaksanakan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenraree	1 Kali	2.000.000		Masyarakat	1 Kali	6.500.000	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Keterpenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		92 %	**12.000.000**			92 %	**12.000.000**	
1	**2**	**3**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		100 Persen	**12.000.000**			100 Persen	**12.000.000**	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Tenaga Kesehatan yang diadakan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenraree	1 Tenaga Kesehatan	12.000.000		Tenaga Kesehatan	1 Tenaga Kesehatan	12.000.000	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Cakupan Desa/Kelurahan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat		50 %	**53.885.000**			50 %	**53.887.000**	
1	**2**	**5**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	**53.885.000**			100 Persen	**53.887.000**	
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenraree	1 Puskesmas	53.885.000		Masyarakat	1 Puskesmas	53.887.000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**2.470.000.000**				**3.292.549.750**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kesehatan		100 %	**1.728.000.000**			100 %	**1.728.000.000**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					DAERAH KABUPATEN/KOTA									
1	**2**	**1**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Kemandirian keuangan Puskesmas		100 Persen	**1.728.000.000**			100 Persen	**1.728.000.000**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah layanan BLUD Puskesmas yang terlaksana	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Gattareng	1 Fasilitas Kesehatan	1.728.000.000	Pendapatan dari BLUD	Masyarakat	1 Fasilitas Kesehatan	1.728.000.000	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Jumlah ibu hamil mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar. Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar. Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Jumlah warga negara terduga Tubercolosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar. Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Jumlah Warga Negara usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan talangan Pemda. Persentase Masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan.		100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	**704.040.000**			100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	**1.526.549.750**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pelaksanaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	**704.040.000**			100 Persen	**1.526.549.750**	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kab. Soppeng, Marioriwawo , Marioriaja	100 Persen	26.075.000		Masyarakat	100 Persen	27.555.250	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	Kab. Soppeng, Marioriwawo , Marioriaja	100 Persen	5.950.000		Masyarakat	100 Persen	27.555.250	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Kab. Soppeng, Marioriwawo , Marioriaja		5.450.000		Masyarakat		27.555.250	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Kab. Soppeng, Marioriwawo , Marioriaja	100 Persen	12.000.000		Masyarakat	100 Persen	27.555.250	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Marioriwawo , Marioriaja	100 Persen	14.900.000		Masyarakat	100 Persen	27.555.250	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Marioriwawo , Marioriaja	100 Persen	17.225.000		Masyarakat	100 Persen	27.555.250	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Marioriwawo , Marioriaja	100 Persen	10.310.000		Masyarakat	100 Persen	27.555.250	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Kab. Soppeng, Marioriwawo , Marioriaja	100 Persen	5.750.000		Masyarakat	100 Persen	27.555.250	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Kab. Soppeng, Marioriwawo , Marioriaja	100 Persen	14.500.000		Masyarakat	100 Persen	27.555.250	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksidini HIV sesuai Standar	Kab. Soppeng, Marioriwawo , Marioriaja	100 Persen	2.000.000		Masyarakat	100 Persen	27.555.250	DINAS KESEHATAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah fasiitas layanan kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Kab. Soppeng, Marioriwawo , Marioriaja	1 layanan	203.575.000		Masyarakat	1 layanan	203.555.250	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah fasilitas layanan kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Kab. Soppeng, Marioriwawo , Marioriaja	1 layanan	24.025.000		Masyarakat	1 layanan	24.555.250	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Fasilitas Layangan Kesehatan yang melakukan Pengelolaan pelayanan Kerja dan Olahraga	Kab. Soppeng, Marioriwawo , Marioriaja	1 Layanan	1.600.000		Masyarakat	1 Layanan	24.555.250	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Kab. Soppeng, Marioriwawo , Marioriaja	1 Layanan	10.780.000		Masyarakat	1 Layanan	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan promosi kesehatan	Kab. Soppeng, Marioriwawo , Marioriaja	1 Layanan	47.980.000		Masyarakat	1 Layanan	24.555.250	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan Surveilans kesehatan	Kab. Soppeng, Marioriwawo , Marioriaja	1 Layanan	149.205.000		Masyarakat	1 Layanan	149.555.250	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	Kab. Soppeng, Marioriwawo , Marioriaja	1 Layanan	8.900.000		Masyarakat	1 Layanan	9.555.250	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Soppeng, Marioriwawo , Marioriaja	1 Layanan	64.640.000		Masyarakat	1 Layanan	64.555.250	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang memanfaatkan bantuan Operasional Kesehatan dalam pelayanan kesehatan	Kab. Soppeng, Marioriwawo , Marioriaja	1 Puskesmas	71.600.000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Masyarakat	1 Puskesmas	742.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Soppeng, Marioriwawo , Marioriaja	2 Kali	7.200.000		Masyarakat	2 Kali	7.555.250	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Kewaspadaan Dini dan respon wabah yang dilaksanakan	Kab. Soppeng, Marioriwawo , Marioriaja	1 Kali	375.000		Masyarakat	1 Kali	555.250	DINAS KESEHATAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Keterpenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		92 %	**12.000.000**			92 %	**12.000.000**	
1	**2**	**3**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		100 Persen	**12.000.000**			100 Persen	**12.000.000**	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Tenaga Kesehatan yang diadakan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Marioriaja	1 Tenaga Kesehatan	12.000.000		Tenaga Kesehatan	1 Tenaga Kesehatan	12.000.000	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Cakupan Desa/Kelurahan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat		50 %	**25.960.000**			50 %	**26.000.000**	
1	**2**	**5**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	**25.960.000**			100 Persen	**26.000.000**	
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Marioriaja	1 Puskesmas	25.960.000		Masyarakat	1 Puskesmas	26.000.000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1.836.314.917**				**2.506.314.417**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kesehatan		100 %	**1.102.314.917**			100 %	**1.102.314.917**	
1	**2**	**1**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Kemandirian keuangan Puskesmas		100 Persen	**1.102.314.917**			100 Persen	**1.102.314.917**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah layanan BLUD Puskesmas yang terlaksana	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Goarie	1 Fasilitas Kesehatan	1.102.314.917	Pendapatan dari BLUD	Masyarakat	1 Fasilitas Kesehatan	1.102.314.917	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN**	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		100 %	**678.915.000**			100 %	**1.348.932.500**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		100 %				100 %		
						Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		100 %				100 %		
						Jumlah ibu hamil mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara terduga Tubercolosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah Warga Negara usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		100 %				100 %		
						Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan talangan Pemda.		100 %				100 %		
						Persentase Masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan.		100 %				100 %		
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pelaksanaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	**678.915.000**			100 Persen	**1.348.932.500**	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentae Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Marioriteng nga	100 Persen	35.129.500		Masyarakat	100 Persen	35.129.500	DINAS KESEHATAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Marioriteng nga	100 Persen	19.649.500		Masyarakat	100 Persen	19.651.500	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Marioriteng nga	100 Persen	10.350.000		Masyarakat	100 Persen	10.350.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Marioriteng nga	100 Persen	21.029.500		Masyarakat	100 Persen	21.051.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Marioriteng nga	100 Persen	35.533.500		Masyarakat	100 Persen	35.502.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Marioriteng nga	100 Persen	6.700.500		Masyarakat	100 Persen	6.700.500	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Marioriteng nga	100 Persen	6.700.500		Masyarakat	100 Persen	6.700.500	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Marioriteng nga	100 Persen	6.700.500		Masyarakat	100 Persen	6.700.500	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Kab. Soppeng, Marioriwawo	100 Persen	6.725.000		Masyarakat	100 Persen	6.725.000	DINAS KESEHATAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							, Marioriteng nga							
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Kab. Soppeng, Marioriwawo , Marioriteng nga	100 Persen	2.200.000		Masyarakat	100 Persen	2.200.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksidini HIV sesuai Standar	Kab. Soppeng, Marioriwawo , Marioriteng nga	100 Persen	1.100.000		Masyarakat	100 Persen	1.100.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah fasiitas layanan kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Kab. Soppeng, Marioriwawo , Marioriteng nga	1 layanan	262.875.000		Masyarakat	1 layanan	262.900.500	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah fasilitas layanan kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Kab. Soppeng, Marioriwawo , Marioriteng nga	1 layanan	26.051.000		Masyarakat	1 layanan	26.051.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Fasilitas Layangan Kesehatan yang melakukan Pengelolaan pelayanan Kerja dan Olahraga	Kab. Soppeng, Marioriwawo , Marioriteng nga	1 Layanan	22.203.000		Masyarakat	1 Layanan	22.203.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Kab. Soppeng, Marioriwawo , Marioriteng nga	1 Layanan	20.700.500		Masyarakat	1 Layanan	20.700.500	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan promosi kesehatan	Kab. Soppeng, Marioriwawo , Marioriteng nga	1 Layanan	32.000.000		Masyarakat	1 Layanan	32.000.000	DINAS KESEHATAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan Surveilans kesehatan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Marioriteng nga	1 Layanan	42.666.500		Masyarakat	1 Layanan	42.666.500	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Marioriteng nga	1 Layanan	2.200.000		Masyarakat	1 Layanan	2.200.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Marioriteng nga	1 Layanan	45.200.000		Masyarakat	1 Layanan	45.200.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang memanfaatkan bantuan Operasional Kesehatan dalam pelayanan kesehatan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Marioriteng nga	1 Puskesmas	64.000.000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Masyarakat	1 Puskesmas	734.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Marioriteng nga	2 Kali	1.400.000		Masyarakat	2 Kali	1.400.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Kewaspadaan Dini dan respon wabah yang dilaksanakan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Marioriteng nga	1 Kali	7.800.500		Masyarakat	1 Kali	7.800.500	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Keterpenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		92 %	**24.000.000**			92 %	**24.000.000**	
1	**2**	**3**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP**	Persentase Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		100 Persen	**24.000.000**			100 Persen	**24.000.000**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota									
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Tenaga Kesehatan yang diadakan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Marioriteng nga	2 Tenaga Kesehatan	24.000.000		Tenaga Kesehatan	2 Tenaga Kesehatan	24.000.000	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Cakupan Desa/Kelurahan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat		50 %	**31.085.000**			50 %	**31.067.000**	
1	**2**	**5**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	**31.085.000**			100 Persen	**31.067.000**	
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Marioriteng nga	1 Puskesmas	31.085.000		Masyarakat	1 Puskesmas	31.067.000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**2.643.219.008**				**3.286.813.658**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kesehatan		100 %	**1.937.219.008**			100 %	**1.937.219.008**	
1	**2**	**1**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Kemandirian keuangan Puskesmas		100 Persen	**1.937.219.008**			100 Persen	**1.937.219.008**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah layanan BLUD Puskesmas yang terlaksana	Kab. Soppeng, Donri Donri, Labokong	1 Layanan	1.937.219.008	Pendapatan dari BLUD	Masyarakat	1 Layanan	1.937.219.008	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Jumlah ibu hamil mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.		100 % 100 % 100 % 100 %	**670.000.000**			100 % 100 % 100 % 100 %	**1.313.594.650**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
						Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara terduga Tubercolosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah Warga Negara usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		100 %				100 %		
						Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan talangan Pemda.		100 %				100 %		
						Persentase Masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan.		100 %				100 %		
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pelaksanaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	**670.000.000**			100 Persen	**1.313.594.650**	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	100 Persen	20.430.300		Masyarakat	100 Persen	20.430.300	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	100 Persen	12.190.500		Masyarakat	100 Persen	12.190.500	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	100 Persen	7.150.000		Masyarakat	100 Persen	7.150.000	DINAS KESEHATAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	100 Persen	16.323.500		Masyarakat	100 Persen	16.323.500	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	100 Persen	31.340.500		Masyarakat	100 Persen	31.340.500	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	100 Persen	5.700.000		Masyarakat	100 Persen	5.700.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	100 Persen	10.390.500		Masyarakat	100 Persen	10.390.500	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	100 Persen	10.390.500		Masyarakat	100 Persen	10.390.500	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	100 Persen	3.000.000		Masyarakat	100 Persen	3.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	100 Persen	8.150.000		Masyarakat	100 Persen	8.150.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksidini HIV sesuai Standar	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	100 Persen	4.950.000		Masyarakat	100 Persen	4.950.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah fasiitas layanan kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	1 layanan	202.410.000		Masyarakat	1 layanan	202.410.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah fasilitas layanan kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	1 layanan	33.065.500		Masyarakat	1 layanan	33.065.500	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Fasilitas Layangan Kesehatan yang melakukan Pengelolaan pelayanan Kerja dan Olahraga	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	1 Layanan	5.340.000		Masyarakat	1 Layanan	5.340.000	DINAS KESEHATAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	1 Layanan	13.065.000		Masyarakat	1 Layanan	13.065.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan promosi kesehatan	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	1 Layanan	75.520.000		Masyarakat	1 Layanan	75.520.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan Surveilans kesehatan	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	1 Layanan	73.817.350		Masyarakat	1 Layanan	73.817.350	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	1 Layanan	1.800.000		Masyarakat	1 Layanan	1.800.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	1 Layanan	68.561.000		Masyarakat	1 Layanan	68.561.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang memanfaatkan bantuan Operasional Kesehatan dalam pelayanan kesehatan	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	1 Puskesmas	62.405.350	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Masyarakat	1 Puskesmas	706.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	2 Kali	3.650.000		Masyarakat	2 Kali	3.650.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Kewaspadaan Dini dan respon wabah yang dilaksanakan	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	1 Kali	350.000		Masyarakat	1 Kali	350.000	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Keterpenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		92 %	**36.000.000**			92 %	**36.000.000**	
1	**2**	**3**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		100 Persen	**36.000.000**			100 Persen	**36.000.000**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Tenaga Kesehatan yang diadakan	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	3 Tenaga Kesehatan	36.000.000		Tenaga Kesehatan	3 Tenaga Kesehatan	36.000.000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1.521.055.567**				**2.198.363.817**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kesehatan		100 %	**847.055.567**			100 %	**847.055.567**	
1	**2**	**1**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Kemandirian keuangan Puskesmas		100 Persen	**847.055.567**			100 Persen	**847.055.567**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah layanan BLUD Puskesmas yang terlaksana	Kab. Soppeng, Donri Donri, Lalabatariaja	1 Fasilitas Kesehatan	847.055.567	Pendapatan dari BLUD	Masyarakat	1 Fasilitas Kesehatan	847.055.567	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		100 %	**615.805.000**			100 %	**1.293.114.000**	
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		100 %				100 %		
						Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		100 %				100 %		
						Jumlah ibu hamil mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara terduga Tubercolosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
						Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Jumlah Warga Negara usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan talangan Pemda. Persentase Masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan.		100 % 100 % 100 % 100 %				100 % 100 % 100 % 100 %		
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pelaksanaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	**615.805.000**			100 Persen	**1.293.114.000**	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kab. Soppeng, Donri Donri, Leworeng	100 Persen	13.770.000		Masyarakat	100 Persen	13.770.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	Kab. Soppeng, Donri Donri, Leworeng	100 Persen	5.500.000		Masyarakat	100 Persen	13.770.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Kab. Soppeng, Donri Donri, Leworeng	100 Persen	12.400.000		Masyarakat	100 Persen	13.770.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Kab. Soppeng, Donri Donri, Leworeng	100 Persen	12.540.000		Masyarakat	100 Persen	13.770.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Donri Donri, Leworeng	100 Persen	14.450.000		Masyarakat	100 Persen	14.450.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Donri Donri, Leworeng	100 Persen	2.750.000		Masyarakat	100 Persen	2.750.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Donri Donri, Leworeng	100 Persen	1.490.000		Masyarakat	100 Persen	2.750.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng,	100 Persen	1.000.000		Masyarakat	100 Persen	2.750.000	DINAS KESEHATAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Donri Donri, Leworeng							
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Kab. Soppeng, Donri Donri, Leworeng	100 Persen	3.025.000		Masyarakat	100 Persen	3.025.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Kab. Soppeng, Donri Donri, Leworeng	100 Persen	4.125.000		Masyarakat	100 Persen	4.125.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksidini HIV sesuai Standar	Kab. Soppeng, Donri Donri, Leworeng	100 Persen	825.000		Masyarakat	100 Persen	825.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah fasiitas layanan kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Kab. Soppeng, Donri Donri, Leworeng	1 layanan	207.975.000		Masyarakat	1 layanan	207.975.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah fasilitas layanan kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Kab. Soppeng, Donri Donri, Leworeng	1 layanan	31.875.000		Masyarakat	1 layanan	31.875.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Fasilitas Layangan Kesehatan yang melakukan Pengelolaan pelayanan Kerja dan Olahraga	Kab. Soppeng, Donri Donri, Leworeng	1 Layanan	2.490.000		Masyarakat	1 Layanan	2.490.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Kab. Soppeng, Donri Donri, Leworeng	1 Layanan	18.894.500		Masyarakat	1 Layanan	18.894.500	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan promosi kesehatan	Kab. Soppeng, Donri Donri, Leworeng	1 Layanan	46.179.700		Masyarakat	1 Layanan	46.179.500	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan Surveilans kesehatan	Kab. Soppeng, Donri Donri, Leworeng	1 Layanan	120.667.700		Masyarakat	1 Layanan	120.667.500	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	Kab. Soppeng, Donri Donri, Leworeng	1 Layanan	825.000		Masyarakat	1 Layanan	51.538.750	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Soppeng,	1 Layanan	51.538.750		Masyarakat	1 Layanan	51.538.750	DINAS KESEHATAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Donri Donri, Leworeng							
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang memanfaatkan bantuan Operasional Kesehatan dalam pelayanan kesehatan	Kab. Soppeng, Donri Donri, Lalabatariaja	1 Puskesmas	61.284.350	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Masyarakat	1 Puskesmas	674.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Soppeng, Donri Donri, Leworeng	2 Kali	825.000		Masyarakat	2 Kali	825.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Kewaspadaan Dini dan respon wabah yang dilaksanakan	Kab. Soppeng, Donri Donri, Leworeng	1 Kali	1.375.000		Masyarakat	1 Kali	1.375.000	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Keterpenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		92 %	**24.000.000**			92 %	**24.000.000**	
1	**2**	**3**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		100 Persen	**24.000.000**			100 Persen	**24.000.000**	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Tenaga Kesehatan yang diadakan	Kab. Soppeng, Donri Donri, Leworeng	2 Tenaga Kesehatan	24.000.000		Tenaga Kesehatan	2 Tenaga Kesehatan	24.000.000	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Cakupan Desa/Kelurahan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat		50 %	**34.195.000**			50 %	**34.194.250**	
1	**2**	**5**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	**34.195.000**			100 Persen	**34.194.250**	
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Soppeng, Donri Donri, Leworeng	1 Puskesmas	34.195.000		Masyarakat	1 Puskesmas	34.194.250	DINAS KESEHATAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1.806.735.695**				**2.404.603.695**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kesehatan		100 %	**1.100.735.695**			100 %	**1.100.735.695**	
1	**2**	**1**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Kemandirian keuangan Puskesmas		100 Persen	**1.100.735.695**			100 Persen	**1.100.735.695**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah layanan BLUD Puskesmas yang terlaksana	Kab. Soppeng, Marioriawa, Attang Salo	1 Fasilitas Kesehatan	1.100.735.695	Pendapatan dari BLUD	Masyarakat	1 Fasilitas Kesehatan	1.100.735.695	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		100 %	**649.750.000**			100 %	**1.256.118.000**	
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		100 %				100 %		
						Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		100 %				100 %		
						Jumlah ibu hamil mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara terduga Tubercolosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah Warga Negara usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		100 %				100 %		



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
						Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan talangan Pemda. Persentase Masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan.		100 % 100 %				100 % 100 %		
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pelaksanaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	**649.750.000**			100 Persen	**1.256.118.000**	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentae Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kab. Soppeng, Marioriawa, Panincong	100 Persen	18.855.000		Masyarakat	100 Persen	19.478.250	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Panincong	100 Persen	11.630.000		Masyarakat	100 Persen	19.478.250	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Kab. Soppeng, Marioriawa, Panincong	100 Persen	7.950.000		Masyarakat	100 Persen	19.478.250	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Kab. Soppeng, Marioriawa, Panincong	100 Persen	15.180.000		Masyarakat	100 Persen	19.478.250	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Marioriawa, Panincong	100 Persen	8.295.000		Masyarakat	100 Persen	19.478.250	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Marioriawa, Panincong	100 Persen	11.750.000		Masyarakat	100 Persen	19.478.250	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Marioriawa, Panincong	100 Persen	8.350.000		Masyarakat	100 Persen	19.478.250	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Marioriawa, Panincong	100 Persen	8.350.000		Masyarakat	100 Persen	19.478.250	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Kab. Soppeng, Marioriawa, Panincong	100 Persen	6.175.000		Masyarakat	100 Persen	19.478.250	DINAS KESEHATAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Kab. Soppeng, Marioriawa, Panincong	100 Persen	5.950.000		Masyarakat	100 Persen	19.478.250	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksidini HIV sesuai Standar	Kab. Soppeng, Marioriawa, Panincong	100 Persen	1.750.000		Masyarakat	100 Persen	19.478.250	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah fasiitas layanan kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Kab. Soppeng, Marioriawa, Panincong	1 layanan	206.425.000		Masyarakat	1 layanan	202.478.250	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah fasilitas layanan kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Kab. Soppeng, Marioriawa, Panincong	1 layanan	44.060.000		Masyarakat	1 layanan	44.064.500	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Fasilitas Layangan Kesehatan yang melakukan Pengelolaan pelayanan Kerja dan Olahraga	Kab. Soppeng, Marioriawa, Panincong	1 Layanan	7.625.000		Masyarakat	1 Layanan	7.064.500	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Panincong	1 Layanan	11.750.000		Masyarakat	1 Layanan	11.750.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan promosi kesehatan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Panincong	1 Layanan	44.060.000		Masyarakat	1 Layanan	11.750.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan Surveilans kesehatan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Panincong	1 Layanan	76.785.000		Masyarakat	1 Layanan	11.750.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	Kab. Soppeng, Marioriawa, Panincong	1 Layanan	3.850.000		Masyarakat	1 Layanan	11.750.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Soppeng, Marioriawa, Panincong	1 Layanan	85.650.000		Masyarakat	1 Layanan	11.750.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang memanfaatkan bantuan Operasional Kesehatan dalam pelayanan kesehatan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Attang Salo	1 Puskesmas	57.960.000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Masyarakat	1 Puskesmas	706.000.000	DINAS KESEHATAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Kab. Soppeng, Marioriawa, Panincong		4.600.000		Masyarakat		11.750.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Kewaspadaan Dini dan respon wabah yang dilaksanakan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Panincong	1 Kali	2.750.000		Masyarakat	1 Kali	11.750.000	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Keterpenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		92 %	**36.000.000**			92 %	**11.750.000**	
1	**2**	**3**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		100 Persen	**36.000.000**			100 Persen	**11.750.000**	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Tenaga Kesehatan yang diadakan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Panincong	1 Tenaga Kesehatan	36.000.000		Tenaga Kesehatan	1 Tenaga Kesehatan	11.750.000	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Cakupan Desa/Kelurahan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat		50 %	**20.250.000**			50 %	**36.000.000**	
1	**2**	**5**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	**20.250.000**			100 Persen	**36.000.000**	
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Soppeng, Marioriawa, Panincong	1 Puskesmas	20.250.000		Masyarakat	1 Puskesmas	36.000.000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**2.880.717.063**				**3.423.314.563**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kesehatan		100 %	**2.138.717.063**			100 %	**2.138.717.063**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					DAERAH KABUPATEN/KOTA									
1	**2**	**1**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Kemandirian keuangan Puskesmas		100 Persen	**2.138.717.063**			100 Persen	**2.138.717.063**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah layanan BLUD Puskesmas yang terlaksana	Kab. Soppeng, Marioriawa, Manorang Salo	1 Fasilitas Kesehatan	2.138.717.063	Pendapatan dari BLUD	Masyarakat	1 Fasilitas Kesehatan	2.138.717.063	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		100 %	**710.575.000**			100 %	**1.252.319.250**	
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		100 %				100 %		
						Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		100 %				100 %		
						Jumlah ibu hamil mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara terduga Tubercolosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah Warga Negara usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		100 %				100 %		
						Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan talangan Pemda.		100 %				100 %		
						Persentase Masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan.		100 %				100 %		



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pelaksanaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	**710.575.000**			100 Persen	**1.252.319.250**	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	100 Persen	27.000.000		Masyarakat	100 Persen	27.747.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	100 Persen	12.165.000		Masyarakat	100 Persen	27.747.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	100 Persen	6.725.000		Masyarakat	100 Persen	27.747.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	100 Persen	27.775.000		Masyarakat	100 Persen	27.747.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	100 Persen	24.125.000		Masyarakat	100 Persen	27.747.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	100 Persen	11.550.000		Masyarakat	100 Persen	11.550.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	100 Persen	14.600.000		Masyarakat	100 Persen	11.550.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	100 Persen	14.600.000		Masyarakat	100 Persen	11.550.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	100 Persen	2.775.000		Masyarakat	100 Persen	11.550.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	100 Persen	7.000.000		Masyarakat	100 Persen	11.550.000	DINAS KESEHATAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksidini HIV sesuai Standar	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	100 Persen	1.400.000		Masyarakat	100 Persen	11.550.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah fasiitas layanan kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	1 layanan	207.000.000		Masyarakat	1 layanan	11.550.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah fasilitas layanan kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	1 layanan	35.425.000		Masyarakat	1 layanan	35.447.750	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Fasilitas Layangan Kesehatan yang melakukan Pengelolaan pelayanan Kerja dan Olahraga	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	1 Layanan	5.115.000		Masyarakat	1 Layanan	5.447.750	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	1 Layanan	12.850.000		Masyarakat	1 Layanan	15.447.750	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan promosi kesehatan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	1 Layanan	51.575.000		Masyarakat	1 Layanan	51.447.750	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan Surveilans kesehatan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	1 Layanan	92.396.650		Masyarakat	1 Layanan	92.447.750	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	1 Layanan	1.700.000		Masyarakat	1 Layanan	2.447.750	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	1 Layanan	83.091.800		Masyarakat	1 Layanan	82.447.750	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang memanfaatkan bantuan Operasional Kesehatan dalam pelayanan kesehatan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Manorang Salo	1 Puskesmas	66.306.550	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Masyarakat	1 Puskesmas	742.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca	Jumlah Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	2 Kali	2.800.000		Masyarakat	2 Kali	2.800.000	DINAS KESEHATAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									
1	2	2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Kewaspadaan Dini dan respon wabah yang dilaksanakan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	1 Kali	2.600.000		Masyarakat	1 Kali	2.800.000	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Keterpenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		92 %	**12.000.000**			92 %	**12.800.000**	
1	**2**	**3**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		100 Persen	**12.000.000**			100 Persen	**12.800.000**	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Tenaga Kesehatan yang diadakan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	1 Tenaga Kesehatan	12.000.000		Tenaga Kesehatan	1 Tenaga Kesehatan	12.800.000	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Cakupan Desa/Kelurahan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat		50 %	**19.425.000**			50 %	**19.478.250**	
1	**2**	**5**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	**19.425.000**			100 Persen	**19.478.250**	
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	1 Puskesmas	19.425.000		Masyarakat	1 Puskesmas	19.478.250	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1.677.837.521**				**2.446.508.021**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kesehatan		100 %	**991.837.521**			100 %	**991.837.521**	
1	**2**	**1**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Kemandirian keuangan Puskesmas		100 Persen	**991.837.521**			100 Persen	**991.837.521**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah layanan BLUD Puskesmas yang terlaksana	Kab. Soppeng, Ganra, Belo	1 Fasilitas Kesehatan	991.837.521	Pendapatan dari BLUD	Masyarakat	1 Fasilitas Kesehatan	991.837.521	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		100 %	**610.750.000**			100 %	**1.379.408.500**	
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		100 %				100 %		
						Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		100 %				100 %		
						Jumlah ibu hamil mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara terduga Tubercolosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.		100 %				100 %		
						Jumlah Warga Negara usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		100 %				100 %		
						Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan talangan Pemda.		100 %				100 %		
						Persentase Masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan.		100 %				100 %		
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pelaksanaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	**610.750.000**			100 Persen	**1.379.408.500**	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kab. Soppeng,	100 Persen	30.140.000		Masyarakat	100 Persen	30.140.850	DINAS KESEHATAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Ganra, Ganra							
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	100 Persen	13.260.000		Masyarakat	100 Persen	30.140.850	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	100 Persen	9.150.000		Masyarakat	100 Persen	30.140.850	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	100 Persen	22.000.000		Masyarakat	100 Persen	30.140.850	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	100 Persen	37.875.000		Masyarakat	100 Persen	30.140.850	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	100 Persen	6.800.000		Masyarakat	100 Persen	30.140.850	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	100 Persen	2.475.000		Masyarakat	100 Persen	30.140.850	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	100 Persen	6.250.000		Masyarakat	100 Persen	30.140.850	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	100 Persen	6.500.000		Masyarakat	100 Persen	30.140.850	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksidini HIV sesuai Standar	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	100 Persen	3.250.000		Masyarakat	100 Persen	30.140.850	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah fasiitas layanan kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	1 layanan	201.550.000		Masyarakat	1 layanan	200.400.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah fasilitas layanan kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Kab. Soppeng,	1 layanan	17.450.000		Masyarakat	1 layanan	17.400.000	DINAS KESEHATAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Ganra, Ganra							
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Fasilitas Layangan Kesehatan yang melakukan Pengelolaan pelayanan Kerja dan Olahraga	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	1 Layanan	9.700.000		Masyarakat	1 Layanan	17.400.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	1 Layanan	8.975.000		Masyarakat	1 Layanan	17.400.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan promosi kesehatan	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	1 Layanan	42.650.000		Masyarakat	1 Layanan	17.400.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan Surveilans kesehatan	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	1 Layanan	48.175.000		Masyarakat	1 Layanan	48.400.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	1 Layanan	4.750.000		Masyarakat	1 Layanan	4.400.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pengelolaan pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	1 Layanan	57.975.000		Masyarakat	1 Layanan	58.400.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang memanfaatkan bantuan Operasional Kesehatan dalam pelayanan kesehatan	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	1 Puskesmas	70.700.000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Masyarakat	1 Puskesmas	686.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	2 Kali	5.250.000		Masyarakat	2 Kali	5.400.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Kewaspadaan Dini dan respon wabah yang dilaksanakan	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	1 Kali	5.875.000		Masyarakat	1 Kali	5.400.000	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Keterpenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		92 %	**36.000.000**			92 %	**36.000.000**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	**2**	**3**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		100 Persen	**36.000.000**			100 Persen	**36.000.000**	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Tenaga Kesehatan yang diadakan	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	3 Tenaga Kesehatan	36.000.000		Tenaga Kesehatan	3 Tenaga Kesehatan	36.000.000	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Cakupan Desa/Kelurahan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat		50 %	**39.250.000**			50 %	**39.262.000**	
1	**2**	**5**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	**39.250.000**			100 Persen	**39.262.000**	
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	1 Puskesmas	39.250.000		Masyarakat	1 Puskesmas	39.262.000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**350.714.780**				**322.560.000**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kesehatan		100 %	**88.353.440**			100 %	**86.072.605**	
1	**2**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**28.925.440**			100 %	**28.594.605**	
1	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	2 Jenis	3.288.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Laboratorium Kesehatan Daerah	2 Jenis	2.894.765	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	18000 Lembar	7.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Laboratorium Kesehatan Daerah	18000 Lembar	7.700.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng,	4 Jenis	17.986.840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Laboratorium Kesehatan Daerah	4 Jenis	17.999.840	DINAS KESEHATAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Lalabata, Lemba							
1	**2**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	**25.428.000**			100 %	**23.478.000**	
1	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telepon Jumlah pemenuhan jasa air Jumlah pemenuhan listrik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	12 Kali 12 Kali 12 Kali	17.628.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	LABKESDA	12 Kali 12 Kali 12 Kali	17.628.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	1 Paket	7.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	LABKESDA	1 Paket	5.850.000	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	**34.000.000**			100 %	**34.000.000**	
1	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	1 Unit	34.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Barang Milik Daerah	1 Unit	34.000.000	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan		95 %	**262.361.340**			95 %	**236.487.395**	
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pelaksanaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	**262.361.340**			100 Persen	**236.487.395**	
1	2	2	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas kesehatan lainnya yang melaksanakan pelayanan kesehatan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	1 Fasilitas	262.361.340	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	1 Fasilitas	236.487.395	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1.940.526.468**				**1.942.000.000**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kesehatan		100 %	**334.187.218**			100 %	**334.187.218**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	**2**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**22.800.000**			100 %	**22.800.000**	
1	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	3 Jenis	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PSC 119	3 Jenis	1.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	1 Paket	6.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PSC 119	1 Paket	6.400.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	1 Paket	6.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PSC 119	1 Paket	6.400.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	1 Paket	8.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PSC 119	1 Paket	8.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg terfasilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	12 Kali	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PSC 119	12 Kali	1.000.000	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	**55.767.218**			100 %	**55.767.218**	
1	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telepon Jumlah pemenuhan jasa air Jumlah pemenuhan listrik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	12 Kali 12 Kali 12 Kali	55.767.218	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PSC 119	12 Kali 12 Kali 12 Kali	55.767.218	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	**255.620.000**			100 %	**255.620.000**	
1	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	13 Unit	252.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PSC 119	13 Unit	252.500.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	13 Unit	3.120.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PSC 119	13 Unit	3.120.000	DINAS KESEHATAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan		95 %	**1.606.339.250**			95 %	**1.607.812.782**	
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pelaksanaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	**1.606.339.250**			100 Persen	**1.607.812.782**	
1	2	2	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Fasilitas Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	1 Fasilitas	1.606.339.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	1 Fasilitas	1.607.812.782	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**126.175.278.000**				**150.594.000.000**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kesehatan		100 %	**79.950.000.000**			100 %	**80.000.000.000**	
1	**2**	**1**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Kemandirian keuangan RS		100 Persen	**79.950.000.000**			100 Persen	**80.000.000.000**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah layanan BLUD RS yang terlaksana	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	1 Fasilitas Kesehatan	79.950.000.000	Pendapatan dari BLUD	Masyarakat	1 Fasilitas Kesehatan	80.000.000.000	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Sesuai Standar		72 %	**46.225.278.000**			72 %	**70.594.000.000**	
1	**2**	**2**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota yang tersedia		100 Persen	**45.631.278.000**			100 Persen	**70.000.000.000**	
1	2	2	2.01	1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya yang dibangun	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	1 Paket	30.499.999.640	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	Sarana dan Prasaranan Kesehatan	1 Paket	30.000.000.000	DINAS KESEHATAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	2	2.01	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang dilakukan Rehabilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	1 Rumah Sakit	0	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	Sarana dan Prasaranan Kesehatan	1 Rumah Sakit	20.000.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Paket Alat kesehatan/ Alat penunjang Medik Fasilitas Kesehatan yang diadakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	1 Paket	15.131.278.360	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	Sarana dan Prasaranan Kesehatan	1 Paket	20.000.000.000	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pelaksanaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	**594.000.000**			100 Persen	**594.000.000**	
1	2	2	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Paket Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	15 Layanan	594.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rumah Sakit	15 Layanan	594.000.000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1	**3**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**69.315.758.348**				**74.679.968.932**	
1	**3**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		100 %	**15.060.225.473**			100 %	**15.509.968.732**	
1	**3**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu		100% 100% 100%	**32.075.000**			100% 100% 100%	**33.000.000**	
1	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Dokumen	11.125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Data-data Perencanaan dan Pelaporan	3 Dokumen	15.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	3.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Data-data Perencanaan dan Pelaporan	1 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata,	1 Dokumen	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Data-data Perencanaan dan Pelaporan	1 Dokumen	3.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Lalabata Rilau							PENATAAN RUANG
1	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	10 Dokumen	14.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Data-data Perencanaan dan Pelaporan	10 Dokumen	15.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**3**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**13.553.088.598**			100 %	**13.876.468.732**	
1	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	140 Orang	13.503.338.598	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Data reliasasi keuangan	140 Orang	13.830.468.732	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	750 SPM	9.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Data reliasasi keuangan	750 SPM	6.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	8 Dokumen	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Data reliasasi keuangan	8 Dokumen	40.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**3**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah		100 %	**8.250.000**			100 %	**10.000.000**	
1	3	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	6 Dokumen	8.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Data barang milik daerah	6 Dokumen	10.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**3**	**1**	2.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		100%	**1.527.904**			100%	**5.000.000**	
1	3	1	2.04	1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah objek retribusi yang terkelola	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Jenis	1.527.904	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Petugas retribusi daerah	3 Jenis	5.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**3**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	**45.300.000**			100 %	**42.500.000**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	3	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Dokumen	22.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Data administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5 Dokumen	25.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang terkelola	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Sistem Informasi	22.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Data administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Sistem Informasi	17.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**3**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**522.880.131**			100%	**548.000.000**	
1	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	7 Jenis	9.507.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Staf Dinas PUPR Kabupaten Soppeng	7 Jenis	10.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Paket	109.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Staf Dinas PUPR Kabupaten Soppeng	3 Paket	120.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Jenis	21.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Staf Dinas PUPR Kabupaten Soppeng	2 Jenis	25.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Paket	70.382.931	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Staf Dinas PUPR Kabupaten Soppeng	5 Paket	75.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg terfasilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	360 Orang	7.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Staf Dinas PUPR Kabupaten Soppeng	360 Orang	18.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	800 Kali	304.590.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Staf Dinas PUPR Kabupaten Soppeng	800 Kali	300.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**3**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang**	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		82%	**47.200.000**			82%	**50.000.000**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					Urusan Pemerintah Daerah									
1	3	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Unit	47.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Staf Dinas PUPR Kabupaten Soppeng	3 Unit	50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**3**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	**356.884.550**			100 %	**370.000.000**	
1	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telepon Jumlah pemenuhan jasa air Jumlah pemenuhan listrik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	36 Kali	145.684.550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Staf Dinas PUPR Kabupaten Soppeng	36 Kali	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Jenis	211.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Staf Dinas PUPR Kabupaten Soppeng	2 Jenis	220.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**3**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	**493.019.290**			100 %	**575.000.000**	
1	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Unit	43.397.790	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Staf Dinas PUPR Kabupaten Soppeng	1 Unit	75.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	64 Unit	182.024.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Staf Dinas PUPR Kabupaten Soppeng	64 Unit	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.09	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	8 Unit	221.477.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Staf Dinas PUPR Kabupaten Soppeng	8 Unit	250.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata,	26 Unit	20.620.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Staf Dinas PUPR Kabupaten Soppeng	26 Unit	20.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Lalabata Rilau							PENATAAN RUANG
1	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	400 m2	25.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Staf Dinas PUPR Kabupaten Soppeng	400 m2	30.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**3**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		0,20 0,68	**17.531.186.500**			0,20 0,68	**20.580.000.000**	
1	**3**	**2**	2.01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota		573.9 Ha	**38.600.000**			573.9 Ha	**100.000.000**	
1	3	2	2.01	4	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen database sungai yang tersusun	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	38.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kawasan Permukiman Rawan Banjir	1 Dokumen	100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**3**	**2**	2.02		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		6627 Ha	**17.492.586.500**			6627 Ha	**20.480.000.000**	
1	3	2	2.02	8	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Luas daerah irigasi potensial kewenangan kabupaten yang dibangun	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300 Ha	17.196.104.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Jaringan Irigasi Kabupaten Soppeng	300 Ha	20.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	2	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Saluran yang terpelihara secara OP	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600 m	62.632.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jaringan Irigasi Kabupaten Soppeng	600 m	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	3	2	2.02	27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang tertangani	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	15.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jaringan Irigasi Kabupaten Soppeng	1 Unit	30.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	2	2.02	28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Petugas OP Irigasi	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	218.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jaringan Irigasi Kabupaten Soppeng	50 Orang	300.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**3**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari		100 %	**4.329.374.000**			100 %	**9.500.000.000**	
1	**3**	**3**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola dan dikembangkan		1 Unit	**4.329.374.000**			1 Unit	**9.500.000.000**	
1	3	3	2.01	4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sarana dan prasarana air bersih yang terbangun	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Unit	547.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Pengguna Air Bersih	15 Unit	5.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	3	2.01	19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Tinggal dengan akses Jaringan Perpipaan yang dikembangkan/diperluas di kawasan Perdesaan		500 Unit	3.782.174.000	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	Masyarakat Pengguna Air Bersih	500 Unit	4.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**3**	**5**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik		100 %	**1.919.053.000**			100 %	**3.150.000.000**	
1	**3**	**5**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten yang dikelola dan dikembangkan		311 Unit	**1.919.053.000**			311 Unit	**3.150.000.000**	
1	3	5	2.01	6	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Sarana dan Prasarana Sub Sistem Pengolahan setempat yang terbangun/tersedia	Kab. Soppeng, Semua	300 Unit	1.791.853.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Masyarakat	300 Unit	3.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Kecamatan, Semua Kelurahan							PENATAAN RUANG
1	3	5	2.01	14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah rumah tangga yang terlayani Layanan Lumpur Tinja	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300 Rumah Tangga	127.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	300 Rumah Tangga	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**3**	**8**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Rasio Kepatuhan IMB		0,55 %	**19.550.000**			0,55 %	**25.000.000**	
1	**3**	**8**	2.01		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi		0.0008 Rasio	**19.550.000**			0.0008 Rasio	**25.000.000**	
1	3	8	2.01	1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah pengawasan perizinan bangunan yang terfasilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	200 Kali	19.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	200 Kali	25.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**3**	**#**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota		59 %	**29.567.045.475**			59 %	**25.620.000.000**	
1	**3**	**#**	2.01		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	Panjang jalan yang dibangun, ditingkatkan, derehabilitasi dan dipelihara kabupaten		20 Km	**29.567.045.475**			20 Km	**25.620.000.000**	
1	3	10	2.01	4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen database jalan dan jembatan yang tersusun	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	40.875.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jalan Kabupaten	1 Dokumen	120.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	10	2.01	9	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang ditingkatkan statusnya	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan,	4 Km	24.905.932.335	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Transfer	Jalan Kabupaten	4 Km	20.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semua Kelurahan			Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				
1	3	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang terpelihara	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Km	313.234.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jalan Kabupaten	10 Km	300.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang terbangun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	20 m	4.157.043.390	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jalan Kabupaten	20 m	5.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang terpelihara secara rutin	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 m	149.960.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jalan Kabupaten	100 m	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**3**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi		0,25	**52.150.000**			0,30	**50.000.000**	
1	**3**	**11**	2.01		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang dilatih		50 Orang	**17.100.000**			50 Orang	**20.000.000**	
1	3	11	2.01	6	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang tersertifikasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	40 Orang	17.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tenaga Kerja Konstruksi	40 Orang	20.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**3**	**11**	2.03		**Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)**	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) yang diterbitkan		35 Rekomendasi	**17.950.000**			35 Rekomendasi	**20.000.000**	
1	3	11	2.03	2	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah rekomendasi IUJK yang terbit	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 Rekomendasi	17.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perusahaan Konstruksi	35 Rekomendasi	20.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**3**	**11**	2.04		**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	Jumlah Laporan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		1 Dokumen	**17.100.000**			1 Dokumen	**10.000.000**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	3	11	2.04	2	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang terlatih	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	40 Orang	17.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyelenggara Konstruksi	40 Orang	10.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**3**	**#**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Ketaatan Terhadap RTRW		40 %	**837.173.900**			43 %	**245.000.200**	
1	**3**	**#**	2.01		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	Jumlah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab yang disusun		1 Dokumen	**209.998.900**			1 Dokumen	**200**	
1	3	12	2.01	1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persub RTRW yang tersusun		1 Dokumen	209.998.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PUPR Kabupaten Soppeng	1 Dokumen	200	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**3**	**#**	2.02		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah laporan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	**590.000.000**			1 Dokumen	**200.000.000**	
1	3	12	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RTRW yang tersusun		1 Dokumen	590.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PUPR Kabupaten Soppeng	1 Dokumen	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**3**	**#**	2.03		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten		1 Dokumen	**22.275.000**			1 Dokumen	**25.000.000**	
1	3	12	2.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah kegiatan pemantauan pemanfaatan ruang yang terlaksana	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Kali	22.275.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bangunan dan atau lahan di Kabupaten Soppeng	12 Kali	25.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**3**	**#**	2.04		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten		1 Dokumen	**14.900.000**			1 Dokumen	**20.000.000**	
1	3	12	2.04	4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah kegiatan pemantauan pemanfaatan ruang yang terlaksana	Kab. Soppeng, Lalabata,	12 Kali	14.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PUPR Kabupaten Soppeng	12 Kali	20.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Lalabata Rilau							PENATAAN RUANG
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1	**4**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**3.480.982.450**				**7.829.393.800**	
1	**4**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman			**2.854.784.000**				**3.459.393.800**	
1	**4**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu		100% 100% 100%	**83.347.000**			100% 100% 100%	**150.000.000**	
1	4	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	31.722.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	50.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	19.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	50.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	32.025.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	50.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	**4**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**2.405.624.827**			100 %	**2.654.393.800**	
1	4	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	2.373.249.827	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Orang	2.610.393.800	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	1 Paket	19.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	30.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semua Kelurahan							
1	4	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang tersusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	12.875.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	14.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	**4**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**280.392.173**			100 %	**376.000.000**	
1	4	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Jenis	2.266.573	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Jenis	6.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	57.701.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	70.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	65.790.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	100.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Jenis	11.994.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Jenis	50.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	62.364.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	100%	80.276.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	150.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semua Kelurahan							
1	**4**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	**17.200.000**			100 %	**150.000.000**	
1	4	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	17.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	150.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	**4**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	**20.000.000**			100 %	**30.000.000**	
1	4	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	30.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	**4**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	**48.220.000**			100 %	**99.000.000**	
1	4	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang berfungsi dengan baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	42.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	80.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Jenis	6.220.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Jenis	8.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	393 M2	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		393 M2	11.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	**4**	**2**				Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni		100 %	**118.853.000**			100 %	**550.000.000**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemda yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni		100 %				100 %		
1	**4**	**2**	2.01		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Jumlah Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana		2 Dokumen	**4.140.000**			2 Dokumen	**150.000.000**	
1	4	2	2.01	4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen	4.140.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Yang Terdampak Relokasi	2 dokumen	100.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	2	2.01	6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, Dan Rumah Khusus	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Yang Terdampak Relokasi	1 Dokumen	50.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	**4**	**2**	2.02		**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Jumlah Sosialisasi Yang Dilakukan		2 Kali	**4.840.000**			2 Kali	**100.000.000**	
1	4	2	2.02	1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	4.840.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Umum	100 Orang	100.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	**4**	**2**	2.03		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Jumlah Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Kabupaten Yang Dibangun dan Direhab		31 Unit	**100.715.000**			31 Unit	**200.000.000**	
1	4	2	2.03	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah yang direhabilitasi akibat bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 unit	100.715.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Yang Berpenghasilan Rendah Yang Terkena Dampak	30 unit	150.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	4	2	2.03	2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Yang Direncanakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Yang Berpenghasilan Rendah Yang Terkena Dampak	1 Dokumen	50.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	**4**	**2**	2.06		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	Jumlah Rekomendasi Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Yang Diterbitkan		100 Persen	**9.158.000**			100 Persen	**100.000.000**	
1	4	2	2.06	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Pertemuan Koordinasi Dan Sinkronisasi Yang Dilakukan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	9.158.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Umum	100 Persen	100.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	**4**	**3**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang Ditangani		25.23 Ha	**105.305.450**			25.23 Ha	**1.320.000.000**	
1	**4**	**3**	2.01		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	Jumlah Rekomendasi Izin Pembangunan dan Pengmbangan Kawasan Permukiman Yang Diterbitkan (Rekomendasi)		100 Persen	**11.878.000**			100 Persen	**220.000.000**	
1	4	3	2.01	2	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Yang Disusun / Direview / Dilegalisasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Umum	1 Dokumen	200.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	3	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Persentase Pertemuan Koordinasi dan Sinkronisasi Yang Dihadiri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	11.878.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Umum	100 Persen	20.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	**4**	**3**	2.02		**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	Jumlah / Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 Ha Yang Ditata		100 Persen	**0**			100 Persen	**400.000.000**	
1	4	3	2.02	1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Persentase Jumlah Survey dan Penetapann Lokasi Yang Dilakukan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	100 Persen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kawasan Permukiman Yang Masuk Dalam SK Kumuh	100 Persen	200.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semua Kelurahan							
1	4	3	2.02	2	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Yang Disusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kawasan Permukiman Yang Masuk Dalam SK Kumuh	1 Dokumen	200.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	**4**	**3**	2.03		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	Jumlah / Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 Ha Yang Ditingkatkan Kwalitasnya		25.23 Ha	**93.427.450**			25.23 Ha	**700.000.000**	
1	4	3	2.03	1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Persentase Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan / Pemugaran Permukiman Kumuh	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kawasan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	200.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	3	2.03	2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah RTLH Yang DIbangun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Unit	93.427.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kawasan Permukiman Kumuh	6 Unit	200.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	3	2.03	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Persentase Kordinasi Dan Sinkronisasi Yang Dihadiri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kawasan Permukiman Kumuh	100 Persen	100.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	3	2.03	6	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Kumuh Yang Dibangun, Dipugar, dan Diremajakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.71 Ha	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kawasan Permukiman Kumuh	4.71 Ha	200.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	**4**	**4**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	Persentase Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang Ditingkatkan Persentase RTLH RT Miskin yang ditingkatkan			**0**				**200.000.000**	
1	**4**	**4**	2.01		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**				**0**				**200.000.000**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	4	4	2.01	1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Diperbaiki	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Unit	200.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	**4**	**5**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Jumlah Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		100 %	**402.040.000**			100 %	**2.300.000.000**	
1	**4**	**5**	2.01		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	Jumlah PSU Perumahan Yang Dibangun / Direhab (Kawasan)		1 Kawasan	**402.040.000**			1 Kawasan	**2.300.000.000**	
1	4	5	2.01	1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	11.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rumah Yang Terfasilitasi PSU	1 Dokumen	200.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	5	2.01	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Penyediaan PSU	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kawasan	389.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rumah Yang Terfasilitasi PSU	1 Kawasan	2.000.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Persentase Pertemuan Koordinasi dan Sinkronisasi Yang Dhadiri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2.040.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rumah Yang Terfasilitasi PSU	100 Persen	100.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2	**#**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**59.948.000**				**150.000.000**	
2	**#**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI**	Persentase Pemanfaatan Tanah yang Sesuai dengan Peruntukkan Tanahnya di Atas Izin Lokasi Dibandingkan dengan Luas Izin Lokasi yang Diterbitkan			**0**				**0**	
2	**#**	**2**	2.01		**Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**0**				**0**	
2	10	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian	Jumlah Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Semua Kab/Kota,	100 Persen	0			100 Persen	0	DINAS PERUMAHAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2	**#**	**4**			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang dilakukan Melalui Mediasi		100 %	**47.900.000**			100 %	**50.000.000**	
2	**#**	**4**	2.01		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten Yang Diselesaikan		100 Persen	**47.900.000**			100 Persen	**50.000.000**	
2	10	4	2.01	2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kasus	47.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Yang Terlibat Dalam Sengketa Tanah	1 Kasus	50.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2	**#**	**6**			**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	Persentase Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal Dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		100 %	**12.048.000**			100 %	**100.000.000**	
2	**#**	**6**	2.01		**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Sertifikat Hak Milik Yang Dikeluarkan		100 Persen	**12.048.000**			100 Persen	**100.000.000**	
2	10	6	2.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Koordinasi Yang Dihadiri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12.048.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	100 Persen	100.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1	**5**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**13.608.172.425**				**13.673.406.973**	
1	**5**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		100 %	**6.476.428.025**			100 %	**6.515.888.823**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	**5**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu		100 % 100 % 100 %	**21.257.700**			100 % 100 % 100 %	**21.250.000**	
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	4.257.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor SATPOL PP & PMK	2 Dokumen	4.250.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	11.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor SATPOL PP & PMK	2 Dokumen	11.100.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	8 Dokumen	5.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor SATPOL PP & PMK	8 Dokumen	5.900.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	**5**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**5.466.608.786**			100 %	**5.540.218.533**	
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	55 ASN	5.445.251.786	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Sat Pol PP dan PMK	55 ASN	5.519.046.533	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	29 SPM	4.332.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Sat Pol PP dan PMK	29 SPM	4.332.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	20 Dokumen	17.025.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Sat Pol PP dan PMK	20 Dokumen	16.840.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	**5**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah		100 %	**9.400.000**			100 %	**9.509.700**	
1	5	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah	Kab. Soppeng, Lalabata,	6 Dokumen	9.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Sat Pol PP dan PMK	6 Dokumen	9.509.700	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Lalabata Rilau							
1	**5**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	**9.400.000**			100 %	**16.400.000**	
1	5	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	6 Dokumen	9.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN	6 Dokumen	16.400.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	**5**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**247.876.477**			100 %	**223.960.200**	
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	19 Jenis	15.203.277	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Sat POL PP dan PMK	19 Jenis	8.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Paket	35.315.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Sat POL PP dan PMK	2 Paket	22.885.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Jenis	29.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Sat POL PP dan PMK	2 Jenis	22.750.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 jenis	91.248.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Sat POL PP dan PMK	4 jenis	91.215.400	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg terfasilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	200 orang	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Sat POL PP dan PMK	200 orang	7.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	203 Kali	72.109.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Sat POL PP dan PMK	203 Kali	72.109.800	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	**5**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang**	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	**18.500.000**			100 %	**18.000.000**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					Urusan Pemerintah Daerah									
1	5	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 unit	18.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Sat POL PP dan PMK	2 unit	18.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	**5**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	**103.988.942**			100 %	**88.419.770**	
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telepon Jumlah pemenuhan jasa air Jumlah pemenuhan listrik	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Kali	103.988.942	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Sat POL PP dan PMK	12 Kali	88.419.770	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	**5**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	**599.396.120**			100 %	**598.130.620**	
1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	40.527.685	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Sat POL PP dan PMK	1 Unit	40.527.685	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Unit	555.248.435	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Sat POL PP dan PMK	30 Unit	554.552.935	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	6 Unit	3.620.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Sat POL PP dan PMK	6 Unit	3.050.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	**5**	**2**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat Terselesaikan		100 % 100 %	**4.046.157.550**			100 % 100 %	**3.951.917.550**	
1	**5**	**2**	2.01		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam**	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota		100 %	**3.989.917.550**			100 %	**3.884.007.550**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
1	5	2	2.01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah patroli,pengamanan dan pengawalan yang dilakukan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	365 Kali	141.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anggota SAT POL PP & Masyarakat	365 Kali	142.375.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	2	2.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah anggota linmas yang terbina	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	120 Orang	8.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anggota SAT POL PP & Masyarakat	120 Orang	11.400.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	2	2.01	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah personil sat pol pp yang terbina	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	309 Orang	3.840.517.550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anggota SAT POL PP & Masyarakat	309 Orang	3.730.232.550	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	**5**	**2**	2.02		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	Persentase penegakan perda dan perkada yang ditegakkan		50 %	**51.200.000**			50 %	**62.870.000**	
1	5	2	2.02	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah perda dan perkada yang memuat sanksi	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 perda	51.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan Anggota Sat Pol PP	8 perda	62.870.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	**5**	**2**	2.03		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	Persentase PPNS yang terbina		100 %	**5.040.000**			100 %	**5.040.000**	
1	5	2	2.03	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang terbina	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Orang	5.040.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Personil PPNS	2 Orang	5.040.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	**5**	**4**			**PROGRAM PENCEGAHAN,**	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		100 %	**3.085.586.850**			100 %	**3.205.600.600**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Non Kebakaran		100 %				100 %		
1	**5**	**4**	2.01		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pencegahan, Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah		100 %	**3.071.311.850**			100 %	**3.105.600.600**	
1	5	4	2.01	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencegahan bahaya kebakaran yang dilaksanakan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Kali	37.655.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Petugas pemadam dan masyarakat	8 Kali	3.066.844.350	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	4	2.01	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah personil pemadam kebakaran		224 orang	3.019.714.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Petugas pemadam dan masyarakat	224 orang	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	4	2.01	6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah jenis sarana dan prasarana pencegahan kebakaran	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Jenis	13.942.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Petugas pemadam dan masyarakat	4 Jenis	38.756.250	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	**5**	**4**	2.05		**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia		100 %	**14.275.000**			100 %	**100.000.000**	
1	5	4	2.05	1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah petugas pencarian dan pertolongan terhadap peristiwa yang menimpa,membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia		35 Orang	14.275.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Petugas pemadam kebakaran dan masyarakat	35 Orang	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1	**5**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**4.404.947.720**				**0**	
1	**5**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah		100 %	**3.386.540.570**			100 %	**0**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
1	**5**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu		100 % 100 % 100 %	**44.387.450**			100 % 100 % 100 %	**0**	
1	5	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	26.814.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Soppeng	1 dokumen	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 dokumen	17.572.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Soppeng	11 dokumen	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**5**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**2.748.258.593**			100 %	**0**	
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23 ASN	2.686.284.093	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PNS Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten SOppeng	23 ASN	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 SPM	4.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PNS Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten SOppeng	100 SPM	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang tersusun	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 dokumen	57.324.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PNS Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten SOppeng	12 dokumen	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**5**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**253.457.755**			100 %	**0**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Jenis	1.499.855	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PNS Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Soppeng	10 Jenis	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	38.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PNS Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Soppeng	1 Paket	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95000 Lembar	21.749.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PNS Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Soppeng	95000 Lembar	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51 Jenis	55.592.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PNS Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Soppeng	51 Jenis	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg terfasilitasi	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	5.005.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PNS Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Soppeng	1 Tahun	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110 Kali	131.210.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PNS Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Soppeng	110 Kali	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**5**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	**22.350.000**			100 %	**0**	
1	5	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan,	2 Unit	22.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor BPBD	2 Unit	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semua Kelurahan							
1	**5**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	**169.811.000**			100 %	**0**	
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telepon Jumlah pemenuhan jasa air Jumlah pemenuhan listrik	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 kali	40.811.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor BPBD	12 kali	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 kali	129.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor BPBD	12 kali	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**5**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	**148.275.772**			100 %	**0**	
1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	37.632.920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pegawai BPBD	1 Unit	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 Unit	88.050.052	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pegawai BPBD	11 Unit	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Jenis	18.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pegawai BPBD	24 Jenis	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1100 M2	4.492.800		Pegawai BPBD	1100 M2	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	**5**	**3**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%) Persentase Keterpenuhan Regulasi, Kelembagaan dan Kerjasama dalam Penanggulangan Bencana		100 % 100 % 100 % 17,78	**1.018.407.150**			100 % 100 % 100 % 38,33	**0**	
1	**5**	**3**	2.01		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	Jumlah jenis layanan informasi rawan bencana		2 jenis	**229.324.700**			2 jenis	**0**	
1	5	3	2.01	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota Yang dilaksanakan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	229.324.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	1 Kegiatan	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**5**	**3**	2.02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	Jumlah layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		3 layanan	**590.353.450**			3 layanan	**0**	
1	5	3	2.02	7	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerusakan Bencana yang tersusun	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	41.125.000		Masyarakat	1 dokumen	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.02	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah TRC yang ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 orang	549.228.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	55 orang	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**5**	**3**	2.03		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	Persentase korban bencana yang dievakuasi		100 %	**198.729.000**			100 %	**0**	
1	5	3	2.03	2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kecepatan Respon untuk setiap penetapan status darurat bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-24 Jam	125.575.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	-24 Jam	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan	Jumlah Logistik yang disediakan	Kab. Soppeng, Semua	200 Paket	73.154.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	200 Paket	0	BADAN PENANGGULAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Kecamatan, Semua Kelurahan							GAN BENCANA DAERAH
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1	**6**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**7.918.796.892**				**7.830.119.000**	
1	**6**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Sosial		100 %	**5.054.108.232**			100 %	**2.524.215.000**	
1	**6**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu		100 % 100 % 100 %	**68.550.000**			100 % 100 % 100 %	**63.115.000**	
1	6	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 dokumen	21.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial Kabupaten Soppeng	3 dokumen	17.500.000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 dokumen	32.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial Kabupaten Soppeng	2 dokumen	24.000.000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 dokumen	14.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial Kabupaten Soppeng	4 dokumen	21.615.000	DINAS SOSIAL
1	**6**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**3.354.009.775**			100 %	**56.200.000**	
1	6	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 %	3.302.759.775	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial	100 %	0	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	300 SPM	21.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial	300 SPM	10.200.000	DINAS SOSIAL



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	6	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	50 dokumen	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial	50 dokumen	21.000.000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jomlah Dokumen Pelaporan Keuangan Yang Disusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Dokumen	15.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial	3 Dokumen	25.000.000	DINAS SOSIAL
1	**6**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah		100 %	**9.000.000**			100 %	**15.000.000**	
1	6	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	6 Dokumen	9.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	pegawai ASN	6 Dokumen	15.000.000	DINAS SOSIAL
1	**6**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**778.796.800**			100 %	**578.500.000**	
1	6	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 paket	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial	2 paket	50.000.000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	37143 lembar	262.367.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial	37143 lembar	24.500.000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Jenis	103.579.050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial	3 Jenis	75.000.000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	314 kali	410.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial	314 kali	429.000.000	DINAS SOSIAL
1	**6**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	**447.200.000**			100 %	**1.080.000.000**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	6	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	15 Unit	197.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial	15 Unit	200.000.000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Unit	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial	3 Unit	80.000.000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Unit	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial	1 Unit	800.000.000	DINAS SOSIAL
1	**6**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	**142.511.687**			100 %	**186.400.000**	
1	6	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telepon Jumlah pemenuhan jasa air Jumlah pemenuhan listrik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 kali 12 kali 12 kali	50.111.687	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	dinas sosial kab soppeng	12 kali 12 kali 12 kali	100.000.000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Jenis	92.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	dinas sosial kab soppeng	3 Jenis	86.400.000	DINAS SOSIAL
1	**6**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	**254.039.970**			100 %	**545.000.000**	
1	6	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	23 Unit	167.719.970	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial	23 Unit	250.000.000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	16 Unit	9.820.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial	16 Unit	45.000.000	DINAS SOSIAL



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	6	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2350 Meter	76.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial	2350 Meter	250.000.000	DINAS SOSIAL
1	**6**	**2**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Persentase Pekerja Sosial yang Mendapatkan Layanan Pemberdayaan Sosial		100 %	**124.000.000**			100 %	**1.202.000.000**	
1	**6**	**2**	2.03		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Tenaga Pekerja Sosial Masyarakat yang mendapatkan Peningkatan pengembangan potensi		102 Orang	**124.000.000**			102 Orang	**1.202.000.000**	
1	6	2	2.03	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat Yang Mendapatkan Peningkatan Pengembangan Potensi	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	101 Pekerja Sosial	36.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	korban bencana	101 Pekerja Sosial	980.000.000	DINAS SOSIAL
1	6	2	2.03	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang Mendapat Peningkatan Kemampuan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	8 TKSK	69.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	korban bencana	8 TKSK	72.000.000	DINAS SOSIAL
1	6	2	2.03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengurus Sumber Kesejahteraan Masyarakat Sosial Kelembagaan Yang Mendapatkan Peningkatan Kemampuan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	70 Orang	17.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	korban bencana	70 Orang	150.000.000	DINAS SOSIAL



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	**6**	**4**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di Luar Panti Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di Luar Panti Jumlah warga negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di Luar Panti Jumlah warga negara Penyandang Disabilitas Terlantar yang memperoleh rehabiitasi sosial di luar panti		100 % 100 % 100 % 100 %	**190.891.000**			100 % 100 % 100 % 100 %	**746.904.000**	
1	**6**	**4**	2.01		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	Jumlah Penyandang Anak Terlantar, di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi Jumlah Penyandang Lanjut Usia Terlantar, serta di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi Jumlah Penyandang serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi		100 % 100 % 100 % 100 %	**190.891.000**			100 % 100 % 100 % 100 %	**746.904.000**	
1	6	4	2.01	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Anak Terlantar yang Diberikan Bantuan Permakanan Jumlah Lansia Terlantar yang Diberikan Bantuan Permakanan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Panti Asuhan 80 Orang	85.916.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	anak terlantar, lanjut usia terlantar, disabilitas terlantar, gelandangan dan pengemis	7 Panti Asuhan 80 Orang	215.904.000	DINAS SOSIAL
1	6	4	2.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Anak Terlantar yang Diberikan Bantuan Sandang	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	7 Panti Asuhan	15.725.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	anak terlantar, lanjut usia terlantar, disabilitas terlantar, gelandangan dan pengemis	7 Panti Asuhan	38.600.000	DINAS SOSIAL
1	6	4	2.01	3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Disabilitas yang Diberikan Alat Bantu	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	10 Orang	25.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	anak terlantar, lanjut usia terlantar, disabilitas terlantar, gelandangan dan pengemis	10 Orang	200.000.000	DINAS SOSIAL
1	6	4	2.01	8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Akses Layanan BPJS	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 %	27.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	anak terlantar, lanjut usia terlantar, disabilitas terlantar, gelandangan dan pengemis	100 %	206.400.000	DINAS SOSIAL
1	6	4	2.01	9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Aduan yang Dilayani	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 %	36.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	anak terlantar, lanjut usia terlantar, disabilitas terlantar, gelandangan dan pengemis	100 %	86.000.000	DINAS SOSIAL



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	**6**	**5**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Persentase Fakir Miskin yang Mendapatkan Bantuan Sosial		100 %	**2.362.725.000**			100 %	**2.925.000.000**	
1	**6**	**5**	2.02		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah data Fakir Miskin yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM		24764 kk	**2.362.725.000**			24764 kk	**2.925.000.000**	
1	6	5	2.02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin yang Diverifikasi dan Validasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	18000 kk	240.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	fakir miskin dan kurang mampu	18000 kk	175.000.000	DINAS SOSIAL
1	6	5	2.02	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga yang di berikan bantuan sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Ganra,	1462 kk	2.057.125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	fakir miskin dan kurang mampu	1462 kk	2.000.000.000	DINAS SOSIAL



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Citta, Semua Kelurahan							
1	6	5	2.02	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Keluarga yang diberikan Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Kelompok	65.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	fakir miskin dan kurang mampu	2 Kelompok	750.000.000	DINAS SOSIAL
1	**6**	**6**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial		100 %	**128.200.000**			100 %	**337.000.000**	
1	**6**	**6**	2.01		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial		100 %	**31.200.000**			100 %	**250.000.000**	
1	6	6	2.01	1	Penyediaan Makanan	Jumlah Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Yang Diberikan Bantuan Permakanan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 %	31.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	warga korban bencana	100 %	250.000.000	DINAS SOSIAL
1	**6**	**6**	2.02		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial Jumlah Taruna Siaga Bencana yang diberdayakan		100 % 17 Orang	**97.000.000**			100 % 17 Orang	**87.000.000**	
1	6	6	2.02	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Peserta Sosialisasi Pelaksanaan Taruna Bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	97.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	taruna siaga bencana	100 %	87.000.000	DINAS SOSIAL
1	**6**	**7**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	TMP yang dikelola		100 %	**58.872.660**			100 %	**95.000.000**	
1	**6**	**7**	2.01		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	Jumlah TMP yang di kelola		1 TMP	**58.872.660**			1 TMP	**95.000.000**	
1	6	7	2.01	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dipelihara	Kab. Soppeng, Lalabata,	2 TMP	58.872.660	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	TMP DAN TMB	2 TMP	95.000.000	DINAS SOSIAL



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Lalabata Rilau							
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2	**8**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**5.637.596.739**				**5.798.465.374**	
2	**8**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		100 %	**5.120.191.789**			100 %	**5.238.556.374**	
2	**8**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu		100 % 100 % 100 %	**38.347.050**			100 % 100 % 100 %	**46.000.000**	
2	8	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Dokumen	3.144.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Data Perencanaan dan Evaluasi	3 Dokumen	4.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	2.420.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Data Perencanaan dan Evaluasi	2 Dokumen	3.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	2.567.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Data Perencanaan dan Evaluasi	2 Dokumen	3.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata,	9 Dokumen	30.214.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Data Perencanaan dan Evaluasi	9 Dokumen	35.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Lalabata Rilau							PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	**8**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**4.289.683.874**			100 %	**4.293.056.374**	
2	8	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	36 ASN	4.244.662.124	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Data Realisasi Keuangan	36 ASN	4.244.662.124	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	150 SPM	25.134.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Data Realisasi Keuangan	150 SPM	25.992.250	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Dokumen	19.887.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Data Realisasi Keuangan	4 Dokumen	22.402.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	**8**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah		100 %	**8.374.900**			100 %	**10.000.000**	
2	8	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Dokumen	8.374.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Data Barang Milik Daerah	5 Dokumen	10.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
														KELUARGA BERENCANA
2	**8**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	**33.549.800**			100 %	**45.000.000**	
2	8	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Dokumen	17.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN DP3APPKB	5 Dokumen	25.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang terkelola	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Sistem Informasi	16.449.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN DP3APPKB	2 Sistem Informasi	20.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	**8**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**436.927.860**			100 %	**491.500.000**	
2	8	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Jenis	1.499.650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN DP3APPKB	5 Jenis	2.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Jenis	5.014.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN DP3APPKB	5 Jenis	10.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	8	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Paket	42.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN DP3APPKB	2 Paket	50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Jenis	12.246.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN DP3APPKB	3 Jenis	13.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Paket	47.878.910	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN DP3APPKB	4 Paket	60.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg terfasilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 Orang	4.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN DP3APPKB	100 Orang	6.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	320 Kali	323.539.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN DP3APPKB	320 Kali	350.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	**8**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	**118.424.228**			100 %	**140.000.000**	
2	8	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telepon Jumlah pemenuhan jasa air Jumlah pemenuhan listrik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Kali 12 Kali	54.824.228	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN DP3APPKB	12 Kali 12 Kali	60.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Jenis	63.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN DP3APPKB	3 Jenis	80.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	**8**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	**194.884.077**			100 %	**213.000.000**	
2	8	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	18 Unit	56.687.117	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kendaraan Dinas, Kendaraan Dinas Operasional/lapangan, Gedung Kantor dan Peralatan Lainnya	18 Unit	65.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	52 Unit	120.632.685	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kendaraan Dinas, Kendaraan Dinas Operasional/lapangan, Gedung Kantor dan Peralatan Lainnya	52 Unit	125.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	8	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	31 Unit	9.320.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kendaraan Dinas, Kendaraan Dinas Operasional/lapangan, Gedung Kantor dan Peralatan Lainnya	31 Unit	11.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	270 Meter per Segi	8.244.275	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kendaraan Dinas, Kendaraan Dinas Operasional/lapangan, Gedung Kantor dan Peralatan Lainnya	270 Meter per Segi	12.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	**8**	**2**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta		13,25 % 93,27 %	**65.907.000**			13,25 % 93,27 %	**100.893.500**	
2	**8**	**2**	2.01		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase ARG pada belanja langsung APBD		2,75 %	**4.750.000**			2,75 %	**4.987.500**	
2	8	2	2.01	4	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Peserta	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	95 Peserta	4.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SKPD, Desa/Kelurahan	95 Peserta	4.987.500	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	**8**	**2**	2.02		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan**	Persentase perempuan pada organisasi kemasyarakatan		70 %	**50.657.000**			70 %	**80.056.000**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					Kewenangan Kabupaten/Kota									
2	8	2	2.02	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	24 organisasi	50.657.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Organisasi Perempuan (Masyarakat perempuan)	24 organisasi	80.056.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	**8**	**2**	2.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase Lembaga Penyedia Layanan yang dibina		100 %	**10.500.000**			100 %	**15.850.000**	
2	8	2	2.03	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	9 lembaga	10.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lembaga Penyedia Layanan	9 lembaga	15.850.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	**8**	**3**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)		0,001	**67.985.000**			0,001	**68.178.750**	
2	**8**	**3**	2.02		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase korban yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan		100 %	**64.110.000**			100 %	**64.110.000**	
2	8	3	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	64.110.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Perempuan Korban kekerasan	100 %	64.110.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	**8**	**3**	2.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penyedia layanan perlindungan perempuan yang terbina		100 %	**3.875.000**			100 %	**4.068.750**	
2	8	3	2.03	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyedia layanan perempuan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	11 Lembaga	3.875.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lembaga Penyedia Layanan	11 Lembaga	4.068.750	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	**8**	**4**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	Persentase ketersediaan layanan pembelajaran keluarga		63%	**29.284.900**			88%	**30.434.250**	
2	**8**	**4**	2.01		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase keluarga yang dibina		1.16 %	**29.284.900**			1.16 %	**30.434.250**	
2	8	4	2.01	3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pembinaan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 KK	29.284.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Keluarga Pra sejahterah	100 KK	30.434.250	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	**8**	**5**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Data Terpilah Gender dan Anak		20,58 %	**23.524.800**			29,41 %	**25.000.000**	
2	**8**	**5**	2.01		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase lembaga pemerintah yang memiliki petugas data gender dan anak terlatih entry data		35 %	**23.524.800**			35 %	**25.000.000**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	8	5	2.01	1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data informasi gender dan anak	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	23.524.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lembaga Pemerintah	2 Dokumen	25.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	**8**	**6**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Persentase Hak Anak yang Terpenuhi		75,00 %	**20.679.500**			75,00 %	**21.853.500**	
2	**8**	**6**	2.01		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah kecamatan/ kelurahan/ desa yang terfasiltasi dalam pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha		10 Desa/ kelurahan	**14.925.000**			10 Desa/ kelurahan	**15.828.750**	
2	8	6	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Forum Anak	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	165 Orang	14.925.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah,Dunia Usaha dan Forum Anak	165 Orang	15.828.750	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	**8**	**6**	2.02		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase desa/kelurahan penyedia layanan peningkatan kualitas anak yang mendapatkan penguatan kelembagaan		43 %	**5.754.500**			43 %	**6.024.750**	
2	8	6	2.02	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokus yang dibina	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Lokus	5.754.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lembaga penyedia Layanan	20 Lokus	6.024.750	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	**8**	**7**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten/Kota		100 %	**310.023.750**			100 %	**313.549.000**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	**8**	**7**	2.01		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Rasio kekerasan terhadap anak		0.003 Rasio	**89.004.750**			0.003 Rasio	**92.530.000**	
2	8	7	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta advokasi kebijakan dan pendampingan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	50 peserta	36.474.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anak korban kekerasan	50 peserta	40.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	7	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 Peserta	52.530.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Anak korban kekerasan	100 Peserta	52.530.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	**8**	**7**	2.02		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang memperoleh layanan komprehensif		100 %	**221.019.000**			100 %	**221.019.000**	
2	8	7	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan rujukan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	221.019.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Anak korban kekerasan	100 %	221.019.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	**#**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**3.439.160.850**				**4.436.304.977**	
2	**#**	**2**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi		45 %	**65.669.750**			56 %	**79.520.250**	
2	**#**	**2**	2.01		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan**	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi pengendalian penduduk yang tersusun		1 Dokumen	**14.664.750**			1 Dokumen	**23.414.750**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk									
2	14	2	2.01	9	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah peserta advokasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 peserta	5.514.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SKPD	100 peserta	9.014.750	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	2	2.01	14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Peserta	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	50 Peserta	3.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SKPD	50 Peserta	5.450.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	2	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Peserta	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 Peserta	5.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SKPD	100 Peserta	8.950.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	**#**	**2**	2.02		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase desa/kelurahan yang didampingi dalam pengembangan kampung KB		23 %	**51.005.000**			23 %	**56.105.500**	
2	14	2	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah dokumen	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 dokumen	51.005.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	1 dokumen	56.105.500	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
														KELUARGA BERENCANA
2	**#**	**3**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)		78,25 % 12,10%	**2.418.066.300**			78,26 % 12%	**3.511.784.727**	
2	**#**	**3**	2.01		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	Jumlah kecamatan yang didampingi		8 Kecamatan	**744.903.800**			8 Kecamatan	**912.930.250**	
2	14	3	2.01	3	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah paket sarana KIE KB yang tersedia	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenraree; Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang; Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang; Kab. Soppeng, Lalabata, Botto; Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu; Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri; Kab. Soppeng, Ganra, Ganra; Kab. Soppeng, Citta, Tinco	8 Paket	150.559.600	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Masyarakat	8 Paket	170.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	2.01	7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah paket operasional sarana balai penyuluhan yang dikelola	Kab. Soppeng, Marioriwawo	8 Paket	594.344.200	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Masyarakat	8 Paket	742.930.250	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							, Tettikenraraе; Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang; Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang; Kab. Soppeng, Lalabata, Botto; Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu; Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri; Kab. Soppeng, Ganra, Ganra; Kab. Soppeng, Citta, Tinco							PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	**#**	**3**	2.02		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	Persentase tenaga fungsional penyuluh KB PKB/PLKB dan IMP yang terlatih		80 %	**340.054.950**			80 %	**425.980.000**	
2	14	3	2.02	1	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Peserta IMP	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	140 orang	4.054.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PKB dan PLKB non PNS	140 orang	5.980.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	2.02	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader IMP yang mendapatkan biaya penggerakan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan,	50 orang	336.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	PKB dan PLKB non PNS	50 orang	420.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semua Kelurahan							PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	**#**	**3**	2.03		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Faskes		100 %	**920.552.550**			100 %	**1.554.041.977**	
2	14	3	2.03	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Faskes yang dilayani	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenraree Kab. Soppeng, Marioriwawo, Goarie Kab. Soppeng, Marioriwawo, Marioriaja Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang Kab. Soppeng, Liliraja, Jampu Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang Kab. Soppeng,	18 Faskes	42.965.200	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Faskes	18 Faskes	50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Lilirilau, Abbanuange Kab. Soppeng, Lalabata, Botto Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba Kab. Soppeng, Lalabata, Bila Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu Kab. Soppeng, Marioriawa, Panincong Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri Kab. Soppeng, Donri Donri, Leworeng Kab. Soppeng, Ganra, Ganra Kab. Soppeng, Citta, Citta							
2	14	3	2.03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Peserta KB yang menggunakan metode kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Soppeng, Marioriwawo,	5520 peserta MKJPKB	368.580.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Faskes	5520 peserta MKJPKB	569.580.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Tettikenraraе Kab. Soppeng, Marioriwawo, Goarie Kab. Soppeng, Marioriwawo, Marioriaja Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang Kab. Soppeng, Liliraja, Jampu Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang Kab. Soppeng, Lilirilau, Abbanuange Kab. Soppeng, Lalabata, Botto Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba Kab. Soppeng, Lalabata, Bila Kab. Soppeng,							ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Lalabata, Lapajung Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu Kab. Soppeng, Marioriawa, Panincong Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri Kab. Soppeng, Donri Donri, Leworeng Kab. Soppeng, Ganra, Ganra Kab. Soppeng, Citta, Citta							
2	14	3	2.03	5	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah dokumen rencana kebutuhan alat dan obat kontrasepsi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	8 Dokumen	16.962.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Faskes	8 Dokumen	18.701.157	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	2.03	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah paket sarana penunjang	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang Kab. Soppeng,	8 Paket	435.755.000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	Faskes	8 Paket	800.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Lilirilau, Pajalesang Kab. Soppeng, Lalabata, Botto Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri Kab. Soppeng, Ganra, Ganra Kab. Soppeng, Citta, Citta							
2	14	3	2.03	7	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah peserta KB yang dilayani	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenraraе Kab. Soppeng, Marioriwawo, Goarie Kab. Soppeng, Marioriwawo, Marioriaja Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang Kab. Soppeng, Liliraja, Jampu Kab. Soppeng,	7000 akseptor KB	56.289.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Faskes	7000 akseptor KB	115.760.820	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Lilirilau, Ujung Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang Kab. Soppeng, Lilirilau, Abbanuange Kab. Soppeng, Lalabata, Botto Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba Kab. Soppeng, Lalabata, Bila Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu Kab. Soppeng, Marioriawa, Panincong Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri Kab. Soppeng, Donri Donri, Leworeng Kab. Soppeng,							



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Ganra, Ganra Kab. Soppeng, Citta, Citta							
2	**#**	**3**	2.04		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	Cakupan kemitraan yang dibina		44.86 %	**412.555.000**			44.86 %	**618.832.500**	
2	14	3	2.04	3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kampung KB yang dikelola	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Soga Kab. Soppeng, Liliraja, Pattojo Kab. Soppeng, Liliraja, Timusu Kab. Soppeng, Lilirilau, Kebo Kab. Soppeng, Lalabata, Maccile Kab. Soppeng, Marioriawa, Patampanua Kab. Soppeng, Marioriawa, Tellulimpoe Kab. Soppeng,	13 kampung kb	412.555.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	PPKBD dan Sub PPKBD	13 kampung kb	618.832.500	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Donri Donri, Sering Kab. Soppeng, Donri Donri, Kessing Kab. Soppeng, Ganra, Belo Kab. Soppeng, Ganra, Lompulle Kab. Soppeng, Citta, Citta Kab. Soppeng, Citta, Tinco							
2	**#**	**4**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Cakupan Kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan		100 % 87,57 % 50 %	**955.424.800**			100 % 87,57 % 50 %	**845.000.000**	
2	**#**	**4**	2.01		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Jumlah kelompok ketahanan daln kesejahteraan keluarga yang dibina		28 Kelompok	**955.424.800**			28 Kelompok	**845.000.000**	
2	14	4	2.01	2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok kegiatan yang akan diberikan sarana	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi Kab. Soppeng, Marioriwawo, Barae Kab. Soppeng, Marioriwawo, Watu Toa	42 kelompok	717.000.000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, DAN UPPKS	42 kelompok	800.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Kab. Soppeng, Marioriwawo , Soga Kab. Soppeng, Liliraja, Timusu Kab. Soppeng, Liliraja, Rompegading Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung Kab. Soppeng, Lilirilau, Tetewatu Kab. Soppeng, Lilirilau, Baringeng Kab. Soppeng, Lilirilau, Masing Kab. Soppeng, Lilirilau, Kebo Kab. Soppeng, Lalabata, Mattabulu Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu Kab. Soppeng, Marioriawa, Kaca							



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Kab. Soppeng, Marioriawa, Attang Salo Kab. Soppeng, Marioriawa, Manorang Salo Kab. Soppeng, Marioriawa, Limpomajang Kab. Soppeng, Marioriawa, Bulue Kab. Soppeng, Marioriawa, Panincong Kab. Soppeng, Marioriawa, Patampanua Kab. Soppeng, Marioriawa, Tellulimpoe Kab. Soppeng, Marioriawa, Laringgi Kab. Soppeng, Donri Donri, Leworeng Kab. Soppeng, Donri Donri, Labokong Kab. Soppeng,							



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Donri Donri, Pesse Kab. Soppeng, Donri Donri, Tottong Kab. Soppeng, Ganra, Lompulle Kab. Soppeng, Citta, Citta Kab. Soppeng, Citta, Tinco							
2	14	4	2.01	3	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok yang diorientasi/dilatih	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	13 Kelompok	37.424.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, DAN UPPKS	13 Kelompok	45.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	4	2.01	6	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok yang mendapatkan biaya operasional	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42 kelompok	201.000.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, DAN UPPKS	42 kelompok	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2	**9**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				**1.312.929.600**				**1.439.272.560**	
2	**9**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pangan		25,71 %	**500.000.000**			27,14 %	**550.000.000**	
2	**9**	**2**	2.01		**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan**	Jumlah Pengembangan Infrastruktur dan Pendukung Kemandirian Pangan yang dilaksanakan		1 Paket	**500.000.000**			1 Paket	**550.000.000**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
2	9	2	2.01	1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang dibangun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	500.000.000	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	Masyarakat	2 Unit	550.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	**9**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Persentase Tingkat Kecukupan Konsumsi Energi		93.10 %	**773.332.600**			94.80 %	**845.715.860**	
2	**9**	**3**	2.01		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	Jumlah Fasilitasi Penyediaan dan Penyaluran Pangan terhadap Stabilisasi Pasokan		6 Kali	**71.742.600**			6 Kali	**79.906.860**	
2	9	3	2.01	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen Informasi Harga Pangan dan Dokumen Laporan NBM	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	8.080.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	2 Dokumen	8.888.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	3	2.01	2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Produk Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Dikembangkan	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	6 Jenis	28.447.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	6 Jenis	31.292.360	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	3	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan Distribusi dan Akses Pangan Masyarakat	Kab. Soppeng, Lalabata,	2 Dokumen	7.740.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	2 Dokumen	8.514.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA,



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Lalabata Rilau							PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	3	2.01	4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Laporan Ketersediaan dan Stabilitas Harga Pangan Strategis	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	18.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	1 Dokumen	21.450.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	3	2.01	6	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM)/TTI yang Dibina dan Dikembangkan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Unit	8.875.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	9 Unit	9.762.500	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	**9**	**3**	2.02		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang Dikelola		5281 Kg	**100.000.000**			5281 Kg	**110.000.000**	
2	9	3	2.02	3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Beras Cadangan Pangan yang Diadakan	Kab. Soppeng, Ganra, Enrekang	10000 Kg	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	10000 Kg	110.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	**9**	**3**	2.04		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	Jumlah Paket Fasilitasi Kegiatan Upaya Pencapaian Target Konsumsi Pangan Masyarakat yang Dilaksanakan		2 Paket	**601.590.000**			2 Paket	**655.809.000**	
2	9	3	2.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelompok Masyarakat Lokasi Pengembangan Pekarangan Pangan Lestari	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 Kelompok	560.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Masyarakat	14 Kelompok	616.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	9	3	2.04	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Laporan Pola Pangan Harapan yang Dihasilkan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	41.590.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	1 Dokumen	39.809.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	**9**	**4**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Penanganan Daerah Rawan Pangan (Poin)		10,25 Poin	**17.000.000**			10,46 Poin	**18.700.000**	
2	**9**	**4**	2.01		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	Jumlah Dokumen Pemetaan Kerentanan Pangan yang Dihasilkan		1 Dokumen	**17.000.000**			1 Dokumen	**18.700.000**	
2	9	4	2.01	1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Dokumen Peta Kerentanan Pangan yang Disusun/Dimutakhirkan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	17.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	1 Dokumen	18.700.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	**9**	**5**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)		100 %	**22.597.000**			100 %	**24.856.700**	
2	**9**	**5**	2.01		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Pembinaan Pengawasan Keamanan Pangan yang Dilakukan		5 Kali	**22.597.000**			5 Kali	**24.856.700**	
2	9	5	2.01	2	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Diuji Keamanan Pangan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Jenis	22.597.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	3 Jenis	24.856.700	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**									
3	**#**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**27.271.915.657**				**26.103.732.719**	
3	**#**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan		100 %	**17.121.556.069**			100 %	**17.022.302.539**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
3	**#**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu		100 % 100 % 100 %	**22.850.000**			100 % 100 % 100 %	**15.895.000**	
3	27	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	7.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Dinas	2 Dokumen	8.140.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	4.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Dinas	1 Dokumen	858.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	4.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Dinas	1 Dokumen	847.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	8 Dokumen	6.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Dinas	8 Dokumen	6.050.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	**#**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**15.676.394.919**			100 %	**15.449.086.367**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
3	27	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	147 Orang	15.637.799.919	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Dinas	147 Orang	15.408.386.367	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	310 SPM	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Dinas	310 SPM	38.500.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	7 Dokumen	3.595.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Dinas	7 Dokumen	2.200.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	**#**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**462.008.700**			100 %	**490.041.805**	
3	27	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Jenis	1.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Dinas	2 Jenis	550.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Paket	17.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Dinas	2 Paket	18.590.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata,	3 Jenis	13.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Dinas	3 Jenis	14.300.000	DINAS TANAMAN PANGAN,



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Lalabata Rilau							HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Paket	94.285.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Dinas	2 Paket	90.323.530	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg terfasilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 Orang	5.490.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Dinas	100 Orang	6.039.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	180 Kali	330.333.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Dinas	180 Kali	360.239.275	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	**#**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	**156.450.000**			100 %	**167.882.000**	
3	27	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Jenis	71.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Dinas	4 Jenis	79.882.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Kab. Soppeng, Lalabata,	1 Jenis	84.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Dinas	1 Jenis	88.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA,



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Lalabata Rilau							PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	**#**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	**298.667.700**			100 %	**328.101.367**	
3	27	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telepon Jumlah pemenuhan jasa air Jumlah pemenuhan listrik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Kali 12 Kali	147.467.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Dinas	12 Kali 12 Kali	161.781.367	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Jenis	151.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Dinas	4 Jenis	166.320.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	**#**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	**505.184.750**			100 %	**571.296.000**	
3	27	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Unit	38.627.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Dinas	1 Unit	42.493.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	153 Unit	220.425.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Dinas	153 Unit	242.484.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
3	27	1	2.09	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Unit	29.231.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Dinas	2 Unit	32.175.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	20 Unit	10.540.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Dinas	20 Unit	12.144.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	500 meter persegi	206.360.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Dinas	500 meter persegi	242.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	**#**	**2**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		10,76 % 2,95 % 10.40 %	**2.455.427.808**			21,28 % 4,91 % 9,77 %	**1.569.646.329**	
3	**#**	**2**	2.01		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	Jumlah Kelompok Penerima Sarana Pertanian yang Diawasi dan Didampingi Penggunaannya		15 Kelompok	**1.433.561.600**			15 Kelompok	**450.010.000**	
3	27	2	2.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan sarana pertanian dan diawasi penggunaannya	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Kelompok	1.275.573.600	DBH CHT	Petani/Kelompok Tani	15 Kelompok	29.590.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Jenis Sarana Pertanian yang Didampingi Penggunaannya	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan,	2 Jenis	157.988.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Petani/Kelompok Tani	2 Jenis	420.420.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semua Kelurahan							DAN KETAHANAN PANGAN
3	**#**	**2**	2.02		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah jenis sumber daya genetik Tumbuhan yang dikelola dan dikembangkan		3 Jenis	**1.021.866.208**			3 Jenis	**1.119.636.329**	
3	27	2	2.02	1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Sumber Daya Genetik Tumbuhan yang Dimurnikan dan Dilestarikan	Kab. Soppeng, Liliraja, Timusu	1 Jenis	77.556.208	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Petani/Kelompok Tani	1 Jenis	83.111.829	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	2	2.02	3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Sumber Daya Genetik Tumbuhan yang Dimanfaatkan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18 komoditi	944.310.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Petani/Kelompok Tani	18 komoditi	1.036.524.500	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	**#**	**3**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Persentase Prasarana Pertanian yang Digunakan		100,00 %	**6.676.670.000**			100,00 %	**6.348.837.000**	
3	**#**	**3**	2.01		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	Jumlah Paket Dukungan Pengembangan Prasarana Pertanian		4 Paket	**61.670.000**			4 Paket	**62.337.000**	
3	27	3	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Jenis Data Pendukung Prasarana Pertanian yang disusun	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Data Base	61.670.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Petani/Kelompok Tani	3 Data Base	62.337.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	**#**	**3**	2.02		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	Cakupan Prasarana Pertanian yang Dibangun dan Berfungsi dengan Baik		100 %	**6.615.000.000**			100 %	**6.286.500.000**	
3	27	3	2.02	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Irigasi Tingkat Usaha Tani yang dibangun	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan,	40 Unit	3.310.200.000	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Ren	Petani/Kelompok Tani	40 Unit	3.351.700.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA,



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semua Kelurahan			ovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian				PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	3	2.02	2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah embung pertanian yang dibangun	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	1.008.000.000	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	Petani/Kelompok Tani	10 Unit	1.108.800.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	3	2.02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang jalan usahatani yang dibangun	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 km	1.666.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	Petani/Kelompok Tani	13 km	1.133.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	3	2.02	4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah Dam Parit untuk pertanian yang dibangun	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	630.000.000	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	Petani/Kelompok Tani	5 Unit	693.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	3	2.02	6	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air				0		Petani/Kelompok Tani		0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	**#**	**5**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN**	Persentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan)		97,03 %	**76.789.500**			97,77 %	**78.760.000**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN									
3	**#**	**5**	2.01		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	Persentase Penanganan Bencana Pertanian		97.03 %	**76.789.500**			97.77 %	**78.760.000**	
3	27	5	2.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Jenis Pestisida Pengendali OPT yang diadakan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Jenis	76.789.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Petani/Kelompok Tani	5 Jenis	78.760.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	**#**	**7**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Lanjut ke Madya Persentase peningkatan kelas kelompok tani madya ke utama Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Pemula ke Lanjut		16 % 8 % 8 %	**941.472.280**			16 % 8 % 8 %	**1.084.186.851**	
3	**#**	**7**	2.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	Jumlah Kelompok Tani yang Meningkat Skor Kemampuannya Jumlah Posluhdes Aktif yang Difasilitasi		652 Unit 4 Unit	**941.472.280**			652 Unit 4 Unit	**1.084.186.851**	
3	27	7	2.01	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan yang Meningkat Kapasitasnya	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	685.370.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Petani	1 Unit	812.933.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	7	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Kelompok Tani yang Mandiri	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	472 Unit	178.622.580	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Petani	472 Unit	186.026.181	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	7	2.01	3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Penyuluhan yang Diadakan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 Unit	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Petani	11 Unit	16.500.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
														KETAHANAN PANGAN
3	27	7	2.01	4	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Difasilitasi	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Unit	62.479.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Petani	8 Unit	68.727.670	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**9.882.395.893**				**10.035.022.243**	
2	**11**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Lingkungan Hidup		100 %	**6.316.331.748**			100 %	**6.392.500.000**	
2	**11**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu		100 % 100 % 100 %	**27.400.000**			100 % 100 % 100 %	**0**	
2	11	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 Persen	22.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparat Dinas Lingkungan Hidup	100 Persen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 Persen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparat Dinas Lingkungan Hidup	100 Persen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**5.927.526.752**			100 %	**6.035.000.000**	
2	11	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Bulan	5.898.346.752	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Dinas Lingkungan Hidup	12 Bulan	6.000.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi	Kab. Soppeng, Lalabata,	6000 lembar	8.580.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Dinas Lingkungan Hidup	6000 lembar	10.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Lalabata Rilau							
2	1 1	1	2.0 2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	20.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Dinas Lingkungan Hidup	2 Dokumen	25.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**1 1**	**1**	2.0 5		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	**14.400.000**			100 %	**15.000.000**	
2	1 1	1	2.0 5	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 Persen	14.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pegawai Dinas Lingkungan Hidup	100 Persen	15.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**1 1**	**1**	2.0 6		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**158.491.600**			100 %	**227.500.000**	
2	1 1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Kali	16.980.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Dinas Lingkungan Hidup	12 Kali	20.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	26275 lembar	11.172.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Dinas Lingkungan Hidup	26275 lembar	15.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	1	2.0 6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Bidang	32.920.550	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	ASN Dinas Lingkungan Hidup	5 Bidang	40.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg terfasilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	50 OM	1.995.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Dinas Lingkungan Hidup	50 OM	2.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Kali	95.423.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Dinas Lingkungan Hidup	50 Kali	150.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**1 1**	**1**	2.0 7		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang**	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	**5.200.000**			100 %	**0**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					Urusan Pemerintah Daerah									
2	11	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 Persen	5.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	**86.791.094**			100 %	**0**	
2	11	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telepon Jumlah pemenuhan jasa air Jumlah pemenuhan listrik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 %	51.391.094	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 Persen	35.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	**96.522.302**			100 %	**115.000.000**	
2	11	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Unit	35.126.902	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	40.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	54 Unit	45.305.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		54 Unit	50.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	21 Unit	6.210.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		21 Unit	10.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Kab. Soppeng, Lalabata,	1 Unit	9.880.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	15.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Lalabata Rilau							
2	**1 1**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup		100 %	**99.999.750**			100 %	**150.020.000**	
2	**1 1**	**2**	2.02		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	Jumlah Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten yang siap digunakan		1 Dokumen	**99.999.750**			1 Dokumen	**150.020.000**	
2	1 1	2	2.02	1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Tersedianya Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang		1 Dokumen	99.999.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kabupatn Soppng	1 Dokumen	150.020.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**1 1**	**3**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		100 %	**116.948.950**			100 %	**130.276.198**	
2	**1 1**	**3**	2.01		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Jumlah Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		3 Kegiatan	**101.898.950**			3 Kegiatan	**115.226.198**	
2	1 1	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah kecamatan yang dipantau kualitas udaranya Jumlah Sumber air yang dipantau kualitas airnya Jumlah Sungai yang dipantau kualitas airnya	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Kecamatan 3 Sumber Air 5 Sungai	78.656.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sungai,. Sumber mata Air dan Industri yang dipantau	8 Kecamatan 3 Sumber Air 5 Sungai	91.983.698	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	3	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah laporan koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi Gas Rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Kali	23.242.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sungai,. Sumber mata Air dan Industri yang dipantau	15 Kali	23.242.500	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**1 1**	**3**	2.02		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Jumlah kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		1 Kegiatan	**15.050.000**			1 Kegiatan	**15.050.000**	
2	1 1	3	2.02	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Dokumen Pengkajian Lingkungan Hidup Yang Tersusun	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	15.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	masyarakat Kab Soppeng	1 Dokumen	15.050.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	**1 1**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	Luasan kawasan yang terkelola sesuai standar (m^2)		9351 M2	**83.042.530**			9351 M2	**83.042.530**	
2	**1 1**	**4**	2.01		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	Cakupan Keanekaragaman Hayati Kabupaten yang dikelola		3 Kawasan	**83.042.530**			3 Kawasan	**83.042.530**	
2	1 1	4	2.01	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas Taman yang ditata dan dipelihara	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9351 M2	83.042.530	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Taman Kota di Kabupaten Soppeng	9351 M2	83.042.530	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**1 1**	**8**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Cakupan kelompok masyarakat yang sadar lingkungan		50%	**18.874.750**			60%	**18.964.750**	
2	**1 1**	**8**	2.01		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah peserta pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup		50 Orang	**18.874.750**			50 Orang	**18.964.750**	
2	1 1	8	2.01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peserta Penyuluhan Lingkungan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Peserta	9.907.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat kabupaten soppeng	50 Peserta	9.997.300	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	8	2.01	2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Sekolah Adiwiyata yang dibina Kelompok Sakakalpataru yang dibentuk	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48 Sekolah 0 Kelompok	8.967.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat kabupaten soppeng	48 Sekolah 0 Kelompok	8.967.450	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**1 1**	**9**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup		100 %	**36.505.000**			100 %	**36.505.000**	
2	**1 1**	**9**	2.01		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup**	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten yang dilaksanakan		1 Penghargaan	**36.505.000**			1 Penghargaan	**36.505.000**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
2	11	9	2.01	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Koordinasi Kampung Iklim yang dibina Jumlah Koordinasi Penilaian Adipura		2 Kampung Iklim 5 Kali	36.505.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat kabupaten Soppeng	2 Kampung Iklim 5 Kali	36.505.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**#**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase Jumlah Pengaduan/Perkara LH yang Ditindak Lanjuti		100 %	**9.995.000**			100 %	**9.995.000**	
2	**11**	**#**	2.01		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	Jumlah Pengaduan masyarakat yang ditindak Lanjuti		1 Kasus	**9.995.000**			1 Kasus	**9.995.000**	
2	11	10	2.01	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Pengaduan Lingkungan yang ditangani	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kasus	9.995.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kabupaten Soppeng	1 Kasus	9.995.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani		68 %	**3.200.698.165**			69 %	**3.213.718.765**	
2	**11**	**11**	2.01		**Pengelolaan Sampah**	volume timbulan sampah yang ditangani (M3)		7922.2 M3	**3.200.698.165**			7922.2 M3	**3.213.718.765**	
2	11	11	2.01	2	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Daur Ulang Sampah Plastik yang dihasilkan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	8696.49 Ton	84.897.975	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pasukan Kuning dan Masyarakat Kabupaten Soppeng	8696.49 Ton	89.027.975	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2.01	3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Indikator Target Jumlah timbulan sampah yang tertangani	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	24417.5 Ton	3.064.590.790	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pasukan Kuning dan Masyarakat Kabupaten Soppeng	24417.5 Ton	3.064.690.790	DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	11	11	2.01	7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA, TPST dan Spa	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	19 Jenis	51.209.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pasukan Kuning dan Masyarakat Kabupaten Soppeng	19 Jenis	60.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2	**#**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**5.542.478.986**				**6.623.058.986**	
2	**#**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		100 %	**5.387.991.936**			100 %	**5.387.991.936**	
2	**#**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu		100 % 100 % 100 %	**56.797.000**			100 % 100 % 100 %	**56.197.000**	
2	12	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Dokumen	12.180.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3 Dokumen	12.180.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Dokumen	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4 Dokumen	4.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	11 Dokumen	40.617.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11 Dokumen	40.017.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**#**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**3.367.612.915**			100 %	**3.368.531.871**	
2	12	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	29 Orang	3.338.502.915	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	29 Orang	3.339.421.871	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah SPM yang terverifikasi	Kab. Soppeng, Lalabata,	100 SPM	25.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100 SPM	25.050.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Lalabata Rilau							PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Dokumen	4.060.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5 Dokumen	4.060.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**#**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	**76.180.750**			100%	**76.180.750**	
2	12	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	52 set	14.280.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	52 set	14.280.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Dokumen	23.075.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3 Dokumen	23.075.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang terkelola	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Sistem Informasi	17.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 Sistem Informasi	17.350.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosisalisasi perundang-undangan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	89 Orang	21.475.750	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	89 Orang	21.475.750	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**#**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**858.971.404**			100 %	**831.763.354**	
2	12	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	15 Jenis	1.249.936	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15 Jenis	1.249.936	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Jenis	166.665.238	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Jenis	166.665.238	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata,	3 Jenis	500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3 Jenis	500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Lalabata Rilau							PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Paket	48.675.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3 Paket	28.700.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Jenis	12.409.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5 Jenis	11.275.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	56 Jenis	107.526.280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	56 Jenis	107.747.780	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg terfasilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	140 Orang	7.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	140 Orang	7.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1232 kali	514.945.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1232 kali	508.625.400	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**#**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	**145.000.000**			100 %	**171.700.000**	
2	12	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	24 Unit	145.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	24 Unit	171.700.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**#**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	**714.263.672**			100 %	**714.452.766**	
2	12	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telepon Jumlah pemenuhan jasa air	Kab. Soppeng, Lalabata,	12 kali 12 kali	139.242.260	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 kali 12 kali	138.831.354	DINAS KEPENDUDUKAN DAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
						Jumlah pemenuhan listrik	Lalabata Rilau	12 kali				12 kali		PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	7 Jenis	575.021.412	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7 Jenis	575.621.412	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**#**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	**169.166.195**			100 %	**169.166.195**	
2	12	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Unit	44.856.040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Unit	44.856.040	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	6 Unit	84.150.155	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6 Unit	84.150.155	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	23 Unit	14.410.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	23 Unit	14.410.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aplikasi yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	6 Aplikasi	5.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6 Aplikasi	5.750.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1032 Meter Persegi	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1032 Meter Persegi	20.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**#**	**2**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Persentase Anak Usia 1-7 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA		99 % 46 %	**133.055.800**			99 % 50 %	**769.234.718**	
2	**#**	**2**	2.01		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	Jumlah Dokumen Kependudukan yang Diterbitkan		4 Dokumen	**133.055.800**			4 Dokumen	**769.234.718**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	12	2	2.01	2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah E-KTP berbasis NIK yang diterbitkan (E-KTP) Jumlah KIA berbasis NIK yang diterbitkan (KIA)	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	10000 E-KTP 3000 KIA	128.145.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penduduk Kab. Soppeng	10000 E-KTP 3000 KIA	128.145.800	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	2	2.01	5	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Kartu Keluarga yang diterbitkan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	15000 KK	0	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	Penduduk Kab. Soppeng	15000 KK	636.178.918	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	2	2.01	7	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Persentase SKPWNI yang diterbitkan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 %	4.910.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penduduk Kab. Soppeng	100 %	4.910.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**#**	**3**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran		96 %	**12.089.000**			96,5 %	**374.662.932**	
2	**#**	**3**	2.01		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan		2 Dokumen	**7.010.000**			2 Dokumen	**369.583.932**	
2	12	3	2.01	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 %	7.010.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	100 %	7.010.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**#**	**3**	2.02		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan		100%	**5.079.000**			100%	**5.079.000**	
2	12	3	2.02	8	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Peserta Sosialisasi (orang)	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Orang	5.079.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	12 Orang	5.079.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**#**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan		88,23 %	**9.342.250**			88,23 %	**30.818.000**	
2	**#**	**4**	2.03		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Jumlah Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		2 Paket	**9.342.250**			2 Paket	**30.818.000**	
2	12	4	2.03	3	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah software/ hardware/ server dan client yang dipelihara (paket)	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Paket	9.342.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kab. Soppeng	2 Paket	9.342.250	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2	**#**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**5.103.754.973**				**5.103.754.973**	
2	**#**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		100 %	**3.237.371.173**			100 %	**3.237.371.173**	
2	**#**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu		100 % 100 % 100 %	**35.320.750**			100 % 100 % 100 %	**35.320.750**	
2	13	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Dokumen	11.295.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Data Perencanaan dan Evaluasi	3 Dokumen	11.295.100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	12.410.050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Data Perencanaan dan Evaluasi	2 Dokumen	12.410.050	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	9 Dokumen	11.615.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Data Perencanaan dan Evaluasi	9 Dokumen	11.615.600	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	**#**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**2.534.900.420**			100 %	**2.534.900.420**	
2	13	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	23 ASN	2.513.230.720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Data Realisasi Keuangan dan ASN DPMD	23 ASN	2.513.230.720	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	60 SPM	13.320.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Data Realisasi Keuangan dan ASN DPMD	60 SPM	13.320.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Dokumen	8.349.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Data Realisasi Keuangan dan ASN DPMD	5 Dokumen	8.349.700	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	**#**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah		100 %	**9.081.750**			100 %	**9.081.750**	
2	13	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	6 Dokumen	9.081.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Buku Inventaris Barang	6 Dokumen	9.081.750	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	**#**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	**26.101.300**			100 %	**26.101.300**	
2	13	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Dokumen	9.150.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN DPMD	5 Dokumen	9.150.300	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang terkelola	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Sistem Informasi	16.951.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN DPMD	2 Sistem Informasi	16.951.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	**#**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**473.912.891**			100 %	**473.912.891**	
2	13	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Jenis	1.619.891	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4 Jenis	1.619.891	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Jenis	5.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1 Jenis	5.200.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Paket	49.720.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2 Paket	49.720.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Jenis	13.200.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5 Jenis	13.200.400	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	13	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Paket	131.505.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5 Paket	131.505.600	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg terfasilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	342 Orang	11.970.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	342 Orang	11.970.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	409 Kali	260.697.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	409 Kali	260.697.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	**#**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	**30.200.000**			100 %	**30.200.000**	
2	13	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Jenis	30.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2 Jenis	30.200.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	**#**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	**82.274.022**			100 %	**82.274.022**	
2	13	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telepon Jumlah pemenuhan jasa air Jumlah pemenuhan listrik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Kali 12 Kali 12 Kali	55.274.022	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Kali 12 Kali 12 Kali	55.274.022	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Jenis	27.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3 Jenis	27.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	**#**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	**45.580.040**			100 %	**45.580.040**	
2	13	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata,	8 Unit	41.340.040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8 Unit	41.340.040	DINAS PEMBERDAYAAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Lalabata Rilau							MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	7 Unit	4.240.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7 Unit	4.240.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	**#**	**4**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Desa Menyusun RPJMDesa , RKPDesa dan APBDesa Tepat Waktu		100 %	**1.705.933.050**			100 %	**1.705.933.050**	
2	**#**	**4**	2.01		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	Jumlah Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa yang dibina dan diawasi		441 orang	**1.705.933.050**			441 orang	**1.705.933.050**	
2	13	4	2.01	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49 Desa	900.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	49 Desa	49 Desa	900.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	2.01	2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah produk hukum tentang desa	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 perbup	5.050.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	49 Desa	1 perbup	5.050.100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	2.01	3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan RKPD/APBDesa	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	49 Desa	22.080.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	49 Desa	49 Desa	22.080.750	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	2.01	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah aparatur pemerintah desa dengan pelaksanaan bimtek keuangan desa; Jumlah yang difasilitasi pengelolaan dana ADD/DAD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	49 Desa	50.830.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	49 Desa	49 Desa	50.830.100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	2.01	5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	98 Orang	8.780.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	49 Desa	98 Orang	8.780.200	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	2.01	8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa	Jumlah bumdes yang terbina	Kab. Soppeng, Semua	49 bumdes	22.500.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	49 Desa	49 bumdes	22.500.300	DINAS PEMBERDAYAAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					dan Lembaga Kerja sama antar Desa		Kecamatan, Semua Kelurahan							MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	2.01	9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa yang fasilitasi	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Desa	666.412.050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	49 Desa	10 Desa	666.412.050	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan profilDesa/Kel	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	70 Desa/Kel	20.279.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	49 Desa	70 Desa/Kel	20.279.750	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah lomba desa yang diadakan.	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Desa/Kel	9.999.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	49 Desa	70 Desa/Kel	9.999.800	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	**#**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	Persentase peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan		4,29 %	**160.450.750**			4,29 %	**160.450.750**	
2	**#**	**5**	2.01		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah kabupaten/kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten yang diberdayakan		7 lembaga	**160.450.750**			7 lembaga	**160.450.750**	
2	13	5	2.01	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga	Jumlah pengurus LPM yang ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	105 Orang	23.119.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	70 D/K	105 Orang	23.119.800	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat									
2	13	5	2.01	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah aparat desa yang difasilitasi dalam pemanfaatan TTG	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Orang	5.780.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	70 D/K	24 Orang	5.780.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	5	2.01	7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah pelaksanaan bulan bakti gotong royong masyarakat	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kali	8.299.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	70 D/K	1 Kali	8.299.900	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	5	2.01	8	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Petugas Trantib yang difasilitasi	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	188 Orang	7.763.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	70 D/K	188 Orang	7.763.900	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	5	2.01	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah program pokok PKK yang difasilitasi	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Program Pokok	115.487.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	70 D/K	10 Program Pokok	115.487.150	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2	**#**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				**7.786.751.867**				**5.540.746.372**	
2	**#**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perhubungan		100 %	**5.597.454.417**			100 %	**5.529.501.372**	
2	**#**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu		100 % 100 % 100 %	**33.270.000**			100 % 100 % 100 %	**0**	
2	15	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	9.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng	2 Dokumen	0	DINAS PERHUBUNGAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	15	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	9.160.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng	1 Dokumen	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	2.560.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng	2 Dokumen	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	9 Dokumen	11.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng	9 Dokumen	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	**#**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**5.038.977.758**			100 %	**5.319.069.372**	
2	15	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	50 ASN	5.000.977.758	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng	50 ASN	5.284.569.372	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	170 SPM	3.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng	170 SPM	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	25 Dokumen	34.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng	25 Dokumen	34.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	**#**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	**60.900.000**			100 %	**70.000.000**	
2	15	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Dokumen	60.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng	5 Dokumen	70.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	**#**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**234.172.310**			100 %	**45.766.000**	
2	15	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata,	4 Jenis	578.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng	4 Jenis	1.500.000	DINAS PERHUBUNGAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Lalabata Rilau							
2	15	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Jenis	2.795.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng	4 Jenis	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Paket	37.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng	2 Paket	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Jenis	14.015.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng	5 Jenis	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Paket	44.131.460	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng	5 Paket	44.266.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg terfasilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	65 Orang	975.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng	65 Orang	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	590 Kali	134.077.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng	590 Kali	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	**#**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	**4.200.000**			100 %	**0**	
2	15	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Jenis	4.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng	1 Jenis	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	**#**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	**92.066.189**			100 %	**94.666.000**	
2		1		2		Jumlah pemenuhan jasa telepon		12 Kali	41.666.189			12 Kali	44.266.000	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
	1 5		2.0 8		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa air Jumlah pemenuhan listrik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng			DINAS PERHUBUNGAN
2	1 5	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Jenis	50.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng	2 Jenis	50.400.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	**#**	**1**	2.0 9		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	**133.868.160**			100 %	**0**	
2	1 5	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Unit	35.076.525	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng	1 Unit	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	1 5	1	2.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	13 Unit	92.571.635	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng	13 Unit	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	1 5	1	2.0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	10 Unit	6.220.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng	10 Unit	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	**#**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota V/C Ratio		82 % 0,065 %	**2.189.297.450**			83 % 0,07 %	**11.245.000**	
2	**#**	**2**	2.0 2		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan		92%	**1.440.372.800**			92%	**0**	
2	1 5	2	2.0 2	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Penerangan Lampu Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Titik	1.322.272.800	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan	Masyarakat Pengguna Jalan	100 Titik	0	DINAS PERHUBUNGAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
										Moda dan Sarana Transportasi Umum				
2	15	2	2.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah rambu-rambu jalan dan marka jalan baru yang berfungsi	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Buah	94.700.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	Masyarakat Pengguna Jalan	70 Buah	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah rambu-rambu jalan dan marka yang berfungsi kembali	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	34 Buah	23.400.000	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	Masyarakat Pengguna Jalan	34 Buah	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	**#**	**2**	2.03		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe C		100%	**5.627.650**			100%	**0**	
2	15	2	2.03	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal yang direhab/dipelihara (buah)	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenraree; Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	1 Terminal	5.627.650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terminal Sentral, Terminal Takalala	1 Terminal	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	**#**	**2**	2.04		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	Jumlah Retribusi Terminal dan Parkir (Rupiah)		258125700 Rupiah	**327.351.000**			258125700 Rupiah	**0**	
2	15	2	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Titik Lokasi Parkir	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 Titik	327.351.000	Retribusi Jasa Umum	Pengemudi Transportasi Darat	17 Titik	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	**#**	**2**	2.05		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	Persentase Kendaraan yang memenuhi Persyaratan Tehnis dan Laik Jalan		89%	**55.400.000**			89%	**0**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	15	2	2.05	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan yang diadakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Paket	55.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sarana Transportasi Umum	2 Paket	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	**#**	**2**	2.06		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan		85.71 %	**325.625.000**			85.71 %	**0**	
2	15	2	2.06	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan (kali)	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	48 Kali	321.425.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sopir Angkutan Umum dan Personil LLAJ	48 Kali	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2.06	3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas yang dilaksanakan (kegiatan)	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	8 Kegiatan	4.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sopir Angkutan Umum dan Personil LLAJ	8 Kegiatan	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	**#**	**2**	2.07		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	Jumlah Bengkel yang dibina		40 Bengkel	**896.000**			40 Bengkel	**0**	
2	15	2	2.07	4	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah bengkel berdampak lalu lintas yang dibina (Bengkel)	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	40 Bengkel	896.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengusaha Bengkel	40 Bengkel	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	**#**	**2**	2.08		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ yang dilaksanakan		8 Kali	**14.380.000**			8 Kali	**0**	
2	15	2	2.08	4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan (Kegiatan)	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Kegiatan	14.380.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat yang berprofesi sebagai sopir	2 Kegiatan	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	**#**	**2**	2.09		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten yang disediakan		1138 Angkutan	**8.400.000**			1138 Angkutan	**0**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	15	2	2.09	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan /atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten yang disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1138 Angkutan	8.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Angkutan	1138 Angkutan	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	**#**	**2**	2.14		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah rekomendasi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Daerah Kabupaten yang diterbitkan		60 Rekomendasi	**11.245.000**			60 Rekomendasi	**11.245.000**	
2	15	2	2.14	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek lintas Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten yang di tertibkan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	60 Rekomendasi	11.245.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengemudi/Sopir Angkutan Umum	60 Rekomendasi	11.245.000	DINAS PERHUBUNGAN
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2	**#**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**6.878.005.110**				**7.637.011.142**	
2	**#**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika		100 %	**4.163.770.255**			100 %	**4.371.958.767**	
2	**#**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu		100 % 100 % 100 %	**25.005.500**			100 % 100 % 100 %	**26.255.775**	
2	16	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 dokumen	2.625.000		Diskominfo	3 dokumen	2.756.250	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan,	1 dokumen	9.930.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Diskominfo	1 dokumen	10.427.025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semua Kelurahan							
2	16	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang tersusun	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	1.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Diskominfo	1 dokumen	1.995.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 dokumen	10.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Diskominfo	6 dokumen	11.077.500	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**#**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**3.703.193.740**			100 %	**3.888.353.427**	
2	16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	35 Orang	3.688.130.440	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Diskominfo	35 Orang	3.872.536.962	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	150 SPM	3.775.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Diskominfo	150 SPM	3.963.750	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	8 dokumen	11.288.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Diskominfo	8 dokumen	11.852.715	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**#**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah		100 %	**700.000**			100 %	**735.000**	
2	16	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 dokumen	700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Diskominfo	6 dokumen	735.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**#**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	**37.550.000**			100 %	**39.427.500**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	16	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 dokumen	8.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Diskominfo	4 dokumen	9.187.500	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang terkelola	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Sistem	28.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Diskominfo	2 Sistem	30.240.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**#**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**247.014.750**			100 %	**259.365.488**	
2	16	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	10 Jenis	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Diskominfo	10 Jenis	1.050.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	10 Jenis	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Diskominfo	10 Jenis	1.050.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 paket	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Diskominfo	2 paket	31.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	25000 lembar	16.165.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Diskominfo	25000 lembar	16.973.250	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	50 Jenis	38.844.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Diskominfo	50 Jenis	40.786.988	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg terfasilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	240 tamu	6.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Diskominfo	240 tamu	6.930.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Semua	70 kali	153.405.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Diskominfo	70 kali	161.075.250	DINAS KOMUNIKASI



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Kecamatan, Semua Kelurahan							DAN INFORMATIKA
2	**#**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	**28.470.000**			100 %	**29.893.500**	
2	16	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Unit	28.470.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Diskominfo	4 Unit	29.893.500	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**#**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	**46.960.000**			100 %	**49.308.000**	
2	16	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telepon Jumlah pemenuhan jasa air Jumlah pemenuhan listrik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	24 kali	19.360.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Diskominfo	24 kali	20.328.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 paket	27.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Diskominfo	2 paket	28.980.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**#**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	**74.876.265**			100 %	**78.620.077**	
2	16	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Unit	30.996.890	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Diskominfo	1 Unit	32.546.734	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Unit	26.999.375	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Diskominfo	3 Unit	28.349.343	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata,	18 Unit	16.880.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Diskominfo	18 Unit	17.724.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Lalabata Rilau							
2	**#**	**2**			**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100 % 25 %	**1.653.187.900**			100 % 27 %	**2.150.953.073**	
2	**#**	**2**	2.01		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)		80 %	**1.653.187.900**			80 %	**2.150.953.073**	
2	16	2	2.01	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Pengaduan dan Aspirasi Publik yang dimonitoring	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	20 pengaduan	9.660.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD dan Masyarakat	20 pengaduan	10.143.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	2	2.01	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah domain dan sub domain pemkab soppeng yang dikelola	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 konten	44.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD dan Masyarakat	1 konten	78.400.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	2	2.01	6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah kegiatan keikutsertaan dalam pameran	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 layanan	33.803.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD dan Masyarakat	1 layanan	67.606.900	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	2	2.01	8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah menara yang diawasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	70 Organisasi	78.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD dan Masyarakat	70 Organisasi	82.425.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	2	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang mendapat penguatan kapasitas	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Orang	36.074.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD dan Masyarakat	2 Orang	37.878.173	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	2	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah penyebarluasan informasi penyelenggaraan daerah melalui media cetak lokal, media cetak nasional dan media online	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	200 media/komunitas	1.450.400.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	OPD dan Masyarakat	200 media/komunitas	1.874.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**#**	**3**			**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo		100 %	**1.061.046.955**			100 %	**1.114.099.302**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	**#**	**3**	2.01		**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015		85 %	**305.982.106**			85 %	**321.281.211**	
2	16	3	2.01	2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah domain dan sub domain pemkab soppeng yang dikelola	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Opd	116.582.106	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD dan Masyarakat	1 Opd	122.411.211	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	3	2.01	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah jenis informasi yang tersaji	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	10 Opd	189.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD dan Masyarakat	10 Opd	198.870.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**#**	**3**	2.02		**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Nilai Indeks SPBE		2 -	**755.064.849**			2 -	**792.818.091**	
2	16	3	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah langganan provider internet	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Orang	750.664.849	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD dan Masyarakat	2 Orang	788.198.091	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	3	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah SKPD yang terlibat dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	34 ada/tidak ada	4.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD dan Masyarakat	34 ada/tidak ada	4.620.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**#**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**143.950.000**				**151.147.500**	
2	**#**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah		100 %	**143.950.000**			100 %	**151.147.500**	
2	**#**	**2**	2.01		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup kabupaten soppeng		100 %	**143.950.000**			100 %	**151.147.500**	
2	20	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	jumlah dokumen statistik sektoral yang dihasilkan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 dokumen	143.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD dan Masyarakat	3 dokumen	151.147.500	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	**#**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				**48.350.000**				**50.767.500**	
2	**#**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah		260	**48.350.000**			265	**50.767.500**	
2	**#**	**2**	2.01		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase keamanan informasi Pemeritnah daerah		100 %	**14.700.000**			100 %	**15.435.000**	
2	21	2	2.01	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah peserta bimbingan pengamanan informasi sandi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	70 Perangkat	14.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD	70 Perangkat	15.435.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**#**	**2**	2.02		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan		0,02%	**33.650.000**			0,02%	**35.332.500**	
2	21	2	2.02	1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi;jumlah skpd yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	34 Orang	33.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD	34 Orang	35.332.500	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2	**#**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				**6.879.017.909**				**6.913.695.023**	
2	**#**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM		100 %	**6.436.435.309**			100 %	**6.471.112.423**	
2	**#**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu		100 % 100 % 100 %	**26.750.000**			100 % 100 % 100 %	**26.740.000**	
2	17	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	8.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2 Dokumen	8.250.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	17	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	9.360.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2 Dokumen	9.360.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2	17	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	8 Dokumen	9.140.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	8 Dokumen	9.130.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2	**#**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**5.692.452.848**			100 %	**5.693.767.427**	
2	17	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	53 Orang	5.669.192.848	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	53 Orang	5.670.507.427	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2	17	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 SPM	10.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	100 SPM	10.500.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2	17	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	6 dokumen	12.760.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	6 dokumen	12.760.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2	**#**	**1**	2.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		100%	**21.373.828**			100%	**21.373.828**	
2	17	1	2.04	1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah objek retribusi yang terkelola	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 objek retribusi	21.373.828	Retribusi Jasa Umum	Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2 objek retribusi	21.373.828	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2	**#**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	**34.132.000**			100%	**63.750.000**	
2	17	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 dokumen	13.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4 dokumen	13.750.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	17	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Orang	20.382.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2 Orang	50.000.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2	**#**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**366.243.048**			100 %	**368.047.808**	
2	17	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	9 jenis	997.208	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	9 jenis	997.208	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2	17	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 paket	25.290.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3 paket	25.290.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2	17	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	7 Jenis	21.860.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	7 Jenis	21.860.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2	17	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Paket	90.380.640	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3 Paket	92.185.400	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2	17	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg terfasilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	160 Orang	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	160 Orang	2.400.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2	17	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	425 Kali	225.315.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	425 Kali	225.315.200	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2	**#**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	**106.690.000**			100 %	**106.690.000**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	17	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	3 jenis	47.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3 jenis	47.700.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2	17	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	7 unit	58.990.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	7 unit	58.990.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2	**#**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	**120.546.540**			100 %	**122.500.000**	
2	17	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telepon Jumlah pemenuhan jasa air Jumlah pemenuhan listrik	Kab. Soppeng, Liliraja, Jennae; Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau; Kab. Soppeng, Lalabata, Botto; Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kelurahan	12 Kali 12 Kali	91.146.540	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	12 Kali 12 Kali	93.100.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2	17	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 jenis	29.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2 jenis	29.400.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2	**#**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	**68.247.045**			100 %	**68.243.360**	
2	17	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	16 unit	30.329.320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	16 unit	29.590.560	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	17	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 unit	4.892.725	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1 unit	5.627.800	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2	17	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	11 unit	5.440.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	11 unit	5.440.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2	17	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	65 M2	27.585.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	130 M2	27.585.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2	**#**	**3**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Persentase koperasi sehat dari total koperasi aktif		20,48 %	**12.930.500**			21,08 %	**12.930.500**	
2	**#**	**3**	2.01		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi		36.56 %	**12.930.500**			36.56 %	**12.930.500**	
2	17	3	2.01	1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi, KSP/USP yang diperiksa dan diawasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27 Koperasi	12.930.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten	27 Koperasi	12.930.500	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2	**#**	**4**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	Persentase koperasi yang sehat terhadap koperasi yang dinilai kesehatannya		68 %	**7.250.000**			70 %	**7.250.000**	
2	**#**	**4**	2.01		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah koperasi yang sehat		34 orang	**7.250.000**			34 orang	**7.250.000**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	1 7	4	2.0 1	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 koperasi	7.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Koperasi di Kabupaten Soppeng	50 koperasi	7.250.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2	**#**	**5**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	Persentase Koperasi yang memiliki SDM yang mencapai peningkatan kompetensi Persentase usaha mikro dengan pelaku usaha yang mencapai peningkatan kompetensi		32,26 % 5,59 %	**390.304.000**			48,39 % 6,58 %	**390.304.000**	
2	**#**	**5**	2.0 1		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi perkoperasian		110 orang	**157.459.500**			110 orang	**157.459.500**	
2	1 7	5	2.0 1	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah pengurus dan pengawas koperasi yang melakukan peningkatan kompetensi Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi perkoperasian dan UMKM	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	60 orang 50 orang	157.459.500	DAK Non Fisik-PK2UKM	Pengurus dan Pengawas koperasi	60 orang 50 orang	157.459.500	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2	**#**	**5**	2.0 2		**Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah peserta pelatihan (UMKM) yang mencapai peningkatan kompetensi		90 orang	**232.844.500**			90 orang	**232.844.500**	
2	1 7	5	2.0 2	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah pelaku UKM yang mendapatkan peningkatan kompetensi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kelurahan	90 Orang	232.844.500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Pelaku Usaha Mikro	90 Orang	232.844.500	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	**#**	**8**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala miko		50,50 %	**32.098.100**			58,25 %	**32.098.100**	
2	**#**	**8**	2.01		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	Jumlah usaha mikro yang mendapatkan pendampingan pengembangan usaha		75 usaha mikro	**32.098.100**			75 usaha mikro	**32.098.100**	
2	17	8	2.01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah usaha mikro dalam kemasan dan pemasaran produk UMKM	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	75 usaha mikro	32.098.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pelaku usaha mikro	75 usaha mikro	32.098.100	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**									
3	**#**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**739.374.000**				**744.130.000**	
3	**#**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan		50 %	**572.750.000**			50 %	**572.750.000**	
3	**#**	**3**	2.01		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	Jumlah sarana distribusi perdagangan termanfaatkan sesuai peruntukannya		18 unit	**557.460.000**			18 unit	**557.460.000**	
3	30	3	2.01	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang terbangun/terevitalisasi		1 Unit	0		Pelaku dagang dan masyarakat di Kabupaten Soppeng		0	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
3	30	3	2.01	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang pengelolaannya terfasilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18 unit	557.460.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pelaku dagang dan masyarakat di Kabupaten Soppeng	18 unit	557.460.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
3	**#**	**3**	2.02		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	Jumlah pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan yang terlaksana		3 Kali	**15.290.000**			3 Kali	**15.290.000**	
3	30	3	2.02	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah kelompok pedagang pengelola sarana distribusi perdagangan yang terkendali	Kab. Soppeng, Liliraja, Jennae Kab. Soppeng,	3 Kelompok	15.290.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3 Kelompok	15.290.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Lalabata, Lapajung Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri							
3	**#**	**4**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Persentase koefisien variasi harga antar waktu		3,92 %	**6.600.000**			3,92 %	**6.450.000**	
3	**#**	**4**	2.02		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	Jumlah harga rata-rata dan stok barang Bapokting yang terdokumentasi		3 Dokumen	**6.600.000**			3 Dokumen	**6.450.000**	
3	30	4	2.02	2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah pelaksanaan pemantauan harga Bapokting di tingkat pasar Jumlah pemantauan harga Barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terlaksana di tingkat pasar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	336 kali	6.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pedagang, konsumen, suplier dan masyarakat	336 kali	6.450.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
3	**#**	**6**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku		80,88 %	**39.060.000**			84,56 %	**39.930.000**	
3	**#**	**6**	2.01		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	Jumlah alat yang ditera dan ditera ulang Jumlah alat yang yang bertanda tera sah berlaku		2200 alat 2200 alat	**39.060.000**			2200 alat 2200 alat	**39.930.000**	
3	30	6	2.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2200 Alat	23.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib tera dan pelaku usaha	2200 Alat	23.700.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
3	30	6	2.01	2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha dan konsumen yang melek UU Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 orang	12.230.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib tera dan pelaku usaha	80 orang	12.230.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
3	30	6	2.01	3	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha dengan tertib niaga yang terawasi	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kelurahan	24 pelaku usaha	3.130.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib tera dan pelaku usaha	24 pelaku usaha	4.000.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kelurahan							
3	**#**	**7**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	Persentase Pelaku usaha yang terfasilitasi dalam pemasaran penggunaan produk dalam negeri		1,86 %	**120.964.000**			2,49 %	**125.000.000**	
3	**#**	**7**	2.01		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	Jumlah pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri		2 even	**120.964.000**			2 even	**125.000.000**	
3	30	7	2.01	1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi dalam promosi penggunaan produk dalam negeri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Pelaku Usaha	120.964.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pelaku usaha	20 Pelaku Usaha	125.000.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
3	**#**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				**2.273.740.625**				**1.833.762.200**	
3	**#**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase pemenuhan perencanaan dan pembangunan industri unggulan daerah		26,67 %	**2.266.390.625**			33,33 %	**1.826.412.200**	
3	**#**	**2**	2.01		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	Jumlah paket pelaksanaan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota		5 paket	**2.266.390.625**			5 paket	**1.826.412.200**	
3	31	2	2.01	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen road map yang tersusun sesuai RPIK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pelaku Industri Kecil Menengah di Kabupaten Soppeng	1 Dokumen	100.000.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
3	3 1	2	2.0 1	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah sentra yang mendapat dukungan pengembangan industri	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Sentra	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pelaku Industri Kecil Menengah di Kabupaten Soppeng	1 Sentra	100.000.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
3	3 1	2	2.0 1	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah pelaku IKM yang berdaya saing	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	119 IKM	343.864.925	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH CHT	Pelaku Industri Kecil Menengah di Kabupaten Soppeng	119 IKM	63.333.200	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
3	3 1	2	2.0 1	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah sentra yang terbentuk	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 sentra	1.715.845.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH CHT Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Pelaku Industri Kecil Menengah di Kabupaten Soppeng	1 sentra	1.556.399.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
3	3 1	2	2.0 1	6	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah sentra yang dimonitoring dan dievaluasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Sentra	6.680.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pelaku Industri Kecil Menengah di Kabupaten Soppeng	1 Sentra	6.680.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
3	**#**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	Persentase tersedianya informasi industri yang tersedia secara lengkap dan terkini		45 %	**7.350.000**			45 %	**7.350.000**	
3	**#**	**4**	2.0 1		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah informasi industri yang tersajikan		1 informasi	**7.350.000**			1 informasi	**7.350.000**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
3	31	4	2.01	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah data industri yang terfasilitasi	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	7.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Soppeng	1 dokumen	7.350.000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2	**7**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**4.963.140.366**				**5.827.005.102**	
2	**7**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi		100 %	**4.548.413.666**			100 %	**5.560.005.102**	
2	**7**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu		100 % 100 % 100 %	**63.200.000**			100 % 100 % 100 %	**78.000.000**	
2	7	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	1 Dokumen	24.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor DPMPTSPNAKERTRANS	1 Dokumen	35.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	8 Dokumen	39.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor DPMPTSPNAKERTRANS	8 Dokumen	43.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	**7**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**4.066.477.858**			100 %	**5.026.640.000**	
2	7	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	37 Orang	4.044.277.858	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN DPMPTSP-NAKERTRANS dan Data realisasi keuangan	37 Orang	5.000.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
														KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Dokumen	22.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN DPMPTSP-NAKERTRANS dan Data realisasi keuangan	3 Dokumen	26.640.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	**7**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	**14.000.000**			100 %	**25.032.000**	
2	7	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Orang	14.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor DPMPTSP-NAKERTRANS	5 Orang	25.032.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	**7**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**207.513.207**			100 %	**228.333.102**	
2	7	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Jenis	934.452	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor DPMPTSP-NAKERTRANS	3 Jenis	1.121.342	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 paket	31.215.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor DPMPTSP-NAKERTRANS	3 paket	37.458.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Jenis	22.670.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor DPMPTSP-NAKERTRANS	4 Jenis	27.204.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
														KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Paket	100.568.955	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor DPMPTSP-NAKERTRANS	4 Paket	100.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	201 kali	52.124.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor DPMPTSP-NAKERTRANS	201 kali	62.549.760	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	**7**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	**121.999.321**			100 %	**122.000.000**	
2	7	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telepon Jumlah pemenuhanjasa air Jumlah pemenuhan listrik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 kali 12 kali 12 kali	121.999.321	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor DPMPTSPTKT	12 kali 12 kali 12 kali	122.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	**7**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	**75.223.280**			100 %	**80.000.000**	
2	7	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	9 unit	75.223.280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor DPMPTSPTKT	9 unit	80.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	**7**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja		20 %	**209.720.000**			25 %	**225.000.000**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	**7**	**2**	2.01		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/ kota		1 Dokumen	**209.720.000**			1 Dokumen	**225.000.000**	
2	7	2	2.01	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah rencana tenaga kerja makro yang tersusun (dokumen)	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	209.720.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perusahaan/LPK Swasta	1 Dokumen	225.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	**7**	**3**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		23,9 %	**205.006.700**			24 %	**42.000.000**	
2	**7**	**3**	2.01		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	Jumlah jenis pelatihan berbasis kompetensi bagi pencari kerja		2 Jenis	**205.006.700**			2 Jenis	**42.000.000**	
2	7	3	2.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	20 Peserta	205.006.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kerja di Kabupaten Soppeng	20 Peserta	42.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	**#**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**588.773.000**				**601.000.000**	
2	**#**	**4**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Persentase Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP		100 %	**266.200.000**			100 %	**276.000.000**	
2	**#**	**4**	2.01		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah izin yang diterbitkan berdasarkan rekomendasi teknis		1927 Izin	**266.200.000**			1927 Izin	**276.000.000**	
2	18	4	2.01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah rekomendasi dan perizinan, non perizinan penanaman modal yang ditindak lanjuti	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	700 Rekomendasi	203.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perizinan dan Non Perizinan	700 Rekomendasi	210.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	18	4	2.01	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang beroperasi sesuai komitmen	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	60 Laporan	31.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perizinan dan Non Perizinan	60 Laporan	33.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	18	4	2.01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Aduan Masyarakat yang Terselesaikan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	10 Pengaduan	31.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perizinan dan Non Perizinan	10 Pengaduan	33.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	**#**	**5**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Persentase Penyelesaian Jumlah Pelaporan LKPM		44,90 %	**322.573.000**			46,90 %	**325.000.000**	
2	**#**	**5**	2.01		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah perusahaan yang dipantau dibina dan diawasi menjadi kewenangan daerah		60 Perusahaan	**322.573.000**			60 Perusahaan	**325.000.000**	
2	18	5	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan pemantauan perusahaan yang telah dilaksanakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	102 Laporan	322.573.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Perusahaan	102 Laporan	325.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**									
3	**#**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**				**154.500.000**				**160.000.000**	
3	**#**	**4**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	Jumlah Satuan Pemukiman yang Dibina		1 UPT	**154.500.000**			1 UPT	**160.000.000**	
3	**#**	**4**	2.01		**Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian**	pendapatan perkapita transmigran		10500000 Rupiah	**154.500.000**			10500000 Rupiah	**160.000.000**	
3	32	4	2.01	2	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam	Jumlah penguatan infrastruktur sosial ekonomi dan kelembagaan	Kab. Soppeng, Marioriwawo	1 UPT	154.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kawasan Transmigran	1 UPT	160.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL,



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					rangka Kemandirian Satuan Pemukiman		, Semua Kelurahan							PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2	**#**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**5.857.986.596**				**5.622.064.624**	
2	**#**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga		100 %	**5.303.335.446**			100 %	**5.128.563.474**	
2	**#**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu		100 % 100 % 100 %	**30.899.400**			100 % 100 % 100 %	**30.899.400**	
2	19	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 dok	9.279.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	3 dok	9.279.800	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 dok	7.820.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	2 dok	7.820.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	9 dok	13.799.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	9 dok	13.799.600	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	**#**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**4.870.511.322**			100 %	**4.780.211.651**	
2	19	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	44 orang	4.821.588.722	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	44 orang	4.731.286.651	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	60 SPM	26.322.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	60 SPM	26.325.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	19	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 dok	22.600.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	5 dok	22.600.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	**#**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah		100 %	**7.200.000**			100 %	**0**	
2	19	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	6 dok	7.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	6 dok	0	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	**#**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	**42.600.000**			100%	**42.600.000**	
2	19	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 dok	21.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	5 dok	21.600.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang terkelola	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 sistem informasi	21.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	2 sistem informasi	21.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	**#**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**147.122.450**			100 %	**146.772.550**	
2	19	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	6 jenis	2.995.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	6 jenis	2.996.100	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 paket	19.690.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	3 paket	19.690.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	18571 lembar	10.499.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	18571 lembar	10.499.850	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	19	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	36 jenis	25.349.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	36 jenis	24.998.600	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg terfasilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	200 orang	13.320.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	200 orang	13.320.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	85 orang	75.268.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	85 orang	75.268.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	**#**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	**121.578.909**			100 %	**123.749.873**	
2	19	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telepon Jumlah pemenuhan jasa air Jumlah pemenuhan listrik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 kali	93.978.909	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	12 kali	96.149.873	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 jenis	27.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	2 jenis	27.600.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	**#**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	**83.423.365**			100 %	**4.330.000**	
2	19	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	6 unit	75.903.365	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	6 unit	0	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Unit	7.520.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	12 Unit	4.330.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	**#**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN**	Persentase Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri		1,03%	**400.318.500**			1,07%	**400.318.500**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan		28,54%				29,83%		
2	**#**	**2**	2.01		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	Jumlah pemuda pelopor dan wirausaha muda yang diberdayakan		71 orang	**400.318.500**			71 orang	**400.318.500**	
2	19	2	2.01	9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah anggota lulus seleksi, jumlah anggota paskibraka yang dibina	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	71 orang	400.318.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	pemuda, organisasi pemuda, wirausaha muda	71 orang	400.318.500	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	**#**	**3**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Jumlah Peningkatan Prestasi Olahraga		1 Prestasi Olahraga	**114.643.000**			1 Prestasi Olahraga	**53.493.000**	
2	**#**	**3**	2.02		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah atlet yang meraih penghargaan medali		15 orang	**92.118.000**			15 orang	**30.968.000**	
2	19	3	2.02	1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah cabang olahraga yang mengikuti kejuaraan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	6 cabang	61.150.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	atlet, pelatih, pelaku olahraga, cabang lahraga	6 cabang	0	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	3	2.02	3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah atlet yang meraih penghargaan medali	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	15 orang	30.968.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	atlet, pelatih, pelaku olahraga, cabang lahraga	15 orang	30.968.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	**#**	**3**	2.03		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	jumlah insan olahraga yang diberi peghargaan		12 atlet/pelatih	**22.525.000**			12 atlet/pelatih	**22.525.000**	
2	19	3	2.03	1	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah atlet yang lolos seleksi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	20 orang	10.125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	atlet, pelatih, pelaku olahraga cabang olahraga	20 orang	10.125.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	19	3	2.03	4	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah insan olahraga yang diberi penghargaan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 orang	12.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	atlet, pelatih, pelaku olahraga cabang olahraga	12 orang	12.400.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	**#**	**4**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	Persentase organisasi pramuka yang aktif		90,12 %	**39.689.650**			90,90%	**39.689.650**	
2	**#**	**4**	2.01		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	Jumlah anggota Pramuka yang dibina		100 orang	**39.689.650**			100 orang	**39.689.650**	
2	19	4	2.01	3	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah peserta kepramukaan yang dibina	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 orang	39.689.650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	pramuka, organisasi pramuka	100 orang	39.689.650	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**									
3	**#**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**553.125.623**				**521.145.874**	
3	**#**	**2**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara		44,50%	**464.680.623**			44,62%	**432.200.874**	
3	**#**	**2**	2.03		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	Jumlah destinasi priwisata yang dikelola		2 objek	**464.680.623**			2 objek	**432.200.874**	
3	26	2	2.03	3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah obyek wisata unggulan yang dipelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 objek	439.055.623	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pelaku dan Pengguna Jasa Kepariwisataan	3 objek	406.575.874	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	26	2	2.03	5	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah objek wisata unggulan yang dipelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 objek	25.625.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pelaku dan Pengguna Jasa Kepariwisataan	3 objek	25.625.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	**#**	**5**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Persentase tenaga kerja disektor pariwisata yang disertifikasi		29,20 %	**88.445.000**			33,30 %	**88.945.000**	
3	**#**	**5**	2.01		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia**	Jumlah perekrutan duta wisata		20 orang	**88.445.000**			20 orang	**88.945.000**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar									
3	26	5	2.01	3	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 pelatihan	88.445.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pelaku dan Pengguna Jasa Kepariwisataan	1 pelatihan	88.945.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2	**#**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				**7.113.565.120**				**14.833.612.452**	
2	**#**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perpustakaan		100 %	**4.430.749.620**			100 %	**4.411.612.452**	
2	**#**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu		100 % 100 % 100 %	**41.231.000**			100 % 100 % 100 %	**37.700.000**	
2	23	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	2 Dokumen	12.250.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2 Dokumen	17.100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	2 Dokumen	16.081.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2 Dokumen	9.300.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	11 Dokumen	12.900.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11 Dokumen	11.300.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**#**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**3.829.516.078**			100 %	**3.710.782.452**	
2	23	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	33 ASN	3.811.416.078	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	33 ASN	3.689.482.452	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	70 SPM	10.050.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	70 SPM	12.800.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	23	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	20 Dokumen	8.050.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	20 Dokumen	8.500.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**#**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	**24.300.000**			100%	**45.000.000**	
2	23	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	33 Orang	24.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas perpustakaan dan kearsipan	33 Orang	25.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**#**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**263.302.310**			100 %	**323.000.000**	
2	23	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	9 jenis	3.533.060	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9 jenis	4.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	8 jenis	3.347.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8 jenis	3.500.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	2 Paket	30.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2 Paket	2 Paket	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	2 Paket	6.175.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2 Paket	2 Paket	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	3 Paket	52.164.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3 Paket	57.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg terfasilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	350 Orang	8.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	350 Orang	11.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	400 kali	158.932.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	400 kali	200.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**#**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	**20.750.000**			100 %	**42.000.000**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	23	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	3 Jenis	20.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3 Jenis	40.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**#**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	**156.987.982**			100 %	**153.000.000**	
2	23	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telepon Jumlah pemenuhan jasa air Jumlah pemenuhan listrik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	12 Kali 12 Kali 12 Kali	62.187.982	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 Kali 12 Kali 12 Kali	65.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	5 Jenis	94.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5 Jenis	88.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**#**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	**94.662.250**			100 %	**100.130.000**	
2	23	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	1 Unit	38.812.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 Unit	38.630.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	5 Unit	44.447.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5 Unit	40.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	25 Unit	6.060.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	25 Unit	10.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	320 m2	5.342.550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	320 m2	10.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**#**	**2**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk		1,14	**2.680.580.500**			1,22	**10.416.000.000**	
2	**#**	**2**	2.01		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun		3.71 %	**74.091.500**			3.71 %	**270.500.000**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	23	2	2.01	4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	jumlah sekolah dasar yang ikut lomba story telling	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 SD	13.127.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas perpustakaan dan Kearsipan, Perpustakaan Sekolah dan perpustakaan Kelurahan / Desa	70 SD	15.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	2	2.01	5	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Desa / Kelurahan yang mengikut lomba	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 keluarahan/ desa	14.374.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas perpustakaan dan Kearsipan, Perpustakaan Sekolah dan perpustakaan Kelurahan / Desa	8 keluarahan/ desa	15.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	2	2.01	6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pustakawan dan tenaga perpustakaan yang mengikuti bintek	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Orang	6.089.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas perpustakaan dan Kearsipan, Perpustakaan Sekolah dan perpustakaan Kelurahan / Desa	40 Orang	7.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	2	2.01	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan Pustaka yang dikelola /dikembangkan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	15687 Judul	40.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas perpustakaan dan Kearsipan, Perpustakaan Sekolah dan perpustakaan Kelurahan / Desa	15687 Judul	40.500.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**#**	**2**	2.02		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Rata-Rata pengunjung per tahun		11340 Orang	**2.606.489.000**			11340 Orang	**10.145.500.000**	
2	23	2	2.02	1	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah pengunjung perpustakaan Umum, Perpustakaan Desa/ Kelurahan dan perpustakaan sekolah	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11340 Pengunjung	85.135.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas perpustakaan dan kearsipan, sekolah dan kelurahan/ Desa	11340 Pengunjung	100.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	2	2.02	2	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah gedung Perpustakaan yang dibangun dan dipelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	1 Paket	2.485.604.000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	Dinas perpustakaan dan kearsipan, sekolah dan kelurahan/ Desa	1 Paket	10.000.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	2	2.02	3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Peserta Pidato/Jumlah Peserta Cerdas Cermat	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	45 0rang	35.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas perpustakaan dan kearsipan, sekolah dan kelurahan/ Desa	45 0rang	37.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	**#**	**3**			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	Jumlah Naskah Kuno yang diakuisis/dialih Media (Digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya		1 naskah	**2.235.000**			1 naskah	**6.000.000**	
2	**#**	**3**	2.01		**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Koleksi Naskah Kuno yang diakuisisi/dialihmediakan		1 Naskah	**2.235.000**			1 Naskah	**6.000.000**	
2	23	3	2.01	1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang menyimpan Naskah Kuno pada Perpustakaan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	2 Orang	1.075.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas perpustakaan dan Kearsipan	2 Orang	2.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	3	2.01	2	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang di Alihmediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	2 Naskah	1.160.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas perpustakaan dan Kearsipan	2 Naskah	4.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**#**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				**66.944.850**				**94.900.000**	
2	**#**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar		100 %	**66.944.850**			100 %	**81.500.000**	
2	**#**	**2**	2.01		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Perangkat daerah yang mengelola arsip dinamis		6 OPD	**18.349.850**			6 OPD	**21.000.000**	
2	24	2	2.01	1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang dibuat dan diciptakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	1 Dokumen	13.949.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 Dokumen	15.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	2	2.01	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang disusun dan dipelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	2500 lembar	4.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2500 lembar	6.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**#**	**2**	2.02		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Perangkat Daerah yang mengelolah arsip statis		6 OPD	**36.270.000**			6 OPD	**45.000.000**	
2	24	2	2.02	1	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah arsip terjaga dan disampaikan ke ANRI		1 dokumen	25.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	34 SKPD	1 dokumen	30.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	2	2.02	2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip statis dan jumlah perangkat daerah yang dibina	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	6 OPD	11.020.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	34 SKPD	6 OPD	15.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**#**	**2**	2.03		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi**	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku		79.94 %	**12.325.000**			79.94 %	**15.500.000**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota									
2	24	2	2.03	2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi Jumlah SKPD yang mengelola arsip	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	45 Orang 21 OPD	12.325.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan dan kearsipan	45 Orang 21 OPD	13.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**									
3	**#**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**7.596.816.055**				**8.605.000.000**	
3	**#**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan		100 %	**6.002.405.855**			100 %	**7.400.000.000**	
3	**#**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu		100 % 100 % 100 %	**22.340.400**			100 % 100 % 100 %	**41.900.000**	
3	25	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 dokumen	10.115.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng	3 dokumen	28.100.000	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3	25	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	8 dokumen	12.225.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng	8 dokumen	13.800.000	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3	**#**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**5.549.441.763**			100 %	**5.563.846.813**	
3	25	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	51 ASN	5.523.049.463	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng	51 ASN	5.523.049.463	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3	25	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 dokumen	26.392.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng	1 dokumen	40.797.350	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3	**#**	**1**	2.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		100%	**133.764**			100%	**133.764**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
3	25	1	2.04	1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah objek retribusi yang terkelola	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Obejk retribusi	133.764	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng	4 Obejk retribusi	133.764	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3	**#**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**164.349.990**			100 %	**755.157.760**	
3	25	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 jenis	496.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng	1 jenis	4.803.400	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3	25	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 jenis	1.074.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng	4 jenis	4.885.500	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3	25	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 paket	12.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng	1 paket	14.100.000	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3	25	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Jenis	3.370.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng	1 Jenis	9.264.150	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3	25	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Paket	15.585.640	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng	3 Paket	81.592.910	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3	25	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	248 kali	131.423.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng	248 kali	640.511.800	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3	**#**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	**10.200.000**			100 %	**439.500.000**	
3	25	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kab. Soppeng, Lalabata,	1 unit	10.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan	1 unit	439.500.000	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Lalabata Rilau				dan Perikanan Kabupaten Soppeng			HEWAN DAN PERIKANAN
3	**#**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	**129.697.274**			100 %	**189.750.209**	
3	25	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telepon Jumlah pemenuhan jasa air Jumlah pemenuhan listrik	Kab. Soppeng, Liliraja, Jennae; Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau; Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo; Kab. Soppeng, Marioriawa, Limpomajang; Kab. Soppeng, Citta, Citta	12 kali 12 kali 12 kali	65.197.274	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng	12 kali 12 kali 12 kali	76.350.209	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3	25	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Jenis	64.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng	3 Jenis	113.400.000	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3	**#**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	**126.242.664**			100 %	**409.711.454**	
3	25	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	38 unit	33.867.593	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng	38 unit	139.884.848	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3	25	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	6 unit	23.223.631	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng	6 unit	111.349.796	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
3	25	1	2.09	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	6 unit	56.221.440	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng	6 unit	81.756.810	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3	25	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	11 unit	3.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng	11 unit	16.270.000	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3	25	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau; Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo	225 m2	9.880.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng	225 m2	60.450.000	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3	**#**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)		3.017,35 ton	**324.499.400**			3.047,53 ton	**120.000.000**	
3	**#**	**3**	2.01		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah sarana dan prasarana penangkapan ikan di dalam daerah kabupaten/kota yang dikelola		1 paket	**324.499.400**			1 paket	**120.000.000**	
3	25	3	2.01	2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana perikanan tangkap yang tersedia	Kab. Soppeng, Marioriawa, Limpomajang; Kab. Soppeng, Donri Donri, Kessing	1 paket	324.499.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	Kelompok nelayan	1 paket	120.000.000	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3	**#**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)		434,38 ton	**874.248.000**			438,72 ton	**880.000.000**	
3	**#**	**4**	2.02		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan		5 Kelompok	**443.838.000**			5 Kelompok	**495.000.000**	
3	25	4	2.02	1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah benih ikan yang dihasilkan	Kab. Soppeng,	8820000 ekor	443.838.000		Kelompok pembudidaya ikan	8820000 ekor	495.000.000	DINAS PETERNAKAN,



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Liliraja, Jennae Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo Kab. Soppeng, Citta, Citta			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3	**#**	**4**	2.04		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	Jumlah Produksi Ikan Kontribusi Hasil Pembudidayaan Ikan		434.34 ton	**430.410.000**			434.34 ton	**385.000.000**	
3	25	4	2.04	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pengembangan Perikanan yang Diadakan	Kab. Soppeng, Citta, Citta	1 paket	261.270.000	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	Kelompok pembudidaya ikan	1 paket	200.000.000	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3	25	4	2.04	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana usaha pembudidaya ikan dalam kabupaten/ kota	Kab. Soppeng, Citta, Citta	1 paket	169.140.000	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	Kelompok pembudidaya ikan	1 paket	185.000.000	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3	**#**	**6**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Persentase Peningkatan Jenis Produk Olahan Hasil Perikanan		50 %	**395.662.800**			100 %	**205.000.000**	
3	**#**	**6**	2.01		**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	Jumlah usaha skala mikro dan kecil yang difasilitasi untuk mendapatkan rekomendasi		5 unit	**18.872.800**			5 unit	**20.000.000**	
3	25	6	2.01	1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis data dan informasi yang disediakan	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang Kab. Soppeng, Lalabata, Botto Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	3 jenis	18.872.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelompok agribisnis/ pelaku usaha perikanan	3 jenis	20.000.000	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
3	**#**	**6**	2.03		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah jenis bahan baku industri pengolahan ikan		3 Jenis	**376.790.000**			3 Jenis	**185.000.000**	
3	25	6	2.03	2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil yang diberikan fasilitas	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	1 unit	376.790.000	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	Kelompok agribisnis/ pelaku usaha perikanan	1 unit	185.000.000	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3	**#**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**535.657.113**				**820.000.000**	
3	**#**	**2**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Produksi Daging (Kg) Produksi Hasil Ikutan Lainnya (Kg) Produksi Telur (Kg)		475.937 Ton 95.969 Kg 9.883.338 Kg	**363.469.000**			503.065 Ton 100.479 Kg 10.011.821 Kg	**400.000.000**	
3	**#**	**2**	2.03		**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah kelahiran ternak sapi hasil IB Jumlah kelompok penerima bibit ternak yang disebar Jumlah luas lahan HPT Jumlah unit usaha (toko/ poultry shop) yang diawasi dalam rangka pengawasan dan peredaran pakan		349 ekor 2 kelompok 465.97 ha 22 unit	**363.469.000**			349 ekor 2 kelompok 465.97 ha 22 unit	**400.000.000**	
3	27	2	2.03	1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah kelahiran ternak sapi hasil IB jumlah kelompok penerima bibit ternak yang disebar Jumlah luas lahan HPT Jumlah unit usaha (toko/ poultry shop) yang diawasi dalam rangka pengawasan dan peredaran pakan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenraraे; Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang; Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang; Kab. Soppeng, Lalabata, Botto; Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu; Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	349 ekor 2 Kelompok 465.97 Ha 22 unit	363.469.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peternak/ Keolompok ternak	349 ekor 2 Kelompok 465.97 Ha 22 unit	400.000.000	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
3	**#**	**3**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Persentase Prasarana (Peternakan) yang Digunakan		95,00 %	**69.728.213**			95,00 %	**200.000.000**	
3	**#**	**3**	2.02		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	Jumlah Prasarana Peternakan yang Diadakan		1 Unit	**69.728.213**			1 Unit	**200.000.000**	
3	27	3	2.02	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana kawasan kebun bibit rumput yang dibangun/ rehab	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Unit	69.728.213	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelompok pembudidaya ternak	1 Unit	200.000.000	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3	**#**	**4**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (Anthrax) Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (Avian Influensa) Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (Brucellosis) Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (Rabies)		0 % 0 % 0,05 % 0 %	**102.459.900**			0 % 0 % 0,04 % 0 %	**220.000.000**	
3	**#**	**4**	2.01		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah ternak yang mendapatkan pelayanan keswan dan kesmavet		1300 ekor	**95.549.900**			1300 ekor	**120.000.000**	
3	27	4	2.01	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah HPR (hewan penular rabies) yang kebal terhadap rabies Jumlah ternak sapi yang mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi Jumlah ternak yang kebal terhadap anthrax Jumlah unggas yang tahan terhadap penyakit AI (avian influenza)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2500 ekor 400 ekor 2200 ekor 600000 ekor	95.549.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peternak, Kelompok ternak, dan masyarakat sekitar	2500 ekor 400 ekor 2200 ekor 600000 ekor	120.000.000	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3	**#**	**4**	2.04		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	Jumlah pemeriksanaan sampel keswan dan kesmavet		20 sampel	**6.910.000**			20 sampel	**100.000.000**	
3	27	4	2.04	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah ternak dan produk peternakan yang dikirim ke luar daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	950 ekor	6.910.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pelaku usaha peternakan	950 ekor	100.000.000	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**									
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**				**190.180.000**				**190.180.000**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah		100 %	**87.480.000**			100 %	**87.480.000**	
4	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**630.000**			100 %	**630.000**	
4	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	63 SPM	630.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng	63 SPM	630.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**86.850.000**			100 %	**86.850.000**	
4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Paket	26.180.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng	1 Paket	26.180.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Jenis	2.278.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng	1 Jenis	2.278.500	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Paket	9.010.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng	4 Paket	9.010.100	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	92 Kali	49.381.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng	92 Kali	49.381.400	SEKRETARIAT DAERAH
4	**1**	**2**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Cakupan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang Dirumuskan		100 %	**102.700.000**			100 %	**102.700.000**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
4	**1**	**2**	2.01		**Administrasi Tata Pemerintahan**	Jumlah Kebijakan Administrasi Tata Pemerintahan yang disusun		10 Kebijakan	**91.760.000**			10 Kebijakan	**91.760.000**	
4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Penyelenggaraan Penataan Administrasi Pemerintahan yang Terlaksana	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Kali	15.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemerintah Kabupaten Soppeng	8 Kali	15.600.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Kewilayahan yang Dihasilkan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Dokumen	23.340.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemerintah Kabupaten Soppeng	3 Dokumen	23.340.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Otonomi Daerah yang Disusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Dokumen	52.820.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemerintah Kabupaten Soppeng	4 Dokumen	52.820.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**1**	**2**	2.04		**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	Jumlah Rumusan Kebijakan Fasilitasi Kerjasama Daerah yang disusun		1 Kebijakan	**10.940.000**			1 Kebijakan	**10.940.000**	
4	1	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Kesepakatan Bersama (MoU)/Perjanjian Kerjasama (PKS) Dalam Negeri yang difasilitasi dan dikoordinasikan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	20 Dokumen	10.940.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemerintah Kabupaten Soppeng/Stakeholder	20 Dokumen	10.940.000	SEKRETARIAT DAERAH
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**									
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**				**544.460.800**				**545.825.792**	
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah		100 %	**240.378.900**			100 %	**241.743.892**	
4	**1**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	**135.520.000**			100 %	**136.884.992**	
4	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosisalisasi perundang-undangan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan,	70 Kel/Desa	135.520.000	DBH CHT	Masyarakat di Kelurahan/Desa	70 Kel/Desa	136.884.992	SEKRETARIAT DAERAH



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semua Kelurahan; Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau							
4	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**104.858.900**			100 %	**104.858.900**	
4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Paket	19.495.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng	1 Paket	19.495.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Paket	10.775.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng	3 Paket	10.775.900	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	106 Kali	74.588.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng	106 Kali	74.588.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**1**	**2**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Cakupan Kebijakan Bidang Hukum dan Perundang-undangan yang Dirumuskan		100 %	**304.081.900**			100 %	**304.081.900**	
4	**1**	**2**	2.03		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	Persentase Produk Hukum Daerah yang terfasilitasi sesuai standar		100 %	**304.081.900**			100 %	**304.081.900**	
4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Rancangan Perda	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenraree Kab. Soppeng,	10 Perda	68.806.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemerintah Kabupaten Soppeng/ Sekretariat Daerah/ Masyarakat	10 Perda	68.806.500	SEKRETARIAT DAERAH



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Liliraja, Appanang Kab. Soppeng, Lilirilau, Parenring Kab. Soppeng, Lalabata, Salokaraja Kab. Soppeng, Marioriawa, Manorang Salo Kab. Soppeng, Donri Donri, Pising Kab. Soppeng, Ganra, Belo Kab. Soppeng, Citta, Kampiri							
4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus/LO di Lingkup Pemerintah Daerah yang ditangani	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Kasus/Lo	123.065.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemerintah Kabupaten Soppeng/ Sekretariat Daerah/ Masyarakat	2 Kasus/Lo	123.065.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum yang didokumentasikan dan dipublikasikan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi Kab. Soppeng, Marioriwawo, Goarie	80 Perda/Perbup	112.210.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemerintah Kabupaten Soppeng/ Sekretariat Daerah/ Masyarakat	80 Perda/Perbup	112.210.400	SEKRETARIAT DAERAH



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Kab. Soppeng, Liliraja, Jampu Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung Kab. Soppeng, Lilirilau, Masing Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu Kab. Soppeng, Donri Donri, Labokong Kab. Soppeng, Ganra, Lompulle Kab. Soppeng, Ganra, Enrekang Kab. Soppeng, Citta, Citta Kab. Soppeng, Citta, Labae							
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**									
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**				**273.384.800**				**273.384.800**	
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah		100 %	**273.384.800**			100 %	**273.384.800**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
4	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**750.000**			100 %	**750.000**	
4	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	63 SPM	750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng	63 SPM	750.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**65.968.200**			100 %	**65.968.200**	
4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Paket	7.070.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng	1 Paket	7.070.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Jenis	1.225.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng	1 Jenis	1.225.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Paket	10.904.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng	4 Paket	10.904.400	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	32 Kali	46.768.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng	32 Kali	46.768.800	SEKRETARIAT DAERAH
4	**1**	**1**	2.13		**Penataan Organisasi**	Jumlah Rumusan Kebijakan Penataan Organisasi yang Disusun		10 Kebijakan	**206.666.600**			10 Kebijakan	**206.666.600**	
4	1	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	82.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemerintah Kabupaten Soppeng / Sekretariat Daerah / SKPD	2 Dokumen	82.050.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Soppeng, Lalabata,	2 Dokumen	65.594.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemerintah Kabupaten Soppeng	2 Dokumen	65.594.400	SEKRETARIAT DAERAH



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Lalabata Rilau				/ Sekretariat Daerah / SKPD			
4	1	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan PMPRB	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	31.972.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemerintah Kabupaten Soppeng / Sekretariat Daerah / SKPD	2 Dokumen	31.972.200	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.13	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	27.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemerintah Kabupaten Soppeng / Sekretariat Daerah / SKPD	1 Dokumen	27.050.000	SEKRETARIAT DAERAH
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**									
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**				**513.780.250**				**517.657.001**	
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah		100 %	**58.614.650**			100 %	**58.614.650**	
4	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**500.000**			100 %	**500.000**	
4	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	50 SPM	500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng	50 SPM	500.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**58.114.650**			100 %	**58.114.650**	
4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Paket	8.890.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng	1 Paket	8.890.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Paket	9.324.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng	3 Paket	9.324.250	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab.	42 Kali	39.900.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng	42 Kali	39.900.400	SEKRETARIAT DAERAH



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau							
4	**1**	**3**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Cakupan Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA yang Dirumuskan		100 %	**455.165.600**			100 %	**459.042.351**	
4	**1**	**3**	2.01		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	Jumlah Rumusan Kebijakan Perekonomian yang disusun		5 Kebijakan	**67.365.000**			5 Kebijakan	**67.365.000**	
4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	58.852.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemerintah Kabupaten Soppeng,/ SKPD/ Masyarakat	1 Dokumen	58.852.500	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	2.01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Laporan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Dokumen	8.512.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemerintah Kabupaten Soppeng,/ SKPD/ Masyarakat	4 Dokumen	8.512.500	SEKRETARIAT DAERAH
4	**1**	**3**	2.04		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	Persentase Kegiatan Starategis Daerah yang memiliki SOP/Juknis		100%	**387.800.600**			100%	**391.677.351**	
4	1	3	2.04	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah data Pengendalian Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	382.622.050	DBH CHT	Pemerintah Kabupaten Soppeng	1 Dokumen	386.498.801	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	2.04	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Data Pengendalian Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab.	1 Dokumen	5.178.550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemerintah Kabupaten Soppeng	1 Dokumen	5.178.550	SEKRETARIAT DAERAH



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau							
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**									
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**				**522.725.000**				**1.041.000.000**	
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah		100 %	**340.545.900**			100 %	**431.000.000**	
4	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**500.000**			100 %	**1.000.000**	
4	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	50 SPM	500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng	50 SPM	1.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**1**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	**195.836.000**			100 %	**250.000.000**	
4	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	31 Orang	195.836.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng	31 Orang	250.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**144.209.900**			100 %	**180.000.000**	
4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Paket	58.570.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng	1 Paket	70.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Paket	22.599.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng	4 Paket	30.000.000	SEKRETARIAT DAERAH



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	29 Kali	63.040.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng	29 Kali	80.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**1**	**3**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Persentase Jumlah Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan dengan metode kompetitif		100 %	**182.179.100**			100 %	**610.000.000**	
4	**1**	**3**	2.03		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa		3 Kegiatan	**182.179.100**			3 Kegiatan	**610.000.000**	
4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa yang ditender/Pengadaan Langsung/E-Purchasing/Penunjukan Langsung	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5000 Paket	126.319.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SKPD Terkait, Penyedia Barang/jasa Pemerintah, Kelompok Kerja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan	5000 Paket	500.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	7000 Paket	23.749.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SKPD Terkait, Penyedia Barang/jasa Pemerintah, Kelompok Kerja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan	7000 Paket	60.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pembinaan/Advokasi Pengadaan Barang/jasa	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Kali	32.110.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SKPD Terkait, Penyedia Barang/jasa Pemerintah, Kelompok Kerja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan	3 Kali	50.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**									
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**				**1.622.580.000**				**1.622.580.000**	
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah		100 %	**85.110.000**			100 %	**85.110.000**	
4	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**5.400.000**			100 %	**5.400.000**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
4	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	85 SPM	5.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng	85 SPM	5.400.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**79.710.000**			100 %	**79.710.000**	
4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Paket	7.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1 Paket	7.450.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Jenis	8.120.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1 Jenis	8.120.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Paket	9.980.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bagian Kesejahteraan Rakyat	4 Paket	9.980.200	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	108 Kali	54.159.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bagian Kesejahteraan Rakyat	108 Kali	54.159.800	SEKRETARIAT DAERAH
4	**1**	**2**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Cakupan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dirumuskan		100 %	**1.537.470.000**			100 %	**1.537.470.000**	
4	**1**	**2**	2.02		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	Jumlah Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang disusun		2 Kebijakan	**1.537.470.000**			2 Kebijakan	**1.537.470.000**	
4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dalam 1 Tahun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;	26 Kali	1.479.995.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Masyarakat	26 Kali	1.479.995.000	SEKRETARIAT DAERAH



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau							
4	1	2	2.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah pelaksanaan kegiatan terkait Kesejahteraan Sosial	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Kali	57.475.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Masyarakat	3 Kali	57.475.000	SEKRETARIAT DAERAH
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**									
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**				**8.869.270.963**				**8.861.770.963**	
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah		100 %	**8.869.270.963**			100 %	**8.861.770.963**	
4	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**5.000.000**			100 %	**5.000.000**	
4	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	150 SPM	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bagian Umum dan Protokol / Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng	150 SPM	5.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**1**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	**49.350.000**			100 %	**41.850.000**	
4	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	41.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng	1 Dokumen	41.850.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab.	1 Orang	7.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng	1 Orang	0	SEKRETARIAT DAERAH



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau							
4	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**1.110.969.525**			100 %	**1.110.969.525**	
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	9 Jenis	45.231.975	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng / Rujab KDH dan WKDH / Rumdis / Gedung Kantor	9 Jenis	45.231.975	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Paket	33.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng / Rujab KDH dan WKDH / Rumdis / Gedung Kantor	2 Paket	33.800.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Jenis	39.760.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng / Rujab KDH dan WKDH / Rumdis / Gedung Kantor	3 Jenis	39.760.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Paket	67.688.550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng / Rujab KDH dan WKDH / Rumdis / Gedung Kantor	4 Paket	67.688.550	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg terfasilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab.	9000 Orang	743.955.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng / Rujab KDH dan WKDH / Rumdis / Gedung Kantor	9000 Orang	743.955.000	SEKRETARIAT DAERAH



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau							
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	180 Kali	180.534.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng / Rujab KDH dan WKDH / Rumdis / Gedung Kantor	180 Kali	180.534.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	**27.360.000**			100 %	**27.360.000**	
4	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Jenis	27.360.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng / Rujab KDH dan WKDH / Rumdis / Gedung Kantor	5 Jenis	27.360.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	**1.811.352.934**			100 %	**1.811.352.934**	
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telepon Jumlah pemenuhan jasa air Jumlah pemenuhan listrik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau; Kab. Soppeng, Lalabata, Botto; Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	12 Kali 12 Kali 12 Kali	1.012.752.934	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng / Rujab KDH dan WKDH / Rumdis / Gedung Kantor	12 Kali 12 Kali 12 Kali	1.012.752.934	SEKRETARIAT DAERAH



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Jenis	798.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng / Rujab KDH dan WKDH / Rumdis / Gedung Kantor	2 Jenis	798.600.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	**1.456.511.400**			100 %	**1.456.511.400**	
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang berfungsi dengan baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	106 Unit	1.191.123.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional, Barang Milik Daerah	106 Unit	1.191.123.400	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	44 Unit	12.445.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional, Barang Milik Daerah	44 Unit	12.445.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang di pelihara (Gedung Kantor) Luas gedung kantor yang di pelihara (Mess Pemda) Luas gedung kantor yang di pelihara (Rujab Bupati) Luas gedung kantor yang di pelihara (Rujab Wakil Bupati) Luas gedung kantor yang di pelihara (Rumdis Sekda)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau; Kab. Soppeng, Lalabata, Botto; Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	1500 M2 640 M2 7796 M2 1305 M2 928 M2	252.943.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional, Barang Milik Daerah	1500 M2 640 M2 7796 M2 1305 M2 928 M2	252.943.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**1**	**1**	2.11		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala**	Persentase keterpenuhan pengadministrasian Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terlaksana tepat waktu		100%	**1.577.732.104**			100%	**1.577.732.104**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pemenuhan pembayaran gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Kali	397.404.104	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KDH / WKDH , Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng	12 Kali	397.404.104	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.11	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pemenuhan pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	32 Set	102.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KDH / WKDH , Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng	32 Set	102.500.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.11	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pemenuhan pelaksaaan medical check up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Kali	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KDH / WKDH , Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng	5 Kali	50.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.11	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pemenuhan penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Kali	1.027.828.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KDH / WKDH , Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng	12 Kali	1.027.828.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**1**	**1**	2.12		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	Persentase keterpenuhan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang dilaksanakan		100%	**1.380.745.000**			100%	**1.380.745.000**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
4	1	1	2.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	3 Paket	884.785.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KDH / WKDH , Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng	3 Paket	884.785.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	3 Paket	495.960.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KDH / WKDH , Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng	3 Paket	495.960.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**1**	**1**	2.14		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	Persentase Acara Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan yang Difasilitasi		100 %	**1.450.250.000**			100 %	**1.450.250.000**	
4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Acara Keprotokolan yang terfasilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Kali	102.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemerintah Kabupaten Soppeng / KDH/WKDH / Sekretariat Daerah / Tamu Negara / Masyarakat	12 Kali	102.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Komunikasi Pimpinan yang terfasilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Kali	1.348.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemerintah Kabupaten Soppeng / KDH/WKDH / Sekretariat Daerah / Tamu Negara / Masyarakat	12 Kali	1.348.250.000	SEKRETARIAT DAERAH
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**									
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**				**13.279.472.739**				**13.279.472.739**	
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah		100 %	**13.279.472.739**			100 %	**13.279.472.739**	
4	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu		100 % 100 %	**56.694.500**			100 % 100 %	**56.694.500**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
						Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu		100 %				100 %		
4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Dokumen	7.989.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat Daerah / Bappelitbangda / BPKPD / Inspektorat Daerah	3 Dokumen	7.989.500	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	12.605.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat Daerah / Bappelitbangda / BPKPD / Inspektorat Daerah	1 Dokumen	12.605.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	12.070.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat Daerah / Bappelitbangda / BPKPD / Inspektorat Daerah	2 Dokumen	12.070.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	10 Dokumen	24.030.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat Daerah / Bappelitbangda / BPKPD / Inspektorat Daerah	10 Dokumen	24.030.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**12.875.593.639**			100 %	**12.875.593.639**	
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	157 ASN	12.773.459.639	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat Daerah, BPKPD, Inspektorat	157 ASN	12.773.459.639	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	201 SPM	75.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat Daerah, BPKPD, Inspektorat	201 SPM	75.900.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	6 Dokumen	26.234.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat Daerah, BPKPD, Inspektorat	6 Dokumen	26.234.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**347.184.600**			100 %	**347.184.600**	
4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Lalabata,	1 Paket	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bagian Perencanaan dan Keuangan / Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng	1 Paket	25.000.000	SEKRETARIAT DAERAH



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Lalabata Rilau							
4	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Paket	67.680.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bagian Perencanaan dan Keuangan / Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng	4 Paket	67.680.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	179 Kali	254.504.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bagian Perencanaan dan Keuangan / Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng	179 Kali	254.504.600	SEKRETARIAT DAERAH
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**									
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**				**131.000.000**				**131.000.000**	
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah		100 %	**81.751.500**			100 %	**81.751.500**	
4	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**600.000**			100 %	**600.000**	
4	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	38 SPM	600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng	38 SPM	600.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**81.151.500**			100 %	**81.151.500**	
4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Paket	14.910.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng	1 Paket	14.910.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Jenis	5.670.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng	1 Jenis	5.670.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Paket	11.502.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng	4 Paket	11.502.100	SEKRETARIAT DAERAH



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	120 Kali	49.069.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng	120 Kali	49.069.400	SEKRETARIAT DAERAH
4	**1**	**3**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Cakupan Kebijakan Bidang Pembangunan yang Dirumuskan		100 %	**49.248.500**			100 %	**49.248.500**	
4	**1**	**3**	2.02		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	Jumlah Rumusan Kebijakan Administrasi Pembangunan yang disusun		1 Kebijakan	**49.248.500**			1 Kebijakan	**49.248.500**	
4	1	3	2.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Data Koordinasi Dokumen Pelaporan dan Pembinaan Kegiatan Pembangunan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Dokumen	49.248.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng/ SKPD	3 Dokumen	49.248.500	SEKRETARIAT DAERAH
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**									
4	**2**				**SEKRETARIAT DPRD**				**26.261.473.940**				**29.445.391.440**	
4	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase capaian kinerja penunjang Urusan Sekretariat DPRD		100 %	**21.310.168.140**			100 %	**23.989.265.640**	
4	**2**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu		100 % 100 % 100 %	**48.790.000**			100 % 100 % 100 %	**49.390.000**	
4	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 dokumen	15.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pimpinan dan Anggota DPRD	2 dokumen	16.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 dokumen	12.460.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 dokumen	12.460.000	SEKRETARIAT DPRD



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
4	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 dokumen	8.630.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 dokumen	8.630.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	11 dokumen	12.300.000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Pimpinan dan Anggota DPRD	11 dokumen	12.300.000	SEKRETARIAT DPRD
4	**2**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**3.568.629.296**			100 %	**94.885.436**	
4	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	36 ASN	3.477.279.296	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pimpinan dan Anggota DPRD	36 ASN	3.535.436	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	180 SPM	70.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pimpinan dan Anggota DPRD	180 SPM	70.550.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 dokumen	15.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pimpinan dan Anggota DPRD	5 dokumen	15.650.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang disusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 dokumen	5.150.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pimpinan dan Anggota DPRD	12 dokumen	5.150.000	SEKRETARIAT DPRD
4	**2**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah		100 %	**16.000.000**			100 %	**16.000.000**	
4	2	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 dokumen	16.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pimpinan dan Anggota DPRD	2 dokumen	16.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	**2**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	**86.575.000**			100 %	**86.575.000**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
4	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	68 Set	51.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Sekretariat DPRD	68 Set	51.500.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 dokumen	6.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Sekretariat DPRD	5 dokumen	6.050.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang terkelola	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 sistem informasi	7.475.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Sekretariat DPRD	2 sistem informasi	7.475.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah ASN yang dievaluasi kinerjanya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	36 ASN	6.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Sekretariat DPRD	36 ASN	6.400.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosisalisasi perundang-undangan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	36 Orang	5.150.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Sekretariat DPRD	36 Orang	5.150.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Orang	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Sekretariat DPRD	4 Orang	10.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	**2**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**734.650.600**			100 %	**839.962.000**	
4	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	19 Jenis	31.420.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pimpinan dan Anggota DPRD	19 Jenis	31.420.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	15 Jenis	12.342.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pimpinan dan Anggota DPRD	15 Jenis	12.342.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Lalabata,	1 paket	72.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 paket	72.200.000	SEKRETARIAT DPRD



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Lalabata Rilau							
4	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	6 Jenis	23.770.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pimpinan dan Anggota DPRD	6 Jenis	24.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Paket	100.504.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pimpinan dan Anggota DPRD	5 Paket	110.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg terfasilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	7500 Orang	222.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pimpinan dan Anggota DPRD	7500 Orang	250.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	254 kali	203.414.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pimpinan dan Anggota DPRD	254 kali	220.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah aplikasi/website yang terkelola	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 aplikasi	69.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pimpinan dan Anggota DPRD	3 aplikasi	120.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	**2**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	**851.700.000**			100 %	**6.470.000.000**	
4	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	6 Jenis	102.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pimpinan dan Anggota DPRD	6 Jenis	245.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	11 Unit	156.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pimpinan dan Anggota DPRD	11 Unit	225.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Kab. Soppeng, Lalabata,	2 Unit	593.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Unit	6.000.000.000	SEKRETARIAT DPRD



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Lalabata Rilau							
4	**2**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	**2.082.280.000**			100 %	**2.150.000.000**	
4	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telepon Jumlah pemenuhan jasa air Jumlah pemenuhan listrik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 kali 12 kali 12 kali	434.680.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pimpinan dan Anggota DPRD	12 kali 12 kali 12 kali	450.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	11 Jenis	1.647.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pimpinan dan Anggota DPRD	11 Jenis	1.700.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	**2**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	**456.690.040**			100 %	**901.000.000**	
4	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	36 unit	312.195.040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pimpinan dan Anggota DPRD	36 unit	350.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	28 unit	24.170.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pimpinan dan Anggota DPRD	28 unit	35.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	20000 meter persegi	120.325.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pimpinan dan Anggota DPRD	20000 meter persegi	516.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	**2**	**1**	2.15		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Jumlah paket jasa administrasi DPRD yang disediakan		4 Paket	**11.923.853.204**			4 Paket	**11.840.453.204**	
4	2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang dibayarkan tunjangannya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	30 Orang	11.592.203.204	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pimpinan dan Anggota DPRD	30 Orang	11.592.203.204	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian/atribut yang disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata,	180 Set	294.150.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pimpinan dan Anggota DPRD	180 Set	210.750.000	SEKRETARIAT DPRD



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Lalabata Rilau							
4	2	1	2.1 5	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang melakukan medical check up	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	30 Orang	37.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pimpinan dan Anggota DPRD	30 Orang	37.500.000	SEKRETARIAT DPRD
4	**2**	**1**	2.1 6		**Layanan Administrasi DPRD**	Jumlah Anggota DPRD yang terlayani administrasi Keuangan dan Kesejahteraannya		30 Orang	**1.541.000.000**			30 Orang	**1.541.000.000**	
4	2	1	2.1 6	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah kebutuhan rapat-rapat DPRD yang disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Jenis	115.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pimpinan dan Anggota DPRD	3 Jenis	115.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.1 6	4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah paket kebutuhan Rumah tangga pimpinan DPRD yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Paket	1.426.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pimpinan dan Anggota DPRD	3 Paket	1.426.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	**2**	**2**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Persentase rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD yang terlaksana sesuai rencana		100 %	**4.951.305.800**			100 %	**5.456.125.800**	
4	**2**	**2**	2.0 1		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Jumlah Kegiatan Pembentukan Perda yang difasilitasi		3 Kegiatan	**223.110.000**			3 Kegiatan	**223.110.000**	
4	2	2	2.0 1	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Rapat Propemperda yang difasilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Rapat	55.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pimpinan dan Anggota DPRD	3 Rapat	55.700.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.0 1	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Pembahasan Ranperda yang di fasilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	11 Ranperda	29.410.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pimpinan dan Anggota DPRD	11 Ranperda	29.410.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.0 1	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Naskah akademik Ranperda Inisiatif yang dihasilkan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 dokumen	138.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pimpinan dan Anggota DPRD	3 dokumen	138.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	**2**	**2**	2.0 2		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPRD yang difasilitasi		8 Kegiatan	**52.400.000**			8 Kegiatan	**52.400.000**	
4	2	2	2.0 2	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah rapat KUA dan PPAS yang difasilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata,	2 Kegiatan	6.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Kegiatan	6.900.000	SEKRETARIAT DPRD



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Lalabata Rilau							
4	2	2	2.02	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah rapat KUA dan PPAS perubahan yang difasilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Kegiatan	6.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Kegiatan	6.900.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.02	3	Pembahasan APBD	Jumlah rapat pembahasan APBD yang difasilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Kegiatan	12.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Kegiatan	12.100.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.02	4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah rapat pembahasan APBD perubahan yang difasilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Kegiatan	12.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Kegiatan	12.100.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.02	5	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah rapat pembahasan laporan semester yang difasilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Kegiatan	5.150.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Kegiatan	5.150.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.02	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah rapat pembahasan pertanggungjawaban APBD yang difasilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Kegiatan	9.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Kegiatan	9.250.000	SEKRETARIAT DPRD
4	**2**	**2**	2.03		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD yang difasilitasi		8 Kegiatan	**17.970.000**			8 Kegiatan	**17.970.000**	
4	2	2	2.03	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah agenda Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum yang difasilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 kegiatan	1.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 kegiatan	1.450.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.03	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah agenda Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur yang difasilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 kegiatan	1.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 kegiatan	1.450.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.03	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah agenda Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Kegiatan	1.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Kegiatan	1.450.000	SEKRETARIAT DPRD



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
4	2	2	2.03	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah agenda Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian yang difasilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Kegiatan	1.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Kegiatan	1.450.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.03	5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah agenda Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam yang difasilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Kegiatan	1.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Kegiatan	1.450.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.03	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah agenda Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang difasilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Kegiatan	1.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Kegiatan	1.450.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.03	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah agenda Pengawasan Penggunaan Anggaran yang difasilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Kegiatan	4.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Kegiatan	4.450.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.03	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah agenda Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang difasilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Kegiatan	4.820.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Kegiatan	4.820.000	SEKRETARIAT DPRD
4	**2**	**2**	2.04		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Jumlah kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitias DPRD yang difasilitasi		5 Kegiatan	**842.475.000**			5 Kegiatan	**842.475.000**	
4	2	2	2.04	2	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan Pendalaman Tugas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pimpinan dan Anggota DPRD	30 Orang	300.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.04	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah kegiatan DPRD yang di publikasikan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48 Kegiatan	380.375.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pimpinan dan Anggota DPRD	48 Kegiatan	380.375.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Orang	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Orang	60.000.000	SEKRETARIAT DPRD



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
4	2	2	2.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi yang disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Orang	90.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pimpinan dan Anggota DPRD	5 Orang	90.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen Rencana Kerja yang dihasilkan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 dokumen	12.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 dokumen	12.100.000	SEKRETARIAT DPRD
4	**2**	**2**	2.05		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Jumlah Kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang difasilitasi		2 Kegiatan	**2.003.025.000**			2 Kegiatan	**2.003.025.000**	
4	2	2	2.05	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah kegiatan penyusunan/pengimputan pokok-pokok pikiran DPRD yang dilaksanakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Kegiatan	19.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pimpinan dan Anggota DPRD	3 Kegiatan	19.800.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.05	3	Pelaksanaan Reses	Jumlah kegiatan Reses yang dilaksanakan	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Kegiatan	1.983.225.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pimpinan dan Anggota DPRD	3 Kegiatan	1.983.225.000	SEKRETARIAT DPRD
4	**2**	**2**	2.08		**Fasilitasi Tugas DPRD**	Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas-tugas DPRD yang difasilitasi		3 Kegiatan	**1.812.325.800**			3 Kegiatan	**2.317.145.800**	
4	2	2	2.08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah kegiatan Kunjungan Kerja, Study Banding, Orientasi dan Pendalaman Tugas yang difasilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23 kegiatan	1.500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pimlinan dan Anggota DPRD	23 kegiatan	2.000.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.08	2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Dokumen IKM terhadap kinerja DPRD yang dihasilkan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pimlinan dan Anggota DPRD	1 dokumen	100.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.08	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah kegiatan Kunjungan Kerja, Study Banding, Orientasi dan Pendalaman Tugas Pimpinan DPRD yang difasilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52 kegiatan	212.325.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pimlinan dan Anggota DPRD	52 kegiatan	217.145.800	SEKRETARIAT DPRD
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**									
5	**1**				**PERENCANAAN**				**5.331.679.542**				**5.491.602.569**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
5	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		100 %	**4.716.554.042**			100 %	**4.823.683.569**	
5	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu		100 % 100 % 100 %	**36.883.500**			100 % 100 % 100 %	**40.650.000**	
5	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Dokumen	13.093.050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda	3 Dokumen	14.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN DAERAH
5	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	12.231.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda	1 Dokumen	13.200.000	BADAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN DAERAH
5	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	3.187.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda	1 Dokumen	3.450.000	BADAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN DAERAH
5	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	9 Dokumen	8.371.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda	9 Dokumen	10.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN DAERAH
5	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**3.622.086.646**			100 %	**3.724.233.569**	
5	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	34 ASN	3.601.427.646	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda	34 ASN	3.701.433.569	BADAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN DAERAH



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
5	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	400 SPM	6.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda	400 SPM	8.500.000	BADAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN DAERAH
5	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	16 Dokumen	13.909.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda	16 Dokumen	14.300.000	BADAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN DAERAH
5	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**306.989.700**			100 %	**406.300.000**	
5	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	8 Jenis	8.793.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda	7 Jenis	11.200.000	BADAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN DAERAH
5	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Paket	32.395.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda	12 Kali	37.500.000	BADAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN DAERAH
5	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	30000 Lembar	19.525.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda	30000 Lembar	21.100.000	BADAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN DAERAH
5	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	48 Paket	49.869.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda	48 Paket	67.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN DAERAH
5	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg terfasilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	340 OM	13.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda	340 OM	16.500.000	BADAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN DAERAH



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
5	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	262 Kali	182.907.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda	262 Kali	253.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN DAERAH
5	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	**29.900.000**			100 %	**102.000.000**	
5	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Unit	29.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda	1 Unit	102.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN DAERAH
5	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	**399.217.076**			100 %	**420.000.000**	
5	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telepon Jumlah pemenuhan jasa air Jumlah pemenuhan listrik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Kali 12 Kali 12 Kali	139.217.076	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda	12 Kali 12 Kali 12 Kali	150.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN DAERAH
5	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Jenis	260.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda	2 Jenis	270.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN DAERAH
5	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	**321.477.120**			100 %	**130.500.000**	
5	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Unit	53.847.120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda	12 Unit	57.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN DAERAH
5	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata,	7 Unit	18.130.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda	7 Unit	20.500.000	BADAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Lalabata Rilau							PENELITIAN DAERAH
5	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3680 Meter Persegi	249.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda	3680 Meter Persegi	53.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN DAERAH
5	**1**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD (%) Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)		100 % 100 %	**382.563.000**			100 % 100 %	**334.350.000**	
5	**1**	**2**	2.01		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun tepat waktu		100 %	**333.775.500**			100 %	**259.600.000**	
5	1	2	2.01	2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah peserta Sosialisasi dan Workshop (orang)	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	500 orang	74.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SKPD se Kab. Soppeng	500 orang	0	BADAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN DAERAH
5	1	2	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah SKPD yang Melaksanakan Forum SKPD/Lintas SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	34 SKPD	25.165.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SKPD se Kab. Soppeng	34 SKPD	44.100.000	BADAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN DAERAH
5	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Musrembang Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Kali	138.060.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SKPD se Kab. Soppeng	1 Kali	139.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN DAERAH
5	1	2	2.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanan Pembangunan Daerah Kabupaten yang ditetapkan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	96.300.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SKPD se Kab. Soppeng	2 Dokumen	76.500.000	BADAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN DAERAH
5	**1**	**2**	2.02		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang**	Persentase Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang dimanfaatkan SKPD		100 %	**21.812.500**			100 %	**33.750.000**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					Perencanaan Pembangunan Daerah									
5	1	2	2.02	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	10.762.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemerintah Kabupaten Soppeng	1 Dokumen	21.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN DAERAH
5	1	2	2.02	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah SKPD yang menggunakan data sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah (SKPD)	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	34 SKPD	11.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemerintah Kabupaten Soppeng	34 SKPD	12.750.000	BADAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN DAERAH
5	**1**	**2**	2.03		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase dokumen hasil Pengendalian dan evaluasi bidang perencanaan pembangunan daerah		100 %	**26.975.000**			100 %	**41.000.000**	
5	1	2	2.03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Pertemuan dalam Rangka Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Kali	26.975.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SKPD se Kab. Soppeng	4 Kali	41.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN DAERAH
5	**1**	**3**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur		100 %	**232.562.500**			100 %	**333.569.000**	
5	**1**	**3**	2.01		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan		100 %	**73.090.500**			100 %	**124.550.000**	
5	1	3	2.01	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan yang terasistensi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	38 Dokumen	6.640.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SKPD se Kabupaten Soppeng	38 Dokumen	7.500.000	BADAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN DAERAH
5	1	3	2.01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah Bidang Pembangunan SDM (RPJPD,RPJMD, RKPD) yang terkoordinasikan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	66.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SKPD se Kabupaten Soppeng	1 Dokumen	117.050.000	BADAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN DAERAH



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
5	**1**	**3**	2.02		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah Lingkup Bidang Perekonomian		100%	**60.772.000**			100%	**80.719.000**	
5	1	3	2.02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD, RKPD) yang terkoordinasikan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	7.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SKPD se Kab. Soppeng	2 Dokumen	7.800.000	BADAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN DAERAH
5	1	3	2.02	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian yang terasistensi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	6 Dokumen	47.819.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SKPD se Kab. Soppeng	6 Dokumen	65.819.000	BADAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN DAERAH
5	1	3	2.02	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang SDA yang terasistensi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Dokumen	5.853.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SKPD se Kab. Soppeng	4 Dokumen	7.100.000	BADAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN DAERAH
5	**1**	**3**	2.03		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup infrastruktur Persentase Kesesuain Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Kewilayaan		100%	**98.700.000**			100%	**128.300.000**	
5	1	3	2.03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Insfrastruktur (RPJPD,RPJMD, RKPD) yang terkoordinasikan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	2.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SKPD terkait	1 Dokumen	3.100.000	BADAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN DAERAH
5	1	3	2.03	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang terasistensi	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	1 Dokumen	5.150.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SKPD terkait	1 Dokumen	6.500.000	BADAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN DAERAH
5	1	3	2.03	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang dimonitoring dan dievaluasi kegiatannya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	2.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SKPD terkait	1 Dokumen	3.100.000	BADAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					Daerah Bidang Infrastruktur									PENELITIAN DAERAH
5	1	3	2.03	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrstrutur yang terkoordinasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	59.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SKPD terkait	1 Dokumen	78.100.000	BADAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN DAERAH
5	1	3	2.03	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang terkoordinasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	29.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SKPD terkait	1 Dokumen	37.500.000	BADAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN DAERAH
5	**5**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**145.525.000**				**237.000.000**	
5	**5**	**2**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Persentase implementasi rencana kelitbangan Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah (SIDa)		100 % 17,65 %	**145.525.000**			100 % 35,29 %	**237.000.000**	
5	**5**	**2**	2.02		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	Presentase Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang disusun		100 %	**62.900.000**			100 %	**102.000.000**	
5	5	2	2.02	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Litbang Bidang Aspek Sosial yang disusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	62.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Stakeholder Terkait	1 Dokumen	102.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN DAERAH
5	**5**	**2**	2.03		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	Persentase Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang disusun		100%	**36.300.000**			100%	**75.000.000**	
5	5	2	2.03	5	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Litbang Kelautan dan Perikanan yang disusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	36.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Stakeholder Terkait	1 Dokumen	75.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN DAERAH
5	**5**	**2**	2.04		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Persentase Pelaksanaan Inovasi dan Teknologi		100%	**46.325.000**			100%	**60.000.000**	
5	5	2	2.04	2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Pelaksanaan uji coba penerapan rancang Bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi yang difasilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Kali	22.325.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Organisasi Perangkat Daerah	1 Kali	32.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
														PENELITIAN DAERAH
5	5	2	2.04	4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi dan Desiminasi hasil hasil kelitbangan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Kali	24.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Organisasi Perangkat Daerah	1 Kali	28.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN DAERAH
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**									
5	**2**				**KEUANGAN**				**149.264.438.671**				**151.669.614.621**	
5	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah		100 %	**25.794.746.330**			100 %	**28.199.922.280**	
5	**2**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu		100 % 100 % 100 %	**50.130.000**			100 % 100 % 100 %	**50.130.000**	
5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	7 Dokumen	7.795.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Penyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	7.795.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	14.705.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Penyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	14.705.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	15.830.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Penyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	15.830.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	9 Dokumen	11.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Penyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan	9 Dokumen	11.800.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
											Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
5	**2**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**17.144.422.145**			100 %	**19.549.598.095**	
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	107 ASN	17.012.659.145	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Pengelola Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	107 ASN	19.417.835.095	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1200 SPM	118.340.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Pengelola Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1200 SPM	118.340.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Dokumen	13.423.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Pengelola Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen	13.423.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	**2**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	**41.050.000**			100 %	**41.050.000**	
5	2	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	7 Dokumen	41.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Pengelola Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7 Dokumen	41.050.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	**2**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**933.341.170**			100 %	**933.341.170**	
5	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia	Kab. Soppeng, Citta, Semua Kelurahan	2 Jenis	15.523.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Pengelola Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Jenis	15.523.500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Paket	143.565.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Pengelola Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 Paket	143.565.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Jenis	312.532.500	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; Dana Transfer	Aparatur Pengelola Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 Jenis	312.532.500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
										Umum-Dana Alokasi Umum				
5	2	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Paket	168.764.970	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Pengelola Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 Paket	168.764.970	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg terfasilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	600 Orang	20.425.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Pengelola Administrasi Umum Perangkat Daerah	600 Orang	20.425.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	280 kali	272.530.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Pengelola Administrasi Umum Perangkat Daerah	280 kali	272.530.200	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	**2**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	**357.530.000**			100 %	**357.530.000**	
5	2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Unit	337.530.000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Aparatur Pengguna Barang Milik Daerah	12 Unit	337.530.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Unit	20.000.000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Aparatur Pengguna Barang Milik Daerah	1 Unit	20.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	**2**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	**7.070.053.965**			100 %	**7.070.053.965**	
5	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Paket Pengiriman	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	80 kali	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur pengelola Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 kali	10.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telepon Jumlah pemenuhan jasa air Jumlah pemenuhan listrik	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan,	36 kali	6.540.253.965	Pajak Penerangan Jalan	Aparatur pengelola Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 kali	6.540.253.965	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semua Kelurahan							
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau Kab. Soppeng, Lalabata, Botto Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	2 Jenis	519.800.000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur pengelola Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Jenis	519.800.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	**2**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	**198.219.050**			100 %	**198.219.050**	
5	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	294 unit	157.444.050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Pengguna Barang Milik Daerah	294 unit	157.444.050	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	39 unit	19.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Pengguna Barang Milik Daerah	39 unit	19.050.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau; Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	75 Meter Persegi	21.725.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Pengguna Barang Milik Daerah	75 Meter Persegi	21.725.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	**2**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Persentase Keterpenuhan Dokumen Penganggaran Daerah Tepat Waktu Persentase Keterpenuhan Penyampaian SPJ Keuangan Tepat Waktu Persentase Keterpenuhan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tepat Waktu		100 % 100 % 100 %	**121.722.364.598**			100 % 100 % 100 %	**121.722.364.598**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
5	**2**	**2**	2.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Persentase Keterpenuhan Dokumen Penganggaran Daerah yang Tersusun dan Tervalidasi sesuai Regulasi		100 %	**1.177.605.000**			100 %	**1.177.605.000**	
5	2	2	2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA-PPAS Pokok yang Terverifikasi dan Sesuai Regulasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	24.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	TAPD, SKPD Pelaksana APBD Tahun 2022 dan Masyarakat Kab. Soppeng	1 Dokumen	24.050.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Terverifikasi dan Sesuai Regulasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	38.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	TAPD, SKPD Pelaksana APBD Tahun 2022 dan Masyarakat Kab. Soppeng	1 Dokumen	38.900.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	2.01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Terverifikasi sesuai Pedoman Penyusunan RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	34 Dokumen	36.225.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	TAPD, SKPD Pelaksana APBD Tahun 2022 dan Masyarakat Kab. Soppeng	34 Dokumen	36.225.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	2.01	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Terverifikasi sesuai Pedoman Penyusunan RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	34 Dokumen	43.225.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	TAPD, SKPD Pelaksana APBD Tahun 2022 dan Masyarakat Kab. Soppeng	34 Dokumen	43.225.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	2.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Terverifikasi dan Tervalidasi untuk Disahkan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	34 Dokumen	5.775.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	TAPD, SKPD Pelaksana APBD Tahun 2022 dan Masyarakat Kab. Soppeng	34 Dokumen	5.775.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	2.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Terverifikasi dan Tervalidasi untuk Disahkan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	34 Dokumen	5.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	TAPD, SKPD Pelaksana APBD Tahun 2022 dan Masyarakat Kab. Soppeng	34 Dokumen	5.950.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Rancangan	524.525.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	TAPD, SKPD Pelaksana APBD Tahun 2022 dan Masyarakat Kab. Soppeng	2 Rancangan	524.525.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	2.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Rancangan Perda dan Perbup Perubahan APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Rancangan	480.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	TAPD, SKPD Pelaksana APBD Tahun 2022 dan Masyarakat Kab. Soppeng	2 Rancangan	480.050.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
5	2	2	2.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen SBU yang Tersusun dan Ditetapkan sebagai Biaya Masukan Pelaksanaan Kegiatan Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen SBU	18.905.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	TAPD, SKPD Pelaksana APBD Tahun 2022 dan Masyarakat Kab. Soppeng	1 Dokumen SBU	18.905.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	**2**	**2**	2.02		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Persentase Keterpenuhan Sistem Penatausahaan dan Perbendaharaan Daerah yang Terproses dan Tervalidasi sesuai Regulasi		100 %	**128.654.500**			100 %	**128.654.500**	
5	2	2	2.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Kas dan Data Ketersediaan Transaksi Harian Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Dokumen	16.783.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SKPD Pengelola Keuangan Perangkat Daerah	4 Dokumen	16.783.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	2.02	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen SPD yang Diteribitkan untuk Diproses sesuai Rencana Anggaran Kas Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Dokumen	16.860.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SKPD Pengelola Keuangan Perangkat Daerah	4 Dokumen	16.860.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	2.02	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah SKPD yang mengelola DAK sesuai Juknis dan Sistem	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	9 SKPD	14.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SKPD Pengelola Keuangan Perangkat Daerah	9 SKPD	14.200.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN yang Terproses	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	6 Laporan	23.290.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SKPD Pengelola Keuangan Perangkat Daerah	6 Laporan	23.290.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	2.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Berita Acara atas pelaksanaan Rekonsiliasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	6 Berita Acara	25.355.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SKPD Pengelola Keuangan Perangkat Daerah	6 Berita Acara	25.355.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Pengujian dan Penyelesaian Verifikasi SP2D yang Terproses Tepat Waktu	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 %	32.166.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SKPD Pengelola Keuangan Perangkat Daerah	100 %	32.166.500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
5	**2**	**2**	2.03		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	Persentase Keterpenuhan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang Tersusun dan Tervalidasi sesuai Regulasi		100 %	**356.130.000**			100 %	**356.130.000**	
5	2	2	2.03	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang sesuai PSAP Akuntabel	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	34.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SKPD Penyusun Laporan Akuntansi Instansi Daerah	2 Dokumen	34.750.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	2.03	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang Terverifikasi sesuai Regulasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	34 Dokumen	45.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SKPD Penyusun Laporan Akuntansi Instansi Daerah	34 Dokumen	45.950.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	2.03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Realisasi Bulanan Triwulan dan Semesteran SKPD yang Terverifikasi sesuai Regulasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	612 Dokumen	30.765.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SKPD Penyusun Laporan Akuntansi Instansi Daerah	612 Dokumen	30.765.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	2.03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD BLUD dan LKPD yang terkonsolidasi UN AUDIT	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	85.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SKPD Penyusun Laporan Akuntansi Instansi Daerah	1 Dokumen	85.900.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	2.03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Ranperda dan Ranperbup Pertanggungjawaban APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Rancangan	64.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SKPD Penyusun Laporan Akuntansi Instansi Daerah	2 Rancangan	64.450.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	2.03	7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah pelaksanaan sidang Majelis Persentase Penyelesaian kerugian daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Kali 100 %	55.070.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SKPD Penyusun Laporan Akuntansi Instansi Daerah	4 Kali 100 %	55.070.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sisdur Akuntansi dan Laporan Keuangan Daerah yang diterbitkan	Kab. Soppeng, Lalabata,	1 Sisdur	39.245.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SKPD Penyusun Laporan Akuntansi Instansi Daerah	1 Sisdur	39.245.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Lalabata Rilau							PENDAPATAN DAERAH
5	**2**	**2**	2.04		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Persentase penyaluran Dana Keuangan yang Sesuai Kewenangan, Tepat Waktu dan Tepat Jumlah		100 %	**120.059.975.098**			100 %	**120.059.975.098**	
5	2	2	2.04	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase pengalokasian TKDD dan DD yang tepat waktu dan Tepat Jumlah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	112.463.982.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemerintah Desa dan Masyarakat Kabupaten Soppeng	100 %	112.463.982.700	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	2.04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase pengalokasian dan pemenuhan kebutuhan dana tanggap darurat dan mendesak	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemerintah Desa dan Masyarakat Kabupaten Soppeng	100 %	5.000.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang tepat waktu dan Tepat Jumlah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2.595.992.398	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemerintah Desa dan Masyarakat Kabupaten Soppeng	100 %	2.595.992.398	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	**2**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Persentase Tertib Asset Manajemen		100 %	**706.380.000**			100 %	**706.380.000**	
5	**2**	**3**	2.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Persentase Keterpenuhan Barang Milik Daerah yang Teradministrasi Lengkap dan Tepat sesuai Regulasi		100 %	**706.380.000**			100 %	**706.380.000**	
5	2	3	2.01	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa yang Terkonsolidasi untuk Diterbitkan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	107.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SKPD Pengelola Barang Milik Daerah	2 Dokumen	107.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	3	2.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengadministrasian Barang Milik Daerah yang Terproses dan Terverifikasi sesuai Regulasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 dokumen	36.425.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SKPD Pengelola Barang Milik Daerah	1 dokumen	36.425.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	3	2.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset Pemda	Semua Kab/Kota, Semua	50 Aset Pemda	352.195.000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	SKPD Pengelola Barang Milik Daerah	50 Aset Pemda	352.195.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
						Jumlah Titik Penjagaan Ratio Pengamanan Barang Milik Daerah	Kecamatan, Semua Kelurahan	2 titik penjagaan 100 %		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 titik penjagaan 100 %		PENDAPATAN DAERAH
5	2	3	2.01	8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penilaian Aset Daerah yang Terkoreksi Kewajarannya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	36.140.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SKPD Pengelola Barang Milik Daerah	2 Dokumen	36.140.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	3	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pencatatan Mutasi Barang Milik Daerah yang Terproses sesuai Regulasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	70.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SKPD Pengelola Barang Milik Daerah	2 Dokumen	70.100.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	3	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah yang Akuntabel, Transparan dan dapat Terakses dengan Baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Informasi/Dokumen	104.520.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SKPD Pengelola Barang Milik Daerah	5 Informasi/Dokumen	104.520.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	**2**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Rasio Efektivitas PAD		100 %	**1.040.947.743**			100 %	**1.040.947.743**	
5	**2**	**4**	2.01		**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah		100 %	**1.040.947.743**			100 %	**1.040.947.743**	
5	2	4	2.01	1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi Potensi Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	8 Kecamatan 21.4 Milyar	309.102.743	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Aparatur Pengelola Pajak/Retribusi Daerah dan Masyarakat Kab. Soppeng	8 Kecamatan 21.4 Milyar	309.102.743	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	2.01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Regulasi Pengelolaan Pajak Daerah yang Terproses untuk Diterbitkan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	69.875.000	Pajak Restoran	Aparatur Pengelola Pajak/Retribusi Daerah dan Masyarakat Kab. Soppeng	1 Dokumen	69.875.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	2.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Peserta yang Terafirmasi Patuh dan Taat Pajak Jumlah Peserta yang Terafirmasi Patuh dan Taat Pajak Jumlah Wajib Pajak yang sadar Pajak	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	25 Orang Laki-Laki 25 Orang perempuan 190000 WP	23.670.000	Pajak Hotel	Aparatur Pengelola Pajak/Retribusi Daerah dan Masyarakat Kab. Soppeng	25 Orang Laki-Laki 25 Orang perempuan 190000 WP	23.670.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	2.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Basis Data Bangunan Objek Pajak dan Retribusi Jumlah Jenis Obyek Pajak dan Retribusi yang Dimutakhirkan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen 9 Jenis	319.450.000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Aparatur Pengelola Pajak/Retribusi Daerah dan Masyarakat Kab. Soppeng	2 Dokumen 9 Jenis	319.450.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah SPPT yang Terdistribusi dengan Baik dan Lancar Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan tepat Waktu	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	203200 lembar 165000 wajib PBB	304.600.000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Aparatur Pengelola Pajak/Retribusi Daerah dan Masyarakat Kab. Soppeng	203200 lembar 165000 wajib PBB	304.600.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah Jumlah Wilayah yang terkendalikan dan diawasi dalam Penerimaan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen 8 Kecamatan	9.350.000	Pajak Penerangan Jalan	Aparatur Pengelola Pajak/Retribusi Daerah dan Masyarakat Kab. Soppeng	1 Dokumen 8 Kecamatan	9.350.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Capaian Realisasi Retribusi Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	100 %	4.900.000	Retribusi Jasa Usaha	Aparatur Pengelola Pajak/Retribusi Daerah dan Masyarakat Kab. Soppeng	100 %	4.900.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**									
5	**2**				**KEUANGAN**				**42.943.800**				**42.943.800**	
5	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah		100 %	**26.933.800**			100 %	**26.933.800**	
5	**2**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**26.933.800**			100 %	**26.933.800**	
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	2 Jenis	1.515.000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Aparatur BPKPD UPT Kecamatan Lalabata	2 Jenis	1.515.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	2 Paket	10.000.000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Aparatur BPKPD UPT Kecamatan Lalabata	2 Paket	10.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	69 kali	15.418.800	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Aparatur BPKPD UPT Kecamatan Lalabata	69 kali	15.418.800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	**2**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Rasio Efektivitas PAD		100 %	**16.010.000**			100 %	**16.010.000**	
5	**2**	**4**	2.01		**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah		100 %	**16.010.000**			100 %	**16.010.000**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan tepat Waktu	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	27527 WP	16.010.000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Aparatur UPT BPKPD dan Masyarakat Kecamatan Lalabata	27527 WP	16.010.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**									
5	**2**				**KEUANGAN**				**31.653.800**				**31.653.800**	
5	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah		100 %	**20.643.800**			100 %	**20.643.800**	
5	**2**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**20.643.800**			100 %	**20.643.800**	
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kelurahan	2 Jenis	1.515.000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Aparatur UPT BPKPD Kecamatan Donri-Donri	2 Jenis	1.515.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kelurahan	2 Paket	10.000.000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Aparatur UPT BPKPD Kecamatan Donri-Donri	2 Paket	10.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kelurahan	30 kali	9.128.800	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Aparatur UPT BPKPD Kecamatan Donri-Donri	30 kali	9.128.800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	**2**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Rasio Efektivitas PAD		100 %	**11.010.000**			100 %	**11.010.000**	
5	**2**	**4**	2.01		**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah		100 %	**11.010.000**			100 %	**11.010.000**	
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan tepat Waktu	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kelurahan	24377 WP	11.010.000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Aparatur UPT BPKPD dan Masyarakat Kecamatan Donri-Donri	24377 WP	11.010.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**									
5	**2**				**KEUANGAN**				**34.683.800**				**34.683.800**	
5	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah		100 %	**22.173.800**			100 %	**22.173.800**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					DAERAH KABUPATEN/KOTA									
5	**2**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**22.173.800**			100 %	**22.173.800**	
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kelurahan	2 Jenis	1.515.000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Aparatur UPT BPKPD Kecamatan Liliriaja	2 Jenis	1.515.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kelurahan	2 Paket	10.000.000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Aparatur UPT BPKPD Kecamatan Liliriaja	2 Paket	10.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kelurahan	38 kali	10.658.800	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Aparatur UPT BPKPD Kecamatan Liliriaja	38 kali	10.658.800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	**2**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Rasio Efektivitas PAD		100 %	**12.510.000**			100 %	**12.510.000**	
5	**2**	**4**	2.01		**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah		100 %	**12.510.000**			100 %	**12.510.000**	
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan tepat Waktu	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kelurahan	28216 WP	12.510.000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Aparatur BPKPD UPT dan Masyarakat Kecamatan Liliriaja	28216 WP	12.510.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**									
5	**2**				**KEUANGAN**				**38.553.800**				**38.553.800**	
5	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah		100 %	**24.043.800**			100 %	**24.043.800**	
5	**2**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**24.043.800**			100 %	**24.043.800**	
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kelurahan	2 Jenis	1.515.000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Aparatur UPT BPKPD Kecamatan Lilirilau	2 Jenis	1.515.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
5	2	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kelurahan	2 Paket	10.000.000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Aparatur UPT BPKPD Kecamatan Lilirilau	2 Paket	10.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kelurahan	49 kali	12.528.800	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Aparatur UPT BPKPD Kecamatan Lilirilau	49 kali	12.528.800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	**2**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Rasio Efektivitas PAD		100 %	**14.510.000**			100 %	**14.510.000**	
5	**2**	**4**	2.01		**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah		100 %	**14.510.000**			100 %	**14.510.000**	
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan tepat Waktu	Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kelurahan	33331 WP	14.510.000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Aparatur UPT BPKPD dan Masyarakat Kecamatan Lilirilau	33331 WP	14.510.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**									
5	**2**				**KEUANGAN**				**32.323.800**				**32.323.800**	
5	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah		100 %	**20.813.800**			100 %	**20.813.800**	
5	**2**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**20.813.800**			100 %	**20.813.800**	
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kelurahan	2 Jenis	1.515.000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Aparatur UPT BPKPD Kecamatan Marioriawa	2 Jenis	1.515.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kelurahan	2 Paket	10.000.000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Aparatur UPT BPKPD Kecamatan Marioriawa	2 Paket	10.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kelurahan	30 kali	9.298.800	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Aparatur UPT BPKPD Kecamatan Marioriawa	30 kali	9.298.800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
5	**2**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Rasio Efektivitas PAD		100 %	**11.510.000**			100 %	**11.510.000**	
5	**2**	**4**	2.01		**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah		100 %	**11.510.000**			100 %	**11.510.000**	
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan tepat Waktu	Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kelurahan	25183 WP	11.510.000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Aparatur UPT BPKPD dan Masyarakat Kecamatan Marioriawa	25183 WP	11.510.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**									
5	**2**				**KEUANGAN**				**39.223.800**				**39.223.800**	
5	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah		100 %	**24.213.800**			100 %	**24.213.800**	
5	**2**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**24.213.800**			100 %	**24.213.800**	
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	2 Jenis	1.515.000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Aparatur UPT BPKPD Kecamatan Marioriwawo	2 Jenis	1.515.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	2 Paket	10.000.000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Aparatur UPT BPKPD Kecamatan Marioriwawo	2 Paket	10.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	51 kali	12.698.800	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Aparatur UPT BPKPD Kecamatan Marioriwawo	51 kali	12.698.800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	**2**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Rasio Efektivitas PAD		6 %	**15.010.000**			6 %	**15.010.000**	
5	**2**	**4**	2.01		**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah		100 %	**15.010.000**			100 %	**15.010.000**	
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan tepat Waktu	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	42467 WP	15.010.000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Aparatur UPT BPKPD dan Masyarakat Kecamatan Marioriwawo	42467 WP	15.010.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**									



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
5	**2**				**KEUANGAN**				**30.813.800**				**30.813.800**	
5	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah		100 %	**20.303.800**			100 %	**20.303.800**	
5	**2**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**20.303.800**			100 %	**20.303.800**	
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kelurahan	2 Jenis	1.515.000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Aparatur UPT BPKPD Kecamatan Ganra	2 Jenis	1.515.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kelurahan	2 Paket	10.000.000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Aparatur UPT BPKPD Kecamatan Ganra	2 Paket	10.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kelurahan	28 kali	8.788.800	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Aparatur UPT BPKPD Kecamatan Ganra	28 kali	8.788.800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	**2**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Rasio Efektivitas PAD		100 %	**10.510.000**			100 %	**10.510.000**	
5	**2**	**4**	2.01		**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah		100 %	**10.510.000**			100 %	**10.510.000**	
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan tepat Waktu	Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kelurahan	15239 WP	10.510.000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Aparatur UPT BPKPD dan Masyarakat Kecamatan Ganra	15239 WP	10.510.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**									
5	**2**				**KEUANGAN**				**27.613.800**				**27.613.800**	
5	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah		100 %	**18.603.800**			100 %	**18.603.800**	
5	**2**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**18.603.800**			100 %	**18.603.800**	
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng,	2 Jenis	1.515.000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Aparatur UPT BPKPD Kecamatan Citta	2 Jenis	1.515.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Citta, Semua Kelurahan							PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Citta, Semua Kelurahan	2 Paket	10.000.000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Aparatur UPT BPKPD Kecamatan Citta	2 Paket	10.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Citta, Semua Kelurahan	11 kali	7.088.800	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Aparatur UPT BPKPD Kecamatan Citta	11 kali	7.088.800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	**2**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Rasio Efektivitas PAD		100 %	**9.010.000**			100 %	**9.010.000**	
5	**2**	**4**	2.01		**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah		100 %	**9.010.000**			100 %	**9.010.000**	
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan tepat Waktu	Kab. Soppeng, Citta, Semua Kelurahan	13287 WP	9.010.000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Aparatur UPT BPKPD dan Masyarakat Kecamatan Citta	13287 WP	9.010.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**									
5	**3**				**KEPEGAWAIAN**				**7.109.785.992**				**8.361.873.277**	
5	**3**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		100 %	**5.843.410.692**			100 %	**6.456.297.977**	
5	**3**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu		100 % 100 % 100 %	**43.070.050**			100 % 100 % 100 %	**50.727.250**	
5	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Dokumen	16.727.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKPSDM Kab. Soppeng	3 Dokumen	16.812.250	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata,	1 Dokumen	4.257.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKPSDM Kab. Soppeng	1 Dokumen	12.020.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Lalabata Rilau							N SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	4.410.050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKPSDM Kab. Soppeng	1 Dokumen	4.220.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	7 Dokumen	17.675.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKPSDM Kab. Soppeng	7 Dokumen	17.675.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	**3**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**4.485.904.052**			100 %	**4.590.454.168**	
5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	47 ASN	4.454.229.152	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKPSDM Kab. Soppeng	47 ASN	4.555.454.168	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	98 SPM	14.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKPSDM Kab. Soppeng	98 SPM	16.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Dokumen	17.324.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKPSDM Kab. Soppeng	2 Dokumen	19.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	**3**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah		100 %	**10.550.000**			100 %	**10.550.000**	
5	3	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	6 Dokumen	10.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor BKPSDM	6 Dokumen	10.550.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
5	**3**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	**10.114.500**			100 %	**11.355.000**	
5	3	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	47 ASN	10.114.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN BKPSDM	47 ASN	11.355.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	**3**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**731.337.227**			100 %	**1.161.150.227**	
5	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	9 Jenis	2.715.557	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKPSDM KAB. SOPPENG	9 Jenis	2.642.957	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	9 Jenis	100.401.120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKPSDM KAB. SOPPENG	9 Jenis	100.431.120	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Paket	105.640.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKPSDM KAB. SOPPENG	3 Paket	105.640.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Jenis	41.982.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKPSDM KAB. SOPPENG	2 Jenis	41.800.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Paket	79.518.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKPSDM KAB. SOPPENG	5 Paket	79.634.150	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg terfasilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata,	600 Orang	18.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKPSDM KAB. SOPPENG	600 Orang	18.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Lalabata Rilau							N SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	400 Kali	383.080.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKPSDM KAB. SOPPENG	400 Kali	813.002.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	**3**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	**119.500.000**			100 %	**94.250.000**	
5	3	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	10 Unit	119.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKPSDM	10 Unit	94.250.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	**3**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	**227.654.178**			100 %	**236.978.082**	
5	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telepon Jumlah pemenuhan jasa air Jumlah pemenuhan listrik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Kali 12 Kali 12 Kali	188.654.178	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKPSDM Kab. Soppeng	12 Kali 12 Kali 12 Kali	197.978.082	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Jenis	39.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKPSDM Kab. Soppeng	1 Jenis	39.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	**3**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	**215.280.685**			100 %	**300.833.250**	
5	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	6 Unit	80.660.685	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKPSDM Kab. Soppeng	6 Unit	91.213.250	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
5	3	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	23 Unit	14.570.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKPSDM Kab. Soppeng	23 Unit	14.570.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3000 M2	120.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKPSDM Kab. Soppeng	3000 M2	120.050.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	**3**	**2**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Persentase Pegawai yang ditempatkan sesuai kompetensi Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu Persentase ASN yang meningkat kompetensinya		100 % 100 % 0,57%	**1.266.375.300**			100 % 100 % 0,55	**1.905.575.300**	
5	**3**	**2**	2.01		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Jumlah ASN yang terlayani Administrasi Kepegawainnya		5221 ASN	**576.250.000**			5221 ASN	**1.191.770.000**	
5	3	2	2.01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Presentase Pemenuhan Kebutuahan PNS melalui seleksi CPNS	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	250 CPNS	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	250 CPNS	613.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Formasi Kepegawaian yang sesuai kebutuhan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	243 ASN	488.725.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	243 ASN	488.725.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah ASN yang memasuki Usia Pensiun berdasarkan PNS yang memenuhi syarat	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	243 ASN	21.480.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	243 ASN	24.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumah usulan Cuti PNS, Karpeg , Karsi Karsu, Taspen, BPJS Tenaga Kontrak dan Izin Perceraian,	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1300 Berkas	27.615.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	1300 Berkas	27.615.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
5	3	2	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Data ASN yang terupdate Jumlah Dokumen Absensi Pegawai	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5221 Berkas 388 Dokumen	38.430.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	5221 Berkas 388 Dokumen	38.430.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	**3**	**2**	2.02		**Mutasi dan Promosi ASN**	Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai kapasitasnya		1146 ASN	**88.525.000**			1146 ASN	**89.775.000**	
5	3	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah SK Jabatan Fungsional	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	500 berkas	44.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN	500 berkas	44.650.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan Pangkat	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	850 berkas	43.875.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN	850 berkas	45.125.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	**3**	**2**	2.03		**Pengembangan Kompetensi ASN**	Jumlah ASN yang meningkat kompetensinya		246 ASN	**505.835.300**			246 ASN	**519.165.300**	
5	3	2	2.03	2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi yang lulus seleksi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	8 ASN	186.670.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN	8 ASN	200.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mengikuti tugas belajar dan izin belajar	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	25 ASN	280.650.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN	25 ASN	280.650.300	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah bahan publikasi/sosialisasi Kepegawaian	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Bahan Publikasi	20.940.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN	3 Bahan Publikasi	20.940.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah SK Penempatan ASN	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	246 berkas	17.575.000	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai	ASN	246 berkas	17.575.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
										Pemerintah dengan Perjanjian Kerja				N SUMBER DAYA MANUSIA
5	**3**	**2**	2.04		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	Persentase Peningkatan Disiplin ASN		100 %	**95.765.000**			100 %	**104.865.000**	
5	3	2	2.04	1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Kebijakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	2.325.000	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	ASN	1 Dokumen	2.325.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah Pelaksanaan Verifikasi TPP Jumlah PNS yang menerima Penghargaan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Kali 520 ASN	82.135.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN	12 Kali 520 ASN	82.135.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang dijatuhi hukuman disiplin	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	24 ASN	11.305.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN	24 ASN	11.305.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	**4**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**1.463.773.200**				**3.068.706.950**	
5	**4**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan (JP)		20 JP	**1.463.773.200**			20 JP	**3.068.706.950**	
5	**4**	**2**	2.01		**Pengembangan Kompetensi Teknis**	Jumlah ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis		40 ASN	**2.025.000**			40 ASN	**202.025.000**	
5	4	2	2.01	4	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Diklat Teknis	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Dokumen	2.025.000	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	ASN	1 Dokumen	2.025.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	**4**	**2**	2.02		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan**	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pengembangan Manajerial dan Fungsional		129 ASN	**1.461.748.200**			129 ASN	**2.866.681.950**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					Kompetensi Manajerial dan Fungsional									
5	4	2	2.02	3	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang mengikuti pelaksanaan Sertifikasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	40 ASN	64.656.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN	40 ASN	64.656.950	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	2	2.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang mengikuti pengiriman diklat manajerial Jumlah Kelas Diklat Manajerial	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 ASN 2 Kelas	1.395.066.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN	1 ASN 2 Kelas	2.800.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	2	2.02	8	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang dinilai Jumlah Dokumen Diklat Manajerial dan Fungsional	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	254 ASN 1 Dokumen	2.025.000	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	ASN	254 ASN 1 Dokumen	2.025.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**									
6	**1**				**INSPEKTORAT DAERAH**				**9.147.061.899**				**9.147.061.899**	
6	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Inspektorat Daerah		100 %	**7.481.899.549**			100 %	**7.481.899.549**	
6	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu		100 % 100 % 100 %	**8.375.000**			100 % 100 % 100 %	**8.375.000**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
6	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	1 Dokumen	1.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Inspektorat Daerah	1 Dokumen	1.550.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	1 Dokumen	2.155.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Inspektorat Daerah	1 Dokumen	2.155.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	1 Dokumen	2.155.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Inspektorat Daerah	1 Dokumen	2.155.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	9 Dokumen	2.515.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Inspektorat Daerah	9 Dokumen	2.515.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**6.631.381.899**			100 %	**6.631.381.899**	
6	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	59 ASN	6.610.156.899	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	59 ASN	6.610.156.899	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	100 SPM	18.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 SPM	18.500.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	6 Dokumen	2.725.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6 Dokumen	2.725.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	**1**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	**350.403.500**			100 %	**350.403.500**	
6	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	20 Dokumen	31.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng	20 Dokumen	31.050.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan, pelatihan sesuai tugas dan fungsi	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	9 ASN	273.801.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng	9 ASN	273.801.000	INSPEKTORAT DAERAH



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
6	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	59 ASN	45.552.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng	59 ASN	45.552.500	INSPEKTORAT DAERAH
6	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**247.147.850**			100 %	**247.147.850**	
6	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	5 Jenis	1.880.080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng	5 Jenis	1.880.080	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	3 Paket	72.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng	3 Paket	72.100.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	6 Jenis	11.703.650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng	6 Jenis	11.703.650	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	5 Paket	65.076.320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng	5 Paket	65.076.320	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg terfasilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	80 Orang	2.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng	80 Orang	2.800.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	37 Kali	93.587.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng	37 Kali	93.587.800	INSPEKTORAT DAERAH
6	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	**71.440.000**			100 %	**71.440.000**	
6	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	2 Jenis	20.490.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng	2 Jenis	20.490.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	2 Jenis	50.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng	2 Jenis	50.950.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	**80.043.700**			100 %	**80.043.700**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
6	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telepon Jumlah pemenuhan jasa air Jumlah pemenuhan listrik	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Kali	46.443.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng	36 Kali	46.443.700	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Jenis	33.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng	3 Jenis	33.600.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	**93.107.600**			100 %	**93.107.600**	
6	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	27 Unit	56.853.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng	27 Unit	56.853.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	38 Unit	23.830.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng	38 Unit	23.830.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300.34 M2	12.424.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng	300.34 M2	12.424.600	INSPEKTORAT DAERAH
6	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Persentase Rekomendasi Temuan yang Selesai Ditindak Lanjuti		80 %	**1.350.204.850**			85 %	**1.350.204.850**	
6	**1**	**2**	2.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa		83 LHP	**992.359.850**			83 LHP	**992.359.850**	
6	1	2	2.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 LHP	18.425.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Pemerintahan Desa	1 LHP	18.425.000	INSPEKTORAT DAERAH



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
6	1	2	2.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27 LHP	305.919.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Pemerintahan Desa	27 LHP	305.919.850	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	2	2.01	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23 LHP	206.755.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Pemerintahan Desa	23 LHP	206.755.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	2	2.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	4 LHP	55.960.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Pemerintahan Desa	4 LHP	55.960.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	2	2.01	5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22 LHP	225.225.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Pemerintahan Desa	22 LHP	225.225.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	2	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah kegiatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan: a. Inskab, b. Insprov, c. BPK-RI	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Kali	180.075.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Pemerintahan Desa	4 Kali	180.075.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	**1**	**2**	2.02		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	Jumlah Laporan hasil penyelesaian kasus-kasus/ pengaduan masyarakat dan pengawasan tertentu		43 LHP	**357.845.000**			43 LHP	**357.845.000**	
6	1	2	2.02	2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan tujuan tertentu yang ditangani	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43 LHP	357.845.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Pemerintahan Desa	43 LHP	357.845.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	**1**	**3**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Persentase Penurunan Temuan Keuangan		70 %	**314.957.500**			60 %	**314.957.500**	
6	**1**	**3**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang**	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		2 kebijakan	**103.167.500**			2 kebijakan	**103.167.500**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan									
6	1	3	2.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	1 Kebijakan	103.167.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Pemerintahan Desa	1 Kebijakan	103.167.500	INSPEKTORAT DAERAH
6	**1**	**3**	2.02		**Pendampingan dan Asistensi**	Jumlah pendampingan dan asistensi terhadap SKPD dan Pemerintahan Desa		8 Kali	**211.790.000**			8 Kali	**211.790.000**	
6	1	3	2.02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	4 Kali	51.790.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Pemerintahan Desa	4 Kali	51.790.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	3	2.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah pelaksanaan operasional Saber Pungli	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Kali	160.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Pemerintahan Desa	4 Kali	160.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7	**1**				**KECAMATAN**				**5.614.854.929**				**5.862.350.927**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lilirilau		100 %	**5.551.635.929**			100 %	**5.757.581.927**	
7	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu		100 % 100 % 100 %	**29.128.350**			100 % 100 % 100 %	**21.104.050**	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	2 Dokumen	9.374.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peresentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	10.000.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	2 dokumen	18.029.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peresentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2 dokumen	9.629.400	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	7 dokumen	1.724.650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peresentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	7 dokumen	1.474.650	KECAMATAN LILIRILAU



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**5.162.827.982**			100 %	**5.352.208.370**	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	52 ASN	5.157.618.332	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Laporan Keuangan Kecamatan Lilirilau	52 ASN	5.346.998.720	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	35 SPM	2.610.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Laporan Keuangan Kecamatan Lilirilau	35 SPM	2.610.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang tersusun	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	20 dokumen	2.599.650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Laporan Keuangan Kecamatan Lilirilau	20 dokumen	2.599.650	KECAMATAN LILIRILAU
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**168.128.640**			100 %	**168.035.100**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	8 jenis	2.499.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Camat Lilirilau	8 jenis	2.499.800	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	2 paket	51.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Camat Lilirilau	2 paket	51.750.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	4 Jenis	13.524.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Camat Lilirilau	4 Jenis	13.524.700	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	4 Paket	32.971.140	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Camat Lilirilau	4 Paket	32.877.600	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg terfasilitasi	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	480 orang	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Camat Lilirilau	480 orang	12.000.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	171 kali	55.383.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Camat Lilirilau	171 kali	55.383.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang**	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	**9.060.000**			100 %	**43.893.000**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					Urusan Pemerintah Daerah									
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	1 Jenis	3.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kecamatan Lilirilau	1 Jenis	3.200.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	2 Jenis	5.860.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kecamatan Lilirilau	2 Jenis	40.693.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	**75.707.477**			100 %	**70.007.477**	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telepon Jumlah pemenuhan jasa air Jumlah pemenuhan listrik	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	12 kali 12 kali 12 kali	46.307.477	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kecamatan Lilirilau	12 kali 12 kali 12 kali	46.307.477	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	3 jenis	29.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kecamatan Lilirilau	3 jenis	23.700.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	**106.783.480**			100 %	**102.333.930**	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	3 unit	46.903.480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kecamatan Lilirilau	3 unit	42.403.480	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	6 unit	3.630.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kecamatan Lilirilau	6 unit	3.630.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	98 M2	56.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kecamatan Lilirilau	98 M2	56.300.450	KECAMATAN LILIRILAU
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Lilirilau(%) Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Lilirilau		100% 100%	**31.200.000**			100% 100%	**72.750.000**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	**1**	**2**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase Pelimpahan Kewenangan Yang Terlaksana		100%	**31.200.000**			100%	**22.750.000**	
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah perizinan Non Usaha yang diterbitkan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	50 buah	7.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kecamatan Lilirilau	50 buah	5.200.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Non perizinan yang diterbitkan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	100 buah	23.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kecamatan Lilirilau	100 buah	17.550.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lilirilau		100 %	**10.119.850**			100 %	**10.119.850**	
7	**1**	**3**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah pelaksanaan koordinasi kecamatan sehat		2 kali	**10.119.850**			2 kali	**10.119.850**	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan koordinasi kecamatan sehat	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	2 kali	10.119.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Lilirilau	2 kali	10.119.850	KECAMATAN LILIRILAU
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Lilirilau		100 %	**14.000.000**			100 %	**14.000.000**	
7	**1**	**4**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan		100 %	**14.000.000**			100 %	**14.000.000**	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jasa Narasumber Penyuluhan Kantibmas	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	2 orang	14.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Lilirilau	2 orang	14.000.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Lilirilau		100 %	**7.899.150**			100 %	**7.899.150**	
7	**1**	**6**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase desa yang dibina dan diawasi		100 %	**7.899.150**			100 %	**7.899.150**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi pengelolaan ADD	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	8 desa	7.899.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Desa se Kecamatan Lilirilau	8 desa	7.899.150	KECAMATAN LILIRILAU
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7	**1**				**KECAMATAN**				**795.971.000**				**255.595.000**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lilirilau		100 %	**119.971.000**			100 %	**119.995.000**	
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**1.152.000**			100 %	**1.152.000**	
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	30 SPM	1.152.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantort Kelurahan Ujung	30 SPM	1.152.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**42.560.520**			100 %	**42.584.520**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	3 jenis	564.620	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kelurahan Ujung	3 jenis	564.620	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	2 paket	12.855.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kelurahan Ujung	2 paket	12.855.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	1 Jenis	2.160.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kelurahan Ujung	1 Jenis	2.160.700	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	5 Paket	10.107.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kelurahan Ujung	5 Paket	10.131.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg terfasilitasi	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	350 orang	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kelurahan Ujung	350 orang	5.000.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	31 kali	11.873.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kelurahan Ujung	31 kali	11.873.200	KECAMATAN LILIRILAU
7	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang**	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	**26.980.000**			100 %	**26.980.000**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					Urusan Pemerintah Daerah									
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	3 Jenis	26.980.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Jenis	26.980.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	**37.183.000**			100 %	**37.183.000**	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telepon Jumlah pemenuhan jasa air Jumlah pemenuhan listrik	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	12 Kali 12 Kali 12 Kali	12.033.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kelurahan Ujung	12 Kali 12 Kali 12 Kali	12.033.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	2 Jenis	25.150.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kelurahan Ujung	2 Jenis	25.150.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	**12.095.480**			100 %	**12.095.480**	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	1 unit	2.492.440	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kelurahan Ujung	1 unit	2.492.440	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	2 unit	4.222.515	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kelurahan Ujung	2 unit	4.222.515	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	7 unit	4.390.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kelurahan Ujung	7 unit	4.390.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	99 M2	990.525	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kelurahan Ujung	99 M2	990.525	KECAMATAN LILIRILAU
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN**	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lilirilau		100 %	**676.000.000**			100 %	**135.600.000**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan		100 %	**676.000.000**			100 %	**135.600.000**	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan Yang dilaksanakan Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	6 Kegiatan 5 Paket	676.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kelurahan Ujung	6 Kegiatan 5 Paket	135.600.000	KECAMATAN LILIRILAU
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7	**1**				**KECAMATAN**				**796.000.000**				**796.748.365**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lilirilau		100 %	**120.000.000**			100 %	**120.748.365**	
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**1.260.000**			100 %	**1.260.000**	
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	30 SPM	1.260.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kelurahan Cabenge	30 SPM	1.260.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**38.679.000**			100 %	**39.473.600**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	4 Jenis	652.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kelurahan Cabenge	4 Jenis	652.600	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	2 paket	12.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kelurahan Cabenge	2 paket	12.800.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	1 Jenis	2.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kelurahan Cabenge	1 Jenis	2.100.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	4 Paket	11.306.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kelurahan Cabenge	4 Paket	11.306.800	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg terfasilitasi	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	600 orang	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kelurahan Cabenge	600 orang	6.000.000	KECAMATAN LILIRILAU



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	27 Kali	5.819.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kelurahan Cabenge	27 Kali	6.614.200	KECAMATAN LILIRILAU
7	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	**8.500.000**			100 %	**8.500.000**	
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	1 Jenis	8.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Jenis	8.500.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	**57.243.740**			100 %	**57.197.505**	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telepon Jumlah pemenuhan jasa air Jumlah pemenuhan listrik	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	12 Kali 12 Kali 12 Kali	12.843.740	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kelurahan Cabenge	12 Kali 12 Kali 12 Kali	12.797.505	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	1 Jenis	44.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kelurahan Cabenge	1 Jenis	44.400.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	**14.317.260**			100 %	**14.317.260**	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	3 unit	8.075.760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kelurahan Cabenge	3 unit	8.075.760	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	4 unit	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kelurahan Cabenge	4 unit	2.400.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	384 M2	3.841.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kelurahan Cabenge	384 M2	3.841.500	KECAMATAN LILIRILAU
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN**	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lilirilau		100 %	**676.000.000**			100 %	**676.000.000**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan		100 %	**676.000.000**			100 %	**676.000.000**	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	4 paket	377.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kelurahan Cabenge	4 paket	335.400.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	8 kegiatan	299.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kelurahan Cabenge	8 kegiatan	340.600.000	KECAMATAN LILIRILAU
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7	**1**				**KECAMATAN**				**796.000.000**				**773.626.500**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lilirilau		100 %	**120.000.000**			100 %	**97.625.550**	
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**1.260.000**			100 %	**1.260.000**	
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	30 SPM	1.260.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kelurahan Pajalesang	30 SPM	1.260.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**39.318.705**			100 %	**17.794.255**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	4 jenis	763.305	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kelurahan Pajalesang	4 jenis	708.255	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	2 Paket	12.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kelurahan Pajalesang	2 Paket	800.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	1 Jenis	2.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kelurahan Pajalesang	1 Jenis	2.100.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	4 Paket	11.665.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kelurahan Pajalesang	4 Paket	6.616.400	KECAMATAN LILIRILAU



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg terfasilitasi	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	499 orang	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kelurahan Pajalesang	499 orang	6.000.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28 kali	5.989.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kelurahan Pajalesang	28 kali	1.569.600	KECAMATAN LILIRILAU
7	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	**4.550.000**			100 %	**17.500.000**	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	1 Jenis	4.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	1 Jenis	17.500.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	**60.578.085**			100 %	**46.778.085**	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telepon Jumlah pemenuhan jasa air Jumlah pemenuhanlistrik	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	12 Kali 12 Kali 12 Kali	14.378.085	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran	12 Kali 12 Kali 12 Kali	14.378.085	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	2 Jenis	46.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran	2 Jenis	32.400.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	**14.293.210**			100 %	**14.293.210**	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	3 unit	8.075.760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	3 unit	8.075.760	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	4 unit	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	4 unit	2.400.000	KECAMATAN LILIRILAU



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	381 m2	3.817.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	381 m2	3.817.450	KECAMATAN LILIRILAU
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lilirilau		100 %	**676.000.000**			100 %	**676.000.950**	
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan		100 %	**676.000.000**			100 %	**676.000.950**	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	4 paket	471.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kelurahan Pajalesang	4 paket	471.400.950	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	6 Kegiatan	204.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kelurahan Pajalesang	6 Kegiatan	204.600.000	KECAMATAN LILIRILAU
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7	**1**				**KECAMATAN**				**796.000.000**				**120.000.000**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lilirilau		100 %	**120.000.000**			100 %	**120.000.000**	
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**1.260.000**			100 %	**1.260.000**	
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi	Kab. Soppeng, Lilirilau, Macanre	30 SPM	1.260.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kelurahan Macanre	30 SPM	1.260.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**38.517.920**			100 %	**38.517.920**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lilirilau, Macanre	3 Jenis	678.170	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kelurahan Macanre	3 Jenis	678.170	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Lilirilau, Macanre	2 paket	12.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kelurahan Macanre	2 paket	12.800.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng,	1 Jenis	2.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kelurahan Macanre	1 Jenis	2.100.000	KECAMATAN LILIRILAU



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Lilirilau, Macanre							
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Macanre	4 Paket	11.120.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kelurahan Macanre	4 Paket	11.120.150	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg terfasilitasi	Kab. Soppeng, Lilirilau, Macanre	600 orang	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kelurahan Macanre	600 orang	6.000.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lilirilau, Macanre	26 Kali	5.819.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kelurahan Macanre	26 Kali	5.819.600	KECAMATAN LILIRILAU
7	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	**21.000.000**			100 %	**21.000.000**	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Macanre	1 Jenis	21.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kelurahan Macanre	1 Jenis	21.000.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	**45.243.740**			100 %	**45.243.740**	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telepon Jumlah pemenuhan jasa air Jumlah pemenuhan listrik	Kab. Soppeng, Lilirilau, Macanre	12 Kali 12 Kali 12 Kali	12.843.740	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kelurahan Macanre	12 Kali 12 Kali 12 Kali	12.843.740	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum	Kab. Soppeng, Lilirilau, Macanre	1 Jenis	32.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kelurahan Macanre	1 Jenis	32.400.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	**13.978.340**			100 %	**13.978.340**	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lilirilau, Macanre	3 unit	8.318.640	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kelurahan Macanre	3 unit	8.318.640	KECAMATAN LILIRILAU



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lilirilau, Macanre	3 unit	1.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kelurahan Macanre	3 unit	1.800.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Kab. Soppeng, Lilirilau, Macanre	385 M2	3.859.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kelurahan Macanre	385 M2	3.859.700	KECAMATAN LILIRILAU
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lilirilau		100 %	**676.000.000**			100 %	**0**	
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan		100 %	**676.000.000**			100 %	**0**	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang di bangun	Kab. Soppeng, Lilirilau, Macanre	4 paket	463.928.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kelurahan Macanre	4 paket	0	KECAMATAN LILIRILAU
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Macanre	9 kegiatan	212.072.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kelurahan Macanre	9 kegiatan	0	KECAMATAN LILIRILAU
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7	**1**				**KECAMATAN**				**2.225.293.122**				**0**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Citta		100 %	**2.147.203.172**			100 %	**0**	
7	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu		100 % 100 % 100 %	**4.036.600**			100 % 100 % 100 %	**0**	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Kab. Soppeng, Citta, Citta	3 Dokumen	1.479.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perencanaan, Stakeholder	3 Dokumen	0	KECAMATAN CITTA
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	Kab. Soppeng, Citta, Citta	1 Dokumen	849.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perencanaan, Stakeholder	1 Dokumen	0	KECAMATAN CITTA
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	Kab. Soppeng, Citta, Citta	8 Dokumen	1.706.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perencanaan, Stakeholder	8 Dokumen	0	KECAMATAN CITTA



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**1.804.563.433**			100 %	**0**	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	Kab. Soppeng, Citta, Citta	17 ASN	1.800.236.533	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Camat Citta	17 ASN	0	KECAMATAN CITTA
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi	Kab. Soppeng, Citta, Citta	100 SPM	2.640.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Camat Citta	100 SPM	0	KECAMATAN CITTA
7	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang tersusun	Kab. Soppeng, Citta, Citta	20 Dokumen	1.686.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Camat Citta	20 Dokumen	0	KECAMATAN CITTA
7	**1**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	**19.000.000**			100 %	**0**	
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis	Kab. Soppeng, Citta, Citta	3 ASN	19.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Kantor Camat Citta	3 ASN	0	KECAMATAN CITTA
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**138.920.495**			100 %	**0**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia	Kab. Soppeng, Citta, Citta	20 Jenis	1.999.565	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Camat Citta	20 Jenis	0	KECAMATAN CITTA
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Citta, Citta	3 paket	29.895.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Camat Citta	3 paket	0	KECAMATAN CITTA
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Citta, Citta	3 Jenis	13.408.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Camat Citta	3 Jenis	0	KECAMATAN CITTA
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	29.875.130	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Camat Citta	2 Paket	0	KECAMATAN CITTA
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg terfasilitasi	Kab. Soppeng, Citta, Citta	280 Orang	7.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Camat Citta	280 Orang	0	KECAMATAN CITTA
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Citta, Citta	245 Kali	56.742.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Camat Citta	245 Kali	0	KECAMATAN CITTA



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	**3.200.000**			100 %	**0**	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kab. Soppeng, Citta, Citta	1 Jenis	3.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Camat Citta	1 Jenis	0	KECAMATAN CITTA
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	**65.866.274**			100 %	**0**	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telepon Jumlah pemenuhan jasa air Jumlah pemenuhan listrik	Kab. Soppeng, Citta, Citta	12 Kali 12 Kali 12 Kali	43.066.274	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Camat Citta	12 Kali 12 Kali 12 Kali	0	KECAMATAN CITTA
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum	Kab. Soppeng, Citta, Citta	1 Jenis	22.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Camat Citta	1 Jenis	0	KECAMATAN CITTA
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	**111.616.370**			100 %	**0**	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Citta, Citta	6 Unit	59.596.370	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Camat Citta	6 Unit	0	KECAMATAN CITTA
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Citta, Citta	2 Unit	7.520.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Camat Citta	2 Unit	0	KECAMATAN CITTA
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Kab. Soppeng, Citta, Citta	1 Unit	44.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Camat Citta	1 Unit	0	KECAMATAN CITTA
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Citta (%) Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Citta		100 % 100 %	**27.000.000**			100 % 100 %	**0**	
7	**1**	**2**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan		150 Buah	**27.000.000**			150 Buah	**0**	
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait	jumlah perizinan non usaha yang diterbitkan	Kab. Soppeng, Citta, Citta	50 Buah	6.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelembagaan Masyarakat dan Unit Kerja Lain	50 Buah	0	KECAMATAN CITTA



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha									
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	jumlah nonperizinan yang diterbitkan	Kab. Soppeng, Citta, Citta	100 Buah	20.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelembagaan Masyarakat dan Unit Kerja Lain	100 Buah	0	KECAMATAN CITTA
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Citta		100 %	**23.819.950**			100 %	**0**	
7	**1**	**3**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kecamatan Sehat		8 Kali	**23.819.950**			8 Kali	**0**	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan koordinasi kecamatan sehat	Kab. Soppeng, Citta, Citta	8 Kali	23.819.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Citta	8 Kali	0	KECAMATAN CITTA
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Citta		100 %	**14.640.000**			100 %	**0**	
7	**1**	**4**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Masyarakat penyuluhan kantibmas		240 Orang	**14.640.000**			240 Orang	**0**	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan kantibmas	Kab. Soppeng, Citta, Citta	150 Orang	14.640.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Citta	150 Orang	0	KECAMATAN CITTA
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Citta		100 %	**12.630.000**			100 %	**0**	
7	**1**	**6**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah Desa yang di Fasilitasi		4 Desa	**12.630.000**			4 Desa	**0**	
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang di fasilitasi	Kab. Soppeng, Citta, Citta	4 Desa	12.630.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Desa se Kecamatan Citta	4 Desa	0	KECAMATAN CITTA
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7	**1**				**KECAMATAN**				**2.671.034.175**				**2.671.034.175**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Ganra		100 %	**2.604.844.225**			100 %	**2.604.844.225**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					DAERAH KABUPATEN/KOTA									
7	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu		100 % 100 % 100 %	**20.948.150**			100 % 100 % 100 %	**20.948.150**	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	2 Dokumen	12.383.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perencanaan, Stakeholder	2 Dokumen	12.383.450	KECAMATAN GANRA
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	1 Dokumen	3.774.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perencanaan, Stakeholder	1 Dokumen	3.774.750	KECAMATAN GANRA
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	9 Dokumen	4.789.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perencanaan, Stakeholder	9 Dokumen	4.789.950	KECAMATAN GANRA
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**2.307.669.502**			100 %	**2.307.669.502**	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	22 ASN	2.305.389.502	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Kecamatan Ganra	22 ASN	2.305.389.502	KECAMATAN GANRA
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	100 SPM	2.280.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Kecamatan Ganra	100 SPM	2.280.000	KECAMATAN GANRA
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**110.422.050**			100 %	**110.422.050**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	5 Jenis	1.523.050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Ganra	5 Jenis	1.523.050	KECAMATAN GANRA
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	3 Jenis	1.365.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Ganra	3 Jenis	1.365.000	KECAMATAN GANRA
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	3 paket	27.425.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Ganra	3 paket	27.425.000	KECAMATAN GANRA



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	1 Jenis	8.449.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Ganra	1 Jenis	8.449.700	KECAMATAN GANRA
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	4 Paket	12.453.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Ganra	4 Paket	12.453.100	KECAMATAN GANRA
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg terfasilitasi	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	240 Orang	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Ganra	240 Orang	6.000.000	KECAMATAN GANRA
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	162 Kali	53.206.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Ganra	162 Kali	53.206.200	KECAMATAN GANRA
7	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	**27.785.000**			100 %	**27.785.000**	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	3 Jenis	27.785.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Ganra	3 Jenis	27.785.000	KECAMATAN GANRA
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	**35.836.158**			100 %	**35.836.158**	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telepon Jumlah pemenuhan jasa air Jumlah pemenuhan listrik	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	12 Kali 12 Kali 12 Kali	25.036.158	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Ganra	12 Kali 12 Kali 12 Kali	25.036.158	KECAMATAN GANRA
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	2 Jenis	10.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Ganra	2 Jenis	10.800.000	KECAMATAN GANRA
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	**102.183.365**			100 %	**102.183.365**	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	3 Jenis	43.383.365	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Ganra	3 Jenis	43.383.365	KECAMATAN GANRA



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	14 Unit	8.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Ganra	14 Unit	8.800.000	KECAMATAN GANRA
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	5000 M2	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Ganra	5000 M2	50.000.000	KECAMATAN GANRA
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Ganra(%) Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Ganra		100 % 100 %	**28.800.000**			100 % 100 %	**28.800.000**	
7	**1**	**2**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase Pelimpahan Kewenangan yang terlaksana		300 Buah	**28.800.000**			300 Buah	**28.800.000**	
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	jumlah perizinan dan non usaha yang diterbitkan	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	150 Buah	21.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelembagaan Masyarakat dan Umit Kerja Lain	150 Buah	21.600.000	KECAMATAN GANRA
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah nonperizinan yang diterbitkan	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	150 Buah	7.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelembagaan Masyarakat dan Umit Kerja Lain	150 Buah	7.200.000	KECAMATAN GANRA
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Ganra		100 %	**14.999.950**			100 %	**14.999.950**	
7	**1**	**3**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kecamatan Sehat		2 Kali	**14.999.950**			2 Kali	**14.999.950**	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan koordinasi kecamatan sehat	Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kelurahan	2 Kali	14.999.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Ganra	2 Kali	14.999.950	KECAMATAN GANRA
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Ganra		100 %	**14.640.000**			100 %	**14.640.000**	
7	**1**	**4**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Penyuluhan Kamtibmas		264 Orang	**14.640.000**			264 Orang	**14.640.000**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan kamtibmas	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	264 Orang	14.640.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Ganra	264 Orang	14.640.000	KECAMATAN GANRA
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Ganra		100 %	**7.750.000**			100 %	**7.750.000**	
7	**1**	**6**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah Desa yang di Fasilitasi		4 Desa	**7.750.000**			4 Desa	**7.750.000**	
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kelurahan	4 Desa	7.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Desa Se Kecamatan Ganra	4 Desa	7.750.000	KECAMATAN GANRA
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7	**1**				**KECAMATAN**				**2.945.647.487**				**3.045.647.487**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Donri-Donri		100 %	**2.857.377.487**			100 %	**2.962.327.487**	
7	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu		100 % 100 % 100 %	**12.166.250**			100 % 100 % 100 %	**10.966.250**	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	3 Dokumen	10.094.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Data perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kecamatan Donri-Donri	3 Dokumen	8.894.950	KECAMATAN DONRI-DONRI
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	2 Dokumen	1.458.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Data perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kecamatan Donri-Donri	2 Dokumen	1.458.800	KECAMATAN DONRI-DONRI
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	6 Dokumen	612.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Data perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kecamatan Donri-Donri	6 Dokumen	612.500	KECAMATAN DONRI-DONRI



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**2.466.628.113**			100 %	**2.566.508.113**	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	23 ASN	2.460.963.363	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Kantor Camat Donri - Donri	23 ASN	2.560.963.363	KECAMATAN DONRI-DONRI
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	45 SPM	2.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Kantor Camat Donri - Donri	45 SPM	1.980.000	KECAMATAN DONRI-DONRI
7	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang tersusun	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	20 Dokumen	3.564.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Kantor Camat Donri - Donri	20 Dokumen	3.564.750	KECAMATAN DONRI-DONRI
7	**1**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	**20.000.000**			100 %	**20.000.000**	
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	2 ASN	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN pada Kantor Camat Donri - Donri	2 ASN	20.000.000	KECAMATAN DONRI-DONRI
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**176.528.800**			100 %	**173.058.800**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	2 Jenis	1.489.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Camat Donri - Donri	2 Jenis	1.489.000	KECAMATAN DONRI-DONRI
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	2 Paket	40.910.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Camat Donri - Donri	2 Paket	40.910.000	KECAMATAN DONRI-DONRI
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	3 Jenis	21.841.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Camat Donri - Donri	3 Jenis	19.801.900	KECAMATAN DONRI-DONRI
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	5 Paket	32.678.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Camat Donri - Donri	5 Paket	31.048.300	KECAMATAN DONRI-DONRI
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg terfasilitasi	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	186 Orang	6.510.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Camat Donri - Donri	186 Orang	6.510.000	KECAMATAN DONRI-DONRI



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	225 Kali	73.099.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Camat Donri - Donri	225 Kali	73.299.600	KECAMATAN DONRI-DONRI
7	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	**15.700.000**			100 %	**15.700.000**	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	2 Jenis	15.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Camat Donri - Donri	2 Jenis	15.700.000	KECAMATAN DONRI-DONRI
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	**60.477.964**			100 %	**71.277.964**	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telepon Jumlah pemenuhan jasa air Jumlah pemenuhan listrik	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	12 Kali 12 Kali 12 Kali	25.077.964	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Camat Donri-Donri	12 Kali 12 Kali 12 Kali	25.077.964	KECAMATAN DONRI-DONRI
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	4 Jenis	35.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Camat Donri-Donri	4 Jenis	46.200.000	KECAMATAN DONRI-DONRI
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	**105.876.360**			100 %	**104.816.360**	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	3 Unit	48.186.360	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kantor Camat Donri - Donri	3 Unit	48.686.360	KECAMATAN DONRI-DONRI
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	8 Unit	4.840.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Camat Donri - Donri	8 Unit	3.630.000	KECAMATAN DONRI-DONRI
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	2 Unit	52.850.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kantor Camat Donri - Donri	2 Unit	52.500.000	KECAMATAN DONRI-DONRI
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN**	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Donri-Donri(%)		100 %	**26.400.000**			100 %	**24.000.000**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Donri-Donri		100 %				100 %		
7	**1**	**2**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah Perizinan Non Usaha dan Non Perizinan yang diterbitkan		300 Buah	**26.400.000**			300 Buah	**24.000.000**	
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah perizinan non usaha yang diterbitkan	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	100 Buah	6.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat se Kecamatan Donri - Donri	100 Buah	6.000.000	KECAMATAN DONRI-DONRI
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah non perizinan yang diterbitkan	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	200 Buah	19.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat se Kecamatan Donri - Donri	200 Buah	18.000.000	KECAMATAN DONRI-DONRI
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Donri-Donri		100 %	**27.170.000**			100 %	**26.020.000**	
7	**1**	**3**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kecamatan Sehat		8 Kali	**27.170.000**			8 Kali	**26.020.000**	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan koordinasi Kecamatan Sehat	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	8 Kali	27.170.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat se Kecamatan Donri - Donri	8 Kali	26.020.000	KECAMATAN DONRI-DONRI
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Donri-Donri		100 %	**15.000.000**			100 %	**15.000.000**	
7	**1**	**4**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah masyarakat yang mengiukuti penyuluhan kamtibmas		300 orang	**15.000.000**			300 orang	**15.000.000**	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah masayarakat yang mengikuti Penyuluhan Kamtibmas	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	300 Orang	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Donri - Donri	300 Orang	15.000.000	KECAMATAN DONRI-DONRI
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Donri-Donri		100 %	**19.700.000**			100 %	**18.300.000**	
7	**1**	**6**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan**	Jumlah Desa yang difasilitasi		9 Desa	**19.700.000**			9 Desa	**18.300.000**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					Pengawasan Pemerintahan Desa									
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	9 Desa	19.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Desa se Kecamatan Donri - Donri	9 Desa	18.300.000	KECAMATAN DONRI-DONRI
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7	**1**				**KECAMATAN**				**6.118.802.448**				**6.268.802.474**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriawa		100 %	**6.042.952.448**			100 %	**6.142.952.474**	
7	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu		100 % 100 % 100 %	**14.015.000**			100 % 100 % 100 %	**14.015.000**	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	3 Dokumen	2.055.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Soppeng, Kec.Marioriawa	3 Dokumen	2.055.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	3 Dokumen	10.080.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Soppeng, Kec.Marioriawa	3 Dokumen	10.080.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	20 Dokumen	1.880.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Soppeng, Kec.Marioriawa	20 Dokumen	1.880.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**5.568.611.946**			100 %	**5.668.611.972**	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	56 ASN	5.557.031.946	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	ASN Kecamatan Marioriawa	56 ASN	5.657.031.972	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	50 SPM	1.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Kecamatan Marioriawa	50 SPM	1.950.000	KECAMATAN MARIORIAWA



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang tersusun	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	15 Dokumen	9.630.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Kecamatan Marioriawa	15 Dokumen	9.630.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**188.349.999**			100 %	**195.349.999**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	6 unit	1.539.125	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN MARIORIAWA	6 unit	1.539.125	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	3 Paket	59.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN MARIORIAWA	3 Paket	59.850.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	2 Jenis	5.901.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN MARIORIAWA	2 Jenis	5.901.400	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	5 Paket	36.504.674	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN MARIORIAWA	5 Paket	36.364.674	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg terfasilitasi	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	514 orang	18.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN MARIORIAWA	514 orang	18.000.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	350 Kali	66.554.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN MARIORIAWA	350 Kali	73.694.800	KECAMATAN MARIORIAWA
7	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	**34.440.000**			100 %	**27.440.000**	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	5 unit	34.440.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Soppeng, Kec. Marioriawa	5 unit	27.440.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	**127.774.623**			100 %	**127.774.623**	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telepon Jumlah pemenuhan jasa air	Kab. Soppeng,	12 kali 12 kali	92.974.623	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Soppeng, Kec.Marioriawa	12 kali 12 kali	92.974.623	KECAMATAN MARIORIAWA



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
						Jumlah pemenuhan listrik	Marioriawa, Batu Batu	12 kali				12 kali		
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	3 Jenis	34.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Soppeng, Kec.Marioriawa	3 Jenis	34.800.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	**109.760.880**			100 %	**109.760.880**	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	3 unit	42.450.880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Soppeng, Kec.Marioriawa	3 unit	42.450.880	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	13 unit	7.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Soppeng, Kec.Marioriawa	13 unit	7.950.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	40 M2/Tahun	59.360.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Soppeng, Kec.Marioriawa	40 M2/Tahun	59.360.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Marioriawa(%) Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Marioriawa		100 % 100 %	**36.000.000**			100 % 100 %	**86.000.000**	
7	**1**	**2**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitakan,jasa pelayanan umum Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Marioriawa		300 buah 300 Buah	**36.000.000**			300 buah 300 Buah	**36.000.000**	
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Perizinan dan Non Usaha yang Diterbitkan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	50 Buah	7.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Soppeng. Kec.Marioriawa	50 Buah	7.200.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Non Perizinan Yang Diterbitkan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	200 Buah	28.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Soppeng. Kec.Marioriawa	200 Buah	28.800.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Marioriawa		100 %	**16.050.000**			100 %	**16.050.000**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	**1**	**3**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kecamatan Sehat		2 Kali	**16.050.000**			2 Kali	**16.050.000**	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kecamatan Sehat	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	2 Kali	16.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Marioriawa	2 Kali	16.050.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Marioriawa		100 %	**15.600.000**			100 %	**15.600.000**	
7	**1**	**4**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Penyuluhan Kantibmas		240 Orang	**15.600.000**			240 Orang	**15.600.000**	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Penyuluhan Kamtibmas	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	240 Orang	15.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Marioriawa	240 Orang	15.600.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Marioriawa		100 %	**8.200.000**			100 %	**8.200.000**	
7	**1**	**6**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah Desa yang difasilitasi		5 Desa	**8.200.000**			5 Desa	**8.200.000**	
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	5 Desa	8.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Marioriawa	5 Desa	8.200.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7	**1**				**KECAMATAN**				**796.000.000**				**796.000.000**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriawa		100 %	**120.000.000**			100 %	**120.000.000**	
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**1.170.000**			100 %	**1.170.000**	
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	30 SPM	1.170.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu-Batu	30 SPM	1.170.000	KECAMATAN MARIORIAWA



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**66.455.524**			100 %	**66.455.524**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	7 unit	1.854.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kec.Marioriawa, Marioriawa, Batu-Batu	7 unit	1.854.450	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	3 Paket	18.760.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kec.Marioriawa, Marioriawa, Batu-Batu	3 Paket	18.760.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	2 Jenis	1.652.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kec.Marioriawa, Marioriawa, Batu-Batu	2 Jenis	1.652.350	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	4 Paket	16.640.724	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kec.Marioriawa, Marioriawa, Batu-Batu	4 Paket	16.640.724	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg terfasilitasi	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	132 Orang	3.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kec.Marioriawa, Marioriawa, Batu-Batu	132 Orang	3.300.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	110 Kali	24.248.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kec.Marioriawa, Marioriawa, Batu-Batu	110 Kali	24.248.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	**1.799.550**			100 %	**1.799.550**	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	1 Jenis	1.799.550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu-Batu	1 Jenis	1.799.550	KECAMATAN MARIORIAWA
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	**35.874.606**			100 %	**35.874.606**	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telepon Jumlah pemenuhan jasa air Jumlah pemenuhan listrik	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	12 Kali 12 Kali 12 Kali	13.674.606	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Soppeng, Marioriawa, Batu-Batu	12 Kali 12 Kali 12 Kali	13.674.606	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum	Kab. Soppeng,	2 Jenis	22.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Soppeng, Marioriawa, Batu-Batu	2 Jenis	22.200.000	KECAMATAN MARIORIAWA



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Marioriawa, Batu Batu							
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	**14.700.320**			100 %	**14.700.320**	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	2 unit	7.044.320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Soppeng, Marioriawa, Batu-Batu	2 unit	7.044.320	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	11 unit	6.820.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Soppeng, Marioriawa, Batu-Batu	11 unit	6.820.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 M2/Tahun	836.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Soppeng, Marioriawa, Batu-Batu	20 M2/Tahun	836.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Marioriawa		100 %	**676.000.000**			100 %	**676.000.000**	
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Imam Mesjid Kelurahan , Guru mengaji, RT/RW, Kader posyandu, LPMK yang diberi Insentif		100 orang	**676.000.000**			100 orang	**676.000.000**	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana lingkungan pemukiman,kesehatan,pendidikan,kebidayaan,transportasi yang dibangun dikembangkan dan dipelihara	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	1 paket	567.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Soppeng, Marioriawa, Manorangsalo	1 paket	567.300.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah imam mesjid dikelurahan,guru mengaji,RW,RT,Kader posyandu,LPMK yang diberi insentif dan Jumlah peserta pelatihan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	577 orang	108.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Soppeng, Marioriawa, Manorangsalo	577 orang	108.700.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7	**1**				**KECAMATAN**				**796.000.000**				**796.000.000**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriawa		100 %	**120.000.000**			100 %	**120.000.000**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**600.000**			100 %	**600.000**	
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi	Kab. Soppeng, Marioriawa, Kaca	30 SPM	600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Soppeng, Marioriawa, Kaca	30 SPM	600.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**58.107.758**			100 %	**58.107.758**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia	Kab. Soppeng, Marioriawa, Kaca	7 Jenis	751.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Soppeng, Marioriawa, Kaca	7 Jenis	751.950	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Marioriawa, Kaca	3 Paket	15.865.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Soppeng, Marioriawa, Kaca	3 Paket	15.865.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Marioriawa, Kaca	2 Jenis	1.402.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Soppeng, Marioriawa, Kaca	2 Jenis	1.402.450	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Kaca	5 Paket	14.979.958	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Soppeng, Marioriawa, Kaca	5 Paket	14.979.958	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg terfasilitasi	Kab. Soppeng, Marioriawa, Kaca	160 Orang	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Soppeng, Marioriawa, Kaca	160 Orang	4.000.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Marioriawa, Kaca	93 Kali	21.108.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Soppeng, Marioriawa, Kaca	93 Kali	21.108.400	KECAMATAN MARIORIAWA
7	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	**13.750.000**			100 %	**13.750.000**	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Kaca	2 Jenis	13.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Soppeng, Marioriawa, Kaca	2 Jenis	13.750.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	**32.038.202**			100 %	**32.038.202**	
7	1	1		2		Jumlah pemenuhan jasa telepon		12 Kali	9.838.202			12 Kali	9.838.202	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
			2.08		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa air Jumlah pemenuhan listrik	Kab. Soppeng, Marioriawa, Kaca	12 Kali 12 Kali		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Soppeng, Marioriawa, Kaca	12 Kali 12 Kali		KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum	Kab. Soppeng, Marioriawa, Kaca	2 Jenis	22.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Soppeng, Marioriawa, Kaca	2 Jenis	22.200.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	**15.504.040**			100 %	**15.504.040**	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Marioriawa, Kaca	4 Unit	12.605.040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Soppeng, Marioriawa, Kaca	4 Unit	12.605.040	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Marioriawa, Kaca	1 Unit	600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Soppeng, Marioriawa, Kaca	1 Unit	600.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Kab. Soppeng, Marioriawa, Kaca	25 M2/Tahun	2.299.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Soppeng, Marioriawa, Kaca	25 M2/Tahun	2.299.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Marioriawa		100 %	**676.000.000**			100 %	**676.000.000**	
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		7 paket	**676.000.000**			7 paket	**676.000.000**	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman,Kesehatan,pendidikan,Kebudayaan,transportasi yang dibangun,Dikembangkan dan Dipelihara	Kab. Soppeng, Marioriawa, Kaca	7 paket	506.770.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Soppeng, Marioriawa, Kaca	7 paket	505.980.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Imam Mesjid Kelurahan,Guru Mengaji,RW,RT,Kader Posyandu,LPMK yang diberi insentif dan jumlah Peserta Pelatihan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Kaca	684 Orang	169.230.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Soppeng, Marioriawa, Kaca	684 Orang	170.020.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7	**1**				**KECAMATAN**				**795.999.987**				**795.999.987**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriawa		100 %	**119.999.987**			100 %	**119.999.987**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					DAERAH KABUPATEN/KOTA									
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**1.020.000**			100 %	**1.020.000**	
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi	Kab. Soppeng, Marioriawa, Attang Salo	30 SPM	1.020.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Soppeng, Marioriawa, Attangsalo	30 SPM	1.020.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**60.251.935**			100 %	**60.251.935**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia	Kab. Soppeng, Marioriawa, Attang Salo	6 Jenis	494.675	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Soppeng, Marioriawa, AttangSalo	6 Jenis	494.675	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Marioriawa, Attang Salo	3 Paket	17.390.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Soppeng, Marioriawa, AttangSalo	3 Paket	17.390.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Marioriawa, Attang Salo	2 Jenis	1.348.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Soppeng, Marioriawa, AttangSalo	2 Jenis	1.348.200	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Attang Salo	4 Paket	15.375.660	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Soppeng, Marioriawa, AttangSalo	4 Paket	15.375.660	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg terfasilitasi	Kab. Soppeng, Marioriawa, Attang Salo	183 orang	4.575.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Soppeng, Marioriawa, AttangSalo	183 orang	4.575.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Marioriawa, Attang Salo	99 Kali	21.068.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Soppeng, Marioriawa, AttangSalo	99 Kali	21.068.400	KECAMATAN MARIORIAWA
7	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	**18.099.550**			100 %	**18.099.550**	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Attang Salo	1 Jenis	18.099.550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Soppeng, Marioriawa, AttangSalo	1 Jenis	18.099.550	KECAMATAN MARIORIAWA
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	**30.598.202**			100 %	**30.598.202**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telepon Jumlah pemenuhan jasa air Jumlah pemenuhan listrik	Kab. Soppeng, Marioriawa, Attang Salo	12 Kali 12 Kali 12 Kali	8.398.202	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Soppeng, Marioriawa, AttangSalo	12 Kali 12 Kali 12 Kali	8.398.202	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum	Kab. Soppeng, Marioriawa, Attang Salo	2 Jenis	22.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Soppeng, Marioriawa, AttangSalo	2 Jenis	22.200.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	**10.030.300**			100 %	**10.030.300**	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Marioriawa, Attang Salo	2 Unit	6.747.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Soppeng, Marioriawa, Attangsalo	2 Unit	6.747.300	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Marioriawa, Attang Salo	3 Unit	1.820.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Soppeng, Marioriawa, Attangsalo	3 Unit	1.820.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Kab. Soppeng, Marioriawa, Attang Salo	7 M2/Tahun	1.463.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Soppeng, Marioriawa, Attangsalo	7 M2/Tahun	1.463.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Marioriawa		100 %	**676.000.000**			100 %	**676.000.000**	
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman, Kesehatan,Pendidikan,Kebudayaan, Transportasi yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara		7 paket	**676.000.000**			7 paket	**676.000.000**	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana lingkungan pemukiman,kesehatan,pendidikan,kebudayaan,transportasi yang dibangun dikembangkan dan dipelihara	Kab. Soppeng, Marioriawa, Attang Salo	4 Paket	584.260.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Soppeng, Marioriawa, Attangsalo	4 Paket	584.260.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah imam mesjid kelurahan,guru mengaji,RW,RT,kader posyandu,LPMK yang diberi insentif dan jumlah peserta pelatihan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Attang Salo	552 Orang	91.740.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Soppeng, Marioriawa, Attangsalo	552 Orang	91.740.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7	**1**				**KECAMATAN**				**796.000.000**				**796.000.800**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriawa		100 %	**120.000.000**			100 %	**120.000.000**	
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**900.000**			100 %	**900.000**	
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi	Kab. Soppeng, Marioriawa, Manorang Salo	30 SPM	900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Soppeng, Marioriawa,Manorangsalo	30 SPM	900.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**61.575.736**			100 %	**61.575.736**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia	Kab. Soppeng, Marioriawa, Manorang Salo	6 Jenis	990.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Soppeng, Marioriawa, ManorangSalo	6 unit	990.800	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Marioriawa, Manorang Salo	3 Paket	17.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Soppeng, Marioriawa, ManorangSalo	3 Paket	17.400.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Marioriawa, Manorang Salo	2 Jenis	1.060.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Soppeng, Marioriawa, ManorangSalo	2 Jenis	1.060.500	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Manorang Salo	4 Paket	15.496.036	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Soppeng, Marioriawa, ManorangSalo	4 Paket	15.496.036	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg terfasilitasi	Kab. Soppeng, Marioriawa, Manorang Salo	160 Orang	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Soppeng, Marioriawa, ManorangSalo	160 Orang	4.000.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Marioriawa, Manorang Salo	104 Kali	22.628.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Soppeng, Marioriawa, ManorangSalo	104 Kali	22.628.400	KECAMATAN MARIORIAWA



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	**10.500.000**			100 %	**10.500.000**	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Manorang Salo	1 Jenis	10.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Soppeng, Marioriawa, ManorangSalo	1 Jenis	10.500.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	**33.299.224**			100 %	**33.299.224**	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telepon Jumlah pemenuhan jasa air Jumlah pemenuhan listrik	Kab. Soppeng, Marioriawa, Manorang Salo	12 Kali 12 Kali 12 Kali	7.499.224	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Soppeng, Marioriawa, ManorangSalo	12 Kali 12 Kali 12 Kali	7.499.224	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum	Kab. Soppeng, Marioriawa, Manorang Salo	4 jenis	25.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Soppeng, Marioriawa, ManorangSalo	4 jenis	25.800.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	**13.725.040**			100 %	**13.725.040**	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Marioriawa, Manorang Salo	3 unit	9.781.040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Soppeng, Marioriawa, ManorangSalo	3 unit	9.781.040	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Marioriawa, Manorang Salo	1 unit	600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Soppeng, Marioriawa, ManorangSalo	1 unit	600.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Kab. Soppeng, Marioriawa, Manorang Salo	16 M2/Tahun	3.344.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Soppeng, Marioriawa, ManorangSalo	16 M2/Tahun	3.344.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN**	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Marioriawa		100 %	**676.000.000**			100 %	**676.000.800**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		4 paket	**676.000.000**			4 paket	**676.000.800**	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana lingkungan pemukiman,kesehatan,pendidikan,kebudayaan,trnsportasi yang dibngun,dkembangkan dan dipelihara	Kab. Soppeng, Marioriawa, Manorang Salo	4 paket	503.440.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Soppeng, Marioriawa,Manorangsalo	4 paket	503.440.800	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah imam mesjid dikelurahan,guru mengaji,RW,RT,Kader posyandu,LPMK yang diberi insentif dan Jumlah peserta pelatihan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Manorang Salo	901 orang	172.560.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Soppeng, Marioriawa,Manorangsalo	901 orang	172.560.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7	**1**				**KECAMATAN**				**796.000.000**				**796.000.000**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriawa		100 %	**120.000.000**			100 %	**120.000.000**	
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**1.110.000**			100 %	**1.110.000**	
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi	Kab. Soppeng, Marioriawa, Limpomajang	30 SPM	1.110.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Soppeng, Marioriawa, Limpomajang	30 SPM	1.110.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**62.771.340**			100 %	**62.771.340**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia	Kab. Soppeng, Marioriawa, Limpomajang	8 Jenis	995.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Soppeng, Marioriawa, Limpomajang	8 Jenis	995.300	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Marioriawa, Limpomajang	3 Paket	19.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Soppeng, Marioriawa, Limpomajang	3 Paket	19.950.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Marioriawa, Limpomajang	2 Jenis	1.585.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Soppeng, Marioriawa, Limpomajang	2 Jenis	1.585.150	KECAMATAN MARIORIAWA



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Limpomajang	4 Paket	15.022.490	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Soppeng, Marioriawa, Limpomajang	4 Paket	15.022.490	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg terfasilitasi	Kab. Soppeng, Marioriawa, Limpomajang	124 Orang	3.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Soppeng, Marioriawa, Limpomajang	124 Orang	3.100.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Marioriawa, Limpomajang	104 Kali	22.118.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Soppeng, Marioriawa, Limpomajang	104 Kali	22.118.400	KECAMATAN MARIORIAWA
7	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	**5.800.000**			100 %	**5.800.000**	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Limpomajang	1 Jenis	5.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Soppeng, Marioriawa, Limpomajang	1 Jenis	5.800.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	**38.048.900**			100 %	**38.048.900**	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telepon Jumlah pemenuhan jasa air Jumlah pemenuhanlistrik	Kab. Soppeng, Marioriawa, Limpomajang	12 Kali 12 Kali 12 Kali	15.848.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Soppeng, Marioriawa, Limpomajang	12 Kali 12 Kali 12 Kali	15.848.900	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum	Kab. Soppeng, Marioriawa, Limpomajang	2 Jenis	22.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Soppeng, Marioriawa, Limpomajang	2 Jenis	22.200.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	**12.269.760**			100 %	**12.269.760**	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Marioriawa,	2 Unit	7.271.760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Soppeng, Marioriawa, Limpomajang	2 Unit	7.271.760	KECAMATAN MARIORIAWA



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Limpomajang							
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Marioriawa, Limpomajang	4 Unit	2.490.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Soppeng, Marioriawa, Limpomajang	4 Unit	2.490.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Kab. Soppeng, Marioriawa, Limpomajang	12 M2/Tahun	2.508.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Soppeng, Marioriawa, Limpomajang	12 M2/Tahun	2.508.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Marioriawa		100 %	**676.000.000**			100 %	**676.000.000**	
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan		7 paket	**676.000.000**			7 paket	**676.000.000**	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana lingkungan pemukiman,kesehatan,pendidikan,Kebudayaan,transportasi yang dibangunan dikembangkan dan dipelihara	Kab. Soppeng, Marioriawa, Limpomajang	1 paket	566.980.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Soppeng, Marioriawa, Limpomajang	1 paket	566.121.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Imam mesjid kelurahan,Guru mengaji,RW,RT,kader posyandu,LPMK yang diberi Insentif dan Jumlah Peserta pelatihan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Limpomajang	637 orang	109.020.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Soppeng, Marioriawa, Limpomajang	637 orang	109.879.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7	**1**				**KECAMATAN**				**5.495.178.800**				**5.762.758.686**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Liliriaja		100 %	**5.414.626.850**			100 %	**5.625.706.736**	
7	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu		100 % 100 % 100 %	**19.203.300**			100 % 100 % 100 %	**19.203.300**	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Kab. Soppeng, Liliraja, Jennae	3 Dokumen	7.935.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Kecamatan Liliriaja	3 Dokumen	7.935.000	KECAMATAN LILIRIAJA



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	2 Dokumen	8.844.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Kecamatan Liliriaja	2 Dokumen	8.844.150	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	7 Dokumen	2.424.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Kecamatan Liliriaja	7 Dokumen	2.424.150	KECAMATAN LILIRIAJA
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**5.089.996.302**			100 %	**5.309.210.224**	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	51 ASN	5.076.122.152	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Kecamatan Liliriaja	51 ASN	5.295.536.074	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	60 SPM	3.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Kecamatan Liliriaja	60 SPM	3.600.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang tersusun	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	20 Dokumen	10.074.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Kecamatan Liliriaja	20 Dokumen	10.074.150	KECAMATAN LILIRIAJA
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**95.701.866**			100 %	**95.652.316**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	8 Jenis	3.651.316	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Kecamatan Liliriaja	8 Jenis	3.614.616	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	2 Paket	18.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Kecamatan Liliriaja	2 Paket	18.000.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	6 Jenis	12.812.550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Kecamatan Liliriaja	6 Jenis	12.799.700	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	4 Paket	20.938.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Kecamatan Liliriaja	4 Paket	20.938.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg terfasilitasi	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	150 orang	5.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Kecamatan Liliriaja	150 orang	5.250.000	KECAMATAN LILIRIAJA



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	131 Kali	35.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Kecamatan Liliriaja	131 Kali	35.050.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	**13.200.000**			100 %	**13.200.000**	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	2 Unit	13.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Liliriaja	2 Unit	13.200.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	**87.600.342**			100 %	**79.515.856**	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telepon Jumlah pemenuhan jasa air Jumlah pemenuhan listrik	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	12 Kali 12 Kali 12 Kali	32.800.342	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kecamatan Liliriaja	12 Kali 12 Kali 12 Kali	32.515.856	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	3 Unit	54.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kecamatan Liliriaja	3 Unit	47.000.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	**108.925.040**			100 %	**108.925.040**	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	4 Unit	39.227.240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Liliriaja	4 Unit	39.227.240	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	10 Unit	6.210.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Liliriaja	10 Unit	6.210.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	250 M2	63.487.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Liliriaja	250 M2	63.487.800	KECAMATAN LILIRIAJA
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN**	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Liliriaja(%)		100 %	**36.500.000**			100 %	**94.300.000**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Liliriaja		100 %				100 %		
7	**1**	**2**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan		250 Buah	**36.500.000**			250 Buah	**36.500.000**	
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah perizinan non usaha yang diterbitkan	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	150 Buah	14.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Liliriaja	150 Buah	14.300.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah non perizinan yang diterbitkan	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	100 Buah	22.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Liliriaja	100 Buah	22.200.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Liliriaja		100 %	**19.299.950**			100 %	**17.999.950**	
7	**1**	**3**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kecamatan Sehat		2 Kali	**19.299.950**			2 Kali	**17.999.950**	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Koordinasi Kecamatan sehat	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	2 Kali	19.299.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Desa se Kecamatan Liliriaja	2 Kali	17.999.950	KECAMATAN LILIRIAJA
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Liliriaja		100 %	**18.500.000**			100 %	**18.500.000**	
7	**1**	**4**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Jasa Narasumber Penyuluhan Kantibmas		2 Orang	**18.500.000**			2 Orang	**18.500.000**	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah jasa narasumber Penyuluhan Kantibmas	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	2 Orang	18.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kec. Liliriaja	2 Orang	18.500.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Liliriaja		100 %	**6.252.000**			100 %	**6.252.000**	
7	**1**	**6**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan**	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam pengelolaan dana ADD		5 Desa	**6.252.000**			5 Desa	**6.252.000**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					Pengawasan Pemerintahan Desa									
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam pengelolaan ADD	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	5 Desa	6.252.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Desa se Kecamatan Liliriaja	5 Desa	6.252.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7	**1**				**KECAMATAN**				**796.000.000**				**799.215.920**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Liliriaja		100 %	**120.000.000**			100 %	**123.215.920**	
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**780.000**			100 %	**780.000**	
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	25 SPM	780.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	25 SPM	780.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**37.632.155**			100 %	**43.632.155**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	6 Jenis	866.805	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Appanang	6 Jenis	866.805	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	2 Paket	10.630.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Appanang	2 Paket	10.630.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	2 Jenis	5.239.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Appanang	2 Jenis	5.239.950	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	4 Paket	9.885.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Appanang	4 Paket	15.885.400	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg terfasilitasi	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	200 Orang	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Appanang	150 Orang	6.000.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	26 kali	5.010.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Appanang	26 kali	5.010.000	KECAMATAN LILIRIAJA



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	**10.000.000**			100 %	**10.000.000**	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	1 Unit	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Kelurahan Appanang	1 Unit	10.000.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	**58.223.765**			100 %	**62.223.765**	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telepon Jumlah pemenuhan jasa air Jumlah pemenuhan listrik	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	12 kali 12 kali 12 kali	5.423.765	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Appanang	12 kali 12 kali 12 kali	5.423.765	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	2 Jenis	52.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Appanang	2 Jenis	56.800.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	**13.364.080**			100 %	**6.580.000**	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	4 Unit	6.792.080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Kelurahan Appanang	4 Unit	0	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	3 Unit	1.890.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Kelurahan Appanang	3 Unit	1.890.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	121 m2	4.682.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Kelurahan Appanang	121 m2	4.690.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Liliriaja		100 %	**676.000.000**			100 %	**676.000.000**	
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana		2 Paket	**676.000.000**			2 Paket	**676.000.000**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun, dipeliharan dan dikembangkan	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	5 Paket	463.060.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Msyarakat Kelurahan Appanang	5 Paket	463.060.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	6 Kegiatan	212.940.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Msyarakat Kelurahan Appanang	6 Kegiatan	212.940.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7	**1**				**KECAMATAN**				**796.000.000**				**776.359.200**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Liliriaja		100 %	**120.000.000**			100 %	**100.359.200**	
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**780.000**			100 %	**798.000**	
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	25 SPM	780.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Galung	25 SPM	798.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**51.453.100**			100 %	**31.812.300**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	5 jenis	1.293.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Galung	5 jenis	1.293.100	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	2 paket	15.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Galung	2 paket	15.300.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	2 Jenis	5.327.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Galung	2 Jenis	0	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	4 Paket	14.312.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Galung	4 Paket	0	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg terfasilitasi	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	740 Orang	7.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Galung	740 Orang	7.400.000	KECAMATAN LILIRIAJA



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	38 kali	7.819.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Galung	38 kali	7.819.200	KECAMATAN LILIRIAJA
7	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	**10.000.000**			100 %	**10.000.000**	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	1 Jenis	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Galung	1 Jenis	10.000.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	**45.763.300**			100 %	**45.745.300**	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telepon Jumlah pemenuhan jasa air Jumlah pemenuhan listrik	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	12 Kali 12 Kali 12 Kali	7.963.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Galung	12 Kali 12 Kali 12 Kali	7.945.300	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	2 jenis	37.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Galung	2 jenis	37.800.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	**12.003.600**			100 %	**12.003.600**	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	2 unit	5.601.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Galung	2 unit	5.601.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	4 unit	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Galung	4 unit	2.500.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	121 m2	3.902.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Galung	121 m2	3.902.600	KECAMATAN LILIRIAJA
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN**	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Liliriaja		100 %	**676.000.000**			100 %	**676.000.000**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan		2 Paket	**676.000.000**			2 Paket	**676.000.000**	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun, dipelihara dan dikembangkan	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	3 paket	553.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kelurahan Galung	3 paket	553.300.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	6 Kegiatan	122.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kelurahan Galung	6 Kegiatan	122.700.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7	**1**				**KECAMATAN**				**796.000.000**				**795.958.000**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Liliriaja		100 %	**120.000.000**			100 %	**119.958.000**	
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**600.000**			100 %	**600.000**	
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi	Kab. Soppeng, Liliraja, Jennae	25 SPM	600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan JennaE	25 SPM	600.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**41.653.813**			100 %	**41.653.813**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia	Kab. Soppeng, Liliraja, Jennae	8 jenis	500.213	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan JennaE	8 jenis	500.213	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Liliraja, Jennae	2 paket	15.360.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan JennaE	2 paket	15.360.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Liliraja, Jennae	2 Jenis	3.203.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan JennaE	2 Jenis	3.203.250	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Liliraja, Jennae	4 Paket	10.821.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan JennaE	4 Paket	10.821.150	KECAMATAN LILIRIAJA



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg terfasilitasi	Kab. Soppeng, Liliraja, Jennae	108 Orang	3.780.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan JennaE	108 Orang	3.780.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Liliraja, Jennae	34 kali	7.989.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan JennaE	34 kali	7.989.200	KECAMATAN LILIRIAJA
7	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	**21.100.000**			100 %	**21.100.000**	
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Kab. Soppeng, Liliraja, Jennae	1 Jenis	2.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan JennaE	1 Jenis	2.650.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kab. Soppeng, Liliraja, Jennae	2 unit	18.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan JennaE	2 unit	18.450.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	**43.479.837**			100 %	**43.689.837**	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telepon Jumlah pemenuhan jasa air Jumlah pemenuhan listrik	Kab. Soppeng, Liliraja, Jennae	12 Kali 12 Kali 12 Kali	6.879.837	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan JennaE	12 Kali 12 Kali 12 Kali	7.089.837	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum	Kab. Soppeng, Liliraja, Jennae	4 Jenis	36.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan JennaE	4 Jenis	36.600.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	**13.166.350**			100 %	**12.914.350**	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Liliraja, Jennae	3 unit	6.809.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan JennaE	3 unit	6.809.400	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng,	4 unit	2.490.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan JennaE	4 unit	2.490.000	KECAMATAN LILIRIAJA



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Liliraja, Jennae							
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Kab. Soppeng, Liliraja, Jennae	18 m2	3.866.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan JennaE	18 m2	3.614.950	KECAMATAN LILIRIAJA
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Liliriaja		100 %	**676.000.000**			100 %	**676.000.000**	
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana		2 paket	**676.000.000**			2 paket	**676.000.000**	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun, dipelihara dan dikembangkan	Kab. Soppeng, Liliraja, Jennae	4 paket	472.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kelurahan JennaE	4 paket	472.000.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	Kab. Soppeng, Liliraja, Jennae	6 Kegiatan	204.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kelurahan JennaE	6 Kegiatan	204.000.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7	**1**				**KECAMATAN**				**9.264.859.411**				**9.424.917.570**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lalabata		100 %	**9.193.459.411**			100 %	**9.304.417.570**	
7	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu		100 % 100 % 100 %	**15.800.000**			100 % 100 % 100 %	**15.800.000**	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	2 Dokumen	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kecamatan Lalabata	2 Dokumen	2.000.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	2 Dokumen	9.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kecamatan Lalabata	2 Dokumen	9.800.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	9 Dokumen	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kecamatan Lalabata	9 Dokumen	4.000.000	KECAMATAN LALABATA



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**8.880.002.761**			100 %	**8.981.052.764**	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	91 ASN	8.871.302.761	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Kecamatan Lalabata	91 ASN	8.971.302.764	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	30 SPM	8.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Kecamatan Lalabata	30 SPM	9.750.000	KECAMATAN LALABATA
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**141.118.850**			100 %	**159.262.450**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	5 Jenis	4.310.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kecamatan lalabata	5 Jenis	5.084.500	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	2 Paket	24.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kecamatan lalabata	2 Paket	33.250.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	1 Jenis	6.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kecamatan lalabata	1 Jenis	6.500.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	4 Paket	25.640.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kecamatan lalabata	4 Paket	25.796.950	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg terfasilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	200 Orang	7.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kecamatan lalabata	200 Orang	9.475.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	184 Kali	73.318.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kecamatan lalabata	184 Kali	79.156.000	KECAMATAN LALABATA
7	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	**12.500.000**			100 %	**3.200.000**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	1 Paket	12.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kecamatan Lalabata	1 Paket	3.200.000	KECAMATAN LALABATA
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	**56.834.800**			100 %	**56.836.756**	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telepon Jumlah pemenuhan jasa air Jumlah pemenuhan listrik	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	12 Kali 12 Kali 12 Kali	28.634.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kecamatan Lalabata	12 Kali 12 Kali 12 Kali	28.036.756	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	2 Jenis	28.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kecamatan Lalabata	2 Jenis	28.800.000	KECAMATAN LALABATA
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	**87.203.000**			100 %	**88.265.600**	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	2 Unit	49.603.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Lalabata	2 Buah	50.665.600	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	9 Unit	5.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Lalabata	4 Jenis	5.600.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	32 M2	32.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Lalabata	32 M2	32.000.000	KECAMATAN LALABATA
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Lalabata(%) Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Lalabata		100% 100%	**31.200.000**			100% 100%	**81.200.000**	
7	**1**	**2**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase Pelimpahan Kewenangan Yang Terlaksana		100%	**31.200.000**			100%	**31.200.000**	
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait	Jumlah perizinan Non Usaha yang diterbitkan	Kab. Soppeng,	30 Buah	15.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	30 Buah	15.600.000	KECAMATAN LALABATA



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Lalabata, Botto							
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Non perizinan yang diterbitkan	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	175 Buah	15.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	175 Buah	15.600.000	KECAMATAN LALABATA
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lalabata		100 %	**15.000.000**			100 %	**15.000.000**	
7	**1**	**3**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah pelaksanaan koordinasi kecamatan sehat		4 Kali	**15.000.000**			4 Kali	**15.000.000**	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan koordinasi kecamatan sehat	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	4 Kali	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Lalabata	4 Kali	15.000.000	KECAMATAN LALABATA
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Lalabata		100 %	**12.000.000**			100 %	**12.000.000**	
7	**1**	**4**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Jasa Narasumber Penyuluhan Kantibmas		2 Orang	**12.000.000**			2 Orang	**12.000.000**	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jasa Narasumber Penyuluhan Kantibmas	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	2 Orang	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Lalabata	2 Orang	12.000.000	KECAMATAN LALABATA
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Lalabata		100 %	**13.200.000**			100 %	**12.300.000**	
7	**1**	**6**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah Desa yang terfasilitasi pengelolaan ADD		3 Desa	**13.200.000**			3 Desa	**12.300.000**	
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi pengelolaan ADD	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	3 Desa	13.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Desa Kecamatan Lalabata	3 Desa	12.300.000	KECAMATAN LALABATA
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7	**1**				**KECAMATAN**				**796.000.000**				**1.303.908.505**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lalabata		100 %	**120.000.000**			100 %	**125.230.000**	
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**1.050.000**			100 %	**1.050.000**	
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	35 SPM	1.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Kelurahan Lalabata	35 SPM	1.050.000	KECAMATAN LALABATA
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**48.048.480**			100 %	**50.978.480**	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Paket	10.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Lalabata Rilau	2 Paket	10.050.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Jenis	2.930.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Lalabata Rilau	1 Jenis	2.930.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	4 Paket	17.550.080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Lalabata Rilau	4 Paket	17.550.080	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg terfasilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	292 Orang	7.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Lalabata Rilau	292 Orang	10.230.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	34 Kali	10.218.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Lalabata Rilau	34 Kali	10.218.400	KECAMATAN LALABATA
7	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	**8.450.000**			100 %	**8.450.000**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Jenis	5.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Lalabata Rilau	1 Jenis	5.250.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Jenis	3.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Lalabata Rilau	1 Jenis	3.200.000	KECAMATAN LALABATA
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	**54.056.000**			100 %	**55.256.000**	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telepon Jumlah pemenuhan jasa air Jumlah pemenuhan listrik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Kali 12 Kali 12 Kali	14.456.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Lalabata Rilau	12 Kali 12 Kali 12 Kali	14.456.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Jenis	39.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Lalabata Rilau	2 Jenis	40.800.000	KECAMATAN LALABATA
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	**8.395.520**			100 %	**9.495.520**	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Unit	2.995.520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Lalabata Rilau	3 Unit	2.995.520	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Unit	1.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Lalabata Rilau	3 Unit	4.200.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	350 M2	3.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Lalabata Rilau	350 M2	2.300.000	KECAMATAN LALABATA
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN**	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lalabata		100 %	**676.000.000**			100 %	**1.178.678.505**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan		100 %	**676.000.000**			100 %	**1.178.678.505**	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dibangun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Paket	342.880.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Lalabata Rilau	3 Paket	818.558.505	KECAMATAN LALABATA
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang dilaksanakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Kegiatan	333.120.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Lalabata Rilau	5 Kegiatan	360.120.000	KECAMATAN LALABATA
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7	**1**				**KECAMATAN**				**796.000.000**				**775.963.900**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lalabata		100 %	**120.000.000**			100 %	**99.963.900**	
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**1.650.000**			100 %	**1.650.000**	
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo	35 SPM	1.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Ompo	35 SPM	1.650.000	KECAMATAN LALABATA
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**54.711.700**			100 %	**42.905.401**	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo	2 Paket	17.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelurahan ompo	2 Paket	0	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo	1 Jenis	6.393.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelurahan ompo	1 Jenis	6.390.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo	4 Paket	10.200.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelurahan ompo	4 Paket	10.583.601	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg terfasilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo	250 Orang	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelurahan ompo	250 Orang	6.175.000	KECAMATAN LALABATA



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo	59 Kali	14.468.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelurahan ompo	59 Kali	19.756.800	KECAMATAN LALABATA
7	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	**14.000.000**			100 %	**6.410.700**	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo	2 unit	14.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelurahan ompo	2 unit	6.410.700	KECAMATAN LALABATA
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	**40.143.500**			100 %	**39.522.279**	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telepon Jumlah pemenuhan jasa air Jumlah pemenuhan listrik	Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo	12 Kali 12 Kali 12 Kali	11.943.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelurahan ompo	12 Kali 12 Kali 12 Kali	11.322.279	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum	Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo	1 Jenis	28.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelurahan ompo	1 Jenis	28.200.000	KECAMATAN LALABATA
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	**9.494.800**			100 %	**9.475.520**	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo	3 unit	2.934.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelurahan ompo	3 unit	2.995.520	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo	5 unit	3.110.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelurahan ompo	5 unit	3.020.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo	345 m2	3.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelurahan ompo	345 m2	3.460.000	KECAMATAN LALABATA
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN**	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lalabata		100 %	**676.000.000**			100 %	**676.000.000**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan		100 %	**676.000.000**			100 %	**676.000.000**	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dibangun	Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo	3 Paket	518.872.000	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Kelurahan Ompo	3 Paket	500.600.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang dilaksanakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Kegiatan	157.128.000	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Kelurahan Ompo	5 Kegiatan	175.400.000	KECAMATAN LALABATA
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7	**1**				**KECAMATAN**				**796.000.000**				**796.000.000**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lalabata		100 %	**120.000.000**			100 %	**120.000.000**	
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**1.050.000**			100 %	**1.050.000**	
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	35 SPM	1.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelurahan botto	35 SPM	1.050.000	KECAMATAN LALABATA
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**43.351.000**			100 %	**43.351.000**	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	2 Paket	13.125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelurahan botto	2 Paket	13.125.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	1 Jenis	3.010.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelurahan botto	1 Jenis	3.010.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	4 Paket	13.918.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelurahan botto	4 Paket	13.918.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg terfasilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	100 Orang	3.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelurahan botto	100 Orang	3.500.000	KECAMATAN LALABATA



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	25 Kali	9.798.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelurahan botto	25 Kali	9.798.000	KECAMATAN LALABATA
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	**68.259.000**			100 %	**68.259.000**	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telepon Jumlah pemenuhan jasa air Jumlah pemenuhan listrik	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	12 Kali 12 Kali 12 Kali	8.859.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelurahan botto	12 Kali 12 Kali 12 Kali	8.859.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	1 Jenis	59.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelurahan botto	1 Jenis	59.400.000	KECAMATAN LALABATA
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	**7.340.000**			100 %	**7.340.000**	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	3 Unit	2.530.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelurahan botto	3 Unit	2.530.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	3 Unit	1.810.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelurahan botto	3 Unit	1.810.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luas sarana dan prasana gedung kantor dengan kondisi baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	300 M2	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelurahan botto	300 M2	3.000.000	KECAMATAN LALABATA
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lalabata		100 %	**676.000.000**			100 %	**676.000.000**	
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan		100 %	**676.000.000**			100 %	**676.000.000**	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dibangun	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	2 Paket	457.060.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Botto	2 Paket	457.060.000	KECAMATAN LALABATA



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang dilaksanakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	2 Kegiatan	218.940.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Botto	2 Kegiatan	218.940.000	KECAMATAN LALABATA
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7	**1**				**KECAMATAN**				**796.000.000**				**779.839.520**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lalabata		100 %	**120.000.000**			100 %	**119.839.520**	
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**510.000**			100 %	**510.000**	
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	35 SPM	510.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelurahan lemba	35 SPM	510.000	KECAMATAN LALABATA
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**39.950.500**			100 %	**39.682.350**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	1 Jenis	574.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelurahan lemba	1 Jenis	574.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	2 Paket	9.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelurahan lemba	2 Paket	9.700.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Jenis	5.087.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelurahan lemba	1 Jenis	4.900.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	4 Paket	9.850.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelurahan lemba	4 Paket	9.930.350	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg terfasilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	150 orang	3.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelurahan lemba	150 orang	3.750.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	32 Kali	10.988.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelurahan lemba	32 Kali	10.828.000	KECAMATAN LALABATA



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	**5.735.000**			100 %	**5.735.000**	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	2 Jenis	5.735.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelurahan lemba	2 Jenis	5.735.000	KECAMATAN LALABATA
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	**62.788.500**			100 %	**62.783.500**	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telepon Jumlah pemenuhan jasa air Jumlah pemenuhan listrik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	12 Kali 12 Kali 12 Kali	12.988.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelurahan lemba	12 Kali 12 Kali 12 Kali	12.983.500	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	1 Jenis	49.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelurahan lemba	1 Jenis	49.800.000	KECAMATAN LALABATA
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	**11.016.000**			100 %	**11.128.670**	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	3 Unit	3.036.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelurahan lemba	3 Unit	2.995.520	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	7 Unit	4.310.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelurahan lemba	7 Unit	4.310.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	367 M2	3.670.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelurahan lemba	367 M2	3.823.150	KECAMATAN LALABATA
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lalabata		100 %	**676.000.000**			100 %	**660.000.000**	
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan		100 %	**676.000.000**			100 %	**660.000.000**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dibangun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	4 Paket	420.340.000	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Kelurahan Lemba	4 Paket	400.000.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang dilaksanakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	5 Kegiatan	255.660.000	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Kelurahan Lemba	5 Kegiatan	260.000.000	KECAMATAN LALABATA
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7	**1**				**KECAMATAN**				**796.000.000**				**774.376.400**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lalabata		100 %	**120.000.000**			100 %	**114.376.400**	
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**1.830.000**			100 %	**1.830.000**	
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	35 SPM	1.830.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelurahan bila	35 SPM	1.830.000	KECAMATAN LALABATA
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**45.808.600**			100 %	**40.185.000**	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor		2 Paket	14.125.000		kelurahan bila	2 Paket	8.501.400	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia		1 Jenis	8.501.400		kelurahan bila	1 Jenis	8.501.400	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan		4 Paket	13.073.000		kelurahan bila	4 Paket	13.073.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg terfasilitasi		200 Orang	5.000.000		kelurahan bila	200 Orang	5.000.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		17 Kali	5.109.200		kelurahan bila	17 Kali	5.109.200	KECAMATAN LALABATA
7	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	**14.700.000**			100 %	**14.700.000**	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan		2 Jenis	14.700.000		kelurahan bila	2 Jenis	14.700.000	KECAMATAN LALABATA
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	**49.713.400**			100 %	**49.713.400**	
7	1	1		2		Jumlah pemenuhan jasa telepon		12 Kali	8.913.400		kelurahan bila	12 Kali	8.913.400	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
			2.08		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa air Jumlah pemenuhan listrik		12 Kali 12 Kali				12 Kali 12 Kali		KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum		1 Jenis	40.800.000		kelurahan bila	1 Jenis	40.800.000	KECAMATAN LALABATA
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	**7.948.000**			100 %	**7.948.000**	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang berfungsi dengan baik		1 Unit	1.518.000		kelurahan bila	1 Unit	1.518.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik		6 Unit	3.790.000		kelurahan bila	6 Unit	3.790.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara		264 M2	2.640.000		kelurahan bila	264 M2	2.640.000	KECAMATAN LALABATA
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lalabata		100 %	**676.000.000**			100 %	**660.000.000**	
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan		100 %	**676.000.000**			100 %	**660.000.000**	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dibangun	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	4 Paket	404.965.000	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Kelurahan Bila	4 Paket	400.000.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang dilaksanakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	5 Kegiatan	271.035.000	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Kelurahan Bila	5 Kegiatan	260.000.000	KECAMATAN LALABATA
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7	**1**				**KECAMATAN**				**796.000.000**				**961.101.652**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lalabata		100 %	**120.000.000**			100 %	**143.137.547**	
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**1.110.000**			100 %	**1.110.000**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	35 SPM	1.110.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelurahan lapajung	35 SPM	1.110.000	KECAMATAN LALABATA
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**51.598.100**			100 %	**55.439.800**	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	2 Paket	12.920.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelurahan lapajung	2 Paket	14.070.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	1 Jenis	4.290.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelurahan lapajung	1 Jenis	4.735.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	3 Paket	16.339.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelurahan lapajung	3 Paket	17.836.400	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg terfasilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	150 Orang	3.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelurahan lapajung	150 Orang	4.500.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	58 kali	14.298.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelurahan lapajung	58 kali	14.298.400	KECAMATAN LALABATA
7	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	**3.705.000**			100 %	**18.870.000**	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	1 Jenis	3.705.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelurahan lapajung	1 Jenis	18.870.000	KECAMATAN LALABATA
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	**55.874.100**			100 %	**58.427.832**	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telepon Jumlah pemenuhan jasa air Jumlah pemenuhan listrik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	12 kali 12 kali 12 kali	12.074.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelurahan lapajung	12 kali 12 kali 12 kali	14.627.832	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum	Kab. Soppeng,	2 jenis	43.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelurahan lapajung	2 jenis	43.800.000	KECAMATAN LALABATA



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Lalabata, Lapajung							
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	**7.712.800**			100 %	**9.289.915**	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	1 unit	1.922.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelurahan lapajung	1 unit	1.993.640	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	4 unit	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelurahan lapajung	4 unit	4.220.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	329 m2	3.290.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelurahan lapajung	329 m2	3.076.275	KECAMATAN LALABATA
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lalabata		100 %	**676.000.000**			100 %	**817.964.105**	
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan		100 %	**676.000.000**			100 %	**817.964.105**	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dibangun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	2 Paket	459.460.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan lapajung	2 Paket	573.519.105	KECAMATAN LALABATA
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang dilaksanakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	2 Kegiatan	216.540.000	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Kelurahan lapajung	2 Kegiatan	244.445.000	KECAMATAN LALABATA
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7	**1**				**KECAMATAN**				**796.000.000**				**943.740.000**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lalabata		100 %	**120.000.000**			100 %	**123.000.000**	
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**750.000**			100 %	**750.000**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Salokaraja	35 SPM	750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelurahan salokaraja	35 SPM	750.000	KECAMATAN LALABATA
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**37.938.250**			100 %	**91.938.250**	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Lalabata, Salokaraja	2 Paket	7.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelurahan salokaraja	2 Paket	7.900.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Salokaraja	1 Jenis	6.018.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelurahan salokaraja	1 Jenis	60.018.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Salokaraja	5 Paket	10.341.050		kelurahan salokaraja	5 Paket	10.341.050	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg terfasilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Salokaraja	70 Orang	2.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelurahan salokaraja	70 Orang	2.450.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Salokaraja	53 Kali	11.229.200		kelurahan salokaraja	53 Kali	11.229.200	KECAMATAN LALABATA
7	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	**16.900.000**			100 %	**16.900.000**	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Salokaraja	3 Jenis	16.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelurahan salokaraja	3 Jenis	16.900.000	KECAMATAN LALABATA
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	**54.611.750**			100 %	**3.611.750**	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telepon Jumlah pemenuhan jasa air Jumlah pemenuhan listrik	Kab. Soppeng, Lalabata, Salokaraja	12 Kali 12 Kali 12 Kali	3.611.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelurahan salokaraja	12 Kali 12 Kali 12 Kali	3.611.750	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum	Kab. Soppeng,	2 Jenis	51.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelurahan salokaraja	2 Jenis	0	KECAMATAN LALABATA



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Lalabata, Salokaraja							
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	**9.800.000**			100 %	**9.800.000**	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Salokaraja	5 Unit	2.530.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelurahan salokaraja	5 Unit	2.530.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Salokaraja	6 Unit	3.610.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelurahan salokaraja	6 Unit	3.610.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Kab. Soppeng, Lalabata, Salokaraja	366 m2	3.660.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelurahan salokaraja	366 m2	3.660.000	KECAMATAN LALABATA
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lalabata		100 %	**676.000.000**			100 %	**820.740.000**	
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan		100 %	**676.000.000**			100 %	**820.740.000**	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dibangun	Kab. Soppeng, Lalabata, Salokaraja	5 Paket	529.675.100		Kelurahan Salokaraja	5 Paket	535.360.000	KECAMATAN LALABATA
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang dilaksanakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Salokaraja	5 Kegiatan	146.324.900		Kelurahan Salokaraja	5 Kegiatan	285.380.000	KECAMATAN LALABATA
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7	**1**				**KECAMATAN**				**4.783.530.362**				**44.000.000**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriwawo		100 %	**4.675.010.862**			100 %	**44.000.000**	
7	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu		100 % 100 %	**19.889.400**			100 % 100 %	**0**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
						Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu		100 %				100 %		
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	3 dokumen	989.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Data Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kecamatan Marioriwawo	3 dokumen	0	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	2 dokumen	9.599.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Data Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kecamatan Marioriwawo	2 dokumen	0	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	6 dokumen	9.299.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Data Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kecamatan Marioriwawo	6 dokumen	0	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**4.259.286.743**			100 %	**0**	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	42 ASN	4.245.956.843	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Laporan Keuangan Kecamatan Marioriwawo	42 ASN	0	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	282 SPM	2.830.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Laporan Keuangan Kecamatan Marioriwawo	282 SPM	0	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang tersusun	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	20 dokumen	10.499.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Laporan Keuangan Kecamatan Marioriwawo	20 dokumen	0	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**199.197.528**			100 %	**0**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	9 Jenis	4.329.248	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Camat Marioriwawo	9 Jenis	0	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Marioriwawo	2 Paket	79.035.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Camat Marioriwawo	2 Paket	0	KECAMATAN MARIORIWAWO



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							, Semua Kelurahan							
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	1 Jenis	10.262.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Camat Marioriwawo	1 Jenis	0	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	4 Paket	42.605.880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Camat Marioriwawo	4 Paket	0	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg terfasilitasi	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	1030 orang	17.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Camat Marioriwawo	1030 orang	0	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	320 kali	45.465.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Camat Marioriwawo	320 kali	0	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	**45.280.000**			100 %	**0**	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	7 unit	45.280.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Camat Marioriwawo	7 unit	0	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	**52.787.477**			100 %	**0**	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telepon Jumlah pemenuhan jasa air Jumlah pemenuhan listrik	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	12 kali	46.787.477	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Camat Marioriwawo	12 kali	0	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	1 jenis	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Camat Marioriwawo	1 jenis	0	KECAMATAN MARIORIWAWO



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	**98.569.714**			100 %	**44.000.000**	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	5 unit	50.169.714	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kecamatan Marioriwawo	5 unit	0	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	7 unit	4.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kecamatan Marioriwawo	7 unit	0	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenraree	1 Unit	44.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kecamatan Marioriwawo	1 Unit	44.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Marioriwawo(%) Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Marioriwawo		100 % 100 %	**48.000.000**			100 % 100 %	**0**	
7	**1**	**2**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase pelimpahan kewenangan yang terlaksana		100 %	**48.000.000**			100 %	**0**	
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah perizinan non usaha yang diterbitkan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	50 buah	24.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Marioriwawo	50 buah	0	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah nonperizinan yang diterbitkan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	200 buah	24.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Marioriwawo	200 buah	0	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Marioriwawo		100 %	**25.824.500**			100 %	**0**	
7	**1**	**3**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah pelaksanaan koordinasi kecamatan sehat		8 kali	**25.824.500**			8 kali	**0**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan koordinasi kecamatan sehat	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	8 kali	25.824.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan stackholder Kecamatan Marioriwawo	8 kali	0	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Marioriwawo		100 %	**14.700.000**			100 %	**0**	
7	**1**	**4**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan Kamtibmas		240 orang	**14.700.000**			240 orang	**0**	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan kamtibmas	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	240 orang	14.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Marioriwawo	240 orang	0	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Marioriwawo		100 %	**19.995.000**			100 %	**0**	
7	**1**	**6**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah desa yang difasilitasi		11 desa	**19.995.000**			11 desa	**0**	
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	11 desa	19.995.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Marioriwawo	11 desa	0	KECAMATAN MARIORIWAWO
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7	**1**				**KECAMATAN**				**795.980.000**				**0**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriwawo		100 %	**155.840.000**			100 %	**0**	
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**540.000**			100 %	**0**	
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi	Kab. Soppeng, Marioriwawo,	54 SPM	540.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Lurah Tettikenrarae	54 SPM	0	KECAMATAN MARIORIWAWO



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Tettikenraraе							
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**106.076.850**			100 %	**0**	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenraraе	2 paket	35.280.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Lurah Tettikenrarae	2 paket	0	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenraraе	1 Jenis	3.622.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Lurah Tettikenrarae	1 Jenis	0	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenraraе	6 Paket	53.450.550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Lurah Tettikenrarae	6 Paket	0	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg terfasilitasi	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenraraе	310 orang	5.125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Lurah Tettikenrarae	310 orang	0	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenraraе	34 kali	8.598.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Lurah Tettikenrarae	34 kali	0	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	**30.250.000**			100 %	**0**	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenraraе	2 unit	30.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Lurah Tettikenrarae	2 unit	0	KECAMATAN MARIORIWAWO



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	**13.456.450**			100 %	**0**	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telepon Jumlah pemenuhan jasa air Jumlah pemenuhan listrik	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenraree	12 kali	7.456.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Lurah Tettikenrarae	12 kali	0	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenraree	1 jenis	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Lurah Tettikenrarae	1 jenis	0	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	**5.516.700**			100 %	**0**	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenraree	2 unit	3.626.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kendaraan Dinas dan Kantor Lurah Tettikenrarae	2 unit	0	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenraree	3 unit	1.890.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kendaraan Dinas dan Kantor Lurah Tettikenrarae	3 unit	0	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Marioriwawo		100 %	**640.140.000**			100 %	**0**	
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan		7 paket	**640.140.000**			7 paket	**0**	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenraree	5 paket	441.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kelurahan Tettikenrarae	5 paket	0	KECAMATAN MARIORIWAWO



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenraraе	2 Paket	199.140.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kelurahan Tettikenrarae	2 Paket	0	KECAMATAN MARIORIWAWO
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7	**1**				**KECAMATAN**				**796.000.000**				**0**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriwawo		100 %	**116.650.000**			100 %	**0**	
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**540.000**			100 %	**0**	
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi	54 SPM	540.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Lurah Labessi	54 SPM	0	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**78.623.200**			100 %	**0**	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi	2 paket	17.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Lurah Labessi	2 paket	0	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi	1 Jenis	3.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Lurah Labessi	1 Jenis	0	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi	6 Paket	46.314.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Lurah Labessi	6 Paket	0	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg terfasilitasi	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi	277 orang	4.270.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Lurah Labessi	277 orang	0	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi	26 kali	7.238.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Lurah Labessi	26 kali	0	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	**18.000.000**			100 %	**0**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi	3 unit	18.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Labessi	3 unit	0	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	**14.656.450**			100 %	**0**	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telepon Jumlah pemenuhan jasa air Jumlah pemenuhan listrik	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi	12 kali	8.656.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Labessi	12 kali	0	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi	1 jenis	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Labessi	1 jenis	0	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	**4.830.350**			100 %	**0**	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi	3 unit	3.540.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kendaraan Dinas dan Kantor Lurah Labessi	3 unit	0	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi	2 unit	1.290.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kendaraan Dinas dan Kantor Lurah Labessi	2 unit	0	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Marioriwawo		100 %	**679.350.000**			100 %	**0**	
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan		7 paket	**679.350.000**			7 paket	**0**	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi	5 paket	563.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kelurahan Labessi	5 paket	0	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi	2 paket	115.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kelurahan Labessi	2 paket	0	KECAMATAN MARIORIWAWO



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**									
8	**1**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**5.404.308.453**				**902.413.741**	
8	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		100 %	**3.873.158.341**			100 %	**387.473.129**	
8	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu		100 % 100 % 100 %	**17.385.000**			100 % 100 % 100 %	**0**	
8	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	7 Dokumen	17.385.000		Kesbangpol	7 Dokumen	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan		100 %	**3.504.832.292**			100 %	**0**	
8	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	29 ASN	3.472.902.292		ASN, Kesbangpol	29 ASN	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	86 SPM	4.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN, Kesbangpol	86 SPM	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang tersusun	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Dokumen	27.130.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN, Kesbangpol	5 Dokumen	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100 %	**203.440.970**			100 %	**225.473.050**	
8	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Jenis	997.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN / Kesbangpol	5 Jenis	1.279.500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
8	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Paket	17.520.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN / Kesbangpol	2 Paket	29.940.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Jenis	21.175.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN / Kesbangpol	3 Jenis	22.050.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	2 Paket	31.035.020	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN / Kesbangpol	2 Paket	37.414.950	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg terfasilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	120 Orang	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN / Kesbangpol	120 Orang	3.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	202 Kali	129.713.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN / Kesbangpol	202 Kali	131.788.600	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik		100 %	**9.100.000**			100 %	**23.600.000**	
8	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	1 Jenis	9.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kesbangpol	1 Jenis	23.600.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	**90.960.324**			100 %	**90.960.324**	
8	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telepon Jumlah pemenuhan jasa air Jumlah pemenuhan listrik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	12 Kali	28.710.324	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kesbangpol	12 Kali	28.710.324	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum	Kab. Soppeng, Lalabata,	4 Jenis	62.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kesbangpol	4 Jenis	62.250.000	BADAN KESATUAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Lalabata Rilau							BANGSA DAN POLITIK
8	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik		100 %	**47.439.755**			100 %	**47.439.755**	
8	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	5 Unit	45.629.755	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kesbangpol	5 Unit	45.629.755	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	3 Unit	1.810.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kesbangpol	3 Unit	1.810.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**1**	**2**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Persentase Tingkat Keikutsertaan Aparat dan Masyarakat Bela Negara		100 %	**81.055.000**			100 %	**0**	
8	**1**	**2**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa yang dirumuskan		100 %	**81.055.000**			100 %	**0**	
8	1	2	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Pertemuan / Rapat Koordinasi FPK. Dan Kegiatan Bela Negara	Kab. Soppeng, Citta, Citta	3 Kali	81.055.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kader Bela Negara, FPK, Aparat dan Masyarakat	3 Kali	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**1**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam PILEG, PILPRES, PILKADA, dan PILKADES		77 %	**517.340.612**			78 %	**514.940.612**	
8	**1**	**3**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika**	Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan, Pemerintahan, Perwakilan dan		100%	**517.340.612**			100%	**514.940.612**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Partai Politik, Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik yang dirumuskan								
8	1	3	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Partai Politik yang difasilitasi	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	7 Parpol	514.645.612	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Partai Politik dan Masyarakat	7 Parpol	512.245.612	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	3	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah anggota yang melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan politik	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Orang	2.695.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Partai Politik dan Masyarakat	25 Orang	2.695.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**1**	**4**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Diberdayakan dan Diawasi		100 %	**13.955.000**			100 %	**0**	
8	**1**	**4**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan**	Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Yang dirumuskan		100 %	**13.955.000**			100 %	**0**	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan									
8	1	4	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Peserta dalam Pembinaan Ormas/ LSM	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Orang	13.955.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Ormas/LSM	70 Orang	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**1**	**5**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Persentase Keikutsertaan Masyarakat dan Remaja pada Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba		100 %	**350.499.500**			100 %	**0**	
8	**1**	**5**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Yang dirumuskan		100 %	**350.499.500**			100 %	**0**	
8	1	5	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kegiatan Rakor FKUB / Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Kali	350.499.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	10 Kali	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**1**	**6**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Persentase Penanganan Terkait Konflik Sosial		100 %	**568.300.000**			100 %	**0**	
8	**1**	**6**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dirumuskan		100 %	**568.300.000**			100 %	**0**	
8	1	6	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,	Jumlah Pertemuan / Rapat Koordinasi Anggota KOMINDA dan FKDM	Kab. Soppeng, Lalabata,	14 Kali	558.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	14 Kali	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Lalabata Rilau							
8	1	6	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Pemantauan Situasi Ketertiban Umum dan Ekonomi	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Kali	9.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	12 Kali	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL									**1.171.747.192.881**				**1.244.963.106.174**	





BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

"Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan"

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu, Kepala Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan pembangunan untuk kemajuan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah yang dipimpinnya. Keberhasilan pemimpin dalam mewujudkan cita-cita (Visi dan Misi) dapat dinilai melalui ketercapaian indikator-indikator kinerja pembangunan. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah serta pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Selain penetapan IKU dan IKK Pemerintah Daerah Kab. Soppeng, untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah juga menetapkan target untuk pencapaian SPM di Kab. Soppeng dan target SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

6.1. Penetapan Indikator Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Tabel 6.1. Penetapan Indikator Makro Kab.Soppeng Tahun 2022

No	Indikator Makro	RKPD Kab. Soppeng Tahun 2022
(1)	(2)	(5)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,00
2	Tingkat Kemiskinan (%)	6,86
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,31
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,71
5	Rasio Gini	0,387
6	PDRB PerKapita (Rp)	59.060.000

6.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator kinerja sasaran Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Soppeng. Indikator ini menjadi alat ukur untuk mengetahui ketercapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2016-2021. Indikator

Kionerja Utama diambil dari indikator tujuan sasaran strategik RPJMD. Target capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah untuk Tahun 2022 Disajikan dalam Tabel 6.2

Tabel 6.2. Indikator Kinerja Utama Kab. Soppeng Tahun 2022

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN 2022
A	**TUJUAN**		
1	IKM atas SPM pelayanan dasar dan non pelayanan dasar	Nilai Indeks	86,4
2	IPM	Poin	69,71
3	Indeks Gini	Nilai Indeks	0,387
4	PDRB/kapita (Rp)	Rp	59.060.000
5	Indeks daya saing infrastruktur daerah	Nilai Indeks	71,65
6	Indeks reformasi birokrasi (Nilai/kategori)	Nilai/kategori	53/CC
7	Nilai daya dukung dan daya tampung lingkungan		Belum terlampaui
B	**SASARAN**		
1	Nilai rata-rata tingkat capaian penerapan SPM	%	100
2	IKM pelayanan publik non pelayanan dasar	%	85
3	Indeks Pendidikan	Nilai Indeks	63,2
4	Indeks Kesehatan	Nilai Indeks	77,22
5	Pertumbuhan ekonomi (%)	%	6,00
6	Tingkat pengangguran terbuka (%)	%	4,31
7	Angka kemiskinan (%)	Jiwa	7
8	Indeks Infrastruktur Daerah	Nilai Indeks	63,74
9	Kontribusi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Jasa Lainnya terhadap PDRB	milyar rupiah	301,348
10	Angka Kriminalitas (kasus)	Kasus	80
11	Nilai LPPD (Skor/status kinerja)	Skor/ Status Kinerja	4,0/Tinggi
12	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai Indeks	A
13	Opini laporan keuangan		WTP
14	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Skor/ Status Kinerja	61 (B)
15	Indeks Inovasi Daerah	Poin	601 (inovatif)
16	Indeks Risiko Bencana	Poin	131,20 (Sedang)
17	Potensi Penurunan Emisi GRK (Ton Co2)	Ton Co2	36238
18	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLH)	Poin	66,2

6.3. Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang

dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan

Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 tersebut secara rinci disajikan pada Tabel 6.3

Tabel 6.3. Indikator Kinerja Daerah Kab. Soppeng Tahun 2022 (Permendagri 86 tahun 2017)

No.	Bidang urusan / indikator	Satuan	Target 2022
	ASPEK PELAYANAN UMUM		
	Layanan Urusan Wajib		
1	**Pendidikan**		
1,1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	100
1,2	Angka Partisipasi kasar		
	Angka Partisipasi kasar SD/ MI Paket A	%	100
	Angka Partisipasi kasar (APM) SMP/ MTs Paket B	%	100
1,4	Angka Partisipasi Murni		
01.04.01	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI Paket A	%	100
01.04.02	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs Paket B	%	100
1,5	Angka Partisipasi Sekolah:		
01.05.01	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD / MI Paket A	%	100
01.05.02	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP / MTs Paket B	%	100
1,6	Angka Putus Sekolah:		
01.06.01	Angka Putus Sekolah (APS) SD / MI	%	0
01.06.02	Angka Putus Sekolah (APS) SMP / MTs	%	0
1,7	Angka Kelulusan:		
01.07.01	Angka Kelulusan (AL) SD/ MI	%	100
01.07.02	Angka Kelulusan (AL) SMP/ MTs	%	100
1,8	Angka Melanjutkan (AM):		
01.08.01	Angka Melanjutkan (AM) SD/ MI ke SMP/ MTs	%	100
01.08.02	Angka Melanjutkan (AM) SMP/ MTs ke SMA/ SMK / MA	%	100
1,9	Fasilitas Pendidikan:		
01.09.01	Sekolah Pendidikan SD / MI kondisi bangunan baik	%	86,07
01.09.02	Sekolah Pendidikan SMP/ MTs DAN SMA/ SMK/ MA kondisi bangunan baik	%	84,44
01.10	Rasio ketersedian sekolah/ penduduk usia sekolah pendidikan dasar	%	125,82
01.12	Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar	%	10
01.18	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta Aksara)	%	90
01.19	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	100
02.00	**Kesehatan**		



No.	Bidang urusan / indikator	Satuan	Target 2022
02.01	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	10,5
02.02	Angka kelangsungan hidup bayi	%	89,5
02.03	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	1,2
02.04	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	7,6
02.05	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Per 100.000 Kelahiran Hidup	1,2
02.06	Rasio posyandu per satuan balita	Per Satuan Balita	25
02.07	Rasio puskesmas. poliklinik. pustu per satuan penduduk	Per Satuan Penduduk	0,27
02.08	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Per Satuan Penduduk	0,004
02.09	Rasio dokter per satuan penduduk	Per Satuan Penduduk	0,41
02.10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Per Satuan Penduduk	3,49
02.11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100
02.12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100
02.13	Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)	%	80
02.14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100
02.15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	%	30
02.16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	100
02.17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Per 100.000 Penduduk	> 1
02.18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	100
02.19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	100
02.20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis	Per 100.000 Penduduk	0
02.21	Tingkat kematian karena Tuberkulosis	Per 100.000 Penduduk	0
02.22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	100

No.	Bidang urusan / indikator	Satuan	Target 2022
02.23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	100
02.24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100
02.25	Penderita diare yang ditangani	%	100
02.26	Angka kejadian Malaria	Per 100.000 Penduduk	0
02.27	Tingkat kematian akibat malaria	%	0
02.28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	%	0
02.29	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	%	0
02.30	Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi	%	0
02.33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100
02.34	Cakupan kunjungan bayi	%	100
02.35	Cakupan puskesmas	%	212,5
02.36	Cakupan pembantu puskesmas	%	62,86
02.37	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	100
02.38	Cakupan pelayanan nifas	%	100
02.39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	100
02.40	Cakupan pelayanan anak balita	%	100
02.41	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	100
02.42	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	100
02.43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	100
02.44	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100
02.45	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**		
03.01	Pekerjaan Umum:		
03.01.01	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	0,61
3,1,2,	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Poin	0,0038
3,1,3,	Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	%	9,5
3,1,4,	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	58,5
03.01.05	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1.5 m)	%	48,2
03.01.07	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	72,5

No.	Bidang urusan / indikator	Satuan	Target 2022
03.01.09	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	55
03.01.10	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	%	1,7
03.01.12	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	
03.01.13	Rasio Jaringan Irigasi	Poin	0,022
03.01.14	Persentase penduduk berakses air minum	%	95,5
03.01.15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak. perkotaan dan perdesaan	%	35
03.01.17	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	65
03.01.18	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Per Satuan Penduduk	0,018
03.01.19	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Per Satuan Penduduk	2
03.02	Penataan Ruang:		
03.02.02	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	65
03.02.06	Ketaatan terhadap RTRW	%	40
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**		
04.01	Rasio rumah layak huni		
04.02	Rasio permukiman layak huni		
04.03	Cakupan ketersediaan rumah layak huni		
04.04	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau		
04.05	Persentase pemukiman yang tertata		
04.06	Persentase lingkungan pemukiman kumuh		
04.08	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan		
04.09	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU		
5	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**		
	Cakupan petugas :		
05.01	Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	68,49
05.02	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban. ketentraman. keindahan)	%	80
	Cakupan pelayanan :		
05.03	bencana kebakaran kabupaten/kota	%	100
05.04	Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100
05.05	Persentase Penegakan PERDA	%	100
6	**Sosial**		

No.	Bidang urusan / indikator	Satuan	Target 2022
06.01	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	100
06.02	Persentase PMKS yang tertangani	%	100
06.03	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	100
06.04	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	60
06.05	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	100
06.06	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100
06.07	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100
06.08	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	20
06.09	Persentase penyandang cacat fisik dan mental. serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	100
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar		
1	**Tenaga Kerja**		
01.01	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Per Tahun	0
01.03	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	25,5
01.04	Keselamatan dan perlindungan	%	8,6
01.05	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	95,3
01.06	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	100
2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**		
02.01	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	13,25
02.02	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	24
02.03	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	93,27
02.04	Rasio KDRT		0
02.06	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	98,25
02.07	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100

No.	Bidang urusan / indikator	Satuan	Target 2022
02.08	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100
02.09	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	100
02.10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100
02.11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100
02.12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	17,39
02.13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100
02.14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	%	0,94
02.15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	Poin	1,32
02.16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	Poin	1,3
02.17	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	Poin	1,2
02.18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	Poin	0,98
02.19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	%	40
3	**Pangan**		
03.01	Ketersediaan pangan utama	%	283
03.02	Ketersediaan energi perkapita	Kkal	9721
	Ketersediaan protein perkapita	Gram	248,5
03.03	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	100%
4	**Pertanahan**		
04.01	Persentase luas lahan bersertifikat		
04.02	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	0%
04.03	Penyelesaian izin lokasi	%	100%
5	**Lingkungan Hidup**		
05.26	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada / Tidak ada	Ada
05.27	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada / Tidak ada	Ada
05.28	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada / Tidak ada	Ada

No.	Bidang urusan / indikator	Satuan	Target 2022
05.29	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air	Poin	72
05.30	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara	Poin	91,6
05.31	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan	Poin	78,9
05.32	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan. izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	65
05.33	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	Ada / Tidak ada	2
05.34	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Ada / Tidak ada	Tidak ada
05.35	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	Ada / Tidak ada	Tidak ada
05.36	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Ada / Tidak ada	Tidak ada
05.37	Penetapan hak MHA	Ada / Tidak ada	Tidak ada
05.38	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan		0
05.39	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana		0
05.40	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Kali	50
05.41	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada / Tidak ada	Ada
05.42	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan. izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota. lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	%	100
05.43	Timbulan sampah yang ditangani	%	73
05.44	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	%	26
05.45	Persentase cakupan area pelayanan	%	27,2
05.46	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	73
05.47	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	Nilai	75
05.48	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	%	0
05.49	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	%	0
6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**		

No.	Bidang urusan / indikator	Satuan	Target 2022
06.01	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Per Satuan Penduduk	0,99
06.02	Rasio bayi berakte kelahiran	Poin	0,98
06.03	Rasio pasangan berakte nikah	Poin	0,63
06.04	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada / Tidak ada	Ada
06.05	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/Belum	Sudah
06.06	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	99
06.07	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	98
7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**		
07.01	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	100
07.02	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	3
07.03	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	4
07.04	Persentase LSM aktif	%	100
07.05	Persentase LPM Berprestasi	%	4%
07.06	Persentase PKK aktif	%	100
07.07	Persentase Posyandu aktif	%	100
07.08	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	34,50%
07.09	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%	80
8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		
08.01	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	0,07
08.02	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,15
08.03	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	100%
08.04	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	90
08.05	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Perda/Perkada	1
08.06	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Sektor	7
08.07	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal. non formal. dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Kerja Sama	1
08.08	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Per Keluarga	1,21
08.09	Ratio Akseptor KB	%	78,22
08.10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%	77,38
08.11		Per 1.000	16,1

No.	Bidang urusan / indikator	Satuan	Target 2022
	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	Perempuan Usia 15-19 Tahun	
08.12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	2,5
08.13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	12
08.14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	30
08.15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	45
08.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	65,67
08.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	58,73
08.18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	53
08.19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	50
08.20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	7,7
08.21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100%
08.22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	85
08.23	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100
08.24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	26
08.25	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100%
08.26	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	100
08.27	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	jiwa	0
08.28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	100%
08.29	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	85,85
08.30	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	20

No.	Bidang urusan / indikator	Satuan	Target 2022
08.31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan. Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	0,3
9	**Perhubungan**		
09.01	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	1005
09.02	Rasio ijin trayek	Poin	0,0009
09.03	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	100
09.04	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	2
09.05	Persentase layanan angkutan darat	%	28,16
09.06	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	70
09.07	Pemasangan Rambu- rambu		86
10	**Komunikasi dan Informatika**		
10.01	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan		675
10.02	Cakupan Layanan Telekomunikasi		65,88
10.03	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	76%
10.04	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	81,49
10.05	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	61%
11	**Koperasi. Usaha kecil. dan Menengah**		
11.01	Persentase koperasi aktif	%	89,25
11.02	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	%	99,25
11.03	Persentase BPR/LKM aktif	%	100
11.04	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	99,25
12	**Penanaman Modal**		
12.01	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	52
12.02	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp	83.605.067.514
12.04	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	%	64,76
13	**Kepemudaan dan Olah Raga**		
13.01	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	100
13.03	Cakupan pembinaan olahraga	%	41
13.04	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	90
13.05	Cakupan pembinaan atlet muda	%	60
13.06	Jumlah atlet berprestasi	Orang	10
13.07	Jumlah prestasi olahraga	Prestasi	14
14	**Statistik**		
14.01	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/Tidak Ada	Ada

No.	Bidang urusan / indikator	Satuan	Target 2022
14.02	Buku ”kabupaten dalam angka”	Ada/Tidak Ada	Ada
14.03	Buku ”PDRB”	Ada/Tidak Ada	Ada
15	**Persandian**		
15.01	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	%	13%
16	**Kebudayaan**		
16.01	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Festival	7
16.02	Benda. Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	380
16.03	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Unit	1
16.04	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Unit	3
17	**Perpustakaan**		
17.01	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	%	3,71
17.02	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	%	31,69
17.03	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Per Satuan Penduduk	0,21
17.04	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	Orang	11.340
17.05	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul buku	15.687
17.06	Jumlah pustakawan. tenaga teknis. dan penilai yang memiliki sertifikat	%	100%
18	**Kearsipan**		
18.01	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	79,94
18.02	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	2
	Layanan Urusan Pilihan		
1	**Pariwisata**		
01.01	Kunjungan wisata	%	35%
01.02	Lama kunjungan Wisata (hari)	Hari	2
01.03	PAD sektor pariwisata	%	0,2
2	**Pertanian**		
02.01	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	26,27
02.02	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	14
02.03	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	27,39
02.04	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	100
02.05	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar		5,43
02.06	Cakupan bina kelompok petani	%	100
5	**Perdagangan**		
05.01	Ekspor Bersih Perdagangan (US$)		
05.02	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	100%

No.	Bidang urusan / indikator	Satuan	Target 2022
6	**Perindustrian**		
06.01	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	50%
8	**Kelautan dan Perikanan**		
08.01	Produksi perikanan	%	85
08.02	Konsumsi ikan	%	100
08.03	Cakupan bina kelompok nelayan	%	10
08.04	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	88
08.05	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	125
08.06	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	%	0,14
	Penunjang Urusan		
1	**Perencanaan Pembangunan**		
01.01	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada
01.02	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada
01.03	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada
01.04	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada
01.05	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100%
01.06	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100%
01.07	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	100%
2	**Keuangan**		
02.01	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP/WDP/ TMT/TW	WTP
02.02	Persentase SILPA	%	8,99
02.03	Persentase SILPA terhadap APBD	%	8,99
02.04	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	%	0
02.05	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	30
02.06	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	19
02.08	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	0,2
02.09	Penetapan APBD	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu
3	**Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan**		
03.01	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	20
03.02	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	7,7



No.	Bidang urusan / indikator	Satuan	Target 2022
03.03	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	87,1
03.04	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jabatan Pimpinan Tinggi	33
03.05	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan Administrasi	1915
03.06	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Jabatan Fungsional	3300
4	**Penelitian dan pengembangan**		
04.01	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	100%
04.02	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	100%
	Penerapan SIDa:		
04.03	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	17,65
04.04	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%	100
5	**Pengawasan**		
05.01	Persentase tindak lanjut temuan	%	79
05.02	Persentase pelanggaran pegawai	%	00.06
05.03	Jumlah temuan BPK	Temuan	14
6	**Sekretariat Dewan**		
06.01	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada / Tidak Ada	Ada
06.02	Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan. Fungsi Pembentukan Perda. dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada / Tidak Ada	Ada
06.03	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan. pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada / Tidak Ada	Ada

Tabel 6.4. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kab. Soppeng Tahun 2021-2026 (Permendagri 18 Tahun 2020)

No	Urusan/ IKK outcame	Satuan	Target kinerja 2022
1	**2**	**3**	**4**
	URUSAN WAJIB		
1	**URUSAN PENDIDIKAN**		
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	69

No	Urusan/ IKK outcame	Satuan	Target kinerja 2022
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	91,01
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	78,35
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	58,33
2	**URUSAN KESEHATAN**		
	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	Poin	0,13
	Persentase RS Rujukan tingkat kabupaten atau kota yang terakreditasi	%	100
	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100
	Persentase penderita SDM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100
3	**URUSAN PEKERJAAN UMUM**		
	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	0,2
	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	%	
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	0,68
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	35%
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	72,5
	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota		0,35
	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/kota	%	60,50%
	Rasio tenaga perator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		0,25
	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	1
4	**URUSAN PERUMAHAN RAKYAT**		
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten /kota	unit	30

No	Urusan/ IKK outcame	Satuan	Target kinerja 2022
	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	unit	1
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	100%
	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	100%
	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	100%
5	**URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM dan PERLINDUNGAN MASYARAKAT**		
	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	50
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	jiwa	101735
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	jiwa	101735
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	jiwa	1001 KK
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	90
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	7,75
6	**URUSAN SOSIAL**		
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	%	100
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100
7	**URUSAN KETENAGA KERJAAN**		
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	20
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifiat Kompetensi	%	23,9
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	3,85
	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	%	4,9
8	**URUSAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**		
	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	2,75
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	%	0,04
	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100,000 penduduk perempuan)	%	0,001
9	**URUSAN PANGAN**		
	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	32

No	Urusan/ IKK outcame	Satuan	Target kinerja 2022
10	**URUSAN PERTANAHAN**		
	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100
	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	70
	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal		n.a
	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		n.a
	Tersedianya tanah untuk masyarakat		n.a
	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100
11	**URUSAN LINGKUNGAN HIDUP**		
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	IKLH	82,16
	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	%	68%
	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	65
12	**URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**		
	Perekaman KTP Elektronik	%	99,33
	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	60,15
	Kepemilikan akta kelahiran	%	99,15
	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	100
13	**URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**		
	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	25
	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	4
14	**URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**		
	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	2,15
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	78,25
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	12,1
15	**URUSAN PERHUBUNGAN**		
	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Poin	82
	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V / C	0,065
16	**URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**		
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	1
	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	70
17	**URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**		
	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	38,17

No	Urusan/ IKK outcame	Satuan	Target kinerja 2022
	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	3,3
18	**URUSAN PENANAMAN MODAL**		
	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	%	64,76
19	**URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**		
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Poin	1,04
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	28,54
	Peningkatan Prestasi Olahraga	Prestasi	4
20	**URUSAN STATISTIK**		
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100
21	**URUSAN PERSANDIAN**		
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	260
22	**URUSAN KEBUDAYAAN**		
	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	21,88
23	**URUSAN PERPUSTAKAAN**		
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	50
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	0
24	**URUSAN KEARSIPAN**		
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	100
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	25
	URUSAN PILIHAN		
25	**URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**		
	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah provinsi	Ton	3451,73
	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	3017,35
	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	434,38
26	**URUSAN PARIWISATA**		
	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	33
	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten /Kota	%	44,5
	Tingkat Hunian Akomodasi	%	10
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	1,48

No	Urusan/ IKK outcame	Satuan	Target kinerja 2022
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,2
27	**URUSAN PERTANIAN**		
	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton / Ha	5,43
	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	29,5
28	**URUSAN PERDAGANGAN**		
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	0
	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	22,5
	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	80,88
29	**URUSAN PERINDUSTRIAN**		
	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	%	43,33
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	100
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	%	0
	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		
	1. Keterkinian informasi industri :		
	- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%)	%	0
	- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%)	%	25
	- Tidak menyampaikan informasi industri (0%)	%	0
	2. Kelengkapan informasi industri meliputi :		
	- Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%)	%	10
	- Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%)	%	10
30	**URUSAN TRANSMIGRASI**		
	URUSAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
1	**PERENCANAAN DAN KEUANGAN**		
	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Poin	31,75
	Rasio PAD	Poin	1,33
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	LEVEL 3
	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	LEVEL 2
	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Poin	0,66
	Opini Laporan Keuangan	WTP/WDP/ TMT/TW	WTP



No	Urusan/ IKK outcame	Satuan	Target kinerja 2022
2	**PENGADAAN**		
	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0
	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	%	9,9
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	97
3	**KEPEGAWAIAN**		
	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	7,81
	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	1,6
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	1,02
4	**MANAJEMEN KEUANGAN**		
	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	0,04
	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	0,2
	Assets Management		YA
	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	4,99
5	**TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK**		
	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	100
	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100

6.4. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Soppeng Tahun 2022 secara rinci disajikan pada Tabel 6.3

Tabel 6.5. Indikator SPM Kab. Soppeng Tahun 2022

NO	URUSAN/ JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	SATUAN	TARGET 2022
1	**PENDIDIKAN**			
01:01	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	%	100
01:02	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	%	100
01:03	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100
2	**KESEHATAN**			
02:01	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100
02:02	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100

NO	URUSAN/ JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	SATUAN	TARGET 2022
02:03	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100
02:04	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100
02:05	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100
02:06	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100
02:07	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100
02:08	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100
02:09	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100
02:10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	%	100
02:11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100
02:12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodefici ency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100
3	**PEKRJAAN UMUM**			
03:01	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100
03:02	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100
4	**PERUMAHAN RAKYAT**			
04:01	Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100
04:02	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100
5	**TRANTIBUMLINMAS**			
05:01	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	%	100
05:02	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100



NO	URUSAN/ JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	SATUAN	TARGET 2022
05:03	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100
05:04	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100
05:05	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%	100
6	**SOSIAL**			
06:01	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100
06:02	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100
06:03	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100
06:04	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100
06:05	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	100

6.5. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Soppeng Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 6.4

Tabel 6.4. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kab. Soppeng Tahun 2022

NO	INDIKATOR TPB	TARGET 2022	KONDISI AKHIR 2026
1	*Tujuan : Menghilangkan Kelaparan , Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan*		
	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	1500	100
	Tujuan : Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan		
2	Jumlah Kecamatan yang Terbangun Infrastruktur Air Limbah dengan Sistem terpusat Skala Kota, Kawasan, dan Komunal	3	8
3	Jumlah Kecamatan yang Ditingkatkan Kualitas Pengelolaan Lumpur Tinja Perkotaan dan Dilakukan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	3	8
4	Indikator Kualitas Air Sungai Sebagai Sumber Air Baku	4	9
	Tujuan : Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun		
5	Indikator Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/ Program Keluarga Harapan	5000	500
6	Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SD / MI/ Sederajat	90	100

NO	INDIKATOR TPB	TARGET 2022	KONDISI AKHIR 2026
7	Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/ Sederajat	0,73	0,9
	Tujuan : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan		
8	Indikator Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak di Bawah Lima Tahun/Balita	0,14	0
9	Indikator Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil	0,008	0,003
	Tujuan : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia		
10	Indikator Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terpilih	95%	100%
11	Proporsi Kematian Akibat Keracunan	0,700	0,200
	Tujuan : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua		
12	Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat	1.000	1.500
	Tujuan : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan		
13	Indikator Proporsi Perempuan Dewasa dan Anak Perempuan (Umur 15-64 Tahun) Mengalami Kekerasan (Fisik, Seksual, Emosional) oleh Pasangan atau Mantan Pasangan dalam Dua Belas Bulan Terakhir	21.000	12.000
14	Proporsi Perempuan Dewasa dan Anak Perempuan (Umur 15-64 Tahun) Mengalami Kekerasan (Fisik, Seksual, Emosional) oleh Orang Lain selain Pasangan dalam Dua Belas Bulan Terakhir	21.000	12.000
	Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan Berkelanjutan, Kessempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh , serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua		
15	Indikator Laju Pertumbuhan PDB perkapita	9.000	14.000
16	Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur	0,025	0,005
17	Indikator Jumlah Wisatawan Mancanegara	8	13
18	Indikator Jumlah Wisatawan Nusantara	230.000	350.000
19	Indikator Devisa Sektor Pariwisata	1.300.000.000	1.800.000.000
20	Indikator Devisa Sektor Pariwisata	1.300.000.000	1.800.000.000
	Tujuan : Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati		
21	Proporsi Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi terhadap Luas Lahan Keseluruhan	23.000	33.000
	Tujuan : Menguatkan Masyarakat yang dan damai untuk pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan		
22	Indikator Proporsi Perempuan dan Laki-Laki muda Umur 18-24 Tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 Tahun	27	20
23	Indikator Persentase Keterwakilan Perempuan Sebagai Pengambilan Keputusaan di Lembaga Eksekutif (Eselon I dan II)	4%	10%
24	Indikator Proporsi Anak Umur di Bawah Lima Tahun yang Kelahirannya dicatat oleh Lembaga Pencatatan Sipil Menurut Umur	13.000	17.000
	Tujuan : Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan		
25	Total Pendapatan Pemerintah Sebagai Proporsi terhadap PDB Menurut Sumbernya	1,00	4,00
26	Indikator Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDB	0,05	0,20
27	Indikator Jumlah Metadata kegiatan statistik dasar, sektoral dan khusus yang terdapat dalam Sistem informasiRujukan Statistik (SIRuSa)	14,00	20,00





BAB VII
PENUTUP

"Kesimpulan dan Saran terhadap keberhasilan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi misi serta program-program prioritas yang telah direncanakan"

BAB VII
PENUTUP

7.1 Kaidah Pelaksanaan

Tahun 2022 merupakan tahun kedua pelaksanan RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2021-2026. RKPD Kab. Soppeng Tahun 2022 dilaksanakan dengan tema "***Percepatan Pertumbuhan Ekonomi berbasis Kerakyatan dan Penguatan Kapasistas Infrstruktur Wilayah".*** Perwujudan prioritas pembangunan pada RKPD Kab. Soppeng Tahun 2022 melalui sejumlah strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan. Rencana program dan kegiatan Tahun 2022 selain diarahkan untuk secara langsung mendukung prioritas pembangunan, juga sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kab. Soppeng tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, dan program prioritas nasional dalam RKP. Selain itu juga mengacu pada evaluasi capaian kinerja RPJMD periode sebelumnya dan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2020 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020; dan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2022 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan yang lain baik perencanaan tingkat Pusat, Provinsi maupun tingkat Perangkat Daerah (PD). Oleh karena itu, dalam penyusunannya telah diselaraskan dengan dokumen yang ada pada tingkatan tersebut. Seluruh proses penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng juga telah dilakukan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sesuai amanah Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Keberhasilan pelaksanaan RKPD dalam menjawab tantangan dan permasalahan tidak hanya ditentukan oleh jajaran pemerintah, namun sangat membutuhkan dukungan masyarakat untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, upaya mendorong partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan serta untuk menjamin agar program dan kegiatan masing-masing SKPD pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka diperlukan instrumen pengendalian dan evaluasi. Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD maka ditetapkan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Masing-masing SKPD agar menyempurnakan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2022 untuk menjaga keterpaduan dan konsistensi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan,.
2. SKPD dan masyarakat termasuk didalamnya dunia usaha berkewajiban

untuk melaksanakan program-program yang ada di RKPD Tahun 2022 dengan sebaik baiknya.

3. Pada akhir tahun anggaran 2022, setiap SKPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, kesesuaian dengan target RPJMD serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan peraturan lainnya.

7.2 Kesimpulan

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 disusun melalui proses tahapan yang cukup panjang mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan sampai Musrenbang Tingkat Kabupaten (Musrenbang RKPD), dalam rangka memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakankan.
2. RKPD merupakan acuan/pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2022.
3. RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2022, diupayakan pelaksanaannya dapat sinergis dengan prioritas-prioritas pembangunan Nasional. Dalam rangka sinergitas dan mengingat kemampuan keuangan daerah sangat terbatas, maka untuk melaksanakan hal tersebut ditempuh dengan cara sharing pembiayaan pembangunan dengan Pemerintah Pusat berupa pendanaan dari APBN maupun sumber dana lainnya.
4. RKPD Tahun 2022 masih akan dihadapkan pada beberapa tantangan yang diakibatkan oleh pandemic Covid-19 seperti potensi meningkatnya jumlah KK miskin, potensi meningkatnya jumlah pengangguran dan menunrunnya jumlah kunjungan wisata maka diperlukan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan pencapaian cita-cita pembangunan Kabupaten Soppeng.

BUPATI SOPPENG,

A. KASWADI RAZAK

